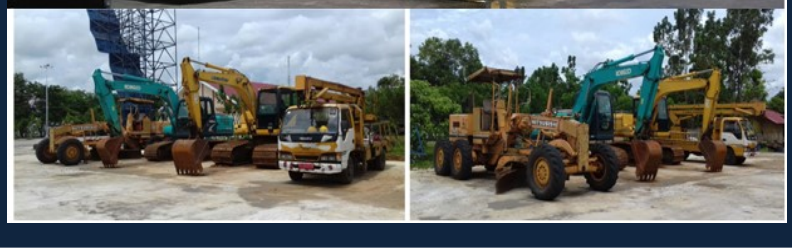
DPUTRPP

PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS





RENJA PERUBAHAN 2024

DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

Disusun Oleh

SUB BAGIAN PROGRAM

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat terwujud. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros dan menjadi pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2024, semoga dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi program dan kegiatan pembangunan yang menjadi urusan dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan kabupaten Maros agar dapat lebih terarah dan berkualitas serta menjadi wujud pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros dalam melaksanakan pencapaian kinerjanya selama tahun 2024.

Maros, 31 Juli 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang,
Perhubungan dan Pertanahan Kab. Maros

MUETAZIM MANSYUR, ST
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19751120201121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun lalu dan CapaianRenstra Perangkat daerah 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 25

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 29

2.5 Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 44

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 47

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 50

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 51

BAB IV PENUTUP 68

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan ini akan digunakan sebagai bahan masukan dan arahan (guidelines) dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pertanahan dan Urusan Perhubungan yang merupakan tugas pokok dan fungsi yang diampu Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA-PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros 2021 - 2026.

Selanjutnya Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk perode 1 (satu) tahun , yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program dari Renstra Perangkat daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Maros di bidang pembangunan dan penataan kota yang memasuki tahun ke dua pemerintahan baru.

Penyusunan Renja merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum dituangkan menjadi Dokumen pelaksanaan Anggaran yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra . Penyusunan rencana kinerja ini dimulai dengan merumuskan RENSTRA yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahun), yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana lima tahunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan. Berdasarkan rencana kerja tahunan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan RKA dan DPA .

Proses Penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2023 dimulai dengan persiapan penyusunan Perubahan RENJA SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7) pasal 5 disebutkan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan

bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dengan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pemerintahan bidang perhubungan dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan dan pertanahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan dan pertanahan;
d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan dan pertanahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Maros Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah, Sedang fungsinya adalah :

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
e. pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional:
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1774);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1774);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keuputsan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
28. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023);

29. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 39);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);dan
38. Peraturan Bupati Maros Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros; dan
39. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024, dengan tujuan :

1. Acuan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros dalam mengoperasionalkan Perubahan RKPD Kabupaten Maros tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros selama tahun 2024.
3. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan prasarana dan sarana Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan yang memadai di Kabupaten Maros.
4. Menciptakan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.
5. Mensinergikan dan mensikronisasikan program-program nasional, provinsi dan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana dan Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros tahun 2021 - 2026 maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, serta mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros tahun 2021-2026.

Pada Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros melaksanakan 19 Program, 43 Kegiatan dan 107 Sub Kegiatan. Adapun Program tidak mencapai target sebanyak 11 Program, mencapai target 5 Program, dan melampaui target 3 Program. Kegiatan tidak mencapai target sebanyak 33 Kegiatan, mencapai target 9 Kegiatan, dan melampaui target 1 Kegiatan. Sub Kegiatan tidak mencapai target sebanyak 45 Sub Kegiatan, mencapai target 57 Sub Kegiatan, dan melampaui target 5 Sub Kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kerja dengan pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawahi ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Maros

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP**										**30**		**53.815.889.438**		**66**	**DPUTR PP**
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	**81.421.861.985**	**100**	**48.853.117.191**	**100,00**	**16.284.372.397**	**0**	**4.962.772.247**	**0**	**30**	**50**	**53.815.889.438**	**50**	**66**	**DPUTR PP**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**105**	**92.595.000**	**63**	**55.557.000**	**21,00**	**18.519.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**63**	**55.557.000**	**60**	**60**	**DPUTR PP**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	20.125.000	3	12.075.000	1,00	4.025.000	1	0	100	0	4	12.075.000	80	60	DPUTR PP
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	12.250.000	3	7.350.000	1,00	2.450.000	1	0	100	0	4	7.350.000	80	60	DPUTR PP
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	15.000.000	3	9.000.000	1,00	3.000.000	0	0	0	0	3	9.000.000	60	60	DPUTR PP

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	13.500.000	3	8.100.000	1,00	2.700.000	1	0	100	0	4	8.100.000	80	60	DPUTR PP
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	17.400.000	3	10.440.000	1,00	3.480.000	0	0	0	0	3	10.440.000	60	60	DPUTR PP
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	10.000.000	36	6.000.000	12,00	2.000.000	5	0	42	0	41	6.000.000	68	60	DPUTR PP
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	4.320.000	12	2.592.000	4,00	864.000	1	0	25	0	13	2.592.000	65	60	DPUTR PP
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Administrasi keuaangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**225**	**69.158.579.485**	**135**	**41.495.147.691**	**45,00**	**13.831.715.897**	**0**	**4.523.155.390**	**0**	**33**	**135**	**46.018.303.081**	**60**	**67**	**DPUTR PP**
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11240	65.532.179.485	6744	39.319.307.691	2.248,00	13.106.435.897	775	4.260.515.390	34	33	7.519	43.579.823.081	67	67	DPUTR PP
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	3.611.300.000	36	2.166.780.000	12,00	722.260.000	5	262.640.000	42	36	41	2.429.420.000	68	67	DPUTR PP
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	9.250.000	3	5.550.000	1,00	1.850.000	0	0	0	0	3	5.550.000	60	60	DPUTR PP
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	5.850.000	54	3.510.000	18,00	1.170.000	6	0	33	0	60	3.510.000	67	60	DPUTR PP

	Adminitarsi barang milik daerah pada perangkat daerah	**Adminitarsi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**5**	**11.875.000**	**3**	**7.125.000**	**1,00**	**2.375.000**	**0**	**300.000**	**0**	**13**	**3**	**7.425.000**	**60**	**63**	**DPUTR PP**
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang miliki daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang miliki daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	11.875.000	3	7.125.000	1,00	2.375.000	0	300.000	0	13	3	7.425.000	60	63	DPUTR PP
	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	**Administrasi kepegawaian perangkat dasrah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**800**	**155.000.000**	**480**	**93.000.000**	**160,00**	**31.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480**	**93.000.000**	**60**	**60**	**DPUTR PP**
	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1000	155.000.000	600	93.000.000	200,00	31.000.000	0	0	0	0	600	93.000.000	60	60	DPUTR PP
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**7**	**4.671.162.500**	**7**	**2.802.697.500**	**7,00**	**934.232.500**	**0**		**0**	**0**	**7**	**2.802.697.500**	**100**	**60**	**DPUTR PP**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	65.775.000	3	39.465.000	1,00	13.155.000	0	0	0	0	3	39.465.000	60	60	DPUTR PP
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	15.140.000	3	9.084.000	1,00	3.028.000	0	0	0	0	3	9.084.000	60	60	DPUTR PP
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1.008.367.500	3	605.020.500	1,00	201.673.500	0	79.830.000	0	40	3	684.850.500	60	68	DPUTR PP
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	374.500.000	3	224.700.000	1,00	74.900.000	0	5.000.000	0	7	3	229.700.000	60	61	DPUTR PP
	Penyediaan bahan/material	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	50.000.000	3	30.000.000	1,00	10.000.000	0	0	0	0	3	30.000.000	60	60	DPUTR PP
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	62.500.000	36	37.500.000	12,00	12.500.000	3	1.125.000	25	9	39	38.625.000	65	62	DPUTR PP
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	3.094.880.000	36	1.856.928.000	12,00	618.976.000	5	102.533.759	42	17	41	1.959.461.759	68	63	DPUTR PP

	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**600.000.000**	**2**	**360.000.000**	**2,00**	**120.000.000**	**0**	**42.000.000**	**0**	**35**	**2**	**402.000.000**	**100**	**67**	**DPUTR PP**
	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150	225.000.000	90	135.000.000	30,00	45.000.000	30	42.000.000	100	93	120	177.000.000	80	79	DPUTR PP
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75	375.000.000	45	225.000.000	15,00	75.000.000	0	0	0	0	45	225.000.000	60	60	DPUTR PP
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**5.559.650.000**	**3**	**3.335.790.000**	**3,00**	**1.111.930.000**	**0**	**368.511.857**	**0**	**33**	**3**	**3.704.301.857**	**100**	**67**	**DPUTR PP**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	40.000.000	36	24.000.000	12,00	8.000.000	5	700.000	42	9	41	24.700.000	68	62	DPUTR PP
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	3.000.000	36	1.800.000	12,00	600.000	5	31.857	42	5	41	1.831.857	68	61	DPUTR PP
	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	5.516.650.000	36	3.309.990.000	12,00	1.103.330.000	5	367.780.000	42	33	41	3.677.770.000	68	67	DPUTR PP
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**4**	**1.173.000.000**	**4**	**703.800.000**	**4,00**	**234.600.000**	**0**	**28.805.000**	**0**	**12**	**4**	**732.605.000**	**100**	**62**	**DPUTR PP**
	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40	250.000.000	24	150.000.000	8,00	50.000.000	5	0	63	0	29	150.000.000	73	60	DPUTR PP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	30	748.000.000	18	448.800.000	6,00	149.600.000	0	24.000.000	0	16	18	472.800.000	60	63	DPUTR PP
	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250	125.000.000	150	75.000.000	50,00	25.000.000	0	4.805.000	0	19	150	79.805.000	60	64	DPUTR PP

	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	50.000.000	3	30.000.000	1,00	10.000.000	0	0	0	0	3	30.000.000	60	60	DPUTR PP
	Meningkatnya ketersediaan air baku		**Persentase Ketersediaan Air Baku untuk Air Bersih dan Irigasi**															**DPUTR PP**
	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	**Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Persentase pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat**	**100**	**75.598.288.000**	**37,5**	**31.908.744.027**	**80,00**	**13.966.102.000**	**0**	**135.500.000**	**0**	**1**	**19**	**32.044.244.027**	**19**	**42**	**DPUTR PP**
	Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (ws) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (ws) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Jumlah ketersediaan air baku**	**90715**	**17.753.500.000**	**40.387**	**9.964.442.549**	**18.143,00**	**3.550.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.387**	**9.964.442.549**	**45**	**56**	**DPUTR PP**
	Pembangunan bangunan perkuatan tebing	Pembangunan bangunan perkuatan tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	5,728	10.576.500.000	4	6.817.937.249	0,58	2.115.300.000	0	0	0	0	4	6.817.937.249	70	64	DPUTR PP
	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Pembangunan sumur air tanah untuk air baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	15	2.350.500.000	15	1.410.928.000	3,00	470.100.000	0	0	0	0	15	1.410.928.000	100	60	DPUTR PP
	Pembangunan embung dan penampung air lainnya	Pembangunan embung dan penampung air lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	15	4.826.500.000	6	1.735.577.300	3,00	965.300.000	0	0	0	0	6	1.735.577.300	40	36	DPUTR PP
	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota**	**Luas irigasi primer dan sekunder dengan luas < 1000 ha dalam kondisi baik**	**31930**	**57.844.788.000**	**9.642**	**21.944.301.478**	**6.386,00**	**10.415.402.000**	**0**	**135.500.000**	**0**	**1**	**9.642**	**22.079.801.478**	**30**	**38**	**DPUTR PP**
	Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Peningkatan jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	41,05	12.206.193.000	23	7.721.013.000	8,21	1.495.060.000	0	0	0	0	23	7.721.013.000	56	63	DPUTR PP
	Peningkatan bendung irigasi	Peningkatan bendung irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	10	2.600.500.000	2	628.992.000	2,00	520.100.000	0	0	0	0	2	628.992.000	20	24	DPUTR PP

	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	123,5	35.614.010.000	10	8.084.100.678	24,70	7.122.802.000	0,715	0	3	0	11	8.084.100.678	9	23	DPUTR PP
	Rehablitasi bendung irigasi	Rehablitasi bendung irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	15	3.960.350.000	8	3.804.410.800	3,00	792.070.000	0	0	0	0	8	3.804.410.800	53	96	DPUTR PP
	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	449,73	2.709.135.000	351	1.705.785.000	32,91	334.450.000	0	135.500.000	0	41	351	1.841.285.000	78	68	DPUTR PP
	Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi kewenangan kabupaten/kota	Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	50	508.100.000	0	0	10,00	101.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUTR PP
	Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi	Pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	425	246.500.000	0	0	85,00	49.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUTR PP
	Meningkatnya cakupan pemenuhan air minum masyarakat sesuai standar pelayanan minimal		**Persentase masyarakat yang memperoleh layanan kebutuhan air minum sesuai SPM**															**DPUTR PP**
	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	**Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum**	**Persentase Masyarakat Maros yang memperoleh pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari sesuai target SPM Pekerjaan Umum**	**100**	**42.433.203.172**	**46,5**	**23.628.944.174**	**100,00**	**6.291.020.000**	**85,25**	**150.402.392**	**85**	**2**	**66**	**23.779.346.566**	**66**	**56**	**DPUTR PP**
	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	**Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Layak**	**429425**	**42.433.203.172**	**123.759**	**23.628.944.174**	**85.885,00**	**6.291.020.000**	**0**	**150.402.392**	**0**	**2**	**123.759**	**23.779.346.566**	**29**	**56**	**DPUTR PP**
	Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan	Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	709	9.337.721.000	559	6.292.421.000	50,00	1.015.100.000	0	25.429.212	0	3	559	6.317.850.212	79	68	DPUTR PP

	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	150	162.850.000	0	0	30,00	32.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUTR PP
	Peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	36	12.279.632.172	30	8.941.382.172	2,00	1.112.750.000	0	41.744.214	0	4	30	8.983.126.386	83	73	DPUTR PP
	Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	18	10.563.750.000	12	2.292.550.302	2,00	2.112.750.000	0	83.228.966	0	4	12	2.375.779.268	67	22	DPUTR PP
	Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	318	10.089.250.000	258	1.469.738.700	20,00	2.017.850.000	0	0	0	0	258	1.469.738.700	81	15	DPUTR PP
	Meningkatnya ketersediaan dan akses infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau		**Persentase luas wilayah kawasan kumuh permukiman**															**DPUTR PP**
	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	**Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**100**	**27.677.670.380**	**0,02**	**21.191.970.380**	**70**	**2.161.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.191.970.380**	**0**	**77**	**DPUTR PP**
	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota	**Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota**	**Panjang drainase yang dikelola dan dikembangkan**	**10**	**27.677.670.380**		**21.191.970.380**	**2**	**2.161.900.000**	**0,05**	**0**	**3**	**0**	**0**	**21.191.970.380**	**1**	**77**	**DPUTR PP**
	Pembangunan sistem drainase lingkungan	Pembangunan sistem drainase lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	22.441	27.677.670.380	16.441	21.191.970.380	2.000	2.161.900.000	100	0	5	0	16.541	21.191.970.380	74	77	DPUTR PP
	Pegembangan permukiman	**Pegembangan permukiman**	**Persentase luas kawasan kumuh**	**30**	**7.211.040.000**	**0,03**	**24.660.945.498**	**6,11**	**2.403.680.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**24.660.945.498**	**0**	**342**	**DPUTR PP**

	Penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman kawasan strategis daerah kabupaten/kota	**Penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman kawasan strategis daerah kabupaten/kota**	**Luas kawasan pemukiman strategis daerah**	**290 ,15**	**7.211.040.000**	**35**	**24.660.945.498**	**85,05**	**2.403.680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35**	**24.660.945.498**	**12**	**342**	**DPUTR PP**
	Penyediaan sub sistem pengolahan setempat di kawasan strategis kabupaten/kota	Penyediaan sub sistem pengolahan setempat di kawasan strategis kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	109 5	7211040000	0	0	219	2.403.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUTR PP
	Meningkatnya sub sektor bangunan sipil terhadap pendapatan domestik regional bruto sektor konstruksi		**Persentase Kontribusi Sub sektor bangunan sipil terhadap sektor konstruksi dalam PDRB**															**DPUTR PP**
	Penataan bangunan gedung	**Penataan bangunan gedung**	**Rasio bangunan Ber IMB per satuan bangunan**	**1**	**112.725.375.000**	**0,1 4**	**82.730.807.488**	**0,62**	**22.545.075.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**82.730.807.488**	**7**	**73**	**DPUTR PP**
	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	**Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung**	**Jumlah dokumen IMB dan setifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan**	**700 0**	**112.725.375.000**	**17**	**82.730.807.488**	**5.000**	**22.545.075.000**	**896**	**0**	**18**	**0**	**913**	**82.730.807.488**	**13**	**73**	**DPUTR PP**
	Pengubahsesuaian bangunan edung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	Pengubahsesuaian bangunan edung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	25	6.500.000.000	0	0	5,00	1.300.000.000	2	0	40	0	2	0	8	0	DPUTR PP
	Pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	Pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	105	106.225.375.000	0	0	21,00	21.245.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DPUTR PP
	Pengembangan jasa konstruksi	**Pengembangan jasa konstruksi**	**Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB**	**12**	**2.708.771.000**	**5,3 7**	**231.863.500**	**11,76**	**628.977.000**	**0**	**6.600.000**	**0,00**	**1,05**	**3**	**238.463.500**	**22**	**9**	**DPUTR PP**

	Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	**Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi**	**Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku**	**650**	**1.146.621.000**	**200**	**158.089.500**	**150**	**316.547.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**200**	**158.089.500**	**31**	**14**	**DPUTR PP**
	Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi	Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	25	492.450.000	0	0	5,00	98.490.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPUTR PP
	Penyediaan instruktur/asesor/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan opertaor dan teknisi atau analis	Penyediaan instruktur/asesor/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan opertaor dan teknisi atau analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	30	39.150.000	0	0	10,00	13.050.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPUTR PP
	Pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan opertaor, teknisi atau analis	Pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan opertaor, teknisi atau analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	450	615.021.000	0	0	150,00	205.007.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPUTR PP
	Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	**Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang Tersedia**		**517.950.000**	**1**	**36.934.000**	**1,00**	**103.590.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1**	**36.934.000**	**0**	**7**	**DPUTR PP**
	Penyediaan perangkat pendukung layanan infromasi jasa konstruksi	Penyediaan perangkat pendukung layanan infromasi jasa konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	5	53.000.000	7	0	1,00	10.600.000	0	0	0,00	0,00	7	0	140	0	DPUTR PP
	Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota	Penyediaan data dan informasi jasa konstruksi cakupan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	15	287.700.000	0	0	3,00	57.540.000	1	0	33,33	0,00	1	0	7	0	DPUTR PP
	Peningkatan kapasitas pengelola SIPJAKI	Peningkatan kapasitas pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25	77.250.000	0	0	5,00	15.450.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPUTR PP
	Operasionalisasi layanan infromasi jasa konstruksi	Operasionalisasi layanan infromasi jasa konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	5	100.000.000	0	0	1,00	20.000.000	1	0	100,00	0,00	1	0	20	0	DPUTR PP

	Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)	**Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)**	**Jumlah izin usaha konstruksi yang diterbitkan**		**303.200.000**	**0**	**0**	**30,00**	**60.640.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DPUTR PP**
	Pemantauan dan evaluasi perizinan berusaha berbasis resiko jasa konstruksi	Pemantauan dan evaluasi perizinan berusaha berbasis resiko jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	150	118.650.000	0	0	30,00	23.730.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPUTR PP
	Penyusunan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi di kabupaten/kota	Penyusunan produk hukum daerah terkait penyelenggaraan jasa konstruksi di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	5	184.550.000	0	0	1,00	36.910.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPUTR PP
	Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	**Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi**	**Jumlah lembaga jasa konstruksi yang di tertibkan**		**741.000.000**	**5**	**36.840.000**	**5,00**	**148.200.000**	**0**	**6.600.000**	**0,00**	**4,45**	**5**	**43.440.000**	**0**	**6**	**DPUTR PP**
	Pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	500	307.000.000	0	0	100,00	61.400.000	0	6.000.000	0,00	9,77	0	6.000.000	0	2	DPUTR PP
	Pengawasan dan evaluasi tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan evaluasi tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang diawasi dan dievaluasi tertib pemanfaatan produk	500	128.000.000	0	0	100,00	25.600.000	50	600.000	50,00	2,34	50	600.000	10	0	DPUTR PP
	Pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi	Pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	25	178.000.000	0	0	5,00	35.600.000	1	0	20,00	0,00	1	0	4	0	DPUTR PP
	Pengawasan dan evaluasi tertib usaha jasa konstruksi kabupaten/kota	Pengawasan dan evaluasi tertib usaha jasa konstruksi kabupaten/kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100	128.000.000	0	0	20,00	25.600.000	10	0	50,00	0,00	10	0	10	0	DPUTR PP

	Meningkatnya Kualitas layanan jaringan jalan		**Meningkatnya Kualitas layanan jaringan jalan**															**DPUTR PP**
	Penyelenggaraan jalan	**Penyelenggaraan jalan**	**Penyelenggaraan jalan**	**100**	**654.826.974.451**	**78,04**	**364.638.359.658**	**95,52**	**86.211.795.000**	**0**	**9.332.650.000**	**0**	**11**	**39**	**373.971.009.658**	**39**	**57**	**DPUTR PP**
	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota	**Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota**	**Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota**	**4928,85**	**654.826.974.451**	**796**	**364.638.359.658**	**985,77**	**86.211.795.000**	**0**	**9.332.650.000**	**0,00**	**10,83**	**796**	**373.971.009.658**	**16**	**57**	**DPUTR PP**
	Pengelolaan leger jalan	Pengelolaan leger jalan	Pengelolaan leger jalan	5	500.000.000	0	0	1,00	100.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPUTR PP
	Pembangunan jalan	Pembangunan jalan	Pembangunan jalan	256	252.017.999.451	232	235.067.999.451	8,00	5.650.000.000	0	186.300.000	0,00	3,30	232	235.254.299.451	91	93	DPUTR PP
	Rekonstruksi jalan	Rekonstruksi jalan	Rekonstruksi jalan	155	347.258.975.000	60	88.507.156.000	31,00	69.451.795.000	1,1	9.079.000.000	3,55	13,07	61	97.586.156.000	39	28	DPUTR PP
	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan kewenangan kabupaten/kota dan desa	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan kewenangan kabupaten/kota dan desa	Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan kewenangan kabupaten/kota dan desa	6192,835	300.000.000	0	0	1.238,57	60.000.000	371,57	12.000.000	30,00	20,00	372	12.000.000	6	4	DPUTR PP
	Rehabilitasi jembatan	Rehabilitasi jembatan	Rehabilitasi jembatan	5	3.000.000.000	0	0	1,00	600.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPUTR PP
	Pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan	45	49.500.000.000	453	32.105.156.207	9,00	9.900.000.000	0	55.350.000	0,00	0,56	453	32.160.506.207	1.007	65	DPUTR PP
	Survey kondisi jalan/jembatan	Survey kondisi jalan/jembatan	Survey kondisi jalan/jembatan	6192,835	2.250.000.000	198	346.333.000	1.238,57	450.000.000	0	0	0,00	0,00	198	346.333.000	3	15	DPUTR PP
	Meningkatnya kesesuaian program pembangunan terhadap rencana penataan ruang		**Tingkat kesesuaian antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah**															**DPUTR PP**
	Penyelenggaraan penataan ruang	**Penyelenggaraan penataan ruang**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**10**	**3.419.253.000**	**3,66**	**3.009.784.814**	**7,25**	**2.027.562.000**	**0**	**89.819.251**	**0**	**4**	**2**	**3.099.604.065**	**18**	**91**	**DPUTR PP**
	Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten/kota	**Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) Kabupaten/kota**	**Luas areal pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan RRTR**	**19800**	**3.419.253.000**	**9.574**	**714.588.676**	**6.600,00**	**1.057.651.000**	**12099,32**	**33.679.251**	**183,32**	**3,18**	**21.673**	**748.267.927**	**109**	**22**	**DPUTR PP**

	Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota	Pelaksanaan persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	9	2.727.228.000	0	0	3,00	909.076.000	2	33.679.251	66,67	3,70	2	33.679.251	22	1	DPUTR PP
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	2.700	445.725.000	0	0	900,00	148.575.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPUTR PP
	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	**Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota**	**Luas Areal Ruang Daerah yang perencanaannya sesuai dengan rencana peruntukan**	**19.800**	**123.150.000**	**0**	**0**	**6.600,00**	**41.050.000**	**0**	**1.450.000**	**0,00**	**3,53**	**0**	**1.450.000**	**0**	**1**	**DPUTR PP**
	Pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Pelaksanaan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	150	123.150.000	0	0	50,00	41.050.000	15	1.450.000	30,00	3,53	15	1.450.000	10	1	DPUTR PP
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	**Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota**	**Luas Ruang Daerah yang Dikendalikan Pemanfaatannya**	**33000**	**4.644.305.000**	**9.574**	**2.295.196.138**	**6.600,00**	**928.861.000**	**0**	**54.690.000**	**0,00**	**5,89**	**9.574**	**2.349.886.138**	**29**	**51**	**DPUTR PP**
	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1500	4.153.180.000	2	419.085.658	300,00	830.636.000	48	50.610.000	16,00	6,09	50	469.695.658	3	11	DPUTR PP
	Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiaatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiaatan pemanfaatan ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	150	288.125.000	0	0	30,00	57.625.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPUTR PP
	Pengawasan TURBINLAK dan pengawasan fungsi dan manfaat	Pengawasan TURBINLAK dan pengawasan fungsi dan manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	5	203.000.000	0	0	1,00	40.600.000	0	4.080.000	0,00	10,05	0	4.080.000	0	2	DPUTR PP
	Meningkatnya Rumah Tangga Miskin Yang memiliki aset produktif berupa lahan		**Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset lahan**															**DPUTR PP**
	Penyelesaian sengketa tanah garapan	**Penyelesaian sengketa tanah garapan**	**Persentase penyelesaian kasus sengketa tanah garapan**	**100**	**43.019.484.840**	**50**	**37.328.000,00**	**100,00**	**31.320.000**	**0**	**2.550.000**	**0**	**8**	**25**	**39.878.000**	**25**	**0**	**DPUTR PP**

	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus sengketa tanah garapan yang diselesaikan**	**4**	**43.019.484.840**	**4**	**37.328.000**	**3,00**	**6.191.933.484**	**0**	**614.990.000**	**0,00**	**9,93**	**4**	**652.318.000**	**100**	**2**	**DPUTR PP**
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30	23.658.917.420	3	32.470.000	6,00	4.731.783.484	2	374.360.000	33,33	7,91	5	406.830.000	17	2	DPUTR PP
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15	19.360.567.420	3	4.858.000	3,00	3.872.113.484	1	96.870.000	33,33	2,50	4	101.728.000	27	1	DPUTR PP
	Redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	**Redistribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absente**	**Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee**	**100**	**85.575.000**	**25**	**9.420.000,00**	**100,00**	**859.670.000**	**0**	**277.490.000**	**0,00**	**32,28**	**13**	**286.910.000**	**13**	**335**	**DPUTR PP**
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah subjek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente yang di tetapkan**	**1**	**85.575.000**	**1**	**9.420.000**	**1,00**	**7.115.000**	**0**	**3.000.000**	**0,00**	**42,16**	**1**	**12.420.000**	**100**	**15**	**DPUTR PP**
	Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangk Kegiatan Redistribusi Tanah	5	35.575.000	0	0	1,00	7.115.000	0	3.000.000	0,00	42,16	0	3.000.000	0	8	DPUTR PP
	Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	50.000.000	2	9.420.000	1,00	10.000.000	0	0	0,00	0,00	2	9.420.000	40	19	DPUTR PP
	Penatagunaan tanah	**Penatagunaan tanah**	**Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan RTRW**	**100**	**2.253.000.000**	**0**	**4.760.000**	**70,00**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**4.760.000**	**0**	**0**	**DPUTR PP**

	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW**	**19800**	**2.253.000.000**	**0**	**4.760.000**	**6.600,00**	**636.020.000**	**0**	**112.090.000**	**0,00**	**17,62**	**0**	**116.850.000**	**0**	**5**	**DPUTR PP**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5	2.253.000.000	1	4.760.000	1,00	450.600.000	0	300.000	0,00	0,07	1	5.060.000	20	0	DPUTR PP
	Meningkatnya sub sektor angkutan darat dan penyeberangan terhadap pendapatan domestik regional bruto sektor transportasi		**Meningkatnya sub sektor angkutan darat dan penyeberangan terhadap pendapatan domestik regional bruto sektor transportasi**															**DPUTR PP**
	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	**Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)**	**Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)**	**50**	**22.880.084.387**	**17,73**	**17.060.813.387**	**38,04**	**4.330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9**	**17.060.813.387**	**18**	**75**	**DPUTR PP**
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalam kabupaten/kota	**Penyediaan perlengkapan jalan di jalam kabupaten/kota**	**Penyediaan perlengkapan jalan di jalam kabupaten/kota**	**10**	**10.440.286.109**	**6**	**11.143.857.109**	**2,00**	**75.600.000**	**0**	**75.300.000**	**0,00**	**99,60**	**6**	**11.219.157.109**	**60**	**107**	**DPUTR PP**
	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	7675	10.390.836.109	2.282	10.341.096.109	1.535,00	16.580.000	639	8.400.000	41,63	50,66	2.921	10.349.496.109	38	100	DPUTR PP
	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	1500	49.450.000	0	0	300,00	9.890.000	146	0	48,67	0,00	146	0	10	0	DPUTR PP
	Pengelolaan terminal penumpang Tipe C	**Pengelolaan terminal penumpang Tipe C**	**Pengelolaan terminal penumpang Tipe C**	**1**	**169.550.000**	**3**	**14.500.000**	**1,00**	**32.120.000**	**0**	**28.090.000**	**0,00**	**87,45**	**3**	**42.590.000**	**300**	**25**	**DPUTR PP**
	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe C (Fasilitas utama dan penunjang)	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe C (Fasilitas utama dan penunjang)	Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe C (Fasilitas utama dan penunjang)	5	169.550.000	1	7.500.000	1,00	33.910.000	0	0	0,00	0,00	1	7.500.000	20	4	DPUTR PP
	Penerbitan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir	**Penerbitan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir**	**Penerbitan izin penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir**	**250**	**3.785.775.000**	**20**	**10.040.000**	**50,00**	**12.990.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**20**	**10.040.000**	**8**	**0**	**DPUTR PP**

	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabuoaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabuoaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabuoaten/kota	50	3.785.775.000	1	10.040.000	10,00	757.155.000	34	125.540.000	340,00	16,58	35	135.580.000	70	4	DPUTR PP
	Pengujian berkala kendaran bermotor	**Pengujian berkala kendaran bermotor**	**Pengujian berkala kendaran bermotor**	**10500**	**7.213.780.078**	**1.644**	**4.784.838.078**	**3.500,00**	**135.400.000**	**0**	**53.160.000**	**0,00**	**39,26**	**1.644**	**4.837.998.078**	**16**	**67**	**DPUTR PP**
	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	20	4.628.949.120	17	4.602.684.120	1,00	8.755.000	0	0	0,00	0,00	17	4.602.684.120	85	99	DPUTR PP
	Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor	15.187	1.840.116.000	4.687	1.116.000	3.500,00	613.000.000	186	72.380.000	5,31	11,81	4.873	73.496.000	32	4	DPUTR PP
	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	17500	249.300.000	4.687	42.500.000	3.500,00	49.860.000	1331	0	38,03	0,00	6.018	42.500.000	34	17	DPUTR PP
	Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	Sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor	15	47.300.000	10	11.250.000	3,00	9.460.000	3	0	100,00	0,00	13	11.250.000	87	24	DPUTR PP
	Indentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Indentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	Indentifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji	70	150.000.000	15	8.020.000	14,00	30.000.000	4	0	28,57	0,00	19	8.020.000	27	5	DPUTR PP
	Pemeliharaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Pemeliharaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Pemeliharaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	55	93.989.958	14	62.789.958	11,00	10.400.000	8	0	72,73	0,00	22	62.789.958	40	67	DPUTR PP
	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	100	198.075.000	17	9.000.000	20,00	39.615.000	4	0	20,00	0,00	21	9.000.000	21	5	DPUTR PP
	Monitoring dan evaluasi peyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Monitoring dan evaluasi peyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Monitoring dan evaluasi peyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	20	6.050.000	18	5.825.000	4,00	1.210.000	3	0	75,00	0,00	21	5.825.000	105	96	DPUTR PP
	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	**Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota**	**Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota**	**4**	**1.038.170.000**	**4**	**1.032.095.000**	**3,00**	**1.210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4**	**1.032.095.000**	**100**	**99**	**DPUTR PP**

	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	20	758.000.000	9	756.695.000	4,00	435.000	0	0	0,00	0,00	9	756.695.000	45	100	DPUTR PP
	Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	20	2.935.000	2	1.630.000	4,00	435.000	0	0	0,00	0,00	2	1.630.000	10	56	DPUTR PP
	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	60	277.235.000	6	273.770.000	12,00	1.155.000	2	0	16,67	0,00	8	273.770.000	13	99	DPUTR PP
	Persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas (andallain) untuk jalan kabupaten/kota	**Persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas (andallain) untuk jalan kabupaten/kota**	**Persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas (andallain) untuk jalan kabupaten/kota**	**60**	**232.523.200**	**0**	**75.483.200**	**20,00**	**1.155.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**75.483.200**	**0**	**32**	**DPUTR PP**
	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andallalin	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andallalin	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andallalin	20	11.475.000	7	4.300.000	4,00	1.435.000	2	0	50,00	0,00	9	4.300.000	45	37	DPUTR PP
	Peningkatan kompetensi perihal andallalin	Peningkatan kompetensi perihal andallalin	Peningkatan kompetensi perihal andallalin	10	44.148.200	2	36.973.200	2,00	1.435.000	0	0	0,00	0,00	2	36.973.200	20	84	DPUTR PP
	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi persetujuan teknis andallalin	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi persetujuan teknis andallalin	Pengawasan pelaksanaan rekomendasi persetujuan teknis andallalin	50	176.900.000	21	34.210.000	10,00	35.380.000	0	0	0,00	0,00	21	34.210.000	42	19	DPUTR PP
	Pengelolaan pelayaran	**Pengelolaan pelayaran**	**Pengelolaan pelayaran**	**50**	**996.425.000**	**0**	**1.022.925.000**	**50,00**	**32.080.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1.022.925.000**	**0**	**103**	**DPUTR PP**
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota**	**6**	**21.425.000**	**0**	**21.425.000**	**2,00**	**3.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**21.425.000**	**0**	**100**	**DPUTR PP**
	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten/kota	82	21.425.000	76	21.425.000	2,00		0		0,00	#DIV/0!	76	21.425.000	93	100	DPUTR PP

	Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten/kota	**Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten/kota**	**Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten/kota**	**6**	**0**	**0**	**0**	**2,00**		**0**		**0,00**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DPUTR PP**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	49	0	43	0	2,00		0		0,00	#DIV/0!	43	0	88	0	DPUTR PP
	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	**Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**	**Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**	**12**	**0**	**0**	**19.700.000**	**4,00**		**0**		**0,00**	**#DIV/0!**	**0**	**19.700.000**	**0**	**0**	**DPUTR PP**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	12	0	0	0	4,00		0		0,00	#DIV/0!	0	0	0	0	DPUTR PP
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**4**	**0**	**0**	**0**	**4,00**		**0**		**0,00**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DPUTR PP**
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12	0	0	0	4,00		0		0,00	#DIV/0!	0	0	0	0	DPUTR PP
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**7**	**975.000.000**	**7**	**981.800.000**	**4,00**		**0**		**0,00**	**#DIV/0!**	**7**	**981.800.000**	**100**	**101**	**DPUTR PP**
	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	8	975.000.000	5	975.000.000	1,00		0		0,00	#DIV/0!	5	975.000.000	63	100	DPUTR PP
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan penyeberangan	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan penyeberangan	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan penyeberangan	6	0	2	6.800.000	2,00		0		0,00	#DIV/0!	2	6.800.000	33	0	DPUTR PP

Dari seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak tercapai disebabkan oleh adanya refocusing anggaran yang dilakukan oleh Tim TAPD Kabupaten dan waktu pelaksanaan yang singkat sehingga ada beberapa yang tidak sempat dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat teknis maupun bersifat administratif secara proposional telah berjalan dengan baik.

Dalam menganalisis Kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolak ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Adapun ukuran yang digunakan antara lain Indikator Kinerja Kunci (IKK RPJMD) 37 indikator, Indikator Kinerja Utama (IKU) 13 indikator, dan TPB 5 indikator. Dari beberapa indikator yang diampuh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros sebanyak 20 indikator yang tidak tercapai , 9 indikator yang tercapai dan 22 indikator melampau target.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	IKU	TPB	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam Kondisi baik (Km)		✓			0.83	0.87	0.91	0.95	0.68	0.68	0,68	0,69	IKK rpjmd
2	Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk		✓			0.003	0.003	0.003	0.003	0.0027	0.0027	0,003	0,003	IKK rpjmd
3	Persentase Kawasan Permukiman Yang Belum Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4		✓			9.34	7.98	6.82	5.82	9.34	9.34	9,39	9,43	IKK rpjmd
4	Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)		✓	✓		88.68	92.23	95.92	99.75	77.10	74.72	81.10	97.18	IKK rpjmd/IKU
5	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran pembuang (min 1,5 m)		✓			1.57	1.58	1.60	1.62	1.54	1.54	1,55	1,56	IKK rpjmd
6	Persentase Sempadan jalan yang Dipakai Pedagang kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar		✓			14.89	14.75	14.61	14.47	0	0	14.53	14.23	IKK rpjmd

7	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	✓	✓			95.86	96.63	97.39	98.17	99.65	100	100	100	IKK rpjmd/SPM
8	Persentase Sempadan Sungai yang Diapakai bangunan Liar		✓			4.42	3.97	3.58	3.22	5.45	5.45	5,40	5,20	IKK rpjmd
9	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor		✓			26.15	31.38	37.65	45.19	29.57	29.57	29,72	29,87	IKK rpjmd
10	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik		✓			85.14	88.55	92.09	95.77	81.45	61.59	75.16	88.65	IKK rpjmd
11	Rasio jaringan irigasi (km/ha)		✓			0.45	0.49	0.53	0.57	0.71	0.75	0.79	0.85	IKK rpjmd/IKU
12	Persentase penduduk Berakses Air Minum	✓	✓			91.17	91.46	91.85	92.33	92.46	98.49	100	100	IKK rpjmd/SPM
13	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum layak, Perkotaan dan Perdesaan		✓			68.66	70.33	72.11	66.71	93.07	98.49	100	100	IKK rpjmd/TPB
14	Persentase Areal Kawasan Kumuh		✓			6.18	6.14	6.11	6.07	5.62	5.62	5,65	5,68	IKK rpjmd
15	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		✓			1.31	1.46	1.62	1.80	0.93	0.93	0,93	0,94	IKK rpjmd
16	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya		✓			0	0	0	0	0	0	0	0	IKK rpjmd
17	Rasio Luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara		✓			2.50	0	0	0	3.00	3.10	3.15	3.20	IKK rpjmd
18	Ketaatan Terhaap RTRW		✓			4.53	5.73	7.25	9.18	5.86	5.86	5,89	5,92	IKK rpjmd
19	Kontribusi Sektor Konstruksi		✓			16.71	18.14	19.35	20.53	10.47	14.52	20.14	20.52	IKK rpjmd
20	Luas RTH 20 % dari luas wilayah kota.kawasan perkotaan (%)		✓			2.70	2.95	3.21	3.46	3.60	3.60	3,62	3,64	IKK rpjmd
21	Rasio Luas Wilayah Perkotaan		✓			0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	IKK rpjmd
22	Persentase Luas Lahan Bersertifikat		✓			22.01	26.93	32.95	40.31	20.53	20.53	20,63	20,74	IKK rpjmd
23	Penyelesaian Kasus Tanah Negara		✓			100	100	100	100	100	100	100	100	IKK rpjmd
24	Penyelesaian izin lokasi		✓			100	100	100	100	100	100	100	100	IKK rpjmd
25	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		✓			1.833.727	1.870.401	1.907.810	1.945.966	2.159.169	2.159.169	2.169.964.845	2.180.814.669	IKK rpjmd
26	Rasio Ijin Trayek		✓			0.0003	0.0004	0.0004	0.0004	0	0	0.0036	0.0038	IKK rpjmd

27	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum		✓			0	0	0	0	755	178	758	762	IKK rpjmd
28	Jumlah pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus		✓			1	1	1	1	1	1	1	1	IKK rpjmd
29	Persentase Layanan Angkutan Darat		✓			20.45	27.89	38.04	51.87	36.18	36	36,36	36,54	IKK rpjmd
30	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum		✓			100	100	100	100	49.43	61.39	49,68	49,93	IKK rpjmd
31	Pemasangan Rambu-Rambu		✓			85	90	95	100	80	82.50	80,40	80,80	IKK rpjmd
32	Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan		✓			0.021	0.020	0.019	0.018	0.0172	0.052	0,017	0,017	IKK rpjmd
33	Jumlah orang Yang Terangkut Angkutan Umum		✓			1.774 307	1.933. 995	2.108. 054	2.297. 779	2.159.733	2.159.833	2.170.531 .665	2.181.384 .323	IKK rpjmd
34	Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan Umum		✓			202.30 4.760	240.10 9.880	284.97 9.723	338.23 4.488	7.031.146 .354	1.045.800	2.170.531 ,665	2.181.384 ,323	IKK rpjmd
35	Jumlah Orang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per tahun		✓			1.562. 929	1.594. 186	1.626. 069	1.658. 589	2.159.733	2.159.833	2.170.531 ,665	2.181.384 ,323	IKK rpjmd
36	Jumlah Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per tahun		✓			202.30 4.949	240.11 0.127	284.98 0.045	338.23 4.908	7.031.146 .354	1.045.800	2.170.531 ,665	2.181.384 ,323	IKK rpjmd
37	Tingkat Kecelakaan		✓			0.256	0.234	0.186	0.177	0.256	0.604	0.148	0.221	IKK rpjmd
38	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	✓		✓	✓	93.26	98.83	100	100	93.07	98.49	100	100	SPM/IKK/IKU/TPB
39	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	✓		✓	✓	100	100	100	100	99.65	100	100	100	SPM/IKK/IKU/TPB
40	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	✓		✓	✓	93.26	98.83	100	100	92.46	98.49	100	100	SPM/IKK/IKU/TPB
41	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	✓		✓	✓	100	100	100	100	92.70	100	100	100	SPM/IKK/IKU/TPB
42	Jumlah dermaga penyeberangan				✓	2	2	2	2	2	2	2	2	TPB
43	Persentase Kontribusi Sub sektor bangunan sipil terhadap sektor konstruksi dalam PDRB			✓		4,5	6,45	2,81	9,52	10.47	10.47	10,52	10,58	IKU
44	Persentase Kontribusi Sub sektor angkutan darat dan penyeberangan terhadap sektor transportasi dalam PDRB			✓		1,3	1,31	1,32	1,33	35.56	35.56	35,74	35,92	IKU
45	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset lahan			✓		98,5	98,75	99,12	99,5	99.71	99.71	100,21	100,71	IKU
46	Persentase ketersediaan air baku untuk air bersih dan irigasi			✓		70	75	80	85	75	75	75,38	75,75	IKU
47	Persentase akses air minum layak dengan jaringan perpipaan			✓		36,98	40,39	43,8	47,2	51.49	51.49	51,75	52,01	IKU

48	Persentase luas wilayah kawasan kumuh permukiman			✓		0,015	0,013	0,012	0,011	0.014	0.014	0,014	0,014	IKU
49	Tingkat kesesuaian antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah			✓		95,22	96,82	98,42	99,13	100	100	100,50	101,00	IKU
50	Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi			✓		85	87	90	93	88.67	88.67	89,11	89,56	IKU
51	Persentase kontribusi sektor transportasi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca			✓		4.48	4.47	4.46	4.45	4.48	4.48	4,50	4,53	IKU

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Mengevaluasi dan menyikapi kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros termasuk di dalamnya apakah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros telah melaksanakan kegiatan-kegiatan progam sesuai dengan arah kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain:

Dalam tugas pokok dan fungsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Secara umum dan normatif suatu hal yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah adalah proses manajemen mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Proses tersebut merupakan serangkaian tahapan kritis yang harus dikelola melalui penyusunan manajemen resiko sehingga sebelum dilaksanakan akan dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak negatif atau penyimpangannya. Oleh karena itu, setiap tahapan tersebut harus dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Tabel 2.3
Rumusan Permasalahan Berdasarkan Indikator Pelayanan

NO.	MASALAH	Hambatan	Peluang	DAMPAK
1	Tonase berlebih dan kondisi cuaca ekstrem	sebagian besar jalan yang rusak merupakan kewenangan pusat/ provinsi sehingga tidak dapat diperbaiki oleh pemda	Koordinasi yang baik antara pemda, balai besar jalan dan dinas provinsi	Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam Kondisi baik (Km)
2	Panjang jalan yang dibangun tidak sebanding dengan jumlah penduduk	laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat setiap tahun, tidak seiring dengan kewenangan penganggaran	adanya SK jalan baru	Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk
3	adanya kondisi ruas jalan yang statusnya berubah sesuai tingkat kondisi kerusakannya yang dari rusak ringan menjadi rusak berat	adanya kondisi jalan yang mengalami perbaikan yang berulang/overlap penanganan	Koordinasi yang baik antara pemda, balai besar jalan dan dinas provinsi	Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)
4	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase belum sebanding dengan seluruh panjang jalan kewenangan kabupaten	lahan yang tersedia untuk membangun trotoar dan drainase pada lokasi jalan yang dibangun tidak mencukupi	adanya kegiatan pembangunan jalan	Persentase Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran pembuang (min 1,5 m)
5	masih banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan sempadan jalan	tidak adanya aturan yang tegas tetang penggunaan sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima	koordinasi antara OPD yang terkait	Persentase Sempadan jalan yang Dipakai Pedagang kaki Lima Atau Bangunan Rumah Liar
6	Panjang drainase yang terbangun tidak senbanding dengan panjang seluruh drainase yang dibutuhkan dan menjadi kewenangan kabupaten	penganggaran yang terbatas sehingga tidak mampu menangani panjang drainase yang dalam kondisi rusak atau belum ada terbangun	Tersedianya Ruas Jalan yang bisa ditangani kebutuhan pembangunan drainasenya	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuang Saluran Air Tidak Tersumbat
7	luasan daerah genangan yang yang terjadi di kabupaten Maros hanya terjadi rata-rata sekali dalam setahun	Luasan daerah genangan rata-rata pada kondisi topografi yang berada pada elevasi terendah sehingga adanya potensi kiriman air dari elevasi yang lebih tinggi	adanya pembangunan drainase/saluran pembuang di daerah rawan genangan	Tidak Terjadi Genangan > 2 kali setahun
8	adanya sebagian besar sungai yang tidak bisa dilakukan penanganan karena terkait adanya kewenangan propinsi dan balai	adanya sungai yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai	Terdapatnya sejumlah sungai-sungai kecil yang ada di wilayah kabupaten yang belum jelas kewenangannya	Persentase Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor
9	Luas irigasi yang tertangani tidak sebanding dengan luas areal irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten	penganggaran yang terbatas sehingga tidak mampu menangani luas areal irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten	Terdapatnya 75 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten	Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik

10	adanya kawasan yang tertangani namun tidak bisa mempengaruhi kenaikan penanganan kawasan kumuh	Terdapatnya lokasi Kumuh yang tidak bisa ditangani karena tidak termuat dalam SK kawasan kumuh	Adanya SK kumuh yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Persentase Areal Kawasan Kumuh
11	semakin menurunnya ruang terbuka hijau	terdapatnya alih fungsi ruang terbuka hijau	adanya Perda RTRW yang mengatur tentang penggunaan RTH	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
12	masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIR	kurangnya petugas yang melakukan swiping kendaraan umum yang tidak memiliki KIR	Prasarana pengujian KIR telah terbangun/tersedia	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
13	masih terdapat wilayah yang belum mendapatkan pemasangan rambu-rambu	masih terdapatnya sekelompok masyarakat yang masih sering menghilangkan rambu-rambu yang telah dipasang	ada kegiatan pengadaan rambu-rambu	Pemasangan Rambu-Rambu
14	banyaknya Jasa Angkutan/ekspedisi yang tersedia	masyarakat lebih memilih menggunakan jasa angkutan/ekspedisi	tersediannya terminal angkutan umum	Jumlah Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
15	sudah banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi	kurangnya angkutan umum yang tersedia	terdapatnya beberapa dermaga dan terminal	Jumlah Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal per tahun
16	masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara	masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran berkendara di jalan raya	adanya rambu-rambu peringatan dan swiping yang dilakukan petugas	Tingkat Kecelakaan
17	masih kurangnya ketersediaan air baku untuk air minum	masih kuranganya masyarakat yang memiliki sumber air minum layak	Adanya pembangunan yang berkelanjutan (SDGS)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.
18	masih kurangnya ketersediaan air baku untuk air minum yang aman	masih banyaknya masyarakat yang menggunakan sumber air minum yang terjamin keamanannya	Adanya pembangunan yang berkelanjutan (SDGS)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.

Adapun masalah yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu :

1. Pengembangan kapasitas SDM diseluruh lini melalui : pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada kebutuhan baik dalam rangka peningkatan kompetensi maupun dalam rangka pengembangan/peningkatan wawasan dan pengetahuan, serta pengembangan karier berbasis kompetensi.
2. Peningkatan keberdayaan seluruh lini dilakukan melalui : kebutuhan dan SDM pegawai yang diarahkan pada kebutuhan kompetensi SDM untuk fungsi rencana stratejik organisasi, pemenuhan sarana kerja yang memadai, dan peningkatan kapasitas kegiatan program unit kerja yang terangkumkan. SDM yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros relatif kurang terutama tenaga teknis yang berlatar belakang pendidikan yang sesuai kebutuhan pada Bidang Bina Marga,

Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya dan Bidang Penataan Ruang, meskipun pada saat ini sudah ada beberapa tenaga teknis yang dibutuhkan. Sedangkan pada bagian umum, kompetensi personilnya harus disesuaikan dan ditingkatkan. Mengingat kewajiban dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan sangat besar, sudah sewajarnyalah bila SDM pada dinas ini lebih diperkuat dan ditingkatkan.

3. Prasarana dan Sarana Nilai SDM yang relatif baik tersebut tidak akan mencapai kinerja yang maksimal jika tidak ditunjang oleh prasarana dan sarana yang memadai, misalnya fasilitas IT yang cukup memadai, sarana bagi tenaga pengawas/koordinator lapangan, perencanaan banyak yang tidak lagi berupa blue print, pengarsipan yang belum tertata dengan baik. Oleh karenanya sebagai organisasi penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Maros perlu lebih ditingkatkan sehingga kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan dapat meningkat sesuai dengan harapan.
4. Tersedianya anggaran sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Tanpa ada dana yang menunjang suatu kegiatan dapat dipastikan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu rencana kinerja tahunan harus menyesuaikan dengan kemampuan APBDnya.
5. Maraknya kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan, seperti alih fungsi lahan secara melawan hukum, kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai perizinan pemanfaatan ruang, dan perizinan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Seringnya terjadi perubahan peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan.
7. Belum optimalnya pelaksanaan komitmen dan konsistensi kebijakan yang mengikat.
8. Belum lengkapnya instrumen dasar atau aturan (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria /NSPK) dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai dasar yang melandasi implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini menyebabkan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilakukan secara optimal, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Disamping itu pedoman-pedoman perizinan, insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi masih dalam proses penyusunan. Dalam proses penyusunan tersebut, diupayakan kaidah - kaidah atau norma tata ruang harus mampu memenuhi kebutuhan dasar

masyarakat dan memuaskan bagi para pihak, oleh karena itu kaidah/norma tata ruang akan dirumuskan secara tepat dan jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda beda.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros menyoroti beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh karena disebabkan beberapa hal seperti penyiapan lahan, perencanaan yang kurang maksimal dengan dukungan data dan kendala waktu pelaksanaan. Oleh karenanya program kerja setiap memasuki tahun anggaran sudah harus memiliki jadwal kerja yang tersusun secara sistematik dengan koordinasi internal yang terpadu untuk mensinkronisasikan dengan OPD terkait lainnya sehingga capaian tujuan akhir dari setiap pelaksanaan program dapat terwujud secara sistematik, terarah dan tepat waktu.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024
Kabupaten Maros

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan Dan Pertanahan

NO	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**16.826.964.690,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**16.826.964.690,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	12 Dokumen	**18.519.000,00**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	12 Dokumen	**18.519.000,00**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.025.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.025.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.450.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.450.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.700.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.480.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.480.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	864.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	864.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	45 Laporan	13.831.715.897,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	45 Laporan	13.831.715.897,00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.248 Orang/bulan	13.106.435.897,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.248 Orang/bulan	13.106.435.897,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	722.260.000,,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	722.260.000,,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.850.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.850.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	1.170.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	1.170.000,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.375.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.375.000,00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.375.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.375.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	160 Orang	31.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	160 Orang	31.000.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Maros	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	31.000.000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Maros	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	31.000.000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	7 Jenis	934.232.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	7 Jenis	934.232.500,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Maros	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.155.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Maros	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.155.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Maros	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.028.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Maros	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.028.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	201.673.500,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	201.673.500,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	74.900.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	74.900.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Maros	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Maros	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.500.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.500.000,00	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	618.976.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	618.976.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	120.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	120.000.000,00	
	Pengadaan Mebel	Kab. Maros	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	45.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kab. Maros	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	45.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	75.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	75.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	1.111.930.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	1.111.930.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.103.330.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.103.330.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang Berada Dalam Kondisi Baik	4 Jenis	234.600.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang Berada Dalam Kondisi Baik	4 Jenis	234.600.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Maros	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Maros	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	50.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Maros	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit	149.600.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Maros	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit	149.600.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	25.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.000.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		**Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat**	**80 Persen**	17.142.571.333,00	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat**	**80 Persen**	17.142.571.333,00	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan air baku	18143 m3	3.550.700.000,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketersediaan air baku	18143 m3	3.550.700.000,00	

	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Maros	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.58 KM	2.115.300.000,00	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Maros	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0.58 KM	2.115.300.000,00	
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Maros	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	3 Titik	470.100.000,00	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Maros	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	3 Titik	470.100.000,00	
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit	965.300.000,00	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit	965.300.000,00	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	6386 Ha	10.415.402.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	6386 Ha	10.415.402.000,00	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Maros	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		2.973.310.983,00	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Maros	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan		2.973.310.983,00	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Maros	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	8.21 KM	1.495.060.000,00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Maros	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	8.21 KM	1.495.060.000,00	
	Peningkatan Bendung Irigasi	Kab. Maros	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	2 Bendung	520.100.000,00	Peningkatan Bendung Irigasi	Kab. Maros	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	2 Bendung	520.100.000,00	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Maros	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	24.70 KM	7.325.960.350,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Maros	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	24.70 KM	7.325.960.350,00	
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Maros	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	792.070.000	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Maros	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	792.070.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Maros	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	32.91 KM	334.450.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Maros	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	32.91 KM	334.450.000,00	
	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	10 Lembaga	101.620.000,00	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	10 Lembaga	101.620.000,00	
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Kab. Maros	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	85 DI	49.300.000,00	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Kab. Maros	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	85 DI	49.300.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		**Persentase akses air minum layak dengan jaringan perpipaan Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Kebutuhan Air Minum Sesuai SPM**	**43,8 Persen 100 Persen**	6.291.020.000,00	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**Persentase akses air minum layak dengan jaringan perpipaan Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Kebutuhan Air Minum Sesuai SPM**	**43,8 Persen 100 Persen**	6.291.020.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	85883 RT	6.291.020.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	85883 RT	6.291.020.000,00	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Maros	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	20 Unit	1.015.100.000,00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Maros	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	20 Unit	1.015.100.000,00	

	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Maros	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 Orang	32.570.000,00	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kab. Maros	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 Orang	32.570.000,00	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Maros	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	1.112.750.000,00	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Maros	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	1.112.750.000,00	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Maros	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2 Liter/Detik	2.112.750.000,00	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Maros	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2 Liter/Detik	2.112.750.000,00	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Maros	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	20 SR	2.017.850.000,00	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Maros	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	20 SR	2.017.850.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**70 Persen**	2.161.900.000,00	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**70 Persen**	2.161.900.000,00	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik**	**2 KM**	2.161.900.000,00	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik**	**2 KM**	2.161.900.000,00	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	**Kab. Maros**	**Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun**	**2700 M**	2.161.900.000,00	**Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan**	**Kab. Maros**	**Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun**	**2700 M**	2.161.900.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		**Persentase areal kawasan kumuh**	**6,11 Persen**	2.403.680.000,00	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**		**Persentase areal kawasan kumuh**	**6,11 Persen**	2.403.680.000,00	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Layak	82831 RT	2.403.680.000,00	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Layak	82831 RT	2.403.680.000,00	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	219 Rumah Tangga	2.403.680.000,00	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	219 Rumah Tangga	2.403.680.000,00	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		**Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan**	**0.62 Rasio**	22.545.075.000,00	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan**	**0.62 Rasio**	22.545.075.000,00	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Dokumen IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan	5000 Dokumen	22.545.075.000,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Dokumen IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan	5000 Dokumen	22.545.075.000,00	
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	5 Bangunan Gedung	1.300.000.000,00	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	5 Bangunan Gedung	1.300.000.000,00	
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	23 Dokumen	21.245.075.000,00	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	23 Dokumen	21.245.075.000,00	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**	**95,52 Persen**	86.211.795.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**	**95,52 Persen**	86.211.795.000,00	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	985,77 KM	86.211.795.000,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	985,77 KM	86.211.795.000,00	
	Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	100.000.000,00	Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	100.000.000,00	
	Pembangunan Jalan	Kab. Maros	Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	5.650.000.000,00	Pembangunan Jalan	Kab. Maros	Panjang Jalan yang Dibangun	10 KM	5.650.000.000,00	
	Rekonstruksi Jalan	Kab. Maros	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	33 KM	69.451.795.000,00	Rekonstruksi Jalan	Kab. Maros	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	33 KM	69.451.795.000,00	
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Maros	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1238,567 KM	60.000.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Kab. Maros	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1238,567 KM	60.000.000,00	
	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Maros	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	600.000.000,00	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Maros	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	600.000.000,00	
	Pembangunan Jembatan	Kab. Maros	Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	9.900.000.000,00	Pembangunan Jembatan	Kab. Maros	Jumlah Jembatan yang Dibangun	10 Jembatan	9.900.000.000,00	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Maros	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1238,567 KM	450.000.000,00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Maros	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1238,567 KM	450.000.000,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		**Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB**	**11,76 Persen**	628.977.000,00	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		**Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB**	**11,76 Persen**	628.977.000,00	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Memenuhi Standar Sesuai ketentuan yang berlaku	150 Orang	316.547.000,00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Memenuhi Standar Sesuai ketentuan yang berlaku	150 Orang	316.547.000,00	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. Maros	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	98.490.000,00	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kab. Maros	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	98.490.000,00	
	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. Maros	Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	10 Orang	13.050.000,00	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kab. Maros	Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	10 Orang	13.050.000,00	
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kab. Maros	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150 Orang	205.007.000,00	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kab. Maros	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150 Orang	205.007.000,00	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersedia	1 Sistem	103.590.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersedia	1 Sistem	103.590.000,00	
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Maros	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	10.600.000,00	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Maros	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	10.600.000,00	

	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	3 Dokumen	57.540.000,00	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	3 Dokumen	57.540.000,00	
	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Kab. Maros	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	15.450.000,00	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Kab. Maros	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	15.450.000,00	
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Maros	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	20.000.000,00	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kab. Maros	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	20.000.000,00	
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Yang Diterbitkan	30 Rekomendasi	60.640.000,00	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Yang Diterbitkan	30 Rekomendasi	60.640.000,00	
	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	30 Dokumen	23.730.000,00	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	30 Dokumen	23.730.000,00	
	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	36.910.000,00	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	36.910.000,00	
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Penyelenggara Jasa Konstruksi Yang Diawasi dan Dievaluasi	5 Badan Usaha	148.200.000,00	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Penyelenggara Jasa Konstruksi Yang Diawasi dan Dievaluasi	5 Badan Usaha	148.200.000,00	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 Paket Pekerjaan	61.400.000,00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	100 Paket Pekerjaan	61.400.000,00	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	100 Bangunan Konstruksi	25.600.000,00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	100 Bangunan Konstruksi	25.600.000,00	
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kab. Maros	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5 Lembaga	35.600.000,00	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kab. Maros	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	5 Lembaga	35.600.000,00	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	20 Badan Usaha	25.600.000,00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	20 Badan Usaha	25.600.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**7,25 Persen**	2.027.562.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**7,25 Persen**	2.027.562.000,00	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Luas areal pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan RRTR	6600 Ha	1.057.651.000,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Luas areal pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan RRTR	6600 Ha	1.057.651.000,00	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	909.076.000,000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	909.076.000,000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kab. Maros	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	900 Orang	148.575.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kab. Maros	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	900 Orang	148.575.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Luas areal ruang daerah yang perencanaannya sesuai dengan rencana peruntukan	6600 Ha	1.077.005.000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Luas areal ruang daerah yang perencanaannya sesuai dengan rencana peruntukan	6600 Ha	1.077.005.000,000	
	Penyusunan Peta Dasar	Kab. Maros	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	295.741.000,000	Penyusunan Peta Dasar	Kab. Maros	Jumlah data SHP Peta Dasar	1 Peta	295.741.000,000	
	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	781.264.000,000	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	781.264.000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Luas Areal Ruang Daerah yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana peruntukan	6600 Ha	41.050.000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Luas Areal Ruang Daerah yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana peruntukan	6600 Ha	41.050.000,000	
	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Maros	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	50 Layanan	41.050.000,000	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kab. Maros	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	50 Layanan	41.050.000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Luas Ruang Daerah yang Dikendalikan Pemanfaatannya	6600 ha	928.861.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Luas Ruang Daerah yang Dikendalikan Pemanfaatannya	6600 ha	928.861.000,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	830.636.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	830.636.000,00	
	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kab. Maros	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	300 Dokumen	57.625.000,00	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kab. Maros	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	300 Dokumen	57.625.000,00	
	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kab. Maros	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	40.600.000,00	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kab. Maros	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	40.600.000,00	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		**Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan**	**100 Persen**	48.010.00,00	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**		**Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan**	**100 Persen**	48.010.00,00	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Sengketa Tanah Yang Diselesaikan	40 Kasus	48.010.00,00	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Sengketa Tanah Yang Diselesaikan	40 Kasus	48.010.00,00	
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	29.750.000,00	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	29.750.000,00	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	18.260.000,00	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	18.260.000,00	
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		**Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee**	**100 Persen**	46.905.000,00	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**		**Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee**	**100 Persen**	46.905.000,00	

	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi	1 Dokumen	46.905.000,00	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen hasil Koordinasi	1 Dokumen	46.905.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	24.310.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	24.310.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.595.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	22.595.000,00	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		**Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai dengan RTRW**	**70 Persen**	31.320.000,00	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**		**Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai dengan RTRW**	**70 Persen**	31.320.000,00	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Koordinasi	1 Dokumen	31.320.000,00	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Hasil Koordinasi	1 Dokumen	31.320.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	31.320.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	31.320.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Kab. Maros**	**Persentase layanan angkutan darat**	**38,04 Persen**	31.320.000,000	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kab. Maros**	**Persentase layanan angkutan darat**	**38,04 Persen**	31.320.000,000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1535 Unit	4.796.783.484,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1535 Unit	4.796.783.484,00	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1535 Unit	3.872.113.484,00	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1535 Unit	3.872.113.484,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Maros	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	300 Unit	924.670.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Maros	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	300 Unit	924.670.000,00	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 Unit	7.115.000,00	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 Unit	7.115.000,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Maros	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	7.115.000,00	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kab. Maros	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	7.115.000,00	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah fasilitas pelayanan parkir yang memiliki izin	50 Izin	10.000.000,00	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah fasilitas pelayanan parkir yang memiliki izin	50 Izin	10.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	10.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	10.000.000,00	

	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah kendaraan wajib uji berkala	3500 Unit	636.020.000,00	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah kendaraan wajib uji berkala	3500 Unit	636.020.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	450.600.000,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	450.600.000,00	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	3500 Unit	4.330.000,00	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	3500 Unit	4.330.000,00	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500 Dokumen	75.6000.000,00	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500 Dokumen	75.6000.000,00	
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan	16.580.000,00	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan	16.580.000,00	
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Maros	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	14 Laporan	9.890.000,00	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Maros	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	14 Laporan	9.890.000,00	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	32.120.000,00	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	32.120.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	33.910.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	33.910.000,00	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	12.990.000,00	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Maros	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	12.990.000,00	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	757.155.000,00	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	757.155.000,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	135.400.000,00	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	135.400.000,00	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	8.755.000,00	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	8.755.000,00	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	613.000.000,00	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	613.000.000,00	
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan	30 Rekomendasi	49.860.000.,00	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan	30 Rekomendasi	49.860.000.,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	9.460.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	9.460.000,00	

	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Kab. Maros	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 Orang	30.000.000,00	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Kab. Maros	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 Orang	30.000.000,00	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kab. Maros	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	10 Laporan	10.400.000,000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Kab. Maros	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	10 Laporan	10.400.000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		**Persentase Arus Penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai Yang Melalui Dermaga/ Pelabuhan Perahu Penyeberangan**	**50 Persen**	39.615.000,00	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**Persentase Arus Penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai Yang Melalui Dermaga/ Pelabuhan Perahu Penyeberangan**	**50 Persen**	39.615.000,00	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah izin usaha angkutan laut yang diterbitkan	2 Dokumen	1.210.000,00	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah izin usaha angkutan laut yang diterbitkan	2 Dokumen	1.210.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.210.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.210.000,00	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang diterbitkan	2 Dokumen	435.000,00	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang diterbitkan	2 Dokumen	435.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	435.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	435.000,00	
	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang terbitkan	4 Rekomendasi	1.155.000,00	Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal		Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang terbitkan	4 Rekomendasi	1.155.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1 Laporan	1.155.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1 Laporan	1.155.000,00	
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang memiliki izin pembangunan dan operasi	4 Rekomendasi	1.435.000,00	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang memiliki izin pembangunan dan operasi	4 Rekomendasi	1.435.000,00	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 Laporan	1.435.000,00	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 Laporan	1.435.000,00	
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah pelabuhan yang memiliki izin pembangunan dan operasi	4 Rekomendasi	35.380.000,00	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah pelabuhan yang memiliki izin pembangunan dan operasi	4 Rekomendasi	35.380.000,00	

	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Maros	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	1 Unit	32.080.000,00	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Maros	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	1 Unit	32.080.000,00	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Laporan	3.300.000,00	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Laporan	3.300.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Sehingga Usulan-usulan program masyarakat akan langsung diteruskan ke masing-masing OPD yang terkait dan akan di temukan di dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang akan melibatkan seluruh Stakeholder Pemerintahan dalam menentukan program-program prioritas pembangunan kedepannya.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Maros

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Kab. Maros**	**Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat**	**80 Persen**	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah ketersediaan air baku	18143 m3	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Maros	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	4.11 KM	Usulan Musrenbang Usulan Pokir
	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Kab. Maros	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	10 Titik	Usulan Musrenbang Usulan Pokir
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	9 Unit	Usulan Musrenbang Usulan Pokir
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik	6386 Ha	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Maros	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	8.21 KM	Usulan Musrenbang
	Peningkatan Bendung Irigasi	Kab. Maros	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	3 Bendung	Usulan Musrenbang
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kab. Maros	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	24.70 KM	Usulan Musrenbang Usulan Pokir
	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Kab. Maros	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	10 Bendung	Usulan Musrenbang
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Kab. Maros**	**Persentase akses air minum layak dengan jaringan perpipaan** **Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Kebutuhan Air Minum Sesuai SPM**	**43,8 Persen** **100 Persen**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak	85883 RT	
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kab. Maros	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	50 Unit	Usulan Musrenbang Usulan Pokir
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kab. Maros	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	20 SR	Usulan Musrenbang
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Kab. Maros**	**Persentase Pengurangan Sampah pada Wilayah Perkotaan yang Terfasilitasi**	**1,57 Persen**	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Volume Timbunan Sampah Yang Tertangani	29628 m3	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Maros	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	50 Ton/hari	Usulan Musrenbang
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Maros	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	Usulan Musrenbang
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Kab. Maros**	**Persentase rumah tinggal bersanitasi**	**97,37 Persen**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Layak	82831 RT	
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kab. Maros	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	150 M^3/Hari	Usulan Musrenbang Usulan Pokir

	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kab. Maros	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100 Rumah Tangga	Usulan Musrenbang
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	Usulan Musrenbang
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Kab. Maros**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**70 Persen**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	53000 KM	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Maros	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5000 M	Usulan Musrenbang Usulan Pokir
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kab. Maros	Jumlah Dokumen IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan	5000 Dokumen	
	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	Usulan Musrenbang
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	15 Dokumen	Usulan Musrenbang
6	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Kab. Maros**	**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**	**95,52 Persen**	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang	985,77 KM	
	Pembangunan Jalan	Kab. Maros	Panjang Jalan yang Dibangun	2,5 KM	Usulan Musrenbang Usulan Pokir
	Rekonstruksi Jalan	Kab. Maros	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3,5 KM	Usulan Musrenbang Usulan Pokir
	Pembangunan Jembatan	Kab. Maros	Jumlah Jembatan yang Dibangun	6 Jembatan	Usulan Musrenbang Usulan Pokir
7	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kab. Maros**	**Persentase layanan angkutan darat**	**38,04 Persen**	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	300 Unit	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 Unit	Usulan Musrenbang Usulan Pokir
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Maros	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	300 Unit	Usulan Musrenbang Usulan Pokir
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Maros	Jumlah pelabuhan yang memiliki izin pembangunan dan operasi	7 Rekomendasi	
	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Maros	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	2 Unit	Usulan Musrenbang
	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Kab. Maros	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	1 Unit	Usulan Musrenbang

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap arah kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembanguan dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros.

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

"INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR"

Penjabaran dari Visi adalah Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.Majuberarti Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap. Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dapat dijabarkan dengan menelaah sasaran utama RPJMN 2020-2024. Sementara sasaran utama pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada visi misi pemerintah, strategi pembangunan nasional serta agenda prioritas pembangunan nasional.

Visi Pemerintah untuk tahun 2020-2024 adalah ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong".*** Visi ini kemudian diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tabel. 3.1
Identifikasi Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan daerah

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Provinsi	Arah Kebijakan Daerah
Meningkatkan pemerataan antar wilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi strandar GESI	Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu
Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah	Peningkatan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting	Pemenuhan standar pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari - hari
Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah	Peningkatan dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting	Pemenuhan standar pelayanan pengolahan air limbah domestik
Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah	Penguatan kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah	Percepatan pelaksanaan PUG melalui penguatan pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)
Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa	Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah	Peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.
Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi	Peningkatan nilai investasi melalui promosi potensi daerah	Peningkatan dukungan infrastrukt ur dan logistik

Perkuatan konektifitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah	Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah	Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan
		Peningkatan dan Pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta prasarana fasilitas perlengkapan jalan
Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan	Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah	Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan
Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan memenuhi strandar GESI	Peningkatan dan Pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta prasarana fasilitas perlengkapan jalan
		Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi
		Pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan
		Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penerapan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan realisasi perjanjian kinerja yang disepakati.
		Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan
		Peningkatan ketersediaan sarana prasarana transportasi angkutan barang dan jasa
Penataan ruang berbasis RDTR untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah	Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
Meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah dengan (i) optimalisasi kawasan strategis prioritas seperti KEK, KI, DPP, dan kawasan lainnya; (ii) optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa; (iii) pembangunan kota baru dan pembangunan Ibu Kota Negara di luar pulau Jawa	Peningkatan kualitas air, udara dan air serta upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengendalian kualitas emisi dari berbagai macam sumber
Mengoptimalisasi layanan informasi pertanahan dan tata ruang	Peningkatan pengembangan potensi komoditas unggulan, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah	Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah didasarkan Rancangan Awal Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros adalah :

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan
Tahun 2024

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024
1	Meningkatkan Cakupan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Kebutuhan Air Minum Sesuai SPM	100
		Meningkatnya cakupan pemenuhan ketersediaan layanan pengolahan air limbah domestik sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Pengolahan air limbah domestik Sesuai SPM	100
2	Meningkatkan Kontribusi sektor konstruksi dan transportasi terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya sub sektor bangunan sipil terhadap pendapatan domestik regional bruto sektor konstruksi	Persentase Kontribusi Sub sektor bangunan sipil terhadap sektor konstruksi dalam PDRB	2,81
		Meningkatnya sub sektor angkutan darat dan penyeberangan terhadap pendapatan domestik regional bruto sektor transportasi	Persentase Kontribusi Sub sektor angkutan darat dan penyeberangan terhadap sektor transportasi dalam PDRB	1,32
		Meningkatnya Rumah Tangga Miskin Yang memiliki aset produktif berupa lahan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset lahan	99,12
3	Menurunkan Tingkat Kesenjangan ketersediaan infrastruktur Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Kualitas layanan jaringan jalan	tingkat kemantapan jalan	95,92
		Meningkatnya ketersediaan air baku	Persentase ketersediaan air baku untuk air bersih dan irigasi	80
		Meningkatnya ketersediaan dan akses infrastruktur permukiman yang layak aman dan terjangkau	Persentase akses air minum layak dengan jaringan perpipaan	43,80
			Persentase akses sanitasi layak dan aman	100
			Persentase luas wilayah kawasan kumuh permukiman	0,012
		Meningkatnya kesesuaian program pembangunan terhadap rencana penataan ruang	Tingkat kesesuaian antara rencana pembangunan dengan rencana tata ruang wilayah	98,42
		Meningkatnya ketersediaan dan akses masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi	Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi	90
4	Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatnya kontribusi sektor transportasi terhadap penurunan tingkat emisi gas rumah kaca	Persentase kontribusi sektor transportasi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca	4,46

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam perubahan renja tahun 2024, pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros merancang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh:

1. Bahwa perlunya dilakukan usulan penambahan anggaran pada beberapa Sub Kegiatan dikarenakan adanya sisa utang dan sisa DAU Spesifik Grand yang perlu dimasukkan kembali ke dalam DPA Perubahan Tahun 2024.
2. Bahwa perlunya dilakukan usulan penambahan anggaran pada beberapa Sub Kegiatan dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan penerangan jalan pada ruas jalan nasional ke dalam DPA Perubahan Tahun 2024.
3. Melihat kondisi yang ada di jalan, penerangan lampu jalan yang sangat mengkuatirkan dikarenakan sering terjadi kecelakaan pada malam hari dikarenakan penerangan jalan banyak yang tidak berfungsi.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami perubahan dapat terlihat pada tabel 3.3 berikut ini :

TABEL 3.3

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAROS

TAHUN 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
	DINAS PEKERJAAN UMUM ,TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN				**158.943.266.881**	**181.797.306.494**				
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**152.520.483.397**	**165.314.523.010**				
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**152.520.483.397**	**165.314.523.010**				
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**16.284.372.397**	**16.284.372.397**				
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**19 Dokumen**	**12 Dokumen**	**18.519.000**	**18.519.000**				
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	4.025.000	4.025.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.450.000	2.450.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000	2.700.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.480.000	3.480.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD

1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2 Laporan	2.000.000	2.000.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4 Laporan	864.000	864.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**31 Laporan**	**45 Laporan**	**13.831.715.897**	**13.831.715.897**				
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/Bulan	2.248 Orang/Bulan	13.106.435.897	13.106.435.897	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		DAU
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	722.260.000	722.260.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.850.000	1.850.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	1.170.000	1.170.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**2.375.000**	**2.375.000**				
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.375.000	2.375.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**160 Orang**	**160 Orang**	**31.000.000**	**31.000.000**				
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	1 Paket	31.000.000	31.000.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**7 Jenis**	**7 Jenis**	**934.232.500**	**934.232.500**				

1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1 Paket	13.155.000	13.155.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	1 Paket	3.028.000	3.028.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	90 Paket	4 Paket	201.673.500	201.673.500	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	4 Paket	74.900.000	74.900.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12.500.000	12.500.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	618.976.000	618.976.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Jenis**	**2 Jenis**	**120.000.000**	**120.000.000**				
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	50 Unit	30 Unit	45.000.000	45.000.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	3 Unit	75.000.000	75.000.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**1.111.930.000**	**1.111.930.000**				
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	8.000.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	600.000	600.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.103.330.000	1.103.330.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD

1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang Berada Dalam Kondisi Baik**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**234.600.000**	**234.600.000**				
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	50.000.000	50.000.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	149.600.000	149.600.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	25.000.000	25.000.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	10.000.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		DAU
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Pemenuhan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan air bersih masyarakat**	**80 Persen**	**80 Persen**	**13.966.102.000**	**17.142.571.333**				
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah ketersediaan air baku**	**18143 m3**	**18143 m3**	**3.550.700.000**	**3.550.700.000**				
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	4.11 KM	0.58 KM	2.115.300.000	2.115.300.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	3 Titik	3 Titik	470.100.000	470.100.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	3 Unit	3 Unit	965.300.000	965.300.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU

1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas Irigasi Dalam Kondisi Baik**	**6386 Ha**	**6386 Ha**	**10.415.402.000**	**13.591.871.333**				
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				2.973.310.983	Kab. Maros	Kab. Maros		DPAL
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	8.21 KM	8.21 KM	1.495.060.000	1.495.060.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	2 Bendung	2 Bendung	520.100.000	520.100.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	24.70 KM	24.70 KM	7.122.802.000	7.325.960.350	Kab. Maros	Kab. Maros		DAK/DAU
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	3 Bendung	3 Bendung	792.070.000	792.070.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	45 KM	32.91 KM	334.450.000	334.450.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	10 Lembaga	10 Lembaga	101.620.000	101.620.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	85 DI	85 DI	49.300.000	49.300.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase akses air minum layak dengan jaringan perpipaan Persentase Masyarakat Maros Yang Memperoleh Layanan Kebutuhan Air Minum Sesuai SPM**	**43,8 Persen 100 Persen**	**43,8 Persen 100 Persen**	**6.291.020.000**	**6.291.020.000**				
1.03.03	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak**	**85883 RT**	**85883 RT**	**6.291.020.000**	**6.291.020.000**				

1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	50 Unit	20 Unit	1.015.100.000	1.015.100.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 Orang	30 Orang	32.570.000	32.570.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	1.112.750.000	1.112.750.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	2.112.750.000	2.112.750.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	20 SR	20 SR	2.017.850.000	2.017.850.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**70 Persen**	**70 Persen**	**2.161.900.000**	**2.861.900.000**				
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik**	**53000 KM**	**2 KM**	**2.161.900.000**	**2.861.900.000**				
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	5000 M	2700M	2.161.900.000	2.861.900.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.07	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase areal kawasan kumuh**	**6,11 Persen**	**6,11 Persen**	**2.403.680.000**	**2.488.680.000**				
1.03.07.2.01	**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Limbah Layak**	**82831 RT**	**82831 RT**	**2.403.680.000**	**2.488.680.000**				

1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	219 Rumah Tangga	219 Rumah Tangga	2.403.680.000	2.488.680.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan**	**3,07 Rasio**	**0,62 Rasio**	**22.545.075.000**	**24.554.544.680**				
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah Dokumen IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan**	**5000 Dokumen**	**5000 Dokumen**	**22.545.075.000**	**24.554.544.680**				
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	5 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung	1.300.000.000	1.300.000.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	21 Dokumen	23 Dokumen	21.245.075.000	23.254.544.680	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)**	**95,52 Persen**	**95,52 Persen**	**86.211.795.000**	**93.034.895.600**				
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang**	**985,77 KM**	**985,77 KM**	**86.211.795.000**	**93.034.895.600**				
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,5 KM	10 KM	5.650.000.000	8.034.079.600	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	3,5 KM	33 KM	69.451.795.000	71.451.795.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAK/DAU
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	1238,567 KM	1238,567 KM	60.000.000	60.000.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	5 Jembatan	1 Jembatan	600.000.000	600.000.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU

1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	9 Jembatan	10 Jembatan	9.900.000.000	12.339.021.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1238,567 KM	1238,567 KM	450.000.000	450.000.000	Kab. Maros	Kab. Maros		DAU
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Peningkatan Kontribusi Lapangan Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PDRB**	**11,76 Persen**	**11,76 Persen**	**628.977.000**	**628.977.000**				
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Memenuhi Standar Sesuai ketentuan yang berlaku**	**940 Orang**	**150 Orang**	**316.547.000**	**316.547.000**				
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga	5 Lembaga	98.490.000	98.490.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	10 Orang	10 Orang	13.050.000	13.050.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	450 Orang	150 Orang	205.007.000	205.007.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi Yang Tersedia**	**1 Sistem**	**1 Sistem**	**103.590.000**	**103.590.000**				
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	10.600.000	10.600.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	57.540.000	57.540.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Orang	5 Orang	15.450.000	15.450.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD

1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	20.000.000	20.000.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.11.2.03	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Jumlah Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Yang Diterbitkan**	**50 Rekomendasi**	**30 Rekomendasi**	**60.640.000**	**60.640.000**				
1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	100 Dokumen	30 Dokumen	23.730.000	23.730.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	36.910.000	36.910.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah Penyelenggara Jasa Konstruksi Yang Diawasi dan Dievaluasi**	**50 Badan Usaha**	**5 Badan Usaha**	**148.200.000**	**148.200.000**				
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	200 Paket Pekerjaan	100 Paket Pekerjaan	61.400.000	61.400.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	300 Bangunan Konstruksi	100 Bangunan Konstruksi	25.600.000	25.600.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	20 Lembaga	5 Lembaga	35.600.000	35.600.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	25.600.000	25.600.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD

1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**	**7,25 Persen**	**7,25 Persen**	**2.027.562.000**	**2.027.562.000**				
1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Luas areal pemanfaatan lahan yang ditetapkan dalam RTRW dan RRTR**	**6600 Ha**	**6600 Ha**	**1.057.651.000**	**1.057.651.000**				
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	3 Dokumen	909.076.000	909.076.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	900 Orang	900 Orang	148.575.000	148.575.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas Areal Ruang Daerah yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana peruntukan**	**6600 Ha**	**6600 Ha**	**41.050.000**	**41.050.000**				
1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	300 Layanan	50 Layanan	41.050.000	41.050.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Luas Ruang Daerah yang Dikendalikan Pemanfaatannya**	**6600 ha**	**6600 ha**	**928.861.000**	**928.861.000**				
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	830.636.000	830.636.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	30 Dokumen	57.625.000	57.625.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD
1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	50 Dokumen	1 Dokumen	40.600.000	40.600.000	Dinas PUTRPP	Dinas PUTRPP		PAD

2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.422.783.484**	**16.482.783.484**				
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**126.235.000**	**126.235.000**				
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**48.010.000**	**48.010.000**				
2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kasus Sengketa Tanah Yang Diselesaikan**	**40 Kasus**	**6 Kasus**	**48.010.000**	**48.010.000**				
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	6 Dokumen	29.750.000	29.750.000	Kab.Maros	Kab.Maros		PAD
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	3 Berita Acara	18.260.000	18.260.000	Kab.Maros	Kab.Maros		PAD
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase Penyelesaian Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Akibat Kelebihan Maksimum dan Absentee**	**100 Persen**	**100 Persen**	**46.905.000**	**46.905.000**				
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen hasil Koordinasi**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**46.905.000**	**46.905.000**				
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	24.310.000	24.310.000	Kab.Maros	Kab.Maros		PAD

2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	22.595.000	22.595.000	Kab.Maros	Kab.Maros		PAD
2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Luas Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai dengan RTRW**	**70 Persen**	**70 Persen**	**31.320.000**	**31.320.000**				
2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Hasil Koordinasi**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**31.320.000**	**31.320.000**				
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	31.320.000	31.320.000	Kab.Maros	Kab.Maros		PAD
2.15.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**6.296.548.484**	**16.356.548.484**				
2.15.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase layanan angkutan darat**	**38,04 Persen**	**38,04 Persen**	**6.256.933.484**	**16.316.933.484**				
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**300 Unit**	**1535 Unit**	**4.796.783.484**	**14.856.783.484**				
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	300 Unit	1535 Unit	3.872.113.484	13.897.113.484	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	300 Unit	300 Unit	924.670.000	959.670.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**1 Unit**	**1 Unit**	**7.115.000**	**7.115.000**				
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	7.115.000	7.115.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU

2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah fasilitas pelayanan parkir yang memiliki izin**	**50 Izin**	**50 Izin**	**10.000.000**	**10.000.000**				
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	10.000.000	10.000.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah kendaraan wajib uji berkala**	**500 Unit**	**3500 Unit**	**636.020.000**	**636.020.000**				
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	2 Unit	450.600.000	450.600.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	3500 Unit	3500 Unit	4.330.000	4.330.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3500 Dokumen	3500 Dokumen	75.600.000	75.600.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan	3 Laporan	16.580.000	16.580.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	14 Laporan	14 Laporan	9.890.000	9.890.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	11 Unit	11 Unit	32.120.000	32.120.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	20 Laporan	33.910.000	33.910.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU

2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan	4 Laporan	12.990.000	12.990.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**4 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**757.155.000**	**757.155.000**				
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	135.400.000	135.400.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	8.755.000	8.755.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	613.000.000	613.000.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rekomendasi Andalalin yang dikeluarkan**	**30 Rekomendasi**	**30 Rekomendasi**	**49.860.000**	**49.860.000**				
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	4 Laporan	9.460.000	9.460.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 Orang	2 Orang	30.000.000	30.000.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	12 Laporan	10 Laporan	10.400.000	10.400.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU

2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Arus Penumpang Angkutan Penyeberangan Sungai Yang Melalui Dermaga/ Pelabuhan Perahu Penyeberangan**	**50 Persen**	**50 Persen**	**39.615.000**	**39.615.000**				
2.15.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah izin usaha angkutan laut yang diterbitkan**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**1.210.000**	**1.210.000**				
2.15.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1.210.000	1.210.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.03.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang diterbitkan**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**435.000**	**435.000**				
2.15.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	2 Laporan	435.000	435.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.03.2.08	**Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal**	**Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang terbitkan**	**4 Rekomendasi**	**4 Rekomendasi**	**1.155.000**	**1.155.000**				

2.15.03.2.08.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	1 Laporan	1 Laporan	1.155.000	1.155.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.03.2.12	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang memiliki izin pembangunan dan operasi**	**4 Rekomendasi**	**4 Rekomendasi**	**1.435.000**	**1.435.000**				
2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	10 Laporan	4 Laporan	1.435.000	1.435.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.03.2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Jumlah pelabuhan yang memiliki izin pembangunan dan operasi**	**7 Rekomendasi**	**4 Rekomendasi**	**35.380.000**	**35.380.000**				
2.15.03.2.13.0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di bangunan	2 Unit	2 Unit			Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.03.2.13.0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	1 Unit	1 Unit	32.080.000	32.080.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU
2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2 Laporan	2 Laporan	3.300.000	3.300.000	Kab.Maros	Kab.Maros		DAU

BAB. IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana kerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros guna mewujudkan Prasarana dan Sarana Dasar Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Maros Yang Berhasil Guna dan Berdaya Guna Mewujudkan Masyarakat Maros yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros di urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan Perhubungan dan urusan Pertanahan.

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN MAROS

KATA PENGANTAR

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

Kepala Badan Kesbangpol sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwuju dan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Maros, 31 Juli 2024

KEPALA BADAN

H. JUFRI, S. Pd., M. Si

Pangkat : Pembina Tingkat 1/ IVb

Nip : 196090061998021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan CapaianRenstra..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan …….. 22

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 26

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 27

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...43

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 44

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 44

3.2 Tujuan dan Sasaran 44

3.3 Program dan Kegiatan 46

BAB IV PENUTUP…… **84**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022 ...11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 304 23
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 305 28
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 43
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 46
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.....47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanahkan Pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Sehubungan dengan itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros sebagai salah satu instansi Kabupaten Maros menyusun dokumen perencanaan dalam periode satu tahun ke depan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada berupa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program kegiatan serta sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Maros Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut : (1). Tahap Persiapan; (2). Penyusunan rancangan awal Perubahan Renja PD; (3) Penyusunan Rancangan; (4). Penyusunan rancangan Akhir; (5). Penetapan Perubahan Renja PD.

Berdasarkan uraian diatas, Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2024 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros dalam satu tahun anggaran untuk menjawab tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja, serta pengorganisasian perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor

72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Maros Nomor Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6);

21. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 34); dan
22. Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program, kegiatan, dan sub kegiatan;
b. Menjadi dasar Penyusunan RKA Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Kabupaten Maros tahun anggaran 2025;
c. Sebagai dasar penyusunan laporan akuntabiltas kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yang menjelaskan arah dan kebijakan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Program dan Kegiatan yang memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. P E N U T U P

Bab ini berisikan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KESBANGPOL

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Lalu.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesbangpol merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Kesbangpol. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Badan Kesbangpol ini menyajikan pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol selama Tahun 2023.

Hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sampai dengan Tahun Lalu dan Realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada laporan realisasi APBD Tahun-tahun Sebelumnya.

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Maros

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		**Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**															**KESBANG POL**
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**16.082.113.795**	**100**	**9.649.268.277**	**100**	**3.216.422.759**		**1.195.658.091**	**0,00**	**37,17**	**50**	**10.844.926.368**	**50**	**67**	**KESBANG POL**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**40**	**265.415.500**	**24**	**159.249.300**	**8**	**53.083.100**		**24.008.910**	**0,00**	**45,23**	**24**	**183.258.210**	**60**	**69**	**KESBANG POL**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	10	11.200.000	6	6.720.000	2	2.240.000		2.240.000	0,00	100,00	6	8.960.000	60	80	KESBANGPOL
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	18.200.000	3	10.920.000	1	3.640.000		3.600.000	0,00	98,90	3	14.520.000	60	80	KESBANGPOL
	Koordinasi dan penyusunan dokumen	Koordinasi dan penyusunan dokumen	Koordinasi dan penyusunan dokumen	5	29.320.500	3	17.592.300	1	5.864.100		0	0,00	0,00	3	17.592.300	60	60	KESBANGPOL

	Perubahan RKA SKPD	Perubahan RKA SKPD	Perubahan RKA SKPD															
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5	11.700.000	3	7.020.000	1	2.340.000		2.265.000	0,00	96,79	3	9.285.000	60	79	KESBANGPOL
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	5	21.225.000	3	12.735.000	1	4.245.000		0	0,00	0,00	3	12.735.000	60	60	KESBANGPOL
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	5	143.270.000	3	85.962.000	1	28.654.000		15.903.910	0,00	55,50	3	101.865.910	60	71	KESBANGPOL
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	30.500.000	3	18.300.000	1	6.100.000		0	0,00	0,00	3	18.300.000	60	60	KESBANGPOL
	Administrasi keuangan perangkat daerah	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**195**	**14.489.215.795**	**117**	**8.693.529.477**	**39**	**2.897.843.159**	**194,00**	**1.104.899.954**	**497,44**	**38,13**	**311**	**9.798.429.431**	**159**	**68**	**KESBANGPOL**
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	1.890	13.650.935.795	1.134	8.190.561.477	378	2.730.187.159	189,00	1.032.149.954	50,00	37,81	1.323	9.222.711.431	70	68	KESBANGPOL
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	70	800.250.000	42	480.150.000	14	160.050.000	5,00	72.750.000	35,71	45,45	47	552.900.000	67	69	KESBANGPOL
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	15.965.000	3	9.579.000	1	3.193.000	0,00	0	0,00	0,00	3	9.579.000	60	60	KESBANGPOL
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	60	22.065.000	36	13.239.000	12	4.413.000	0,00	0	0,00	0,00	36	13.239.000	60	60	KESBANGPOL
	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	**Administrasi kepegawaian perangkat dasrah**	**Administrasi kepegawaian perangkat dasrah**	**225**	**60.000.000**	**135**	**36.000.000**	**45**	**12.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**135**	**36.000.000**	**60**	**60**	**KESBANGPOL**
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	225	60.000.000	135	36.000.000	45	12.000.000	0,00	0	0,00	0,00	135	36.000.000	60	60	KESBANGPOL

	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Administrasi umum perangkat daerah**	**7**	**954.822.500**	**21**	**572.893.500**	**7**	**190.964.500**	**24**	**53.629.227**	**342,86**	**28,08**	**45**	**626.522.727**	**643**	**66**	**KESBANGPOL**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25	7.375.000	15	4.425.000	5	1.475.000	5	1.475.000	100,00	100,00	20	5.900.000	80	80	**KESBANGPOL**
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	5	26.325.000	3	15.795.000	1	5.265.000	0	0	0,00	0,00	3	15.795.000	60	60	KESBANGPOL
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	70	301.572.500	42	180.943.500	14	60.314.500	14	9.860.000	100,00	16,35	56	190.803.500	80	63	KESBANGPOL
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	**10**	**15.530.000**	**6**	**9.318.000**	**2**	**3.106.000**	**0**	**500.000**	0,00	16,10	6	9.818.000	60	63	**KESBANGPOL**
	Penyediaan bahan/material	Penyediaan bahan/material	Penyediaan bahan/material	5	65.000.000	3	39.000.000	1	13.000.000	0	0	0,00	0,00	3	39.000.000	60	60	**KESBANGPOL**
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	5	101.700.000	3	61.020.000	1	20.340.000	0	0	0,00	0,00	3	61.020.000	60	60	KESBANGPOL
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50	437.320.000	30	262.392.000	10	87.464.000	5	41.794.227	50,00	47,78	35	304.186.227	70	70	KESBANGPOL
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**3**	**162.660.000**	**3**	**97.596.000**	**3**	**32.532.000**	**4,00**	**13.120.000**	**133,33**	**40,33**	**4**	**110.716.000**	**117**	**68**	KESBANGPOL
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	5	5.160.000	3	3.096.000	1	1.032.000	0,00	0	0,00	0,00	3	3.096.000	60	60	KESBANGPOL
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5	19.500.000	3	11.700.000	1	3.900.000	1,00	1.620.000	100,00	41,54	4	13.320.000	80	68	KESBANGPOL
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	138.000.000	36	82.800.000	12	27.600.000	3,00	11.500.000	25,00	41,67	39	94.300.000	65	68	KESBANGPOL
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**2**	**150.000.000**	**2**	**90.000.000**	**2**	**30.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1**	**90.000.000**	**50**	**60**	**KESBANGPOL**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas	10	50.000.000	6	30.000.000	2	10.000.000	0,00	0	0,00	0,00	6	30.000.000	60	60	KESBANGPOL

	atau kendaraan dinas jabatan	atau kendaraan dinas jabatan	atau kendaraan dinas jabatan															
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	5	100.000.000	3	60.000.000	1	20.000.000	0,00	0	0,00	0,00	3	60.000.000	60	60	**KESBANGPOL**
	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan		**Persentase Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pembauran kebangsaan**															**KESBANGPOL**
			Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara															**KESBANGPOL**
	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	**Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan**	**Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100**	**7.138.606.400**	**100**	**1.791.208.500**	**100**	**1.086.244.000**	**100,00**	**73.597.200**	**100,00**	**6,78**	**100**	**1.864.805.700**	**100**	**26**	**KESBANGPOL**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**60**	**7.138.606.400**	**36**	**1.791.208.500**	**12**	**1.086.244.000**	**337,00**	**73.597.200**	**2808,33**	**6,78**	**373**	**1.864.805.700**	**622**	**26**	**KESBANGPOL**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	250	1.849.866.650	37	1.764.378.500	50	28.496.050	0,00	0	0,00	0,00	37	1.764.378.500	15	95	KESBANGPOL
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan	1.000	72.476.000	0	0	200	14.495.200	85,00	6.547.200	42,50	45,17	85	6.547.200	9	9	KESBANGPOL

	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan															
	Pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Pembentukan dan penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	250	79.718.750	0	20.000.000	50	15.943.750	0,00	0	0,00	0,00	0	20.000.000	0	25	KESBANGPOL
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	20	155.566.750	0	0	4	31.113.350	2,00	10.000.000	50,00	32,14	2	10.000.000	10	6	KESBANGPOL
	Pembentukan paskibraka	Pembentukan paskibraka	Jumlah Paskibraka	1.250	4.851.795.000	0	0	250	970.359.000	250,00	57.050.000	100,00	5,88	250	57.050.000	20	1	KESBANGPOL
	Pembinaan lanjutan kepada purna paskibraja duta pancasila	Pembinaan lanjutan kepada purna paskibraja duta pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	25	129.183.250	0	0	5	25.836.650	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	KESBANGPOL
	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya		**Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah**															**KESBANG POL**

	stabilitas kehidupan berdemokrasi		**Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas**															**KESBANG POL**
	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	**Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik**	**Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik**	**100**	**167.993.903.450**	**100**	**2.055.521.414**	**100**	**33.598.780.690**	**100**	**2.345.458.000**	**100,00**	**6,98**	**100**	**4.400.979.414**	**100**	**3**	**KESBANG POL**
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**20**	**167.993.903.450**	**12**	**2.055.521.414**	**4**	**33.598.780.690**	**1**	**2.345.458.000**	**25,00**	**6,98**	**7**	**4.400.979.414**	**33**	**3**	**KESBANG POL**
	Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Penyusunan program kerja dibidang Pendidikan politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	150	38.850.000	0	0	50	7.770.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	KESBANGPOL

	Pemantauan Situasi Politik	Pemantauan Situasi Politik	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik															
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di daerah	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantau Situasi Politik di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	15.000	100.761.032.070	0	0	5.000	33.587.010.690	5000	2.345.458.000	100,00	6,98	5.000	2.345.458.000	33	2	KESBANGPOL
	Pelaksanaan tugas paskibraka	Pelaksanaan tugas paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	6	20.000.000	0	0	2	4.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	KESBANGPOL
	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam toleransi, komunikasi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan mengantisipasi potensi konflik.		**Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik**															**KESBANG POL**
			Persentase Pembinaan terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam menjaga Stabilitas Keamanan dan Menjaga kerukunan Umat Beragama															**KESBANG POL**
	Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemsyarakatan	**Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemsyarakatan**	**Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas**	**100**	**583.735.000**	**0**	**0**	**100**	**142.098.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**KESBANG POL**
	Perumusan Kebijakan Teknis	**Perumusan Kebijakan Teknis**	**Jumlah Kebijakan Teknis dan**	**5**	**583.735.000**	**0**	**0**	**1**	**142.098.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**KESBANG POL**

	dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**																
	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan oras dan ormas asing di daerah	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan oras dan ormas asing di daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	500	583.735.000	96	18.827.500	100	116.747.000	0	0	0,00	0,00	96	18.827.500	19	3	KESBANGPOL
	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekoomi, sosial dan budaya	**Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekoomi, sosial dan budaya**	**Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya**	**100**	**4.539.100.000**	**100**	**272.161.600**	**100**	**18.731.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**50**	**272.161.600**	**50**	**6**	**KESBANGPOL**
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya**	**750**	**4.464.100.000**	**105**	**272.161.600**	**150**	**6.620.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**105**	**272.161.600**	**14**	**6**	**KESBANGPOL**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	750	4.464.100.000	77	253.511.600	150	892.820.000	0	356.305.500	0,00	39,91	77	609.817.100	10	14	KESBANGPOL
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan	500	75.000.000	120	12.150.000	100	892.820.000	0	356.305.500	0,00	39,91	120	368.455.500	24	491	KESBANGPOL

	Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10	75.000.000	0	6.500.000	2	15.000.000	0	0	0,00	0,00	0	6.500.000	0	9	KESBANGPOL
	Peningkatan kewaspadaan nasional dan pembingkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	**Peningkatan kewaspadaan nasional dan pembingkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial**	**Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyaraat Dalam Mengantisipasi Konflik**		**0**	**10,75**	**1.040.434.450**	**100**	**18.227.000**	**100**	**1.823.500**	**100,00**	**10,00**	**111**	**1.042.257.950**	**0**	**0**	**KESBANGPOL**
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**		**0**	**128**	**1.040.434.450**	**15**	**859.593.000**	**4**	**354.482.000**	**26,67**	**41,24**	**132**	**1.394.916.450**	**0**	**0**	**KESBANGPOL**
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang	500	0	0	0	100		0		0,00	#DIV/0!	0	0	0	0	KESBANGPOL

	Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah															
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10	0	45	95.273.000	2		1		50,00	#DIV/0!	46	95.273.000	460	0	KESBANGPOL
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum korodinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	60	0	26	885.526.400	12		3		25,00	#DIV/0!	29	885.526.400	48	0	KESBANGPOL

Berdasarkan Hasil Evaluasi yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan pada Badan kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 diperoleh hasil sebagai Berikut :

1. Program yang dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 6 Program, dengan rincian program yang mencapai target sebanyak 2 program dan melampaui target sebanyak 4 program.
2. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 9 Kegiatan, dengan rincian; kegiatan yang mencapai Target Sebanyak 7 Kegiatan, sedangkan kegiatan yang tidak mencapai target sebanyak 2 kegiatan
3. Subkegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 35 Sub kegiatan, dengan rincian Sub kegiatan yang mencapai Target Sebanyak 26 subkegiatan, sub kegiatan yang tidak mencapai target sebanyak 7 sub kegiatan dan sub kegiatan yang melampaui target sebanyak 2 sub kegiatan.

Kegiatan dan sub kegiatan yang tidak mencapai target disebabkan adanya pengurangan anggaran pada saat perubahan anggaran, sedangkan target yang ditetapkan dilakukan perubahan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama sebanyak 6 Indikator. Berdasarkan Capaian Kinerja Tahun 2024, Indikator yang tercapai sebanyak 7 Indikator, sedangkan Indikator yang tidak tercapai sebanyak 7 Indikator. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Maros

No	Indikator	SATUAN	IKU	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
					2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Persentase Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pembauran kebangsaan	Persen	V	-	3.33	3,50	4,00	5,50	6,00	4,00	99	5,50	6,00	
2	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara	Persen	V	-	4.43	5,00	5,50	6,00	6,50	5,45	96	6,00	6,50	
3	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persen	V	-	2.14	3,00	3,75	4,25	5,00	3,15	82	4,25	5,00	

No	Indikator	SATUAN	IKU	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Penting
					2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjaga kerukunan umat beragama	Persen	V	-	2.26	3,00	3,50	4,00	4,50	3,25	100	4,00	4,50	
5	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah	Persen	V	-	0.11	0,25	0,50	0,90	1,00	0,35	100	0,90	1,00	
6	Persentase Pembinaan LSM dan Ormas	Persen	V	-	16,81	20,00	25,00	30,00	35,00	28,00	95	30,00	35,00	
7	Persentase LSM Aktif	Persen	-	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK RPJMD

TABEL 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4 x 100)	9 = (7/5 x 100)
1	Persentase Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pembauran kebangsaan	Persen	3,5	4	4	99	114,3	2475,0
2	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara	Persen	5	5,5	5,45	96	109,0	1745,5
3	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Persen	3	3,75	3,15	82	105,0	2186,7
4	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjaga kerukunan umat beragama	Persen	3	3,5	3,25	100	108,3	2857,1
5	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah	Persen	0,25	0,5	0,35	100	140,0	20000,0
6	Persentase Pembinaan LSM dan Ormas	Persen	20	25	28	95	140,0	380,0
7	Persentase LSM Aktif	Persen	100	100	100	100	100,0	100,0
TOTAL CAPAIAN KINERJA							115,32	4249,18

2.4 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tabel 2.4
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Peluang	Rekomendasi
1	Tidak Masalah	Tidak Ada Hambatan	Persentase Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pembauran kebangsaan	Letak strategis Kabupaten Maros sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dapat mempercepat perkembangan dan kemajuan pembangunan daerah dan penyerapan informasi yang dapat mendukung terciptanya Pemerintahan yang demokratis	Perangkat Daerah Melakukan kegiatan pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Kebangsaan
2	Tidak Masalah	Tidak Ada Hambatan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara	Percepatan demokratisasi warga masyarakat Kabupaten Maros yang majemuk dengan latar belakang berbagai etnis dan suku bangsa serta agama .	Perangkat Daerah Melakukan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara
3	Tidak Masalah	Tidak Ada Hambatan	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	Keberadaan partai poltik, ormas/LSM dan OKP sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah sebagai daerah otonom	Perangkat Daerah Melakukan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik
4	Tidak Masalah	Tidak Ada Hambatan	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam menjaga stabilitas	adanya pembinaan LSM dan Ormas dapat mengurangi tingginya tinggkat pengangguran	Perangkat Daerah Melakukan pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam menjaga stabilitas

			keamanan dan menjaga kerukunan umat beragama		keamanan dan menjaga kerukunan umat beragama
5	Tidak Masalah	Tidak Ada Hambatan	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah	Adanya Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah	Perangkat Daerah Melakukan Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah
6	Tidak Masalah	Tidak Ada Hambatan	Persentase Pembinaan LSM dan Ormas	Adanya Pembinaan LSM dan Ormas	Perangkat Daerah Melakukan Pembinaan LSM dan Ormas
7	Tidak Masalah	Tidak Ada Hambatan	Persentase LSM Aktif	LSM Aktif	Perangkat Daerah Melakukan Persentase LSM Aktif

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maros

Adapun perbandingan antara RKPD 2024 dengan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2024 sebagaimana tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Kesbangpol				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Badan Kesbangpol		**8.486.500.000**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol			**70.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Badan kesbangpol			***70.000.000***	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan OPD	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah dokumen perencanaan OPD	1 Dokumen	5.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penyusunan dokumen perubhana RKA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penyusunan dokumen perubhana RKA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Peubahan DPA- SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penyusunan dokumen perubhana DPA SKPD	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah penyusunan dokumen perubhana DPA SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja OPD	1	Dokumen	28.654.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja OPD	1 Dokumen	28.654.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Juimlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.000.000	
8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	5.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	100	Jumlah Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	
9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	5.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	5.000.000	

10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Berita Acara	10.000.000	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	10.000.000	
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	
12	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Badan Kesbangpol	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1	Subtansi	5.000.000	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Badan Kesbangpol	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Subtansi	5.000.000	

13	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Badan Kesbangpol	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1	Berita Acara	5.000.000	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Badan Kesbangpol	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara	5.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol				**3.201.000.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Badan Kesbangpol			***3.201.000.000***	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Gaji Dan Tunjangan	45		3.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Gaji Dan Tunjangan	45 Orang	3.000.000.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	5.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.000.000	5.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10	Dokumen	180.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	180.000.000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	6.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	6.000.000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen laporan Keuangan bulanan/Semesteran	12	Laporan	10.000.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD		Jumlah Dokumen laporan Keuangan bulanan/Semesteran	12 Laporan	10.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					10.000.000					10.000.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Kesbangpol				**35.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Badan Kesbangpol			***35.000.000***	
	Pengadaan pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	***45***	***Paket***	**20.000.000**					**20.000.000**	

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	***1***	***Dokumen***	**5.000.000**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	***1 Dokumen***	**5.000.000**	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	***1***	***Dokumen***	**5.000.000**	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	***1 Dokumen***	**5.000.000**	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	***1***	***Dokumen***	**5.000.000**	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	***1 Dokumen***	***5.000.000***	
	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah										**291.000.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah paket komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	5	Paket	6.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan	2	Paket	85.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Bahan Logistik Kantor	2 Paket	85.000.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1	Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1 Paket	5.000.000	
	Penyediaan Bahan Material	Badan Kesbangpol	Jumlah paket Bahan/Material yang di sediakan	1	Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Material		Jumlah paket Bahan/Material yang di sediakan	1 Paket	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	10.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	
	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol									40.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan Penyediaan dan jasa pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12	laporan	30.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan Penyediaan dan jasa pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	12 Laporan	30.000.000	

	8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Kesbangpol									**195.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Badan Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	20.000.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN										1.304.500.000	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	Dokumen	5.000.000	**Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan**	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2 Dokumen	5.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3	Dokumen	10.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3 Dokumen	10.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan ,bela negara,Karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	100	Orang	28.500.000	Pelaksanaan Kebijakan di idang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka tunggal ika dan sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan ,bela negara,Karakter bangsa,pembauran kebangsaan,bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	100 Orang	28.500.000	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi	80	Orang	15.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi	80 Orang	15.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4	Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	20.000.000	

	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Badan Kesbangpol	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	100	Keluarga	20.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Badan Kesbangpol	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter	100 Keluarga	20.000.000	
	Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Badan Kesbangpol	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2	Dokumen	35.000.000	Pembinaan Terhadap Aktifitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Badan Kesbangpol	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	2 Dokumen	35.000.000	
	Pembentukan Paskibraka	Badan Kesbangpol	Jumlah Paskibraka	130	Orang	1.100.000.000	Pembentukan Paskibraka	Badan Kesbangpol	Jumlah Paskibraka	130 Orang	1.100.000.000	
	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Badan Kesbangpol	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	2	Dokumen	26.000.000	Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Badan Kesbangpol	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	26.000.000	
	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Badan Kesbangpol	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	2	Dokumen	25.000.000	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Badan Kesbangpol	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	2 Dokumen	25.000.000	

	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Badan Kesbangpol	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	50	Orang	20.000.000	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Badan Kesbangpol	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	50 Orang	20.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA										***225.000.000***	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	**5.000.000**	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	**5.000.000**	

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2	Dokumen	**5.000.000**	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	**10.000.000**	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengh	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	100	Orang	150.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Pengh	Badan Kesbangpol	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	100 Orang	150.000.000	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang -Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	100	Orang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, sosial dan Budaya	100 Orang	50.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2	Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Badan Kesbangpol	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 Laporan	10.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK										***1.955.000.000***	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	5.000.000	

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	5.000.000	

	Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaanpemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	1000	Orang	1.900.000.000	Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaanpemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	1000 Orang	1.900.000.000	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75	Orang	15.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75 Orang	15.000.000	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2	Laporan	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	10.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Badan kesbangpol	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi	2	Kegiatan	20.000.000	Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Badan kesbangpol	Jumlah peserta pelaksanaan koordinasi	2 Kegiatan	20.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN										85.000.000	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	5.000.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di daerah	100	Orang	50.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Asing di daerah	100 Orang	5.000.000	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80	Orang	15.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 Orang	15.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2	laporan	10.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2 Laporan	10.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL										**1.075.000.000**	

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	dokumen	10.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	Dokumen	10.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Badan Kesbangpol	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	10.000.000	

							Penanganan Konflik di Daerah					
	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	Orang	100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100.000.000	

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan A	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80	orang	15.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan A	Badan Kesbangpol	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80 Orang	15.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2	Laporan	15.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Badan Kesbangpol	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	15.000.000	

							Penanganan Konflik di Daerah					
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen	925.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota	Badan Kesbangpol	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	925.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Assosiasi-assosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, akan tetapi untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros ***"tidak ada usulan".***

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Maros

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	USULAN	VOLUME	LOKASI	KET
-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan, maka dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun mulai dari rencana pembangunan jangka panjang RPJPD, RPJMD dan Renstra, dan rencana pembangunan jangka pendek (RKPD) yang diaktualisasikan melalui penyusunan Renja SKPD, kemudian diimplementasikan kedalam RAPBD, maka Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Tahun 2024 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Perubahan Renja pun harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kedudukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang di pimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.

Terkait dengan kebijakan pembangunan nasional, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku lembaga teknis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terkait dengan seluruh kebijakan nasional yang termuat dalam Prioritas Nasional, Fokus Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros.

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros., maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai seperti yang nampak pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target 2025
1.	Meningkatkan Tata kelola kelembagaan Bakesbangpol Yang Baik	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
			Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)	3,0
2.	Meningkatnya kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan Pembauran kebangsaan.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan	Persentase Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan pembauran kebangsaan Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara	0,33 4,43
3	Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam toleransi, komunikasi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan mengantisipasi potensi konflik.	Persentase pembinaan terhadap Aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik. Persentase Pembinaan terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam menjaga Stabilitas Keamanan dan Menjaga kerukunan Umat Beragama	2,14 0,11
4	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya	Persentase Pembinaan Politik terhadap Aparatur dan Masyarakat di Daerah	0,11
			Persentase pembinaan	16,81

		stabilitas kehidupan berdemokrasi	terhadap LSM dan Ormas	

3.3. Program Dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

I. Pokok Permasalahan

- Bahwa Belanja Yang tercantum pada Rincian Belanja Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka tidak mencukupi pada rekening belanja perjalanan Dinas Luar Provinsi
- Terdapata Kelebihan Anggaran pada Belanja Jasa Kantor dari Nilai Standar Harga Satuan
- Terdapat kelebihan belanja perjalanan Dinas biasa pada Program Penguatan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Penguatan Karakter
- Terdapat bebebrapa sub kegiatan harus dilakukan penyesuaian dikarenakan terdapat perubahan komposisi perolehan suara pemilu tahun 2024
- Terdapat Beberapa sub kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian dikarenakan Anggaran yang ada tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan jamuan tamu

II. Analisis dan Alasan Perubahan

- Pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Material Kendaraan Hias dilakukan pengurangan pada belanja Barang pakai habis untuk dialihkan pada Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor souvenir dikarenakan tidak terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut
- Pada sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD (Belanja Makanan MInuman) dialihkan pada belanja perjalanan Dinas Biasa dikarenakan kurangnya anggaran pada perjalanan dinas
- Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum serta pemantauan situasi politik di daerah.dilakukan penambahan anggaran dikarenakan terdapat perubahan komposisi perolehan suara hasil pemilu Tahun 2024.
- Bahwa pergeseran anggaran ini dapat terealisasikan agar pelaksanaan sub kegiatan dapat terlaksana yaitu sub kegiatan pembentukan paskibraka pada rekening belanja perjalanan dinas

diluar provinsi yang diperuntukkan kepada paskibraka Kabupaten Maros Tahun 2024.

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN MAROS

NO	KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
				Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
	8.01.01	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		Persen	Persen	**38.942.980.949**	**39.568.149.135**				
	8.01.01.2.01	**Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	Dokumen	Dokumen	**53.083.100**	**53.083.100**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	2.240.000	2.240.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.640.000	3.640.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.864.100	4.579.100	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

	8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.340.000	2.340.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.245.000	2.530.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8.01.02.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	28.654.000	31.654.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Laporan	6.100.000	6.100.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	39 Dokumen	39 Dokumen	**2.897.843.159**	**2.897.843.159**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378 Orang/ Bulan	378 Orang/ Bulan	2.730.187.159	2.730.187.159	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	DAU

	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 dokumen	14 dokumen	160.050.000	160.050.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	3.193.000	3.193.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	DAU
	8 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4.413.000	4.413.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanaka	45 Orang	45 Orang	12.000.000	12.000.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.05 0002	pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya	45 Paket	45 Paket	12.000.000	12.000.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	7 layanan	7 Layanan	190.964.500	190.964.500	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

	8 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	1.475.000	1.475.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.265.000	5.265.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket	60.314.500	60.314.500	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.106.000	3.106.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.000.000	3.000.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	20.340.000	30.340.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	10 Laporan	87.464.000	87.464.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

	8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	3 Jenis	3 Jenis	Rp 32.532.500	Rp 32.532.500	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1.032.500	1.032.500	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.900.000	3.900.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	27.600.000	27.600.000	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	2 Jenis	2 Jenis	30.000.000	30.000.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	10.000.000	10.000.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	20.000.000	20.000.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

	8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persen	100 Persen			Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	12 dokumen	1.086.244.000	1.661.279.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	50 Orang	28.496.050	23.186.050	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 02 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	200 Orang	14.495.200	14.495.200	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 02 2.01 0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek	50 Keluarga	50 Keluarga	15.943.750	10.633.750	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

			Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								
	8 01 02 2.01 0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 Dokumen	4 Dokumen	31.113.350	26.813.350	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 02 2.01 0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	250 Orang	250 Orang	970.359.000	1.562.014.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 02 2.01 0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	5 Laporan	5 Laporan	25.836.650	24.136.650	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi, Etika dan Budaya Politik	100 Persen	100 Persen	33.598.780.690	33.633.913.876	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

	8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan danPartai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 dokumen	4 dokumen	33.598.780.690	33.633.913.876	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 03 2.01 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	50 Orang	50 Orang	7.770.000	7.770.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

	8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	5000 Orang	5000 Orang	33.587.010.690	33.622.143.876	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 03 2.01 0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4.000.000	4.000.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Terhadap LSM dan Ormas	100 Persen	100 Persen	6.615.000	6.615.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	1 Dokumen	6.615.000	6.615.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 04 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	100 Orang	100 Orang	6.615.000	6.615.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

			Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah								
	8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya	100 Persen	100 Persen	142.098.000	142.098.000	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan ketahanan ekonomi, social dan budaya	150 Orang	150 Orang	142.098.000	142.098.000	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 05 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	150 Orang	150 Orang	116.747.000	116.747.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
	8 01 05 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	18.731.000	18.731.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

	8 01 05 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daera	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	2 Laporan	2 laporan	6.620.000	6.620.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
	8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyaraat Dalam Mengantisipasi Konflik	100 Persen	100 Persen	892.820.000	907.820.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
	8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	15 Dokumen	15 Dokumen	892.820.000	907.820.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
	8 01 06 2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100	15.000.000	30.000.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD

		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	2	18.227.000	18.227.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum korodinasi pimpinan daerah kabupaten/kota	Dokumen	12	859.593.000	859.593.000	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

BAB IV
P E N U T U P

5.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Tahun 2025 ini mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 – 2024 serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros (2019-2024). Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bersama dengan seluruh Bidang pada B`akesbangpol Kabupaten Maros mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. Melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

5.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Prafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. JEND. SUDIRMAN, KOMPLEKS KANTOR BUPATI MAROS, KEL. PETTUADAE, KEC. TURIKALE, KAB. MAROS

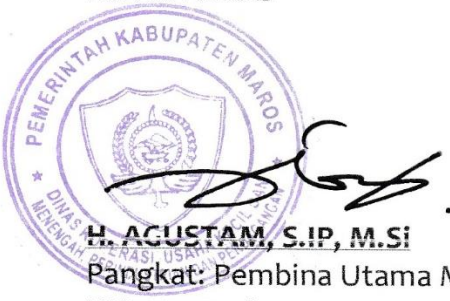
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta beberapa program/kegiatan yang sifatnya strategis dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.

Maros, 13 Juli 2024
KEPALA DINAS



H. AGUSTAM, S.IP, M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 197308201992021001

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.1. Landasan Hukum 2
1.2. Maksud Dan Tujuan 5
1.3. Sistematika Penulisan 5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 34
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 39
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 45
2.5. Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 95
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 100
BAB IV PENUTUP 146
1.1. Catatan Penting Yang Perlu Dapat Perhatian 146
1.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 146
1.3. Rencana Tindak Lanjut 147

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah mengatur dan mengamanahkan secara lugas bahwa Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja perangkat daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah. Renja disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal, rancangan, dan rancangan akhir, serta tahap penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 merupakan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Maros tahun 2024. Dengan demikian, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan program RKPD secara keseluruhan, dan pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2024, dan akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam satu tahun anggaran untuk menjawab tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja, serta pengorganisasian perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

1.1. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasidan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 13);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahn Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Maros Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros(Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 14);
26. Peraturan Bupati Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor ….).

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra perangkat daerah Tahun 2021-2026, sebagai pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tujuan disusunnya Dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, kebijakan di dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024;
2. sebagai acuan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024;
3. sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan

RKPD, sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2024 Triwulan II

Bab ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dan capaian renstra hingga tahun 2024; Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Isu-isu terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Review terhadap rancangan awal RKPD, serta Penelaahan usulan program dan kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bab ini menjelaskan rencana kerja dan pendanaan indikatif program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ung Tahun Anggaran 2024.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan PD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pencapaian kinerja pelayanan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Sampai bulan Mei 2024 disajikan berikut ini:

a. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan sebanyak 11 dari 11 program atau 100%. Sedangkan realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan sebanyak 20 dari 20 kegiatan atau 100%, dan realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan sebanyak 48 dari 48 kegiatan atau 100%.
b. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakansebanyak 0 dari 11 program atau 0%. Sedangkan realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakan sebanyak 0 dari 20 kegiatan atau 0%, dan realisasi sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran yang direncanakansebanyak 0 dari 48 kegiatan atau 0%.
c. Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan sebanyak 0 dari 11 program atau 0%. Sedangkan realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan sebanyak 0 dari 20 kegiatan atau 0%, dan realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang direncanakan sebanyak 0 dari 48 kegiatan atau 0%.
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan salah satunya adalah karena terbatasnya anggaran yang tersedia atau beberapa pos anggaran difokuskan ke pencapaian target yang lebih utama misalnya pencapaian target kontrak politik Bupati dan Wakil Bupati Maros, selain itu terdapat kondisi kendala yang bersifat teknis dan beberapa

lainnya belum mencapai jadwal anggaran kas yang telah disusun. Dan belum ada faktor-faktor penyebab terepenuhinya target kinerja program/kegiatan dan melebihinya target kinerja program/kegiatan disebabkan karena beberapa belum ada yang mencapai target;

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra adalah belum sepenuhnya memenuhi target sampai saat ini sehingga persentase ketercapaian target Renstra masih perlu didorong sampai akhir tahun dan juga pada tahun berikutnya; dan
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan memonitoring dan mengevaluasi secara berkala hasil kinerja dalam upaya menentukan strategi perencanaan dan penganggaran menggunakan seluruh sumber daya yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan lebih optimal.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai Tahun 2024
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Diskopurindag										
	Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Yang Professional dan Berkinerja Tinggi	**Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros**	**Nilai Indeks**	**61**	**62,85**	**56**	**62,85**	112,23	**71**	65,57	107,49
	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros	**Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan**	**Nilai Level**	**73**	**64,66**	**71**	**65,56**	92,34	**73**	67,74	92,79
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2.17.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**										
2.17.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	100,00	**100**	**60**	60,00
2.17.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	120	24	24	24	100,00	24	72	60,00
2.17.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	2	2	2	100,00	2	6	60,00
2.17.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
2.17.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2.17.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2.17.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2.17.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	6	6	6	100,00	6	18	60,00
2.17.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
2.17.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	354	34	34	34	100,00	34	102	28,81
2.17.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	320	854	854	854	100,00	896	2604	813,75
2.17.01.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
2.17.01.2.02.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
2.17.01.2.02.0006.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	90	18	18	18	100,00	18	54	60,00
2.17.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	255	12	13	13	100,00	13	38	14,90
2.17.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	5	0	1	1	100,00	1	2	40,00
2.17.01.2.03.0004.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
2.17.01.2.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	Laporan	60	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
03.0006.	pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD									
2.17.01.2. 03.0007.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2. 04.	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	604	12	12	12	100,00	12	36	5,96
2.17.01.2. 04.0001.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2. 04.0002.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2. 04.0003.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	130	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2. 04.0004.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	130	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2. 04.0005.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	102	12	12	12	100,00	12	36	35,29
2.17.01.2. 04.0006.	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	130	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2. 04.0007.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	102	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2. 05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Orang**	319	63	64	64	100,00	51	178	55,80
2.17.01.2. 05.0001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2. 05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5	0	1	1	100,00	0	1	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
2.17.01.2.05.0003.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	317	0	64	64	100,00	59	123	38,80
2.17.01.2.05.0005.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	343	0	64	64	100,00	59	123	35,86
2.17.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	15	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	317	0	64	64	100,00	0	64	20,19
2.17.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	317	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**Jenis**	45	9	9	9	100,00	6	24	53,33
2.17.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2.17.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	0	0	0,00	0	1	20,00
2.17.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	10	2	2	2	100,00	2	6	60,00
2.17.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2.17.01.2.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	Paket	10	2	2	2	100,00	2	6	60,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
06.0007.		Disediakan									
2.17.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1500	300	300	300	100,00	300	900	60,00
2.17.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	895	179	179	179	100,00	179	537	60,00
2.17.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	300	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis**	30	6	6	6	100,00	1	13	43,33
2.17.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	3	0	0	0,00	6	9	60,00
2.17.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	25	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	15	3	0	0	0,00	0	3	20,00
2.17.1.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis**	20	4	4	4	100,00	2	10	50,00
2.17.1.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	1	1	1	100,00	1	3	60,00
2.17.1.2.0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	60	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
8.0002.	Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
2.17.1.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.1.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100,00	12	36	60,00
2.17.1.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**Jenis**	55	12	11	11	100,00	3	26	47,27
2.17.1.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	95	0	0	0	0,00	19	19	20,00
2.17.1.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.1.2.09.0004.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	25	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.1.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	600	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.1.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120	24	24	24	100,00	24	72	60,00
2.17.1.2.09.0007.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.1.2.0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang	Unit	10	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
9.0008.		Dipelihara									
2.17.1.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	130	26	26	26	100,00	26	78	60,00
2.17.1.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	130	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.1.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	130	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.1.2.09.0012.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	10000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Tujuan 2. Meningkatkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	**Pertumbuhan Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor**	**Persen**	5,6	5,3	5,6	5,6	100,00	6	5,63	100,60
	Sasaran 2. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	**Indeks Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persen**	100	105,34	96,3	101,88	105,79	100	102,41	102,41
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**										
3.30.06.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Penyelesaian Aduan Konsumen**	**Persen**	85	0	85	85	100,00	90	58,33	68,63
3.30.06.2.01.	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah unit usaha perdagangan yang memiliki cap tanda tera**	**Unit**	2850	570	570	570	100,00	570	1710	60,00
3.30.06.2.01.0001.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	4715	994	943	943	100,00	943	2880	61,08
3.30.06.2.01.0002.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	440	407	88	88	100,00	88	583	132,50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
3.30.06.2.01.0003.	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	4715	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran**	**Persen**	95	100	95	95	100,00	100	98,33	103,51
3.30.04.2.01.	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia**	**Jenis**	110	0	22	22	100,00	22	44	40,00
3.30.04.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	1215	0	243	243	100,00	243	486	40,00
3.30.04.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	60	0	12	12	100,00	0	12	20,00
3.30.04.2.01.0003.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok an Barang Penting d Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	60	0	12	12	100,00	0	12	20,00
	Tujuan 3. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	**Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**	**Persen**	5	4	5	5	100,00	6	5,00	100,00
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	**Persen**	20	19	20	20	100,00	21	20,00	100,00
	Sasaran 3. Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan	**Persentase Pertumbuhan UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan Produknya Melalui Sistem Elektronik**	**Persen**	7	6,52	7	7	100,00	8	7,17	102,48
		Persentase Peningkatan Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan	**Persen**	22	21	22	22	100,00	23	22,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**										
2.17.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**										
2.17.02.	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah**	**Persen**	85	87	85	85	100,00	90	87,33	102,75
2.17.02.2.01.	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam**	**Unit Usaha**	935	187	187	187	100,00	187	561	60,00
2.17.02.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	935	187	187	187	100,00	187	561	60,00
2.17.02.2.02.	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam**	**Unit Usaha**	20	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.02.2.02.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	20	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Kabupaten/Kota										
2.17.03.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Penurunan Jumlah Koperasi Bermasalah dan Berpotensi Masalah**	**Persen**	2,36	1,76	2,36	2,36	100,00	0	1,37	58,19
2.17.03.2.01.	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Koperasi berkualitas**	**Unit**	1270	65	254	254	100,00	0	319	25,12
2.17.03.2.01.0003.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	1270	25	254	254	100,00	0	279	21,97
2.17.03.2.01.0004.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	1270	245	254	254	100,00	0	499	39,29
2.17.04.	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Berkategori Sehat**	**Persen**	71,62	75	71,62	71,62	100,00	72,27	72,96	101,88
2.17.04.2.01.	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang memperoleh sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi**	**Unit**	617	66	66	66	100,00	66	198	32,09
2.17.04.2.01.0001.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	1765	75	353	353	100,00	353	781	44,25
2.17.04.2.01.0002.	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	1765	26	353	353	100,00	0	379	21,47
2.17.05.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi Berkinerja Baik**	**Persen**	71,62	70	71,62	71,62	100,00	0	47,21	65,91

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
2.17.05.2.01.	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah pengurus koperasi yang memiliki peningkatan kualitas dan kapasitas**	**Orang**	500	140	100	100	100,00	0	240	48,00
2.17.05.2.01.0001.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	500	70	100	100	100,00	0	170	34,00
2.17.06.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**	**Persen**	71,62	67,42	71,62	71,62	100,00	71,62	70,22	98,05
2.17.06.2.01.	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Koperasi yang memperoleh perlindungan usaha dan pemberdayaan kopeasi**	**Unit**	250	220	50	50	100,00	50	320	128,00
2.17.06.2.01.0002.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.06.2.01.0003.	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	50	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.06.2.01.0004.	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	300	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.06.2.01.0005.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	Unit Usaha	500	140	100	100	100,00	0	240	48,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Restrukturisasi Usaha	Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									
2.17.06.2.01.0006.	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha	150	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.06.2.01.0007.	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	300	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.06.2.01.0008.	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit Usaha	1825	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.06.2.01.0009.	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	500	0	0	0	0,00	100	100	20,00
2.17.07.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persen**	100	99,2	100	100	100,00	100	99,73	99,73
2.17.07.2.01.	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha.**	**Unit Usaha**	167375	1600	33475	33475	100,00	33475	68550	40,96
2.17.07.2.01.0002.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	300	80	60	60	100,00	60	200	66,67
2.17.07.2.01.0003.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	7000	650	0	0	0,00	1400	2050	29,29
2.17.07.2.01.0004.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	500	870	100	100	100,00	100	1070	214,00
2.17.07.2.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para	Jumlah SDM yang Telah Melakukan	Orang	500	311	0	0	0,00	100	411	82,20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
01.0005.	Pemangku Kepentingandalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro									
2.17.07.2. 01.0007.	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.07.2. 01.0008.	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.07.2. 01.0009.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	7000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.07.2. 01.0010.	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	430	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.07.2. 01.0011.	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	7000	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.07.2. 01.0012.	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	500	0	0	0	0,00	33475	33475	6695,00
2.17.07.2. 01.0013.	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.07.2. 01.0014.	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	33479	0	1	1	100,00	0	1	0,00
2.17.07.2. 01.0015.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	500	0	0	0	0,00	100	100	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
2.17.08.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase UMKM Yang Mengalami Peningkatan Permodalan, Jenis Usaha, Nilai Pemasaran, Kualitas dan Kuantitas Produksi.**	**Persen**	65	80	65	65	100,00	0	48,33	74,36
2.17.08.2.01.	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi**	**Unit Usaha**	750	150	150	150	100,00	0	300	40,00
2.17.08.2.01.0002.	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	600	150	120	120	100,00	0	270	45,00
2.17.08.2.01.0003.	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.08.2.01.0004.	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Lembaga	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.08.2.01.0005.	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
2.17.08.2.01.0006.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	750	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**0**							
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**0**							
3.30.02.	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Permohonan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang singkat, Murah, dan Mudah**	**Persen**	95	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00
3.30.02.2	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar**	**Jumlah penerbitan Izin Pengelolaan Pasar**	**Izin**	250	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
.01.	**Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**									
3.30.02.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	250	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.01.0002.	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Laporan	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.02.	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan**	**TDP**	150	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.02.0001.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	50	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.03.	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri**	**Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri**	**STPW Luar Negeri**	100	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.03.0001.	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	75	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.03.0002.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW)	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau	Dokumen	75	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Dalam Negeri	Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri									
3.30.02.2.03.0003.	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	175	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.03.0004.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	175	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.04.	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri**	**Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri**	**STPW Luar Negeri**	100	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.04.0001.	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW} Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	50	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.04.0002.	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dokumen	50	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.04.0003.	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	100	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	Dokumen	100	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
.04.0004.	Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri									
3.30.02.2.05.	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat**	**Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat yang diterbitkan**	**Izin**	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.05.0001.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	150	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.05.0002.	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui SistemPelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.06.	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Gudang**	250	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2.06.0001.	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.02.2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
.06.0002.	Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2									
3.30.02.2.06.0003.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 P- B2)	Laporan	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.05.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan**	**Persen**	0,99	0,3	0,99	0,99	100,00	0,99	0,76	76,77
3.30.05.2.01.	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis produk ekspor unggulan yang dipromosikan melalui pameran daganga dan misi dagang**	**Jenis**	53	0	10	10	100,00	11	21	39,62
3.30.05.2.01.0002.	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	55	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.05.2.01.0003.	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	55	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.05.2.01.0004.	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	10	0	0	0	0,00	2	2	20,00
3.30.05.2.01.0005.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	55	11	0	0	0,00	0	11	20,00
3.30.07.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Produk Dalam Negeri Yang Dipasarkan Di Pasar Rakyat Dan Ritel Modern**	**Persen**	83	0	0	0	0,00	0	**0**	0,00
3.30.07.2.01.	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk**	**Jumlah perusahaan dalam negeri yang melaksanakan promosi, pemasaran dan**	**Perusahaan**	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Dalam Negeri	**peningkatan penggunaan produk**									
3.30.07.2.01.0004.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.07.2.01.0005.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.07.2.01.0006.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	500	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Sasaran 4. Meningkatnya Kontribusi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri	**Persentase Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri**	**Persen**	19,6	15,59	19,6	19,6	100,00	20	18,40	93,86
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							0,00		**0**	0,00
3.31.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							0,00		**0**	0,00
3.31.02.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri**	**Persen**	95	95	95	95	100,00	100	96,67	101,75
3.31.02.2.01.	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Luas areal pengembangan kawasan industri yang sesuai dengan RTRW**	**Ha**	200	200	200	200	100,00	200	600	300,00
3.31.02.2.01.0001.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.31.02.2.01.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Perwilayahan Industri	dan Perwilayahan Industri									
3.31.02.2.01.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.31.02.2.01.0004.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	7	0	1	1	100,00	3	4	57,14
3.31.02.2.01.0005.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	15	10	0	0	0,00	3	13	86,67
3.31.02.2.01.0006.	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	20	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.31.02.2.01.0007.	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.31.02.2.01.0008.	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi. Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.31.02.2.01.0009.	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	Laporan	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.31.02.2.01.0010.	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.31.03.	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA**	**Persentase Pengendalian Usaha Industri**	**Persen**	100	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA										
3.31.03.2.01.	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Indsutri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Indsutri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.31.03.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.31.03.2.01.0004.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.31.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM**	**Persentase Ketersediaan Data dan**	**Persen**	85	100	85	85	100,00	90	**91,67**	107,84

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	INFORMASI INSUDTRI NASONAL	**Informasi Industri Yang Dimanfaatkan Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Melalui Sistem Informasi Industri Nasional**									
3.31.04.2.01.	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah jenis informasi yang tersedia dan termanfaatkan untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI**	**Jenis**	5	1	0	0	0,00	1	2	40,00
3.31.04.2.01.0001.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	5	1	0	0	0,00	1	2	40,00
3.31.04.2.01.0002.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.31.04.2.01.0003.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
	Sasaran 5. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	**Inflasi Pada Tingkat Grosir**	**Persen**	3,14	5,81	3,14	3,14	100,00	3,08	4,01	127,71
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**										
3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran**	**Persen**	95	100	95	95	100,00	100	98,33	103,51

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
3.30.04.2.02.	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jenis bahan pokok dan barang penting yang harganya dapat dikendalikan**	**Jenis**	110	22	22	22	100,00	22	66	60,00
3.30.04.2.02.0001.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1250	0	0	0	0,00	250	250	20,00
3.30.04.2.02.0002.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	1250	250	250	250	100,00	12	512	40,96
3.30.04.2.02.0003.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	60	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.04.2.03.	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah distributor pupuk dan pestisida bersubsidi di Kabupaten Maros yang diawasi**	**Perusahaan**	35	7	7	7	100,00	7	21	60,00
3.30.04.2.03.0001.	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	60	0	0	0	0,00	84	84	140,00
3.30.04.2.03.0002.	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.04.2.03.0003.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	420	84	84	84	100,00	84	252	60,00
	Tujuan 4. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan	**Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan Sesuai Standar**	**Persen**	100	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2022-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Prog & Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program & Kegiatan 2022			Target prog & keg Renja PD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
						Target Renja tahun 2023	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Keg s/d 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Sasaran 6. Meningkatnya Ketersediaan Pasar Rakyat Sesuai Standar di Setiap Wilayah Kecamatan	**Persentase Ketersediaan Pasar Rakyat Sesuai Standar**	**Persen**	100	92	100	100	100,00	100	97,33	97,33
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**										
3.30.03.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat**	**Persen**	95	70	95	95	100,00	100	88,33	92,98
3.30.03.2.01.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik**	**Unit**	26	26	26	26	100,00	26	26	100,00
3.30.03.2.01.0001.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	26	26	26	26	100,00	26	26	100,00
3.30.03.2.01.0002.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	26	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.03.2.01.0003.	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Unit	25	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.03.2.01.0004.	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Unit	25	0	0	0	0,00	0	0	0,00
3.30.03.2.02.	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang memiliki kapasitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan berlaku**	**Orang**	625	125	0	0	0,00	0	125	20,00
3.30.03.2.02.0001.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	5	1	0	0	0,00	0	1	20,00
3.30.03.2.02.0002.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	5	0	0	0	0,00	0	0	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Diskopurindag Kab. Maros sebagai lembaga penunjang yang membantu Kepala Daerah di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan telah diatur dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Diskopurindag Kab. Maros Sampai Triwulan II Tahun 2024 berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya:

a. Nilai SAKIP Diskopurindag

   Nilai SAKIP Diskopurindag merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian realisasi B (65,56). Nilai ini masih menggunakan capaian realisasi tahun 2023 dikarenakan belum ada penilaian tahun 2024.

b. Indeks Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

   Indeks Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian realisasi 111,88%.

c. Persentase Pertumbuhan UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan Produknya Melalui Sistem Elektronik

   Persentase Pertumbuhan UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan Produknya Melalui Sistem Elektronik merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian realisasi 8,62%.

d. Persentase Peningkatan Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan

   Persentase Peningkatan Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian realisasi 22%.

e. Persentase Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri

   Persentase Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian realisasi 19,80%.

f. Inflasi Pada Tingkat Grosir

   Inflasi Pada Tingkat Grosir merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian realisasi 0,40.

g. Persentase Ketersediaan Pasar Rakyat Sesuai Standar

   Persentase Ketersediaan Pasar Rakyat Sesuai Standar merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian realisasi 100%.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros

No	Indikator	SPM	TPB	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
							2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase akses UMKM ke layanan keuangan		√			Persen	79,67	79,67	79,67	79,67	79,67	79,67	79,67	79,67	79,67	
2	Persentase koperasi aktif			√		Persen	50,20	35,80	25,53	18,21	70,39	50,20	35,80	25,53	18,21	IKK RPJMD
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif			√		Persen	99,35	98,70	98,06	97,43	100	99,35	98,70	98,06	97,43	IKK RPJMD
4	Persentase BPR/LKM aktif			√		Persen	100	0	0	0	0	100	0	0	0	IKK RPJMD
5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil			√		Persen	99,35	100,14	100,93	101,73	98,57	99,35	100,14	100,93	101,73	IKK RPJMD
6	Ekspor Bersih Perdagangan			√		Persen	603.054.296.041	448.610.388.288	333.720.001.335	248.253.366.838	810.668.886.562	603.054.296.041	448.610.388.288	333.720.001.335	248.253.366.838	IKK RPJMD
7	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal			√		Persen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	IKK RPJMD
8	Cakupan bina kelompok pengrajin			√		Persen	91,43	83,60	76,43	69,88	100,00	91,43	83,60	76,43	69,88	IKK RPJMD
9	Persentase Koperasi Kualitas			√		Persen	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	
10	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha			√		Persen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	
11	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)			√		Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Persentase kinerja realisasi pupuk			√		Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku			√		Persen	36	36	36	36	36	36	36	36	36	
14	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota			√		Persen	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	1509	
15	Persentase pencapaian sasaran			√		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	SPM	TPB	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
							2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
	pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK															
16	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			√		Persen	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
17	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			√		Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota			√		Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			√		Persen	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
20	Nilai SAKIP Diskopurindag				√	Nilai Level	BB (73)	BB (75)	A (81)	A (82)	B (64,66)	B (65,56)	B (66,47)	B (67,40)	B (68,34)	
21	Indeks Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				√	Nilai Indeks	100	100	100	100	96,30	101,88	107,78	114,03	120,64	
22	Persentase Pertumbuhan UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan Produknya Melalui Sistem Elektronik				√	Persen	7	8	9	10	6,52	8,2	10,31	12,97	16,31	
23	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan				√	Persen	22	23	24	25	21	22	23,05	24,15	25,29	
24	Persentase Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri				√	Persen	19,6	20	20,4	20,8	15,59	19,8	25,15	31,94	40,56	
25	Inflasi Pada Tingkat Grosir				√	Persen	3,14	3,08	3,03	3	5,81	0,4	0,03	0,00	0,00	

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros

No	Indikator	Satuan	Target Renstra		Realisasi Capaian		Capaian Kinerja (%)		Catatan Analisis
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	
1	Persentase akses UMKM ke layanan keuangan	Persen	79,67	79,67	79,67	79,67	100	100	
2	Persentase koperasi aktif	Persen	70,39	50,2	70,39	50,2	100	100	IKK RPJMD
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persen	100	99,35	100	99,35	100	100	IKK RPJMD
4	Persentase BPR/LKM aktif	Persen	0	100	0	100	0	100	IKK RPJMD
5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	98,57	99,35	98,57	99,35	100	100	IKK RPJMD
6	Ekspor Bersih Perdagangan	Persen	810.668.886.562	603.054.296.041	810.668.886.562	603.054.296.041	100	100	IKK RPJMD
7	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	100	0	100	0	100	0	IKK RPJMD
8	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	100	91,43	100	91,43	100	100	IKK RPJMD
9	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	18,33	18,33	18,33	18,33	100	100	
10	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,11	0,11	0,11	0,11	100	100	
11	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	0	0	0	0	0	0	
12	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	0	0	0	0	0	0	
13	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	36	36	36	36	100	100	
14	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	1509	1509	1509	1509	100	100	
15	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	23	23	23	23	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra		Realisasi Capaian		Capaian Kinerja (%)		Catatan Analisis
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	
17	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	0	0	0	0	0	
18	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0	0	0	0	0	0	
19	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	150	150	150	150	100	100	
20	Nilai SAKIP Diskopurindag	Nilai Level	71	73	64,66	65,56	91,07	89,81	
21	Indeks Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Nilai Indeks	100	100	96,3	101,88	96,30	101,88	
22	Persentase Pertumbuhan UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan Produknya Melalui Sistem Elektronik	Persen	6	7	6,52	8,2	108,67	117,14	
23	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan	Persen	21	22	21	22	100,00	100,00	
24	Persentase Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri	Persen	19,2	19,6	15,59	19,8	81,20	101,02	
25	Inflasi Pada Tingkat Grosir	Persen	3,18	3,14	5,81	0,4	182,70	12,74	
	TOTAL CAPAIAN KINERJA	Persen					**82,40**	**76,90**	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Maros.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros mempunyai tugas di bidang/urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan.

Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain. Secara umum identifikasi permasalahan di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros

No	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK	PELUANG	REKOMENDASI
1	Persentase akses UMKM ke layanan keuangan	Akses UMKM ke bank	Persentase akses UMKM ke layanan keuangan tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Unit usaha dapat dijadikan agunan	Fasilitasi dan pembinaan UMKM ke layanan perbankan
2	Persentase koperasi aktif	Beberapa koperasi tidak aktif	Persentase koperasi aktif tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Potensi penambahan anggota masih besar untuk mengaktifkan koperasi	Pembinaan koperasi
3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	UKM non BPR/LKM aktif mengalami penurunan	Persentase UKM non BPR/LKM aktif tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Peluang kemitraan tetap meningkat	Fasilitasi kemitraan
4	Persentase BPR/LKM aktif	BPR/LKM aktif masih perlu ditingkatkan	Persentase BPR/LKM aktif sudah sesuai harapan target yang direncanakan tapi masih bisa ditingkatkan lagi	Peluang kemitraan tetap meningkat	Fasilitasi kemitraan
5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Usaha mikro dan kecil masih banyak yang belum terdaftar	Persentase Usaha Mikro dan Kecil tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Proses penerbitan NIB dipermudah	Sosialisasi dan fasilitasi UMKM ke penerbitnan NIB
6	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai Ekspor mengalami penurunan	Ekspor Bersih Perdagangan tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Komoditi ekspor yang pernah ada masih dapat dikembangkan	Sosialisasi dan penyuluhan komoditi ekspor yang potensial
7	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal mengalami penurunan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Potensi kelompok pedagang cukup besar	Pembinaan kelompok pedagang/usaha informal
8	Cakupan bina kelompok pengrajin	Cakupan bina kelompok pengrajin mengalami penurunan	Cakupan bina kelompok pengrajin tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Potensi kelompok pengrajin cukup besar	Pembinaan kelompok kelompok pengrajin
9	Persentase Koperasi yang berkualitas	Beberapa koperasi tidak berkualitas	Persentase Koperasi yang berkualitas tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Potensi perkembangan koperasi masih besar	Pembinaan koperasi
10	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Akses modal ke perbankan untuk memajukan usaha ke wirausaha	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
11	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai	Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat	Proses perizinan mudah dilakukan satu atap di MPP	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha

No	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK	PELUANG	REKOMENDASI
	dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) masih rendah	Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) tidak sesuai harapan target yang direncanakan		Toko Swalayan
12	Persentase kinerja realisasi pupuk	Kinerja realisasi pupuk bersubsidi masih rendah	Persentase kinerja realisasi pupuk tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Tersedianya subsidi pupuk dari pemerintah	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku belum sepenuhnya lengkap	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Tersedianya layanan tera/tera ulang	Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
14	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil dan menengah di Maros masih rendah	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Potensi pengembangan IKM di Maros cukup besar	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
15	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK tercapai maksimal	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Adanya Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
16	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait belum maksimal	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Proses perizinan mudah dilakukan satu atap di MPP	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
17	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan	Proses perizinan mudah dilakukan satu atap di MPP	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian

No	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK	PELUANG	REKOMENDASI
	jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	(IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait masih rendah	Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait tidak sesuai harapan target yang direncanakan		yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
18	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota masih rendah	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Proses perizinan mudah dilakukan satu atap di MPP	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
19	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Informasi industri belum lengkap	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini tidak sesuai harapan target yang direncanakan	Adanya Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
20	Nilai SAKIP Diskopurindag	Rendahnya daya dukung penyelenggara urusan di tiap unit dalam meningkatkan kinerja	Nilai SAKIP sulit mendapatkan nilai indeks maksimal, realisasi diperoleh 65,56 dengan capaian kinerja 89,81%. Kriteria penilaian realisasi kinerja tergolong "tinggi" tapi belum mencapai target kinerja.	Perencanaan yang komprehensip dan pelaksanaan kinerja yang dimaksimalkan dari setiap penyelenggara urusan di tiap unit melalui pemanfaatan anggaran yang tersedia	Peningkatan kualitas Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah
21	Indeks Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting cenderung berubah sesuai ketersediaan stok dan faktor tinggi rendahnya permintaan	Indeks Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tidak sesuai harapan target yang direncanakan, realisasi diperoleh 101,88% dengan capaian kinerja 101,88%. Kriteria penilaian realisasi kinerja tergolong "sangat tinggi".	Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tempat pemasaran	Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
22	Persentase Pertumbuhan UMKM	Masih rendahnya UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan	Persentase Pertumbuhan UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan Produknya	Persentase Pertumbuhan UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan	Pendampingan Koperasi dan UMKM

No	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK	PELUANG	REKOMENDASI
	dan Koperasi Yang Memasarkan Produknya Melalui Sistem Elektronik	Produknya Melalui Sistem Elektronik. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang	Melalui Sistem Elektronik tidak sesuai harapan target yang direncanakan, realisasi diperoleh 8,62% dengan capaian kinerja 123,09%. Kriteria penilaian realisasi kinerja tergolong "sangat tinggi".	Produknya Melalui Sistem Elektronik dapat ditingkatkan melalui Pemanfaatan platform digital seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, X, Tiktok ataupun website.	
23	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan	Kurangnya survey terhadap Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan tidak sesuai harapan target yang direncanakan, realisasi diperoleh 22% dengan capaian kinerja 100%. Kriteria penilaian realisasi kinerja tergolong "sangat tinggi".	Survey dapat dilakukan bersamaan dengan penagihan retribusi pasar	Akses pasar dan jaringan pemasaran yang masih perlu ditingkatkan
24	Persentase Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri	Masih rendahnya nilai produksi IKM	Persentase Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri tidak sesuai harapan target yang direncanakan, realisasi diperoleh 19,8% dengan capaian kinerja 101,02%. Kriteria penilaian realisasi kinerja tergolong "sangat tinggi".	Pemanfaatan Kredit Bunga Rendah	Permudah perizinan IKM dan tingkatkan pembinaan IKM
25	Inflasi Pada Tingkat Grosir	Inflasi Pada Tingkat Grosir tinngi	Inflasi Pada Tingkat Grosir tidak sesuai harapan target yang direncanakan, realisasi diperoleh 0,4% dengan capaian kinerja 187,26%. Kriteria penilaian realisasi kinerja tergolong "sangat tinggi".	Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tempat pemasaran	Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tempat pemasaran
26	Persentase Ketersediaan Pasar Rakyat Sesuai Standar	Standarisasi pasar	Persentase Ketersediaan Pasar Rakyat Sesuai Standar tidak sesuai harapan target yang direncanakan, realisasi diperoleh 100% dengan capaian kinerja 100%. Kriteria penilaian realisasi kinerja tergolong "sangat tinggi".		Infrastruktur perdagangan masih sangat perlu dukungan dari pemerintah

Tabel 2.5
Analisis Lingkungan (Internal dan Eksternal) / SWOT Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros

STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
• Peraturan Bupati Maros Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang memberi kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; • Diskopurindag adalah salah satu perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD); • Jumlah SDM yang memadai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana berkisar 63%.	• Lemahnya pengelolaan data akibat terbatasnya kompetensi aparatur terhadap penguasaan tupoksi dan teknologi informasi; • Lemahnya kemampuan/kompetensi sumber daya manusia aparatur Diskopurindag dalam inovasi maupun pengembangan organisasi; • Ketidakmampuan SDM aparatur Diskopurindag dalam mengembangkan kelembagaan koperasi yang tidak aktif dan tidak berkembang menjadi sehat dan berkualitas. • Kurangnya koordinasi antar stake holder dalam melaksanakan tupoksi yang saling berhubungan (cross cutting)
OPPORTUNITIES (PELUANG)	**THREATS (ANCAMAN)**
• Sebagai penghasil PAD berperan penting dalam mengembangkan tingkat ekonomi Kabupaten Maros dan masyarakat; • Meningkatnya tren pertumbuhan UMKM memberi peluang berkembangnya ekonomi kecil dan menengah.	• Lemahnya pengelolaan data di bidang teknis berakibat bertumpunya beban pengelolaan kinerja hanya pada sub bagian program; • Kurangnya inovasi menyebabkan kurang berkembangnya program perangkat daerah; • Kurangnya kompetensi dalam mengembangkan pengawasan dan pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyebabkan perangkat daerah harus melibatkan pihak luar/SDM eksternal;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja merupakan bagian integral dari rangkaian penyelenggaraan pembangunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dituangkan didalam rencana kerja.

Rencana kerja merupakan pedoman dan arahan di dalam penyelenggaraan Renstra. Penetapan sasaran, program dan kegiatan, mengacu pada hasil-hasil pencapaian pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD/Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan kementerian/lembaga, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.

Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, dalam proses penyusunannya melalui rancangan awal. Dalam pelaksanaannya, rancangan awal program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros mengalami perubahan–perubahan yang berkaitan dengan besaran dana dan target kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Diskopurindag					13.000.000.000	Diskopurindag				10.713.866.211	
	Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Yang Professional dan Berkinerja Tinggi	Kel. Pettuadae	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros	Nilai Indeks	B (61)	8.030.498.493	Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Yang Professional dan Berkinerja Tinggi	Kel. Pettuadae	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros	B (66)	7.924.571.783	
	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros	Kel. Pettuadae	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Level	BB (73)	8.030.498.493	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros	Kel. Pettuadae	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	BB (75)	7.924.571.783	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
2.17.01.	PROGRAM	Kel.	Persentase	Persen	100	23.352.697.400	PROGRAM	Kel.	Persentase Layanan	100	7.924.571.783	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**Pettuadae**	**Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Pettuadae**	**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
2.17.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**19**	**17.252.600**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**19**	15.500.000	
2.17.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3.703.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1.865.000	
2.17.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4.462.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4.210.000	
2.17.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	2.858.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	2.685.000	
2.17.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	Dokumen	1	1.028.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1	2.785.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			SKPD						SKPD			
2.17.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1.028.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	2.125.000	
2.17.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	2.648.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	905.000	
2.17.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	1.525.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	925.000	
2.17.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	**82**	**5.718.872.961**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**82**	5.581.364.283	
2.17.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Pettuadae	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	64	5.538.720.461	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Pettuadae	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	5.415.214.783	
2.17.01.2.	Penyediaan	Kel.	Jumlah Dokumen	Dokume	12	0	Penyediaan	Kel.	Jumlah Dokumen	12	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
02.0002.	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pettuadae	Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pettuadae	Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
2.17.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	175.560.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12	163.460.000	
2.17.01.2.02.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	0	
2.17.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	0	
2.17.01.2.02.0006.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	
2.17.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Laporan	18	4.592.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18	2.689.500	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			
2.17.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	0	
2.17.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**51**	**3.876.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**51**	3.554.000	
2.17.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	
2.17.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	0	
2.17.01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1.690.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	1.640.000	
2.17.01.2.03.0004.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	Laporan	12	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	12	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Milik Daerah pada SKPD		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				Barang Milik Daerah pada SKPD		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
2.17.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	1.914.000	
2.17.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	2.186.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	0	
2.17.01.2.03.0007.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1	0	
2.17.01.2.04.	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**132**	**0**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**132**	**0**	
2.17.01.2.04.0001.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1	0	
2.17.01.2.04.0002.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	1	0	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.01.2.04.0003.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	26	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	26	0	
2.17.01.2.04.0004.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	26	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	26	0	
2.17.01.2.04.0005.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	26	0	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	26	0	
2.17.01.2.04.0006.	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	26	0	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	26	0	
2.17.01.2.04.0007.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	26	0	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	26	0	
2.17.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Orang**	**90**	**18.110.400**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**90**	17.991.000	
2.17.01.2.05.0001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	0	
2.17.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	1	13.875.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1	14.800.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Kelengkapan				Kelengkapannya		Kelengkapan			
2.17.01.2.05.0003.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	0	
2.17.01.2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	64	1.899.400	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	64	1.586.000	
2.17.01.2.05.0005.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	90	2.336.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	90	1.605.000	
2.17.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kel. Pettuadae	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kel. Pettuadae	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	0	
2.17.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel. Pettuadae	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	64	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel. Pettuadae	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64	0	
2.17.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel. Pettuadae	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Orang	64	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kel. Pettuadae	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	64	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Perundang-Undangan						Perundang-Undangan			
2.17.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**Jenis**	**9**	**345.292.320**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**9**	**358.272.000**	
2.17.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	17.183.320	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	10.014.000	
2.17.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	0	
2.17.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	0	
2.17.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	63.289.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	61.238.000	
2.17.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	46.120.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	45.000.000	
2.17.01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	2	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	10.000.000	
2.17.01.2.	Fasilitasi Kunjungan	Kel.	Jumlah Laporan	Laporan	300	96.000.000	Fasilitasi Kunjungan	Kel.	Jumlah Laporan	300	96.000.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
06.0008.	Tamu	Pettuadae	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tamu	Pettuadae	Fasilitasi Kunjungan Tamu			
2.17.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	179	112.700.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179	136.020.000	
2.17.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	60	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kel. Pettuadae	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60	0	
2.17.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis**	**6**	**311.880.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**6**	65.500.000	
2.17.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	0	
2.17.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	0	Pengadaan Mebel	Kel. Pettuadae	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	0	
2.17.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	0	
2.17.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Lainnya yang Disediakan						yang Disediakan			
2.17.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	311.880.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	65.500.000	
2.17.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	0	
2.17.1.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis**	**4**	**1.485.214.212**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4**	1.732.212.000	
2.17.1.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.164.212	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	12.012.000	
2.17.1.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	0	
2.17.1.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.1.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.480.050.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.720.200.000	
2.17.1.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**Jenis**	**11**	**130.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kel. Pettuadae**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**11**	**150.178.500**	
2.17.1.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Pettuadae	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19	60.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Pettuadae	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	50.000.000	
2.17.1.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Pettuadae	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Pettuadae	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	0	
2.17.1.2.09.0004.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kel. Pettuadae	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	5	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kel. Pettuadae	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	5	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.1.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Kel. Pettuadae	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	120	0	Pemeliharaan Mebel	Kel. Pettuadae	Jumlah Mebel yang Dipelihara	120	0	
2.17.1.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	40.000.000	
2.17.1.2.09.0007.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10	0	
2.17.1.2.09.0008.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kel. Pettuadae	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kel. Pettuadae	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2	0	
2.17.1.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	26	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26	60.178.500	
2.17.1.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	26	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	26	0	
2.17.1.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	26	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Pettuadae	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	26	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.1.2.09.0012.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kel. Pettuadae	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	10000	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kel. Pettuadae	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	10000	0	
	Tujuan 2. Meningkatkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	**Diskopurindag**	**Pertumbuhan Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor**	**Persen**	**6**	**2.337.427.000**	**Tujuan 2. Meningkatkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok**	**Diskopurindag**	**Pertumbuhan Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor**	**6**	**78.830.000**	
	Sasaran 2. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	**Diskopurindag**	**Indeks Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persen**	**100**	**2.337.427.000**	**Sasaran 2. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok**	**Diskopurindag**	**Indeks Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**100**	**78.830.000**	
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					
3.30.03.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Kab. Maros**	**Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat**	**Persen**	**100**	**2.245.670.000**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Kab. Maros**	**Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat**	**100**		
3.30.03.2.01.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kab. Maros**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik**	**Unit**	**26**	**2.245.670.000**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kab. Maros**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik**	**26**		

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.03.2.01.0001.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	26	2.245.670.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	26		
3.30.03.2.01.0002.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	26	0	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	26		
3.30.03.2.01.0003.	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Maros	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Unit	25	0	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Maros	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	25		
3.30.03.2.01.0004.	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Maros	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Unit	25	0	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Maros	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	25		
3.30.03.2.02.	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Kab. Maros**	**Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang memiliki kapasitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan berlaku**	**Orang**	**125**	**0**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Kab. Maros**	**Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang memiliki kapasitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan berlaku**	**125**		
3.30.03.2.02.0001.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	0	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1		
3.30.03.2.02.0002.	Pemberdayaan Pengelola Sarana	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	Dokumen	1	0	Pemberdayaan Pengelola Sarana	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan	1		

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Distribusi Perdagangan		dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				Distribusi Perdagangan		dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			
3.30.06.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Diskopurindag**	**Persentase Penyelesaian Aduan Konsumen**	**Persen**	**90**	**81.592.000**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Diskopurindag**	**Persentase Penyelesaian Aduan Konsumen**	**90**	71.530.000	
3.30.06.2.01.	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Kab. Maros**	**Jumlah unit usaha perdagangan yang memiliki cap tanda tera**	**Unit**	**570**	**81.592.000**	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Kab. Maros**	**Jumlah unit usaha perdagangan yang memiliki cap tanda tera**	**570**	71.530.000	
3.30.06.2.01.0001.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Maros	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	943	66.889.000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Maros	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	943	58.330.000	
3.30.06.2.01.0002.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Maros	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	88	14.703.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Maros	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	88	13.200.000	
3.30.06.2.01.0003.	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Maros	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	943	0	Penyidikan Metrologi Legal	Kab. Maros	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	943	0	
3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Diskopurindag**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran**	**Persen**	**95**	**10.165.000**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Diskopurindag**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran**	**95**	7.300.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.04.2.01.	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia**	**Jenis**	**22**	**10.165.000**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia**	**22**	7.300.000	
3.30.04.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	243	10.165.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	243	7.300.000	Usulan langsung masy/ lembaga
3.30.04.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	0	
3.30.04.2.01.0003.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok an Barang Penting d Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	12	0	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok an Barang Penting d Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Tujuan 3. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Diskopurindag	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	6	1.258.887.750	Tujuan 3. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Diskopurindag	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	6	558.119.000	
		Diskopurindag	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Persen	21	1.423.186.757		Diskopurindag	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	21	1.164.832.757	
	Sasaran 3. Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan	Diskopurindag	Persentase Pertumbuhan UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan Produknya Melalui Sistem Elektronik	Persen	8	1.220.368.750	Sasaran 3. Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan	Diskopurindag	Persentase Pertumbuhan UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan Produknya Melalui Sistem Elektronik	8	552.659.000	
		Diskopurindag	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan	Persen	23	12.214.000		Diskopurindag	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan	23	5.460.000	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.02.	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Diskopurindag**	**Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah**	**Persen**	**90**	**14.060.000**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Diskopurindag**	**Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah**	**90**	13.540.000	
2.17.02.2.01.	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam**	**Unit Usaha**	**187**	**0**	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam**	**187**	13.540.000	
2.17.02.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	187	0	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	187	13.540.000	
2.17.02.2.02.	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan**	**Kab. Maros**	**Jumlah koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan**	**Unit Usaha**	**4**	**14.060.000**	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi**	**Kab. Maros**	**Jumlah koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan**	**4**	**0**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		**kantor kas koperasi simpan pinjam**				**Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**kantor kas koperasi simpan pinjam**			
2.17.02.2.02.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	4	14.060.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	0	
2.17.03.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Diskopurindag**	**Persentase Penurunan Jumlah Koperasi Bermasalah dan Berpotensi Masalah**	**Persen**	**2,43**	**0**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Diskopurindag**	**Persentase Penurunan Jumlah Koperasi Bermasalah dan Berpotensi Masalah**	**2,43**	**0**	
2.17.03.2.01.	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah**	**Kab. Maros**	**Jumlah Koperasi berkualitas**	**Unit**	**254**	**0**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah**	**Kab. Maros**	**Jumlah Koperasi berkualitas**	**254**	**0**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kabupaten/ Kota						**Kabupaten/ Kota**					
2.17.03.2.01.0003.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	254	0	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	254	0	
2.17.03.2.01.0004.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	254	0	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	254	0	
2.17.04.	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Diskopurindag**	**Persentase Koperasi Berkategori Sehat**	**Persen**	**72,27**	**34.463.500**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Diskopurindag**	**Persentase Koperasi Berkategori Sehat**	**72,27**	21.300.000	
2.17.04.2.01.	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang memperoleh sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi**	**Unit**	**353**	**34.463.500**	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang memperoleh sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi**	**353**	21.300.000	
2.17.04.2.01.0001.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	353	12.627.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	353	21.300.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.17.04.2.01.0002.	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	353	21.836.500	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	353	0	
2.17.05.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Diskopurindag**	**Persentase Koperasi Berkinerja Baik**	**Persen**	**72,27**	**285.770.500**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Diskopurindag**	**Persentase Koperasi Berkinerja Baik**	**72,27**	**0**	
2.17.05.2.01.	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Maros	**Jumlah pengurus koperasi yang memiliki peningkatan kualitas dan kapasitas**	**Orang**	**100**	**285.770.500**	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Maros	**Jumlah pengurus koperasi yang memiliki peningkatan kualitas dan kapasitas**	**100**	**0**	
2.17.05.2.01.0001.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Maros	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	100	285.770.500	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Maros	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100	0	Usulan langsung masy/ lembaga
2.17.06.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Diskopurindag**	**Persentase Koperasi Aktif**	**Persen**	**71,62**	**76.361.750**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Diskopurindag**	**Persentase Koperasi Aktif**	**71,62**	66.200.000	
2.17.06.2.01.	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang**	**Kab. Maros**	**Jumlah Koperasi yang memperoleh perlindungan**	**Unit**	**50**	**76.361.750**	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang**	**Kab. Maros**	**Jumlah Koperasi yang memperoleh perlindungan usaha**	**50**	66.200.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		**usaha dan pemberdayaan kopeasi**				**Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**		**dan pemberdayaan kopeasi**			
2.17.06.2.01.0002.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	100	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100	0	
2.17.06.2.01.0003.	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kab. Maros	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	10	0	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi DalamPengembangan Ekonomi	Kab. Maros	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	10	0	
2.17.06.2.01.0004.	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	60	0	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	60	0	
2.17.06.2.01.0005.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses	Unit Usaha	100	0	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses	100	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			
2.17.06.2.01.0006.	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha	30	0	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	30	0	
2.17.06.2.01.0007.	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	60	0	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	60	0	
2.17.06.2.01.0008.	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit Usaha	365	0	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	365	0	
2.17.06.2.01.0009.	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	100	76.361.750	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	100	66.200.000	
2.17.07.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN**	**Diskopurindag**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persen**	**100**	**581.779.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN**	**Diskopurindag**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**100**	**451.619.000**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	USAHA MIKRO (UMKM)						**USAHA MIKRO (UMKM)**					
2.17.07.2.01.	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kab. Maros**	**Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha.**	**Unit Usaha**	**33475**	**581.779.000**	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kab. Maros**	**Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha.**	**33475**	**451.619.000**	
2.17.07.2.01.0002.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	60	37.229.000	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	60	93.729.000	Usulan langsung masy/ lembaga
2.17.07.2.01.0003.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	1400	73.965.000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	1400	103.928.000	Usulan langsung masy/ lembaga
2.17.07.2.01.0004.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	100	247.601.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100	50.000.000	
2.17.07.2.	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah SDM yang	Orang	100	14.194.000	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah SDM yang	100	25.090.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
01.0005.	Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingandalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Maros	Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingandalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Maros	Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			
2.17.07.2.01.0007.	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	100	0	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	0	
2.17.07.2.01.0008.	Pemulihan Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	100	0	Pemulihan Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	0	
2.17.07.2.01.0009.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	1400	0	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	1400	0	
2.17.07.2.01.0010.	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	30	0	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30	0	
2.17.07.2.01.0011.	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	1400	0	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1400	0	
2.17.07.2.01.0012.	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	100	120.000.000	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	95.000.000	
2.17.07.2.01.0013.	Penyediaan Tempat Promosi dan	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang	Unit Usaha	100	0	Penyediaan Tempat Promosi dan	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik		Terfasilitasi				Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik					
2.17.07.2.01.0014.	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	1	38.790.000	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1	33.872.000	
2.17.07.2.01.0015.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Maros	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	100	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Maros	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100	50.000.000	Usulan langsung masy/ lembaga
2.17.08.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Diskopurindag**	**Persentase UMKM Yang Mengalami Peningkatan Permodalan, Jenis Usaha, Nilai Pemasaran, Kualitas dan Kuantitas Produksi.**	**Persen**	**70,00**	**227.934.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Diskopurindag**	**Persentase UMKM Yang Mengalami Peningkatan Permodalan, Jenis Usaha, Nilai Pemasaran, Kualitas dan Kuantitas Produksi.**	**70,00**	**0**	
2.17.08.2.01.	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kab. Maros**	**Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan**	**Unit Usaha**	**150**	**227.934.000**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kab. Maros**	**Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan**	**150**	**0**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			teknologi						**teknologi**			
2.17.08.2.01.0002.	Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	120	227.934.000	Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	120	0	
2.17.08.2.01.0003.	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kab. Maros	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	100	0	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kab. Maros	Jumlah yang Difasilitasi	100	0	
2.17.08.2.01.0004.	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Kab. Maros	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Lembaga	100	0	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Kab. Maros	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	100	0	
2.17.08.2.01.0005.	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	100	0	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Kab. Maros	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	100	0	
2.17.08.2.01.0006.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	150	0	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	150	0	Usulan langsung masy/ lembaga
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					
3.30.02.	**PROGRAM PERIZINAN**	**Diskopuri**	**Persentase**	**Persen**	**100**	**0**	**PROGRAM**	**Diskopuri**	**Persentase**	**100**	**0**	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**ndag**	**Permohonan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang singkat, Murah, dan Mudah**				**PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**ndag**	**Permohonan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang singkat, Murah, dan Mudah**			
3.30.02.2.01.	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Kab. Maros**	**Jumlah penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Izin**	**50**	**0**	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Kab. Maros**	**Jumlah penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**50**	**0**	
3.30.02.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Maros	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	50	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Maros	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	50	0	
3.30.02.2.01.0002.	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen,	Kab. Maros	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk	Laporan	1	0	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen,	Kab. Maros	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk	1	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik		distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik		distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik			
3.30.02.2.02.	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Kab. Maros**	**Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan**	**TDP**	**30**	**0**	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Kab. Maros**	**Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan**	**30**	**0**	
3.30.02.2.02.0001.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	10	0	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	10	0	
3.30.02.2.03.	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri**	**Kab. Maros**	**Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri**	**STPW Luar Negeri**	**20**	**0**	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri**	**Kab. Maros**	**Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri**	**20**	**0**	
3.30.02.2.03.0001.	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	15	0	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	15	0	
3.30.02.2.03.0002.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau	Kab. Maros	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan	Dokumen	15	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran	Kab. Maros	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen	15	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri			
3.30.02.2.03.0003.	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	35	0	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	35	0	
3.30.02.2.03.0004.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	35	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	35	0	
3.30.02.2.04.	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri**	**Kab. Maros**	**Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri**	**STPW Luar Negeri**	**20**	**0**	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri**	**Kab. Maros**	**Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri**	**20**	**0**	
3.30.02.2	Sistem Pelayanan	Kab.	Jumlah Data dan	Dokume	10	0	Sistem Pelayanan	Kab.	Jumlah Data dan	10	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
.04.0001.	Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Maros	Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW} Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	n			Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Maros	Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW} Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri			
3.30.02.2.04.0002.	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dokumen	10	0	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	10	0	
3.30.02.2.04.0003.	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Kab. Maros	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	20	0	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Kab. Maros	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	20	0	
3.30.02.2.04.0004.	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau	Kab. Maros	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai	Dokumen	20	0	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran	Kab. Maros	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai	20	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri				dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri		Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri			
3.30.02.2.05.	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat**	**Kab. Maros**	**Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat yang diterbitkan**	**Izin**	**100**	**0**	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat**	**Kab. Maros**	**Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat yang diterbitkan**	**100**	**0**	
3.30.02.2.05.0001.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Maros	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	30	0	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Kab. Maros	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	30	0	
3.30.02.2.05.0002.	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan	Kab. Maros	Jumlah Surat Keterangan	dokumen	100	0	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan	Kab. Maros	Jumlah Surat Keterangan	100	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C		Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui SistemPelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C		Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui SistemPelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
3.30.02.2.06.	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Gudang**	**50**	**0**	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**50**	**0**	
3.30.02.2.06.0001.	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	1	0	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	1	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.30.02.2.06.0002.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen	1	0	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	1	0	
3.30.02.2.06.0003.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 P- B2)	Laporan	1	0	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 P- B2)	1	0	
3.30.02.2.07.	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	**Kab. Maros**	**Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) yang dikeluarkan**	**Dokumen**	**100**	**0**	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	**Kab. Maros**	**Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) yang dikeluarkan**	**100**	**0**	
3.30.02.2.07.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat	Dokumen	5	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat	5	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penerbitan SKA		Keterangan Asal				Penerbitan SKA		Keterangan Asal			
3.30.05.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Diskopurindag**	**Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan**	**Persen**	**0,99**	**12.214.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Diskopurindag**	**Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan**	**0,99**	5.460.000	
3.30.05.2.01.	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah jenis produk ekspor unggulan yang dipromosikan melalui pameran daganga dan misi dagang**	**Jenis**	**11**	**12.214.000**	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah jenis produk ekspor unggulan yang dipromosikan melalui pameran daganga dan misi dagang**	**11**	5.460.000	
3.30.05.2.01.0002.	Pameran Dagang Nasional	Kab. Maros	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	11	0	Pameran Dagang Nasional	Kab. Maros	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	11	0	
3.30.05.2.01.0003.	Pameran Dagang Lokal	Kab. Maros	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	11	0	Pameran Dagang Lokal	Kab. Maros	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	11	0	
3.30.05.2.01.0004.	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Maros	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	2	6.288.000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Maros	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2	5.460.000	
3.30.05.2.01.0005.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Maros	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi	Produk	11	5.926.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Maros	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi	11	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Materi Promosi						Materi Promosi			
3.30.07.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Diskopurindag**	**Persentase Produk Dalam Negeri Yang Dipasarkan Di Pasar Rakyat Dan Ritel Modern**	**Persen**	**84**	**0**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Diskopurindag**	**Persentase Produk Dalam Negeri Yang Dipasarkan Di Pasar Rakyat Dan Ritel Modern**	**84**	**0**	
3.30.07.2.01.	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Kab. Maros**	**Jumlah perusahaan dalam negeri yang melaksanakan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk**	**Perusahaan**	**100**	**0**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Kab. Maros**	**Jumlah perusahaan dalam negeri yang melaksanakan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk**	**100**	**0**	
3.30.07.2.01.0004.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kab. Maros	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	100	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kab. Maros	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	100	0	
3.30.07.2.01.0005.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	100	0	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100	0	
3.30.07.2.01.0006.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	Kab. Maros	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi	UMKM	100	0	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk	Kab. Maros	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran	100	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			
	Sasaran 4. Meningkatnya Kontribusi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri	**Kab. Maros**	**Persentase Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri**	**Persen**	**20**	**1.423.186.757**	**Sasaran 4. Meningkatnya Kontribusi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri**	**Kab. Maros**	**Persentase Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri**	**20**	**1.164.832.757**	
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
3.31.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**					
3.31.02.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kab. Maros**	**Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri**	**Persen**	**100**	**1.393.966.757**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Kab. Maros**	**Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri**	**100**	**1.135.612.757**	
3.31.02.2.01.	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Luas areal pengembangan kawasan industri yang sesuai dengan RTRW**	**Ha**	**200**	**1.393.966.757**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Luas areal pengembangan kawasan industri yang sesuai dengan RTRW**	**200**	**1.135.612.757**	
3.31.02.2.01.0001.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	Dokumen	1	0	Penyusunan Rencana Pembangunan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan	1	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kabupaten/Kota		Industri				Industri Kabupaten/Kota		Industri			
3.31.02.2.01.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	20.738.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	0	
3.31.02.2.01.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	28.801.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	0	
3.31.02.2.01.0004.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	3	1.126.939.257	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3	787.109.257	Usulan langsung masy/ lembaga
3.31.02.2.01.0005.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	3	217.488.500	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3	348.503.500	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.31.02.2.01.0006.	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	4	0	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4	0	
3.31.02.2.01.0007.	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Maros	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi	1	0	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Maros	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1	0	
3.31.02.2.01.0008.	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi. Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	1	0	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi. Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1	0	
3.31.02.2.01.0009.	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Maros	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	Laporan	1	0	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Maros	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	1	0	
3.31.02.2.	Rekomendasi	Kab.	Jumlah	Rekomen	1	0	Rekomendasi	Kab.	Jumlah	1	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
01.0010.	Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Maros	rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	dasi			Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Maros	rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri			
3.31.03.	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Maros**	**Persentase Pengendalian Usaha Industri**	**Persen**	**100**	**0**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA**	**Kab. Maros**	**Persentase Pengendalian Usaha Industri**	**100**	**0**	
3.31.03.2.01.	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Indsutri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Indsutri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	**1**	**0**	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Indsutri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Indsutri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**1**	**0**	
3.31.03.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	Dokumen	1	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	1	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
3.31.03.2.01.0004.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Maros	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Dokumen	1	0	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kab. Maros	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri	1	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat						Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			
3.31.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INSUDTRI NASONAL**	**Kab. Maros**	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Industri Yang Dimanfaatkan Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Melalui Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persen**	**90**	**29.220.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INSUDTRI NASONAL**	**Kab. Maros**	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Industri Yang Dimanfaatkan Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Melalui Sistem Informasi Industri Nasional**	**90**	**29.220.000**	
3.31.04.2.01.	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah jenis informasi yang tersedia dan termanfaatkan untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI**	**Jenis**	**1**	**29.220.000**	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah jenis informasi yang tersedia dan termanfaatkan untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI**	**1**	**29.220.000**	
3.31.04.2.01.0001.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	Dokumen	1	29.220.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	1	29.220.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
3.31.04.2.01.0002.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	0	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1	0	
3.31.04.2.01.0003.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	0	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	0	
	Sasaran 5. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	**Kab. Maros**	**Inflasi Pada Tingkat Grosir**	**Persen**	**3,08**	**26.305.000**	**Sasaran 5. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok**	**Kab. Maros**	**Inflasi Pada Tingkat Grosir**	**3,08**	**18.685.000**	
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN**						**URUSAN PEMERINTAHAN**					

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	PILIHAN						**PILIHAN**					
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					
3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kab. Maros**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran**	**Persen**	**100**	**26.305.000**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kab. Maros**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran**	**100**	**18.685.000**	
3.30.04.2.02.	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jenis bahan pokok dan barang penting yang harganya dapat dikendalikan**	**Jenis**	**22**	**17.945.000**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jenis bahan pokok dan barang penting yang harganya dapat dikendalikan**	**22**	12.535.000	
3.30.04.2.02.0001.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	0	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	0	
3.30.04.2.02.0002.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Laporan	250	12.935.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	250	7.850.000	Usulan langsung masy/ lembaga

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
3.30.04.2.02.0003.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	12	5.010.000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	4.685.000	
3.30.04.2.03.	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah distributor pupuk dan pestisida bersubsidi di Kabupaten Maros yang diawasi**	**Perusahaan**	**7**	**8.360.000**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah distributor pupuk dan pestisida bersubsidi di Kabupaten Maros yang diawasi**	**7**	6.150.000	
3.30.04.2.03.0001.	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	12	0	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	12	0	
3.30.04.2.03.0002.	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	1	0	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1	0	
3.30.04.2.03.0003.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Laporan	84	8.360.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	84	6.150.000	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%						Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			
	Tujuan 4. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan	**Kab. Maros**	**Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan Sesuai Standar**	**Persen**	**100**	**2.245.670.000**	**Tujuan 4. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan**	**Kab. Maros**	**Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan Sesuai Standar**	**100**	968.827.671	
	Sasaran 6. Meningkatnya Ketersediaan Pasar Rakyat Sesuai Standar di Setiap Wilayah Kecamatan	**Kab. Maros**	**Persentase Ketersediaan Pasar Rakyat Sesuai Standar**	**Persen**	**100**	**2.245.670.000**	**Sasaran 6. Meningkatnya Ketersediaan Pasar Rakyat Sesuai Standar di Setiap Wilayah Kecamatan**	**Kab. Maros**	**Persentase Ketersediaan Pasar Rakyat Sesuai Standar**	**100**	968.827.671	
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					
3.30.03.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Kab. Maros**	**Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat**	**Persen**	**100**	**2.245.670.000**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Kab. Maros**	**Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat**	**100**	968.827.671	
3.30.03.2.01.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kab. Maros**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik**	**Unit**	**26**	**2.245.670.000**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Kab. Maros**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik**	**26**	968.827.671	
3.30.03.2.01.0001.	Penyediaan Sarana Distribusi	Kab. Maros	Jumlah Sarana Distribusi	Unit	26	2.245.670.000	Penyediaan Sarana Distribusi	Kab. Maros	Jumlah Sarana Distribusi	26	968.827.671	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Perdagangan		Perdagangan				Perdagangan		Perdagangan			
3.30.03.2.01.0002.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	26	0	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	26	0	
3.30.03.2.01.0003.	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Maros	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Unit	25	0	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Maros	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	25	0	
3.30.03.2.01.0004.	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Maros	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Unit	25	0	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Kab. Maros	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	25	0	
3.30.03.2.02.	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Kab. Maros**	**Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang memiliki kapasitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan berlaku**	**Orang**	**125**	**0**	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Kab. Maros**	**Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang memiliki kapasitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan berlaku**	**125**	**0**	
3.30.03.2.02.0001.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1	0	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	0	
3.30.03.2.02.0002.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola	Dokumen	1	0	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola	1	0	

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Sarana Distribusi Perdagangan						Sarana Distribusi Perdagangan			

2.5. Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja pembangunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros tahun 2024 merupakan bagian integral dari rangkaian penyelenggaraan pembangunan Daerah yang dituangkan didalam rencana kerja Pemerintah daerah Tahun 2024.

Penetapan program dan kegiatan penyelenggaraan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, mengacu pada hasil kajian dari pelaksanaan musrenbang kecamatan. Usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan dengan melalui jaring aspirasi dari kelompok masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan hasil musrenbang dapat disajikan pada tabel Hasil Musrenbang untuk usulan program untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan PerdaganganKabupaten Maros

	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran Volume	Catatan Penting
	Tujuan 2. Meningkatkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	**Kab. Maros**	**Pertumbuhan Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor**	**Persen**	**6**	
	Sasaran 2. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	**Kab. Maros**	**Indeks Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persen**	**100**	
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					
3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Diskopurindag**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran**	**Persen**	**95**	
3.30.04.2.01.	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia**	**Jenis**	**22**	
3.30.04.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Maros, Mandai, Bontoa. Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	243	Usulan langsung masy/ lembaga
	Tujuan 3. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	**Kab. Maros**	**Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**	**Persen**	**5**	
		Kab. Maros	**Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB**	**Persen**	**20**	

	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran Volume	Catatan Penting
	Sasaran 3. Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan	**Kab. Maros**	**Persentase Pertumbuhan UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan Produknya Melalui Sistem Elektronik**	**Persen**	**7**	
		Kab. Maros	**Persentase Peningkatan Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan**	**Persen**	**22**	
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					
2.17.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**					
2.17.05.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Diskopurindag**	**Persentase Koperasi Berkinerja Baik**	**Persen**	**72,27**	
2.17.05.2.01.	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	Kab. Maros	**Jumlah pengurus koperasi yang memiliki peningkatan kualitas dan kapasitas**	**Orang**	**100**	
2.17.05.2.01.0001.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Malllawa, Gatarang Matinggi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	100	Usulan langsung masy/ lembaga
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**Kab. Maros**	**Persentase Koperasi Aktif**	**Persen**	**71,62**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Kab. Maros**	**Jumlah Koperasi yang memperoleh perlindungan usaha dan pemberdayaan kopeasi**	**Unit**	**50**	
01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Rompegading Kec. Cenrana, Dusun Panaikang, Pa''rasangan Beru & Balosi Desa Pajukukang Kec. Bontoa, Dusun , Kab. Maros, Bontoa, Pajukukang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Koperasi	50	Usulan langsung masyarakat/ lembaga

	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran Volume	Catatan Penting
2.17.07.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Diskopurindag**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persen**	**100**	
2.17.07.2.01.	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Kab. Maros**	**Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha.**	**Unit Usaha**	**33475**	
2.17.07.2.01.0002.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lau, Soreang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	60	Usulan langsung masy/ lembaga
2.17.07.2.01.0003.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa. Marusu, Temmapaduae. Turikale, Adatongeng	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	1400	Usulan langsung masy/ lembaga
2.17.07.2.01.0015.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa. Camba, Mario Pulana. Camba, Pattiro Deceng. Bantimurung, Leang Leang. Maros Baru, Mattiro Tasi. Bontoa, Tunikamaseang. Marusu, Temmapaduae. Simbang, Jenetaesa. Tompobulu, Tompobulu. Tompobulu, Bonto Matinggi. Moncong Loe, Bonto Bunga. Turikale, Turikale. Turikale,	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	100	Usulan langsung masy/ lembaga

	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran Volume	Catatan Penting
		Taroada. Turikale, Raya				
2.17.08.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Diskopurindag**	**Persentase UMKM Yang Mengalami Peningkatan Permodalan, Jenis Usaha, Nilai Pemasaran, Kualitas dan Kuantitas Produksi.**	**Persen**	**70,00**	
2.17.08.2.01.	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Kab. Maros**	**Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi**	**Unit Usaha**	**150**	
2.17.08.2.01.0006.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kab. Maros, Bantimurung, Leang Leang. Lau, Bonto Marranu. Turikale, Bori Bellaya	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	150	Usulan langsung masy/ lembaga
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**					
3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Kab. Maros**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran**	**Persen**	**100**	
3.30.04.2.02.	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jenis bahan pokok dan barang penting yang harganya dapat dikendalikan**	**Jenis**	**22**	
3.30.04.2.02.0002.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Maros, Mandai, Bontoa. Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	250	Usulan langsung masy/ lembaga

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan untuk kegiatan tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN MAROS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	Diskopurindag					10.295.866.211				10.713.866.211		418.000.000	
	Tujuan 1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Yang Professional dan Berkinerja Tinggi	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros	Nilai Indeks	Kel. Pettuadae	B (66)	7.851.763.283	APBD	Kel. Pettuadae	B (66)	7.924.571.783	APBD	72.808.500	
	Sasaran 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Maros	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Level	Kel. Pettuadae	BB (75)	7.851.763.283	APBD	Kel. Pettuadae	BB (75)	7.924.571.783	APBD	72.808.500	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	MENENGAH												
2.17.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**Kel. Pettuadae**	**100**	7.851.763.283	**APBD**	**Kel. Pettuadae**	**100**	**7.924.571.783**	**APBD**	**72.808.500**	
2.17.01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**Kel. Pettuadae**	**19**	15.500.000	**APBD**	**Kel. Pettuadae**	**19**	15.500.000	**APBD**		
2.17.01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kel. Pettuadae	2	1.865.000	APBD	Kel. Pettuadae	2	1.865.000	APBD		
2.17.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kel. Pettuadae	1	4.210.000	APBD	Kel. Pettuadae	1	4.210.000	APBD		
2.17.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kel. Pettuadae	1	2.685.000	APBD	Kel. Pettuadae	1	2.685.000	APBD		
2.17.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Kel. Pettuadae	1	2.785.000	APBD	Kel. Pettuadae	1	2.785.000	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.17.01.2.01.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kel. Pettuadae	1	2.125.000	APBD	Kel. Pettuadae	1	2.125.000	APBD		
2.17.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kel. Pettuadae	1	905.000	APBD	Kel. Pettuadae	1	905.000	APBD		
2.17.01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kel. Pettuadae	12	925.000	APBD	Kel. Pettuadae	12	925.000	APBD		
2.17.01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	**Kel. Pettuadae**	**82**	5.581.364.283	**APBD**	**Kel. Pettuadae**	**82**	5.581.364.283	**APBD**		
2.17.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kel. Pettuadae	64	5.415.214.783	APBD	Kel. Pettuadae	64	5.415.214.783	APBD		
2.17.01.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Kel. Pettuadae	12	0	APBD	Kel. Pettuadae	12	0	APBD		
2.17.01.2.02.0003.	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	Kel. Pettuada	12	163.460.000	APBD	Kel. Pettuadae	12	163.460.000	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		e									
2.17.01.2.02.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	Kel. Pettuadae	12	0	APBD	Kel. Pettuadae	12	0	APBD		
2.17.01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.01.2.02.0006.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	Kel. Pettuadae	18	2.689.500	APBD	Kel. Pettuadae	18	2.689.500	APBD		
2.17.01.2.02.0008.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	Kel. Pettuadae	12	0	APBD	Kel. Pettuadae	12	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.17.01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**Kel. Pettuadae**	**51**	3.554.000	**APBD**	**Kel. Pettuadae**	**51**	3.554.000	**APBD**		
2.17.01.2.03.0001.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kel. Pettuadae	12	0	APBD	Kel. Pettuadae	12	0	APBD		
2.17.01.2.03.0003.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	Kel. Pettuadae	1	1.640.000	APBD	Kel. Pettuadae	1	1.640.000	APBD		
2.17.01.2.03.0004.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kel. Pettuadae	12	0	APBD	Kel. Pettuadae	12	0	APBD		
2.17.01.2.03.0005.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kel. Pettuadae	12	1.914.000	APBD	Kel. Pettuadae	12	1.914.000	APBD		
2.17.01.2.03.0006.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Laporan	Kel. Pettuadae	12	0	APBD	Kel. Pettuadae	12	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
		SKPD											
2.17.01.2.03.0007.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.01.2.04.	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**Kel. Pettuadae**	**132**	**0**	**APBD**	**Kel. Pettuadae**	**132**	**0**	**APBD**		
2.17.01.2.04.0001.	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.01.2.04.0002.	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.01.2.04.0003.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	Kel. Pettuadae	26	0	APBD	Kel. Pettuadae	26	0	APBD		
2.17.01.2.04.0004.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	Kel. Pettuadae	26	0	APBD	Kel. Pettuadae	26	0	APBD		
2.17.01.2.04.0005.	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	Kel. Pettuadae	26	0	APBD	Kel. Pettuadae	26	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.17.01.2.04.0006.	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen	Kel. Pettuadae	26	0	APBD	Kel. Pettuadae	26	0	APBD		
2.17.01.2.04.0007.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	Kel. Pettuadae	26	0	APBD	Kel. Pettuadae	26	0	APBD		
2.17.01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Orang**	**Kel. Pettuadae**	**59**	17.991.000	**APBD**	**Kel. Pettuadae**	**59**	17.991.000	**APBD**		
2.17.01.2.05.0001.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kel. Pettuadae	1	14.800.000	APBD	Kel. Pettuadae	1	14.800.000	APBD		
2.17.01.2.05.0003.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.01.2.05.0004.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	Kel. Pettuadae	64	1.586.000	APBD	Kel. Pettuadae	64	1.586.000	APBD		
2.17.01.2.05.0005.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Kel. Pettuadae	90	1.605.000	APBD	Kel. Pettuadae	90	1.605.000	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.17.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Kel. Pettuadae	3	0	APBD	Kel. Pettuadae	3	0	APBD		
2.17.01.2.05.0010.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kel. Pettuadae	64	0	APBD	Kel. Pettuadae	64	0	APBD		
2.17.01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kel. Pettuadae	64	0	APBD	Kel. Pettuadae	64	0	APBD		
2.17.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**Jenis**	**Kel. Pettuadae**	**9**	338.692.000	**APBD**	**Kel. Pettuadae**	**9**	**358.272.000**	**APBD**	19.580.000	
2.17.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kel. Pettuadae	1	10.014.000	APBD	Kel. Pettuadae	1	10.014.000	APBD		
2.17.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kel. Pettuadae	2	0	APBD	Kel. Pettuadae	2	0	APBD		
2.17.01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	Kel. Pettuada	2	61.238.000	APBD	Kel. Pettuadae	2	61.238.000	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
		Disediakan		e									
2.17.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kel. Pettuadae	1	45.000.000	APBD	Kel. Pettuadae	1	45.000.000	APBD		
2.17.01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Kel. Pettuadae	2	10.000.000	APBD	Kel. Pettuadae	2	10.000.000	APBD		
2.17.01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Kel. Pettuadae	300	96.000.000	APBD	Kel. Pettuadae	300	96.000.000	APBD		
2.17.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kel. Pettuadae	179	116.440.000	APBD	Kel. Pettuadae	179	136.020.000	APBD	19.580.000	
2.17.01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Kel. Pettuadae	60	0	APBD	Kel. Pettuadae	60	0	APBD		
2.17.01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis**	**Kel. Pettuadae**	**6**	50.500.000	**APBD**	**Kel. Pettuadae**	**6**	65.500.000	APBD	15.000.000	
2.17.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kel. Pettuadae	12	0	APBD	Kel. Pettuadae	12	0	APBD		
2.17.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Kel. Pettuada	3	0	APBD	Kel. Pettuadae	3	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
		yang Disediakan		e									
2.17.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kel. Pettuadae	5	50.500.000	APBD	Kel. Pettuadae	5	65.500.000	APBD	15.000.000	
2.17.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Kel. Pettuadae	3	0	APBD	Kel. Pettuadae	3	0	APBD		
2.17.1.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis**	**Kel. Pettuadae**	**4**	1.724.162.000	**APBD**	**Kel. Pettuadae**	**4**	1.732.212.000	**APBD**	8.050.000	
2.17.1.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kel. Pettuadae	1	12.012.000	APBD	Kel. Pettuadae	1	12.012.000	APBD		
2.17.1.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kel. Pettuadae	12	0	APBD	Kel. Pettuadae	12	0	APBD		
2.17.1.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	Kel. Pettuadae	12	0	APBD	Kel. Pettuadae	12	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
		yang Disediakan											
2.17.1.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kel. Pettuadae	12	1.712.150.000	APBD	Kel. Pettuadae	12	1.720.200.000	APBD	8.050.000	
2.17.1.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**Jenis**	**Kel. Pettuadae**	**11**	**120.000.000**	**APBD**	**Kel. Pettuadae**	**11**	**150.178.500**	**APBD**	**30.178.500**	
2.17.1.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Kel. Pettuadae	19	50.000.000	APBD	Kel. Pettuadae	19	50.000.000	APBD		
2.17.1.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kel. Pettuadae	1	0	APBD	Kel. Pettuadae	1	0	APBD		
2.17.1.2.09.0004.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	Kel. Pettuadae	5	0	APBD	Kel. Pettuadae	5	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.17.1.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Kel. Pettuadae	120	0	APBD	Kel. Pettuadae	120	0	APBD		
2.17.1.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kel. Pettuadae	24	40.000.000	APBD	Kel. Pettuadae	24	40.000.000	APBD		
2.17.1.2.09.0007.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kel. Pettuadae	10	0	APBD	Kel. Pettuadae	10	0	APBD		
2.17.1.2.09.0008.	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	Kel. Pettuadae	2	0	APBD	Kel. Pettuadae	2	0	APBD		
2.17.1.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kel. Pettuadae	26	30.000.000	APBD	Kel. Pettuadae	26	60.178.500	APBD	30.178.500	
2.17.1.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Kel. Pettuadae	26	0	APBD	Kel. Pettuadae	26	0	APBD		
2.17.1.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Kel. Pettuadae	26	0	APBD	Kel. Pettuadae	26	0	APBD		
2.17.1.2.09.0012.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilit	Ha	Kel. Pettuadae	10000	0	APBD	Kel. Pettuadae	10000	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
		asi											
	Tujuan 2. Meningkatkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	**Pertumbuhan Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor**	**Persen**	**Diskopurindag**	**6**	**78.830.000**	**APBD**	**Diskopurindag**	**6**	**78.830.000**	**APBD**		
	Sasaran 2. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	**Indeks Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	**Persen**	**Diskopurindag**	**100**	**78.830.000**	**APBD**	**Diskopurindag**	**100**	**78.830.000**	**APBD**		
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**												
3.30.06.	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Penyelesaian Aduan Konsumen**	**Persen**	**Diskopurindag**	**90**	71.530.000	**APBD**	**Diskopurindag**	**90**	71.530.000	**APBD**		
3.30.06.2.01.	**Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah unit usaha perdagangan yang memiliki cap tanda tera**	**Unit**	**Kab. Maros**	**570**	71.530.000	**APBD**	**Kab. Maros**	**570**	71.530.000	**APBD**		
3.30.06.2.01.0001.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	Kab. Maros	943	58.330.000	APBD	Kab. Maros	943	58.330.000	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
3.30.06.2.01.0002.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	Kab. Maros	88	13.200.000	APBD	Kab. Maros	88	13.200.000	APBD		
3.30.06.2.01.0003.	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	943	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	943	0	APBD		
3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran**	**Persen**	**Diskopurindag**	**95**	7.300.000	**APBD**	**Diskopurindag**	**95**	7.300.000	**APBD**		
3.30.04.2.01.	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia**	**Jenis**	**Kab. Maros**	**22**	7.300.000	**APBD**	**Kab. Maros**	**22**	7.300.000	**APBD**		
3.30.04.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Poko dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	Kab. Maros, Mandai, Bontoa. Turikale, Pettuadae	243	7.300.000	APBD	Kab. Maros, Mandai, Bontoa. Turikale, Pettuadae	243	7.300.000	APBD		Usulan langsung masy/ lembaga
3.30.04.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan	Laporan	Kab. Maros	12	0	APBD	Kab. Maros	12	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat											
3.30.04.2.01.0003.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok an Barang Penting d Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	Kab. Maros	12	0	APBD	Kab. Maros	12	0	APBD		
	Tujuan 3. Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan dan Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	**Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**	**Persen**	**Diskopurindag**	**6**	**542.119.000**	**APBD**	**Diskopurindag**	**6**	**558.119.000**	**APBD**	**16.000.000**	
		Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	**Persen**	**Diskopurindag**	**21**	**888.641.257**	**APBD**	**Diskopurindag**	**21**	**1.164.832.757**	**APBD**	**276.191.500**	
	Sasaran 3. Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan	**Persentase Pertumbuhan UMKM dan Koperasi Yang Memasarkan Produknya Melalui Sistem Elektronik**	**Persen**	**Diskopurindag**	**8**	**536.659.000**	**APBD**	**Diskopurindag**	**8**	**552.659.000**	**APBD**	**16.000.000**	
		Persentase Peningkatan Omzet Pedagang Pada Pasar Kecamatan	**Persen**	**Diskopurindag**	**23**	**5.460.000**	**APBD**	**Diskopurindag**	**23**	**5.460.000**	**APBD**		
2.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK**												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.17.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**												
2.17.02.	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang Cepat, Murah, dan Mudah**	**Persen**	**Diskopurindag**	**90**	13.540.000	**APBD**	**Diskopurindag**	**90**	13.540.000	**APBD**		
2.17.02.2.01.	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam**	**Unit Usaha**	**Kab. Maros**	**187**	13.540.000	**APBD**	**Kab. Maros**	**187**	13.540.000	**APBD**		
2.17.02.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kab. Maros	187	13.540.000	APBD	Kab. Maros	187	13.540.000	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	Kabupaten/Kota												
2.17.02.2.02.	**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koperasi yang memiliki izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam**	**Unit Usaha**	**Kab. Maros**	**4**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**4**	**0**	**APBD**		
2.17.02.2.02.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kab. Maros	4	0	APBD	Kab. Maros	4	0	APBD		
2.17.03.	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Penurunan Jumlah Koperasi Bermasalah dan Berpotensi Masalah**	**Persen**	**Diskopurindag**	**2,43**	**0**	**APBD**	**Diskopurindag**	**2,43**	**0**	**APBD**		
2.17.03.2.01.	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi**	**Jumlah Koperasi berkualitas**	**Unit**	**Kab. Maros**	**254**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**254**	**0**	**APBD**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota												
2.17.03.2.01.0003.	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	Kab. Maros	254	0	APBD	Kab. Maros	254	0	APBD		
2.17.03.2.01.0004.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	Kab. Maros	254	0	APBD	Kab. Maros	254	0	APBD		
2.17.04.	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Koperasi Berkategori Sehat**	**Persen**	**Diskopurindag**	**72,27**	21.300.000	**APBD**	**Diskopurindag**	**72,27**	21.300.000	**APBD**		
2.17.04.2.01.	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang memperoleh sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi**	**Unit**	**Kab. Maros**	**353**	21.300.000	**APBD**	**Kab. Maros**	**353**	21.300.000	**APBD**		
2.17.04.2.01.0001.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah	Unit Usaha	Kab. Maros	353	21.300.000	APBD	Kab. Maros	353	21.300.000	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dilakukan Penilaian Kesehatan											
2.17.04.2.01.0002.	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Kab. Maros	353	0	APBD	Kab. Maros	353	0	APBD		
2.17.05.	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase Koperasi Berkinerja Baik**	**Persen**	**Diskopurindag**	**72,27**	**0**	**APBD**	**Diskopurindag**	**72,27**	**0**	**APBD**		
2.17.05.2.01.	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah pengurus koperasi yang memiliki peningkatan kualitas dan kapasitas**	**Orang**	Kab. Maros	**100**	**0**	**APBD**	Kab. Maros	**100**	**0**	**APBD**		
2.17.05.2.01.0001.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Malllawa, Gatarang Matinggi	100	0	APBD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Malllawa, Gatarang Matinggi	100	0	APBD		Usulan langsung masy/ lembaga
2.17.06.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase Koperasi Aktif**	**Persen**	**Diskopurindag**	**71,62**	66.200.000	**APBD**	**Diskopurindag**	**71,62**	66.200.000	**APBD**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												
2.17.06.2.01.	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Koperasi yang memperoleh perlindungan usaha dan pemberdayaan kopeasi**	**Unit**	**Kab. Maros**	**50**	66.200.000	**APBD**	**Kab. Maros**	**50**	66.200.000	**APBD**		
2.17.06.2.01.0002.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		
2.17.06.2.01.0003.	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat	Kab. Maros	10	0	APBD	Kab. Maros	10	0	APBD		
2.17.06.2.01.0004.	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	Kab. Maros	60	0	APBD	Kab. Maros	60	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.17.06.2.01.0005.	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		
2.17.06.2.01.0006.	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha	Kab. Maros	30	0	APBD	Kab. Maros	30	0	APBD		
2.17.06.2.01.0007.	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha	Kab. Maros	60	0	APBD	Kab. Maros	60	0	APBD		
2.17.06.2.01.0008.	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit Usaha	Kab. Maros	365	0	APBD	Kab. Maros	365	0	APBD		
2.17.06.2.01.0009.	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kab. Maros	100	66.200.000	APBD	Kab. Maros	100	66.200.000	APBD		
2.17.07.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN**	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**	**Persen**	**Diskopurindag**	**100**	435.619.000	**APBD**	**Diskopurindag**	**100**	**451.619.000**	**APBD**	16.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												
2.17.07.2.01.	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembinaan dalam bentuk bantuan modal kemitraan, fasilitasi kemudahan perizinan, pelatihan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha.**	**Unit Usaha**	**Kab. Maros**	**33475**	435.619.000	**APBD**	**Kab. Maros**	**33475**	**451.619.000**	**APBD**	16.000.000	
2.17.07.2.01.0002.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lau, Soreang	60	28.729.000	APBD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Lau, Soreang	60	93.729.000	APBD	65.000.000	Usulan langsung masy/ lembaga
2.17.07.2.01.0003.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa. Marusu, Temmapaduae.	1400	103.928.000	APBD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa. Marusu, Temmapaduae.	1400	103.928.000	APBD		Usulan langsung masy/ lembaga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
				Turikale, Adatongeng				Turikale, Adatongeng					
2.17.07.2.01.0004.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	100	50.000.000	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	100	50.000.000	APBD		
2.17.07.2.01.0005.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingandalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	100	25.090.000	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	100	25.090.000	APBD		
2.17.07.2.01.0007.	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		
2.17.07.2.01.0008.	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		
2.17.07.2.01.0009.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha	Kab. Maros	1400	0	APBD	Kab. Maros	1400	0	APBD		
2.17.07.2.01.0010.	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	Kab. Maros	30	0	APBD	Kab. Maros	30	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.17.07.2.01.0011.	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	Kab. Maros	1400	0	APBD	Kab. Maros	1400	0	APBD		
2.17.07.2.01.0012.	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	Kab. Maros	100	144.000.000	APBD	Kab. Maros	100	95.000.000	APBD	-49.000.000	
2.17.07.2.01.0013.	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		
2.17.07.2.01.0014.	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	Kab. Maros	1	33.872.000	APBD	Kab. Maros	1	33.872.000	APBD		
2.17.07.2.01.0015.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa. Camba, Mario Pulana. Camba, Pattiro Deceng. Bantimurung, Leang Leang. Maros Baru, Mattiro	100	50.000.000	APBD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa. Camba, Mario Pulana. Camba, Pattiro Deceng. Bantimurung, Leang Leang. Maros Baru, Mattiro	100	50.000.000	APBD		Usulan langsung masy/ lembaga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
				Tasi. Bontoa, Tunikamaseang. Marusu, Temmapaduae. Simbang, Jenetaesa. Tompobulu, Tompobulu. Tompobulu, Bonto Matinggi. Moncong Loe, Bonto Bunga. Turikale, Turikale. Turikale, Taroada. Turikale, Raya				Tasi. Bontoa, Tunikamaseang. Marusu, Temmapaduae. Simbang, Jenetaesa. Tompobulu, Tompobulu. Tompobulu, Bonto Matinggi. Moncong Loe, Bonto Bunga. Turikale, Turikale. Turikale, Taroada. Turikale, Raya					
2.17.08.	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase UMKM Yang Mengalami Peningkatan Permodalan, Jenis Usaha, Nilai**	**Persen**	**Diskopurindag**	**70,00**	**0**	**APBD**	**Diskopurindag**	**70,00**	**0**	**APBD**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
		Pemasaran, Kualitas dan Kuantitas Produksi.											
2.17.08.2.01.	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya menjadi usaha kecil melalui pelatihan pengembangan produksi dan pengeolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi**	**Unit Usaha**	**Kab. Maros**	**150**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**150**	**0**	**APBD**		
2.17.08.2.01.0002.	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	Kab. Maros	120	0	APBD	Kab. Maros	120	0	APBD		
2.17.08.2.01.0003.	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		
2.17.08.2.01.0004.	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Lembaga	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		
2.17.08.2.01.0005.	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		
2.17.08.2.01.0006.	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta	Unit Usaha	Kab. Maros, Bantimurung, Leang Leang. Lau,	150	0	APBD	Kab. Maros, Bantimurung, Leang Leang. Lau,	150	0	APBD		Usulan langsung masy/ lembaga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
		Desain dan Teknologi		Bonto Marranu. Turikale, Bori Bellaya				Bonto Marranu. Turikale, Bori Bellaya					
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**												
3.30.02.	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Permohonan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Diselesaikan Dalam Waktu yang singkat, Murah, dan Mudah**	**Persen**	**Diskopurindag**	**100**	**0**	**APBD**	**Diskopurindag**	**100**	**0**	**APBD**		
3.30.02.2.01.	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Jumlah penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Izin**	**Kab. Maros**	**50**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**50**	**0**	**APBD**		
3.30.02.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	Dokumen	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	50	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	50	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
3.30.02.2.01.0002.	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Laporan	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
3.30.02.2.02.	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Jumlah tanda daftar gudang yang diterbitkan**	**TDP**	**Kab. Maros**	**30**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**30**	**0**	**APBD**		
3.30.02.2.02.0001.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	10	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	10	0	APBD		
3.30.02.2.03.	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri**	**Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Dari Waralaba Dalam Negeri**	**STPW Luar Negeri**	**Kab. Maros**	**20**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**20**	**0**	**APBD**		
3.30.02.2.03.0001.	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda	Dokumen	Kab. Maros,	15	0	APBD	Kab. Maros,	15	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		Turikale, Pettuadae				Turikale, Pettuadae					
3.30.02.2.03.0002.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	15	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	15	0	APBD		
3.30.02.2.03.0003.	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Kab. Maros	35	0	APBD	Kab. Maros	35	0	APBD		
3.30.02.2.03.0004.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen	Kab. Maros	35	0	APBD	Kab. Maros	35	0	APBD		
3.30.02.2.04.	**Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar**	**Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari**	**STPW Luar Negeri**	**Kab. Maros**	**20**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**20**	**0**	**APBD**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	Negeri	**Waralaba Luar Negeri**											
3.30.02.2.04.0001.	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW} Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	10	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	10	0	APBD		
3.30.02.2.04.0002.	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dokumen	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	10	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	10	0	APBD		
3.30.02.2.04.0003.	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen	Kab. Maros	20	0	APBD	Kab. Maros	20	0	APBD		
3.30.02.2.04.0004.	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau	Dokumen	Kab. Maros	20	0	APBD	Kab. Maros	20	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
		Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri											
3.30.02.2.05.	**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat**	**Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat yang diterbitkan**	**Izin**	**Kab. Maros**	**100**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**100**	**0**	**APBD**		
3.30.02.2.05.0001.	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	30	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	30	0	APBD		
3.30.02.2.05.0002.	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B	dokumen	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
		dan C yang diterbitkan melalui SistemPelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik											
3.30.02.2.06.	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Gudang**	**Kab. Maros**	**50**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**50**	**0**	**APBD**		
3.30.02.2.06.0001.	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	1	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	1	0	APBD		
3.30.02.2.06.0002.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
3.30.02.2.06.0003.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan	Laporan	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 P- B2)											
3.30.02.2.07.	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**	**Persentase Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) yang dikeluarkan**	**Dokumen**	**Kab. Maros**	**100**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**100**	**0**	**APBD**		
3.30.02.2.07.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	5	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	5	0	APBD		
3.30.05.	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Kenaikan Nilai Ekspor Bersih Perdagangan**	**Persen**	**Diskopurindag**	**0,99**	5.460.000	**APBD**	**Diskopurindag**	**0,99**	5.460.000	**APBD**		
3.30.05.2.01.	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis produk ekspor unggulan yang dipromosikan melalui pameran daganga dan misi dagang**	**Jenis**	**Kab. Maros**	**11**	5.460.000	**APBD**	**Kab. Maros**	**11**	5.460.000	**APBD**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
3.30.05.2.01.0002.	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	11	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	11	0	APBD		
3.30.05.2.01.0003.	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	11	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	11	0	APBD		
3.30.05.2.01.0004.	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	2	5.460.000	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	2	5.460.000	APBD		
3.30.05.2.01.0005.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	11	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	11	0	APBD		
3.30.07.	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Produk Dalam Negeri Yang Dipasarkan Di Pasar Rakyat Dan Ritel Modern**	**Persen**	**Diskopurindag**	**84**	**0**	**APBD**	**Diskopurindag**	**84**	**0**	**APBD**		
3.30.07.2.01.	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Jumlah perusahaan dalam negeri yang melaksanakan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk**	**Perusahaan**	**Kab. Maros**	**100**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**100**	**0**	**APBD**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
3.30.07.2.01.0004.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		
3.30.07.2.01.0005.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		
3.30.07.2.01.0006.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	Kab. Maros	100	0	APBD	Kab. Maros	100	0	APBD		
	Sasaran 4. Meningkatnya Kontribusi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri	**Persentase Kontribusi IKM terhadap Sektor Industri**	**Persen**	**Kab. Maros**	**20**	**888.641.257**	**APBD**	**Kab. Maros**	**20**	**1.164.832.757**	**APBD**	**276.191.500**	
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
3.31.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**												
3.31.02.	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Kesesuaian Antara RTRW dan Rencana Kawasan Industri**	**Persen**	**Kab. Maros**	**100**	859.421.257	**APBD**	**Kab. Maros**	**100**	**1.135.612.757**	**APBD**	**276.191.500**	
3.31.02.2.01.	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Luas areal pengembangan kawasan industri yang sesuai dengan RTRW**	**Ha**	**Kab. Maros**	**200**	859.421.257	**APBD**	**Kab. Maros**	**200**	**1.135.612.757**	**APBD**	**276.191.500**	
3.31.02.2.01.0001.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
3.31.02.2.01.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
3.31.02.2.01.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
3.31.02.2.	Koordinasi,	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	Kab.	3	492.443.257	APBD	Kab.	3	787.109.257	APBD	294.666.000	Usulan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
01.0004.	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Maros				Maros					langsung masy/ lembaga
3.31.02.2. 01.0005.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Kab. Maros	3	366.978.000	APBD	Kab. Maros	3	348.503.500	APBD	-18.474.500	
3.31.02.2. 01.0006.	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	Kab. Maros	4	0	APBD	Kab. Maros	4	0	APBD		
3.31.02.2. 01.0007.	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
3.31.02.2. 01.0008.	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi. Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
3.31.02.2.	Penyediaan Data dan	Data dan informasi	Laporan	Kab.	1	0	APBD	Kab.	1	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
01.0009.	Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri		Maros				Maros					
3.31.02.2.01.0010.	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
3.31.03.	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pengendalian Usaha Industri**	**Persen**	**Kab. Maros**	**100**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**100**	**0**	**APBD**		
3.31.03.2.01.	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Indsutri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Indsutri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	**Kab. Maros**	**1**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**1**	**0**	**APBD**		
3.31.03.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil	Dokumen	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	Kabupaten/Kota	dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat											
3.31.03.2.01.0004.	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain	Dokumen	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
		bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat											
3.31.04.	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INSUDTRI NASONAL**	**Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Industri Yang Dimanfaatkan Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Melalui Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persen**	**Kab. Maros**	**90**	**29.220.000**	**APBD**	**Kab. Maros**	**90**	**29.220.000**	**APBD**		
3.31.04.2.01.	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota**	**Jumlah jenis informasi yang tersedia dan termanfaatkan untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI**	**Jenis**	**Kab. Maros**	**1**	**29.220.000**	**APBD**	**Kab. Maros**	**1**	**29.220.000**	**APBD**		
3.31.04.2.01.0001.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri	Dokumen	Kab. Maros	1	29.220.000	APBD	Kab. Maros	1	29.220.000	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
		Nasional (SIINas)											
3.31.04.2.01.0002.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
3.31.04.2.01.0003.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
	Sasaran 5. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	**Inflasi Pada Tingkat Grosir**	**Persen**	**Kab. Maros**	**3,08**	**18.685.000**	**APBD**	**Kab. Maros**	**3,08**	**18.685.000**	**APBD**		
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG**												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	PERDAGANGAN												
3.30.04.	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Penting Yang Diperdagangkan di Tempat Pemasaran**	**Persen**	**Kab. Maros**	**100**	**18.685.000**	**APBD**	**Kab. Maros**	**100**	**18.685.000**	**APBD**		
3.30.04.2.02.	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jenis bahan pokok dan barang penting yang harganya dapat dikendalikan**	**Jenis**	**Kab. Maros**	**22**	12.535.000	**APBD**	**Kab. Maros**	**22**	12.535.000	**APBD**		
3.30.04.2.02.0001.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	Kab. Maros	12	0	APBD	Kab. Maros	12	0	APBD		
3.30.04.2.02.0002.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	Kab. Maros, Mandai, Bontoa. Turikale, Pettuadae	250	7.850.000	APBD	Kab. Maros, Mandai, Bontoa. Turikale, Pettuadae	250	7.850.000	APBD		Usulan langsung masy/ lembaga
3.30.04.2	Pelaksanaan Operasi	Jumlah Laporan	Laporan	Kab.	12	4.685.000	APBD	Kab.	12	4.685.000	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
.02.0003.	Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		Maros				Maros					
3.30.04.2.03.	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah distributor pupuk dan pestisida bersubsidi di Kabupaten Maros yang diawasi**	**Perusahaan**	**Kab. Maros**	**7**	6.150.000	**APBD**	**Kab. Maros**	**7**	6.150.000	**APBD**		
3.30.04.2.03.0001.	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	12	0	APBD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	12	0	APBD		
3.30.04.2.03.0002.	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
3.30.04.2.03.0003.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	Kab. Maros	84	6.150.000	APBD	Kab. Maros	84	6.150.000	APBD		
	Tujuan 4. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Perdagangan	**Persentase Ketersediaan Sarana Perdagangan Sesuai Standar**	**Persen**	**Kab. Maros**	**100**	915.827.671	**APBD**	**Kab. Maros**	**100**	968.827.671	**APBD**	53.000.000	
	Sasaran 6. Meningkatnya	**Persentase Ketersediaan Pasar**	**Persen**	**Kab. Maros**	**100**	915.827.671	**APBD**	**Kab. Maros**	**100**	968.827.671	**APBD**	53.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
	Ketersediaan Pasar Rakyat Sesuai Standar di Setiap Wilayah Kecamatan	**Rakyat Sesuai Standar**											
3.	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3.30.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**												
3.30.03.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat**	**Persen**	**Kab. Maros**	**100**	915.827.671	**APBD**	**Kab. Maros**	**100**	968.827.671	**APBD**	53.000.000	
3.30.03.2.01.	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola dengan baik**	**Unit**	**Kab. Maros**	**26**	915.827.671	**APBD**	**Kab. Maros**	**26**	968.827.671	**APBD**	53.000.000	
3.30.03.2.01.0001.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Kab. Maros	26	915.827.671	APBD	Kab. Maros	26	968.827.671	APBD	53.000.000	
3.30.03.2.01.0002.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	Kab. Maros	26	0	APBD	Kab. Maros	26	0	APBD		
3.30.03.2.01.0003.	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Unit	Kab. Maros	25	0	APBD	Kab. Maros	25	0	APBD		
3.30.03.2	Identifikasi terhadap	Jumlah laporan	Unit	Kab.	25	0	APBD	Kab.	25	0	APBD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Rencana Sebelum Perubahan				Rencana Setelah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Catatan Penting
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
.01.0004.	lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang		Maros				Maros					
3.30.03.2.02.	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang memiliki kapasitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan berlaku**	**Orang**	**Kab. Maros**	**125**	**0**	**APBD**	**Kab. Maros**	**125**	**0**	**APBD**		
3.30.03.2.02.0001.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		
3.30.03.2.02.0002.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	Kab. Maros	1	0	APBD	Kab. Maros	1	0	APBD		

BAB IV PENUTUP

1.1. Catatan Penting Yang Perlu Dapat Perhatian

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu dapat perhatian, antara lain :

a. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik;
b. Alokasi APBD Kabupaten Maros untuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros selama ini belum dapat menyentuh semua kebutuhan masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Maros;
c. Optimalisasi peran serta seluruh stakeholder merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada pembinaan koperasi, UMKM dan Perdagangan yang ada di Kabupaten Maros.

1.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksakan pada tahun 2024. Rencana Kerja disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Dalam Perubahan Rencana Kerja ini terdapat kebijakan Pembangunan yang menjadi rujukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada visi Bupati Maros 2021-2026 yaitu "Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing", yang memberikan arahan dalam mengoptimalkan pembangunan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros ini disusun dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun perubahan program dan kegiatan tahun 2024.

Program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang tersusun dalam Perubahan rencana kerja Tahun 2024 diharapkan dapat dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros atau sumber dana lain yang dapat meningkatkan pertumbuhan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Maros.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana kerja tindak lanjut dari program kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros adalah tetap mengedepankan prinsip kepemerintahan yang baik dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan yang dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan pembinaan dan pembangunan urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros yang masih belum optimal bila dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya yang telah berkembang lebih dahulu dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

Oleh karena itu komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros, serta dukungan dari pimpinan eksekutif dan pihak legislative serta oleh segenap aparatur daerah dan dukungan partisipasi masyarakat dan pemerhati koperasi, serta para wirausaha yang akan mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan apresiasinya di dalam mendukung mengimplementasikan rencana kerja ini.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros ini, maka perncanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dan lebih terarah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan management Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros sesuai kebutuhan dan harapan stake holder.

KABUPATEN MAROS

RENCANA KERJA PERUBAHAN

DP3ADALDUKKB



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATENMAROS

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas petunjuk dan perkenannya, sehingga dokumen ***" RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA"*** dapat diselesaikan.

Rencana Kerja P ini dapat disusun berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros yang diupayakan dapat mencakup dan mengakomodir kepentingan pelayanan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesempurnaan perjalanan rencana kerja ini sangat ditunjang oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, efektifitas koordinasi, pengendalian pengawasan berbagai pihak termasuk masyarakat dan unit kerja lain sebagai pengguna kegiatan yang telah diprogramkan.

Dari sisi tersebut diatas dapat menentukan besarnya kinerja yang dilakukan oleh bagian pada lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlidnugan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros yang semakin tahun mengalami peningkatan.

Demikian pengantar ini, mudah-mudahan dokumen ini dapat menjadi dasar dan acuan yang mendekati kesempurnaan pelaksanaan tugas yang efesien, efektif dan berkelanjutan.

Maros, 13 Juli 2024
Kepala Dinas DP3ADALDUKKB

A.ZULKIFILI RISWAN AKBAR, S.STP
NIP :198403122002121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan Renja 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PD TAHUN LALU 13

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra 13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 28

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 35

2.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 40

2.5. Analisis Lingkungan (Internal dan Eksternal) / SWOT Perangkat Daerah 43

2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Maros 46

2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 52

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 57

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 57

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja 58

3.3 Program dan Kegiatan 60

BAB IV. Perubahan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 79

BAB V. PENUTUP 91

LAMPIRAN 100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2022-2026 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Pokok PD. Rencana Kerja (Renja) Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan, penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Revisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2022-2026. Rencana Kerja (Renja) Pokok Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka di susunlah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maros.

Sebagaimana dengan bidang tugas lingkup Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai pelayanan administrasi, koordinasi, pengendalian, dan pembinaan kemasyarakatan yang dengan berdasarkan visi dan misi kabupaten yang telah di rumuskan, diharapkan dapat menjadi payung perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi agar supaya sasaran dan tujuan dapat tercapai sesuai yang di harapkan.

MISI MAROS :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Birokrasi dan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Pemenuhan Kenutuhan Dasar, Pelayanan Dasar, Penegakan Hukum, Nilai Budaya, dan Keagamaan Secara Inklusif
3. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Local dan Penataan Wilaya Secara Merata Sesuai Kondisi Geografis Wilaya
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros dalam menyusun Rencana Kerja Pokok tahun 2025 mengakomodir seluruh kepentingan dasar dan kebijakan pemerintah daerah, baik Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun sifatnya koordinatif dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

Begitupula program dan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilanjutkan dengan mekanisme dan penyusunan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku:

Tingkat pencapaian dari Renja Pokok tersebut sangat tergantung dari realisasi pagu anggaran yang tersedia serta tingkat kemampuan aparatur untuk melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Rencana kinerja PD memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan komponen kunci untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah daerah. Sedangkan perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah diidentifikasikan dalam rencana strategis, termasuk didalamnya pembuatan target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja.

Rencana Kerja Pokok ini memuat program, kegiatan serta sasaran yang responsif gender akan dicapai berdasarkan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang tersedia sebagai salah

satu kinerja keberhasilan kegiatan tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan PD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,(Tambahan Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republilk Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedomana Umum Pelaksanaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun2021 – 2026 (Lembaran Daearah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Lembran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
28. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
29. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengrusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Maros Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 52);

1.3 Maksud dan Tujuan Renja

Memberi Arahan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Tahun Pertama dari Renstra Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan :

1. Acuan Bagi setiap Bidang dan Aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun 2025
2. Acuan bagi Seluruh Stakcholder Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2025, adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros,

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Pokok PD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan PD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA POKOK PD TAHUN LALU

2.1 Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Pokok PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Pokok PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Pokok PD tahun-tahun sebelumnya

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Sub bab ini memuat kajian tentang tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tupoksi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dampak pelayanan PD terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, SPM dan MDGs

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Memuat uraian mengenai penelaahan terhadap kebijakan dan prioritas nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan PD

Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Renja Perubahan PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tupoksi PD dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.3 Program dan Kegiatan PD Tahun 2024

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan PD serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV : PERUBAHAN RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksnakan pada tahun 2024, maka diperoleh hasil sebgai berikut :

1. Program yang dilaksanakan sebanyak 10 program. Kemudian program yang mencapai target sebanyak 10 Program, Semua program mencapai target, tidak ada program yang melampaui target.
2. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 30 Kegiatan. Kemudian kegiatan yang mencapai target sebanyak 26 Kegiatan , seluruh kegiatan mencapai target.
3. Sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 64 sub kegiatan. Kemudian sub kegiatan yang mencapai target sebanyak 64 sub kegiatan, tidak mencapai target 4 sub kegiatan yaitu Penyusunan Grand Design Kependudukan (GDPK) program,

Adanya beberapa program, kegiatand an sub kegiatan yang tidak mencpai target disebakan, pada saat penyusunan anggaran perubaha, tidak disertai dengan perubahan target, selain itu adanya penetapan target yang terlalu tinggi dalam RENSTRA Tahun 2021-2026 juga menyebabkan beberapa target program tidak dapat terpenuhi.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra PD S/D TAHUN 2022 Dinas Pemberdayaan PerempuanPerlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Maros

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg						Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
												Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2						3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
1	1	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					Nilai SAKIP	Skor	100,00	67,00	72,00	67,00	93,06	5.806.940.175,00	3.133.080.540,00	53,95	46,37	
1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	5.806.940.175,00	3.133.080.540,00	53,95	46,37	
1	1	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	19,00	21,05	19,00	4,00	21,05	15.850.000,00	9.050.000,00	57,10	70,00	44,00
1	1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	11,00	9,09	2,00	1,00	50,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	50,00	
1	1	1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5,00	20,00	1,00	1,00	100,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	100,00	
1	1	1	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA- PD	Dokumen	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	1	1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-PD	Dokumen	5,00	20,00	1,00	1,00	100,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	100,00	
1	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- PD	Dokumen	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
					Perubahan DPA-SKPD												
1	1	1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5,00	20,00	1,00	1,00	100,00	2.150.000,00	1.250.000,00	58,14	100,00	
1	1	1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	Laporan	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	2.900.000,00	0,00	0,00	50,00	
1	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	**225,00**	**3,11**	**45,00**	**7,00**	**15,56**	**5.418.822.575,00**	**2.984.048.090,00**	**55,07**	**56,37**	
1	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNPenyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	70,00	11,43	14,00	8,00	57,14	5.329.152.575,00	2.950.298.090,00	55,36	57,14	
1	1	1	2	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan PD	Dokumen	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	80.520.000,00	32.350.000,00	40,18	50,00	
1	1	1	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	1	2	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Laporan	90,00	6,67	18,00	6,00	33,33	6.800.000,00	1.400.000,00	20,59	33,33	
1	**1**	**1**	**3**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Presentase Ketersediaan Layanan**	**Jenis**	**7,00**	**28,57**	**6,00**	**2,00**	**33,33**	**185.318.600,00**	**72.271.450,00**	**39,00**	**28,00**	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg						Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
												Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2						3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
							Administrasi Umum PD											
1	1	1	3	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	6.337.650,00	6.000.000,00	94,67	0,00	
1	1	1	3	2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga	Paket	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	9.765.000,00	0,00	0,00	0,00	
1	1	1	3	3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	Paket	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	51.260.950,00	22.171.450,00	43,25	0,00	
1	1	1	3	4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	17.200.000,00	8.000.000,00	46,51	0,00	
1	1	1	3	5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	16.000.000,00	4.000.000,00	25,00	50,00	
1	1	1	3	6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	Laporan	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	84.755.000,00	32.100.000,00	37,87	50,00	
1	**1**	**1**	**4**	**Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenis**	**4,00**	**25,00**	**2,00**	**1,00**	**50,00**	**163.300.000,00**	**61.330.000,00**	**37,56**	**52,50**	
1	1	1	4	1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Terdistribusi	Surat	12.500,00	10,00	2.500,00	1.250,00	50,00	4.500.000,00	0,00	0,00	50,00	
1	1	1	4	2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	158.800.000,00	61.330.000,00	38,62	50,00	
1	**1**	**1**	**5**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**Presentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik**	**Jenis**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**23.649.000,00**	**6.381.000,00**	**26,98**	**25,00**	
1	1	1	5	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan	Unit	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	16.049.000,00	3.881.000,00	24,18	0,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
					Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinan											
1	1	1	5	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	20,00	0,00	4,00	0,00	0,00	7.600.000,00	2.500.000,00	32,89	0,00	
2	**1**	**Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Anak**				**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak**	**Indeks**	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**3,25**	**100,00**	**148.330.000,00**	**8.680.000,00**	**5,85**	**64,83**	**Masih Menggunakan Data Realisasi Tahun 2022**
2	**1**	**1**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK**			**Presentase Anak yang**	**Persen**	**100,00**	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**100,00**	**148.330.000,00**	**8.680.000,00**	**5,85**	**68,00**	
2	**1**	**1**	**1**	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**489,00**	**14,11**	**489,00**	**69,00**	**14,11**	**64.187.500,00**	**8.680.000,00**	**13,52**	**75,00**	
2	1	1	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	150,00	10,00	30,00	15,00	50,00	15.812.500,00	0,00	0,00	50,00	
2	1	1	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	20,00	1,00	1,00	100,00	48.375.000,00	8.680.000,00	17,94	100,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
							Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
2	**1 1 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah kesenian tradisional yang dikelola, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**84.142.500,00**	**22.460.000,00**	**26,69**	**61,00**	**36,67**
2	1 1 2 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	37.595.000,00	0,00	0,00	50,00	
2	1 1 2 2 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	15.225.000,00	0,00	0,00	0,00	
2	1 1 2 3 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500,00	10,00	100,00	50,00	50,00	31.322.500,00	22.460.000,00	71,71	50,00	
3	**1 1 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan anak yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**45.880.000,00**	**7.200.000,00**	**15,69**	**61,67**	
3	**1 1 1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak**	**Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**13.780.000,00**	**7.200.000,00**	**52,25**	**85,00**	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
				Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		**para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											
3	1	1	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	225,00	20,00	45,00	45,00	100,00	13.780.000,00	7.200.000,00	52,25	100,00	
3	**1**	**1**	**2**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**19.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	
3	1	1	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00	19.050.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	**1**	**1**	**3**	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**			**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**13.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
3	1	1	3	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100,00	20,00	20,00	20,00	100,00	13.050.000,00	0,00	0,00	100,00	
4	**1**	**Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat**				**ASFR**		**100,00**	**99,00**	**100,00**	**99,00**	**99,00**	**286.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**59,44**	**Masih Menggunakan Data Realisasi Tahun 2022**
4	**1**	**1**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**Persen**	**100,00**	**99,00**	**100,00**	**99,00**	**99,00**	**286.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**52,50**	
4	**1**	**1**	**1**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**		**Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk**	**Persen**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**28.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	
4	1	1	1	1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
4	**1**	**1**	**2**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase ketersediaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah**	**Persen**	**100,00**	**99,00**	**100,00**	**99,00**	**99,00**	**258.800.000,00**	**10.000.000,00**	**3,86**	**80,00**	
4	1	1	2	1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	5,00	20,00	1,00	1,00	100,00	110.600.000,00	10.000.000,00	9,04	100,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
							Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
4	1 1 2 2 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	60,00	19,50	12,00	11,70	97,50	148.200.000,00	0,00	0,00	97,50	
5	**1 1 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA**	**Presentase Anak yang**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**2.953.560.000,00**	**512.315.000,00**	**17,35**	**66,38**	
5	**1 1 1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Pellaksanaan Kegiatan advokasi, komunikasi dan Informasi edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.166.100.000,00**	**140.950.000,00**	**12,09**	**75,00**	
5	1 1 1 1 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	182.000.000,00	36.400.000,00	20,00	50,00	
5	1 1 1 2 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	674.100.000,00	70.350.000,00	10,44	50,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
5	1	1	1	3	Pengendalian Program KKBPK (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	160.000.000,00	34.200.000,00	21,38	50,00	
5	1	1	1	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK NON FISIK)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	150.000.000,00	0,00	0,00	50,00	
5	**1**	**1**	**2**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Cakupan Organisasi Kemasyarakat yang berperan akif dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pengendalian Penduduk dan KB Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**80,00**	**100,00**	**80,00**	**80,00**	**381.000.000,00**	**83.040.000,00**	**21,80**	**80,00**	
5	1	1	2	1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung KB	150,00	16,00	30,00	24,00	80,00	381.000.000,00	83.040.000,00	21,80	80,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
5	**1**	**1**	**3**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Cakupan Organisasi Kemasyarakat yang berperan akif dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pengendalian Penduduk dan KB Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**273.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00**	
5	1	1	3	1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	273.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
5	**1**	**1**	**4**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**1.132.660.000,00**	**288.325.000,00**	**25,46**	**56,53**	
5	1	1	4	1	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK NON FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	17.100.000,00	5.700.000,00	33,33	50,00	
5	1	1	4	2	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Laporan	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	27.900.000,00	9.300.000,00	33,33	50,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
					dan Jejaringnya (DAK NON FISIK)	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya											
5	1	1	4	3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	369.866.000,00	0,00	0,00	50,00	
5	1	1	4	4	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (DAK NON FISIK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	500,00	17,60	100,00	88,00	88,00	717.794.000,00	273.325.000,00	38,08	88,00	
6	**1**	**Meningktanya Partisipasi sekolah**				**Angka Partisipasi sekolah**	**Persen**	**100,00**	**32,33**	**100,00**	**32,33**	**32,33**	**269.840.000,00**	**18.500.000,00**	**6,86**	**41,22**	**Masih**
6	**1**	**1**	**PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**Persentase Perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta**	**Persen**	**100,00**	**32,33**	**100,00**	**32,33**	**32,33**	**269.840.000,00**	**18.500.000,00**	**6,86**	**41,22**	
6	**1**	**1**	**1**	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**		**Presentase Ketersediaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah daerah tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk**	**Persen**	**56,98**	**61,43**	**56,98**	**35,00**	**61,43**	**42.640.000,00**	**11.000.000,00**	**25,80**	**61,67**	
6	1	1	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Perangkat Daerah	225,00	20,00	45,00	45,00	100,00	13.425.000,00	11.000.000,00	81,94	100,00	
6	1	1	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Dokumen	200,00	1,00	40,00	2,00	5,00	29.215.000,00	0,00	0,00	5,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
					Gender PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengarusutamaan Gender PUG Kewenangan Kabupaten/Kota											
6	**1**	**1**	**2**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persen**	**100,00**	**50,00**	**100,00**	**50,00**	**50,00**	**209.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37,00**	
6	1	1	2	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (HIBAH DHAMA WANITA)	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dokumen	10,00	10,00	2,00	1,00	50,00	162.000.000,00	0,00	0,00	50,00	
6	1	1	2	2	Advokasi Kebijaka dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	**1**	**1**	**3**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/kota**	**Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**Persen**	**56,98**	**0,00**	**56,98**	**0,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**7.500.000,00**	**41,67**	**25,00**	
6	1	1	3	1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan	Dokumen	225,00	0,00	45,00	0,00	0,00	18.000.000,00	7.500.000,00	41,67	0,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
							Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
	Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia											
7 1	**Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Perempuan**	**Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**	**Persen**	**100,00**	**78,00**	**100,00**	**78,00**	**78,00**	**418.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34,67**	**Masih Menggunakan Data Realisasi Tahun 2022**
7 1 1	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan perempuan yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan**	**Persen**	**100,00**	**78,00**	**100,00**	**78,00**	**78,00**	**418.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34,67**	
7 1 1 1	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Perempuan yang diselesaikan tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**106.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36,00**	
7 1 1 1 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	60,00	10,00	12,00	6,00	50,00	93.750.000,00	0,00	0,00	50,00	
7 1 1 1 2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan	Perangkat Daerah	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
					Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											
7	**1**	**1**	**2**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Presentase Ketersediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**247.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00**	
7	1	1	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	5,00	20,00	1,00	1,00	100,00	217.500.000,00	0,00	0,00	100,00	
7	1	1	2	2	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	150,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
7	**1**	**1**	**3**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**63.750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
7	1	1	3	1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK)	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	250,00	12,00	50,00	30,00	60,00	63.750.000,00	0,00	0,00	60,00	
8	**1**	**Meningkatnya Derajat Kesehatan Perempuan**				**Angka Harapan Hidup Perempuan saat lahir**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**141.040.000,00**	**15.500.000,00**	**10,99**	**58,33**	**Masih Menggunakan Data Realisasi Tahun 2022**
8	**1**	**1**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan perempuan yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan**	**Rasio**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**141.040.000,00**	**15.500.000,00**	**10,99**	**58,33**	
8	**1**	**1**	**1**	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Terlaksananya penguatan dan Pengembagangan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**29.345.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25,00**	
8	1	1	1	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	16.645.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
8	1	1	1	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	**1**	**1**	**2**		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Ketersediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**Persen**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**74.300.000,00**	**15.500.000,00**	**20,86**	**75,00**	
8	1	1	2	1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	74.300.000,00	15.500.000,00	20,86	100,00	
8	**1**	**1**	**3**		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**Persen**	**100,00**	**98,00**	**100,00**	**98,00**	**100,00**	**37.395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	
8	1	1	3	1	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	20,00	1,00	1,00	100,00	37.395.000,00	0,00	0,00	100,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
9	1	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Perempuan				Indeks Pendapatan (Laki-Laki dan Perempuan)		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			25,00	Masih Menggunakan Data Realisasi Tahun 2022
9	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			Persentase Pemanfaatan Data Gender dan anak dalam perencanaan Pembangunan		100,00	0,00		0,00	0,00	16.520.000,00	0,00	0,00	25,00	
9	1	1	1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persen	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	16.520.000,00	0,00	0,00	25,00	
9	1	1	1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	16.520.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	1	Meningkatnya Kemandirian Keluarga				Persentase Keluarga Mandiri					99,00	99,00	2.262.600.000,00	199.320.000,00	8,81	57,50	Masih Menggunakan Data Realisasi Tahun 2022
10	1	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	100,00	99,00	100,00	99,00	99,00	2.262.600.000,00	199.320.000,00	8,81	57,50	
10	1	1	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Cakupan Pelaksanaan PembangunanKeluarga Melalui Pembinaan Ketahahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	100,00	94,00	100,00	94,00	94,00	2.262.600.000,00	199.320.000,00	8,81	57,50	
10	1	1	1	1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Unit	70,00	10,00	14,00	7,00	50,00	360.000.000,00	0,00	0,00	50,00	

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg					Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan I Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
											Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2					3	4,00	5,00	6 = 8/5 x 100	7,00	8,00	9=8/7 x 100	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00
					Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK FISIK)		(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)											
10	1	1	1	2	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	1.200,00	10,00	240,00	120,00	50,00	1.902.600.000,00	199.320.000,00	10,48	50,00	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3ADALDUK KB memiliki 65 inidkator, yang terdiri dari; 30 indikator IKK RPJMD, 8 Indicator IKK LPPD,19 indicator TPB, 8 indikator IKU. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros dapat dilihat Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

No	Indikator Kinerja	SPM	TPB	IKK (RPJMD dan LPPD)	IKU	Satuan	Target				Realisasi			Proyeksi		Catatan analisis
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak				√		32,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	3,27	3,27	IKU
2	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) pe.1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) 15-19)				√		29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	IKU
3	Angka Partisipasi Sekolah Perempuan				√		93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	93,54	IKU
4	Presentase Penyelesaian Kasusu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak				√		100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	IKU
5	Angka Harapan Hidup Perempuan saat Lahir				√		73,32	73,32	73,32	73,32	73,32	73,32	73,32	73,32	73,32	IKU
6	Indeks Pemberdayaan Gender				√		75,69	75,69	75,69	75,69	75,69	75,69	75,69	75,69	75,69	IKU
7	Persentase Keluarga Mandiri				√		37,39	37,39	37,39	37,39	37,39	37,39	37,39	37,39	37,39	IKU
8	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			√			26,14	31,46	37,85	45,54	21,67	31,46	45,54	66,02	95,70	IKK
9	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR			√			25,71	28,57	28,57	28,57	25,71	28,57	28,57	30,16	31,84	IKK
10	Partisipasi perempuan di lembaga swasta			√			78,97	77,53	76,11	74,72	80,22	77,53	77,53	76,23	74,95	IKK
11	Rasio KDRT			√			0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,00	0,00	IKK
12	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur			√			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	IKK
13	artisipasi Angkatan Kerja Perempuan			√			45,47	46,42	47,40	48,39	35,60	46,42	46,42	53,47	61,60	IKK

No	Indikator Kinerja	SPM	TPB	IKK (RPJMD dan LPPD)	IKU	Satuan	Target				Realisasi			Proyeksi		Catatan analisis
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu			√			100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit			√			100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
16	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Persen			√			100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
17	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak			√			100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
18	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum			√			100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
19	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan			√			100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
20	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan			√			100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
21	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD			√			1,02	1,03	1,03	1,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
22	Rasio APM perempuan/lai-laki di SMP			√			1,11	1,12	1,14	1,15	1,17	0,94	0,94	0,85	0,76	IKK

No	Indikator Kinerja	SPM	TPB	IKK (RPJMD dan LPPD)	IKU	Satuan	Target				Realisasi			Proyeksi		Catatan analisis
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	Rasio melek huruf perempuan terhadap lakilaki pada kelompok usia 15-24 tahun			√			1,03	1,05	1,07	1,09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK
24	Kontrobusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian			√			97	97	97	97	10	11	11,00	11,55	12,13	IKK
25	Laju pertumbuhan penduduk			√			1,73						0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	IKK
26	Total Fertility Rate (TFR) Jiwa 2,56 2,31 2,29			√			2,56	97,00	97,00	97,00	0,00	97,00	97,00	#DIV/0!	#DIV/0!	IKK
27	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB			√			100	1,59	1,59	1,59	1,73	1,59	1,59	1,53	1,46	IKK
28	Persentase perangkatd aerah (dinas/Badan) yang memyusun dan memanfaatkan rencanagan induk pengendalian penduduk			√			28,21	2,31	2,29	2,29	2,56	2,31	2,31	2,20	2,09	IKK
29	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tenatng pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk			√			1	33,33	35,90	35,90	100,00	33,33	33,33	22,22	14,81	IKK
30	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan			√			7	35,90	38,46	38,46	28,21	35,90	35,90	40,79	46,35	IKK
31	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan			√			14	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	IKK
32	Rata-rata jumlah anak per keluarga			√			0,44	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	IKK
33	Ratio akseptor KB			√			51,53	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	IKK
34	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun			√			51,19	1,47	1,45	1,45	0,44	1,47	1,47	3,19	6,92	IKK

No	Indikator Kinerja	SPM	TPB	IKK (RPJMD dan LPPD)	IKU	Satuan	Target				Realisasi			Proyeksi		Catatan analisis
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) tahun Per 1.000			√			30,5	80,16	83,85	83,85	51,53	80,16	80,16	102,43	130,88	IKK
36	Cakupan pasangan usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun			√			24,1	46,00	47,20	47,20	51,19	46,00	46,00	43,67	41,45	IKK
37	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)			√			29,65	311,26	414,6	414,6	30,50	311,26	311,26	1743,87	9770,26	IKK
38	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)			√			21,99	7	8	9	10	11	11,00	11,55	12,13	IKK
39	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi			√			87,06	0,21	0,16	0,16	24,10	0,21	0,21	0,11	0,05	IKK
40	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) BerKB			√			11,77	10,05	8,99	8,99	29,65	10,05	10,05	6,73	4,50	IKK
41	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB			√			1,69	34,96	38,58	38,58	21,99	34,96	34,96	45,27	58,62	IKK
42	Cakupan bina keluarga lansia (BKL) ber-KB			√			0,53	42,71	42,41	42,41	87,06	42,71	42,71	31,83	23,72	IKK
43	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan			√			14,29	21,99	23,39	23,39	11,77	21,99	21,99	31,54	45,23	IKK
44	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa			√			35,87	21,11	24,96	24,96	1,69	21,11	21,11	142,40	960,56	IKK
45	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat derah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk			√			100	6,50	6,85	6,85	0,53	6,50	6,50	43,11	285,90	IKK
46	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri			√			28,4	71,43	78,57	78,57	14,29	71,43	71,43	214,24	642,57	IKK
47	Rasio petugas pemabntu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan			√			100	46,20	46,47	46,47	35,87	46,20	46,20	52,85	60,46	IKK

No	Indikator Kinerja	SPM	TPB	IKK (RPJMD dan LPPD)	IKU	Satuan	Target				Realisasi			Proyeksi		Catatan analisis
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kopntrasepsi untuk emmenuhi permintaan masyarakat			√			21,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	IKK
49	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.			√			66,47	66,86	67,25	67,64	28,40	73,35	73,35	131,40	235,38	IKK
50	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		√				73,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	TPB
51	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		√				29,89	32,95	36,01	39,07	21,69	77,88	77,88	178,76	410,30	TPB
52	perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		√				24,92	54,9	54,9	54,9	24,92	54,9	54,90	87,92	140,81	TPB
53	Proporsi perempuan usia Total Fertility Rate (TFR).		√				2,11	2,56	2,56	2,56	2,11	2,56	2,56	2,83	3,14	TPB
54	Unmet need pelayanan kesehatan.		√				14,23	29.65	29,65	29,65	14,23	29,65	29,65	45,71	70,48	TPB
55	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		√				20	20	20	20	20	20	20,00	20,00	20,00	TPB
56	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		√				0,03	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,01	TPB

No	Indikator Kinerja	SPM	TPB	IKK (RPJMD dan LPPD)	IKU	Satuan	Target				Realisasi			Proyeksi		Catatan analisis
							2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		√				0,02	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	TPB
58	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		√				0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	TPB
59	Proporsi perempuan dewasa Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		√				100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	TPB
60	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun..		√				21,26	24,10	24,10	24,10	21,26	24,10	24,10	25,71	27,43	TPB
61	MEdian usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		√				28,12	23,55	23,55	23,55	28,12	23,55	23,55	21,64	19,88	TPB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros selaku lembaga wajib non pelayanan dasar dengan Fungsi Penunjang Pemerintahan dan kebijakan sehingga dalam perencanaan harus mampu menjawab tantangan tersebut. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari proses sampai dengan tataran implementasi di lapangan. Dalam perkembangan ke depan, dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros diharapkan responsif gender, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan

kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencana, memantapkan kelembagaan perencana di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi pemangku kepentingan. Secara umum kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Maros telah mengalami peningkatan. Beberapa Indikator yang memperlihatkan hal tersebut maka kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang berkualitas dan transparan.
b. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan publik yang berkualitas dan memadai
c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur secara berkesinambungan sesuai kebutuhan dan perkembangan daerah.
d. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan aparatur.
e. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan .
f. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender.
g. Meningkatkan Kualitas Pemenuhan dan Perlindungan Hak anak
h. Mengendalikan laju pertumbuhan peduduk
i. Meningkatan ketahananan dan kesejahteraan keluarga
j. Meningkatkan pembinaan Keluarga Berencana

Namun terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi dalam rangka proses perencanaan tersebut, diantaranya antara lain :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana kabupaten maros sebagi lembaga Teknis
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros dengan PD dan legislatif daerah
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan

kepastian akan direalisasikannya rencana

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya prilaku nerabas (*sbortcutting program*)
6. Internal birokrasi : Lemahnya koordinasi dan masih adanya egosektoral antara PD, dengan kegiatan-kegiatan *project error*, rendahnya kapasitas dan komitmen PD pada proses perencanaan, rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal *(fiscal gap)*
7. Internal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten maros: belum mampu menyediakan *Standar Operating Procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan
8. Masih kurang ketersediaan Data terpilah untuk urusan Perempuan dan anak.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

a. Analisis Kinerja Pelayanan

Permasalahan, hambatan dan dampak yang di temukan dalam pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	7	8	9	12	13	15	16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		32,25	3,25	3,25	3,26	10,077519	100,307692

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	7	8	9	12	13	15	16
2	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) pe.1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR) 15-19)		29,73	29,73	29,73	29,73	100	100
3	Angka Partisipasi Sekolah Perempuan		93,54	93,54	93,54	93,54	100	100
4	Presentase Penyelesaian Kasusu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak		100	100	100	100	100	100
5	Angka Harapan Hidup Perempuan saat Lahir		73,32	73,32	73,32	73,32	100	100
6	Indeks Pemberdayaan Gender		75,69	75,69	75,69	75,69	100	100
7	Persentase Keluarga Mandiri		37,39	37,39	37,39	37,39	100	100
8	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		26,14	31,46	21,67	31,46	82,89	100
9	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		25,71	28,57	25,71	28,57	100	100
10	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		78,97	77,53	80,22	77,53	101,58	100
11	Rasio KDRT		0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	100	100
12	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur		0	0,00	0,00	0,00	0	0
13	artisipasi Angkatan Kerja Perempuan		45,47	46,42	35,60	46,42	78,29	100
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu		100	100,00	100,00	100,00	100	100
15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit		100	100,00	100,00	100,00	100	100
16	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Persen		100	100,00	100,00	100,00	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	7	8	9	12	13	15	16
17	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		100	100,00	100,00	100,00	100	100
18	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		100	100,00	100,00	100,00	100	100
19	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		100	100,00	100,00	100,00	100	100
20	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		100	100,00	100,00	100,00	100	100
21	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		1,02	1,03	100,00	100,00	9803,92	9708,73
22	Rasio APM perempuan/lai-laki di SMP		1,11	1,12	1,17	0,94	105,40	83,92
23	Rasio melek huruf perempuan terhadap lakilaki pada kelompok usia 15-24 tahun		1,03	1,05	1,00	1,00	97,08	95,23
24	Kontrobusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sektor Non Pertanian		97	97	10	11	10,30	11,34
25	Laju pertumbuhan penduduk		1,73				0	0
26	Total Fertility Rate (TFR) Jiwa 2,56 2,31 2,29		2,56	97,00	0,00	97,00	0	100
27	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB		100	1,59	1,73	1,59	1,73	100
28	Persentase perangkatd aerah (dinas/Badan) yang memyusun dan memanfaatkan rencanagan induk pengendalian penduduk		28,21	2,31	2,56	2,31	9,07	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	7	8	9	12	13	15	16
29	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tenatng pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		1	33,33	100,00	33,33	10000	100
30	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		7	35,90	28,21	35,90	403	100
31	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		14	1,00	1,00	1,00	7,14	100
32	Rata-rata jumlah anak per keluarga		0,44	7,00	7,00	7,00	1590,90	100
33	Ratio akseptor KB		51,53	14,00	14,00	14,00	27,16	100
34	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun		51,19	1,47	0,44	1,47	0,85	100
35	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) tahun Per 1.000		30,5	80,16	51,53	80,16	168,95	100
36	Cakupan pasangan usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		24,1	46,00	51,19	46,00	212,40664	100
37	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)		29,65	311,26	30,50	311,26	102,86678	100
38	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		21,99	7	10	11	45,475216	157,142857
39	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		87,06	0,21	24,10	0,21	27,682058	100
40	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) BerKB		11,77	10,05	29,65	10,05	251,91164	100
41	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB		1,69	34,96	21,99	34,96	1301,1834	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	7	8	9	12	13	15	16
42	Cakupan bina keluarga lansia (BKL) ber-KB		0,53	42,71	87,06	42,71	16426,415	100
43	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan		14,29	21,99	11,77	21,99	82,36529	100
44	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa		35,87	21,11	1,69	21,11	4,711458	100
45	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat derah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk		100	6,50	0,53	6,50	0,53	100
46	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri		28,4	71,43	14,29	71,43	50,316901	100
47	Rasio petugas pemabntu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		100	46,20	35,87	46,20	35,87	100
48	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kopntrasepsi untuk emmenuhi permintaan masyarakat		21,69	100,00	100,00	100,00	461,04195	100
49	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		66,47	66,86	28,40	73,35	42,726042	109,70685
50	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		73,25	100,00	100,00	100,00	136,51877	100
51	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		29,89	32,95	21,69	77,88	72,566076	236,358118
52	perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		24,92	54,9	24,92	54,9	100	100
53	Proporsi perempuan usia Total Fertility Rate (TFR).		2,11	2,56	2,11	2,56	100	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	7	8	9	12	13	15	16
54	Unmet need pelayanan kesehatan.		14,23	29.65	14,23	29,65	100	0
55	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		20	20	20	20	100	100
56	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		0,03	0,02	0,03	0,02	100	100
57	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		0,02	0,01	0,02	0,01	100	100
58	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		0,01	0,01	0,01	0,01	100	100
59	Proporsi perempuan dewasa Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		100	100	100	100	100	100
60	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun..		21,26	24,10	21,26	24,10	100	100
62			28,12	23,55	28,12	23,55	100	100
TOTAL CAPAIAN KINERJA							725,45902	254,143611

2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur staf pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan, dan pelayanan masyarakat serta fungsi pendukung lainnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dan masyarakat pada umumnya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan-hambatan sehingga diperlukan koordinasi dengan PD terkait.

Adapun faktor-faktor yang sampai saat ini masih dirasakan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan pelayanan dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

- Pemahaman dan penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur masih kurang.
- Penguasaan teknologi informasi masih perlu dikembangkan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan setiap saat.
- Masih kurangnya data terpilah yang dimiliki masing-masing Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.
- Kualitas sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan tentang pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG).
- Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
- Meningkatkn pelayanan KB kepada Masyarakat
- Meningkatkan kualitas pemenuhan dan Perlindungan Perempuan dan anak
- Meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat dalam pencegahan resiko stunting
- Pemahaman dan penguasaan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender bagi para Tim Focal Point Kabupaten dan PD masih kurang.
- Meningkatkan Koordinasi dengan PD terkait tugas Pokok dan Fungsi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros.

Oleh karena itu perlu di identifikasi solusi-solusi yang harus dilakukan baik secara jangka pendek maupun jangka panjang antara lain :

- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan Gender.
- Mengevaluasi tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat/staf dan dilakukan evaluasi kelembagaan sesuai kebutuhan Lingkup Dinas PPPA.
- Meningkatkan pengawasan dan pembinaan aparatur baik kedisiplinan, kinerja dan keuangan.
- Meningkatkan Pemahaman dan penguasaan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender bagi para Tim Focal Point Kabupaten dan PD
- Meningkatkan kerja sama lintas sector baik pemerintah maupun swasta dalam pencegahan perkawinan anak
- Meningkatkan kerja sama lintas sector baik pemerintah maupun swasta dalam upaya penanganan keluarga beresiko stunting
- Meningkatkan pelayanan dan pembinaan Keluarga Berencana
- Meningkatkan upaya laju pertumbuhan penduduk melalui program Bangga Kencana

Tabel 2.4

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Peluang	Rekomendasi
1	Belum optimalnya sumbangan pendapatan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga.	Masih rendahnya Pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi	Indeks Pemberdayaan Gender	meningkatkan akses ke sumber daya dan modal	membuat kredit mikro atau pinjaman seperti peningkatan akses perempuan ke layanan kredit mikro dan pinjaman dengan bunga rendah untuk memulai atau mengembangkan usahanya

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Peluang	Rekomendasi
2	Indicator kemandirian dan kesejahteraan keluarga	Rendanya pendapatan yang mendukung ekonomi keluarga Masih banyak anak yang beresiko stunting	Pembangunan Keluarga mandiri	peningkatkan pelatihan dan pendidikan	meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan bagi orang tua dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih. Pendidikan juga penting untuk pemahaman gizi yang baik bagi anak-anak.
3	Adanya budaya patriarki	Rendahnya jumlah perempuan yang duduk sebagai posisi managerial/pimpinan	Angka partisipasi kerja perempuan	kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan gender	melakukan implementasi kebijakan yang memastikan kesetaraan, kesempatan dalam rekrutmen, promosi dan pengembangan karir bagai perempuan
4	Adanya Budaya patriarki	Rendahnya jumlah pejabat perempuan yang menduduki jabatan eselon	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	pemberdayaan perempuan dalam organisasi	mendorong dan mendukung pembentukan jaringan dan asosiasi perempuan dalam pemerintahan yang dapat menjadi platform untuk berbagai pengalaman dan strategi
5	Kurangnya sarana dan prasaran pendukung pelayanan	Banyaknya kasus yang belum tertangani di wilayah pedesaan	Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT	meningkatkan pendidikan dan pelatihan	mengadakan program pelatihan khusus untuk tenaga kerja lokal dalam menangani kasus-kasus yang sering terjadi di pedesaan dan meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas di bidang kesehatan, pendidikan dan hukum yang ditugaskan di pedesaan

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Peluang	Rekomendasi
6	Masih rendahnya kemampuan pengetahuan Kepemimpinan perempuan	Kurangnya perempuan yang teribat di jabatan Legislatif	Proporsi perempuan yang duduk di legislatif	perubahan budaya dan persepsi masyarakat	melakukan usaha untuk mrngatasi strereotip gender yang menghalangi perempuan untuk terlibat dalam politik dan melakukan promosi tokoh perempuan sukses dalam politik sebagai role model untuk menginspirasi calon-calon baru
7	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi	Laju pertumbuhan penduduk meningkat Kehamilan yang tidak direncanakan	Angka pemakaian Kontrasepsi bagi pasangan usia subur	meningkatkan pendidikan seksual yang komrehensif	menambah wawasan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kontrosepsi di kalangan remaja dan orang dewasa muda
8	Masih kurangnya pendataan kasus keluarga beresiko stunting	Kasus stunting belum optimal dalam penanganannya	Angka kelahiran perempuan umur 15-19 tahun	meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan	meningkatkan fasilitas kesehatan seperti peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan di daerah yang rentan terhadap stuntung
9	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan kontrasepsi	Laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi	Unmeet need pelayanan	peningkatan askses dan pendidikan tentang kontrasepsi	memastikan ketersediaan dan akses yang mudah terhadap berbagai metode kontrasepsi di seluruh daerah, termaksud pedesaan dan terpnecil

2.5 Analisis Lingkungan (Internal dan Eksternal) / SWOT Perangkat Daerah

Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan memiliki sejumlah keunggulan dan tantangan yang dapat dianalisis melalui pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Dari segi kekuatan (strengths), Maros memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang terampil, serta lokasi strategis yang dekat dengan Kota Makassar, yang menjadi pusat ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, terdapat kelemahan (weaknesses) yang perlu diperhatikan, seperti infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah, pengelolaan sumber daya yang kurang efektif, dan birokrasi yang kompleks. Di sisi lain, peluang (opportunities) yang bisa

dimanfaatkan termasuk pengembangan sektor pariwisata yang kaya akan potensi alam dan budaya, peluang investasi dan kemitraan yang dapat mendukung pembangunan, inovasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, serta dukungan dari pemerintah pusat. Namun, ancaman (threats) yang perlu diwaspadai meliputi persaingan dengan daerah lain, kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, fluktuasi ekonomi global, serta isu-isu sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Dengan pemahaman yang mendalam tentang analisis SWOT ini, perangkat daerah Kabupaten Maros dapat merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.5

Analisis Lingkungan (Internal dan Eksternal) / SWOT Perangkat Daerah

STRENGTHS 	WEAKNESSES 
1. Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Memiliki pegawai yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. 2. Program dan Kebijakan yang Solid: Adanya program-program yang telah terstruktur dan kebijakan yang mendukung upaya pemberdayaan dan perlindungan. 3. Jaringan Kerja yang Kuat: Kemitraan dengan LSM, organisasi internasional, dan komunitas lokal yang mendukung pelaksanaan program.	1. Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Memiliki pegawai yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. 2.Program dan Kebijakan yang Solid: Adanya program-program yang telah terstruktur dan kebijakan yang mendukung upaya pemberdayaan dan perlindungan. 3.Jaringan Kerja yang Kuat: Kemitraan dengan LSM, organisasi internasional, dan komunitas lokal yang mendukung pelaksanaan program. 4.Data dan Informasi yang Akurat: Basis data yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi program.

4. Data dan Informasi yang Akurat: Basis data yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi program. 5. Dukungan dari Pemerintah Daerah: Komitmen dari pimpinan daerah untuk mendukung program-program dinas.	5.Dukungan dari Pemerintah Daerah: Komitmen dari pimpinan daerah untuk mendukung program-program dinas.
OPPORTUNITIES 	THREATS 
1.Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Memiliki pegawai yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. 2.Program dan Kebijakan yang Solid: Adanya program-program yang telah terstruktur dan kebijakan yang mendukung upaya pemberdayaan dan perlindungan. 3.Jaringan Kerja yang Kuat: Kemitraan dengan LSM, organisasi internasional, dan komunitas lokal yang mendukung pelaksanaan program. 4.Data dan Informasi yang Akurat: Basis data yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi program.	1.Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Memiliki pegawai yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. 2.Program dan Kebijakan yang Solid: Adanya program-program yang telah terstruktur dan kebijakan yang mendukung upaya pemberdayaan dan perlindungan. 3.Jaringan Kerja yang Kuat: Kemitraan dengan LSM, organisasi internasional, dan komunitas lokal yang mendukung pelaksanaan program. 4.Data dan Informasi yang Akurat: Basis data yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi program.

5.Dukungan dari Pemerintah Daerah: Komitmen dari pimpinan daerah untuk mendukung program-program dinas.	5.Dukungan dari Pemerintah Daerah: Komitmen dari pimpinan daerah untuk mendukung program-program dinas.

2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Maros

Penyusunan Rencana Kerja OPD disamping mengacu pada Renstra OPD juga berdasarkan realisasi dan plafon anggaran tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja. Disamping itu Rivew Renstra OPD terhadap Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD dengan melihat perkembangan – perkembangan lingkungan organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran OPD.

Tabel 2.6.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
DP3ADALDUKKB Kabupaten Maros

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**Kab. Maros, Turikale**				**16.712.165.994**	**Kab. Maros, Turikale**			**15.820.734.994**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**Kab. Maros, Turikale**					**Kab. Maros, Turikale**			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**Kab. Maros, Turikale**					**Kab. Maros, Turikale**			
	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	**6.996.068.994**	**Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Maros, Turikale	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	**6.998.878.994**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**45**	**20.550.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**45**	**20.550.000**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	4.500.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	4.500.000
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	2.700.000	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	2.700.000

	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	3.200.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	3.200.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	3.200.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	3.200.000
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	2.100.000	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	2.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1.950.000	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1.950.000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	2.900.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	2.900.000
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**155**	**6.441.653.094**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**155**	**6.459.613.094**

	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4620	6.279.866.794	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4620	6.279.866.794
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	145.240.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	163.200.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	3.406.300	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	3.406.300
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	13.140.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	13.140.000
	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**155**	**8.000.000**	**Administrasi kepegawaian perangkat dasrah**	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**155**	**8.000.000**
	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	155	8.000.000	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	155	8.000.000

	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**277.615.900**	**Administrasi umum perangkat daerah**	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**277.615.900**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	6.452.400	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	6.452.400
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Paket peralatan kantor yang disediakan	5	8.845.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Paket peralatan kantor yang disediakan	5	8.845.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	61.182.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	61.182.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	16.541.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	16.541.500
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	32.000.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	32.000.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	152.595.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	152.595.000
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**3.000.000**	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**3.000.000**

	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	3.000.000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	3.000.000
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**195.700.000**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**195.700.000**
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	195.700.000	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	195.700.000
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**3**	**47.600.000**	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**3**	**34.400.000**
	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	30.000.000	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	15.000.000
	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	7.600.000	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	9.400.000

	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	10.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	10.000.000
	Penataan organisasi	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah kebijakan terkait penataan organisasi yang di keluarkan**	**5**	**1.950.000**	**Penataan organisasi**	Kab. Maros, Turikale	**Jumlah kebijakan terkait penataan organisasi yang di keluarkan**	**5**	**0**
	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	1.950.000	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kab. Maros, Turikale	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	0
	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Persentase Perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta**	**80**	**399.740.000**	**Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Persentase Perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta**	**80**	**399.740.000**
	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG**	**500**	**36.690.000**	**Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/Kota**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG**	**500**	**36.690.000**
	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3	21.195.000	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3	21.195.000

	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	15.495.000	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	15.495.000
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosiak dan ekonpmi pada organisasi kemsyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah perempuan anggota oragnisasi kemsyarakatan yang memiliki peningkatan kapasitas pada bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**300**	**315.050.000**	**Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosiak dan ekonpmi pada organisasi kemsyarakatan kewenangan kabupaten/kota**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah perempuan anggota oragnisasi kemsyarakatan yang memiliki peningkatan kapasitas pada bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**300**	**315.050.000**
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidnag politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	11.900.000	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidnag politik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	11.900.000
	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politiik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	500	303.150.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politiik, hukum, sosial dan ekonomi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	500	303.150.000

	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak**	**1**	**48.000.000**	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perempuan kewenangan kabupaten/kota**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak**	**1**	**48.000.000**
	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	30.000.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	30.000.000
	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	18.000.000	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	18.000.000
	Program Perlindungan perempuan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan perempuan yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan**	**100**	**418.800.000**	**Program Perlindungan perempuan**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan perempuan yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan**	**100**	**418.800.000**

	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	**30**	**106.550.000**	**Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	**30**	**106.550.000**
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	93.750.000	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	93.750.000
	Advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	12.800.000	Advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	12.800.000
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban keekrasan yang memerlukan korodinasi kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah jenis layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang tersedia**	**1**	**248.500.000**	**Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban keekrasan yang memerlukan korodinasi kewenangan kabupaten/kota**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah jenis layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang tersedia**	**1**	**248.500.000**

	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	248.500.000	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	30.000.000
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan**	**1**	**63.750.000**	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan**	**1**	**63.750.000**
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	500	63.750.000	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	500	63.750.000
	Program Peningkatan kualitas keluarga	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**		**135.260.000**	**Program Peningkatan kualitas keluarga**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**		**93.060.000**

	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak tingkay daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah keluarga yang memiiki pengetahuan terkait kesetaraan gedner dan hak anak**	**500**	**57.150.000**	**Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak tingkay daerah kabupaten/kota**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah keluarga yang memiiki pengetahuan terkait kesetaraan gedner dan hak anak**	**500**	**14.950.000**
	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200	14.950.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200	14.950.000
	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	42.200.000	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	0
	Penguatan dan pengembangan lenbaga penyedia layanan peningkatanan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas kelluarga**	**1**	**13.950.000**	**Penguatan dan pengembangan lenbaga penyedia layanan peningkatanan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas kelluarga**	**1**	**13.950.000**

	Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5	13.950.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5	13.950.000
	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah jenis layanan bagi keluarga yang tersedia**	**1**	**64.160.000**	**Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah jenis layanan bagi keluarga yang tersedia**	**1**	**64.160.000**
	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	64.160.000	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	64.160.000
	Program Pengelolaan sistem data gender dan anak	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Persentase Pemanfaatan Data Gender dan anak dalam perencanaan Pembangunan**	**100**	**16.280.000**	**Program Pengelolaan sistem data gender dan anak**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Persentase Pemanfaatan Data Gender dan anak dalam perencanaan Pembangunan**	**100**	**16.280.000**

	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah jenis data gender dan anak yang tersedia dan dianalisis**	**2**	**16.280.000**	**Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah jenis data gender dan anak yang tersedia dan dianalisis**	**2**	**16.280.000**
	Penyajian dan pemanfaatan data gender dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5	16.280.000	Penyajian dan pemanfaatan data gender dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5	16.280.000
	Program Pemenuhan hak anak (PHA)	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Presentase Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak**	**100**	**614.080.000**	**Program Pemenuhan hak anak (PHA)**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Presentase Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak**	**100**	**325.360.000**
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan duia usaha kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju satuan pendidikan ramah anak**	**485**	**374.470.000**	**Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan duia usaha kewenangan kabupaten/kota**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju satuan pendidikan ramah anak**	**485**	**85.750.000**

	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	225	22.750.000	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	225	22.750.000
	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	351.720.000	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	63.000.000
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hiduo anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak**	**1**	**239.610.000**	**Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hiduo anak kewenangan kabupaten/kota**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak**	**1**	**239.610.000**
	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	33.210.000	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	33.210.000

	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan ualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	36.800.000	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan ualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	36.800.000
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan layanan peningkatan kualitas hiudp anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	169.600.000	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan layanan peningkatan kualitas hiudp anak tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	169.600.000
	Program Perlindungan khusus anak (PKA)	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan anak yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan**	**100**	**85.370.000**	**Program Perlindungan khusus anak (PKA)**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan anak yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan**	**100**	**75.910.000**
	Pencegahan keekrasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak**	**490**	**31.610.000**	**Pencegahan keekrasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak**	**490**	**22.150.000**

	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	225	22.150.000	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	225	22.150.000
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	5	9.460.000	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	5	0
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang meemrlukan perlindungan khusus**	**1**	**53.760.000**	**Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang meemrlukan perlindungan khusus**	**1**	**53.760.000**
	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	275	25.000.000	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	275	25.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan layanan AMPK	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	275	28.760.000	Koordinasi Pelaksanaan layanan AMPK	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	275	28.760.000
	Program Pengendalian penduduk	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk**		**138.000.000**	**Program Pengendalian penduduk**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk**		**138.000.000**

	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupateb/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk**	**1**	**28.000.000**	**Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupateb/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk**	**1**	**28.000.000**
	Penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5	28.000.000	Penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5	28.000.000
	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah jenis data kependudukan dan pengendalian penduduk yang tersedia**	**2**	**110.000.000**	**Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah jenis data kependudukan dan pengendalian penduduk yang tersedia**	**2**	**110.000.000**
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60	60.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60	60.000.000
	Pembinaan dan pengawasan pencacatan dan pelaporan program bangga kencana	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	60	50.000.000	Pembinaan dan pengawasan pencacatan dan pelaporan program bangga kencana	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	60	50.000.000

	Program Pembinaan keluarga berencana	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Persentase Akseptor KB**	**100**	**5.659.147.000**	**Program Pembinaan keluarga berencana**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Persentase Akseptor KB**	**100**	**5.105.286.000**
	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang mendapatkan advokasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB**	**63500**	**2.110.000.000**	**Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang mendapatkan advokasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB**	**63500**	**2.110.000.000**
	Pengendalian program KKBPK	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	15	1.750.000.000	Pengendalian program KKBPK	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	15	1.750.000.000
	Pelaksanaan mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	70	210.000.000	Pelaksanaan mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	70	210.000.000

	Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	150.000.000	Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	150.000.000
	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan dalam rangka perencanaan dan pembanguna daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana**	**605**	**1.233.200.000**	**Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan dalam rangka perencanaan dan pembanguna daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana**	**605**	**1.233.200.000**
	Pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1030	370.800.000	Pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1030	370.800.000

	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	60	862.400.000	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	60	862.400.000
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kotrasepsi serta pelaksanaan KB di daerah kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah PUS yang mendapatkan pelayanan penunjang KB berupa alat dan obat kontrasepsi**	**9705**	**1.540.697.000**	**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kotrasepsi serta pelaksanaan KB di daerah kabupaten/kota**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah PUS yang mendapatkan pelayanan penunjang KB berupa alat dan obat kontrasepsi**	**9705**	**986.836.000**
	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60	28.800.000	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60	28.800.000
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	9705	678.367.000	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	9705	124.506.000

	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10	809.980.000	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10	809.980.000
	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaringnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60	23.550.000	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaringnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60	23.550.000
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemsyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah Organisasi Kemasyarakat yang berperan akif dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**5**	**775.250.000**	**Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemsyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah Organisasi Kemasyarakat yang berperan akif dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**5**	**775.250.000**
	Pembinaan terpadu kampung KB	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	60	775.250.000	Pembinaan terpadu kampung KB	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	60	775.250.000
	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**6**	**2.249.420.000**	**Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**6**	**2.249.420.000**

	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**70**	**2.235.920.000**	**Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**70**	**2.235.920.000**
	Pengadaan saran kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan kelaurha (BKB, BKR, BKL, PPKSK, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA))	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1510	311.900.000	Pengadaan saran kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan kelaurha (BKB, BKR, BKL, PPKSK, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA))	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1510	311.900.000
	Penyediaan biaya operasional bagi pengelolan dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL. PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	520	1.924.020.000	Penyediaan biaya operasional bagi pengelolan dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL. PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	520	1.924.020.000

	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**520**	**13.500.000**	**Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	**Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**520**	**13.500.000**
	Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	520	13.500.000	Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	520	13.500.000

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil penelahaan usulan program dan kegiatan kegiatan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Maros

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Keterangan	Catatan
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Kabupaten Maros				
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kabupaten Maros	Persentase Jumlah OPD yang melaksanakan PUG termasuk PPRG	45	OPD	Usulan musrembang perempuan
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Lembaga	Usulan musrembang perempuan
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Lembaga	Usulan musrembang perempuan
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*	4	Kegiatan	Usulan musrembang perempuan
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	orang	Usulan musrembang perempuan
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan*	2	layanan	Usulan musrembang perempuan

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Keterangan	Catatan
	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten Maros	Rsio KDRT	0,01		Usulan musrembang perempuan
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30	Kasus	Usulan musrembang perempuan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	1	Kegiatan	Usulan musrembang perempuan
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	*Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	1	Kegiatan	Usulan musrembang perempuan
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	layanan	Usulan musrembang perempuan
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan*			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	1	Kegiatan	Usulan musrembang perempuan
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Tahun	Usulan musrembang perempuan

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Keterangan	Catatan
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	*Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*	1	Kegiatan	Usulan musrembang perempuan
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	*Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Untuk mewujudkan KG dan Perlindungan AnakKewenangan Kabupatn Maros*	1	tahun	Usulan musrembang anak
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kabupaten Maros				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab./Kota	1	Tahun	Usulan musrembang anak
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Tahun	Usulan musrembang anak
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	layanan	Usulan musrembang anak
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kabupaten Maros	Persentase ketersediaan data terpilah	100	persen	Usulan musrembang anak
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	450	OPD	Usulan musrembang anak
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia*	3	Kegiatan	Usulan musrembang anak

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Keterangan	Catatan
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	*Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota*	3	Kegiatan	Usulan musrembang anak
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Maros	PERSENTASE ANAK YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN HAK ANAK	100	persen	Usulan musrembang anak
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros				
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	*Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha*	1	Kegiatan	Usulan musrembang anak
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	1	Kegiatan	Usulan musrembang anak
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Lembaga	Usulan musrembang anak
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	layanan	Usulan musrembang anak
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	1	Kegiatan	Usulan musrembang anak
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	*Jumlah Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	1	Kegiatan	Usulan musrembang anak

No	Program/kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Keterangan	Catatan
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kabupaten Maros	PERSENTASE PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KASUS YANG MELIBATKAN ANAK YANG DISELESAIKAN	100	persen	Usulan musrembang anak
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	30	Kasus	Usulan musrembang anak
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	Usulan musrembang anak
	Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	desa	Jumlah kebijakan perlindungan Khusus anak	80	perdes pencegahan perkawinan anak	Usulan musrembang anak
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memer lukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	layanan	Usulan musrembang anak
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Maros	Jumlah Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	layanan	Usulan musrembang anak
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	desa/lurah	Jumlah layanan AMPK			

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan, maka dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun mulai dari rencana pembangunan jangka panjang RPJPD, RPJMD dan Renstra, dan rencana pembangunan jangka pendek (RKPD) yang diaktualisasikan melalui penyusunan Renja Perubahan PD, kemudian diimplementasikan kedalam RAPBD, maka Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2024 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja pun harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2024, merupakan salah satu Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur staf pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan, pengoordinasian administratif dan pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Terkait dengan kebijakan pembangunan nasional, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros selaku Perangkat Daerah sebagai staf pendukung Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administarsi serta fungsi pendukung lainnya di bidang pembangunan terkait dengan seluruh kebijakan nasional yang termuat dalam Prioritas Nasional, Fokus Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional.

Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut :

i) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

ii) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
iii) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
iv) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakanhukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
v) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
vi) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di Pasar Internasional
vii) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
viii) Melakukan revolusi karakter bangsa
ix) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra), maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2022-2026**.**

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros

No	Tujuan	sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang profesional dan Berkinerja tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP	A
		Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap Anak	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Nilai Survey	3,25
2	Mengendalikan Struktur Kependudukan dan Pemenuhan Hak Anak	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	ASFR	per 1000 Perempuan	29
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Terhadap Perempuan	Angka Partisipasi sekolah perempuan	Persen	93,54
		Meningkatnya derajat kesehatan perempuan	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persen	100
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Perempuan	Angka Harapan Hidup Perempuan saat lahir	Tahun	73,32
		Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Nil;ai Indeks	76
4	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Kemandirian Keluarga	Persentase Keluarga Mandiri	Persen	70,36

3.3 Program dan Kegiatan

Terdapat beberapa belanja yang kurang tepat pos belanjanya dan beberapa anggaran belanja yang dianggap tidak efesien dan tidak tepat sasaran, sementara ada beberapa sub kegiatan yang masih membutuhkan anggaran yang lebih besar dan beberapa kegiatan yang tidak dianggarkan dalam anggaran pokok tahun 2024.

1. Pada Sub Kegiatan "Penyediaan Gaji dan Tunjangan" termasuk belanja tambahan penghasilan dilakukan pengurangan pada belanja PPPK untuk dialihkan pada belanja penatausahaan dan verifikasi keuangan **dikarenakan** sub kegiatan Penatausahaan dan verifikasi keuangan membutuhkan anggaran 12 bulan sedangkan yang dianggarkan hanya 11 bulan dan belanja honor bendahara hanya 7 bulan
2. Pada Sub Kegiatan " Pelaksanaan Penatausahaan dan verifikasi keuangan dilakukan penambahan anggaran dari belanja sub kegiatan gaji dan tunjangan **dikarenakan** anggaran yang tersedia tidak mencukupi 12 bulan
3. pada Program Penataan Organisasi sub kegiatan " Laporan penyusunan laporan kinerja pemerintah" dilakukan pengurangan pada belanja barang pakai habis (di nol kan anggaran nya) untuk dialihkan pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi **dikarenakan** banyak nya perjalanan yang sifatnya urgen yang membutuhkan tambahan anggaran
4. pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dilakukan penambahan anggaran dari sub kegiatan laporan penyusunan laporan kinerja pemerintah **dikarenakan** banyaknya perjalanan yang sifatnya urgen yang membutuhkan tambahan anggaran
5. Pada sub kegiatan "Pengadaan Mebel" dianggarkan pada perubahan untuk pengadaan partisi aula rapat kantor yang anggarannya diambil dari sub kegiatan " Jasa Pemeliharaan kendaraan bermotor belanja devile kendaraan

hias yang tidak digunakan pada tahun 2024 dikarenakan ruang aula rapat tidak representatif untuk ruang pertemuan.

6. Adanya penambahan anggaran pada sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin untuk belanja AC pada ruangan Aula kantor yang digunakan untuk rapat dn pertemuan dikarenakan AC pada aula sudah tidak layak digunakan lagi.yang anggarannya dari sub kegiatan" Penyediaan gaji dan tunjangan"
7. Pada sub Kegiatan " Penyediaan jasa pelayanan umum" dilakukan penambahan anggaran pada honorarium operator 4 orang/Bulan **dikarenakan** adanya jasa honorarium tidak mencukupi anggarannya.serta penambahan belanja penambah daya tahan tubuh dikarenakan anggarannya tidak mencukupi selama 1 tahun.
8. Pada sub kegiatan "Pemeliharaan dan peralatan mesin lainnya" dilakukan penambahan anggaran **dikarenakan** belanja service AC, Printer dan Komputer tidak mencukupi sedangkan ada beberapa peralatan yang membutuhkan anggaran pemeliharaan.
9. Pada sub kegiatan"Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota" dilakukan pengurangan anggaran belanja paket pelatihan untuk dialihkan pada sub kegiatan" Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota" untuk belanja perjalanan monev PRA,SRA dan PATBM yang terdapat pada indikator Kabupaten Layak Anak (KLA).
10. Pada sub kegiatan"Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota" hanya dilakukan perbaikan belanja paket perlengkapan korban dari 3 paket beralih ke 100 paket dengan perbaikan volume per paket nya.
11. Pada sub kegiatan "Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)" hanya dilakukan pergeseran belanja bahan obat lainnya disesuaikan dengan kebutuhan pada kegiatan pelayanan KB

sudah berjalan sebelumnya.

Perubahan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektivitas penggunaan anggran belanja sehingga pelaksanaan kegiatan akan berjalan maksimal dan dapat terealisasi.

Tabel 3.2.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dan rakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Maros

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	**100**	**6.996.068.994**	**6.998.878.994**	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**45**	**45**	**20.550.000**	**20.550.000**	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	15	4.500.000	4.500.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	5	2.700.000	2.700.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	5	3.200.000	3.200.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	5	3.200.000	3.200.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	5	2.100.000	2.100.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5	1.950.000	1.950.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	2.900.000	2.900.000	Kab. Maros, Turikale		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Administrasi keuangan perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**155**	**155**	**6.441.653.094**	**6.459.613.094**	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4620	4620	6.279.866.794	6.279.866.794	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	60	145.240.000	163.200.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5	3.406.300	3.406.300	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	20	13.140.000	13.140.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**155**	**155**	**8.000.000**	**8.000.000**	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	155	155	8.000.000	8.000.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**6**	**277.615.900**	**277.615.900**	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	6.452.400	6.452.400	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan kantor yang disediakan	5	5	8.845.000	8.845.000	Kab. Maros, Turikale		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	61.182.000	61.182.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	16.541.500	16.541.500	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	60	32.000.000	32.000.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	60	152.595.000	152.595.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**3**	**3.000.000**	**3.000.000**	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	15	3.000.000	3.000.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**1**	**195.700.000**	**195.700.000**	Kab. Maros, Turikale		PAD
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	60	195.700.000	195.700.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**3**	**3**	**47.600.000**	**34.400.000**	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	10	30.000.000	15.000.000	Kab. Maros, Turikale		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	7.600.000	9.400.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	10.000.000	10.000.000	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Penataan organisasi	**Jumlah kebijakan terkait penataan organisasi yang di keluarkan**	**5**	**5**	**1.950.000**	**0**	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5	5	1.950.000	0	Kab. Maros, Turikale		PAD
	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	**Persentase Perempuan di lembaga pemerintah dan Swasta**	**80**	**80**	**399.740.000**	**399.740.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/Kota	**Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG**	**500**	**500**	**36.690.000**	**36.690.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	21.195.000	21.195.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	15.495.000	15.495.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosiak dan ekonpmi pada organisasi kemsyarakatan kewenangan kabupaten/kota	**Jumlah perempuan anggota oragnisasi kemsyarakatan yang memiliki peningkatan kapasitas pada bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi**	**300**	**300**	**315.050.000**	**315.050.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAD
	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidnag politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	11.900.000	11.900.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAD
	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politiik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	500	500	303.150.000	303.150.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAD
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perempuan kewenangan kabupaten/kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak**	**1**	**1**	**48.000.000**	**48.000.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAD
	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1	1	30.000.000	30.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAD
	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3	3	18.000.000	18.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Program Perlindungan perempuan	**Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan perempuan yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan**	**100**	**100**	**418.800.000**	**418.800.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	**Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan**	**30**	**30**	**106.550.000**	**106.550.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	93.750.000	93.750.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK
	Advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200	200	12.800.000	12.800.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		PAD
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban keekrasan yang memerlukan korodinasi kewenangan kabupaten/kota	**Jumlah jenis layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang tersedia**	**1**	**1**	**248.500.000**	**248.500.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	248.500.000	30.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan**	**1**	**1**	**63.750.000**	**63.750.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	500	500	63.750.000	63.750.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK
	Program Peningkatan kualitas keluarga	**Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**			**135.260.000**	**93.060.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak tingkay daerah kabupaten/kota	**Jumlah keluarga yang memiiki pengetahuan terkait kesetaraan gedner dan hak anak**	**500**	**500**	**57.150.000**	**14.950.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		
	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	200	200	14.950.000	14.950.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	42.200.000	0	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Penguatan dan pengembangan lenbaga penyedia layanan peningkatanan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas kelluarga**	**1**	**1**	**13.950.000**	**13.950.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5	5	13.950.000	13.950.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	**Jumlah jenis layanan bagi keluarga yang tersedia**	**1**	**1**	**64.160.000**	**64.160.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		
	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	5	64.160.000	64.160.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Program Pengelolaan sistem data gender dan anak	**Persentase Pemanfaatan Data Gender dan anak dalam perencanaan Pembangunan**	**100**	**100**	**16.280.000**	**16.280.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	**Jumlah jenis data gender dan anak yang tersedia dan dianalisis**	**2**	**2**	**16.280.000**	**16.280.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		
	Penyajian dan pemanfaatan data gender dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	16.280.000	16.280.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Program Pemenuhan hak anak (PHA)	**Presentase Anak yang Mendapatkan Pemenuhan Hak Anak**	**100**	**100**	**614.080.000**	**325.360.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		
	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan duia usaha kewenangan kabupaten/kota	**Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju satuan pendidikan ramah anak**	**485**	**485**	**374.470.000**	**85.750.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	225	225	22.750.000	22.750.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	351.720.000	63.000.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hiduo anak kewenangan kabupaten/kota	**Jumlah lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak dalam pemenuhan hak anak**	**1**	**1**	**239.610.000**	**239.610.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		
	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	33.210.000	33.210.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan ualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	36.800.000	36.800.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan layanan peningkatan kualitas hiudp anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	5	169.600.000	169.600.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Program Perlindungan khusus anak (PKA)	**Persentase penyelesaian tindak pidana dan melibatkan anak yang diselesaikan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan**	**100**	**100**	**85.370.000**	**75.910.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		
	Pencegahan keekrasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	**Jumlah kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak**	**490**	**490**	**31.610.000**	**22.150.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Advokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	225	225	22.150.000	22.150.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	5	5	9.460.000	0	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	**Jumlah layanan yang disediakan bagi anak yang meemrlukan perlindungan khusus**	**1**	**1**	**53.760.000**	**53.760.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		
	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	275	275	25.000.000	25.000.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Koordinasi Pelaksanaan layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	275	275	28.760.000	28.760.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		PAD
	Program Pengendalian penduduk	**Persentase Pertambahan Jumlah Penduduk**			**138.000.000**	**138.000.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		
	Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupateb/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	**Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk**	**1**	**1**	**28.000.000**	**28.000.000**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		
	Penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	5	5	28.000.000	28.000.000	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae		DAK NON FISIK
	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	**Jumlah jenis data kependudukan dan pengendalian penduduk yang tersedia**	**2**	**2**	**110.000.000**	**110.000.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60	60	60.000.000	60.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK
	Pembinaan dan pengawasan pencacatan dan pelaporan program bangga kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	60	60	50.000.000	50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK
	Program Pembinaan keluarga berencana	**Persentase Akseptor KB**	**100**	**100**	**5.659.147.000**	**5.105.286.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	**Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang mendapatkan advokasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB**	**63500**	**63500**	**2.110.000.000**	**2.110.000.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Pengendalian program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	15	15	1.750.000.000	1.750.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK
	Pelaksanaan mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	70	70	210.000.000	210.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK
	Promosi dan KIE program bangga kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	5	150.000.000	150.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	**Jumlah PKB/PLKB yang didayagunakan dalam rangka perencanaan dan pembanguna daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana**	**605**	**605**	**1.233.200.000**	**1.233.200.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Pergerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1030	1030	370.800.000	370.800.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK
	Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	60	60	862.400.000	862.400.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kotrasepsi serta pelaksanaan KB di daerah kabupaten/kota	**Jumlah PUS yang mendapatkan pelayanan penunjang KB berupa alat dan obat kontrasepsi**	**9705**	**9705**	**1.540.697.000**	**986.836.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60	60	28.800.000	28.800.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK FISIK
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	9705	9705	678.367.000	124.506.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK FISIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	10	10	809.980.000	809.980.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK FISIK
	Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60	60	23.550.000	23.550.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK FISIK
	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemsyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	**Jumlah Organisasi Kemasyarakat yang berperan akif dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**5**	**5**	**775.250.000**	**775.250.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Pembinaan terpadu kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	60	60	775.250.000	775.250.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK
	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	**Persentase kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**6**	**6**	**2.249.420.000**	**2.249.420.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	**Jumlah kelompok kegiatan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**70**	**70**	**2.235.920.000**	**2.235.920.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Pengadaan saran kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan kelaurha (BKB, BKR, BKL, PPKSK, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	1510	1510	311.900.000	311.900.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK NON FISIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024					KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH		
	Penyediaan biaya operasional bagi pengelolan dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL. PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	520	520	1.924.020.000	1.924.020.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK FISIK
	Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	**Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**520**	**520**	**13.500.000**	**13.500.000**	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	520	520	13.500.000	13.500.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		DAK FISIK

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja Perubahan yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025.

Rencana Kerja Pokok ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010, hasilnya tetap memerlukan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bidang sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target kinerja dan hasil yang maksimal.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar bidang dan sekretariat
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan

3. Penyusunan Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 masih belum sempurna sesuaidengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 karena belum adanya kesepahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja Pokok tersebut
4. Rencana Kerja (Renja) Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan tahunan PD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN
5. Rencana Kerja (Renja) Pokok PD di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya seperti RKP, RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD.
6. Renja Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025` harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

PERUBAHAN
RENJA
TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan perkenan-Nya sehingga Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros ini dapat diselesaikan.

Penyusunan RENJA OPD merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk itu maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros, Rencana Strategis OPD ini merupakan pedoman bagi pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya.

Maros, 13 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Ketenagakerjaan Kabupaten
Maros,

NURYADI, S.Sos., M.A.P
Pangkat : Pembina Tingkat I
Nip : 19741005 199803 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 9
2.2. Analisis Perangkat Daerah 26
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 34
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGJKAT DAERAH 50
3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional 50
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 50
3.3. Program dan Kegiata 51
BAB IV.PENUTUP 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Dearah s/d Tahun 2023 Kabupaten Maros 12

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Pelayanan Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros 27

Tabel 2.3 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 31

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 pada DPMPTSPK Kabupaten Maros 35

Tabel 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 36

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 51

Tabel 3.2. Evaluasi Capaian Kinerja DPMPTSP 54

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selain sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah , Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja-OPD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra OPD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Kementrian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan bidang urusan OPD. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) menyusun Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) guna menyusun rencana kerja yang berupa program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas. Dengan begitu baik program maupun kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) dapat terintegrasi dan terlaksana dengan baik nantinya

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases (Covid 19) dan/atau Dalam rangnka menghadapiancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penanggaran pembangunan nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 136);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klarifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Prngolahan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 – 2019 ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
27. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
28. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sulsel tahun 2024-2026
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Tahun 2024 adalah sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan, pengawasan dan pengendalian, bahan koordinasi serta evaluasi Tahun 2022. Disamping itu maksud dan tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Tahun 2024 adalah untuk merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Tahun 2024 beserta rencana Anggaran Tahunan secara sistematis yang berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan bidang urusan, kebutuhan dan kemampuan keuangan/ Anggaran Daerah yang tersedia guna

mencapai sasaran dan tujuan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) untuk menyusun program dan kegiatan tahunan.
2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan penjelasan ringkas tentang Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK), proses penyusunan Renja DPMPTSPK Kab. Maros dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DPMPTSPK Kab.Maros.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan serta susunan garis besar dari isi Renja.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Sub Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Beriikan kajian terhadapcapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai factor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB V. P E N U T U P

Berisi catatan penting, kaidah – kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut dan harapan dari kepala Perangkat Daerah.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026 yang memuat indikator keberhasilan perencanaan kurun waktu 5 (Lima) Tahun juga dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) selaku PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evauasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros Tahun 2022 dan perkiraan pelaksanaan DPA Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros Tahun 2023.

Pelaksanaan Program/kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros tahun 2022 terdiri dari 10 Program, 19 Kegiatan dan 44 Subkegitan, daftar program, kegiatan dan subkegitan tersebut dapat dilihat pada table 2.1 dibawah. Adapun evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Program yang mencapai Target tahun 2022 sebanyak 9 program dan yang tidak mencapai target sebnyak 1 program, yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas tenaga Kerja hal ini dikarenakan pada tahun 2022 bidang terkait memfokuskan kerja sama dengan Lembaga kerja yang nantinya bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan Pelatihan kerja pada tahun depan.
2. Jumlah Kegiatan yang mencapai target tahun 2022 sebanyak 15 kegiatan dan yang tidak mencapai target sebanyak 4 kegiatan yang terdiri dari :

1) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

   Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan hal ini dikarena adanya pertimbangan bahwa tahun sebelumnya sudah pernah dilakukan pembuatan peta potensi dan menurut bidang terkait akan dilakukan koordinasi dan evaluasi terkait titk-titik peta potensi yang telah dibuat ditahun sebelumnya.

2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

   Jumlah target Jenis Pelayayan perizinan yaitu 26 jenis, namun yang terlaksana hanya 8 Jenis, hal ini dilihat dari jumlah jenis layanan yang dimohonkan oleh masyarakat pada DMPPTSPK pada tahun 2022 hanya mencakup 8 jenis layanan.

3) Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi

   Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi pada tahun 2022 tidak dilaksanakan karena tahun 2022 bidang terkait memfokuskan kerja sama dengan Lembaga kerja yang nantinya bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan Pelatihan kerja pada tahun depan.

4) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

   Pengelolaan Informasi Pasar Kerja tidak dilaksakanan pada tahun 2022

3. Jumlah Subkegiatan yang mencapai target pada tahun 2022 sebanyak 41 subkegiatan dan yang didak mencapai target sebanyak 3 subkegiatan yang terdiri dari :

   1) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

      Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan pada tahun 2022 hal ini dikarenakan diperlukan melakukan evaluasi dan monitoring pada hasil pembuatan peta potensi tahun 2021

   2) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

      Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi tidak dilaksanakan karena diperlukan pendataan dan

Kerjasama yang baik dengan Lembaga pelatihan kerja sebelum melakukan pelatihan kerj

3) Job Fair/Bursa Kerja

Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja tidak dilaksanakan pada tahun 2022 hal ini dikarenakan adanya pengaturan birokrasi kegiatan yang tidak bisa diselesaikan oleh bidang terkait, yang kemudian dialihkan dengan memberikan informasi lapangan pekerjaan kepada para calon tenaga kerja melalui media sosial.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Dearah s/d Tahun 2023 Kabupaten Maros

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP**										**37**		**29,559,527,680**		**67**	**DPMPTSPK**
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	**43,805,544,305**	**100**	**26,283,326,583**	**100**	**8,761,108,861**	**100**	**3,276,201,097**	**100**	**37**	**100**	**29,559,527,680**	**100**	**67**	**DPMPTSPK**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**95**	**187,995,000**	**57**	**112,797,000**	**19**	**37,599,000**	**8**	**14,265,000**	**42.11**	**37.94**	**65**	**127,062,000**	**68**	**68**	**DPMPTSPK**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	45,780,000	6	27,468,000	2	9,156,000	1	7,576,000	50.00	82.74	7	35,044,000	70	77	DPMPTSPK

	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	19,945,000	3	11,967,000	1	3,989,000	1	3,989,000	100.00	100.00	4	15,956,000	80	80	DPMPTSPK
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	18,735,000	3	11,241,000	1	3,747,000	0.7	0	70.00	0.00	4	11,241,000	74	60	DPMPTSPK
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	13,500,000	3	8,100,000	1	2,700,000	1	2,700,000	100.00	100.00	4	10,800,000	80	80	DPMPTSPK
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	17,745,000	3	10,647,000	1	3,549,000	0.7	0	70.00	0.00	4	10,647,000	74	60	DPMPTSPK
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	47,490,000	3	28,494,000	1	9,498,000	0.5	0	50.00	0.00	4	28,494,000	70	60	DPMPTSPK

	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	24,800,000	36	14,880,000	12	4,960,000	5	0	41.67	0.00	41	14,880,000	68	60	DPMPTSPK
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Administrasi keuaangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**210**	**36,324,618,830**	**126**	**21,794,771,298**	**42**	**7,264,923,766**	**16**	**2,833,822,757**	**38.10**	**39.01**	**142**	**24,628,594,055**	**68**	**68**	**DPMPTSPK**
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5575	35,372,303,830	3345	21,223,382,298	1,115	7,074,460,766	490	2,775,572,757	43.95	39.23	3,835	23,998,955,055	69	68	DPMPTSPK
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	906,950,000	36	544,170,000	12	181,390,000	6	58,250,000	50.00	32.11	42	602,420,000	70	66	DPMPTSPK
	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60	25,070,000	36	15,042,000	12	5,014,000	6	0	50.00	0.00	42	15,042,000	70	60	DPMPTSPK
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20	20,295,000	12	12,177,000	4	4,059,000	2	0	50.00	0.00	14	12,177,000	70	60	DPMPTSPK
	Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah	**Administrasi barang milik daerah pada**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah**	**5**	**7,750,000**	**3**	**4,650,000**	**1**	**1,550,000**	**0.5**	**0**	**50.00**	**0.00**	**4**	**4,650,000**	**70**	**60**	**DPMPTSPK**

		peranglat daerah															
	Rekonsilisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rekonsilisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	7,750,000	3	4,650,000	1	1,550,000	0.5	0	50.00	0.00	4	4,650,000	70	60	DPMPTSPK
	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	**Administrasi kepegawaian perangkat dasrah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**390**	**949,695,000**	**234**	**569,817,000**	**78**	**189,939,000**	**78**	**0**	**100.00**	**0.00**	**312**	**569,817,000**	**80**	**60**	**DPMPTSPK**
	Peningkatan sarana dan prasarana dispilin pegawai	Peningkatan sarana dan prasarana dispilin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	575,000,000	3	345,000,000	1	115,000,000	0	0	0.00	0.00	3	345,000,000	60	60	DPMPTSPK
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya	10	335,500,000	6	201,300,000	2	67,100,000	0	0	0.00	0.00	6	201,300,000	60	60	DPMPTSPK
	Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60	39,195,000	36	23,517,000	12	7,839,000	5	0	41.67	0.00	41	23,517,000	68	60	DPMPTSPK
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**2,661,669,300**	**6**	**1,597,001,580**	**6**	**532,333,860**	**5.00**	**193,433,340**	**83.33**	**36.34**	**6**	**1,790,434,920**	**92**	**67**	**DPMPTSPK**
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	326,809,300	3	196,085,580	1	65,361,860	0.5	26,235,000	50.00	40.14	4	222,320,580	70	68	DPMPTSPK

	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	1,047,810,000	3	628,686,000	1	209,562,000	0.5	79,700,000	50.00	38.03	4	708,386,000	70	68	DPMPTSPK
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan pengganda an	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	51,500,000	3	30,900,000	1	10,300,000	0.4	4,225,000	40.00	41.02	3	35,125,000	68	68	DPMPTSPK
	Penyediaan bahan/material	Penyediaan bahan/mat erial	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	50,000,000	3	30,000,000	1	10,000,000	0	0	0.00	0.00	3	30,000,000	60	60	DPMPTSPK
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	400,000,000	3	240,000,000	1	80,000,000	0.4	18,400,000	40.00	23.00	3	258,400,000	68	65	DPMPTSPK
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	785,550,000	36	471,330,000	12	157,110,000	5	64,873,340	41.67	41.29	41	536,203,340	68	68	DPMPTSPK
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**3,293,750,000**	**3**	**1,976,250,000**	**3**	**658,750,000**	**3.00**	**234,680,000**	**100.00**	**35.63**	**3**	**2,210,930,000**	**100**	**67**	**DPMPTSPK**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	106,500,000	36	63,900,000	12	21,300,000	5	9,150,000	41.67	42.96	41	73,050,000	68	69	DPMPTSPK
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkap an kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	1,320,000,000	36	792,000,000	12	264,000,000	5	110,000,000	41.67	41.67	41	902,000,000	68	68	DPMPTSPK
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	1,867,250,000	36	1,120,350,000	12	373,450,000	5	115,530,000	41.67	30.94	41	1,235,880,000	68	66	DPMPTSPK

	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**2**	**380,066,175**	**2**	**228,039,705**	**2**	**76,013,235**	**1**	**0**	**50.00**	**0.00**	**2**	**228,039,705**	**75**	**60**	**DPMPTSPK**
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	141,249,725	9	84,749,835	3	28,249,945	2	0	66.67	0.00	11	84,749,835	73	60	DPMPTSPK
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50	238,816,450	30	143,289,870	10	47,763,290	10	0	100.00	0.00	40	143,289,870	80	60	DPMPTSPK
	Meningkatnya pertumbuhan dan daya tarik investasi di Kabupaten Maros		**Persentase realisasi investasi**															**DPMPTSPK**
	Promosi penanaman modal	**Promosi penanaman modal**	**Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi**	**100**	**63,375,000**	**0**	**40,000,000**	**100**	**12,675,000**	**30**	**0**	**30**	**0**	**15**	**40,000,000**	**15**	**63**	**DPMPTSPK**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang**	**Jumlah investor yang melakukan investasi pada tahun berkenan**	**495**	**63,375,000**	**0**	**40,000,000**	**165**	**12,675,000**	**40**	**0**	**24.24**	**0.00**	**40**	**40,000,000**	**8**	**63**	**DPMPTSPK**

	Daerah Kabupaten/Kota	**Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota**																
	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenagan kabupaten/kota	Penyusunan strategi promosi penanaman modal kewenagan kabupaten/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	5	63,375,000	1	40,000,000	1	12,675,000	0	0	0.00	0.00	1	40,000,000	20	63	DPMPTSPK
	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	**Pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	**Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Tepat Wakt**	**100**	**1,908,750,000**	**41.25**	**728,088,405**	**100**	**381,750,000**	**30**	**36,790,000**	**30.00**	**9.64**	**36**	**764,878,405**	**36**	**40**	**DPMPTSPK**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota**	**Jumlah perusahaan yang yang dievaluasi dan mendapatkan pendampingan**	**480**	**1,908,750,000**	**10**	**728,088,405**	**160**	**381,750,000**	**30**	**36,790,000**	**18.75**	**9.64**	**40**	**764,878,405**	**8**	**40**	**DPMPTSPK**
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10	288,325,000	0	0	2	57,665,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	DPMPTSPK

	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	600	1,049,750,000	0	0	120	209,950,000	0	5,000,000	0.00	2.38	0	5,000,000	0	0	DPMPTSPK
	Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	300	570,675,000	0	0	60	114,135,000	30	31,790,000	50.00	27.85	30	31,790,000	10	6	DPMPTSPK
	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan		**IKM Perizinan dan Non Perizinan**															**DPMPTSPK**
	Pelayanan penanaman modal	**Pelayanan penanaman modal**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan**	**100**	**538,125,000**	**98**	**152,927,000**	**100**	**107,625,000**	**50**	**0**	**50**	**0**	**74**	**152,927,000**	**74**	**28**	**DPMPTSPK**

	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota**	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**130**	**538,125,000**	**13**	**152,927,000**	**26**	**107,625,000**	**12**	**0**	**46.15**	**0.00**	**25**	**152,927,000**	**19**	**28**	**DPMPTSPK**
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	250	162,245,000	0	0	50	32,449,000	40	0	80.00	0.00	40	0	16	0	DPMPTSPK
	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis mikro	Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis mikro	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	250	145,805,000	0	0	50	29,161,000	40	0	80.00	0.00	40	0	16	0	DPMPTSPK

	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	15	230,075,000	0	0	3	46,015,000	1	0	33.33	0.00	1	0	7	0	DPMPTSPK
	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	**Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal**	**Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100**	**78,675,000**	**0**	**47,027,000**	**100**	**15,735,000**	**70**	**0**	**70.00**	**0.00**	**35**	**47,027,000**	**35**	**60**	**DPMPTSPK**
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Jenis data dan sistem Informasi Penanaman Modal**	**2**	**78,675,000**	**0**	**47,027,000**	**2**	**15,735,000**	**1**	**0**	**50.00**	**0.00**	**1**	**47,027,000**	**25**	**60**	**DPMPTSPK**
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	20	78,675,000	12	47,027,000	4	15,735,000	2	0	50.00	0.00	14	47,027,000	70	60	DPMPTSPK

		secara Elektronik															
	Meningkatnya Kualitas tenaga kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja		**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**														**DPMPTSPK**
	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	**Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja**	**Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**50**	**158,800,000**	**22.69**	**0**	**37.54**	**31,760,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**0**	**23**	**0**	**DPMPTSPK**
	Pelaksanaan platihan berdasarkan unit kompetensi	**Pelaksanaan platihan berdasarkan unit kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikasi kompetensi**	**69**	**158,800,000**	**0**	**0**	**23**	**31,760,000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DPMPTSPK**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	69	158,800,000	0	0	23	31,760,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	DPMPTSPK
	Penempatan tenaga kerja	**Penempatan tenaga kerja**	**Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**35**	**298,302,000**	**22.69**	**42,491,000**	**24.5**	**51,937,000**	**12**	**0**	**48.98**	**0.00**	**17**	**42,491,000**	**50**	**14**	**DPMPTSPK**

	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten /Kota**	**Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan**	**3000**	**48,302,000**	**2**	**42,491,000**	**1,000**	**1,937,000**	**500**	**0**	**50.00**	**0.00**	**502**	**42,491,000**	**17**	**88**	**DPMPTSPK**
	Pelayanan Antar Kerja	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	250	48,302,000	110	42,491,000	50	1,937,000	36	0	72.00	0.00	146	42,491,000	58	88	DPMPTSPK
	Pengelolaan informasi pasar kerja	**Pengelolaan informasi pasar kerja**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja**	**2400**	**250,000,000**	**0**	**0**	**800**	**50,000,000**		**0**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DPMPTSPK**
	Job Fair/Bursa kerja	Job Fair/Bursa kerja	Jumlah pelaksanaan Job Fair	5	250,000,000	0	0	1	50,000,000		0	0.00	0.00	0	0	0	0	DPMPTSPK
	Hubungan industrial	**Hubungan industrial**	**Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan**	**100**	**279,155,000**	**50**	**117,992,500**	**100**	**55,831,000**	**60**	**0**	**60.00**	**0.00**	**55**	**117,992,500**	**55**	**42**	**DPMPTSPK**
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota**	**Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian kerja**	**20**	**189,130,000**	**3**	**91,200,000**	**4**	**37,826,000**	**3**	**0**	**75.00**	**0.00**	**6**	**91,200,000**	**30**	**48**	**DPMPTSPK**

	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	30	189,130,000	5	91,200,000	6	37,826,000	4	0	66.67	0.00	9	91,200,000	30	48	DPMPTSPK
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota**	**Jumlah Kasus Persselisihan Hubungan Industrial terfasilitasi**	**50**	**90,025,000**	**10**	**26,792,500**	**10**	**18,005,000**	**5**	**0**	**50.00**	**0.00**	**15**	**26,792,500**	**30**	**30**	**DPMPTSPK**
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu)	Jumlah Perselisihan yang dicegah	25	90,025,000	5	26,792,500	5	18,005,000	5	0	100.00	0.00	10	26,792,500	40	30	DPMPTSPK

		Daerah Kabupaten/ Kota																
	Meningkatnya Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi		**Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKtrans)**															**DPMPTSPK**
	Perencanaan kawasan transmigrasi	**Perencanaan kawasan transmigrasi**	**Persentase kesesuaian Kawasan Transmigrasi**	**100**	**29,600,000**	**0**	**0**	**100**	**5,920,000**	**100**	**0**	**100**	**0**	**50**	**0**	**50**	**0**	**DPMPTSPK**
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Luas areal kawasan transmigrasi yang tersedia**	**220**	**29,600,000**	**0**	**0**	**220**	**5,920,000**	**220**	**0**	**100.00**	**0.00**	**220**	**0**	**100**	**0**	**DPMPTSPK**
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	5	29,600,000	0	0	1	5,920,000	1	0	100.00	0.00	1	0	20	0	DPMPTSPK

2.2. Analisis Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pelayanan Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros dapat dilihat dari pencapaian beberapa Indikator yang diurai dari 25 indikator IKK RPJMD, 6 indikator LPPD, 5 indikator IKU dan 1 indikator TPB yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan menunjang proses pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pelayanan Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table2.2 :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Pelayanan Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maros

No	Indikator	LPPD	IKK RPJMD	IKU	TPB	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
						Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	√								180	182.2	180	182.2	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	√								105	100	105	100	
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	√								27.98	37.44	27.98	37.44	
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	√								44.37	44.96	44.99	45.01	
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	√								89.82	89.82	89.82	89.82	
6	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja	√								25.01	25.01	25.01	25.01	

	dalam wilayah Kabupaten													
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPTSPK			√		BB	BB	BB	A	B	B	BB	BB	
8	IKM Perizinan dan Non Perizinan			√		3.25	3.25	3.25	3.25	3.38	3.38	3.25	3.25	
9	Persentase realisasi investasi			√		9	9	9	9	9	9	9	9	
10	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		√	√		8.39	8.48	8.58	8.76	90.41	90.41	8.48	8.58	
11	Nilai Rata-rata Perkembangan Kawasan Transmigrasi			√		<50	<50	<50-75	<50-75	<50	<50	<50	<50-75	
12	Kontribusi Sektor Indutsri Terhadap PDRB		√			22.29	23.13	23.60	23.93	15.59	15.59	16.01	16.02	
13	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan bangunan		√			1.17	1.9	3.07	4.97	0.5	0.5	0.5	0.6	
14	Penyelesaian Izin Lokasi		√			100	100	100	100	100	100	100	100	
15	Jumlah Investor Berskala nasional (PMDN/PMA)		√			49	59	70	83	142	142	145	149	
16	Jumlah Nilai Investasi Berskala nasional (PMDN/PMA)		√			7,125,826	7,985,002	8,947,770	10,026,621	30,888,623,531,353	30,888,623,531,353	30,888,623,531,353	30,888,623,531,353	

17	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)		√			12.06	12.06	12.06	12.06	-2.9	-2.9	12.06	12.06	
18	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		√			61.18	63.87	66.69	72.69	55.85	55.91	72.69	72.69	
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		√			63.43	62.6	61.77	60.95	61.37	61.37	61.37	61.37	
20	Tingkat Penganguran Terbuka		√			6.11	5.82	5.54	5.28	5.04	5.04	5.28	5.28	
21	Rasio Penduduk Yang Bekerja		√			0.83	0.83	0.84	0.85	0.95	0.95	0.95	0.95	
22	laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja		√			-0.52	1.31	2.71	3.58	3.47	3.47	3.47	3.48	
23	Rasio Kesempatan Kerja		√			0.95	0.95	0.96	0.96	0.95	0.95	0.95	0.95	
24	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun		√			66.07	77.92	91.89	108.38	55.92	55.92	55.92	55.92	
25	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)		√			70.59	72.22	73.68	75	100	100	100	100	
26	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		√			24.08	24.5	24.92	25.35	15.87	15.87	15.87	15.87	
27	Keselamatan dan perlindungan		√			100	100	100	100	100	100	100	100	

28	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS Ketenakerjaan)		√			84.33	87.51	90.81	94.24	67.63	67.63	67.63	67.63	
29	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah		√			100	100	100	100	100	100	100	100	
30	Besaran Pemeriksanaan Perusahaan		√			83.7	83.36	83.03	82.69	18	18	30	40	
31	Besaran tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		√		√	37.19	37.54	37.9	38.26	80	80	80	80	
32	Besaran tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis masyarakat		√			70.32	70.99	71.67	72.35	69	69	72.35	72.35	
33	Besaran tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan		√			61.15	61.73	62.32	62.91	60	60	62.32	62.91	
34	Rasio Lulusan S1/S2/S3		√			0.06	0.06	0.06	0.06	0.1	0.1	0.12	0.13	
35	Persentase Transmigran Swakarsa		√			66.67	66.67	66.67	66.67	60	60	66.67	66.67	

Dari Analisis kinerja pelayanan diatas terdapat beberapa permasalahan pada Dinas Penamanan Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang perlu menjadi perhatian seperti terlihat oada table 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Tindak Lanjut
1	Banyaknya masyarakan desa yang tidak membuat IMB/PBG sebelum melalukan pembangunan Rumah / Bangunan	Pengurusan IMB/PBG terlalu lama dan Biaya yang tinggi	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan bangunan	Melakukan sosialisasi dan Pengawasan terhadap masyarakan yang memiliki Bangunan yang tidak dilengkapi dengan PBG
2	Banyaknya Jumlah Tenaga Kerja yang menua yang kemudian digantikan oleh tenaga kerja muda yang tidak seimbang jumlahnya	Tenaga kerja yang muda (usia 15 tahun keatas), lebih memilih melanjutkan sekolah abgi yang mampu sementara bagi yang kurang mampu dan tdk memiliki pendidikan sesuai standar perusahaan lebih memilih membantu keluarga di Desa	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Melakukan Sosialisasi terkait peningkatan kompetensi tenaga kerja
3	Pelaku Usaha masih kurang memahami kewajiban dan manfaat yang diterima apabila mengikutsertakan pekerjanya ke program jaminan sosial ketenagakerjaan	Penetapan sanksi yang diberikan ke pelaku usaha yang tidak ikut serta dalam Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan masih tergolong ringan	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS Ketenakerjaan)	Melakukan Edukasi ke pelaku usaha terkait sanksi dan manfaat program sosial ketenagakerjaan lebih intensif dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait
4	Banyaknya Perusahaan yg tidak memiliki Standar Aturan Perusahaan	Pemeriksanaan Perusahaan bukan menjadi kewenangan Kabupaten	Besaran Pemeriksanaan Perusahaan	Melakukan Koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi terkait Pemeriksaan Perusahaan di Kabupaten Maros
5	Masih banyak Tenaga Kerja yang belum memiki keahlian yang berbasis kompetensi	Kurangnya keinginan dan biaya bagi para pencari kerja dalam mengembangkan kompetensinya	Besaran tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis masyarakat	Tersedianya program kegiatan pada DPMPSPK yaitu Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi. Dan juga segera melakukan perencanaan pelatihaan kewirausahaan
6	Masih banyak Tenaga Kerja yang belum memiki keahlian yang berbasis kewirausahaan	Kurangnya keinginan dan biaya bagi para pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kewirauhaan	Besaran tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan kewirausahaan	

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu – isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Maros.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros adalah mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal, penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pelaporan pelayanan serta tenaga kerja;dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros memiliki susunan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas,
b. Sekretaris sebagai kepala sekretriat yang terdiri dari sub bagian:
    1. Perencanaan,dan Pelaporan;
    2. Keuangan dan Asset
    3. Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri atas Kelompok
e. Jabatan Fungsional;
f. Bidang Pengaduan dan Pelaporan Pelayanan, terdiri atas Kelompok
g. Jabatan Fungsional;
h. Bidang Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
i. Bidang Hubungan Industrial dan Transmigrasi, terdiri atas Kelompok
j. Jabatan Fungsional; dan
k. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam tugas pokok dan fungsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Secara umum dan normatif suatu hal yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah adalah proses manajemen mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Proses tersebut merupakan serangkaian tahapan kritis yang harus dikelola melalui penyusunan manajemen resiko sehingga sebelum dilaksanakan akan dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak negatif atau

penyimpangannya. Oleh karena itu, setiap tahapan tersebut harus dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rencana Kerja OPD disamping mengacu pada Renstra OPD juga berdasarkan realisasi dan plafon anggaran tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja. Disamping itu Rivew Renstra OPD terhadap Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD dengan melihat perkembangan – perkembangan lingkungan organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran OPD

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 pada DPMPTSPK Kabupaten Maros

No	Program/Kegiata/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikasi kompetensi		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Maros , Kec. Simbang, Kec. Lau, Kec. Turikale, Kec. Marusu	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 orang	Usulan Musrenbang

Tabel 2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN				**9,424,331,861**	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN**				**9,424,331,861**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				**139,528,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**139,528,000**	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 Persen	31,760,000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	100 Persen	1,110,000,000	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikasi kompetensi	25 Orang	31,760,000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikasi kompetensi	25 Orang	720,000,000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	23 Orang	31,760,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	23 Orang	31,760,000	

3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	24.5 Persen	51,937,000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	24.5 Persen	51,937,000	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pelayanan Antar kerja	2 Dokumen	1,937,000	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pelayanan Antar kerja	2 Dokumen	1,937,000	
	Pelayanan antar Kerja	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	1,937,000	Pelayanan antar Kerja	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50 Orang	1,937,000	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah pencari kerja yang mengikuti Informasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	20 Orang	50,000,000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Jumlah pencari kerja yang mengikuti Informasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK)	20 Orang	50,000,000	
	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	50,000,000	Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	50,000,000	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan	100 Persen	55,831,000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan	100 Persen	55,831,000	

	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian kerja	2 Dokumen	37,826,000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian kerja	2 Dokumen	37,826,000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	37,826,000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	37,826,000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Persselisihan Hubungan Industrial terfasilitasi	2 Kasus	18,005,000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kasus Persselisihan Hubungan Industrial terfasilitasi	2 Kasus	18,005,000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	18,005,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara	18,005,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				**9,278,883,861**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**9,278,883,861**	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.	100 Persen	8,761,108,861	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.	100 Persen	8,761,108,861	

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	19 Dokumen	37,599,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	19 Dokumen	37,599,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9,156,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9,156,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,989,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,989,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,747,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,747,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,700,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,700,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,549,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,549,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9,498,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	9,498,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4,960,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4,960,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	12 Dokumen	7,264,923,766	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	12 Dokumen	7,264,923,766	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.115 Orang/bulan	7,074,460,766	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.115 Orang/bulan	7,074,460,766	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	181,390,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	181,390,000	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	5,014,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	5,014,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4,059,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4,059,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,550,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	1,550,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,550,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,550,000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	78 Pegawai	189,939,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	78 Pegawai	203,914,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	115,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	115,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	67,100,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	67,100,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	13,975,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	7,839,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	7,839,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	6 Layanan	532,323,860	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	6 Layanan	532,323,860	

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	65,361,860	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	65,361,860	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	209,562,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	221,827,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10,300,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	120,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	80,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	275,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	157,100,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	658,750,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	658,750,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21,300,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21,300,000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	264,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	264,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	373,450,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	373,450,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan PD	2 Jenis	76,013,235	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan PD	2 Jenis	76,013,235	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	28,249,945	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	12,009,945	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	47,763,290	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	47,763,290	

7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi	100 Persen	12,675,000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi	100 Persen	12,675,000	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Promosi Penanaman Modal	165 Dokumen	12,675,000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Promosi Penanaman Modal	165 Dokumen	12,675,000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	12,675,000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	12,675,000	
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100 Persen	107,625,000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	100 Persen	107,625,000	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	26 Jenis	107,625,000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	26 Jenis	107,625,000	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	32,449,000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	32,449,000	

	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	29,161,000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	29,161,000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	3 Kegiatan Usaha	46,015,000	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	3 Kegiatan Usaha	46,015,000	
9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Tepat Waktu	100 Persen	381,740,000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Tepat Waktu	100 Persen	381,740,000	

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan LKPM	160 Laporan	381,740,000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan LKPM	160 Laporan	381,740,000	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2 Kegiatan Usaha	57,655,000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2 Kegiatan Usaha	57,655,000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120 Pelaku Usaha	209,950,000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120 Pelaku Usaha	209,950,000	

	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	114,135,000	Pengawasan Penanaman Modal	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	114,135,000	
10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 Persen	15,735,000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 Persen	15,735,000	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jenis data dan sistem Informasi Penanaman Modal	2 Dokumen	15,735,000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jenis data dan sistem Informasi Penanaman Modal	2 Dokumen	15,735,000	

	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	15,735,000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Maros, Turikale, Adatongeng	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen	15,735,000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANAN				**5,920,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHANAN**				**5,920,000**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				**5,920,000**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**5,920,000**	
11	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentasekesesuiaian Kawasan Transmigrasi	100 Persen	5,920,000	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentasekesesuiaian Kawasan Transmigrasi	100 Persen	5,920,000	
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah lokasi calon penempatan transmigrasi yang dijajaki	2 Lokasi	5,920,000	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		Jumlah lokasi calon penempatan transmigrasi yang dijajaki	2 Lokasi	5,920,000	
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab. Maros, Tompobulu, Bonto Manurung	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	5,920,000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab. Maros, Tompobulu, Bonto Manurung	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	5,920,000	

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGJKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional

Identifikasi Terhadap kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah dapat dilihat pada table dibawah ini :

Identifikasi terhadap arah kebijakan nasional yaitu dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang selanjutnya selaras dengan dengan arah kebijakkan provinsi yaitu adanya perbaikan tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang kemuadian dilanjutkan dengan adanya kebijakan daerah terkait dengan Pemantapan Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik. Identifikasi terhadap arah kebijakan nasional berikutnya adalah Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing yang dilanjutkan dengan arah kebijakan Provinsi yang menedukung adanya Pembangunan Manusia yang memudian dilanjutkan dengan munculnya arah kebijakan daerah yaitu Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan isu – isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Ppintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam

perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 seperti yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatkan Tata Kelola DPMPTSPK Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Yang bersih, akuntabel, efisien dan efektif	Nilai Akuntabilitas Kinerja DPMPTSPK
		Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	IKM Perizinan dan Non Perizinan
2	Meningkatkan Kontribusi Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya pertumbuhan dan daya tarik investasi di Kabupaten Maros	Persentase Realisasi Investasi
		Meningkatnya Kualitas tenaga kerja dan Ketersediaan Lapangan Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga kerja
3	Meningkatkan Kawasan Transmigrasi sebagai Pendukung Pertumbuhan Wilayah	Meningkatnya Status Perkembangan Kawasan Transmigrasi	Nilai Rata-Rata Perkembangan Kawasan Transmigrasi

3.3. Program dan Kegiata

A. Faktor – factor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan dan Program Kegiatan

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 maka untuk tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Maros merancang program, kegiatan, dan sub kegiatan. Rincian Program Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah.

b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan ketenagakerjaan Kab. Maros Tahun Anggaran 2024 adalah 9 Program 17 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan. Dan untuk lebih lengkapnya dapar dilihat pada table 3.2 dibawah.

c. Analisis Perubahan Anggaran

Analisis perubahan anggaran DPMPTSPK adalah :

1. Pada Sub Kegiatan “Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian” dilakukan Penambahan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp. 3.895.000,-dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sebesar Rp. 10.080.000,- dikarenakan perlunya dilakukan kegiatan untuk sosialisasi informasi kepegawaian dan evaluasi kinerja pegawai yang pelaksanaannya bekerjasama sama dengan stackholder terkait.
2. Pada Sub Kegiatan “Penyediaan Bahan Logistik Kantor” dilakukan Penambahan belanja pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover sebesar Rp. 12.265.000,- dikarenakan adanya penambahan kebutuhan Bahan Logistik Kantor pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan.
3. Pada Sub Kegitan “Penyediaan Bahan/Material” dilakukan pengurangan pada “Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya” sebesar Rp. 10.000.000,- dikarenakan tidak digunakannya Anggaran pada sub kegiatan “Penyediaan Bahan/Material”, yang kemudian di alihkan ke sub kegiatan “Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian”
4. Pada Sub Kegiatan “Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan” dilakukan pengurangan pada “Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan” sebesar Rp. 16.240.000,- dikarenakan perlunya pembagian Alokasi Anggaran pada sub kegiatan “Penyediaan Bahan Logistik

Kantor" dan sub kegiatan "Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian" demi kelancaran proses pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK).

Tabel 3.2. Evaluasi Capaian Kinerja DPMPTSP

NO	Program/Kegiatan/Sub Keg		Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH		
1	2		3	4		5		6		7	8
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN						**9,424,331,861**	**9,424,331,861**				
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**			**8,761,108,861**	**8,761,108,861**				PAD
	2.18.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	**19**	**19**	**37,599,000**	**37,599,000**				PAD
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	2	2	9,156,000	9,156,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	1	1	3,989,000	3,989,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1	1	3,747,000	3,747,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1	1	2,700,000	2,700,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1	1	3,549,000	3,549,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD

	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP - PD	1	1	9,498,000	9,498,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	12	12	4,960,000	4,960,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**42**	**42**	**7,264,923,766**	**7,264,923,766**				PAD
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,115	1,115	7,074,460,766	7,074,460,766	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan PD	12	12	181,390,000	181,390,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	12	12	5,014,000	5,014,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	4	4	4,059,000	4,059,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**1**	**1**	**1,550,000**	**1,550,000**				PAD
	2.18.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	1	1,550,000	1,550,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**78**	**78**	**189,939,000**	**203,914,000**				PAD
	2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Jenis Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	1	115,000,000	115,000,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	2	67,100,000	67,100,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD

	2.18.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	2	-	13,975,000	-	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	7,839,000	7,839,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	**6**	**6**	**532,333,860**	**534,598,860**				PAD
	2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1	1	65,361,860	65,361,860	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1	1	209,562,000	221,827,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Pakrt Barang Cetakan dan Penggandaan	1	1	10,300,000	10,300,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material	1	0	10,000,000	0	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas kunjungan tamu	1	1	80,000,000	80,000,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	12	12	157,110,000	157,110,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**3**	**3**	**658,750,000**	**658,750,000**				PAD
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	21,300,000	21,300,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	264,000,000	264,000,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	373,450,000	373,450,000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD

	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan PD	2	2	**76,013,235**	59,773,235				PAD
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	28,249,945	12,009,945	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
	2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10	10	47,763,290	47,763,290	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Turikale, Turikale	ASN DPMPTSPK	PAD
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**Persentase Rencana Investasi Yang terealisasi**	**100**	**100**	**12,675,000**	**12,675,000**				PAD
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah investor yang melakukan investasi pada tahun berkenan**	**165**	**165**	**12,675,000**	**12,675,000**				PAD
	2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	1	12,675,000	12,675,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Masyarakat	PAD
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Pemenuhan Dokumen Permohonan Perizinan dan Non Perizinan**	**100**	**100**	**107,625,000**	**107,625,000**				PAD
	2.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan**	**26**	**26**	**107,625,000**	**107,625,000**				PAD
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem	50	50	32,449,000	32,449,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Masyarakat	PAD

			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	3	3	46,015,000	46,015,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Masyarakat	PAD
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50	50	29,161,000	29,161,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Masyarakat	PAD
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Tepat Wakt**	**100**	**100**	**381,740,000**	**381,740,000**				DAK
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan yang yang dievaluasi dan mendapatkan pendampingan**	**160**	**160**	**381,740,000**	**381,740,000**				DAK
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2	2	57,655,000	57,655,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Pelaku Usaha	DAK
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	120	120	209,950,000	209,950,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Pelaku Usaha	DAK

	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60	60	114,135,000	114,135,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Pelaku Usaha	DAK
6	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**100**	**100**	**15,735,000**	**15,735,000**				PAD
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jenis data dan sistem Informasi Penanaman Modal**	**2**	**2**	**15,735,000**	**15,735,000**				PAD
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	4	15,735,000	15,735,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Masyarakat	PAD
7	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**Persentase Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselesaikan**	**100**	**100**	**55,831,000**	**55,831,000**				PAD
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran perjanjian kerja**	**4**	**4**	**37,826,000**	**37,826,000**				PAD
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai	6	6	37,826,000	37,826,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Masyarakat	PAD

			Peserta Jamsostek serta Pengupahan								
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kasus Persselisihan Hubungan Industrial terfasilitasi**	**10**	**10**	**18,005,000**	**18,005,000**				PAD
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang dicegah	5	5	18,005,000	18,005,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Masyarakat	PAD
8	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**	**37.54**	**37.54**	**31,760,000**	**31,760,000**				PAD
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan memiliki sertifikasi kompetensi**	**23**	**23**	**31,760,000**	**31,760,000**				PAD
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	23	23	31,760,000	31,760,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Masyarakat	PAD
9	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan**	**24.5**	**24.5**	**51,937,000**	**51,937,000**				PAD
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan**	**1,000**	**1,000**	**1,937,000**	**1,937,000**				PAD

	2.07.04.2.01.02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	50	50	1,937,000	1,937,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Masyarakat	PAD
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan informasi pasar kerja**	**800**	**800**	**50,000,000**	**50,000,000**				PAD
	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pelaksanaan Job Fair	1	1	50,000,000	50,000,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Masyarakat	PAD
10	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	**Persentase kesesuaian Kawasan Transmigrasi**	**100**	**100**	**5,920,000**	**5,920,000**				PAD
	3.32.02.2.01	pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	**Luas areal kawasan transmigrasi yang tersedia**	**220**	**220**	**5,920,000**	**5,920,000**				PAD
	3.32.03.2.01.05	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1	1	5,920,000	5,920,000	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kec/Kel/Desa	Masyarakat	PAD

BAB IV.PENUTUP

Rencana Kerja-OPD merupakan dokumen perencanaan, sebagai acuan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, bahan Koordinasi dan evaluasi yang berisi rencana pelaksanaan program dan kegiatan beserta rencana anggaran dalam satu tahun anggaran sebagai implementasi dan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Renja OPD dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok OPD serta dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja-OPD didasarkan pada program dan kegiatan yang termuat dalam Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu maupun RKPD, dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunya Renja-OPD setiap Tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feed-back terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta untuk mengembangkan aspirasi sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan apresiasi sebagai catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
2. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi data potensi investasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis
4. Perlunya peningkatan dan pengembangan data potensi investasi yang akurat dan terkini, untuk mendukung peningkatan dan pengembangan sistem Informasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Peningkatan sumber daya, sarana prasarana penunjang investasi,

6. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dengan memberikan jaminan kepastian kepastian hukum dan kepastian berusaha, insentif dan kemudahan, terbuka, akuntabel bagi pengusaha lokal PMA maupun PMDN dengan dukungan personil, sarana dan prasarana serta dana yang memadahi
7. Peningkatan Promosi dan Kerjasama yang tepat efektif dan efisien untuk meningkatkan daya tarik investasi
8. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Investasiuntuk mewujudkan pelayanan prima
9. Peningkatan pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan (DPMPTSPK) Kabupaten Maros Tahun 2024 ini kami sadari masih banyak kekurangan – kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu sangat memerlukan kritikan, saran serta masukan - masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan rencana kerja ini.

Demikianlah Rencana Kerja ini kami buat mudah-mudahan mendapat respon dan kebijaksanaan, atas bantuan dan dukungan kami ucapkan terima kasih

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada akhirnya Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2024 ini pada hakikatnya merupakan perencanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Untuk meningkatkan daya guna laporan dan peningkatan kinerja, Inspektorat Kabupaten Maros secara bertahap berupaya untuk mengembangkan kualitas implementasi pelaporan kinerja dengan memperhatikan kriteria komponen-komponen perencanaan, memanfaatkan sistem pengukuran kinerja untuk monitoring kegiatan dan meningkatkan mutu informasi dalam laporan kinerja.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2024 ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait, khususnya Inspektorat Kabupaten Maros sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Maros, 31 Juli 2024

Inspektur Kabupaten Maros,

Ir. H. TAKDIR, D., MM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19671201 199703 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud danTujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja pd Tahun lalu dan Capaian PD 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 16

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebiajakan Nasional, Provinsi, Daerah 26

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 29

3.3 Program dan Kegiatan 30

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Yang Perlu Dapat Diperhatikan 45

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 46

4.3 Rencana Tindak Lanjut 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Maros periode Tahun 2024, merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2021-2026.

Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan salah satu unsur manajemen dalam upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan program dan kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.

Sebagai dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah (PD) ,rencana kerja Inspektorat Kabupaten Maros mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Kabupaten Maros, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Tahun 2024 adalah dokumen yang secara substansial merupakan implementasi dari Tujuan dan Arah Kebijakan
2. Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maros (RKPD).
3. Rencana kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Tahun 2024, merupakan acuan untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta merupakan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.

4. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Tahun 2024 selain merupakan gambaran / wujud dari pencapaian kinerja juga merupakan salah satu instrument untuk mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Inspektorat dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Maros, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD tetap mengedepankan profesionalisme pengawasan sebagai program prioritas, sesuai tata cara dan alur penyusunan Rencana Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rebcana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan bahwa:

1. Renja disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indicator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang –undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Derah, Tata Cara Evaliasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Derah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur No 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Inspektorat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 4).
20. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang pengarus utamaan Gender (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 1);

21. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 34).

1.3. Maksud danTujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran yang mempunyai fungsi:

1) Sebagai Acuan dan Dasar Hukum Inspektorat Daerah Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Tahun 2024
2) Sebagai bahan pembanding dan tolok ukur atas target kinerja tahun berjalan sesuai yang telah direncanakan.
3) Sebagai bahan evaluasi terhadap penyempurnaan pelaksanaan program dan peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2022 sekaligus sebagai informasi umum kepada publik.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah :

1) Menjabarkan rencana strategis Inspektorat kabupaten Maros periode Tahun 2021-2026 dalam rencana program kegiatan prioritas, peningkatan pengawasan yang berkualitas dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan Tahun Anggaran 2024.
2) Menjadi pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Maros dalam melaksanakan seluruh kegiatan strategis Tahun Anggaran 2024.
3) Menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten Maros dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas.
4) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pengawasan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV. P E N U T U P

Bab ini menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut..

BAB V. P E N U T U P

Bab ini menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Maros

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros tahun lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 dan realisasi renja tahun berjalan sampai dengan tahun 2024 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Maros

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP**										**37,07638401**		**38**		**752**	**INSPEKTORAT**
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	100	44.303.677.890	100	26.562.206.734	100	8.968.362.381	100	3.969.879.113	100,00	38	100	29.952.185.847	100,00	68	INSPEKTORAT
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**55**	**96.765.000**	**33**	**58.059.000**	**11**	**19.353.000**	**3**	**0**	**27,27**	**0,00**	**36**	**58.059.000**	**65**	**60**	**INSPEKTORAT**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	16.325.000	6	9.795.000	2	3.265.000	0	0	0,00	0,00	6	9.795.000	60	60	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	15.222.500	3	9.133.500	1	3.044.500	0	0	0,00	0,00	3	9.133.500	60	60	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	11.222.500	3	6.733.500	1	2.244.500	0	0	0,00	0,00	3	6.733.500	60	60	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	13.000.000	3	7.800.000	1	2.600.000	1	0	100,00	0,00	4	7.800.000	80	60	INSPEKTORAT

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	14.995.000	3	8.997.000	1	2.999.000	0	0	0,00	0,00	3	8.997.000	60	60	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realisaskinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realisaskinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	13.000.000	3	7.800.000	1	2.600.000	1	0	100,00	0,00	4	7.800.000	80	60	INSPEKTORAT
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	13.000.000	12	7.800.000	4	2.600.000	1	0	25,00	0,00	13	7.800.000	65	60	INSPEKTORAT
	Administrasi keuangan perangkat daerah	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	125	40.602.435.125	75	24.361.461.075	25	8.120.487.025	8	3.166.101.473	32,00	38,99	83	27.527.562.548	66	68	INSPEKTORAT
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5110	39.937.485.125	3066	23.962.491.075	1.022	7.987.497.025	507	3.118.141.473	49,61	39,04	3573	27.080.632.548	70	68	INSPEKTORAT
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55	664.950.000	33	398.970.000	11	132.990.000	5	47.960.000	45,45	36,06	38	446.930.000	69	67	INSPEKTORAT
	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	**Administrasi kepegawaian perangkat dasrah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	365	538.134.015	219	322.880.409	73	107.626.803	5	34.879.000	6,85	32,41	224	357.759.409	61	66	INSPEKTORAT
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	5	37.500.000	3	22.500.000	1	7.500.000	0	0	0,00	0,00	3	22.500.000	60	60	INSPEKTORAT

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	365	500.634.015	219	300.380.409	73	100.126.803	4	34.879.000	5,48	34,83	223	335.259.409	61	67	INSPEKTORAT
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**7**	**2.058.593.750**	**7**	**1.235.156.250**	**7**	**411.718.750**	**2**	**99.019.640**	**28,57**	**24,05**	**4,5**	**1.334.176.890**	**64**	**65**	**INSPEKTORAT**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	6.375.000	3	3.825.000	1	1.275.000	0	0	0,00	0,00	3	3.825.000	60	60	INSPEKTORAT
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor	5	50.000.000	3	30.000.000	1	10.000.000	0	0	0,00	0,00	3	30.000.000	60	60	INSPEKTORAT
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	47.287.500	3	28.372.500	1	9.457.500	0	1.530.700	0,00	16,19	3	29.903.200	60	63	INSPEKTORAT
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	432.825.000	12	259.695.000	4	86.565.000	0	14.666.000	0,00	16,94	12	274.361.000	60	63	INSPEKTORAT
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15	191.250.000	9	114.750.000	3	38.250.000	0	6.300.000	0,00	16,47	9	121.050.000	60	63	INSPEKTORAT
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	200.000.000	36	120.000.000	12	40.000.000	5	12.500.000	41,67	31,25	41	132.500.000	68	66	INSPEKTORAT
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.130.856.250	36	678.513.750	12	226.171.250	5	64.022.940	41,67	28,31	41	742.536.690	68	66	INSPEKTORAT
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**1**	**75.000.000**	**1**	**45.000.000**	**1**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,5**	**45.000.000**	**50**	**60**	**INSPEKTORAT**

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	75.000.000	30	45.000.000	10	15.000.000	0	0	#DIV/0!	0,00	30	45.000.000	60	60	INSPEKTORAT
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15**	**857.750.000**	**9**	**514.650.000**	**3**	**171.550.000**	**2**	**35.100.000**	**66,67**	**20,46**	**5,5**	**549.750.000**	**37**	**64**	**INSPEKTORAT**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2250	60.000.000	1350	36.000.000	450	12.000.000	171	2.250.000	38,00	18,75	1521	38.250.000	68	64	INSPEKTORAT
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	280.750.000	9	168.450.000	3	58.150.000	0	3.100.000	0,00	5,52	9	171.550.000	60	61	INSPEKTORAT
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	517.000.000	36	310.200.000	12	103.400.000	5	29.750.000	41,67	28,77	41	339.950.000	68	66	INSPEKTORAT
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**1**	**75.000.000**	**1**	**45.000.000**	**1**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,5**	**45.000.000**	**50**	**60**	**INSPEKTORAT**
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	75.000.000	3	45.000.000	1	15.000.000	0	0	0,00	0,00	3	45.000.000	60	60	INSPEKTORAT
	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros		**Persentase Unit Kerja yang memenuhi syarat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)**															**INSPEKTORAT**
	Penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelenggaraan pegawai	1	11.938.650.000	0,24	4.906.961.000	1	2.124.000.000	0	986.320.000	0,00	42	0,12	5.794.261.000	12,00	49	INSPEKTORAT

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyelenggaraan pengawasan internal	**Penyelenggaraan pengawasan internal**	**Jumlah temuan pelanggaran yang ditindaklanjuti**	**740**	**11.938.650.000**	**731**	**4.908.961.000**	**3**	**1.860.430.000**	**3**	**805.250.000**	**100,00**	**43,28**	**734**	**5.714.211.000**	**99**	**48**	**INSPEKTORAT**
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	590	1.275.000.000	50	610.810.000	118	255.000.000	10	252.110.000	8,47	98,87	60	862.920.000	10	68	INSPEKTORAT
	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	750	6.020.550.000	341	2.425.220.000	150	1.204.110.000	50	464.270.000	33,33	38,56	391	2.889.490.000	52	48	INSPEKTORAT
	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaanan BPK RI dan tindak lanjut pemeriksanaan APIP	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksanaan BPK RI dan tindak lanjut pemeriksanaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	180	2.006.600.000	11	1.351.371.000	36	401.320.000	28	88.870.000	77,78	22,14	39	1.440.241.000	22	72	INSPEKTORAT
	Penyelenggaraan penagwasan dengan tujuan tertentu	**Penyelenggaraan penagwasan dengan tujuan tertentu**	**Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang diterbitkan**	**144**	**1.318.250.000**	**138**	**585.590.000**	**2**	**263.650.000**	**1**	**80.070.000**	**50,00**	**30,37**	**139**	**665.660.000**	**97**	**50**	**INSPEKTORAT**
	Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	40	90.000.000	17,00	23.400.000	8	18.000.000	0	0	0,00	0,00	17,00	23.400.000	43	26	INSPEKTORAT
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	198,00	1.228.250.000	160,00	562.190.000	12	245.650.000	6	80.070.000	50,00	32,60	166,00	642.260.000	85	52	INSPEKTORAT
	Meningkatnya kualitas Pengedalian Internal		**Persentase temuan berulang yang diselesaikan**															**INSPEKTORAT**
	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase tindak lanjut temuan	100	732.790.000	30,7	392.846.400	4	165.038.000	4	12.000.000	100,00	7	17,35	404.846.400	17,35	55	INSPEKTORAT
	Pendampingan dan asistensi	**Pendampingan dan asistensi**	**Jumlah layanan pendampingan dan asistensi di yang di berikan**	**4**	**732.790.000**	**4**	**392.846.400**	**4**	**165.038.000**	**0**	**12.000.000**	**0,00**	**7,27**	**2**	**404.846.400**	**50**	**55**	**INSPEKTORAT**
	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	195	302.020.000	40	226.296.400	39	60.404.000	0	12.000.000	0,00	19,87	40	238.296.400	21	79	INSPEKTORAT

	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangktu Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pendampingan , asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Pendampingan , asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	195	176.350.000	40	103.600.000	39	35.270.000	0	0	0,00	0,00	40	103.600.000	21	59	INSPEKTORAT
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15	115.820.000	13	17.750.000	3	23.164.000	0	0	0,00	0,00	13	17.750.000	87	15	INSPEKTORAT
	Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan zona integritas	Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan zona integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	21	138.600.000	0	45.200.000	7	46.200.000	0	0	0,00	0,00	0	45.200.000	0	33	INSPEKTORAT

Dari hasil yang dilakukan terkait Pelaksanaan Renja Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

- Jumlah Program yang dilaksanakan dan mencapai target oleh ITDA Tahun 2023 sebanyak 3 Program. Adapun Jumlah Program yang telah mencapai target adalah 2 Program, dan Program yang tidak mencapai target adalah 1 Program.
- Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dan mencapai target oleh ITDA Tahun 2023 sebanyak 11 Kegiatan. Adapun Jumlah Kegiatan yang telah mencapai target adalah 8 Kegiatan, dan Kegiatan yang tidak mencapai target adalah 4 Kegiatan.
- Jumlah Sub kegiatan yang dilaksanakan dan mencapai target oleh ITDA sebanyak 35 Sub kegiatan. Adapun Jumlah Sub Kegiatan yang telah mencapai target adalah 29 Sub Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang tidak mencapai target adalah 1 Sub Kegiatan, dan sub kegiatan yang tidak terlaksana adalah 5 Sub Kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah : Urusan Penunjang Bidang Pengawasan Internal dan Fasilitas Pengawasan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan Pelayanan mengampuh 11 Indikator Kinerja Pelayanan yang terdiri dari : Indikator IKU Sebanyak 5 Indikator, Indikator IKK Sebanyak 4 Indikator, dan Indikator LPPD Sebanyak 3 Indikator

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Maros Tahun 2023

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisa
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Hasil Survey Kepuasan ASN			V	3,26	3,5	3,7	3,8	3,28	3,28	3,7	3,8	IKU
2	Nilai SPIP			V	3	3	3	3	3	3	3	3	IKU
3	Persentase Temuan Yang ditindak Lanjuti			V	76,45	81,18	86,20	91,54	73,98	73,98	76	77	IKU
4	Nilai Kapabilitas APIP			V	3	3	3	3	3	3	3	3	IKU
5	Jumlah Unit Kerja yang Ditetapkan ZI WBK			V	3	3	4	5	3	3	4	5	IKU
6	Jumlah Temuan Yang Ditindak Lanjuti		V		464	477	506	522	464	477	492	506	IKK
7	Persentase Pelanggaran Pegawai		V		0,13	0,11	0,10	0,08	0,06	0,06	0,05	0,04	IKK
8	Jumlah Temuan BPK		V		13	13	12	12	4	4	4	4	IKK
9	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022				-	-	-	-	957	1.044	-	-	LPPD
10	Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022				-	-	-	-	1.250	1.339	-	-	LPPD
11	Nilai MCP Tahun 2022				-	-	-	-	89	80	-	-	LPPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros

Tabel 2.3
Analisis Kinerja Pelayanan ITDA Kab. Maros

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak
1	2	3	4
1.	ASN yang membutuhkan Bebas Temuan Belum mengetahui Dokumen yang dipersyaratkan	Masih belum lengkapnya Dokumen terkait persyaratan Pelayanan yang akan diberikan	Survey Kepuasan ASN
2.	Penerapan SPIP pada level OPD masih sebatas dokumen	Regulasi terkait SPIP (Manajemen Risiko) belum di susun	Nilai SPIP
3.	Temuan 10 tahun terakhir tidak dapat di tindak lanjuti	Belum adanya Tindak lanjut dari Perangkat Daerah yang memiliki Temuan	Persentase Temuan Yang ditindak Lanjuti
4.	Belum meratanya kemampuan tenaga APIP dalam memberikan pendampingan dan asistensi	Terbatasnya tenaga apip yang memiliki kemampuan dalam memahami peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pendampingan untuk program dan kegiatan perangkat daerah	Nilai Kapabilitas APIP
5.	Belum adanya kesiapan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai ZI WBK	Meninimnya pengetahuan Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Zona Integritas	Unit Kerja yang Ditetapkan ZI WBK

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak
1	2	3	4
6.	Adanya temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti	Objek Temuan (ASN) sudah meninggal dunia, pensiun dan berpindah alamat	Temuan Yang Ditindak Lanjuti
7.	Masih adanya ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin	Tidak memperoleh sanksi dari Perangkat Daerah	Persentase Pelanggaran Pegawai
8.	Terjadi Temuan Berulang	Minimnya kesadaran Perangkat Daerah terhadap pentingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Temuan BPK
9.	Dokumen tindak lanjut dari perangkat daerah tidak sesuai Rekomendasi	Minimnya pemahaman terkait dokumen Tindak Lanjut sesuai Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2023
10.	Terjadi Temuan Berulang	Minimnya kesadaran Perangkat Daerah terhadap pentingan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2023
11.	Perangkat Daerah kurang paham terkait pemenuhan eviden dalam area intervensi	Perbedaan presepsi antara evaluasi dengan admin terkait Eviden	Nilai MCP Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan sektor Pengawasan Inspektorat Daerah di Kabupaten Maros, diperoleh gambaran tentang adanya isu-isu strategis yang harus dihadapi pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bahwa nilai Maturitas SPIP Daerah mencapai level 5.
2. Memaksimalkan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang mana PNS yang melakukan Pelanggaran akan dikenai sanksi.
3. Peningkatan terhadap Elektabilitas Kinerja serta SDM terkait kapalitas APIP.
4. Pengusulan Penambahan Unit Kerja dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.

TABEL 2.4
Analisis Lingkungan (Internal dan Eksternal) Analisis SWOT
ITDA Kabupaten Maros

KEKUATAN		KELEMAHAN	
1		2	
1	Adanya mekanisme pelaporan hasil Audit Inspektorat yang langsung ditujukan kepada bupati yang berwenang dalam membuat Kebijakan	1	Belum memadainya kualitas sumberdaya manusia Aparat Pengawasan (APIP)
2	Adanya program kerja pengawasan tahunan (PKPT)	2	Belum memadainya jumlah anggaran sesuai dengan beban tugas yang ada
3	Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan		
PELUANG		**ANCAMAN**	
1		2	
1	Adanya kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam rangka penegakan hukum	1	Banyaknya perangkat daerah dan desa yang harus diawasi
2	Adanya tuntutan terhadap perangkat daerah untuk menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), Pengawasan masyarakat dan melakukan pencegahan terhadap praktek- praktek korupsi, kolusi, Nepotisme	2	Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja untuk perangkat daerah terutama dalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024. Hal ini berdasarkan atas hasil analisis kebutuhan akan adanya Peraturan Daerah Perencanaan dan Penganggaran guna meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Maros

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD				KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
			11.149.853.578,00	**11.149.853.578,00**				
06.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**8.860.735.578,00**	**8.876.366.578,00**	**Itda Maros**	**Itda Maros**		
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**19.353.000,00**	**19.353.000,00**	**Itda Maros**	**Itda Maros**		**PAD**
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.265.000,00	3.265.000,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.044.500,00	3.044.500,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.244.500,00	2.244.500,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.600.000,00	2.600.000,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.999.000,00	2.999.000,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD				KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000,00	2.600.000,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.120.487.025,00**	**8.120.487.025,00**	**Itda Maros**	**Itda Maros**		**PAD**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.903.497.025,00	7.987.497.025,00	Itda Maros	Itda Maros		DAU
	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN		84.000.000,00	0,00	Itda Maros	Itda Maros		DAU
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.990.000,00	132.990.000,00	Itda Maros	Itda Maros		DAU
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**107.626.803**	**107.442.803**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.500.000	7.500.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100.126.803	100.126.803	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**411.718.750**	**401.718.750**	**Itda Maros**	**Itda Maros**		**PAD**
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.275.000	1.275.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.000.000	-	Itda Maros	Itda Maros		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD				KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9.457.500	9.457.500	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86.565.000	86.381.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	38.250.000	38.250.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	40.000.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.171.250	226.171.250	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		**15.000.000**	**62.500.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.000.000	62.500.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**171.550.000**	**149.865.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	5.250.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	56.150.000	57.215.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	103.400.000	87.400.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**15.000.000**	15.000.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15.000.000	15.000.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD				KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		**2.124.080.000**	**2.133.510.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**1.860.430.000**	**1.869.860.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	255.000.000	252.110.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.204.110.000	1.207.000.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	401.320.000	410.750.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		**263.650.000**	**263.650.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	18.000.000	18.000.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	245.650.000	245.650.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		**165.038.000**	**139.977.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		**165.038.000**	**139.977.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60.404.000	87.114.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD				KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35.270.000	39.964.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	23.164.000	7.799.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46.200.000	5.100.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Assosiasi-assosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, akan tetapi untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Maros ***"tidak ada usulan".***

DAFTAR USULAN KECAMATAN YANG TERAKOMODIR DALAM RENJA PD TAHUN 2024

INSPEKTORAT DAERAH

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	USULAN	VOLUME	LOKASI	KET
-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Maros sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah diantaranya adalah mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2015-2020. Selain itu dalam arah kebijakan bidang aparatur Negara tahun 2016, salah satunya adalah menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek – praktek KKN , melalui penerapan prinsip- prinsip tata-pemerintahan yang baik *(good governance)* pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil- hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PANRB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan system pengawasan dan audit, serta system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih.

Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di lingkungan aparatur Negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit eksternal dan pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan system struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur.

Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan. Uraian yang telah disebutkan diatas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan.Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat

diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros tahun 2016-2021. Serta dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Maros.

Inspektorat Kabupaten Maros sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Maros. telah mengamanatkan tanggung jawab menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah

No	Nasional	Provinsi	Daerah
1.	Melaksanakan Perumusan Kebijakan kelembagaan dan tata laksana Pemerintah Daerah	Pelaporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah khususnya yang terindikasi KKN disampaikam kepada Menteri (Mendagri) untuk dilakukan Supervisi pengawasan.	Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi pelayanan publik
2.	Melaksanakan perumusan kebijakan evaluasi jabatan dan pengembangan kinerja jabatan	Penambahan fungsi Inspektorat Daerah dalam pencegahan korupsi.	Melaksanakan perumusan kebijakan dan monitoring evaluasi standarisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3.	Meningkatkan implementasi Budaya Pemerintahan	Penambahan satu unit kerja yang melakukan pemeriksaan investigatif.	
4.	Mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pengangkatan dan Pemberhentian Inspektur atas izin Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri.	

3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Inspektorat Kabupaten Maros

Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran Inspektorat yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2021-2026 sebagai berikut:

Sehingga tujuan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Maros yaitu "**Meningkatkan peran pengawasan internal pemerintah daerah"** dengan indikator tujuan yaitu Persentase pengawasan internal pemerintah daerah.

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Maros tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Pengelolaan Inspektorat
2. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Internal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran Perencanaan Pembangunan ITDA

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional dan berkinerja Tinggi	Meningkatnya kepuasan layanan Pengawasan dan konsultasi .	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	A
		Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SPIP	3
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	76%
			Nilai Kapabilitas APIP	3
			Jumlah Unit Kerja Yang Ditetapkan ZI WBK	4

3.3 Program dan Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Maros dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2024 menetapkan 3 program dengan jumlah kagiatan sebanyak 11 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pada Sub Kegiatan "Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN" dilakukan pengurangan pada belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS untuk dialihkan pada belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban KerjaPNS **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai.
2. Pada Sub Kegiatan "Penyediaan " dilakukan pengurangan pada belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Penyelenggaraan Diklat) untuk dialihkan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SPI) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam dalam Wilayah Kabupaten Maros **dikarenakan** tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
3. Pada Sub Kegiatan "Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor" dilakukan pengurangan pada belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya untuk dialihkan pada Belanja Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk snack, nasi dos dan prasmanan VIP **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan anggaran di kegiatan tersebut tidak ada.

4. Pada Sub Kegiatan "Penyediaan Jasa Surat Menyurat" dilakukan pengurangan pada Belanja Jasa Tenaga Caraka (Honorarium Caraka (1 Orang x 12 Bulan)) untuk dialihkan pada Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Saber Pungli (Kudapan (Snack) dan Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas **dikarenakan** petugas caraka sebelumnya terangkat sebagai PPPK dan hanya sampai pada bulan September 2024, sesuai dengan Proposal Tim Saber Pungli Polres Kabupaten Maros.
5. Pada Sub Kegiatan "Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh" dilakukan pengurangan pada Belanja Uang Makan ASN untuk dialihkan pada Belanja Modal Personal Computer (printer) dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kegiatan Saber Pungli **dikarenakan** jumlah pegawai yang menerima hanya pada bagian sekretariat dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
6. Pada Sub Kegiatan "Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor" dilakukan pengurangan pada Belanja Jasa Tenaga Supir untuk dialihkan pada Belanja Modal Personal Computer (Scan) **dikarenakan** sudah tidak ada tenaga sebagai sopir oprasional dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
7. Pada Sub Kegiatan "Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah" dilakukan pengurangan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk dialihkan pada Belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah **dikarenakan** sudah tidak ada pemeriksaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dan Anggarannya hanya sampai bulan sepember 2024 sedangkan kegiatan pengawasan berdasarkan PKPT sampai dengan Bulan Desember 2024.
8. Pada Sub Kegiatan "Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP" dilakukan pengurangan pada Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih dari 8 Jam dalam Wilayah Kabupaten Maros untuk dialihkan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Sulawesi Selatan), Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang disetarakan, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer (Jasa website), Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Penanganan Gratifikasi Dan Benturan Kepentingan (Makanan dan Minuman), Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Penanganan Gratifikasi Dan Benturan Kepentingan (Cetak Spanduk) **dikarenakan** adanya kegiatan evaluasi dan monitoring pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang langsung melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dalam persentasi Tindak Lanjut atas Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sul Sel, BPKP Perwakilan Prov. Sul Sel, Inspetorat Provinsi dan Inspektorat Daerah; perbaikan pada aplikasi grab teman yang digunakan untuk mengeluarkan keterangan "Bebas Temuan; jumlah anggaran kegiatan tersebut yang masih kurang dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.

9. Pada Sub Kegiatan "Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi" dilakukan pengurangan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Kegiatan SPI (Kertas F4 dan A4) untuk dialihkan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SPI) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam dalam Wilayah Kabupaten Maros **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan urgenitas kegiatan.
10. Pada Sub Kegiatan "Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah" dilakukan pengurangan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan P3DN untuk dialihkan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Manajemen Resiko (MR) **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan urgenitas kegiatan serta tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
11. Pada Sub Kegiatan "Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi" dilakukan pengurangan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan (SPI) (Nasi Dos) untuk dialihkan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (MCP) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam dalam Wilayah Kabupaten Maros **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan urgenitas kegiatan dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
12. Pada Sub Kegiatan "Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi" dilakukan pengurangan pada Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan dan Honorarium/Jasa Moderator P3DN untuk dialihkan pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan Manajemen Resiko (MR) **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
13. Pada Sub Kegiatan "Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi" dilakukan pengurangan pada Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Kegiatan SPI untuk dialihkan pada Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Penanganan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan jumlah anggaran kegiatan tersebut yang masih kurang yang dilakukan sebanyak 2 kali kegiatan.
14. Pada Sub Kegiatan "Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi" dilakukan pengurangan pada Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Dan Penanganan Gratifikasi Dan Benturan Kepentingan untuk dialihkan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Larwasda (Cetak Spanduk/Baliho) dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Kegiatan SPI (Cetak Spanduk) **dikarenakan** Anggarannya melebihi dari jumlah pemateri dan merupakan kegiatan mandatory tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.

15. Pada Sub Kegiatan "Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" dilakukan pengurangan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan ZI (Kertas F4 dan A4) untuk dialihkan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (MCP) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam dalam Wilayah Kabupaten Maros **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
16. Pada Sub Kegiatan "Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" dilakukan pengurangan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan ZI (Nasi Dos) untuk dialihkan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (MCP) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Lebih dari 8 Jam dalam Wilayah Kabupaten Maros **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
17. Pada Sub Kegiatan "Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" dilakukan pengurangan pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Kegiatan ZI (Snack) untuk dialihkan pada Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
18. Pada Sub Kegiatan "Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" dilakukan pengurangan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan (FGD) (Nasi Dos) dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan (FGD) Kudapan (Snack) untuk dialihkan pada Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
19. Pada Sub Kegiatan "Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" dilakukan pengurangan pada Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang disetarakan (ZI) untuk dialihkan pada Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
20. Pada Sub Kegiatan "Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" dilakukan pengurangan pada Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan (ZI) dan Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II/yang disetarakan (ZI) untuk dialihkan pada Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas

Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.

21. Pada Sub Kegiatan "Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" dilakukan pengurangan pada Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan (ZI) dan Honorarium/Jasa Moderator (ZI) untuk dialihkan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Dos) dan Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Kegiatan Saber Pungli **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan jumlah anggaran kegiatan tersebut yang masih kurang.
22. Pada Sub Kegiatan "Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi" dilakukan pengurangan pada Honorarium/Jasa Moderator (FGD) dan Moderator/MC (FGD) untuk dialihkan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Dos) dan Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Kegiatan Saber Pungli **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan jumlah anggaran kegiatan tersebut yang masih kurang yang hanya sampai pada bulan September 2024.
23. Pada Sub Kegiatan "Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas" dilakukan pengurangan pada Honorarium/Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Sekretaris dan Honorarium/Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Pengarah untuk dialihkan pada Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Dos) dan Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Kegiatan Saber Pungli **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan jumlah anggaran kegiatan tersebut yang masih kurang.
24. Pada Sub Kegiatan "Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas" dilakukan pengurangan pada Honorarium/Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Ketua untuk dialihkan pada Honorarium/Jasa Narasumber/Pembahas Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah yang disetarakan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan j tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.
25. Pada Sub Kegiatan "Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas" dilakukan pengurangan pada Honorarium/Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Penanggung Jawab dan Honorarium/Jasa Tim Pelaksana Kegiatan yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah Spesifikasi : Wakil ketua untuk dialihkan pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa Zona Integritas **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan tidak ada penganggaran pada DPA Pokok 2024.

26. Pada Sub Kegiatan "Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas" dilakukan pengurangan pada Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota untuk dialihkan pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi tangga) **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan kondisi tangga kantor yang tidak ideal sehingga berdampak keselamatan kerja bagi ASN Inspektorat dan Tamu yang berkunjung.
27. Pada Sub Kegiatan "Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas" dilakukan pengurangan pada Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Spesifikasi : Anggota untuk dialihkan pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Rehabilitasi tangga) **dikarenakan** Anggarannya tidak terpakai dan kondisi tangga kantor yang tidak ideal sehingga berdampak keselamatan kerja bagi ASN Inspektorat dan Tamu yang berkunjung.

No	Misi RPJMD	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	Inspektorat Daerah Kab. Maros	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat Daerah Kab. Maros	8.876.366.578,00
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Maros	19.353.000,00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Maros	3.265.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	3.044.500,00
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	2.244.500,00
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	2.600.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	2.999.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	2.600.000,00
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Maros	2.600.000,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Maros	8.120.487.025,00

No	Misi RPJMD	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab. Maros	7.987.497.025.,00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	132.990.000,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Maros	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah Kab. Maros	26.250.000,00
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Inspektorat Daerah Kab. Maros	5.925.000,00
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Inspektorat Daerah Kab. Maros	99.942.903,00
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Maros	401.718.750,00

No	Misi RPJMD	Sasaran PD	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Maros	1.275.000,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab. Maros	9.457.500,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Maros	86.565.000,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab. Maros	38.250.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab. Maros	40.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	226.171.250,00
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Maros	62.500.000,00
			Belanja Modal Personal Komputer	Inspektorat Daerah Kab. Maros	27.500.000,00
			Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab. Maros	8.000.000,00

			Belanja Peralatan Komputer		7.000.000,00
No	**Misi RPJMD**	**Sasaran PD**	**Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Pagu Indikatif**
1	2	3	4	5	6
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Maros	149.865.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab. Maros	5.250.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Maros	57.215.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab. Maros	87.4000.000,00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab. Maros	0,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab. Maros	35.000.000,00

Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut table Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2024 :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

SKPD : Inspektorat Kabupaten Maros

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD				KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
			11.149.853.578,00	**11.149.853.578,00**				
06.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**8.860.735.578,00**	**8.876.366.578,00**	**Itda Maros**	**Itda Maros**		
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**19.353.000,00**	**19.353.000,00**	**Itda Maros**	**Itda Maros**		**PAD**
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.265.000,00	3.265.000,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.044.500,00	3.044.500,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.244.500,00	2.244.500,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.600.000,00	2.600.000,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.999.000,00	2.999.000,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD				KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.600.000,00	2.600.000,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000,00	2.600.000,00	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**8.120.487.025,00**	**8.120.487.025,00**	**Itda Maros**	**Itda Maros**		**PAD**
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.903.497.025,00	7.987.497.025,00	Itda Maros	Itda Maros		DAU
	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN		84.000.000,00	0,00	Itda Maros	Itda Maros		DAU
6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.990.000,00	132.990.000,00	Itda Maros	Itda Maros		DAU
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**107.626.803**	**107.442.803**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.500.000	7.500.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100.126.803	100.126.803	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**411.718.750**	**401.718.750**	**Itda Maros**	**Itda Maros**		**PAD**
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.275.000	1.275.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.000.000	-	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9.457.500	9.457.500	Itda Maros	Itda Maros		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD				KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86.565.000	86.381.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	38.250.000	38.250.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	40.000.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.171.250	226.171.250	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		**15.000.000**	**62.500.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15.000.000	62.500.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**171.550.000**	**149.865.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	5.250.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	56.150.000	57.215.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	103.400.000	87.400.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**15.000.000**	15.000.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15.000.000	15.000.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		**2.124.080.000**	**2.133.510.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**1.860.430.000**	**1.869.860.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD				KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	255.000.000	252.110.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.204.110.000	1.207.000.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	401.320.000	410.750.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		**263.650.000**	**263.650.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	18.000.000	18.000.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	245.650.000	245.650.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
06.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		**165.038.000**	**139.977.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		**165.038.000**	**139.977.000**	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60.404.000	87.114.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	35.270.000	39.964.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	23.164.000	7.799.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A:LSKPD				KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	46.200.000	5.100.000	Itda Maros	Itda Maros		PAD

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2024 ini, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Maros serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2024 dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak terkait.

4.1 Catatan Penting Yang Perlu Dapat Diperhatikan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan tahun 2024 dibuat berdasarkan penjabaran RPJMD dan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Maros periode tahun 2021-2026. Berbeda dengan dokumen Rencana Kerja tahun sebelumnya, pada dokumen Renja ITDA ini telah mengaplikasikan perumusan indikator kinerja baik itu Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja berdasarkan Kepmendagri No. 19 Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Dalam mengaplikasikan Indikator Kinerja sesuai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, sehingga Rencana Kerja yang telah diuraikan diatas, melahirkan catatan penting yang perlu dapat perhatian, antara lain :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dalam manajemen pada umumnya dan juga manajemen Pengawasan;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkan Pengawasan;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan Pengawasan Internal Pemerinta Daerah;
e. Peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang Pengawasan.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros Tahiun 2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Rencana Kerja disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros ini disusun dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2021.

Program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang tersusun dalam rencana kerja Tahun 2024 diharapkan dapat dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros atau sumber dana lain yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Maros.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana kerja tindak lanjut dari program kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Maros tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (good government) dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel oleh karena itu komitmen pimpinan dan segenap staf Inspektorat Daerah Kabupaten Maros sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan teknis Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

PERUBAHAN
RENCANA
KERJA
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

KECAMATAN MAROS BARU

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami Panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia_Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maros Baru Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini suatu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Maros Baru Tahun 2024.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Maros Baru Tahun 2024 ini adalah dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Maros Baru, dan apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini maka kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan Rencana Kerja ini. Kami berharap semoga Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya bagi kita semua.

Maros,13 Juli 2024
Camat Maros Baru,

H. ABBAS MASKUR, SE, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19700304 200701 1 037

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi..... iii
Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan..... 31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 32
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 36
3.3. Program dan Kegiatan 38
BAB IV PENUTUP 47

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagi satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaran Pemrintahaan.Prenecaaan adalah suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan dengan memeperhatikan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Maros Baru Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Sehubungan dengan itu, Kecamatan Maros Baru, sebagai salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Maros membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maros Baru Tahun 2021-2026. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Kecamatan Maros Baru disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan;
2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
3) Penyusunan Rancangan;
4) Penyusunan Rancangan Akhir;
5) Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 dan tetap mempedomani Renstara Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Perangkat Daerah menjadi Pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA/DPA Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Maros Baru Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
    2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587),
    5. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangana Pendemi Corona Viru Disease 2019 (Covid – 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
    Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasidan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahn Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2).

28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3;
30. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 34);
31. Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2023 Tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 nomor 36.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Maros Baru Tahun 2024 adalah untuk merumuskan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Maros Baru untuk periode 1 tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya dokumen Perubahan Renja Kecamatan Maros Baru Tahun 2024 adalah :

1. Pelaksaan pelayanan perangkat daerah;
2. Pelaksnaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Penyusunan rencana anggaran perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rentsra Perangkat Daerah dengan Perubahan Renja K/L dan Perubahan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024,

Pada bab ini memuat kajian (riview) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD Semester I tahun berjalan.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan,

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telahan Terhadap Kebijakan Nasional yang menjelaskan menyangkut arah dan kebijakan riorpitas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Tujuan dan sasaran Perubahan Renja PD yang merupakan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab lV Penutup

Pada bab ini berisikan uraian kesimpulan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja perubahan Kecamatan Maros Baru Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Maros Baru.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Maros Baru merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Maros Baru. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Maros Baru ini menyajikan pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Maros Baru selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Maros Baru 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Maros Baru tahun 2023 dan Evaluasi renja Kecamatan Maros Baru tahun berjalan tahun 2024 mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kecamatan Maros Baru, antara lain :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai yang direncanakan

1. Kecamatan Maros Baru pada tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan urusan dan non urusan yang semuanya mencapai target dan terdapat pula kegiatan yang belum terlaksana karena belum berjalan sebagaimana waktu yang ditetapkan pada angkas Renja.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Pada kegiatan perencanaan dan penganggaran dapat merealisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Kecamatan Maros Baru pada tahun 2024 dapat merealisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada trwulan II (kedua) yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Diantaranya Kegiatan Musrembang Kecamatan, Kegiatan Kecamatan Sehat, Sosialisasi Non usaha dan perizinan. Rincian dapat dilihat pada Tabel 2.1.

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

1. Program dan kegiatan pada Kecamatan Maros Baru Tahun 2023 pada umumnya terealisasi sesuai dengan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan pada Kecamatan Maros Baru Tahun 2023 pada umumnya belum dapat dilihat dimana melibihi target karna masih berjalan kegiatannya.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adanya program/kegiatan yang tidak terealisasi;

1. Faktor penyebab adanya program/kegiatan yang tidak terealisasi 100% khususnya pada tahun 2023 adalah belanja sarana dan prasarana kelurahan dimana kegiatan tersebut tidak tercapai karena diakhir tahun menunggu Perbup sehingga kegiatan tersebut hanya terealisasi 50% , sementara program dan kegiatan lainnya terealisasi sesuai tujuan dan sasaran program melalui koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh pelaksana kegiatan dan seluruh stakeholder.
2. Faktor penyebab adanya program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 yang belum memenuhi terget diakibatkan karena Belum terealisasi anggaran tersebut karena masih masuk di Tahun berjalan, sementara program dan kegiatan lainnya terealisasi sesuai tujuan dan sasaran program melalui koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh pelaksana kegiatan dan seluruh stakeholder.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kec. Maros Baru;

Implikasi atau dampak yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah merupakan upaya pemerintah Kecamatan dalam Meningkatkan Peran dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Maros Baru, selain itu juga berdampak positif pada Peningkatan kapasitas ASN Kecamatan Maros Baru dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis Kec. Maros Baru

f. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab diatas;

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan

pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan/koordinasi

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TRIWULAN II TAHUN 2024
KECAMATAN MAROS BARU

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		**Nilai SAKIP**										**38**		**2,544,419,589**		**222**	**KEC MAROS BARU**
	Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota	**Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.**	**100**	**1,146,950,000**	**100**	**688,170,000**	**100**	**4,909,555,202**	**66.67**	**1,856,249,589**	**67**	**38**	**83**	**2,544,419,589**	**83**	**222**	**KEC MAROS BARU**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**30**	**16,500,000**	**18**	**9,900,000**	**26**	**3,300,000**	**9**	**2,152,000**	**35**	**65**	**27**	**12,052,000**	**90**	**73**	**KEC MAROS BARU**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	0	3	0	1	550000	1	550,000	100	100	4	0	80	0	KEC MAROS BARU

	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	2,750,000	3	1,650,000	1	550,000	1	534,000	100	97	4	2,184,000	80	79	KEC MAROS BARU
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	2,750,000	3	1,650,000	1	550,000	0	550,000	0	100	3	2,200,000	60	80	KEC MAROS BARU
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	2,750,000	3	1,650,000	1	550,000	1	518,000	100	94	4	2,168,000	80	79	KEC MAROS BARU
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	2,750,000	3	1,650,000	1	550,000	0	0	0	0	3	1,650,000	60	60	KEC MAROS BARU
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90	2,750,000	54	1,650,000	18	550,000	6	550,000	33	100	60	2,200,000	67	80	KEC MAROS BARU

	Evaluasi kinerja perangkat daerah	**Evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20**	**2,750,000**	**12**	**1,650,000**	**4**	**550,000**	**1**	**0**	**25**	**0**	**13**	**1,650,000**	**65**	**60**	**KEC MAROS BARU**
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	Administrasi keuaangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	125	23,050,428,510	75	13,830,257,106	25	4,610,085,702	12	1,774,592,544	48	38	87	15,604,849,650	70	68	KEC MAROS BARU
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3720	22,852,978,510	2232	13,711,787,106	744	4,570,595,702	318	1,756,642,544	43	38	2,550	15,468,429,650	69	68	KEC MAROS BARU
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	**Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD**	**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**55**	**197,450,000**	**33**	**118,470,000**	**11**	**39,490,000**	**5**	**17,950,000**	**45**	**45**	**38**	**136,420,000**	**69**	**69**	**KEC MAROS BARU**
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian	130	16,500,000	78	9,900,000	26	3,300,000	0		0	0	78	9,900,000	60	60	KEC MAROS BARU
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	**Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya**	**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	**130**	**16,500,000**	**78**	**9,900,000**	**26**	**3,300,000**	**0**		**0**	**0**	**39**	**9,900,000**	**30**	**60**	**KEC MAROS BARU**
	Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	30	2,384,522,500	18	1,430,713,500	6	91,404,500	6	26,785,045	100	29	24	1,457,498,545	80	61	KEC MAROS BARU
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	1,125,000	3	675,000	1	225,000	1	225,000	100	100	4	900,000	80	80	KEC MAROS BARU
	penyediaan peratalan rumah tangga	penyediaan peratalan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	80	9,447,500	48	5,668,500	16	1,889,500	10	1,017,000	63	54	58	6,685,500	73	71	KEC MAROS BARU

	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	40,500,000	9	24,300,000	3	8,100,000	2	4,137,000	67	51	11	28,437,000	73	70	KEC MAROS BARU
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	####	14,250,000	21000	8,550,000	###	2,850,000	2800	824,900	40	29	#####	9,374,900	68	66	KEC MAROS BARU
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	125,400,000	36	75,240,000	12	25,080,000	5	5,680,000	42	23	41	80,920,000	68	65	KEC MAROS BARU
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	**Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**60**	**266,300,000**	**36**	**159,780,000**	**12**	**53,260,000**	**5**	**14,901,145**	**42**	**28**	**41**	**174,681,145**	**68**	**66**	**KEC MAROS BARU**
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	963,750,000	6	578,250,000	2	192,750,000	2	51,720,000	100	27	8	629,970,000	80	65	KEC MAROS BARU
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	50,000,000	36	30,000,000	12	10,000,000	5	4,150,000	42	42	41	34,150,000	68	68	KEC MAROS BARU
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	**penyediaan jasa pelayanan umum kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	**60**	**913,750,000**	**36**	**548,250,000**	**12**	**182,750,000**	**5**	**47,570,000**	**42**	**26**	**21**	**595,820,000**	**34**	**65**	**KEC MAROS BARU**
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik	2	4,578,575,000	2	1,555,875,000	2	8,715,000	2	1,000,000	100	11	4	1,556,875,000	200	34	KEC MAROS BARU
	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	38,750,000	30	23,250,000	10	7,750,000	3	1,000,000							KEC MAROS BARU

	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**														**KEC MAROS BARU**
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di kecamatan	**Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di kecamatan**	**IKM PATEN**	**5**	**4,825,000**	**3**	**2,895,000**	**1**	**965,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**2,895,000**	**60**	**60**	**KEC MAROS BARU**
	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100**	**4,535,000,000**	**62.5**	**1,529,730,000**	**100**	**1,015,000,000**	**90**	**370,240,150**	**90**	**36**	**76**	**1,899,970,150**	**76**	**42**	**KEC MAROS BARU**
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan	1	820,250,000	1	13,000,000	4	272,050,000	3	93,240,150	75	34	2	106,240,150	200	13	KEC MAROS BARU
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	10,250,000	29	13,000,000	12	2,050,000	0	0	0	0	29	13,000,000	48	127	KEC MAROS BARU
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	270,000,000			12	90,000,000	5	32,747,350	42	36	5	32,747,350	14	12	KEC MAROS BARU

	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	270,000,000			12	90,000,000	5	37,194,550	42	41	5	37,194,550	14	14	KEC MAROS BARU
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**36**	**270,000,000**			**12**	**90,000,000**	**5**	**23,298,250**	**42**	**26**	**5**	**23,298,250**	**14**	**9**	**KEC MAROS BARU**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan	2	3,694,250,000	2	1,472,200,000	2	738,850,000	0	277,000,000	0	37	1	1,749,200,000	50	47	KEC MAROS BARU
	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5	10,250,000	1	0	1	2,050,000	0	0	0	0	1	0	20	0	KEC MAROS BARU
	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan	**Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**60**	**3,684,000,000**	**21**	**1,472,200,000**	**12**	**736,800,000**	**0**	**277,000,000**	**0**	**38**	**21**	**1,749,200,000**	**35**	**47**	**KEC MAROS BARU**
	Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat	Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat	Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat	2	20,500,000	2	44,530,000	2	4,100,000	0	0	0	0	1	44,530,000	50	217	KEC MAROS BARU

	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha	20	10,250,000	19	11,690,000	4	2,050,000	0	0	0	0	19	11,690,000	95	114	KEC MAROS BARU
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**															**KEC MAROS BARU**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan**	**IKM Desa/Kelurahan**	**60**	**10,250,000**	**7**	**21,150,000**	**12**	**2,050,000**	**0**	**0**	**#REF!**	**0**	**7**	**21,150,000**	**12**	**206**	**KEC MAROS BARU**
	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	**100**	**35,290,000**	**30.04**	**30,810,000**	**100**	**1,120,000**	**0**			**0**	**15**	**30,810,000**	**15**	**87**	**KEC MAROS BARU**
	Fasilitasi, rekomendasi dan korodinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, rekomendasi dan korodinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	4	35,290,000	4	30,810,000	4	1,120,000	0			0	2	30,810,000	50	87	KEC MAROS BARU
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan desa		**Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**															**KEC MAROS BARU**

	Meningkatnya peran aktif perempuan di kecamatan dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi	**Meningkatnya peran aktif perempuan di kecamatan dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi**	**Persentase perempuan yang terlbat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi di kecamatan**	**20**	**35,290,000**	**10**	**30,810,000**	**4**	**1,120,000**	**0**		**0**	**0**	**10**	**30,810,000**	**50**	**87**	**KEC MAROS BARU**
	Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan	**Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100**	**2,067,142,500**	**42.26**	**333,369,300**	**100**	**653,428,500**	**50**	**16,265,000**	**50**	**2**	**46**	**349,634,300**	**46**	**17**	**KEC MAROS BARU**
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	4,128	267,142,500	928	134,206,000	800	53,428,500	400	16,265,000	50	30	1,328	150,471,000	32	56	KEC MAROS BARU
	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10	104,017,500	6	85,296,000	2	20,803,500	1	16,265,000	50	78	7	101,561,000	70	98	KEC MAROS BARU
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	**Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**10**	**163,125,000**	**2**	**48,910,000**	**2**	**32,625,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**48,910,000**	**20**	**30**	**KEC MAROS BARU**

	Pemberdayaan kelurahan	Pemberdayaan kelurahan	Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	300	1,800,000,000	180	199,163,300	60	600,000,000	0	0	0	0	180	199,163,300	60	11	KEC MAROS BARU
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	600,000,000	3	84,232,950	1	200,000,000	0		0	0	3	84,232,950	100	14	KEC MAROS BARU
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	600,000,000		57,465,175	1	200,000,000	0		0	0	0	57,465,175	0	10	KEC MAROS BARU
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**															**KEC MAROS BARU**
	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	**Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban di kecamatan**	**IKM Trantibun Linmas**	**3**	**600,000,000**		**57,465,175**	**1**	**200,000,000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**57,465,175**	**0**	**10**	**KEC MAROS BARU**
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	**Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan**	**100**	**11,250,000**	**36.25**	**9,170,000**	**100**	**2,250,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**9,170,000**	**18**	**82**	**KEC MAROS BARU**
	Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	1600	11,250,000	100	9,170,000	400	2,250,000	0	0	0	0	100	9,170,000	6	82	KEC MAROS BARU

	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan		**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**															**KEC MAROS BARU**
	Meningkatnya Akses Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan secara aktif	**Meningkatnya Akses Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan secara aktif**	**IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan**	**5**	**11,250,000**	**1.5**	**9,170,000**	**1**	**2,250,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**9,170,000**	**30**	**82**	**KEC MAROS BARU**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**100**	**487,875,000**	**36.25**	**176,425,000**	**100**	**97,575,000**	**50.00**	**37,600,000**	**50**	**39**	**43**	**214,025,000**	**43**	**44**	**KEC MAROS BARU**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah	Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	2	487,875,000	2	176,425,000	2	97,575,000	1	37,600,000	50	39	2	214,025,000	75	44	KEC MAROS BARU

	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4000	225,375,000	300	57,300,000	800	45,075,000	0	0	0	0	300	57,300,000	8	25	KEC MAROS BARU

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Maros Baru

Kecamatan Maros Baru merupakan perangkat daerah Kabupaten Maros sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dengantugas utama yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, coordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa disamping itu juga camat bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS
TAHUN 2021 – 2026

RENSTRA			TARGET						SATUAN
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	
Meningkat kan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB	A	A	A	Nilai SAKIP
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM PATEN	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	3,26	IKM
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketenteraman Dan ketertiban di Kecamatan	IKM Trantibum Linmas	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	3,26	IKM
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan	IKM DESA/Kelurahan	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	3,26	IKM
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	Meningkatnya Akses masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	3,26	IKM

Meningkat kan Peran Serta Perempuan Di Kecamatan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial Dan Ekonomi	Persentase Perempuan Yang Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan	25.61	28.19	31.03	34.15	37,59	41,37	PERSEN
Meningkatkan Kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar di Kecamatan Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Kecamatan Sesuai SPM	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM	100	100	100	100	100	100	PERSEN

Jumlah inidkator yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Marusu ada 6 indikator yaitu : IKM Paten, IKM Trantibum Linmas, IKM Desa dan Kelurahan, IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan, Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan bidang sosial dan ekonomi di Kecamatan, Persentase Masyarakat Kecamatan yang mendapatkan pelayanan dasar sesuai SPM, ke 6 indikator tersebut semuanya mencapai target.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Maros Baru

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Maros Baru dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan.

TABEL 2.3
ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MAROS BARU

NO	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK
1	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	IKM Layanan
2	Keterlibatan Perempuan dalam bidang pembangunan social dan Ekonomi	Kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi	Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan Bidang social dan Ekonomi di Kecamatan

3	Jumlah layanan terkait kententraman dan ketertiban umum belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan standar yang berlaku	Kurang anggaran terkait pelaksanaan pelayanan	IKM Trantibum
4	Tercapainya pelayanan kecamatan sesuai dengan SPM	Keterbatasan Sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas, Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki , sumber daya aparatur yang menguasai teknologi imformasi juga terbatas	IKM Layanan

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Maros Baru :

1) Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya dukungan SKPD Teknis terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2) Terbatasnya tingkat kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
3) Anggaran Kecamatan yang disediakan sangat terbatas;
4) Penyediaan Sarana dan Prasarana ASN masih terbatas.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024

Telaahan terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Kabupaten Maros dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Maros Baru dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Maros Baru,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal Perubahan RKPD.

Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target

sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Maros Baru**	**95**	**Persen**	**4,915,175,202**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**Persen**	**4,915,175,202**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Maros Baru**	***19***	***Dokumen***	***3.300.000***	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	***19***	***Dokumen***	***3.300.000***
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Maros Baru	2	Dokumen	550.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	2	Dokumen	550.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	Kecamatan Maros Baru	1	Dokumen	550.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	1	Dokumen	550.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	Kecamatan Maros Baru	1	Dokumen	550.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1	Dokumen	550.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	Kecamatan Maros Baru	1	Dokumen	550.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1	Dokumen	550.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	Kecamatan Maros Baru	**1**	Dokumen	550.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	**1**	Dokumen	550.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP - PD	Kecamatan Maros Baru	1	Dokumen	550.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen SAKIP - PD	1	Dokumen	550.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	Kecamatan Maros Baru	12	Dokumen	550.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	12	Dokumen	550.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**Kecamatan Maros Baru**	***71***	***Dokumen***	***4.618.555.702***	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	***71***	***Dokumen***	***4.618.555.702***

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maros Baru	14	Dokumen	4.570.595.702	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14	Dokumen	4.570.595.702
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan PD	Kecamatan Maros Baru	12	Dokumen	47.960.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan PD	12	Dokumen	47.960.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Kecamatan Maros Baru**	***3.00***	***Orang***	***3.300.000***	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	***67***	***Orang***	***3.300.000***
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PD Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Maros Baru	25	stel	3.300.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PD Beserta Atribut Kelengkapannya	25	stel	3.300.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**Kecamatan Maros Baru**	***11***	***Jenis***	***88.554.500***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	***11***	***Jenis***	***88.554.500***
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Maros Baru	10	jenis	225.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	jenis	225.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Maros Baru	25	jenis	1.889.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	25	jenis	1.889.500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Maros Baru	2	jenis	2.850.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	2	jenis	2.850.000
fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi	Kecamatan Maros Baru	2750	Orang	25.080.000	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi	2750	Orang	25.080.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	Kecamatan Maros Baru	255	Kali	53.260.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	255	Kali	53.260.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Maros Baru	5	Jenis	8.100.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	5	Jenis	8.100.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Maros Baru**	***4***	***Jenis***	***192.750.000***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***4***	***Jenis***	***192.750.000***
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terdistribusi	Kecamatan Maros Baru	1000	surat	10.000.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terdistribusi	1000	surat	10.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Layanan Umum Kantor	Kecamatan Maros Baru	3	jenis	182.750.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Layanan Umum Kantor	3	jenis	182.750.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**Kecamatan Maros Baru**	***11***	***Jenis***	***8.715.000***	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	***11***	***Jenis***	***8.715.000***
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Maros Baru	10	unit	7.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	10	unit	7.750.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Maros Baru	1	unit	965.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	1	unit	965.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan	Kecamatan Maros Baru	95	Persen	1.730.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan	100	Persen	1.730.000.000
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	Kecamatan Maros Baru	**2**	**Kegiatan**	**4.100.000**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**2**	**Kegiatan**	**4.100.000**
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis SPM Yang Dilaksanakan Di Kecamatan	Kecamatan Maros Baru	5	Jenis	2.050.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis SPM Yang Dilaksanakan Di Kecamatan	5	Jenis	2.050.000
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Layanan Masyarakat Yang Terlaksana di Kecamatan	Kecamatan Maros Baru	4	layanan	2.050.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Layanan Masyarakat Yang Terlaksana di Kecamatan	4	layanan	2.050.000
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kecamatan Maros Baru	**1**	**Kegiatan**	**250.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1**	**Kegiatan**	**250.000.000**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah masyarakat dalam kegiatan peningkatan efektifitas keg pemerintahan di tingkat kecamatan	Kecamatan Maros Baru	200	orang	2.050.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah masyarakat dalam kegiatan peningkatan efektifitas keg pemerintahan di tingkat kecamatan	200	orang	2.050.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**Kecamatan Maros Baru**	**3**	**layanan**	**4.100.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**3**	**layanan**	**4.100.000**

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah layanan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Maros Baru	4	layanan	2.050.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah layanan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4	layanan	2.050.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah kegiatan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain Yang Dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku	Kecamatan Maros Baru	1	kegiatan	2.050.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah kegiatan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain Yang Dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku	1	kegiatan	2.050.000
ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	Kecamatan Maros Baru	**95**	**Persen**	**97.575.000**	**ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	100	**Persen**	**97.575.000**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**Kecamatan Maros Baru**	**4**	**Kegiatan**	**97.575.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**4**	**Kegiatan**	**97.575.000**
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Maros Baru	2	kegiatan	52.500.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2	kegiatan	52.500.000
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kecamatan Maros Baru	2	kegiatan	45.075.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2	kegiatan	45.075.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	Kecamatan Maros Baru	**95**	**Persen**	**53.428.500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100**	**Persen**	**53.428.500**

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (gender)	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan**	**Kecamatan Maros Baru**	**2**	**kegiatan**	**53.428.500**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (gender)**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan**	**2**	**kegiatan**	**53.428.500**
Sinkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Wilayah Kerja Kecamatan Yang Terintegrasi	Kecamatan Maros Baru	2	kegiatan	20.803.500	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Wilayah Kerja Kecamatan Yang Terintegrasi	2	kegiatan	20.803.500
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maros Baru	2	kegiatan	32.625.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	2	kegiatan	32.625.000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKM Pelayan desa/kelurahan)	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**Kecamatan Maros Baru**	**4**	**kegiatan**	**870.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKM Pelayan desa/kelurahan)**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**4**	**kegiatan**	**870.000.000**
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	Kecamatan Maros Baru	3	kelurahan	270.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	3	kelurahan	270.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	Kecamatan Maros Baru	5	paket	600.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	21	paket	600.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggar.an perda di wilayah kecamatan**	Kecamatan Maros Baru	**95**	**Persen**	**2.250.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	**100**	**Persen**	**2.250.000**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	Kecamatan Maros Baru	**1**	**kegiatan**	**2.250.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**1**	**kegiatan**	**2.250.000**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti keg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maros Baru	200	orang	2.250.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti keg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	200	orang	2.250.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	Kecamatan Maros Baru	**95**	**Persen**	**1.120.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	**100**	**Persen**	**1.120.000**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	Kecamatan Maros Baru	**4**	**Desa**	**1.120.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**4**	**Desa**	**1.120.000**
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Memiliki Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan Aturan yang berlaku	Kecamatan Maros Baru	4	desa	1.120.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Memiliki Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan Aturan yang berlaku	4	desa	1.120.000

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Usulan program dan kegiatan Kecamatan Maros Baru pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas SDM Aparatur lingkup Kecamatan Maros Baru;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan baik di desa maupun kelurahan;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah;
5. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Telaah usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Maros Baru maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN MAROS

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Posyandu	Mangallekana, Kelurahan Baji Pamai, Kab. Maros	Jumlah Pembangunan Posyandu	1 paket	KELURAHAN BAJI PAMAI
2	Peningkatan Jalan Lingkungan	Kelurahan Baji Pamai	Jumlah peningkatan Jalan	1 paket	KELURAHAN BAJI PAMAI
3	Pembangunan Pagar TPU lingkungan	Lingkungan Masembo, Kab. Maros	Jumlah Pagar TPU	1 paket	KELURAHAN BAJU BODOA
4	Pemasangan Paving Blok	Lingkungan Betang, ,Kab. Maros	Jumlah Layanan Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan)	1 paket	KELURAHAN BAJU BODOA
5	Pembangunan Drainase	Lingkungan RT 01 RW 02	Jumlah pembangunan Drainase	1 paket	KELURAHAN PALLANTIKANG

TABEL 2.6
RENCANA AKHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024
KABUPATEN MAROS

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN				ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN				BERTAMBAH / (BERKURANG)
			VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7 = 4 x 6*	*8*	*9*	*10*	*11 = 9 x 10*	*12 = 11-7*
	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**Rp 160,490,000.00**				**Rp 170,490,000.00**	**Rp 10,000,000.00**
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**Rp 121,550,000.00**				**Rp 88,860,000.00**	**Rp (32,690,000.00)**
	7.01.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**				**Rp 121,550,000.00**				**Rp 88,860,000.00**	**Rp (32,690,000.00)**
	5.1	**BELANJA OPERASI**				**Rp 121,550,000.00**				**Rp 88,860,000.00**	**Rp (32,690,000.00)**
	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**Rp 121,550,000.00**				**Rp 88,860,000.00**	**Rp (32,690,000.00)**
	5.1.02.01	**Belanja Barang**				**Rp 121,550,000.00**				**Rp 88,860,000.00**	**Rp (32,690,000.00)**
	5.1.02.01.01	**Belanja Barang pakai Habis**				**Rp 121,550,000.00**				**Rp 88,860,000.00**	**Rp (32,690,000.00)**
	5.1.02.01.01.0054	**Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh**				**Rp 121,550,000.00**				**Rp 88,860,000.00**	**Rp (32,690,000.00)**
		Uang Makan ASN	12155	Orang/Hari	Rp 10,000.00	Rp 121,550,000.00	8886	Orang/Hari	Rp 10,000.00	Rp 88,860,000.00	Rp (32,690,000.00)
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**Rp 38,940,000.00**				**Rp 81,630,000.00**	**Rp 42,690,000.00**
	7.01.01.2.06.0002	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**				**Rp -**				**Rp 10,000,000.00**	**Rp 10,000,000.00**
	5.2	**BELANJA MODAL**				**Rp -**				**Rp 10,000,000.00**	**Rp 10,000,000.00**
	5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**				**Rp -**				**Rp 10,000,000.00**	**Rp 10,000,000.00**
	5.2.02.10	**Belanja Modal Komputer**				**Rp -**				**Rp 10,000,000.00**	**Rp 10,000,000.00**
	5.2.02.10.01	**Belanja Modal Komputer Unit**				**Rp -**				**Rp 10,000,000.00**	**Rp 10,000,000.00**

	5.2.02.10.01.0002	**Belanja Modal Personal Computer**				**Rp -**				**Rp 10,000,000.00**	**Rp 10,000,000.00**
		Belanja laptop				**Rp -**				**Rp 10,000,000.00**	**Rp 10,000,000.00**
		Laptop	0	unit	##########	Rp -	1	unit	##########	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00
	7.01.01.2.06.08	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**				**Rp 25,080,000.00**				**Rp 60,080,000.00**	**Rp 35,000,000.00**
	5.1	**BELANJA OPERASI**				**Rp 25,080,000.00**				**Rp 60,080,000.00**	**Rp 35,000,000.00**
	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**Rp 25,080,000.00**				**Rp 60,080,000.00**	**Rp 35,000,000.00**
	5.1.02.01	**Belanja Barang**				**Rp 25,080,000.00**				**Rp 60,080,000.00**	**Rp 35,000,000.00**
	5.1.02.01.01	**Belanja Barang pakai Habis**				**Rp 25,080,000.00**				**Rp 60,080,000.00**	**Rp 35,000,000.00**
	5.1.02.01.01.0053	**Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu**				**Rp 25,080,000.00**				**Rp 60,080,000.00**	**Rp 35,000,000.00**
		Kudapan (Snack)	627	Dos	Rp 15,000.00	Rp 9,405,000.00	1327	Dos	Rp 15,000.00	Rp 19,905,000.00	Rp 10,500,000.00
		Nasi Dos	627	Dos	Rp 25,000.00	Rp 15,675,000.00	1327	Dos	Rp 25,000.00	Rp 33,175,000.00	Rp 17,500,000.00
		Prasmanan	0	orang/ kali	Rp 35,000.00	Rp -	200	orang/ kali	Rp 35,000.00	Rp 7,000,000.00	Rp 7,000,000.00
	7.01.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**				**Rp 13,860,000.00**				**Rp 11,550,000.00**	**Rp (2,310,000.00)**
	5.1	**BELANJA OPERASI**				**Rp 13,860,000.00**				**Rp 11,550,000.00**	**Rp (2,310,000.00)**
	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**Rp 13,860,000.00**				**Rp 11,550,000.00**	**Rp (2,310,000.00)**
	5.1.02.04.	**Belanja Perjalanan Dinas**				**Rp 13,860,000.00**				**Rp 11,550,000.00**	**Rp (2,310,000.00)**
	5.1.02.04.01.	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**				**Rp 13,860,000.00**				**Rp 11,550,000.00**	**Rp (2,310,000.00)**
	5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**				**Rp 13,860,000.00**				**Rp 11,550,000.00**	**Rp (2,310,000.00)**
		Perjalanan dinas luar daerah				**Rp 13,860,000.00**				**Rp 11,550,000.00**	**Rp (2,310,000.00)**
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa				**Rp 13,860,000.00**				**Rp 11,550,000.00**	**Rp (2,310,000.00)**
		Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Spesifikasi : Kurang dari 8 Jam dalam Wilayah Kabupaten Maros	198	orang/kali	Rp 70,000.00	Rp 13,860,000.00	165	orang/kali	Rp 70,000.00	Rp 11,550,000.00	Rp (2,310,000.00)

	7:01:05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**Rp 10,000,000.00**				**Rp -**	**Rp (10,000,000.00)**
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**Rp 10,000,000.00**				**Rp -**	**Rp (10,000,000.00)**
	7.01.05.2.01.04	**Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**				**Rp 10,000,000.00**				**Rp -**	**Rp (10,000,000.00)**
	5.1	**BELANJA OPERASI**				**Rp 10,000,000.00**				**Rp -**	**Rp (10,000,000.00)**
	5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**				**Rp 10,000,000.00**				**Rp -**	**Rp (10,000,000.00)**
	5.1.02.01	**Belanja Barang**				**Rp 10,000,000.00**				**Rp -**	**Rp (10,000,000.00)**
	5.1.02.02.01	**Belanja Jasa Kantor**				**Rp 10,000,000.00**				**Rp -**	**Rp (10,000,000.00)**
	5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**				**Rp 10,000,000.00**				**Rp -**	**Rp (10,000,000.00)**
		Belanja Mobil Hias Kegiatan Safari Ramadhan				Rp 10,000,000.00				Rp -	Rp (10,000,000.00)
		Belanja Mobil hias	1	Kegiatan	Rp.10.000.000	Rp 10,000,000.00	0	Kegiatan	Rp.10.000.000	Rp -	Rp (10,000,000.00)
JUMLAH TOTAL						**Rp 170,490,000.00**				**Rp 170,490,000.00**	**Rp -**

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Maros Baru adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Maros Baru

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Maros Baru mempunyai *tujuan*: Meningkatkan Peran Kecamatan Maros Baru dalam Kesejahteraan Masyarakat dengan *sasaran* Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Maros Baru secara optimal. Tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MAROS BARU TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan

Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM PATEN
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	IKM Trantib Linmas
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerinthan Desa /Kelurahan	IKM Desa/Kelurahan
Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	Meningkatnya akses Masyarakat dalam kegiatan Keagamaam secara aktif	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan
Meningkatkan Peran Serta Perempuan di Kecamatan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Atif Perempuan Di Kecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial dan Ekonomi	Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam kegiatan pembangunanBidang social dan ekonomi
Meningkatkan Kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan dasar Kecamatan	Meningkatnya Cakupan Pelayan Dasar Masyarakat Kecamatan sesuai SPM	Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Maros Baru dapat dilihat pada tabel berikut :

I. Pokok Permasalahan

- Terdapat beberapa sub kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian dikarenakan Anggaran kegiatan yang tidak mencukupi dan terdapat Anggaran yang tidak terlaksana . .Sehubungan dengan adanya Perubahan Anggaran pada kantor Maros Baru tersebut, maka dengan ini kami mengajukan usulan perubahan Anggaran agar memenuhi kebutuhan Program kegiatan dan Sub kegiatan pada kantor Kecamatan Maros Baru (daftar terlampir)

- Sehubungan dengan adanya Perubahan Anggaran pada kantor Maros Baru, maka dengan ini kami mengajukan usulan perubahan Anggaran agar memenuhi kebutuhan Program kegiatan dan Sub kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopincam) pada kantor Kecamatan Maros Baru (daftar terlampir) kami yang mana kegiatan tersebut ada pada daftar terlampir.

II. Analisis dan Alasan Perubahan

I. Pada sub kegiatan Penyediaan pelayanan umum dilakukan pengurangan pada Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh dialihkan pada Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu pada belanja Makan minum jamuan tamu karena anggaran pada sub kegiatan tersebut telah habis,

II. Pada Sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional pada Belanja Mobil Hias dialihkan ke Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Belanja Personal computer karena Belanja Mobil Hias tidak dilaksanakan.

III. Pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada Belanja perjalanan Dinaas Biasa dialkukan pengurangan dan dialihkan ke Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu pada belanja Makan minum jamuan tamu.

TABEL 3.2
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	550,000	550,000	550,000	550,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	550,000	550,000	550,000	550,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	550,000	550,000	550,000	550,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	550,000	550,000	550,000	550,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	550,000	550,000	550,000	550,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	550,000	550,000	550,000	550,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	550,000	550,000	550,000	550,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4,570,595,702	4,570,595,702	4,570,595,702	4,570,595,702	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		DAU

7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47,960,000	47,960,000	47,960,000	47,960,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		DAU
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	225,000	225,000	225,000	225,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	-	10,000,000	-	10,000,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,889,500	1,889,500	1,889,500	1,889,500	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8,100,000	8,100,000	8,100,000	8,100,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,080,000	25,080,000	25,080,000	25,080,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53,260,000	53,260,000	53,260,000	53,260,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	182,750,000	182,750,000	182,750,000	182,750,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7,750,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	965,000	965,000	965,000	965,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan/ kec. Sehat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di WilayahKecamatan	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	20,803,500	20,803,500	20,803,500	20,803,500	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	32,625,000	32,625,000	32,625,000	32,625,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		

7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45,075,000	45,075,000	45,075,000	45,075,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Pengajian Rutin + Safari Ramadan/STQ)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona	52,500,000	42,500,000	52,500,000	42,500,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.06.2.01	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		PAD
	KELURAHAN BAJU BODOA									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Kec. Maros Baru	Kec. Maros Baru		
7.01.02	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DITINGKAT KECAMATAN									

7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kel. Baju Bodoa	Kel. Baju Bodoa		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN									
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kel. Baju Bodoa	Kel. Baju Bodoa		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	KELURAHAN BAJI PAMAI									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									
7.01.02	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DITINGKAT KECAMATAN									
7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kel. Baji Pamai	Kel. Baji Pamai		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN									
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kel. Baji Pamai	Kel. Baji Pamai		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	KELURAHAN PALLANTIKANG									
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									

7.01.02	KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DITINGKAT KECAMATAN									
7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kel. Baji Pamai	Kel. Baji Pamai		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
7.01.03.2.02	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN									
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kel. Baji Pamai	Kel. Baji Pamai		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan

BAB IV. PENUTUP

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Maros Baru. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Maros Baru ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Maros secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024 maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hokum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap ridha dan petunjuk Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing.**

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN TURIKALE

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Turikale dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Turikale Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai penjabaran Perencanaan Pembangunan Kecamatan Turikale periode tahun anggaran 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Turikale Tahun 2024 memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan dan berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Turikale dalam rangka mewujudkan pemenuhan visi dan misinya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Turikale Tahun 2024 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas – tugas pembangunan.

Maros, 31 Juli 2024

CAMAT

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

NASRUDDIN, S.Hut

Pangkat : Pembina

Nip : 19720610 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang ……..

I.2. Landasan Hukum ……

I.3. Maksud Dan Tujuan ……...

I.4. Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Tahun 2024

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Turikale tahun lalu dan Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Turikale …….

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Turikale ……

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maros ……

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …….

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……..

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Turikale ……..

3.3. Program Dan Kegiatan ……....

II Analisis dan Alasan Perubahan ……...

III Kesimpulan ……

BAB IV PENUTUP

Saran dan Kesimpulan …….

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah mengarahkan Pemerintah daerah untuk Menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaran Pemerintahaan.Perencanaan adalah Suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan dengan memperhatikan rencana kerja Kecamatan Turikale Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Sehubungan dengan itu, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Maros membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Turikale Tahun 2022-2026. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Kecamatan Turikale disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan.
2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3) Penyusunan Rancangan.
4) Penyusunan Rancangan Akhir
5) Penetapan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 dan tetap mempedomani Renstra Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah Menjadi Pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Turikale Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Adapun landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Turikale Kabupaten Maros adalah :
    1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangana Pendemi Corona Viru Disease 2019 (Covid – 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahn Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu

Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2).

28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3;
30. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 34);
31. Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2023 Tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 nomor 36.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Turikale Tahun 2024 adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Turikale untuk periode 1 tahun sebagai Implementasi pelaksanaan rencana pembagunan jangka menengah Daerah dan Renstra perangkat daerah

Tujuan disusunnya Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Turikale Tahun 2024 adalah:

1. Pelaksaan pelayanan perangkat daerah ;
2. Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
3. Penyusunan rencana anggaran perangkat daerah

I.4. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu, Latar

Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rentsra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022,

Pada bab ini memuat kajian (riview) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat daerah sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan,

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telahan Terhadap Kebijakan Nasional yang menjelaskan menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD yang m erupakan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup berupa Saran dan Kesimpulan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Turikale tahun lalu dan Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Turikale

Rencana Kerja Kecamatan Turikale merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Turikale. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Turikale ini menyajikan pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Turikale selama tahun 2022 dan tahun 2023

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Turikale 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 s/d TAHUN 2022
KECAMATAN TURIKALE

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Nilai SAKIP										**22,46148324**		**26.050.344.694**		**521.006.893.889**	
Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.**	**100**	**43.417.241.120**	**100**	**26.050.344.672**	**100**	**8.675.948.224**	**42,86**	**1.948.746.656**	**42,85714286**	**22,46148324**	**143**	**26.050.344.694**	**2.857**	**521.006.893.889**	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**55**	**42.350.000**	**33**	**25.410.000**	**11**	**8.470.000**	**3**	**3.900.000**	**27,27272727**	**46,04486423**	**60**	**25.410.046**	**1.205**	**508.200.921**	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	6.550.000	6	3.930.000	2	1.310.000	0	1.310.000	0	100	6	3.930.100	120	78.602.000	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	6.400.000	3	3.840.000	1	1.280.000	0	1.280.000	0	100	3	3.840.100	60	76.802.000	
Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	5.150.000	3	3.090.000	1	1.030.000	0	0	0	0	3	3.090.000	60	61.800.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	6.550.000	3	3.930.000	1	1.310.000	1	1.310.000	100	100	103	3.930.100	2.060	78.602.000	
Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	6.400.000	3	3.840.000	1	1.280.000	0	0	0	0	3	3.840.000	60	76.800.000	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5.150.000	3	3.090.000	1	1.030.000	1	0	100	0	103	3.090.000	2.060	61.800.000	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	6.150.000	12	3.690.000	4	1.230.000	1	0	25	0	37	3.690.000	740	73.800.000	
Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**130**	**41.323.291.120**	**78**	**24.793.974.672**	**26**	**8.249.658.224**	**7**	**1.887.543.656**	**26,92307692**	**22,88026491**	**105**	**24.793.974.695**	**2.098**	**495.879.493.898**	
Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.140	41.008.491.120	4284	24.605.094.672	1428	8.201.698.224	408	1.883.183.656	28,57142857	22,96089913	4.313	24.605.094.695	86.251	492.101.893.899	
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	239.800.000	36	143.880.000	12	47.960.000	3	4.360.000	25	9,090909091	61	143.880.009	1.220	2.877.600.182	
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian**	**510**	**37.500.000**	**306**	**22.500.000**	**102**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306**	**22.500.000**	**6.120**	**450.000.000**	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	37.500.000	3	22.500.000	1	7.500.000	0	0	0	0	3	22.500.000	60	450.000.000	
Administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**507.400.000**	**6**	**304.440.000**	**6**	**101.480.000**	**2**	**15.663.000**	**33,33333333**	**15,43456839**	**39**	**304.440.015**	**787**	**6.088.800.309**	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	12.685.000	3	7.611.000	1	2.537.000	0	0	0	0	3	7.611.000	60	152.220.000	
penyediaan peratalan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	36.780.000	3	22.068.000	1	7.356.000	0	1.584.000	0	21,53344209	3	22.068.022	60	441.360.431	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	117.120.000	3	70.272.000	1	23.424.000	0	5.541.000	0	23,65522541	3	70.272.024	60	1.405.440.473	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	27.615.000	3	16.569.000	1	5.523.000	0	1.383.000	0	25,04073873	3	16.569.025	60	331.380.501	
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	115.500.000	36	69.300.000	12	23.100.000	3	5.775.000	25	25	61	69.300.025	1.220	1.386.000.500	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	197.700.000	36	118.620.000	12	39.540.000	3	1.380.000	25	3,490136571	61	118.620.003	1.220	2.372.400.070	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**1.514.200.000**	**2**	**908.520.000**	**2**	**302.840.000**	**2**	**41.640.000**	**100**	**13,7498349**	**102**	**908.520.014**	**2.040**	**18.170.400.275**	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	58.200.000	36	34.920.000	12	11.640.000	3	1.410.000	25	12,11340206	61	34.920.012	1.220	698.400.242	
penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	1.456.000.000	36	873.600.000	12	291.200.000	3	40.230.000	25	13,81524725	61	873.600.014	1.220	17.472.000.276	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**1**	**30.000.000**	**1**	**18.000.000**	**1**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**18.000.000**	**20**	**360.000.000**	
Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	30.000.000	60	18.000.000	20	6.000.000	0	0	0	0	60	18.000.000	1.200	360.000.000	
	IKM PATEN															

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	IKM Desa/Kelurahan															
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100**	**23.416.280.000**	**70**	**4.535.278.900**	**100**	**2.786.150.000**	**54**	**237.870.000**	**54**	**8,537587711**	**124**	**4.535.278.909**	**2.480**	**90.705.578.171**	
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan**	**1**	**23.353.000.000**	**1**	**10.333.148.899**	**1**	**636.200.000**	**1**	**59.270.000**	**100**	**9,316252751**	**101**	**10.333.148.908**	**2.020**	**206.662.978.166**	
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3	31.000.000	0	0	1	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	270.000.000	12	63.885.557	12	90.000.000	3	18.011.000	25	20,01222222	37	63.885.577	740	1.277.711.540	
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	270.000.000	12	63.885.557	12	90.000.000	3	20.995.500	25	23,32833333	37	63.885.580	740	1.277.711.607	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	270.000.000	12	63.885.557	12	90.000.000	3	1.150.000	25	1,277777778	37	63.885.558	740	1.277.711.166	
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	270.000.000	12	63.885.557	12	90.000.000	3	1.150.000	25	1,277777778	37	63.885.558	740	1.277.711.166	
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	270.000.000	12	63.885.557	12	90.000.000	3	15.663.500	25	17,40388889	37	63.885.574	740	1.277.711.488	
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	270.000.000	12	63.885.557	12	90.000.000	3	1.150.000	25	1,277777778	37	63.885.558	740	1.277.711.166	
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	270.000.000	12	63.885.557	12	90.000.000	3	1.150.000	25	1,277777778	37	63.885.558	740	1.277.711.166	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	**Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan**	**5**	**10.716.000.000**	**7**	**4.053.000.000**	**1**	**2.143.200.000**	**1**	**178.600.000**	**100**	**8,333333333**	**107**	**4.053.000.008**	**2.140**	**81.060.000.167**	
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	420	10.716.000.000	131	5.832.950.000	84	2.143.200.000	21	178.600.000	25	8,333333333	156	5.832.950.008	3.120	116.659.000.167	
Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat	**Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat**	**3**	**63.280.000**	**3**	**43.030.000**	**3**	**6.750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**43.030.000**	**60**	**860.600.000**	
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha	5	19.030.000	3	12.280.000	1	2.250.000	0	0	0	0	3	12.280.000	60	245.600.000	
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan terkiat non perizinan	5	18.050.000	3	11.300.000	1	2.250.000	0	0	0	0	3	11.300.000	60	226.000.000	
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	26.200.000	3	19.450.000	1	2.250.000	0	0	0	0	3	19.450.000	60	389.000.000	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Persentase perempuan yang terlbat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi di kecamatan															
Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100**	**5.852.950.000**	**43,5**	**1.571.829.075**	**100**	**1.450.590.000**	**44,44**	**17.900.000**	**44,44444444**	**1,233980656**	**88**	**1.571.829.076**	**1.759**	**31.436.581.525**	
Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**4.500**	**240.950.000**	**850**	**167.640.000**	**900**	**48.190.000**	**400**	**17.900.000**	**44,44444444**	**37,14463582**	**894**	**167.640.037**	**17.889**	**3.352.800.743**	
SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10	120.250.000	5	79.530.000	2	24.050.000	1	17.900.000	50	74,42827443	55	79.530.074	1.100	1.590.601.489	
Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	120.700.000	4	88.110.000	3	24.140.000	0	0	0	0	4	88.110.000	80	1.762.200.000	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pemberdayaan kelurahan	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**4.000**	**5.612.000.000**	**498**	**1.404.189.075**	**800**	**1.402.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**498**	**1.404.189.075**	**9.960**	**28.083.781.500**	
Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5	12.000.000	1	2.400.000	1	2.400.000	0	0	0	0	1	2.400.000	20	48.000.000	
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	800.000.000	2	200.255.582	3	200.000.000	0	0	0	0	2	200.255.582	40	4.005.111.640	
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	800.000.000	2	200.255.582	2	200.000.000	0	0	0	0	2	200.255.582	40	4.005.111.640	
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	800.000.000	2	200.255.582	1	200.000.000	0	0	0	0	2	200.255.582	40	4.005.111.640	
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	800.000.000	2	200.255.582	1	200.000.000	0	0	0	0	2	200.255.582	40	4.005.111.640	
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	800.000.000	2	200.255.582	1	200.000.000	0	0	0	0	2	200.255.582	40	4.005.111.640	
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	800.000.000	2	200.255.582	3	200.000.000	0	0	0	0	2	200.255.582	40	4.005.111.640	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8	800.000.000	2	200.255.582	2	200.000.000	0	0	0	0	2	200.255.582	40	4.005.111.640	
	IKM Trantibun Linmas															
Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	**Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan**	**100**	**13.250.000**	**46,25**	**16.150.000**	**100**	**2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46**	**16.150.000**	**925**	**323.000.000**	
Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	**1.500**	**13.250.000**	**200**	**16.150.000**	**300**	**2.650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**16.150.000**	**4.000**	**323.000.000**	
Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	13.250.000	3	16.150.000	1	2.650.000	0	0	0	0	3	16.150.000	60	323.000.000	
	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan															

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**100**	**265.500.000**	**28,7**	**100.350.000**	**100**	**53.100.000**	**100**	**900.000**	**100**	**1,694915254**	**129**	**100.350.002**	**2.574**	**2.007.000.034**	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah	**Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan**	**2**	**265.500.000**	**2**	**100.350.000**	**2**	**53.100.000**	**1**	**900.000**	**50**	**1,694915254**	**52**	**100.350.002**	**1.040**	**2.007.000.034**	
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2.500	96.250.000	800	48.500.000	500	19.250.000	0	0	0	0	800	48.500.000	16.000	970.000.000	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2.200	169.250.000	920	51.850.000	440	33.850.000	260	900.000	59,09090909	2,658788774	979	51.850.003	19.582	1.037.000.053	

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Turikale tahun 2022 dan Evaluasi renja Kecamatan Turikale tahun berjalan tahun 2023 mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kecamatan Turikale, antara lain :

a. **Realisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran sesuai yang direncanakan**

1. Kecamatan Turikale pada tahun 2022 melaksanakan 5 program dan terealisasi seluruhnya. Dari ke-5 program tersebut, semuanya mencapai target
2. Kecamatan Turikale pada tahun 2022 melaksanakan 13 kegiatan terkait urusan, dari ke-13 kegiatan tersebut yang mencapai target sebanyak 12 kegiatan, sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 1 kegiatan.
3. Kecamatan Turikale pada tahun 2022 melaksanakan 34 sub kegiatan. Dari 34 Subkegiatan yang melaksanakan terdapat 32 subkegiatan yang mencapai target, 1 sub kegiatan yang tidak mencapai target dan 1 subkegiatan yang dibawah target

b. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adanya program/kegiatan yang tidak terealisasi;**

1. Faktor penyebab adanya program / kegiatan yang tidak terealisasi 100% khususnya pada tahun 2023 adalah Evaluasi kelurahan hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran diakhir tahun sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi anggarannya , sementara Program dan Kegiatan lainnya terealisasi sesuai tujuan dan sasaran program melalui koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh pelaksana kegiatan dan seluruh stakeholder.
2. Faktor penyebab adanya program,kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang belum memenuhi terget diakibatkan karena Belum terealisasi anggaran tersebut karena masih masuk di tahun berjalan , sementara Program dan Kegiatan lainnya terealisasi sesuai tujuan dan sasaran program melalui koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh pelaksana kegiatan dan seluruh stakeholder.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab diatas;

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Turikale

Kecamatan Turikale merupakan perangkat daerah Kabupaten Maros sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat,koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa disamping itu juga camat bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Jika dilihat dari jenisnya, Pelayanan Adminitrasi Terpadu dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan

Tabel 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TURIKALE
KABUPATEN MAROS

NO	INDOKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	IKM PATEN		✓	3,24	3,26	3,24	3,25	3,26	3,26	
2	IKM Trantibum Linmas		✓	3,24	3,26	3,24	3,25	3,26	3,26	
3	IKM DESA/Kelurahan		✓	3,24	3,26	3,24	3,25	3,26	3,26	
4	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan		✓	3,24	3,26	3,24	3,25	3,26	3,26	
5	Persentase Perempuan Yang Terlibat Secara AktifDalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan		✓	34,56	37,09	50	60	39,81	42,72	
6	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM		✓	100	100	100	100	100	100	

Jumlah inidkator yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Turikale ada 6 indikator yaitu : IKM Paten, IKM Trantibum Linmas, IKM Desa dan Kelurahan , IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan, Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam Kegiatan Pembangunan bidang Sosial dan ekonomi di Kecamatan, Persentase Masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar sesuai SPM, Ke 6 Indikator tersebut semuanya mencapai target.

- Indikator 1. IKM Paten Kecamatan Turikale sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan mencapai target , program pendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- IKM Trantibum linmas sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan Ketertiban di kecamatan mencapai target , program pendukung Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum.
- IKM Desa/Kelurahan sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan mencapai target Program pendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan sasaran meningkatnya akses masyarakat dalam kegiatan Keagamaan secara aktif, mencapai target program pendukung program Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.
- Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan bidang sosial dan ekonomi di kecamatan mencapai target, program pendukung program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan pelayanan dasar sesuai SPM,mencapai target program pendukung adalah program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Turikale

1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Turikale dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan,

Kecamatan Turikale sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan Aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. **permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

1) Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya dukungan SKPD Teknis terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
2) Terbatasnya tingkat kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
3) Anggaran Kecamatan yang disediakan sangat terbatas
4) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana ASN dalam upaya mewujudkan pelayanan prima
5) Dalam rangka peningkatan perencanaan perlu dialokasikan sejumlah dana perencanaan
6) Perlunya meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

No	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK
1	Jumlah layanan terkait kententraman dan ketertibun umum belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan standar yang berlaku	Kurang anggaran terkait pelaksanaan pelayanan	IKM trantibun
2	Keterlibatan Perempuan dalambidang pembangunan social dan Ekonomi	Kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan social dan ekonomi	Persentase perempuan yang terlibat secara Aktif dalam kegiatan pembangunan Bidang social dan Ekonomi di Kecamatan
3	Keikut sertaan masyarakat	Kurangnya keterlibatan	IKM Keagamaan

	dalam aktifiitas Keagamaan	masyarakat dalam aktifitas keagamaan	
4	Tercapainya pelayanan kecamatan sesuai sesuai dengan SPM	Keterbatasan Sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas, Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki , sumber daya aparatur yang menguasai teknologi informasi juga terbatas	IKM Layanan
5	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	IKM Layanan

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maros

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Maros dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Turikale dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Turikale,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kec. Turikale**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**8.084.860.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Turikale**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**8.084.860.000**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec. Turikale**	**Jumlah Dokumen Perencanaand dan Pelaporan Perangkap Daerah**	**19 Dokumen**	***9.210.000***	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Turikale**	**Jumlah Dokumen Perencanaand dan Pelaporan Perangkap Daerah**	**19 Dokumen**	***9.210.000***	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Turikale	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	1.430.000		Kec. Turikale	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	1.430.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Turikale		1 Dok	1.430.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Turikale		1 Dok	1.430.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Turikale		1 Dok	1.030.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Turikale		1 Dok	1.030.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.430.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.430.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.430.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Turikale		1 laporan	1.030.000	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Turikale		1 laporan	1.030.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Laporan Kinerka (LAPKIN) Perangkap Daerah	12 Laporan	1.430.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Laporan Kinerka (LAPKIN) Perangkap Daerah	12 Laporan	1.430.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec. Turikale**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**12 Dokumen**	***7.605.684.250***	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Turikale**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**12 Dokumen**	***7.605.684.250***	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/bual	7.566.634.250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/bual	7.566.634.250	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	39.050.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	39.050.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	18 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan a n/Semesteran SKPD	18 laporan	-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14 Dokumen		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14 Dokumen		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec. Turikale**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawean**	**120 Orang**	***7.500.000***	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Turikale**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawean**	**120 Orang**	***7.500.000***	
pengadaan pakain dinas beserta atribut dan kelengkpanannya	Kec. Turikale	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	300 Paket	7.500.000	pengadaan pakain dinas beserta atribut dan kelengkpanannya	Kec. Turikale	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	300 Paket	7.500.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Turikale	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6 Jenis**	***157.185.750***		Kec. Turikale	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6 Jenis**	***157.185.750***	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Turikale	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	3.137.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Turikale	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	3.137.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Turikale	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 paket	7.356.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Turikale	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 paket	7.356.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Turikale	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	23.424.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Turikale	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	23.424.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Turikale	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	8.100.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	8.100.000	
fasilitasi kunjungan tamu	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	30.000.000	**fasilitasi kunjungan tamu**	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	30.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255 laporan	85.168.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255 laporan	85.168.750	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec. Turikale**	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	**2 jenis**	**15.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Turikale**	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	**2 jenis**	**15.000.000**	
Pengadaan Mebel	Kec. Turikale	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kec. Turikale	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Turikale	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Turikale	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	15.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Turikale**	**Jumlah Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Jenis**	***280.080.000***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Turikale**	**Jumlah Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Jenis**	***280.080.000***	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12.960.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12.960.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	267.120.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	267.120.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Turikale	**Jumlaj Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Baik**	**4 Jenis**	***10.200.000***	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Turikale	**Jumlaj Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Baik**	**4 Jenis**	***10.200.000***	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Turikale	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	10.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Turikale	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	10.200.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Turikale	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Turikale	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	1 Unit	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Turikale	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pablik di Kecamatan**	**100%**	**1.974.550.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Turikale	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pablik di Kecamatan**	**100%**	**1.974.550.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**8.200.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**8.200.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85 Dok	8.200.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85 Dok	8.200.000	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Kec. Turikale**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**1 Kegiatan**	**1.957.200.000**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Turikale**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**1 Kegiatan**	**1.957.200.000**	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	-	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84 Laporan	1..957.200.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84 Laporan	1..957.200.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kec. Turikale**	**Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	3 Layanan	**9.150.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Turikale**	**Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	3 Layanan	**9.150.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	**4 Dokumen**	3.050.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	**4 Dokumen**	3.050.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	3.050.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	3.050.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	3.050.000		Kec. Turikale	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	3.050.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kec. Turikale**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakatdi Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**90%**	**50.090.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Turikale**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakatdi Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**90%**	**50.090.000**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec. Turikale**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan**	**2 Kegiatan**	**47.690.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Turikale**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan**	**2 Kegiatan**	**47.690.000**	
Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dok	20.200.000	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dok	20.200.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	27.490.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	27.490.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kec. Turikale**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**1 Kegiatan**	**2.400.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kec. Turikale**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**1 Kegiatan**	**2.400.000**	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500 pokmas/ormas	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500 pokmas/ormas	-	
Evaluasi Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 laporan	2.400.000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 laporan	2.400.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kec. Turikale**	**Persentase Penurunan Kasus Penyelesaian K3 Di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**2.650.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Turikale**	**Persentase Penurunan Kasus Penyelesaian K3 Di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**2.650.000**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kec. Turikale**	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**2.650.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Turikale**	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**2.650.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.650.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.650.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kec. Turikale**	**Persentase Masyarakatdi Wilaya Kecamatan yang Mendapat Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**'90%**	**67.850.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Turikale**	**Persentase Masyarakatdi Wilaya Kecamatan yang Mendapat Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**'90%**	**67.850.000**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec. Turikale**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**3 Kegiatan**	**67.850.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Turikale**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**3 Kegiatan**	**67.850.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	21.750.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	21.750.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	-	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	-	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	620 orang	46.100.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	620 orang		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	-	
KELURAHAN PETTUADAE				**260.000.000**	**KELURAHAN PETTUADAE**				**290.000.000**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**90.000.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**60.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**90.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	90.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	
KELURAHAN RAYA				**260.000.000**	**KELURAHAN RAYA**				**290.000.000**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**90.000.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**60.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**90.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	90.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	
KELURAHAN TAROADA				**260.000.000**	**KELURAHAN TAROADA**				**290.000.000**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**90.000.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**60.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**90.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	90.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	
KELURAHAN ADATONGENG				**260.000.000**	**KELURAHAN ADATONGENG**				**290.000.000**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**90.000.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**60.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**90.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	90.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	
KELURAHAN TURIKALE				**260.000.000**	**KELURAHAN TURIKALE**				**290.000.000**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**90.000.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**60.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**90.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	90.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	
KELURAHAN ALLIRITENGAE				**260.000.000**	**KELURAHAN ALLIRITENGAE**				**290.000.000**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**90.000.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**60.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**90.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	90.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	
KELURAHAN BORIBELAYYA				**260.000.000**	**KELURAHAN BORIBELAYYA**				**290.000.000**	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**60.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**90.000.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**60.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**90.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 dokumen	90.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Turikale	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**200.000.000**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**200.000.000**	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	200.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Turikale pada tahun 2024 dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas SDM Aparatur lingkup kecamatan Turikale
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan baik di desa maupun kelurahan
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
5. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Turikale maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Maros

Nama Perangkat Daerah
Kecamatan Turikale

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Turikale**	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan**	**100%**	
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan	1 Kegiatan	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84 Laporan	
2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85 Dokumen	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Turikale	Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.	3 layanan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Turikale**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**90%**	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku	3 kegiatan	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	620 orang	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Turikale**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**90%**	

1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan	2 kegiatan	
	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 dokuemen	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKM Pelayan desa/kelurahan)	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan	1 Kegiatan	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500 pokmas/ ormas	
	Evaluasi Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 laporan	
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Turikale	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan RW 01 / Poros Perumnas, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 1200 x 4 M	Musrenbang
	Penyediaan Sarana Persampahan RW 01, RW 02, RW 03 dan RW 04 Kel. Adatongeng, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 4 RW x 10 = 40 Buah Tempat Sampah dan Pemotong rumput 4 RW x 2 = 8 Buah	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RW 04 / Bonto Puasa, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 1 Unit	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RW 01 Perumnas, Poros Perumnas Tumalia, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 500 M	Musrenbang

	Pembangunan Drainase Lingkungan RW 04 Bontopuasa, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 1000 M	Musrenbang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan RT 01 ke RT 03 / RW 03 Kalli Kalli, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 1000 M x 2 M	Musrenbang
	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Adatongeng, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 40 buah dengan Ukuran 60 x 110 Cm	Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)RT 01 RW 02 Lingk. Tumalia, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 350 M x 4,5 M	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 01 RW 04 Bonto Puasa, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 50 Meter	Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)RT 02 RW 04 Bonto Puasa, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 300 M x 3 M	Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)RT 01 Nusa Idaman RW 04 Bontopuasa, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 500 M x 4 M	Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)RT 04 RW 04 Bonto Puasa, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 100 M x 2,5 M	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 01 RW 02 Lingk. Tumalia, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 1000 M	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 02 RW 02 Lingkungan Tumalia, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 40 Meter	Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)RT 02 RW 02 Lingk. Tumalia, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 120 x 4 M	Musrenbang

	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)RT 02 RW 02 Lingk. Tumalia, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 90 x 4 M	Musrenbang
	Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni RW 02 Tumalia, RW 03 Kalli Kalli, RW 04 Bonto Puasa, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 48 Unit	Musrenbang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan)RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 8 titik	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RW 03 Kalli-Kalli, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 100 M	Musrenbang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan RT 03 RW 03 Kalli- Kalli, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 100 x 2 M	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 03 RW 01 Perumnas Tumalia, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 100 M	Musrenbang
	Penyediaan Sarana PersampahanRW 01 Perumnas, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	1 Unit	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 02 RT 04 RW 01 Perumnas Tumalia, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 200 M	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 01 RW 02 Tumalia, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 100 M	Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 3 RW 3, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 30 M x 3 M	Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	Volume P = 60 M x 1,5 M	Musrenbang

	Blok)RT 03 RW 03, Kab. Maros		di Kelurahan Yang terbangun		
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 03 RW 03, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 200 M	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan BTN Nusa Idaman Blok B3 RW 04 Bonto Puasa, Kab. Maros	Kel. Adatongeng	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 500 M	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Sejahtera RT 02 RW 02 , Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang : 200 m Lebar : 40 cm Tinggi : 50 cm	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Tanggul Kota rt 05 RW 01 Kel. Alliritengae, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 130 m lebar : 40 cm tinggi : 50 cm	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Cempaka Lr 1 RT 05 RT 01, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 150 m lebar : 40 cm tinggi : 50 cm	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Cendana RT 01 RW 02, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang : 250 m Lebar : 60 cm Tinggi : 70 cm	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Lorong Jl Cemara dan Jl. Cendana (Borong Untia) belakang Masjid Agung Maros, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang : 500 m Lebar : 25 cm Tinggi : 50 cm	Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Tanggul Kota (Mannaungi Dalam), Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang : 300 m lebar : 40 cm tinggi : 30 cm	Musrenbang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 3 titik lampu jalan	Musrenbang

	Petunjuk Jalan) Jl. Tanggul Kota (Mannaungi Dalam), Kab. Maros				
	Penyediaan Sarana Persampahan Jl. Sejahtera Lr 2 RT 01 RW 01, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 1	Musrenbang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Jl. Sejahtera Lr 1, Jl. Sejahtera Lr 2, dan Jl. Sejahtera Lr 3 RT 01 RW 01, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 3	Musrenbang
	Penyediaan Sarana Persampahan Jl. Cempaka RT 05 RW 01, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 3	Musrenbang
	Penyediaan Sarana Persampahan Jl. Tanggul Cendana RT 02 RW 02, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 15 bak sampah	Musrenbang
	Penyediaan Sarana Persampahan Jl. Tanggul Kota (Mannaungi Dalam) RT 02 RW 02, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 3 Gerobak Pengangkut	Musrenbang
	Penyediaan Sarana Persampahan TPU Mannaungi Jl Tanggul Kota RT 02 RW 02, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 1 buah	Musrenbang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan Jl. Tanggul Cendana RT 02 RW 02, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang = 200 m Lebar = 4 m Tinggi = 50 cm	Musrenbang
	Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Lurah Alliritengae, Kab. Maros	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Ukuran = 10 m x 15 m x 2 lantai	Musrenbang
	Penyediaan Sarana Persampahan Jl. Cemara dan Jl. Cemara Lorong (Borong Untia)	Kel. Alliritengae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 75 Bak sampah	Musrenbang

	RT 01/RW 02, Kab. Maros				
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Komp Pasar Sentral RT 05 RW 01, Kab. Maros	Kel. Alliriteng ae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Ukuran panjang : 50 m lebar : 1,5 m tinggi : 30 cm	Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Jl. Taufik RT 02 RW 01, Kab. Maros	Kel. Alliriteng ae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume : 3 titik lampu	Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Taufik lr 2 RT 02 RW 01, Kab. Maros	Kel. Alliriteng ae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang : 200 m Lebar : 40 cm Tinggi : 40 cm	Musren bang
	Penyediaan Sarana Persampahan Jl. Tanggul Kota (Mannaungi Dalam) RT 02 RW 02, Kab. Maros	Kel. Alliriteng ae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	1 buah mesin gergaji pohon	Musren bang
	Rehab Rumah Tidak Layak Huni Jl. Tanggul Cendana RT 02 RW 02, Kab. Maros	Kel. Alliriteng ae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Ukuran : 6 x 12 m	Musren bang
	Rehab Rumah Tidak Layak Huni Jl. Tanggul Kota RT 05 RW 01, Kab. Maros	Kel. Alliriteng ae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Ukuran : 4 x 7 m	Musren bang
	Rehab Rumah Tidak Layak Huni Jl. Cempaka Lr 1 RT 05 RW 01, Kab. Maros	Kel. Alliriteng ae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Ukuran : 4 x 7 m	Musren bang
	Pekerjaan Jaringan Perpipaan Air Bersih Perkotaan Nipa,kacampuren dan cabella, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	300 kk warga masyarakat	Musren bang
	Perintisan Jalan Lingkungan Cabella RT01/ RT02, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	700 meter	Musren bang
	Penanganan Jalan yang Tertutup Material dan Penurunan Badan Jalan	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	1000 meter	Musren bang

	Akibat lonsor Lingkungan Cabella RT01 dan RT 02, Kab. Maros		di Kelurahan Yang terbangun		
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Lingkungan Cabella RT01, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	200 meter	Musrenbang
	Penanganan Jalan yang Rusak Akibat terkena Banjir atau Gempa Lingkungan Cabella RT01 dan RT02, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	1000 meter	Musrenbang
	Pembangunan Jembatan Baja dan Beton Lingkungan Cabella RT01, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	12 meter	Musrenbang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Lingkungan Cabella, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	10 titik	Musrenbang
	Pembangunan Tangki Septik/MCK Lingkungan Cabella RT01 dan RT02, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	5 unit	Musrenbang
	Penanganan Lantai dan Gelagar Jembatan yang Hanyut dilanda Banjir Lingkungan Tamalalang, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	60 meter	Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Lingkungan Tamalalang, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Lingkungan Tamalalang, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	500 meter	Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Lingkungan Tamalalang, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	50 meter	Musrenbang
	Pekerjaan Pemasangan Bronjongdan Pasangan Batu Lingkungan tamalalang, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	100 meter	Musrenbang

			di Kelurahan Yang terbangun		
	Pembangunan Drainase Lingkungan Lingkungan Tamalalang, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	200 meter	Musrenbang
	Pembangunan Tangki Septik/MCK Lingkungan Tamalalang RT01 dan RT 02, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	12 unit	Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Lingkungan Marampesu RT01/RT03, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	250 meter	Musrenbang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Lingkungan Marampesu RT 02, Kab. Maros	Kel. Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	2 tiang	Musrenbang
	Penanganan Lantai dan Gelagar Jembatan yang Hanyut dilanda Banjir Marampesu-Pasandang, Kab. Maros	Boribellaya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musrenbang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 02 Rw 03 Lingkungan Labuang, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musrenbang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan RW 01/02 RT PAPPANDANGAN, Kab.Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 140 Meter	Musrenbang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan RW 01/ RT 03 PAPPANDANGAN, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musrenbang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT01 / RW 06 BUTTATOA SELATAN, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Lebar 4 M panjang 100 M	Musrenbang

	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 01 / RW 06 BUTTATOA SELATAN, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Lebar 4 M panjang 150 M	Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan RT02 / RW 04 KASSI LAMA, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Lebar 3 M, panjang 250M	Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 03 / RW 05 KASSI BARU, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Lebar 3 M, panjang 215 M	Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan RT 01 / RW 06 BUTTATOA SELATAN, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 500 M, Lebar 4,5 M	Musren bang
	Penyediaan Sarana Persampahan 7 (tujuh) Lingkungan Di kelurahan Pettuadae, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	1 unit Motor sampah x 7 Lingkungan = 7 Unit	Musren bang
	Penyediaan Sarana Persampahan Lingkungan Labuang, labuang Permai ,kassi lama dan kassi Baru kelurahan Pettuadae, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	lingkungan Labuang 3 Unit, Lingkungan Labuang Permai 50 Unit, Lingkungan Kassi Lama 100 Unit,dan Kassi Baru 10 Unit = 163 unit Tempat Sampah	Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Rt 01 Rw 06 Buttatoa Selatan	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 3X150 M	Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 01 Blok B3 dan Blok C1 Perum RajanaRw 03	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum		Musren bang

	Lingkungan Labuang Permai, Kab. Maros		di Kelurahan Yang terbangun		
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 02, Rw 02 Lingkungan Labuang, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Bambu Runcing Rt Lorong I Lingkungan Kassi Lama, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Bambu Runcing Lorong II Lingkungan Kassi Lama, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Bambu Runcing Lorong III Lingkungan Kassi Lama, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Bambu Runcing Lorong IV Lingkungan Kassi Lama, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Flamboyan Lingkungan Kassi Lama, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 02/Rw 06 Buttatoa Selatan, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 02 Rw 04 Lingkungan Kassi Baru, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 02 Rw 04 Lingkungan Kassi Baru, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 02 Rw 03 Lingkungan Labuang, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 02 Rw 02 Lingkungan Labuang, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang

	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 03 Rw 02 Lingkungan Labuang, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 04 Rw 02 Lingkungan Labuang, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 03 Rw 05 Lingkungan Kassi Baru, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 03 Rw 05 Lingkungan Kassi Baru, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 02 Rw 03 Lingkungan Labuang Permai, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Rt 03 Rw 02 Lingkungan Labuang, Kab. Maros	Kel. Pettuadae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Rehabilitasi Bangunan Gedung Talamangape RT 003/RW 03 Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Bontojolong RT001 / RW 02 , Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Bontojolong RT 001/RW 02, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Bontojolong RT 001/ RW 002, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum		Musren bang

	Bontojolong RT 002 /RW 002, Kab. Maros		di Kelurahan Yang terbangun		
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Bontojolong RT 003 /RW 002, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Bontojolong RT 003 /RW 002, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Bontojolong RT 005/RW002, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Bontojolong RT 007/RW 002, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Bontojolong RT 007/ RW 002 , Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jembatan Baja dan Beton Bontojolong RT 009/ RW 002 , Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan Bontojolong RT 010 / RW 002, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang

	Talamangape RT 003 RW 002, Kab. Maros				
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Talamangape RT 003 / RW 003, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Talamangape RT 003 / RW 003, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Talamangape RT 003 / RW 003, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Penggantian Jembatan dari Jembatan kayu Menjadi Jembatan Baja dan Beton Talamangape RT 002 / RW 003, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Talamangape RT 002 / RW 003, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Talamangape RT 002 / RW 003, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Talamangape RT 002 / RW 003, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Talamangape RT 002 / RW 003, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang

	(Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Pacelle RT 001/ RW 001, Kab. Maros				
	Pembangunan Drainase Lingkungan Pacelle RT 001 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Depan Rumahnya Imam Kelurahan Ustas Makmur	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 200M x 1,5 M , Kab. Maros	Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Pacelle RT 001 / RW 001 samping Rumah ustas makmur , Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Pacelle RT 001 / RW 002, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Penyediaan Sarana Persampahan Pacelle RT 001 /RW 002, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Pacelle RT 002 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Pacelle RT 002 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Pacelle RT 002 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Rehabilitasi Bendung Irigasi Pacelle RT 003 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang

	Rehabilitasi Bendung Irigasi Pacelle RT 003 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Pacelle RT 003 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Pacelle RT 003 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Bangunan Gedung Jl. Makmur dg Sitakka Kel. Raya Kec. Turikale Kab. Maros, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Bangunan Gedung Pacelle RT 003 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Bangunan Gedung Pacelle RT 003 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Pacelle RT 004 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Penyediaan Sarana Persampahan Pacelle RT 004 / RW 001, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan Pacelle RT 001, RT 002 dan RT 003 RW 001 , Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Gotonge RT 009 / RW 002 Bontojolong, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Gotonge RT 009 / RW 002, Kab. Maros	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan	Kel. Raya	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum		Musren bang

	Pacelle RT 003 /RW 001, Kab. Maros		di Kelurahan Yang terbangun		
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 04 RW 05 Lingkungan Ballu Ballu Kelurahn Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jaringan Drainase Permukiman RT 04 RW 05 Ballu Ballu, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 04 RW 05 Lingkungan Ballu Ballu, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 03 RW 03 Maccopa 3 Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 02 RW. 01 Sanggalea Selatan Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan RT 02 RW 01 Sanggalea Selatan Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan RT 03 RW 02 Sanggale Utara Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase, Jalan Lingkungan yang berada di Kawasan Kumuh RT 03 RW 02 Sanggalea Utara Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang

	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 04 RW O2 Sanggalea Utara Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 04 RW 02 Sanggalea Utara Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase, Jalan Lingkungan yang berada di Kawasan Kumuh RT 02 RW 02 Sanggalea Utara Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 03 RW 03 Sanggalea Utara Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 03 RW 04 Maccopa Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) BTN Wesabbe II RT 02 RW 04 Maccopa Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Gerbang Maccopa Indah RT 03 RW 04 Maccopa Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 03 RW 04 Maccopa Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 01 RW 04 Maccopa Kelurahan	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum		Musren bang

	Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros		di Kelurahan Yang terbangun		
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 04 RW 04 Maccopa Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) RT 02 RW 04 Maccopa Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) RT 01 RW 05 Ballu Ballu Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, RT 02 RW 05 Ballu Ballu Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale RT 04 RW 05 Ballu Ballu Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 01 RW 05 Ballu Ballu Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale RT 02 RW 05 Ballu Ballu Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale RT 04 RW 05 Ballu Ballu Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Penyediaan Sarana Persampahan RT 03 RW 05 Ballu ballu Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Bangunan Gedung RT 02 RW 05 Ballu ballu Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 01 RW 06 Baniaga	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum		Musren bang

	Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros		di Kelurahan Yang terbangun		
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 01 RW 06 Baniaga Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros, Turikale, Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan BTN Taniaga RT 04 RW 06 Baniaga Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros, Turikale, Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 3 RW 06 Baniaga Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros, Turikale, Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) RT 02 RW 06 Baniaga Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Penyediaan Sarana Persampahan Kelurahan Taroada, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Penyediaan Sarana Persampahan RW 06 Baniaga Kelurahan Taroada, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) RT 02 RW 06 Baniga Kelurahan Taroada, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang

	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 01 / RW 02 Sanggalea Utara, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang : 100 M Lebar : 50 M	Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 01 / RW 02 Sanggalea Utara, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang : 80 M Lebar : 2 M	Musren bang
	Pembangunan Bangunan Gedung RT 02 / RW 04 Maccopa (BTN Wesabbe II) Kelurahan Taroada, Kab. Maros	Kel. Taroada	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Jalan Inspeksi Saluran Irigasi RT 04 RW 01 Solojirang, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang : 200 M Lebar : 1,70 M	Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan Perbatasan Lingkungan RW 01 RT 03 solojirang 1 dan lingkungan RW 04 RT03 solojirang Kelurahan Turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang : 30 M Lebar : 3 M	Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Jl inspeksi saluran irigasi RT 03 RW 01 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 70 meter lebar 4 meter	Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan Jl.sultan hasanuddin RW 3 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 20 meter lebar 4meter	Musren bang
	Perbaikan Railing Jembatan yang Patah, Perbaikan Lening Jembatan Perbatasan Lingkungan RW 01 Solojirang 1 dan Lingkungan RW 03 Reda Biru Kelurahan Turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang : 6,20 M Lebar : 3 M	Musren bang
	Pembangunan Jembatan Baja dan Beton Jl. Inspeksi Saluran Irigasi Jl. Djamil Dg Pabundu RT 03 RW 01 Solojirang 1	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang : 6,20 M Lebar : 3 M	Musren bang

	Kelurahan Turikale, Kab. Maros				
	Pembangunan Drainase Lingkungan RW 2 RT 2 solojirang 2 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 50 m lebar 50 cm tinggi 70 cm	Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan RW 2 RT 2 Kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 50 m lebar4 m	Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 2 RW 2 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 12 m lebar 1m tinggi 70 cm	Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 4 RW 3 reda beru kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 300 meter lebar 2 meter	Musren bang
	Penggantian Jembatan dari Jembatan kayu Menjadi Jembatan Baja dan Beton RW 3 reda beru kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 6 meter lebar 2 meter	Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) RT 4 RW 3 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 100 meter lebar 1 meter	Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl.sultan hasanuddin RW 3 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 250 m, lebar 1 m, tinggi 60 cm.	Musren bang
	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl.pisang RT 2 RW 3 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 200 m lebar 50 cm tinggi 60 cm	Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan Jl.mangga RT 1 RW 3 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 500 m lebar 3,5 m	Musren bang
	Pelebaran Jembatan Baja dan Beton Jl.makmur dg sitakka RT 4 RW 3 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 6 m lebar 2 m	Musren bang

	Pembangunan Drainase Lingkungan JL.Dr. Ratulangi RT 1 RW 4 solojirang kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 200 m lebar 50 cm tinggi 60 cm	Musren bang
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Lorong 3 RT 1 RW kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 200 meter lebar 1,5 meter	Musren bang
	Penggantian Jembatan dari Jembatan kayu Menjadi Jembatan Baja dan Beton Lorong 1RT 1 RW 4 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 6 m lebar 2 m	Musren bang
	Pembangunan Jembatan Baja dan Beton RW 4 solojirang kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 6m lebar 2m	Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Jl.inspeksi saluran irigasi RW 1 RT 4 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan) Jl.inspeksi saluran lorong 6 solojirang 1 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Bangunan Gedung Jl. Badaruddin Dg. Lira No. 4 Maros Kelurahan Turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pembangunan Bangunan Gedung Kelurahan Turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		Musren bang
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum	Panjang 200 meter	Musren bang

	RW 2 Solojirang 2 kelurahan turikale, Kab. Maros		di Kelurahan Yang terbangun	lebar 6 meter	
	Pembangunan Drainase Lingkungan RW 2 solojirang 2 kelurahan turikale, Kab. Maros	Kel. Turikale	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Panjang 400 m lebar 50 cm tinggi 70 cm	Musren bang
IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Turikale**	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	**100%**	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Turikale	Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan	1 Kegiatan	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Turikale adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Turikale

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Turikale mempunyai *tujuan dan sasaran* :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis maka Kecamatan Turikale

No	sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1	**Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan**	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai Sakip	BB
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan AdministrasiTerpadu di Kecamatan	IKM Paten	IKM	3,26
	Meningkatnya KualitasPelayanan Ketentraman dan Ketertiban diKecamatan	IKM Trantibum Linmas	IKM	3,26
	Meningkatnya KualitasPelayanan Masyarakatpada tingkat Pemerintahan Desa / Kelurahan	IKM Desa / Kelurahan	IKM	3,26
2	**Meningkatkan PeranSerta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan**	**IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan**		
	Meningkatnya Akses Masyarakat Dalam Keagamaan Secara Aktif	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan	IKM	3,26
3	**Meningkatkan PeranSerta Perempuan DiKecamatan Dalam Pembangunan**	**Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial dan Ekonomi di Kecamatan**		
	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan di Kecamatan Dalam Bidang PembangunanSosial dan Ekonomi	Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial dan Ekonomi diKecamatan	Persen	39,81
4	**Meningkatkan Kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar di Kecamatan sesuai standar PelayananMinimal**	**Persentase Masyarakat Kecamatan Yang mendapatkan Pelayanan Dasaruai SPM**		
	Meningkatnya CakupanPelayanan Dasar Masyarakat Kecamatan sesuaiSPM	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang mendapatkan PelayananDasaruai SPM	Persen	100

3.3. Program Dan Kegiatan

I. Pokok Permasalahan

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian dikarenakan , ada beberapa kegiatan yang tidak cukup anggaranya, sedangkan kegiatan lain ada kelebihan anggaran.

II Analisis dan Alasan Perubahan

1. Pada Sub Kegiatan ‘‘Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional’’ dilakukan pengurangan pada belanja kendaraan hias , Belanja Jasa Tenaga Ahli, belanja makanan dan minuman kegiatan amaliah Ramadhan, belanja sewa alat kantor kegiatan amaliah ramadhan dialihkan pada belanja kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kegiatan olahraga / PORKAB) dikarenakan dana yang tesedia tidak cukup
2. Pada Sub Kegiatan ‘‘ Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia‘‘ dialihkan pada belanja kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kegiatan olahraga / PORKAB) dikarenakan dana yang tesedia tidak cukup
3. Pada Sub Kegiatan ‘‘ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD’’ dialihkan pada belanja kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kegiatan olahraga / PORKAB) dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikarenakan dana yang tesedia tidak cukup
4. Pada Sub Kegiatan ‘‘ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor’’ dialihkan pada belanja kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (kegiatan olahraga / PORKAB) dan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikarenakan dana yang tesedia tidak cukup

III Kesimpulan

Dengan adanya perubahan anggaran ini diharapkan agar semua belanja yang terdapat pada DPA Kantor Kecamatan Turikale dapat tercukupi dan tepat sasaran, dan akan disesuaikan dengan anggaran kas perubahan.

1. Program

   Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.

   Program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

   1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / kota
   2) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   3) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
   4) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
   5) Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

2. Kegiatan

   Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :

   1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Kepegawaian Daerah
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   5) Penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   6) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
   7) Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
   8) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
   9) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepadaCamat
   10) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   11) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
   12) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   13) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

3. Dan jumlah sub. Kegiatan sebanyak 32 kegiatan
4. Total kebutuhan dana / pagu indikatif untuk anggaran tahun 2024 menurut sumber pendanaannya :

   - BELANJA OPERASI : Rp. 8.249.658.224,-
   - BELANJA MODAL : Rp. 1.400.000.000.-

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Turikale dapat dilihat pada tabel bertikut:

Tabel 3.2

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.	70	70	8.675.948.224	8.661.588.224				
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	19	11	8.470.000	12.820.000				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	1.310.000	1.310.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1.280.000	1.280.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1.030.000	2.430.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1.310.000	1.310.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1.280.000	2.430.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1.030.000	2.030.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	4	1.230.000	2.030.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	26	26	8.249.658.224	8.249.658.224				
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118	102	8.201.698.224	8.201.698.224	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	DAU
7.01.01.2.02.03.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	47.960.000	47.960.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	DAU
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah**	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian	118	102	7.500.000	7.500.000				
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	300	1	7.500.000	7.500.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	6	6	101.480.000	91.790.000				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	1	2.537.000	2.537.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17	1	7.356.000	7.356.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	1	23.424.000	23.424.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	12	5.523.000	5.523.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	23.100.000	23.100.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255	12	39.540.000	29.850.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	302.840.000	293.820.000				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	11.640.000	11.640.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	291.200.000	282.180.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berdasarkan Dalam Kondisi Baik	1	1	6.000.000	6.000.000				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	6.000.000	6.000.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR	PAD
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	100	100	2.786.150.000	2.786.150.000				
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan	1	1	636.200.000	636.200.000				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85	85	636.200.000	636.200.000	KEC. TURIKALE	7 KELURAHAN & KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	PAD
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan	1	1	2.143.200.000	2.143.200.000				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84	84	2.143.200.000	2.143.200.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	PAD
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat	3	3	6.750.000	6.750.000				
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen NonPerizinan Usaha yang Dilaksanakan	4	1	2.250.000	2.250.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	PAD
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1	1	2.250.000	2.250.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	PAD
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	1	2.250.000	2.250.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	PAD
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan	100	100	1.450.590.000	1.490.200.000				
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	900	900	48.190.000	87.800.000				
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2	2	24.050.000	24.050.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7	3	24.140.000	63.750.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	PAD
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	800	800	1.402.400.000	1.402.400.000				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13	13	1.400.000.000	1.400.000.000	7 KELURAHAN	7 KELURAHAN	APARATUR & MASYARAKAT	DAU EARMARKING
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	1	2.400.000	2.400.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	PAD
7.01.05.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan	100	100	2.650.000	2.650.000				
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	300	300	2.650.000	2.650.000				
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	1	2.650.000	2.650.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	PAD
7.01.05.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100	100	53.100.000	27.850.000				
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	2	2	53.100.000	27.850.000				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100	500	19.250.000	17.250.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	PAD
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	620	440	33.850.000	10.600.000	KEC. TURIKALE	KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	PAD
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		10		30.000.000		KEC. TURIKALE	APARATUR & MASYARAKAT	BANTUAN KEUANGAN
					12.968.438.224	**12.998.438.224**				

BAB IV
PENUTUP

Saran dan Kesimpulan

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Turikale. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Turikale ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Maros secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hokum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Ridha dan Petunjuk Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing. Amin.**

RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) 2024

KECAMATAN BONTOA

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum..... 2
1.3. Maksud dan Tujuan 6
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA 9

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9
II.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah 16
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18
II.4. Review TerhadapTancangan Awal RKPD 20
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 21

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 28

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28
III.2. Tujuan dan SasaranRenja SKPD 29
III.3. Program dan Kegiatan 31

BAB IVPENUTUP..... 35

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya akhirnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bontoa Tahun 2024 telah terselesaikan. maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Bontoa Tahun 2024 bertujuan secara umum sebagai Penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bontoa Tahun 2021-2026 yang memuat Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah, Gambaran Visi dan Misi, serta Rencana Pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontoa Tahun 2024 masih banyak keterbatasan. Akhirnya, semoga Rencana Kerja Kecamatan Bontoa Tahun 2024 dapat menjadi Pedoman awal bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024 guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Maros, 31 Juli 2024

C A M A T

BASO,SE,. M.Si
Pangkat : Penata Tk.I /IIId
Nip : 198712312011011004

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 20214 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Pemerintah daerah untuk Menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaran Pemrintahaan.Prenecaaan adalah Suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan dengan memeperhatikan rencana kerja Kecamatan Bontoa Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA PERUBAHAN merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Sehubungan dengan itu, Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Maros membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD). Renja Perubahan PD tahun disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bontoa Tahun 2021-2026. Renja Perubahan PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Kecamatan Bontoa disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan.
2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan Perangkat Daerah

3) Penyusunan Rancangan.
4) Penyusunan Rancangan Akhir
5) Penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarakn Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 dan tetap mempedomani Renstara Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah Menjadi Pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bontoa Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Adapun landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah :
    1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587),

6. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangana Pendemi Corona Viru Disease 2019 (Covid – 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasidan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-;

25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahn Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3;
31. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 34);
32. Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2023 Tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup

Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 nomor 36.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Bontoa Tahun 2024 adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Bontoa untuk periode 1 tahun sebagai Impelemntasi pelaksnaan rencana pembagunan jangka menengah Daerah dan Renstra perangkat daerah

Tujuan disusunnya Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Bontoa Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan, dan Sub.kegiatan ;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Kantor Kecamatan Bontoa
3. Membuat acuan perencanaan untuk mencapai Visi,Misi , Tujuan yang memuat Programdan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja , kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.
4. Sebagai Dasar Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rentsra Perangkat Daerah, dengan Renja Perubahan K/L dan Renja Perubahan provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya

dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022,

Pada bab ini memuat kajian (riview) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan Perangkat daerah sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan,

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telahan Terhadap Kebijakan Nasional yang menjelaskan menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD yang merupakan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup berupa Saran dan Kesimpulan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Bontoa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bontoa.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bontoa merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bontoa. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Bontoa ini menyajikan pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bontoa selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Bontoa 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Bontoa tahun 2023 dan Evaluasi Renja Perubahan Kecamatan Bontoa tahun berjalan tahun 2024 mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kecamatan Bontoa, antara lain :

a. **Realisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran sesuai yang direncanakan**

1. Pada tahun 2023 melaksanakan 9 kegiatan terkait Urusan dan 5 Kegiatan Non Urusan dari ke-14 kegiatan tersebut semuanya mencapai target meskipun tidak sampai seratus persen.
2. Kecamatan Bontoa pada tahun 2022 melaksanakan 32 sub

kegiatan. Dari 32 Sub kegiatan terdapat 2 sub kegiatan yang tidak mencapai target. Kecamatan Bontoa pada tahun 2023 melaksanakan 5 program dan terealisasi seluruhnya. Dari ke-5 program tersebut, dan semua program mencapai target.

b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adanya program/kegiatan yang tidak terealisasi;

1. Faktor penyebab adanya sub kegiatan Tahun 2023 yang belum memenuhi terget diakibatkan karena Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan

e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab diatas;

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MAROS

Nama OPD : Kec. Bontoa

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		**Nilai SAKIP**										**38**		**10,317,134,105**		**68**	**KEC BONTOA**
	Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota	**Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.**	**100**	**15,266,958,105**	**100**	**9,160,174,863**	**100**	**3,053,391,621**	**80.00**	**1,156,959,242**	**80**	**38**	**90**	**10,317,134,105**	**90**	**68**	**KEC BONTOA**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**55**	**48,000,000**	**33**	**28,800,000**	**11**	**9,600,000**	**3.00**	**5,345,000**	**27.27**	**55.68**	**36.00**	**34,145,000**	**65**	**71**	**KEC BONTOA**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	10,000,000	3	6,000,000	1	2,000,000	1.00	1,995,000	100	99.75	4.00	7,995,000	80	80	KEC BONTOA
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	5,000,000	3	3,000,000	1	1,000,000	1.00	900,000	100	90.00	4.00	3,900,000	80	78	KEC BONTOA
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	5,000,000	3	3,000,000	1	1,000,000	0.00	0	0	0.00	3.00	3,000,000	60	60	KEC BONTOA
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	5,000,000	3	3,000,000	1	1,000,000	0.00	855,000	0	85.50	3.00	3,855,000	60	77	KEC BONTOA
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	5,000,000	3	3,000,000	1	1,000,000	0.00	0	0	0.00	3.00	3,000,000	60	60	KEC BONTOA

	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	8,000,000	36	4,800,000	12	1,600,000	1.00	1,595,000	8.33333 3333	99.69	37.00	6,395,000	62	80	KEC BONTOA
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	10,000,000	12	6,000,000	4	2,000,000	0.00	0	0	0.00	12.00	6,000,000	60.0 0	60	KEC BONTOA
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Administrasi keuaangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**125**	**13,721,933,105**	**75**	**8,233,159,863**	**25**	**2,744,386,621**	**11.00**	**1,085,040,282**	**44**	**39.54**	**86.00**	**9,318,200,145**	**69**	**68**	**KEC BONTOA**
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2380	13,482,133,105	1428	8,089,279,863	476	2,696,426,621	196.00	1,063,240,282	41.1764 7059	39.43	1624.00	9,152,520,145	68.2 4	68	KEC BONTOA
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55	239,800,000	33	143,880,000	11	47,960,000	4.00	21,800,000	36.3636 3636	45.45	37.00	165,680,000	67.2 7	69	KEC BONTOA
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**667,025,000**	**6**	**400,215,000**	**6**	**133,405,000**	**3.00**	**25,333,960**	**50**	**18.99**	**4.5**	**425,548,960**	**75**	**64**	**KEC BONTOA**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	20,000,000	3	12,000,000	1	4,000,000	0.00	0	0	0.00	3.00	12,000,000	60.0 0	60	KEC BONTOA
	penyediaan peratalan rumah tangga	penyediaan peratalan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	30,000,000	3	18,000,000	1	6,000,000	0.00	0	0	0.00	3.00	18,000,000	60.0 0	60	KEC BONTOA
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	115,475,000	3	69,285,000	1	23,095,000	0.50	5,226,000	50	22.63	3.50	74,511,000	70.0 0	65	KEC BONTOA
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	7,000,000	3	4,200,000	1	1,400,000	0.00	0	0	0.00	3.00	4,200,000	60.0 0	60	KEC BONTOA
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	137,500,000	36	82,500,000	12	27,500,000	3.00	6,900,000	25	25.09	39.00	89,400,000	65.0 0	65	KEC BONTOA
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	357,050,000	36	214,230,000	12	71,410,000	5.00	13,207,960	41.6666 6667	18.50	41.00	227,437,960	68.3 3	64	KEC BONTOA
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**713,500,000**	**2**	**428,100,000**	**2**	**142,700,000**	**2.00**	**41,240,000**	**100**	**28.90**	**2**	**469,340,000**	**100**	**66**	**KEC BONTOA**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	43,000,000	36	25,800,000	12	8,600,000	5.00	2,500,000	41.6666 6667	29.07	41.00	28,300,000	68.3 3	66	KEC BONTOA
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	670,500,000	36	402,300,000	12	134,100,000	5.00	38,740,000	41.6666 6667	28.89	41.00	441,040,000	68.3 3	66	KEC BONTOA
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**2**	**116,500,000**	**2**	**69,900,000**	**2**	**23,300,000**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**1**	**69,900,000**	**50**	**60**	**KEC BONTOA**
	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110	101,500,000	66	60,900,000	22	20,300,000	0.00	0	0	0.00	66.00	60,900,000	60.0 0	60	KEC BONTOA
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	15,000,000	3	9,000,000	1	3,000,000	0.00	0	0	0.00	3.00	9,000,000	60.0 0	60	KEC BONTOA
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di kecamatan		**IKM PATEN**															**KEC BONTOA**
	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap**	**100**	**1,786,750,000**	**46.29**	**119,700,000**	**100**	**393,350,000**	**50.00**	**144,384,000**	**50**	**37**	**48**	**264,084,000**	**48**	**15**	**KEC BONTOA**

			Pelayanan Publik di Kecamatan															
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan**	**2**	**1,732,250,000**	**2**	**85,213,000**	**2**	**382,450,000**	**2.00**	**144,384,000**	**100**	**37.75**	**2**	**229,597,000**	**100**	**13**	**KEC BONTOA**
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	1,462,250,000	36	85,213,000	12	292,450,000	5.00	117,750,000	41.66666667	40.26	41.00	202,963,000	68.33	14	KEC BONTOA
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36	270,000,000			12	90,000,000	5.00	26,634,000	41.66666667	29.59	5.00	26,634,000	13.89	10	KEC BONTOA
	Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat	**Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat**	**Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat**	**3**	**54,500,000**	**3**	**34,487,000**	**3**	**10,900,000**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**1.5**	**34,487,000**	**50**	**63**	**KEC BONTOA**
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha	Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan non usaha	5	14,625,000	9	7,200,000	1	2,925,000	0.00	0	0	0.00	9.00	7,200,000	180.00	49	KEC BONTOA
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	5	10,125,000	25	9,737,000	1	2,025,000	0.00	0	0	0.00	25.00	9,737,000	500.00	96	KEC BONTOA
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	29,750,000	5	17,550,000	1	5,950,000	0.00	0	0	0.00	5.00	17,550,000	100.00	59	KEC BONTOA
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan		**IKM Desa/Kelurahan**															**KEC BONTOA**
	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan**	**100**	**73,150,000**	**30.04**	**30,810,000**	**100**	**14,630,000**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**15**	**30,810,000**	**15**	**42**	**KEC BONTOA**
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa	**Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa**	**Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**8**	**73,150,000**	**8**	**30,810,000**	**8**	**14,630,000**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**4**	**30,810,000**	**50**	**42**	**KEC BONTOA**
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30	73,150,000	10	30,810,000	6	14,630,000	0.00	0	0	0.00	10.00	30,810,000	33.33	42	KEC BONTOA
	Meningkatnya peran aktif perempuan di kecamatan dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi		**Persentase perempuan yang terlbat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi di kecamatan**															**KEC BONTOA**
	Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan	**Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100**	**1,386,000,600**	**42.26**	**333,369,300**	**100**	**277,200,120**	**50.00**	**30,900,000**	**50**	**11**	**46**	**364,269,300**	**46**	**26**	**KEC BONTOA**
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**4825**	**386,000,600**	**928**	**134,206,000**	**965**	**77,200,120**	**675.00**	**30,900,000**	**69.94818653**	**40.03**	**1603.00**	**165,106,000**	**33**	**43**	**KEC BONTOA**
	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10	185,750,000	6	85,296,000	2	37,150,000	1.00	30,900,000	50	83.18	7.00	116,196,000	70.00	63	KEC BONTOA

	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	200,250,600	2	48,910,000	3	40,050,120	0.00	0	0	0.00	2.00	48,910,000	13.33	24	KEC BONTOA
	Pemberdayaan kelurahan	**Pemberdayaan kelurahan**	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**100**	**1,000,000,000**	**60**	**199,163,300**	**20**	**200,000,000**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**60.00**	**199,163,300**	**60**	**20**	**KEC BONTOA**
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10	1,000,000,000	1	199,163,300	2	200,000,000	0.00	0	0	0.00	1.00	199,163,300	10.00	20	KEC BONTOA
	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban di kecamatan		**IKM Trantibun Linmas**															**KEC BONTOA**
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	**Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan**	**100**	**19,125,000**	**36.25**	**9,170,000**	**100**	**3,825,000**	**100.00**	**2,025,000**	**100**	**53**	**68**	**11,195,000**	**68**	**59**	**KEC BONTOA**
	Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	**375**	**19,125,000**	**100**	**9,170,000**	**75**	**3,825,000**	**75.00**	**2,025,000**	**100**	**52.94**	**175.00**	**11,195,000**	**47**	**59**	**KEC BONTOA**
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	19,125,000	3	9,170,000	1	3,825,000	1.00	2,025,000	100	52.94	4.00	11,195,000	80.00	59	KEC BONTOA
	Meningkatnya Akses Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan secara aktif		**IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan**															**KEC BONTOA**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**100**	**832,350,000**	**36.25**	**176,425,000**	**100**	**156,475,000**	**33.33**	**42,400,000**	**33**	**27**	**35**	**218,825,000**	**35**	**26**	**KEC BONTOA**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah**	**Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan**	**3**	**832,350,000**	**3**	**176,425,000**	**3**	**156,475,000**	**1.00**	**42,400,000**	**33.3333 3333**	**27.10**	**4.00**	**218,825,000**	**133**	**26**	**KEC BONTOA**
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4225	480,250,000	300	57,300,000	845	96,050,000	0.00	0	0	0.00	300.00	57,300,000	7.10	12	KEC BONTOA
	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	375	60,100,000	200	54,025,000	75	2,025,000	0.00	0	0	0.00	200.00	54,025,000	53.33	90	KEC BONTOA

	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	3500	292,000,000	400	65,100,000	700	58,400,000	600.00	42,400,000	85.7142 8571	72.60	1000.00	107,500,000	28.5 7	37	KEC BONTOA

2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bontoa

Kecamatan Bontoa merupakan perangkat daerah Kabupaten Maros sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat,koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa disamping itu juga camat bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Jika dilihat dari jenisnya, Pelayanan Adminitrasi Terpadu dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BONTOA
KABUPATEN MAROS

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM PATEN	✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
2	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM Trantibum Linmas	✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
3	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM DESA/Kelurahan	✓	3,25	3,26	3,25	3,25	3,26	3,26	

4	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan	✓	3,25	3,26	3,25	3,25	3,25	3,25	
5	Sasaran 4 : Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial dan Ekonomi	Persentase Perempuan Yang Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan	✓	33.81	39.97	40	50	48.35	53.20	
6	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM	✓	100	100	100	100	100	100	

Jumlah inidkator yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Bontoa ada 6 indikator yaitu : IKM Paten, IKM Trantibum Linmas, IKM Desa dan Kelurahan , IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan, Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam Kegiatan Pembangunan bidang Sosial dan ekonomi di Kecamatan, Persentase Masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar sesuai SPM, Ke 6 Indikator Tersebut semuanya mencapai target.

- Indikator 1. IKM Paten Kecamatan Bontoa sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamtan mencapai target , program pendukung penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- IKM Trantibum linmas sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan Ketertiban di kecamatan mencapai target , program pendukung Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum.
- IKM Desa/Kelurahan sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan mencapai target , Program pendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
- IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan sasaran meningkatnya akses masyarakat dalam kegiatan Keagamaan secara aktif, mencapai target program pendukung program Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.

- Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan bidang social dan ekonomi di kecamatan mencapai target, program pendukung program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

- Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan pelayanan dasar sesuai SPM,mencapai target program pendukung adalah program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontoa

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bontoa dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan,

NO	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK
1	Jumlah layanan terkait Kententraman dan Ketertibun umum belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan standar yang berlaku	Masih Lemahnya koordinasi Pelaksanaan tugas antar seksi dalam Pelaksanaan Kegiatan	IKM trantibun
2	Keterlibatan Perempuan dalam bidang pembangunan social dan Ekonomi	Kurangnya Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Pembangunan Social Dan Ekonomi	Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan Bidang social dan Ekonomi di Kecamatan
3	Keikut sertaan masyarakat dalam aktifiitas Keagamaan	Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam aktifitas Keagamaan	IKM Keagamaan
4	Tercapainya pelayanan kecamatan sesuai sesuai dengan SPM	Masih Kurangnya Kuantitas Dan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan Yang Kompeten	IKM Layanan

5	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kurangnya Kualitas Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	IKM Layanan

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Bontoa :

1) Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya dukungan SKPD Teknis terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
2) Masih rendahnya pemahaman Aparatur terhadap tugas pokok dan Fungsi
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana ASN masih terbatas

2. 4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maros

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Maros dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Bontoa dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Bontoa,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024
Provinsi /Kabupaten/Kota Maros

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Bontoa

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg	Lokasi	Indikator	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1		3	4	5	6	7		10	11	12	13	14
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**Kec. Bontoa**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**Nilai Sakip**	**95**	**2.974.906.254**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**Kec. Bontoa**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**Nilai Sakip**	**95**	**2.974.906.254**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Kec. Bontoa**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**2.974.906.254**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Kec. Bontoa**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**2.974.906.254**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	19	9.690.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	19	9.690.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	2	2.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen RKA-PD	Dokumen	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen RKA-PD	Dokumen	1	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	Dokumen	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	Dokumen	1	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen DPA-PD	Dokumen	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen DPA-PD	Dokumen	1	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	Dokumen	1	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	Dokumen	1	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD	Laporan	1	1.690.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD	Laporan	1	1.690.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	2.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Dokumen	24	2.610.181.254	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Dokumen	24	2.610.181.254
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec. Bontoa**	Jumlah ASN yang menerima gaji	Dokumen	12	2.570.691.254	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Kec. Bontoa**	Jumlah ASN yang menerima gaji	Dokumen	12	2.570.691.254
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	39.490.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Kec. Bontoa**	Jumlah Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	12	39.490.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	Jenis	7094	173.885.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	Jenis	7094	173.885.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kec. Bontoa**	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantoryang Disediakan	Paket	7	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Kec. Bontoa**	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantoryang Disediakan	Paket	7	5.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kec. Bontoa**	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yangDisediakan	Paket	25	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**Kec. Bontoa**	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yangDisediakan	Paket	25	6.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kec. Bontoa**	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangDisediakan	Paket	10	24.680.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Kec. Bontoa**	Jumlah Paket BahanLogistik Kantor yangDisediakan	Paket	10	24.680.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangDisediakan	Paket	2	4.190.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Paket BarangCetakan danPenggandaan yangDisediakan	Paket	2	4.190.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6800	27.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6800	27.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec. Bontoa**	JumlahLaporanPenyelenggaraanRapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Laporan	250	107.015.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Kec. Bontoa**	JumlahLaporanPenyelenggaraanRapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Laporan	250	107.015.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	1212	159.150.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	1212	159.150.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec. Bontoa**	JumlahLaporanPenyediaan JasaSurat Menyurat	Laporan	1200	9.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Kec. Bontoa**	JumlahLaporanPenyediaan JasaSurat Menyurat	Laporan	1200	9.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kec. Bontoa**	JumlahLaporanPenyediaan JasaPelayanan UmumKantor yangDisediakan	Laporan	12	150.150.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Kec. Bontoa**	JumlahLaporanPenyediaan JasaPelayanan UmumKantor yangDisediakan	Laporan	12	150.150.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik	Jenis	31	22.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik	Jenis	31	22.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec. Bontoa**	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara	Unit	30	17.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**Kec. Bontoa**	Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDipelihara	Unit	30	17.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kec. Bontoa**	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Kec. Bontoa**	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan LainnyayangDipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	5.000.000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	**Kec. Bontoa**		**IKM Paten**	**3,26**	**350.700.000**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan**	**Kec. Bontoa**		**IKM Paten**	**3,26**	**350.700.000**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kec. Bontoa**	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**Persen**	**100**	**350.700.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Bontoa**	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**Persen**	**100**	**350.700.000**

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Di Kecamatan	Kegiatan	13	70.300.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Di Kecamatan	Kegiatan	13	70.300.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan	Dokumen	1	10.300.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan	Dokumen	1	10.300.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Bontoa)	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan	Dokumen	12	60.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Bontoa)	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan	Dokumen	12	60.000.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	12	268.200.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	12	268.200.000
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Laporan	12	268.200.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Laporan	12	268.200.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kec. Bontoa**	Jumlah Urusan Pemerintahan yan didelegasikan kepada Camat dan terlaksana sesuai ketenrtuan yang berlaku	Urusan	19	12.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kec. Bontoa**	Jumlah Urusan Pemerintahan yan didelegasikan kepada Camat dan terlaksana sesuai ketenrtuan yang berlaku	Urusan	19	12.200.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usahayang Dilaksanakan	Dokumen	6	3.100.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usahayang Dilaksanakan	Dokumen	6	3.100.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	11	3.100.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	11	3.100.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan	Kegiatan	2	6.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan	Kegiatan	2	6.000.000
	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial Dan Ekonomi				**53,20**	**279.580.120**	**Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial Dan Ekonomi**	**Kec. Bontoa**		**Persen**	**53,20**	**279.580.120**
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kec. Bontoa**	**Presentase Partisipasi Aktif**	**Persen**	**100**	**279.580.120**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Bontoa**	**Presentase Partisipasi Aktif**	**Persen**	**100**	**279.580.120**
			Masyarakat di Kecamatan Dalam						**Masyarakat di Kecamatan Dalam**			
			Kegiatan Pembangunan						**Kegiatan Pembangunan**			

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec. Bontoa**	Jumlah Kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan	Kegiatan	4	79.580.120	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec. Bontoa**	Jumlah Kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan	Kegiatan	4	79.580.120
	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2	35.200.000	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	2	35.200.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Laporan	2	44.380.120	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diWilayah Kecamatan	Laporan	2	44.380.120
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan	Kegiatan	1	200.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan	Kegiatan	1	200.000.000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Kec. Bontoa**	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	paket	1	200.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Kec. Bontoa**	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	paket	1	200.000.000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketenteraman Dan ketertiban di Kecamatan	**Kec. Bontoa**		**IKM Trantibum Linmas**	**3,26**	**4.600.000**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketenteraman Dan ketertiban di Kecamatan**	**Kec. Bontoa**		**IKM Trantibum Linmas**	**3,26**	**4.600.000**
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kec. Bontoa**	**Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kecamatan**	**Persen**	**100**	**4.600.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Bontoa**	**Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kecamatan**	**Persen**	**100**	**4.600.000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kec. Bontoa**	Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan	Kegiatan	4	4.600.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kec. Bontoa**	Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan	Kegiatan	4	4.600.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Verertikal di Wilayah Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia danInstansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Laporan	4	4.600.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Verertikal di Wilayah Kecamatan	**Kec. Bontoa**	Jumlah Laporan HasilSinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia danInstansi Vertikal diWilayah Kecamatan	Laporan	4	4.600.000
	Meningkatnya Akses masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif	**Kec. Bontoa**		**IKM**	**3,25**	**117.950.000**	**Meningkatnya Akses masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif**	**Kec. Bontoa**		**IKM**	**3,25**	**117.950.000**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kec. Bontoa**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan**	**Persen**	**100**	**117.950.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Bontoa**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan**	**Persen**	**100**	**117.950.000**
			Ketahanan Nasional						**Ketahanan Nasional**			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan terkait Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Orang	900	117.950.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec. Bontoa**	Jumlah Orang yang mengikuti kegiatan terkait Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Orang	900	117.950.000

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kec. Bontoa**	Jumlah Orang yangMengikutiPembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalanPancasila ,PelaksanaanUndang-UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945,Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaanKeutuhan NegaraKesatuan RepublikIndonesia	Orang	400	68.700.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Kec. Bontoa**	Jumlah Orang yangMengikutiPembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalanPancasila,PelaksanaanUndang-UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun 1945,Pelestarian BhinnekaTunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaanKeutuhan NegaraKesatuan RepublikIndonesia	Orang	400	68.700.000
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**Kec. Bontoa**	Jumlah Orang yangMengikuti Fasilitasi,Koordinasi danPembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional	Orang	200	2.800.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	**Kec. Bontoa**	Jumlah Orang yangMengikuti Fasilitasi,Koordinasi danPembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) WawasanKebangsaan danKetahanan Nasional	Orang	200	2.800.000
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	**Kec. Bontoa**	Jumlah Orang yangMengikutiPembinaanKerukunan AntarSuku dan Intra Suku ,Umat Beragama, Ras,dan GolonganLainnya GunaMewujudkanStabilitas KeamananLokal, Regional, danNasional	Orang	300	46.450.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	**Kec. Bontoa**	Jumlah Orang yangMengikutiPembinaanKerukunan AntarSuku dan Intra Suku ,Umat Beragama, Ras,dan GolonganLainnya GunaMewujudkanStabilitas KeamananLokal, Regional, danNasional	Orang	300	46.450.000
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan	**Kec. Bontoa**		**IKM Desa/ Kelurahan**	**3,26**	**22.400.000**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan**	**Kec. Bontoa**		**IKM Desa/ Kelurahan**	**3,26**	**22.400.000**
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Kec. Bontoa**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	**Persen**	**100**	**22.400.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Bontoa**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan**	**Persen**	**100**	**22.400.000**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	12	22.400.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Dokumen	12	22.400.000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan AsetDesa	Dokumen	12	22.400.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	**Kec. Bontoa**	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan AsetDesa	Dokumen	12	22.400.000

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Bontoa pada tahun 2024 dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum diarahkan pada :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Menjadi Kewenangan Kecamatan dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur lingkup Kecamatan Bontoa
2. Peningkatan Kualitas pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan baik di Desa maupun Kelurahan
3. Upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
4. Peningkatan Kualitas Koordinasi Pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
5. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Bontoa maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel. 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
PROVINSI /KABUPATEN/KOTA MAROS

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Keterangan	Catatan
	Program Pemberdayaan Masyrakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Bontoa	Persentase partisipasi perempuan aktif masyarakat di kecamatan dalam kegiatan pembangunan			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Bontoa Kec.Bontoa	Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Bontoa Kec.Bontoa	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	Paket	Belanja modal Pembangunan drainase	Usulan Musrembang
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Bontoa Kec.Bontoa	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	Paket	Belanja Modal jalan setapak paving blok	Usulan Musrembang

BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamqatan Bontoa adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Bontoa

Table 3.1

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Bontoa mempunyai *tujuan* dan *sasaran*:

Tujuan	**sasaran**	**Indikator**
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM PATEN
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	IKM Trantib Linmas
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerinthan Desa /Kelurahan	IKM Desa /Kelurahan
Meningkatkan Peran serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	Meningkatnya akses Masyarakat dalam kegiatan Keagamaam secara aktif	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan
Meningkatkan Peran Serta Perempuan di Kecamatan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Atif Perempuan Di Kecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial dan ekonomi	Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam kegiatan pembangunanBidang social dan ekonomi
Meningkatkan kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan dasar Kecamatan	Meningkatnya Cakupan Pelayan Dasar Masyarakat Kecamatan sesuai SPM	Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

3.3. Telaahan terhadap Kebijakan Perubahan

I. Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2. Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 180/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kab Maros Tahun 2024
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
4. SE Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2024 Nomor 917/151/BKAD

II. Pokok Permasalahan

1. Terdapat Sub Kegiatan yang harus dilakukan Penyesuaian di karenakan mengalami Perubahan di dalam Sub Rincian Obyek Belanja yang berbeda.
2. Sehubungan dengan adanya kegiatan pada kantor kami, yang dimana tidak terdapat anggaran pada kegiatan tersebut maka kami mengajukan penambahan sub kegiatan dan anggarannya, yang mana kegiatan tersebut ada pada daftar terlampir.

III. Analisis dan Alasan Perubahan

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pada Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan,
- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Pada Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Kendaraan Hias)

Di lakukan Perubahan Untuk dialihkan ke Sub Kegiatan Fasilitasi Jamuan Tamu Pada Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu dengan alasan semakin bertambahnya Kegiatan dan Ke sementara Anggaran Makan Minum Tamu terbatas.

- Pada Sub Kegiatan “Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan” dilakukan Penambahan anggaran dan sub kegiatan **dikarenakan sesuai dengan kebutuhan.**

Tabel T-C 3.2

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAROS

No	URUSAN/BIDANG URUSANPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAB/SUB KEGIATAN	VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	**Nilai SAKIP**								
	Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.**			**3,053,391,621**	**3.061.591.621**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**9,600,000**	**9,600,000**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		**PAD**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2,000,000	2,000,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	1,000,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,600,000	1,600,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2,000,000	2,000,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**25 Dokumen**	**25 Dokumen**	**2,744,386,621**	**2,744,386,621**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		**DAU**

	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392	orang	392	orang	2,696,426,621	2,696,426,621	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	DAU
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11	Dokumen	11	Dokumen	47,960,000	47,960,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	DAU
	Administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**layanan**	**6**	**layanan**	**133,405,000**	**141.605.000**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		**PAD**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	4,000,000	4,000,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	penyediaan peratalan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	paket	1	paket	6,000,000	6,000,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	23,095,000	28.750.000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	1	paket	1,400,000	1,400,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	laporan	12	laporan	27,500,000	40.025.000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	12	laporan	71,410,000	61.430.000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**jenis**	**2**	**jenis**	**142,700,000**	**142,700,000**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	8,600,000	8,600,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	12	laporan	134,100,000	134,100,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	Non ASN Kec.Bontoa	PAD
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**					**23,300,000**	**23,300,000**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		**PAD**
	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	unit	20	unit	20,300,000	20,300,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	1	unit	3,000,000	3,000,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN Kec.Bontoa	PAD
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di kecamatan	**IKM PATEN**										
	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100**	**PERSEN**	**100**	**PERSEN**	**393,350,000**	**395.150.000**				
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan**	**3**	**urusan**	**3**	**urusan**	**382,450,000**	**383.350.000**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		**PAD**

	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	292,450,000	293.350.000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	Masyarakat	PAD
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	laporan	12	laporan	90,000,000	90,000,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	Masyarakat	PAD
	Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat	**Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat**					**10,900,000**	**11.800.000**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		**PAD**
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha	Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan non usaha	1	Dokumen	1	Dokumen	2,925,000	2,925,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	Masyarakat	PAD
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1	laporan	1	laporan	2,025,000	2.925.000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	Masyarakat	PAD
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	laporan	1	laporan	5,950,000	5,950,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	Masyarakat	PAD
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan	**IKM Desa/Kelurahan**										
	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan**					**14,630,000**	**14,630,000**				
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa	**Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**8**	**Dokumen**	**8**	**Dokumen**	**14,630,000**	**14,630,000**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**	**Desa**	**PAD**
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8	Dokumen	8	Dokumen	14,630,000	14,630,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	Desa	PAD
	Meningkatnya peran aktif perempuan di kecamatan dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi	**Persentase perempuan yang terlbat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi di kecamatan**										
	Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**277,200,120**	**277,200,120**				
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**600**	**orang**	**600**	**orang**	**77,200,120**	**77,200,120**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		**PAD**
	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2	Dokumen	2	Dokumen	37,150,000	37,150,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	Masyarakat	PAD
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	laporan	3	laporan	40,050,120	40,050,120	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	Kelompok Masyarakat	PAD

	Pemberdayaan kelurahan	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**2**	**kegiatan**	**2**	**kegiatan**	**200,000,000**	**200,000,000**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		**PAD**
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2	paket	2	paket	200,000,000	200,000,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	Masyarakat	PAD
	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	**IKM Trantibun Linmas**										
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	**Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**3,825,000**	**3,825,000**				
	Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	**75**	**orang**	**75**	**orang**	**3,825,000**	**3,825,000**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		**PAD**
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	laporan	1	laporan	3,825,000	3,825,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	TNI, Polri dan Masyarakat	PAD
	Meningkatnya Akses Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan secara aktif	**IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan**										
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**100**	**persen**	**100**	**persen**	**156,475,000**	**146.475.000**				
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah	**Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan**	**3**	**urusan**	**3**	**urusan**	**156,475,000**	**146.475.000**	**Kec. Bontoa**	**Kec. Bontoa**		**PAD**
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350	orang	350	orang	96,050,000	96,050,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN, SD, SMP, SMA, Desa dan Masyarakat Kec. Bontoa	PAD
	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, sosialisasi, konusltasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75	orang	75	orang	2,025,000	2,025,000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	TNI, Polri dan Masyarakat	PAD
	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	650	orang	650	orang	58,400,000	48.400.000	Kec. Bontoa	Kec. Bontoa	ASN, Masyarakat	PAD

BAB. IV PENUTUP

1. Saran dan Kesimpulan

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bontoa. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Bontoa ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Maros secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Ridha dan Petunjuk Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing. Amin**

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN CAMBA



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
KANTOR KEC. CAMBA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT dan atas segala limpahan rahmat , taufik dan inayahNya akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Camba Tahun 2024 telah terselesaikan.Maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Camba Tahun 2024 bertujuan secara umum sebagai penjabaran dari Dokumen Rencana Strategi Kecamatan Camba Tahun 2021-2026 yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, Gambaran Visi dan Misi , serta Rencana Pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (Satu) Tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Camba Tahun 2024 masih banyak keterbatasan . Akhirnya, semoga Rencana Kerja Kecamatan Camba Tahun 2024 dapat menjadi pedoman awal bagi penyusunan kebijakan Perencanaan dan Penganggaran serta menjadi masukan dalam Penyusunan rancanngan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024 guna mencapai target –target yang telah ditetapkan.

Maros, 13 Juli 2024

Camat camba

AL IKHSAN, S.Pt

NIP. 19690516 199903 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1. Latar Belakang .....

1.2. Landasan Hukum .....

1.3. Maksud dan Tujuan .....

1.4. Sistematika Penulisan .....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....

II.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah .....

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....

II.4. Review TerhadapTancangan Awal RKPD .....

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....

III.2. Tujuan dan SasaranRenja SKPD .....

III.3. Program dan Kegiatan .....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH……

IV.1 Rencana Kerja dan Pendanaan…….

BAB V PENUTUP …….

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 20214 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Pemerintah daerah untuk Menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaran Pemrintahaan.Prenecaaan adalah Suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan dengan memeperhatikan rencana kerja Perubahan Kecamatan Camba Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Sehubungan dengan itu, Kecamatan Camba Kabupaten Maros, sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Maros membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD tahun disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Camba Tahun 2021-2026. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Kecamatan Camba disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan.
2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3) Penyusunan Rancangan.
4) Penyusunan Rancangan Akhir
5) Penetapan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarakn Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 dan tetap mempedomani Renstara Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah Menjadi Pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Camba Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Adapun landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Camba Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangana Pendemi Corona Viru Disease 2019 (Covid – 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasidan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahn Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3;
30. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 34);

31. Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2023 Tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 nomor 36.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Camba Tahun 2024 adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Camba untuk periode 1 tahun sebagai Impelemntasi pelaksnaan rencana pembagunan jangka menengah Daerah dan Renstra perangkat daerah

Tujuan disusunnya Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Camba Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan, dan Sub.kegiatan ;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Kantor Kecamatan Camba
3. Membuat acuan perencanaan untuk mencapai Visi,Misi , Tujuan yang memuat Program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja , kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.
4. Sebagai Dasar Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Camba Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rentsra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022,

Pada bab ini memuat kajian (riview) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat daerah sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan,

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telahan Terhadap Kebijakan Nasional yang menjelaskan menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD yang merupakan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi tentang strategi Kebijakan dan Rencana kerja serta pendanaan indikatif.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa Saran dan Kesimpulan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Camba Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Camba.

Rencana Kerja Kecamatan Camba merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Camba. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Camba ini menyajikan pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Camba selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Camba 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Camba tahun 2023 dan Evaluasi renja Kecamatan Camba tahun berjalan tahun 2024 mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kecamatan Camba, antara lain :

a. Realisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran sesuai yang direncanakan

1. Kecamatan Camba pada tahun 2023 melaksanakan 6 program dan terealisasi seluruhnya. Dari ke-6 program tersebut semua mencapai target.
2. Kecamatan Camba pada tahun 2023 melaksanakan 14 kegiatan terkait urusan dan non urusan , dari ke 14 kegiatan tersebut yang mencapai target sebanyak 13 Kegiatan , sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 1 kegiatan
3. Kecamatan Camba pada tahun 2023 melaksanakan 31 sub kegiatan. Dari 31 Sub kegiatan yang terlaksanakan terdapat 29 sub.kegiatan yang mencapai target, 2 sub kegiatan yang tidak mencapai target.

b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adanya program/kegiatan yang tidak terealisasi;

1. Factor penyebab adanya Sub. kegiatan Tahun 2023 yang belum memenuhi target diakibatkan karena Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

   Faktor penyebab adanya program,kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 yang belum memenuhi terget diakibatkan karena Belum terealisasi anggaran tersebut karena masih masuk di Tahun berjalan , sementara Program dan Kegiatan lainnya terealisasi sesuai tujuan dan sasaran program melalui koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh pelaksana kegiatan dan seluruh stakeholder.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab diatas;

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MAROS

Nama OPD : Kecamatan Camba

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		**Nilai SAKIP**										**37.83303935**		**11,365,888,757**		**227,317,775,137**	**KEC CAMBA**
	Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota	**Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.**	**100**	**18,943,147,865**	**100**	**11,365,888,719**	**100**	**3,788,629,573**	**26.5**	**1,433,353,717**	**26.5**	**37.83303935**	**126.5**	**11,365,888,757**	**2,530**	**227,317,775,137**	**KEC CAMBA**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**55**	**21,000,000**	**33**	**12,600,000**	**11**	**4,200,000**	**4.0**	**0**	**36.36363636**	**0**	**69.36363636**	**12,600,000**	**1,387**	**252,000,000**	**KEC CAMBA**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	3000000	6	1800000	2	600,000	0.0	0	0	0	6	1800000	120	36,000,000	KEC CAMBA

	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	3,000,000	3	1800000	1	600,000	1.0	0	100	0	103	1800000	2,060	36,000,000	KEC CAMBA
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	3,000,000	3	1,800,000	1	600,000	0.0	0	0	0	3	1,800,000	60	36,000,000	KEC CAMBA
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	3,000,000	3	1,800,000	1	600,000	1.0	0	100	0	103	1,800,000	2,060	36,000,000	KEC CAMBA
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	3,000,000	3	1,800,000	1	600,000	0.0	0	0	0	3	1,800,000	60	36,000,000	KEC CAMBA
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	3,000,000	3	1,800,000	1	600,000	1.0	0	100	0	103	1,800,000	2,060	36,000,000	KEC CAMBA

	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	3,000,000	12	1,800,000	4	600,000	1.0	0	25	0	37	1,800,000	740	36,000,000	KEC CAMBA
	Administrasi keuangan perangkat daerah	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**125**	**17,157,098,785**	**75**	**10,294,259,271**	**25**	**3,431,419,757**	**11.0**	**1,385,543,217**	**44**	**40.37813253**	**119**	**10,294,259,311**	**2,380**	**205,885,186,228**	**KEC CAMBA**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2790	16,883,198,785	1674	10,129,919,271	558	3,376,639,757	252.0	1,360,643,217	45.16129032	40.29577672	1719.16129	10,129,919,311	34,383	202,598,386,226	KEC CAMBA
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55	273,900,000	33	164,340,000	11	54,780,000	5.0	24,900,000	45.45454545	45.45454545	78.45454545	164,340,045	1,569	3,286,800,909	KEC CAMBA
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian**	**5**	**38,750,000**	**3**	**23,250,000**	**1**	**7,750,000**	**0.0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**23,250,000**	**60**	**465,000,000**	**KEC CAMBA**
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	38,750,000	3	23,250,000	1	7,750,000	0.0	0	0	0	3	23,250,000	60	465,000,000	KEC CAMBA
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**780,799,080**	**6**	**468,479,448**	**6**	**156,159,816**	**4.0**	**31,627,500**	**66.66666667**	**20.25328975**	**72.66666667**	**468,479,468**	**1,453**	**9,369,589,365**	**KEC CAMBA**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	8,060,000	3	4,836,000	1	1,612,000	0.0	1,390,000	0	86.22828784	3	4,836,086	60	96,721,725	KEC CAMBA

	penyediaan peratalan rumah tangga	penyediaan peratalan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	17,110,000	3	10,266,000	1	3,422,000	0.0	1,024,000	0	29.92402104	3	10,266,030	60	205,320,598	KEC CAMBA
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	106,940,000	3	64,164,000	1	21,388,000	0.0	6,799,500	0	31.79119132	3	64,164,032	60	1,283,280,636	KEC CAMBA
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	27,000,000	3	16,200,000	1	5,400,000	0.0	900,000	0	16.66666667	3	16,200,017	60	324,000,333	KEC CAMBA
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	60	130,500,000	36	78,300,000	12	26,100,000	5.0	3,375,000	41.66666667	12.93103448	77.66666667	78,300,013	1,553	1,566,000,259	KEC CAMBA
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	491,189,080	36	294,713,448	12	98,237,816	5.0	18,139,000	41.66666667	18.46437628	77.66666667	294,713,466	1,553	5,894,269,329	KEC CAMBA
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**720,200,000**	**2**	**432,120,000**	**2**	**144,040,000**	**2.0**	**0**	**100**	**0**	**102**	**432,120,000**	**2,040**	**8,642,400,000**	**KEC CAMBA**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	43,200,000	36	25,920,000	12	8,640,000	5.0	0	41.66666667	0	77.66666667	25,920,000	1,553	518,400,000	KEC CAMBA
	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	677,000,000	36	406,200,000	12	135,400,000	5.0	0	41.66666667	0	77.66666667	406,200,000	1,553	8,124,000,000	KEC CAMBA
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang**	**2**	**225,300,000**	**2**	**135,180,000**	**2**	**45,060,000**	**2.0**	**16,183,000**	**100**	**35.91433644**	**102**	**135,180,036**	**2,040**	**2,703,600,718**	**KEC CAMBA**

			berda Dalam Kondisi Baik														
	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	193,750,000	18	116,250,000	6	38,750,000	1.0	10,000,000	16.66666667	25.80645161	34.66666667	116,250,026	693	2,325,000,516	KEC CAMBA
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	31,550,000	6	18,930,000	2	6,310,000	1.0	6,183,000	50	97.98732171	56	18,930,098	1,120	378,601,960	KEC CAMBA
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di kecamatan		**IKM PATEN**															**KEC CAMBA**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan		**IKM Desa/Kelurahan**															**KEC CAMBA**
	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100**	**2,107,650,000**	**61.39**	**1,019,536,999**	**100**	**610,490,000**	**75.0**	**206,014,500**	**75**	**33.7457616**	**136.39**	**1,019,537,033**	**2,728**	**20,390,740,655**	**KEC CAMBA**
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan**	**3**	**525,000,000**	**3**	**264,736,999**	**1**	**187,640,000**	**1.0**	**39,864,500**	**100**	**21.24520358**	**103**	**264,737,020**	**2,060**	**5,294,740,405**	**KEC CAMBA**

	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	38,200,000	3	88,245,666	1	7,640,000	0.0	0	0	0	3	88,245,666	60	1,764,913,320	KEC CAMBA
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	243,400,000	12	88,245,666	12	90,000,000	5.0	39,864,500	41.66666667	44.29388889	53.66666667	88,245,710	1,073	1,764,914,206	KEC CAMBA
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	243,400,000	12	88,245,666	12	90,000,000	5.0	0	41.66666667	0	53.66666667	88,245,666	1,073	1,764,913,320	KEC CAMBA
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan**	**5**	**1,532,400,000**	**4**	**754,800,000**	**1**	**412,800,000**	**1.0**	**163,250,000**	**100**	**39.54699612**	**104**	**754,800,040**	**2,080**	**15,096,000,791**	**KEC CAMBA**
	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	1,532,400,000	28	754,800,000	24	412,800,000	10.0	163,250,000	41.66666667	39.54699612	69.66666667	754,800,040	1,393	15,096,000,791	KEC CAMBA

	Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat	**Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat**	**Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat**	**3**	**50,250,000**	**3**	**18,500,000**	**2**	**10,050,000**	**0.0**	**2,900,000**	**0**	**28.85572139**	**3**	**18,500,029**	**60**	**370,000,577**	**KEC CAMBA**
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	15	20,000,000	9	3,600,000	1	4,000,000	0.0	0	0	0	9	3,600,000	180	72,000,000	KEC CAMBA
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	30,250,000	3	14,900,000	1	6,050,000	0.0	2,900,000	0	47.9338843	3	14,900,048	60	298,000,959	KEC CAMBA
	Meningkatnya peran aktif perempuan di kecamatan dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi		**Persentase perempuan yang terlbat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi di kecamatan**															**KEC CAMBA**
	Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan	**Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100**	**1,921,141,508**	**70.25**	**936,142,936**	**100**	**467,210,000**	**50.0**	**28,790,000**	**50**	**6.162111256**	**120.25**	**936,142,942**	**2,405**	**18,722,858,843**	**KEC CAMBA**
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**2100**	**718,941,508**	**1,200.00**	**538,097,508**	**525**	**66,110,000**	**350.0**	**28,790,000**	**66.66666667**	**43.54863107**	**1,266.67**	**538,097,552**	**25,333**	**10,761,951,031**	**KEC CAMBA**

	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10	195,150,000	5	95,546,000	2	39,030,000	1.0	28,790,000	50	73.76377146	55	95,546,074	1,100	1,910,921,475	KEC CAMBA
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	523,791,508	9	442,551,508	3	27,080,000	0.0	0	0	0	9	442,551,508	180	8,851,030,160	KEC CAMBA
	Pemberdayaan kelurahan	**Pemberdayaan kelurahan**	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**180**	**1,202,200,000**	**30**	**398,045,428**	**60**	**401,100,000**	**30.0**	**0**	**50**	**0**	**80**	**398,045,428**	**1,600**	**7,960,908,560**	**KEC CAMBA**
	Evaluasi kelurahan	Evaluasi kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4	2,200,000			2	1,100,000	0.0	0	0	0	0	0	0	0	KEC CAMBA
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	600,000,000	1	199,022,714	1	200,000,000	0.0	0	0	0	1	199,022,714	20	3,980,454,280	KEC CAMBA
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	600,000,000	1	199,022,714	1	200,000,000	0.0	0	0	0	1	199,022,714	20	3,980,454,280	KEC CAMBA
	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban di		**IKM Trantibun Linmas**															**KEC CAMBA**

	kecamatan																
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	**Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan**	**100**	**31,000,000**	**98.75**	**15,450,000**	**100**	**6,200,000**	**100.0**	**0**	**100**	**0**	**198.75**	**15,450,000**	**3,975**	**309,000,000**	**KEC CAMBA**
	Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	**1000**	**31,000,000**	**350**	**15,450,000**	**70**	**6,200,000**	**0.0**	**0**	**0**	**0**	**350**	**15,450,000**	**7,000**	**309,000,000**	**KEC CAMBA**
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	31,000,000	3	15,450,000	1	6,200,000	0.0	0	0	0	3	15,450,000	60	309,000,000	KEC CAMBA
	Meningkatnya Akses Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan secara aktif		**IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan**															**KEC CAMBA**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**100**	**330,900,000**	**52.25**	**193,545,000**	**100**	**110,300,000**	**50.0**	**16,300,000**	**50**	**14.77787851**	**102.25**	**193,545,015**	**2,045**	**3,870,900,296**	**KEC CAMBA**

	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah**	**Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan**	**2**	**330,900,000**	**2**	**193,545,000**	**2**	**110,300,000**	**1.0**	**16,300,000**	**50**	**14.77787851**	**52**	**193,545,015**	**1,040**	**3,870,900,296**	**KEC CAMBA**
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2500	160,950,000	1500	160,950,000	500	53,650,000	0.0	0	0	0	1500	160,950,000	30,000	3,219,000,000	KEC CAMBA

	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	2830	169,950,000	657	32,595,000	640	56,650,000	380.0	16,300,000	59.375	28.77316858	716.375	32,595,029	14,328	651,900,575	KEC CAMBA

2. **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Camba**

Kecamatan Camba merupakan perangkat daerah Kabupaten Maros sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat,koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa disamping itu juga camat bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Jika dilihat dari jenisnya, Pelayanan Adminitrasi Terpadu dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CAMBA
KABUPATEN MAROS

NO	INDOKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	IKM PATEN		✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
2	IKM Trantibum Linmas		✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
3	IKM DESA/Kelurahan		✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
4	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan		✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
5	Persentase Perempuan Yang Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan		✓	32,20	34,56	32,20	34,57	38,80	42,72	
6	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM		✓	100	100	100	100	100	100	

Jumlah inidkator yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Camba ada 6 indikator yaitu : IKM Paten, IKM Trantibum Linmas, IKM Desa dan Kelurahan , IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan, Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam Kegiatan Pembangunan bidang Sosial dan ekonomi di Kecamatan, Persentase Masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar sesuai SPM, Ke 6 Indikator Tersebut semuanya mencapai target.

- Indikator 1. IKM Paten Kecamatan Camba sasaran meningkatnya kualitas pelayanan

administrasi terpadu di Kecamtan mencapai target , program pendukung penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- IKM Trantibum linmas sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan Ketertiban di kecamatan mencapai target , program pendukung Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum.
- IKM Desa/Kelurahan sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan mencapai target , Program pendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
- IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan sasaran meningkatnya akses masyarakat dalam kegiatan Keagamaan secara aktif, mencapai target program pendukung program Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.
- Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan bidang social dan ekonomi di kecamatan mencapai target, program pendukung program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan pelayanan dasar sesuai SPM,mencapai target program pendukung adalah program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Camba

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Camba dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan,

No	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK
1	Jumlah layanan terkait kententraman dan ketertibun umum belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan standar yang berlaku	Kurang anggaran terkait pelaksanaan pelayanan	IKM trantibun
2	Keterlibatan Perempuan dalam bidang pembangunan social dan Ekonomi	Kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan social dan ekonomi	Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan Bidang social dan Ekonomi di Kecamatan
3	Keikut sertaan masyarakat	Kurangnya keterlibatan	IKM Keagamaan

	dalam aktifiitas Keagamaan	masyarakat dalam aktifitas keagamaan	
4	Tercapainya pelayanan kecamatan sesuai sesuai dengan SPM	Keterbatasan Sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas, Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki , sumber daya aparatur yang menguasai teknologi imformasi juga terbatas	IKM Layanan
5	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	IKM Layanan

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Camba :

1) Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya dukungan SKPD Teknis terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
2) Masih rendahnya pemahaman Aparatur terhadap tugas pokok dan Fungsi
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana ASN masih terbatas

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maros

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Maros dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Camba dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Camba,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan

Tabel 2.4. Review terhadap Perubahan Rancangan Awal RKPD
Tahun 2024 Provinsi /Kabupaten/Kota Maros

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Camba

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Camba**	**100**	**Persen**	***3.786.627.573***	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**3.793.042.573**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Camba**	***11***	***Dokumen***	***4.200.000***	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	***11 Dokumen***	***4.200.000***	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Camba	2	Dokumen	600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	600.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Camba	1	Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Camba	1	Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Camba	1	Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	600.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Camba	1	Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	600.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Camba	1	Dokumen	600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	600.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	Kecamatan Camba	4	Dokumen	600.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	4 Dokumen	600.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**Kecamatan Camba**	***25***	***Dokumen***	***3.431.419.757***	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	***25 Dokumen***	***3.431.419.757***	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Camba	58	Orang/ bulan	3.376.639.757	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/ bulan	3.376.639.757	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SkPD	Kecamatan Camba	11	Dokumen	54.780.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SkPD	11 Dokumen	54.780.000	
Administrasi Kepegawaian Daerah	**Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Kecamatan Camba**	***58***	***Orang***	***7.750.000***	**Administrasi Kepegawaian Daerah**	**Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	***58 Orang***	***7.750.000***	
Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kecamatan Camba	*1*	Paket	*7.750.000*	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	*1* Paket	*7.750.000*	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**Kecamatan Camba**	***6***	Layanan	***156.157.816***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	***6 Jenis***	***176.322.816***	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Camba	1	Paket	1.612.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1.612.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Camba	1	paket	3.422.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	1 paket	3.422.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Camba	1	paket	21.386.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	1 Paket	21.386.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Camba	1	Paket	5.400.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	5.400.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Camba	12	Laporan	26.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	54.765.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	Kecamatan Camba	12	Laporan	98.237.816	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	12 Laporan	98.237.816	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Camba**	***2***	***Jenis***	***144.040.000***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***2 Jenis***	***138.040.000***	
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedia jasa Surat	Kecamatan Camba	12	laporan	8.640.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terdistribusi	12 laporan	8.640.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Camba	12	laporan	135.400.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	129.400.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**Kecamatan Camba**	***2***	***Jenis***	***43.060.000***	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	***2 Jenis***	***43.060.000***	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Camba	6	unit	36.750.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	36.750.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Camba	2	unit	6.310.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 unit	6.310.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan**	**Kecamatan Camba**	**100**	**Persen**	**610.490.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan**	**100 Persen**	**610.490.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Camba**	**1**	**Urusan**	**187.640.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan**	**1 Urusan**	**187.640.000**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Sehat,)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Camba	1	Dokumen	7.640.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Sehat, BOP Kelurahan)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	1 Dokumen	7.640.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (BOP Kel. Campaniga)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kel. Campaniga	Kecamatan Camba	12	Dokumen	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (BOP Kelurahan Campaniga)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	12 Dokumen	90.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Sehat,)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan (Kel. Mario Pulana)	Kecamatan Camba	12	Dokumen	90.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (BOP Kelurahan Mario Pulana)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	1 Dokumen	90.000.000	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	Kecamatan Camba	**1**	**Layanan**	**412.8000.000**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**1 Layanan**	**412.800.000**	
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Camba	24	laporan	412.8000.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	24 laporan	412.8000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Camba**	**2**	**Urusan**	**10.050.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**2 Urusan**	**10.050.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaa Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Camba	4	Dokumen	4.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinzn Usaha yang dilaksanakan	1 Dokumen	4.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan	Kecamatan Camba	1	laporan	6.050.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan	1 laporan	6.050.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	Kecamatan Camba	**100**	**Persen**	**467.220.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100 Persen**	**467.220.000**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan Pemberdayaan desa yang dilaksanakan	Kecamatan Camba	525 Orang	kegiatan	66.120.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	520 Orang	66.120.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kecamatan Camba	2	Dokumen	39.030.000	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	2 Dokumen	39.030.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Camba	3	Laporan	27.090.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Layanan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	27.090.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKM Pelayan desa/kelurahan)	**Jumlah Masyarakat yang terlibat pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan**	**Kecamatan Camba**	**60**	**60 Orang**	**1.622.800.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKM Pelayan desa/kelurahan)**	**Jumlah Masyarakat yang terlibat pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan**	**60 Orang**	**1.622.800.000**	
Pembangunan sarana prasarana Kelurahan (Kel.Mario Pulana)	Jumlah saranan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Cempaniga)	Kecamatan Camba	1	Unit	200.000.000	Pembangunan sarana prasarana Kelurahan (Kel. Mario Pulana)	Jumlah saranan dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 Unit	200.000.000	
Pembangunan sarana prasarana Kelurahan (Kel.Cempaniga)	Jumlah saranan prasarana kelurahan yang terbangun (Kelurahan Cempaniga)	Kecamatan Camba	1	Unit	200.000.000	Pembangunan sarana prasarana Kelurahan (Kel.Cempaniga)	Jumlah saranan dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 Unit	200.000.000	
Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Camba	2	Laporan	1.100.000	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	1.100.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	Kecamatan Camba	**100**	**Persen**	**6.200.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	**100 Persen**	**6.200.000**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Masyarakat yang terlibatat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Kecamatan Camba	**70**	**Orang**	**6.200.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Masyarakat yang terlibatat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**70 Orang**	**6.200.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vetikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Camba	1	Laporan	6.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vetikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	6.200.000	
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**Kecamatan Camba**	**100**	**Persen**	**71.990.000**	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**Persen**	**83.290.000**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Urusan Pemerintah Daerah sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**Kecamatan Camba**	**2**	**Urusan**	**71.990.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintah Daerah sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**2 Urusan**	**83.290.000**	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Camba	500	Orang	31.090.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	500 orang	31.090.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Camba	1.220	Orang	40.900.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	64 orang	22.200.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Camba	0	Dokumen	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 dokumen	30.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	Kecamatan Camba	**100**	**Persen**	- -	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	**100 Persen**	**4.535.000**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**Kecamatan Camba**	**6**	**Desa**	-	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**6 Desa**	**4.535.000**	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Camba	6	Dokumen	-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	**4.535.000**	

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Camba pada tahun 2024 dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum diarahkan pada :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Menjadi Kewenangan Kecamatan dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur lingkup Kecamatan Camba
2. Peningkatan Kualitas pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan baik di Desa maupun Kelurahan
3. Upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
4. Peningkatan Kualitas Koordinasi Pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
5. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Camba maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel.2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
PROVINSI /KABUPATEN/KOTA MAROS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Camba

NO	PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**KECAMATAN CAMBA**	Persentase Prtisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan		
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	**KELURAHAN CEMPANIGA**	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	51 Paket	Usulan Musrenbang
1	Pembangunan Drainase, Jalan Lingkungan yang berada dikawasan kumuh	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah meter pembangunan Drainase (sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang Terbangun)	7 Meter	
2	Fasilitasi rapat ,Fasilitasi kunjungan dari Provinsi atau pusat	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
3	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar no.19 Camba	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket Pembangunan Pagar Sekolah (sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun)	1 Paket	
4	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar no.102 Inpres Cempaniga	Lingkungan Gattareng Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 paket	
5	Pemeliharaan Bangunan Gedung	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah meter Pemeliharaan Bangunan gedung sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	500 meter	
6	Pembangunan Bangunan Gedung	Lingkungan Gattareng Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan	-	

			yang terbangun		
7	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) SD.102 Cempaniga	Lingkungan Gattareng Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah meter Pembangunan Paving blok sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	30 meter	
8	Pekerjaan Pelebaran Jalan	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket pekerjaan Pelebaran jalan sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	3 Paket	
9	Rehabilitasi Pagar sekolah Menengah Pertama	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
10	Pekerjaan Pemasangan Beronjong dan pasangan batu	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 paket	
11	Perluasan jaringan perpipaan Air Bersih	Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	7000 meter	
12	Perluasan jaringan perpipaan Air Bersih	Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
13	Pembangunan Pagar Sekolah PAUD	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
14	Pengadaan Paving Blok Halama/Pelataran Sekolah PAUD	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
15	Pembangunan Drainase Lingkungan	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
16	Pembangunan Jembatan Baja dan Beton	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan	10 meter	

			yang terbangun		
17	Pengadaan Paving Blok Halaman/Pelataran Sekolah Dasar no.19 camba	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
18	Rehabilitasi Pagar Sekolah Menengah Pertama SMP 3 camba	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
19	Jalan Tani sector Tanaman pangan (Sumber dana DAK Fisik)	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah Unitsarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Unit	
20	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton,Pekerjaan jalan aspal,Pekerjaan Bahu Jalan	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
21	Pengadaan Dermaga dan pos jaga	Lingkungan Gattareng Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
22	Pengadaan Paving Blok Halaman/Pelataran Sekolah Dasar no.102 Cempaniga	Lingkungan Gattareng Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
23	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar	Lingkungan Gattareng Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah Ruang Kelas (sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun)	1 Ruang	
24	Jalan Tani Sektor Tanaman Pangan, (Sumber Dana DAK fisik)	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Unit	
25	Pembangunan Drainase Lingkungan	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	300 meter	
26	Pekerjaan Pemasangan Bronjong dan Pemasangan Batu	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan	1 Paket	

			yang terbangun		
27	Pekerjaan Pelebaran Jalan	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
28	Pendidikan dan pelatihan Calon Tenaga kerja melalui Balai Pelatihan Kerja, Pelatihan menjahit, Tata Boga,Tata Rias,computer dan security)	Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
29	Rehabilitasi Bangunan Gedung (Aula Kantor)	Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	50m2	
30	Pembangunan Bangunan Gedung (Sekretariat PKK Kelurahan Cempaniga	Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	42 m2	
31	Pekerjaan Saluran Jaringan Irigasi Primer dan saluran sekunder yang memiliki sumber air	Lingkungan Gattareng Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
32	Melakukan Rehabilitasi Pagar TMP Maccopa dan penyediaan listrik	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
33	Pembangunan Drainase Lingkungan	Lingkungan Gattareng Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah Meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	300 meter	
34	Jalan Tani sector Tanaman Pangan ,(Sumber Dana Dak Fisik)	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 unit	
35	Pekerjaan jaringan Perpipaan Air Bersih Perkotaan	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
36	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar no. 19 Camba	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan	1 Paket	

			yang terbangun		
37	Pengadaan Paving Blok Halaman / pelataran Sekolah menengah pertama (SMP Muhammadiyah Camba)	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
38	Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
39	Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama (SMP Muhammadiyah)	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
40	Pembangunan Drainase Lingkungan	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah Meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	5 meter	
40	Jalan tani sektor tanaman pangan	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Unit	
42	Pembangunan Drainase Lingkungan	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
43	Rehabilitasi Saluran njaringan irigasi Primer dan saluran sekunderyang memiliki sumber air (Rehabilitasi jaringan Irigasi permukaan)	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
44	Rehabilitasi Saluran njaringan irigasi Primer dan saluran sekunderyang memiliki sumber air (Pembangunan bangunan perkuatan tebing)	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
45	Rehabilitasi Saluran njaringan irigasi Primer dan saluran sekunderyang memiliki sumber air (Rehabilitasi jaringan Irigasi permukaan)	Lingkungan Gattareng Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
46	Pemasangan Guadrail rambu atau tanda peringatan , Warning lighttraffic light, Penerangan jalan umum (	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan	10 Unit	

	PJU) RPPJ Rambu Pandulu petunjuk jalan)		yang terbangun		
47	Pekerjaan saluran jaringan primer dan saluran sekunder yang memiliki sumber air	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
48	Pekerjaan Pelebaran jalan	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun		
49	Perluasan jaringan Perpipaan air bersih	Lingkungan Mallisu Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	100 meter	
50	Pekerasan Jalan,Pekerjaan jalan beton ,pekerjaan jalan aspal	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
51	Pembinaan layanan posyandu dan workshop kader posyandu	Lingkungan Tobonggae Kelurahan Cempaniga Kecamatan Camba	Jumlah Kegiatan Pembinaan Layanan Posyandu dan Worshop Kader Posyandu	1 Kegiatan	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**KECAMATAN CAMBA**	Persentase Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan		
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN	**KELURAHAN CEMPANIGA**	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	40 paket	Usulan Musrenbang
52	Rehabilitasi Bangunan Gedung	Lingkungan Mario Rt.003 Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Unit	
53	Pembangunan Pagar Sekolah PAUD	Lingkungan Mario, Rt.003 Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 paket	
54	Pembangunan Irigasi Air tanah dangkal (Sumur bor,sumber dana DAK Fisik)	Lingkungan Mario, Rt.003 Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	

55	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sumur bor,Sumber dana DAK Fisik)	Lingkungan Mario, Rt.003 Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 unit	
56	Jalan Tani sektor tanaman pangan (Sumber Dana DAK Fisik)	Lingkungan Mario, Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Unit	
57	Jalan Tani sector tanaman pangan (Sumber Dana DAK Fisik)	Lingkungan Mario, Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
58	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)	Lingkungan Mario, Rt.001 Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	300 meter	
59	Pembangunan jembatan Baja dan Beton	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
60	Penggantian jembatan dari jembatan kayu menjadi jembatan baja dan beton	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
61	Penggantian jembatan dari jembatan kayu menjadi jembatan baja dan beton	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
62	Pekerasan jalan, Pekerjaan jalan beton,pekerjaan jalan aspal,pekerjaan bahu jalan	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
63	Pekerjaan saluran jaringan irigasi primer dan saluran sekunder yang memiliki sumber air	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
64	Penggantian jembatan dari jembatan kayu menjadi jembatan baja dan beton	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
65	Perbaikan Railing Jembatan yang patah , perbaikan Lening jembatan	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	

66	Pekerjaan jalan, pekerjaan jalan beton Pekerjaan jalan aspal, pekerjaan bahu jalan	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
67	Pembangunan irigasi air tanah dangkal (sumur bor,sumber dana DAK Fisik)	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Unitt sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Unit	
68	Pekerasan jalan, Pekerjaan jalan beton,pekerjaan jalan aspal,pekerjaan bahu jalan	Lingkungan Mario Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1000 meter	
69	Pekerasan jalan, Pekerjaan jalan beton,pekerjaan jalan aspal,pekerjaan bahu jalan	Lingkungan Mario Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1000 meter	
70	Pekerjaan Pemasangan Bronjong dan Pasang batu	Lingkungan Mario Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
71	Pemasangan Guadrail Rambu atau tanda peringatan, Warning Raffic light, Penerangan jalan umum (PJU), RPPJ (rambu Pandulu Petunjuk Jalan	Lingkungan Mario Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
72	Perintis jalan	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
73	Perintis jalan	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
74	Perintis jalan	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
75	Pekerjaan Pemasangan Bronjong dan pasang batu	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Paket	
76	Pemasangan jembatan Baja dan beton	Lingkungan Barugae Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	

77	Pembanguna irigasiair tanah dangkal (Sumur bor,Sumber dana DAK Fisik)	Lingkungan Bonto Marannu Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Unit	
78	Pembangunan irigasi air tanah dangkal (Sumur bor, Sumber dana DAK Fisik)	Lingkungan Bonto Marannu Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Unit	
79	Pekerasan jalan, Pekerjaan jalan beton, Pekerjaan jalan aspal, pekerjaan Bahu jalan	Lingkungan Bonto Marannu Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 paket	
80	Pengadaan Paving blok Halaman /pelataran sekolah dasar	Lingkungan Bonto Marannu Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 paket	
81	Pembangunan pagar sekolah dasar	Lingkungan Bonto Marannu Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 paket	
82	Pembangunan jembatan Baja dan Beton	Lingkungan Bonto Marannu Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 paket	
83	Pengadaan pompa Air (Sarana Pendukung)	Lingkungan Bonto Marannu Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Unit	
84	Rehabilitasi Ruang Kelas sekolah dasar	Lingkungan Mario Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Ruang Kelas sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 ruang	
85	Pembangunan Gedung/ Ruang kelas/Ruang Guru Paud	Lingkungan Bonto Marannu Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Ruang Kelas sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Ruang	
86	Pembangunan Drainase Lingkungan	Lingkungan Bonto Marannu Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	200 meter	
87	Penambahan jaringan perpipaan air bersih pedesaan	Lingkungan Bonto Marannu Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	

88	Pembangunan irigasi Air Tanah dangkal (sumur bor,sumber dana DAK fisik)	Lingkungan Mario Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	1 Unit	
89	Penambahan jaringan perpipaan air bersih pedesaan	Lingkungan Mario Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
90	Pelatihan/ Bimtek kewirausahaan	Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan / bimtek Kewirausahaan	10 orang	
91	Penyediaan sarana Persampahan	Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di kelurahan yang terbangun	-	
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	DESA TIMPUSENG	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Timpuseng yang terbangun	14 Paket	Usulan Musrenbang
92	Pekerasan Jalan,Pekerasan jalan beton, Pekerasan jalan aspal,pekerjaan bahu jalan	Dusun bu'rung /Dusun Ara Desa Timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Timpuseng yang terbangun	1 paket	
93	Pembangunan Drainase Lingkungan	RT 05 Bonto-bonto dusun Matajang desa Timpuseng kecamatan Camba	Jumlah meter pembangunan drainase lingkungan (sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Timpuseng yang terbangun)	200 meter	
94	Pembangunan jalan Usaha Tani (perintisan dan peningkatan kualitas jalan usaha tani)	Poros Dusun Bu'rung dusun Ara Desa Timpuseg Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Timpuseng yang terbangun	-	
95	Pembangunan Bangunan gedung	RT 01 Dusun Matajang Desa Timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Timpuseng yang terbangun	1 unit	
96	Pekerasan jalan,Pekerjaan jalan beton,Pekerasan jalan aspal, pekerjaan Bahu Jalan	Poros HuloHolo-Ukke'e Desa Timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Timpuseng yang terbangun	1 paket	
97	Advokasi,sosialisasi dan Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non	Lingkup Desa Timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Timpuseng yang terbangun	-	

	formal dan informal				
98	Obat-obatan hewan	Lingkup Desa timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Timpuseng yang terbangun	1 paket	
99	Pekerjaan bendung irigasi (Lanjutan Pekerjaan Irigasi)	Dusun Matajang Desa Timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Timpuseng yang terbangun	250 meter	
100	Pemasangan Perangkat jaringan (Tower,Kabel LAN), pemasangan dan pemeliharan Peralatan jaringan	Dusun Arad an Dusun Bu'rung Desa Timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Timpuseng yang terbangun	1 unit	
101	Pembangunan bangunan Gedung	RT 01 Dusun Matajang Desa Timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Timpuseng yang terbangun	-	
102	Pengakurasian data kemiskinan dalam DTKS secara optimal	Lingkup Desa timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Timpuseng yang terbangun	-	
103	Penyediaan bibit /benih air tawar (Nila, lele,mas)	Lingkup Desa timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah ekor penyediaan binit/benih air tawar (Nila,Lele,Mas)	20.000 Ekor	
104	Penyediaan Sarana dan Prasarana budidaya ikan air tawar	Lingkup Desa timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Timpuseng yang terbangun	1 Paket	
105	Pembangunan jembatan baja dan Beton	Poros dusun Bu'rung-dusun Ara Desa timpuseng Kecamatan Camba	Jumlah metert sarana dan prasarana pelayanan umum di Timpuseng yang terbangun	25 meter	
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	DESA SAWARU	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Sawaru yang terbangun	10 Paket	Usulan Musrenbang
106	Pekerasan jalan, Pekerjaan jalan beton, Pekerasan Jalan Aspal,pekerjaan bahu jalan	Dusun Tajo desa sawaru kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Sawaru yang terbangun	1 Paket	
107	Pekerasan jalan, Pekerjaan jalan beton, Pekerasan Jalan Aspal,pekerjaan bahu jalan	Dusun Tajo desa sawaru kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Sawaru yang		

			terbangun		
108	Pengadaan Gedung BKB dn Perlengkapan Sarana Kelompok Kegiatan	Dusun Sawaru desa sawaru kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Sawaru yang terbangun	-	
109	Pekerasan jalan, Pekerjaan jalan beton, Pekerasan Jalan Aspal,pekerjaan bahu jalan	Dusun Campulili, dan dusun tajo desa sawaru kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Sawaru yang terbangun	1 paket	
110	Pekerasan jalan, pekerjaan jalan beton, pekerjaan jalan aspal, pekerjaan bahu jalan	Desa sawaru kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Sawaru yang terbangun	1 Paket	
111	Pekerasan jalan, pekerjaan jalan beton, pekerjaan jalan aspal, pekerjaan bahu jalan	Dudun campulili dan Dusun Tajo Desa Sawaru kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Sawaru yang terbangun	1 paket	
112	Pekerjaan Pemasangan Bronjong dan pasang batu	Dusun sawaru Desa Sawaru	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Sawaru yang terbangun	1 paket	
113	Penyediaan Bibit/benih air tawar (nila,lele,mas)	Desa sawaru kecamatan Camba	Penyediaan Bibit/benih air tawar (nila,lele,mas)	10.000 Ekor	
114	Melakukan rehabilitasi pagar TMP maccopa dan penyediaan listrik di TMP Camba	Dusun padanglohe Desa sawaru kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di desa Sawaru yang terbangun	-	
115	Pendampingan pembuatan dan penyusunan proposal bantuan sarana dan prasarana	Desa sawaru kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Sawaru yang terbangun	-	
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	DESA CENRANA	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun	14 paket	Usulan Musrenbang
116	Pekerjaan Pelebaran Jalan	Jln Poros Pising menuju dusun Tanah tengnga Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun	I paket	
117	Pekerjaan Pelebaran Jalan	Jln Poros Pising menuju dusun Tanah tengnga Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun	I paket	

118	Pekerasan jalan, Pekerasan jalan beton, Pekerjaan jalan aspal, Pekerjaan bahu jalan	Dusun holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun	1 Paket	
119	Pembangunan Jembatan baja dan beton	Dusun Kajuara Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah meter Pembangunan Jembatan baja dan beton (sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun)	20 mtr	
120	Pekerjaan pelebaran jalan	Dusun Panagi Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun	1 Paket	
121	Pembagunan pagar sekolah dasar	Dusun Kajuara Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun	1 Paket	
122	Pembangunan jalan Lingkungan (Paving blok)	Dusun Panagi Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun	2000 meter	
123	Pembangunan drainse lingkungan	Dusun Panagi Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun	1000 meter	
124	Pelayanan di posyandu lansia dan fasilitas kesehatan	Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah Pelayanan di posyandu lansia dan Fasilitas kesehatan	1 orang	
125	Pekerasan jalan, pekerasan jalan beton,pekerasan jalan aspal,pekerasan bahu jalan	Dusun Benteng Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun	-	
126	Pekerasan jalan, pekerasan jalan beton,pekerasan jalan aspal,pekerasan bahu jalan	Dusun Benteng Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun	-	
127	Pekerasan jalan, pekerasan jalan beton,pekerasan jalan aspal,pekerasan bahu jalan	Dusun Panagi Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun		
128	Pekerjaan Pemasangan Bronjong dan pasangan batu	Dusun Benteng Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah pelayanan umum di Desa Cenrana Jumlah paket sarana dan prasarana yang terbangun		

129	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal (Sumur Bor,Sumber Dana DAK Fisik)	Dusun Kajuara Desa Cenrana Kecamatan Camba	Jumlah unit sarana dan Prasarana pelayanan umum di Desa Cenrana yang terbangun	1 Unit	
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	DESA CENRANA	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Pattiro Deceng yang terbangun		Usulan Musrenbang
130	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	Dusun ujung desa Pattirodeceng Kecamatan Camba	Jumlah kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda yang difasilitasi	1 Kegiatan	
131	Penggantian kabel instalasi listrik	Dusun maddenge desa Pattirodeceng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Pattiro Deceng yang terbangun	-	
132	Pengadaan paving blok halaman/pelataransekolah PAUD	Dusun Satoa desa Pattirodeceng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Pattiro Deceng yang terbangun	-	
133	Pembangunan pagar sekolah PAUD	Dusun ujung desa Pattirodeceng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Pattiro Deceng yang terbangun	1 Paket	
134	Pengadaan paving blok halaman/pelataran sekolah PAUD	Dusun ujung desa Pattirodeceng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Pattiro Deceng yang terbangun	1 Paket	
135	Pengadaan paving blok halaman/pelataran sekolah PAUD	Dusun ujung desa Pattirodeceng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Pattiro Deceng yang terbangun	1 Paket	
136	Perintisan jalan	Dusun maddenge desa Pattirodeceng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Pattiro Deceng yang terbangun	1 paket	
137	Jalan Tani sektor tanaman pangan, (Sumber Dana DAK Fisik)	Dusun Ujung desa Pattirodeceng Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Pattiro Deceng yang terbangun	300 meter	
138	Pekerjaan Pemasangan Bronjong dan pasangan batu	Dusun Ujung Desa Pattirodeceng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Pattiro Deceng yang terbangun	1 Paket	

139	Bimtek Pembuatan Branding hasil produk UMKM	Desa Pattirodeceng Kecamatan Camba	Jumlah kegiatan Bimtek Pembuatan Branding hasil produk UMKM	1 Kegiatan	
140	Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi program KKBPK di sektor lain	Dusun Satoa Desa Pattirodeceng Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Pattiro Deceng yang terbangun		
	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM	DESA PATANNYAMANG	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	13 Paket	Usulan Musrenbang
141	Pembangunan jembatan baja dan beton	Dusun Lalebata desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	1 Paket	
142	Pembangunan jembatan baja dan beton	Dusun Lalebata desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	1 Paket	
143	Rehabilitasi bangunan gedung	Dusun Lalebata Desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah Unit sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	1 Unit	
144	Peningkatan layanan Kesehatan Pos Kesehatan Desa	Desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	1 Paket	
145	Peningkatan layanan Kesehatan Pos Kesehatan Desa	Dusun Lalebata Desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	1 paket	
146	Pekerjaan Bendung Irigasi	Dusun Mangngai Desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	300 meter	
147	Rehabilitasi Pagar Sekolah Menengah Pertama	Dusun Mangngai Desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	1 Paket	
148	Pengadaan Bibit Ternak (sapi)	Desa Patanyamang	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak (sapi)	1 ekor	
149	Pekerasan Jalan, pekerasan Jalan Beton, Pekerasan	Dusun Bontotangnga Desa Patanyamang	Jumlah paket sarana dan prasarana	4 paket	

	jalan aspal, pekerasan bahu jalan	Kecamatan Camba	pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun		
150	Pembangunan Drainase Lingkungan	Dusun Bontotangnga Desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah meter sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	5.500 meter	
151	Pemasangan perangkat jaringan (Tower,Kabal LAN) , pemasangan dan pemeliharaan peralatan jaringan (Towerdan WIFI)	Dusun Lalebata Desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	1 unit	
152	Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	Dusun Lalebata Desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	paket	
153	Pekerasan jalan, Pekerasan jalan beton , Pekerasan jalan aspal, Pekerasan Bahu Jalan	Dusun Bontotangnga Desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	4 paket	
154	Pekerasan jalan, Pekerasan jalan beton , Pekerasan jalan aspal, Pekerasan Bahu Jalan	Dusun Mangngai Desa Patanyamang Kecamatan Camba	Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan umum di Desa Patanyamang yang terbangun	4 paket	

BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TelaahTerhadapKebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Camba adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Camba

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Camba mempunyai *tujuan* dan *sasaran*:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja
1	2	3	4	5
	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	Nilai Sakip	BB
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM Paten	IKM	3,26

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	IKM Trantibum Linmas	IKM	3,26
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat pada tingkat Pemerintahan Desa / Kelurahan	IKM Desa / Kelurahan	IKM	3,26
2	**Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan**	**IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan**		
	Meningkatnya Akses Masyarakat Dalam Keagamaan Secara Aktif	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan	IKM	3,26
3	**Meningkatkan Peran Serta Perempuan Di Kecamatan Dalam Pembangunan**	**Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial dan Ekonomi di Kecamatan**		
	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan di Kecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial dan Ekonomi	Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial dan Ekonomi di Kecamatan	Persen	37,08
4	**Meningkatkan Kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar di Kecamatan sesuai standar Pelayanan Minimal**	**Persentase Masyarakat Kecamatan Yang mendapatkan Pelayanan Dasaruai SPM**		
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Kecamatan sesuai SPM	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang mendapatkan Pelayanan Dasaruai SPM	Persen	100

3.3. Program Dan Kegiatan

I Pokok Permasalahan

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian dikarenakan , ada beberapa kegiatan yang tidak cukup anggaranya, sedangkan kegiatan lain ada kelebihananggaran.

II Analisis dan Alasan Perubahan

1. Pada Sub Kegiatan “Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional” dilakukan pengurangan pada Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan , Belanja Jasa Tenaga Ahli, belanja makanan dan minuman pengajian dan belanja jasa peyelenggara acara untuk dialihkan pada belanja makanan dan minuman jamuan tamu dikarenakan dana yang tesedia tidak cukup
2. Pada Sub Kegiatan “ Penyediaan jasa penunjang urusan kantor dialihkan untuk belanja makanan dan minuman jamuan tamu dikarenakan dana yang tesedia tidak cukup
3. Pada Sub Kegiatan “ Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dialihkan untuk belanja makanan dan minuman jamuan tamu dikarenakan dana yang tesedia tidak cukup

4. Pada sub kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu dilakukan penambahan anggarandisebabkan karena akan di laksanakan PILKADA serentak di Kab. Maros

III Kesimpulan

Dengann adanya perubahan anggaran ini diharapkan agar semua belanja yang terdapat pada DPA Kantor Kecamatan Camba dapat tercukupi dan tepat sasaran, dan akan disesuaikan dengan anggaran kas perubahan.

1. Program

Jumlah Program yang akan dilaksanakan Tahun 2024 adalah **6 Program** yaitu:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- **Jumlah Kegiatan** Yang dilaksanakan tahun 2024

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran Program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sebanyak **14 Kegiatan** :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi KepegawaianDaerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
8. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
10. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
12. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
13. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
14. Fasilitasi, Rekomendasi, koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- Dan Jumlah Sub. Kegiatan sebanyak 36

1. Total Kebutuhan dana / pagu indikatif untuk Anggaran tahun 2024 menurut sumber pendanaannya

   i. DAU Rp. 3.431.419.757
   ii. PAD Rp. 1.513.357.816

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Perubahan Program Dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Camba dapat dilihat pada lampiran.

TABEL 3.2. RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
							VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
							SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
1					2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**				**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**Nilai SAKIP Kecamatan**			**4,942,527,573**	**4,964,777,573**				
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3,786,627,573**	**3,793,042,573**	Kec Camba	Kec Camba		
7	01	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	11 Dok	11 Dok	4,200,000	4,200,000	Kec Camba	Kec Camba		
7	01	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	600,000	600,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dok	1 Dok	600,000	600,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dok	1 Dok	600,000	600,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dok	1 Dok	600,000	600,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dok	1 Dok	600,000	600,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD

7	01	01	2	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Dok	1 Dok	600,000	600,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	600,000	600,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	25 Dokumen	25 Dokumen	3,431,419,757	3,431,419,757				
7	01	01	2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan	3,376,639,757	3,376,639,757	Kec Camba	Kec Camba		DAU
7	01	01	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	54,780,000	54,780,000	Kec Camba	Kec Camba		DAU
7	01	01	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian	58 Orang	58 Orang	7,750,000	7,750,000				
7	01	01	2	05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	7,750,000	7,750,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	6 Layanan	6 Layanan	156,157,816	176,322,816				
7	01	01	2.1	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	1,612,000	1,612,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2.1	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	3,422,000	3,422,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD

7	01	01	2.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik yang ada	1 Paket	1 Paket	21,386,000	21,386,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2.1	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5,400,000	5,400,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2.1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	26,100,000	54,765,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2.1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	98,237,816	89,737,816	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	144,040,000	138,040,000				
7	01	01	2.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8,640,000	8,640,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	135,400,000	129,400,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik	2 Jenis	2 Jenis	43,060,000	43,060,000				
7	01	01	2.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit	6 Unit	36,750,000	36,750,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	01	2.1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	6,310,000	6,310,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD

1	**2**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan**				**Indeks Kepuasan masyarakat**								
7	**01**	**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**610,490,000**	**610,490,000**				
7	01	02	2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan	1 Urusan	1 Urusan	187,640,000	187,640,000				
7	01	02	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sehat)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sehat)	1 Dok	1 Dok	7,640,000	7,640,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	02	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Cempaniga)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Cempaniga)	12 Laporan	12 Laporan	90,000,000	90,000,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	02	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Mario Pulana)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kelurahan Mario Pulana)	12 Laporan	12 Laporan	90,000,000	90,000,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	02	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan pada tingkat Kecamatan	1 Layanan	1 Layanan	412,800,000	412,800,000				
7	01	02	2	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Efektifitas Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan	12 Laporan	24 Laporan	412,800,000	412,800,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	02	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yan didelegasikan kepada Camat dan terlaksana sesuai ketenrtuan yang berlaku	2 Urusan	2 Urusan	10,050,000	10,050,000				

7	01	02	2	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	4,000,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	02	2	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	6,050,000	6,050,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
1	**3**	**Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial Dan Ekonomi**				**Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang social dan ekonomi di Kecamatan**	**37,08 Persen**	**37,08 Persen**						
7	**01**	**03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**467,220,000**	**467,220,000**				
7	01	03	2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah masyarakat yang terlibat pada Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	525 Orang	520 Orang	66,120,000	66,120,000				
7	01	03	2	02	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	39,030,000	39,030,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	03	2	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah LaporanPeningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	27,090,000	27,090,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	03	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Masyarakat yang Terlibat Pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Dilaksanakan	60 Orang	60 Orang	401,100,000	401,100,000				

7	01	03	2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Cempaniga)	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	Kec Camba	Kec Camba		DAU
7	01	03	2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Mario Pulana)	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	Kec Camba	Kec Camba		DAU
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	1,100,000	1,100,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
1	**4**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketenteraman Dan ketertiban di Kecamatan**				**Indeks kepuasan Masyarakat**								
7	**01**	**04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan Pelanggaran Perda di Wilayah Kecamatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**6,200,000**	**6,200,000**				
7	01	04	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70 Orang	70 Orang	6,200,000	6,200,000				
7	01	04	2	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Verertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	6,200,000	6,200,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
1	**5**	**Meningkatnya Akses masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif**				**Indeks kepuasan Masyarakat**								

7	**01**	**05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**100 Persen**	**100 Persen**	**71,990,000**	**83,290,000**				
7	01	05	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	2 Urusan	3 Urusan	71,990,000	83,290,000				
7	01	05	2	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	500 Orang	500 Orang	31,090,000	31,090,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	05	2	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Ummat Beragama Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.220	640	40,900,000	22,200,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
7	01	05	2		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan hasil pelaksaan tigas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	0	3 Laporan	-	30,000,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD
1	**6**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan**				**Indeks kepuasan Masyarakat**								

7	**01**	**06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan**	-	**100 Persen**	-	**4,535,000**				
7	01	06	2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	-	6 Desa	-	4,535,000				
7	01	06	2	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Asset Desa	0	6 Laporan	-	4,535,000	Kec Camba	Kec Camba		PAD

BAB. IV PENUTUP

1. Saran dan Kesimpulan

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Camba. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Camba ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Maros secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Ridha dan Petunjuk Allah SWT, semoga rencana kerja Perubahan anggaran telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing. Amin.**

Maros, 2024

C A M A T

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN CAMBA

AL IKHSAN, S.Pt

Nip : 19690516 199903 1004







KECAMATAN BANTIMURUNG

RENJA PERUBAHAN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1. Latar Belakang .....
1.2. Landasan Hukum.....
1.3. Maksud dan Tujuan .....
1.4. Sistematika Penulisan .....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....
II.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah .....
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....
II.4. Review TerhadapTancangan Awal RKPD .....
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....
III.2. Tujuan dan SasaranRenja SKPD .....
III.3. Program dan Kegiatan .....

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....

IV.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....

BAB V PENUTUP.....

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya akhirnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bantimurung Tahun 2024 telah terselesaikan. maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Bantimurung Tahun 2024 bertujuan secara umum sebagai Penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Bantimurung Tahun 2021-2026 yang memuat Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah, Gambaran Visi dan Misi, serta Rencana Pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantimurung Tahun 2024 masih banyak keterbatasan. Akhirnya, semoga Rencana Kerja Kecamatan Bantimurung Tahun 2024 dapat menjadi Pedoman awal bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024 guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Maros, 31 Juli 2024
C A M A T



MUHAMMAD ARIS, S,Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I /IVb
Nip : 19700717 200003 1 006

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 20214 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Pemerintah daerah untuk Menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaran Pemrintahaan.Prenecaaan adalah Suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan dengan memeperhatikan rencana kerja Kecamatan Bantimurung Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA PERUBAHAN merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Sehubungan dengan itu, Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Maros membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD). Renja Perubahan PD tahun disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bantimurung Tahun 2021-2026. Renja Perubahan PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Kecamatan Bantimurung disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan.
2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan Perangkat Daerah
3) Penyusunan Rancangan.

4) Penyusunan Rancangan Akhir
5) Penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarakn Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 dan tetap mempedomani Renstara Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah Menjadi Pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bantimurung Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Adapun landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah :
    1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587),

6. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangana Pendemi Corona Viru Disease 2019 (Covid – 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasidan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-;

25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahn Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2).
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3;
31. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 34);
32. Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2023 Tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 nomor 36.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Bantimurung Tahun 2024 adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Bantimurung untuk periode 1 tahun sebagai Impelemntasi pelaksnaan rencana pembagunan jangka menengah Daerah dan Renstra perangkat daerah

Tujuan disusunnya Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Bantimurung Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan, dan Sub.kegiatan ;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Kantor Kecamatan Bantimurung
3. Membuat acuan perencanaan untuk mencapai Visi,Misi , Tujuan yang memuat Programdan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja , kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.
4. Sebagai Dasar Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rentsra Perangkat Daerah, dengan Renja Perubahan K/L dan Renja Perubahan provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022,

Pada bab ini memuat kajian (riview) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan Perangkat daerah sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan,

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telahan Terhadap Kebijakan Nasional yang menjelaskan menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD yang merupakan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi tentang strategi Kebijakan dan Rencana kerja serta pendanaan indikatif.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa Saran dan Kesimpulan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Bantimurung Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Bantimurung.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Bantimurung merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bantimurung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Bantimurung ini menyajikan pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bantimurung selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Bantimurung 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Bantimurung tahun 2023 dan Evaluasi Renja Perubahan Kecamatan Bantimurung tahun berjalan tahun 2024 mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kecamatan Bantimurung, antara lain :

a. Realisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran sesuai yang direncanakan

1. Pada tahun 2023 melaksanakan 9 kegiatan terkait Urusan dan 5 Kegiatan Non Urusan dari ke-14 kegiatan tersebut semuanya mencapai target meskipun tidak sampai seratus persen.

2. Kecamatan Bantimurung pada tahun 2022 melaksanakan 32 sub kegiatan. Dari 32 Sub kegiatan terdapat 2 sub kegiatan yang tidak mencapai target. Kecamatan Bantimurung pada tahun 2023 melaksanakan 5 program dan terealisasi seluruhnya. Dari ke-5 program tersebut, dan semua program mencapai target.

b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adanya program/kegiatan yang tidak terealisasi;

1. Faktor penyebab adanya sub kegiatan Tahun 2023 yang belum memenuhi terget diakibatkan karena Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan

e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab diatas;

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MAROS

Nama OPD : Kec. Bantimurung

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Satuan	Target akhir periode RENSTRA (2026)	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2023	Target Tahun 2023	Kinerja Triwulan IV Tahun 2023		Besaran anggaran yang digunakan (Rp)			Realisasi Fisik (%)	Keterangan
							Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6 = 8/5 x 100	7	8	9= 8/7 x 100	9	10	11	12	13
1	**1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**Nilai SAKIP Kecamatan**	**Nilai Sakip**	**89**	**68,27**	**69**	**60,76**	**88,06**	**3.917.067.154**	**3.744.952.181**	**95,61**	**99,17**	
7	**01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**72**	**100**	**72**	**72**	**3.917.067.154**	**3.744.952.181**	**9561%**	**99,17**	
7	01 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	19	100,00	17	19	111,76	6.745.000	6.450.000	95,63	100,00	
7	01 01 2,01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen	11	18	2	2	100	1.235.000	1.195.000	96,76	100,00	
7	01 01 2,01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	Dokumen	5	20	1	1	100	760.000	745.000	98,03	100,00	
7	01 01 2,01 03 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	Dokumen	5	20	1	1	100	760.000	730.000	96,05	100,00	
7	01 01 2,01 04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	Dokumen	5	20	1	1	100	760.000	730.000	96,05	100,00	
7	01 01 2,01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	Dokumen	5	20	1	1	100	760.000	700.000	92,11	100,00	
7	01 01 2,01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Dokumen	5	20	1	1	100	1.235.000	1.115.000	90,28	100,00	
7	01 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	Dokumen	60	20	12	12	100	1.235.000	1.235.000	100,00	100,00	
7	01 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Dokumen	355	8,45	71	30	42,25	3.486.949.654	3.398.272.435	97,46	100,00	
7	01 01 2,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaj	Orang	1260	45,71	840	576	68,57	3.447.459.654	3.358.782.435	97,43	100,00	
7	01 01 2,02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	11	100,00	11	11	100,00	39.490.000	39.490.000	100,00	100,00	
7	01 01 2,05 **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Persen**	**100**	**30**	**30**	**30**	**100**	**12.000.000**	**10.000.000**	**100,00**	**100,00**	
7	01 01 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PD Beserta Atribut Kelengkapannya	Pasang	40	100	40	40	100	12.000.000	10.000.000	83,33	100,00	

7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	Jenis	10	160	10	16	160,00	219.292.500	163.924.098	74,75	95,83	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	11	100	11	11	100	2.800.000	2.345.000	83,75	100,00	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	1	1	1	100	3.670.000	3.576.000	97,44	100,00	
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik yang ada	Tahun	1	1	1	1	100	23.722.500	23.388.500	98,59	100,00	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Tahun	1	1	1	1	100	7.425.000	7.410.000	99,80	100,00	
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis makanan Dan Minuman Yang tersedia	Tahun	1	100	1	1	100	58.675.000	56.300.000	95,95	100,00	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah Yang Diikuti	Tahun	1	100	1	1	100	123.000.000	70.904.598	57,65	75,00	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	166,6666667	3	5	166,67	157.620.000	131.953.098	83,72	100,00	
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengantar surat (Caraka)	Orang	1	100	1	1	100	8.640.000	8.640.000	100,00	100,00	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan yang tersedia	Jenis	4	100	4	4	100	148.980.000	123.313.098	82,77	100,00	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik	Jenis	5	40	5	2	40,00	34.460.000	34.352.550	99,69	100,00	
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	100	1	1	100	27.460.000	27.352.550	99,61	100,00	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	1	100	1	1	100	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00	
1	**2**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan**				**Indeks Kepuasan masyarakat**	**IKM Paten**	**3,26**	**99,69**	**3,25**	**3,25**	**100**	**539.969.000**	**534.900.000**	**99,06**	**95,56**	
7	**01**	**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**Persen**	**100**	**16**	**100**	**16**	**16**	**539.969.000**	**534.900.000**	**99,06**	**95,56**	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Di Kecamatan	Kegiatan	1	300	1	3	300	124.175.000	119.422.000	96,17	100,00	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sehat)	Jumlah kegiatan yang ditingkatkan Efektifitasnya	Kegiatan	1	100	1	1	100	4.175.000	4.100.000	98,20	100,00	
7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kalabbirang)	Jumlah kegiatan yang ditingkatkan Efektifitasnya (Kalabbirang)	Kegiatan	1	100	1	1	100	60.000.000	59.953.500	99,92	100,00	

7	01	02	2,01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Leang-leang)	Jumlah kegiatan yang ditingkatkan Efektifitasnya (Leang-leang)	Kegiatan	1	100	1	1	10	60.000.000	55.368.500	92,28	100,00	
7	01	02	2,02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	Kegiatan	3	2	2	10	500	404.275.000	404.200.000	99,98	100,00	
7	01	02	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Kegiatan	1	100	1	1	100	4.075.000	4.000.000	98,16	100,00	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Efektifitas pelayanan masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	12	75,00	12	9	75,00	400.200.000	400.200.000	100,00	100,00	
7	01	02	2,04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Urusan Pemerintahan yan didelegasikan kepada Camat dan terlaksana sesuai ketenrtuan yang berlaku	Urusan	3	100	3	3	0	11.519.000	11.278.000	97,91	86,67	
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kegiatan	1	100	1	1	100	4.075.000	4.000.000	98,16	100,00	
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Kegiatan	1	100	1	1	100	3.369.000	3.278.000	97,30	60,00	
7	01	02	2,04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain Yang Dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku	Kegiatan	1	100	1	1	100	4.075.000	4.000.000	98,16	100,00	
1	**3**	**Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial Dan Ekonomi**				**Persentase penduduk perempuan yang aktif dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi**	**Persen**	**80**	**37,5**	**35**	**30**	**85,71**	**447.125.000**	**435.187.291**	**97,33**	**87,50**	
7	**01**	**03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**Persen**	**100**	**6**	**100**	**6**	**6**	**447.125.000**	**435.187.291**	**97,33**	**87,50**	
7	01	03	2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan	Kegiatan	2	150	2	3	150	45.250.000	34.525.000	76,30	75,00	
7	01	03	2,01	02	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Wilayah Kerja Kecamatan Yang Terintegrasi	Kegiatan	2	100	2	2	100	26.525.000	26.525.000	100,00	100,00	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	2	50	1	1	100	18.725.000	8.000.000	42,72	50,00	
7	01	03	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan	Kegiatan	3	100	3	3	100	401.875.000	400.662.291	99,70	100,00	

7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	paket	3	100	3	3	100	400.000.000	398.787.291	99,70	100,00	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di bina	Kelurahan	2	100	2	2	100	1.875.000	1.875.000	100,00	100,00	
1	**4**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketenteraman Dan ketertiban di Kecamatan**				**Indeks kepuasan Masyarakat**	**IKM Trantibum Linmas**	**3,26**	**99,08**	**3,25**	**3,23**	**99,38**	**3.075.000**	**0**	**0,00**	**75,00**	
7	**01**	**04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kecamatan**	**Persen**	**100**	**400**	**100**	**400**	**400**	**3.075.000**	**2.175.000**	**70,73**	**75,00**	
7	01	04	2,03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan	Kegiatan	1	40000	1	400	40000	3.075.000	2.175.000	70,73	75,00	
7	01	04	2,03	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Verertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti keg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Orang	400	100	400	400	100	3.075.000	2.175.000	70,73	75,00	
1	**5**	**Meningkatnya Akses masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif**				**Indeks kepuasan Masyarakat**	**IKM**	**3,26**	**99,69**	**3,25**	**3,25**	**100,00**	**61.125.000**	**50.675.000**	82,90	**83,33**	
7	**01**	**05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**Persen**	**100**	**8**	**100**	**8**	**8**	**61.125.000**	**50.675.000**	**82,90**	**83,33**	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan terkait Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Kegiatan	4	200	4	8	200	61.125.000	50.675.000	82,90	83,33	
7	01	05	2,01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	100	2	2	100	37.450.000	37.450.000	100,00	100,00	
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan	kali	4	100	4	4	100	3.175.000	3.175.000	100,00	100,00	

7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah penanganan kerukunan antar Suku yang dilaksanakan	Kegiatan	2	100	2	2	100	20.500.000	10.050.000	49,02	50,00	
1	**6**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan**				**Indeks kepuasan Masyarakat**	**IKM Desa/ Kelurahan**	**3,26**	**99,39**	**3,25**	**3,24**	**99,69**	**3.925.000**	**3.925.000**		**25,00**	
7	**01**	**06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	**Persen**	**100**	**6**	**100**	**6**	**6**	**3.925.000**	**3.925.000**	**100,00**	**25,00**	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Desa/ Kelurahan	6	100	6	6	100	3.925.000	3.925.000	100,00	25,00	
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan desa yang di Fasilitasi	Desa/ Kelurahan	6	100	6	6	100	3.925.000	3.925.000	100,00	25,00	
					TOTAL PAGU								**4.972.286.154**	**4.771.814.472**			

2. **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantimurung**

Kecamatan Bantimurung merupakan perangkat daerah Kabupaten Maros sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat,koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa disamping itu juga camat bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Jika dilihat dari jenisnya, Pelayanan Adminitrasi Terpadu dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BANTIMURUNG KABUPATEN MAROS

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM PATEN	✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
2	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM Trantibum Linmas	✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
3	Sasaran 2 Meningkatnya	IKM DESA/Kelura	✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	

	Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	han								
4	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan	✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
5	Sasaran 4 : Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial dan Ekonomi	Persentase Perempuan Yang Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan	✓	33.81	39.97	43.89	48.81	53.27	55.10	
6	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM	✓	100	100	100	100	100	100	

Jumlah inidkator yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Bantimurung ada 6 indikator yaitu : IKM Paten, IKM Trantibum Linmas, IKM Desa dan Kelurahan , IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan, Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam Kegiatan Pembangunan bidang Sosial dan ekonomi di Kecamatan, Persentase Masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar sesuai SPM, Ke 6 Indikator Tersebut semuanya mencapai target.

- Indikator 1. IKM Paten Kecamatan Bantimurung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamtan mencapai target , program pendukung penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- IKM Trantibum linmas sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan Ketertiban di kecamatan mencapai target , program pendukung Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum.
- IKM Desa/Kelurahan sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat

pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan mencapai target , Program pendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

- IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan sasaran meningkatnya akses masyarakat dalam kegiatan Keagamaan secara aktif, mencapai target program pendukung program Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.
- Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan bidang social dan ekonomi di kecamatan mencapai target, program pendukung program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

- Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan pelayanan dasar sesuai SPM,mencapai target program pendukung adalah program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bantimurung

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Bantimurung dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan,

No NO	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK
1	Jumlah layanan terkait Kententraman dan Ketertibun umum belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan standar yang berlaku	Masih Lemahnya koordinasi Pelaksanaan tugas antar seksi dalam Pelaksanaan Kegiatan	IKM trantibun
2	Keterlibatan Perempuan dalam bidang pembangunan social dan Ekonomi	Kurangnya Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Pembangunan Social Dan Ekonomi	Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan

			pembangunan Bidang social dan Ekonomi di Kecamatan
3	Keikut sertaan masyarakat dalam aktifiitas Keagamaan	Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam aktifitas Keagamaan	IKM Keagamaan
4	Tercapainya pelayanan kecamatan sesuai sesuai dengan SPM	Masih Kurangnya Kuantitas Dan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan Yang Kompeten	IKM Layanan
5	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kurangnya Kualitas Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	IKM Layanan

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Bantimurung :

1) Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya dukungan SKPD Teknis terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
2) Masih rendahnya pemahaman Aparatur terhadap tugas pokok dan Fungsi
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana ASN masih terbatas

2. 4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maros

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Maros dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Bantimurung dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Bantimurung,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi /Kabupaten/Kota Maros

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kecamatan Bantimurung

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**TARGET CAPAIAN**		**KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Bantimurung**	**100**	**Persen**	**5.228.682.050**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**5.529.058.346**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Bantimurung**	***19***	***Dokumen***	***38.000.000***	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	***19 Dokumen***	***38.000.000***	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bantimurung	2	Dokumen	8.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Bantimurung	1	Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Bantimurung	1	Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Bantimurung	1	Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Bantimurung	1	Dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Bantimurung	1	Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	Kecamatan Bantimurung	12	Dokumen	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Kecamatan Bantimurung**			3.888.192.050	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			3.888.192.050	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bantimurung	60	Orang	3.683.702.050	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang	3.683.702.050	
Penyedia administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bantimurung	14	Dokumen	25.000.000	Penyedia administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	25.000.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SkPD	Kecamatan Bantimurung	11	Dokumen	39.490.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SkPD	11 Dokumen	39.490.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bantimurung	12	Dokumen	25.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	25.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi PD	Kecamatan Bantimurung	12	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi PD	12 Dokumen	20.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Kecamatan Bantimurung	1	Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 Dokumen	25.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Bantimurung	1	Dokumen	25.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Bantimurung	18	Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	18 Dokumen	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**TARGET CAPAIAN**		**KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD	Kecamatan Bantimurung	1	Dokumen	20.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD	1 Dokumen	20.000.000	
Administrasi Barang MIlik Daerah pada perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	Kecamatan Bantimurung	***4***	**Jenis**	***15.000.000***	**Administrasi Barang MIlik Daerah pada perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	***4***	***15.000.000***	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kecamatan Bantimurung	1	Dokumen	3.750.000	Jumlah rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	*1* Dokumen	3.750.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian barang milik daerah	Kecamatan Bantimurung	1	Laporan	3.750.000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian barang milik daerah	1 Laporan	3.750.000	
Rekonsiliasi dan penyusunan barang milik Daerah SKPD	Jumlah lapoaran Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik Daerag pada SKPD	Kecamatan Bantimurung	1	Laporan	3.750.000	Jumlah lapoaran Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik Daerag pada SKPD	Jumlah lapoaran Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik Daerag pada SKPD	1 Laporan	3.750.000	
Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Bantimurung	1	Laporan	3.750.000	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.750.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Kecamatan Bantimurung**	***58***	***Orang***	***99.440.000***	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	***58 Orang***	***99.440.000***	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Saranan Prasarana displin pegawai	Kecamatan Bantimurung	4	unit	20.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Saranan Prasarana displin pegawai	4 unit	20.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	Kecamatan Bantimurung	53	Paket	20.650.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	53 Paket	20.650.000	
Pendataan dan pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah dokomen pendataan dan engolahan Administrasi kepegawaian	Kecamatan Bantimurung	12	Dokumen	11.000.000	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah dokomen pendataan dan engolahan Administrasi kepegawaian	12 Dokumen	11.000.000	
Koordinasi dan pelaksanaan sistim informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan system Imformasi kepegawaian	Kecamatan Bantimurung	12	Dokumen	8.800.000	Koordinasi dan pelaksanaan sistim informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan system Imformasi kepegawaian	12 Dokumen	8.800.000	
Monitoring evaluasi, dan penilaian kierja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kecamatan Bantimurung	12	Dokumen	45.000.000	Monitoring evaluasi, dan penilaian kierja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	45.000.000	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kecamatan Bantimurung	2	Orang	45.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	45.000.000	
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikui sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Bantimurung	100	orang	7,500.000	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikui sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	7,500.000	
Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Kecamatan Bantimurung	57	Orang	7,500.000	Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	57	7,500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**TARGET CAPAIAN**		**KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**Kecamatan Bantimurung**	***11***	Orang	***289..500.000***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	***11 Jenis***	***289..500.000***	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bantimurung	15	Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	5.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Bantimurung	10	Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	35.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Bantimurung	17	paket	7.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	7.500.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bantimurung	5	paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	35.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Bantimurung	2	jenis	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	10.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material	Kecamatan Bantimurung	5	Jenis	6.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material	5 Jenis	6.000.000	
fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi	Kecamatan Bantimurung	750	Orang	30.000.000	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi	750 Orang	30.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	Kecamatan Bantimurung	12	Laporan	112.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	12 Laporan	112.000.000	
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Bantimurung	12	Dokumen	10.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	10.000.000	
Dokumen pelaksanaan Sistim pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistim pemerintahan	Kecamatan Bantimurung	2	Dokumen	30.000.000	Dokumen pelaksanaan Sistim pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistim pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	berbasis elektronik pada SKPD									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Bantimurung**	***5***	***jenis***	***900.000.000***	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	***5 jenis***	***900.000.000***	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Bantimurung	1	Unit	35.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 Unit	35.000.000	
Pengadaan Moel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kecamatan Bantimurung	4	Unit	75.000.000	Pengadaan Moel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	75.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor	Kecamatan Bantimurung	4	unit	75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor	4 Unit	75.000.000	
Pengadaan gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit atau bangunan bangunan lainnya yang disediakan	Kecamatan Bantimurung	2	unit	300.000.000	Pengadaan gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit atau bangunan bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	300.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kecamatan Bantimurung	2	Jenis	415.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 Jenis	415.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Bantimurung**	***4***	***Jenis***	***202.110.000***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***4 Jenis***	***202.110.000***	
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedia jasa Surat	Kecamatan Bantimurung	12	laporan	12.120.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terdistribusi	700 surat	12.120.000	
Penyedia jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komonikasi, Sumber Daya Air	Kecamatan Bantimurung	12	laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Layanan Umum Kantor	3 jenis	12.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	dan listrik yang disediakan									
Penyedia jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Bantimurung	12	laporan	12.000.000	Penyedia jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	12.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Bantimurung	12	laporan	165.990.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	165.990.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**Kecamatan Bantimurung**	***11***	***Jenis***	***58.600.000***	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	***11 Jenis***	***58.600.000***	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Bantimurung	6	unit	6.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	6.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Bantimurung	6	unit	45.600.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	6 unit	45.600.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Bantimurung	2	unit	7.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	2 unit	7.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap**	**Kecamatan Bantimurung**	**100**	**Persen**	**785.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan**	**100 Persen**	**785.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	pelayanan public di kecamatan									
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Bantimurung**	**4**	**Urusan**	**255.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan**	**4 Urusan**	**255.000.000**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Sehat, BOP Kelurahan)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Bantimurung	25	Dokumen	255.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Sehat, BOP Kelurahan)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	25 Dokumen	255.000.000	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	Kecamatan Bantimurung	**2**	**Kegiatan**	**510.000.000**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**2 Kegiatan**	**510.000.000**	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bantimurung	1	Laporan	10.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis SPM Yang Dilaksanakan Di Kecamatan	1 laporan	10.000.000	
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Bantimurung	24	laporan	500.000.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	24 laporan	500.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan**	**Kecamatan Bantimurung**	**3**	**layanan**	**20.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**3 layanan**	**20.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.									
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Bantimurung	4	Dokumen	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinzn Usaha yang dilaksanakan	4 Dokumen	5.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan plaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kecamatan Bantimurung	1	laporan	5.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan plaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	1 laporan	5.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan	Kecamatan Bantimurung	1	laporan	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan	1 laporan	10.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	Kecamatan Bantimurung	**100**	**Persen**	**2.630.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100 Persen**	**2.630.000.000**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (gender)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan	Kecamatan Bantimurung	2	kegiatan	135.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (gender)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan	2 Kegiatan	135.000.000	
Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kecamatan Bantimurung	2	Dokumen	60.000.000	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	2 Dokumen	60.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**TARGET CAPAIAN**		**KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bantimurung	2	Laporan	75.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	75.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKM Pelayan desa/kelurahan)	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**Kecamatan Bantimurung**	**4**	**kegiatan**	**1.622.800.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKM Pelayan desa/kelurahan)**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**4 kegiatan**	**1.622.800.000**	
Pembangunan sarana prasarana Kelurahan	Jumlah saranan prasarana kelurahan yang terbangun	Kecamatan Bantimurung	6	Unit	1.500.000.000	Pembangunan sarana prasarana Kelurahan	Jumlah saranan prasarana kelurahan yang terbangun	6 Unit	1.500.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan di kelurahan	Kecamatan Bantimurung	7	Pokmas/ Ormas	120.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan di kelurahan	**7** Pokmas/ Ormas	120.000.000	
Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Bantimurung	2	Laporan	2.800.000	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2.800.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	Kecamatan Bantimurung	**95**	**Persen**	**8.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	**100 Persen**	8.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	Kecamatan Bantimurung	**1**	**kegiatan**	**8.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**1 kegiatan**	**8.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vetikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Bantimurung	1	Laporan	8.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vetikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	8.000.000	
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**Kecamatan Bantimurung**	**100**	**Persen**	**339.732.000**	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**Persen**	**100**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**Kecamatan Bantimurung**	**4**	**Kegiatan**	**339.732.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**4 Kegiatan**	**339.732.000**	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Kecamatan Bantimurung	500	Orang	150.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	500 orang	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia									
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Bantimurung	400	Orang	62.732.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	400 orang	62.732.000	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Bantimurung	1.220	Orang	120.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.220 orang	120.000.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Bantimurung	1	Dokumen	7.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	7.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	Kecamatan Bantimurung	**100**	**Persen**	**16.800.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	**100 Persen**	**16.800.000**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**Kecamatan Bantimurung**	**6**	**Desa**	**16.800.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**6 Desa**	**16.800.000**	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Bantimurung	6	Dokumen	16.800.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 dokumen	16.800.000	

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Bantimurung pada tahun 2024 dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum diarahkan pada :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Menjadi Kewenangan Kecamatan dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur lingkup Kecamatan Bantimurung
2. Peningkatan Kualitas pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan baik di Desa maupun Kelurahan
3. Upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
4. Peningkatan Kualitas Koordinasi Pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
5. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Bantimurung maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel. 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
PROVINSI /KABUPATEN/KOTA MAROS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bantimuru

No	Program/kegiatan/ Subk Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Keterangan	Catatan
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kalabbirang Kec. Bantimurung	Persentase Partisipasi Perempuan Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan			
I.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kalabbirang Kec. Bantimurung	Jumlah Masyarakat yang Terlibat pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan			
I.1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kalabbirang Kec. Bantimurung	Jumlah Sarana Prasarana yang terbangun	Unit	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	Usulan Musrenbang
I.1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kalabbirang Kec. Bantimurung	Jumlah Sarana Prasarana yang terbangun	Unit	Belanja Modal Bangunan Drainase	Usulan Musrenbang
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Leang Leang Kec. Bantimurung	Persentase Partisipasi Perempuan Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan			
I.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Leang Leang Kec. Bantimurung	Jumlah Masyarakat yang Terlibat pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan			
I.1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Leang Leang Kec. Bantimurung	Jumlah Sarana Prasarana yang terbangun	Unit	Belanja Modal Jalan Khusus	Usulan Musrenbang

BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TelaahTerhadapKebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamqatan Bantimurung adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Bantimurung

Table 3.1

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Bantimurung mempunyai *tujuan* dan *sasaran*:

Tujuan	**sasaran**	**Indikator**
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM PATEN
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	IKM Trantib Linmas
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerinthan Desa /Kelurahan	IKM Desa /Kelurahan
Meningkatkan Peran serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	Meningkatnya akses Masyarakat dalam kegiatan Keagamaam secara aktif	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan
Meningkatkan Peran Serta Perempuan di Kecamatan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Atif Perempuan Di Kecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial dan ekonomi	Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam kegiatan pembangunanBidang social dan ekonomi
Meningkatkan kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan dasar Kecamatan	Meningkatnya Cakupan Pelayan Dasar Masyarakat Kecamatan sesuai SPM	Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

3.3. Telaahan terhadap Kebijakan Perubahan

I. Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2. Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 180/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kab Maros Tahun 2024
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
4. SE Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2024 Nomor 917/151/BKAD

II. Pokok Permasalahan

1. Terdapat Sub Kegiatan yang harus dilakukan Penyesuaian di karenakan mengalami Perubahan di dalam Sub Rincian Obyek Belanja yang berbeda.
2. Sehubungan dengan adanya kegiatan pada kantor kami, yang dimana tidak terdapat anggaran pada kegiatan tersebut maka kami mengajukan penambahan sub kegiatan dan anggarannya, yang mana kegiatan tersebut ada pada daftar terlampir.

III. Analisis dan Alasan Perubahan

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pada Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan,
- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Pada Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Kendaraan Hias)

Di lakukan Perubahan Untuk dialihkan ke Sub Kegiatan Fasilitasi Jamuan Tamu Pada Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu dengan alasan semakin bertambahnya Kegiatan dan Ke sementara Anggaran Makan Minum Tamu terbatas.

- Pada Sub Kegiatan “Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan” dilakukan Penambahan anggaran dan sub kegiatan **dikarenakan sesuai dengan kebutuhan.**

Renja Perubahan Kecamatan Bantimurung 2024

TABEL T-C. 3.2

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN MAROS TAHUN 2024

Perangkat Daerah : Kecamatan Bantimurung

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1 1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**	**Nilai SAKIP Kecamatan**								
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4,148,465,930**	**4,165,965,930**	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		
7 01 01 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	11 Dok	11 Dok	6,710,000	6,710,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		
7 01 01 2 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	790,000	790,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7 01 01 2 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-PD	1 Dok	1 Dok	1,040,000	1,040,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7 01 01 2 03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PD	1 Dok	1 Dok	790,000	790,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7 01 01 2 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	1 Dok	1 Dok	1,040,000	1,040,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7 01 01 2 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PD	1 Dok	1 Dok	790,000	790,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7 01 01 2 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Dok	1 Dok	1,060,000	1,060,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7 01 01 2 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	1,200,000	1,200,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7 01 01 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	25 Dokumen	25 Dokumen	3,801,824,430	3,801,824,430				
7 01 01 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji	672 Orang	672 Orang	3,754,964,430	3,754,964,430	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		DAU
7 01 01 2 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	46,860,000	46,860,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7 01 01 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	6 Layanan	6 Layanan	161,501,500	189,001,500				

7	01	01	2	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	2,780,000	2,780,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	01	2	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	8,627,000	8,627,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	01	2	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan Logistik yang ada	1 Paket	1 Paket	24,391,500	24,391,500	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	01	2	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 Paket	1 Paket	6,103,000	6,103,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	01	2	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jenis makanan Dan Minuman Yang tersedia	12 Laporan	12 Laporan	68,150,000	95,650,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	01	2	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah Yang Diikuti	12 Laporan	12 Laporan	51,450,000	51,450,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	01	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			148,050,000	148,050,000				
7	01	01	2	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengantar surat (Caraka)	12 Laporan	12 Laporan	7,320,000	7,320,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	01	2	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa Pelayanan yang tersedia	12 Laporan	12 Laporan	140,730,000	140,730,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	01	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik	2 Jenis	2 Jenis	30,380,000	20,380,000				
7	01	01	2	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22 Unit	22 Unit	26,150,000	16,150,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	4,230,000	4,230,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
1	**2**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan**				**Indeks Kepuasan masyarakat**								
7	**01**	**02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**673,000,000**	**673,000,000**				
7	01	02	2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Pemerintahan Di Kecamatan	3 Urusan	3 Urusan	184,150,000	184,150,000				
7	01	02	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Sehat)	Jumlah kegiatan yang ditingkatkan Efektifitasnya	1 Dok	1 Dok	4,150,000	4,150,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	02	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kalabbirang)	Jumlah kegiatan yang ditingkatkan Efektifitasnya (Kalabbirang)	12 Laporan	12 Laporan	90,000,000	90,000,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	02	2	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Leang-leang)	Jumlah kegiatan yang ditingkatkan Efektifitasnya (Leang-leang)	12 Laporan	12 Laporan	90,000,000	90,000,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD

Renja Perubahan Kecamatan Bantimurung 2024

7	01	02	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan di Kecamatan	2 Layanan	2 Layanan	440,325,000	440,325,000				
7	01	02	2	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	4,125,000	4,125,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	02	2	03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Efektifitas pelayanan masyarakat yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	436,200,000	436,200,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	02	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yan didelegasikan kepada Camat dan terlaksana sesuai ketenrtuan yang berlaku	3 Urusan	3 Urusan	48,525,000	48,525,000				
7	01	02	2	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	4,125,000	4,125,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	02	2	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	1 Laporan	1 Laporan	3,150,000	3,150,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	02	2	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain Yang Dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku	1 Laporan	1 Laporan	41,250,000	41,250,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
1	**3**	**Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial Dan Ekonomi**				**Persentase penduduk perempuan yang aktif dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi**								
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**451,150,000**	**443,650,000**				
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan	400 Orang	400 Orang	47,450,000	39,950,000				
7	01	03	2	02	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Wilayah Kerja Kecamatan Yang Terintegrasi	2 Dokumen	2 Dokumen	26,450,000	26,450,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	03	2	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	21,000,000	13,500,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	03	2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	403,700,000	403,700,000				
7	01	03	2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Kalabbirang)	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		DAU
7	01	03	2	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Leang leang)	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		DAU
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang di bina	1 Laporan	1 Laporan	3,700,000	3,700,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD

Renja Perubahan Kecamatan Bantimurung 2024

1	**4**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketenteraman Dan ketertiban di Kecamatan**				**Indeks kepuasan Masyarakat**								
7	**01**	**04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**Presentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kecamatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4,100,000**	**4,100,000**				
7	01	04	2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan	75 Orang	75 Orang	4,100,000	4,100,000				
7	01	04	2	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Verertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang mengikuti keg Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	4,100,000	4,100,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
1	**5**	**Meningkatnya Akses masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif**				**Indeks kepuasan Masyarakat**								
7	**01**	**05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**100 Persen**	**100 Persen**	**107,950,000**	**107,950,000**				
7	01	05	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan terkait Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	3 Urusan	3 Urusan	107,950,000	107,950,000				
7	01	05	2	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	300 Orang	300 Orang	50,525,000	50,525,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	05	2	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan	75 Orang	160 Orang	4,150,000	14,150,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
7	01	05	2	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah penanganan kerukunan antar Suku yang dilaksanakan	800 Orang	800 Orang	53,275,000	43,275,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD
1	**6**	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan**				**Indeks kepuasan Masyarakat**								
7	**01**	**06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang -Undangan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2,800,000**	**2,800,000**				

7	01	06	2		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	6 Dokumen	6 Dokumen	2,800,000	2,800,000				
7	01	06	2	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan desa yang di Fasilitasi	6 Dokumen	6 Dokumen	2,800,000	2,800,000	Kec Bantimurung	Kec Bantimurung		PAD

BAB. V PENUTUP

1. Saran dan Kesimpulan

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Bantimurung. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Bantimurung ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Maros secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Ridha dan Petunjuk Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing. Amin.**

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN MANDAI

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI.....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1. Latar Belakang .....

1.2. Landasan Hukum.....

1.3. Maksud dan Tujuan .....

1.4. Sistematika Penulisan .....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....

II.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah .....

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....

II.4. Review TerhadapTancangan Awal RKPD .....

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....

III.2. Tujuan dan SasaranRenja SKPD .....

III.3. Program dan Kegiatan .....

BAB IV PENUTUP.....

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya akhirnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mandai Tahun 2024 telah terselesaikan. maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja Kecamatan Mandai Tahun 2024 bertujuan secara umum sebagai Penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mandai Tahun 2021-2026 yang memuat Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah, Gambaran Visi dan Misi, serta Rencana Pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mandai Tahun 2024 masih banyak keterbatasan. Akhirnya, semoga Rencana Kerja Kecamatan Mandai Tahun 2024 dapat menjadi Pedoman awal bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024 guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Maros, 31 Juli 2024

C A M A T

ANDI CHAEBAR, S.IP.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 197511102007011018

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 20214 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Pemerintah daerah untuk Menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaran Pemrintahaan.Prenecaaan adalah Suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan dengan memeperhatikan rencana kerja Kecamatan Mandai Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA PERUBAHAN merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Sehubungan dengan itu, Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Maros membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD). Renja Perubahan PD tahun disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mandai Tahun 2021-2026. Renja Perubahan PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Kecamatan Mandai disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan.
2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan Perangkat Daerah
3) Penyusunan Rancangan.
4) Penyusunan Rancangan Akhir
5) Penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarakn Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 dan tetap mempedomani Renstara Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah Menjadi Pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mandai Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Adapun landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah :
    1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587),
    6. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangana Pendemi Corona Viru Disease 2019 (Covid – 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasidan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 Nomor 23);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahn Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2).

29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3;
31. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 34);
32. Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2023 Tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 nomor 36.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Mandai Tahun 2024 adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Mandai untuk periode 1 tahun sebagai Impelemntasi pelaksnaan rencana pembagunan jangka menengah Daerah dan Renstra perangkat daerah

Tujuan disusunnya Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Mandai Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan, dan Sub.kegiatan ;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Kantor Kecamatan Mandai
3. Membuat acuan perencanaan untuk mencapai Visi,Misi , Tujuan yang memuat Programdan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja , kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.
4. Sebagai Dasar Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rentsra Perangkat Daerah, dengan Renja Perubahan K/L dan Renja Perubahan provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2022,

Pada bab ini memuat kajian (riview) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan Perangkat daerah sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan,

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telahan Terhadap Kebijakan Nasional yang menjelaskan menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD yang merupakan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup berupa Saran dan Kesimpulan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Mandai Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mandai.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mandai merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi Penjabaran Perencanaan Tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Mandai. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA PERUBAHAN) Kecamatan Mandai ini menyajikan pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Mandai selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Mandai 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Mandai tahun 2023 dan Evaluasi Renja Perubahan Kecamatan Mandai tahun berjalan tahun 2024 mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kecamatan Mandai, antara lain :

a. **Realisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran sesuai yang direncanakan**

1. Kecamatan Mandai pada tahun 2022 melaksanakan 6 program dan terealisasi seluruhnya. Dari ke-6 program tersebut, terdapat 2 program yang tidak mencapai target.
2. Kecamatan Mandai pada tahun 2022 melaksanakan 14 kegiatan terkait urusan, dari ke-14 kegiatan tersebut yang mencapai target sebanyak 12 Kegiatan , sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 2 kegiatan.

3. Kecamatan Mandai pada tahun 2022 melaksanakan 33 sub kegiatan Dari 33 Subkegiatan yang melaksanakan terdapat 31 subkegiatan yang mencapai target, 2 sub kegiatan yang tidak mencapai target

b. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adanya program/kegiatan yang tidak terealisasi;

1. Faktor penyebab adanya program / kegiatan yang tidak terealisasi 100% khususnya pada tahun 2022 adalah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia hal ini disebabkan karena tidak dilakukan permintaan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan sementara Program dan Kegiatan lainnya terealisasi sesuai tujuan dan sasaran program melalui koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh pelaksana kegiatan dan seluruh stakeholder.
2. Faktor penyebab adanya program,kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang belum memenuhi terget diakibatkan karena Belum terealisasi anggaran tersebut karena masih masuk di Tahun berjalan , sementara Program dan Kegiatan lainnya terealisasi sesuai tujuan dan sasaran program melalui koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh pelaksana kegiatan dan seluruh stakeholder.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab diatas;

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan urusanpemerintahan

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MAROS

Nama OPD : Kec. Mandai

KODE	URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMEN 050 TAHUN 2020)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN DAERAH S/D TAHUN (N-3) 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH (n-1)TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (N-1)TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang pelakasanaan Pemerintah daerah**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	100%	**100%**	**100%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah**	57 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	100%	19 Dokumen	57 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan OPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah penyusunan dokumen RKA SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	jumlah penyusunan dokumen perubhana RKA SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah penyusunan dokumen perubhana DPA SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja OPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	36 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**71 Dokumen**	**57 Dokumen**	**57 Dokumen**	**57 Dokumen**	**100%**	**57 Dokumen**	**57 Dokumen**	**100%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	95%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan PD	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 dokumen	100%	12 Dokumen	9 Dokumen	75%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah Yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	171 Orang	171 Orang	171 Orang	171 Orang		171 Orang	171 Orang	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	58	Paket	-	-		58 paket		
	~~Administrasi Umum Perangkat Daerah~~	~~Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang dilaksanakan~~	6 Jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	34	15 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	100%	6 Jenis	34 Jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42 Jenis	17 Jenis	17 Jenis	17 Jenis	**100%**	8 Jenis	40 jenis	95%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	7 jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	3 Jenis	7 Jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	6 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	6 Jenis	100%
	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang berkunjung dan terpasilitasi	**2.25**	750 Orang	750 Orang	750 Orang	100%	750 Orang	2.025 Orang	90%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	800 Kali	300 Kali	300 kali	300 Kali	100%	366 kali	500 kali	62,5%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jenis jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	2.1	700 Surat	700 Surat	700 Surat	100%	700 Surat	1.900 Surat	90487%
	penyediaan jasa komuniaski sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan komuniskasi yang tersedia	**1 jenis**	**1 jenis**	**1 jenis**	**1 jenis**	100	1 jenis	1 jenis	1 jenis
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Juimlah jenis jasa layanan umum kantor	4 Jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**24**	**8**	**8**	**8**	**100%**	**8 Jenis**	**23 Jenis**	**95,83%**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan /Mesin Kebutuhan Kantor dalam kondisi Baik	18	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 unit	1 5 unit	83,33 %
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan lainnya dalam kondisi baik	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 unit	5 unit	83,33%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100	100%	75%	91,67%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan**	**4 Urusan**	**4 Urusan**	**4 Urusan**	**4 persen**	**100**	**4 Urusan**	**4 Urusan**	**100%**

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75	25 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100 persen	25 Dokumen	69 Dokumen	92%
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan pada tingkat Kecamatan**	**4 Layanan**	**4 Layanan**	**4 Layanan**	**4 Layanan**	**100%**	**4 Layanan**	**4 Layanan**	**100%**
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	72 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	66 Laporan	91,67%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Di limpahkan Kepada Camat**	**3 Urusan**	**3 Urusan**	**3 Urusan**	**3 Urusan**	**100%**	**3 Urusan**	**3 urusan**	**100%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan usaha yang dilaksanakan	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	10 Dokumen	83,33
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50%	-	6 Dokumen	100
	~~Pelaksanaan Urusan~~ Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Dokumen ~~Pelaksanaan yang terkait~~ Dengan Kewenangan lain Yang Dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku	3 Laporan	1Laporan	1Laporan	1Laporan	100%	1Laporan	3 Laporan	100%

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Partisipasi aktif masyarakat di Kecamatan dalam Kegiatan Pembangunan**	**100**	**100%**	**100%**	**94,25%**	**94,25**	**100**	**72,92%**	**72,92%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	2.66	1,120	1.120 Orang	950 Orang	84,82	420 Orang	2.370 Orang	89,10%
	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	5 Dokumen	83,33%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	5 Laporan	83,33%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**		**3 kegiatan**						
	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (Kelurahan Bontoa)	Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun	2 Unit	1 unit		-	-	1 unit	1 unit	100%
	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (Kelurahan Hasanuddin)	Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun	2 Unit	1 unit		-	-	1 unit	1 unit	100%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melakukan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 Pokmas/ormas	7 Pokmas/ormas	-	-	-	-	7 Pokmas/ormas	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	100	Persen	100	100	100	100	100	100

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum**	**500 Orang**	**200 Orang**	**200 Orang**	**100%**	**100 Orang**	-	**400 Orang**	**80%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporah Hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	2 urusan	2 Urusan	2 Urusan	2 Urusan	100%	2 Urusan	2 Urusan	100%

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	800	450 Orang	450Orang	450 orang	100%	500	800	100%
	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2Orang	1,220	307	307 Orang	100	566 Orang	1.714 Orang	81,89%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Yang dilaksanakan		-	-	-		-	-	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen laporan Atas Hasil Pelaksanaan Tugas FORKOPIMCAM		-	-	-		-	-	-

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa sesuai ketentuan yang berlaku	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	100%	4 Desa	4 Desa	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan Aturan yang berlaku	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	100%	4 Desa	4 Desa	66,67%

2. **Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mandai**

Kecamatan Mandai merupakan perangkat daerah Kabupaten Maros sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat,koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa disamping itu juga camat bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Jika dilihat dari jenisnya, Pelayanan Adminitrasi Terpadu dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MANDAI
KABUPATEN MAROS

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM PATEN	✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
2	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM Trantibum Linmas	✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
3	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas	IKM DESA/Kelurahan	✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	

	Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan									
4	Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan	✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
5	Sasaran 4 : Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial dan Ekonomi	Persentase Perempuan Yang Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan	✓	33.81	39.97	43.89	48.81	53.27	55.10	
6	Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM	✓	100	100	100	100	100	100	

Jumlah inidkator yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Mandai ada 6 indikator yaitu : IKM Paten, IKM Trantibum Linmas, IKM Desa dan Kelurahan , IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan, Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam Kegiatan Pembangunan bidang Sosial dan ekonomi di Kecamatan, Persentase Masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar sesuai SPM, Ke 6 Indikator Tersebut semuanya mencapai target.

- Indikator 1. IKM Paten Kecamatan Mandai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamtan mencapai target , program pendukung penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- IKM Trantibum linmas sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan Ketertiban di kecamatan mencapai target , program pendukung Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum.
- IKM Desa/Kelurahan sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan mencapai target ,

Program pendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

- IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan sasaran meningkatnya akses masyarakat dalam kegiatan Keagamaan secara aktif, mencapai target program pendukung program Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.
- Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan bidang social dan ekonomi di kecamatan mencapai target, program pendukung program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan pelayanan dasar sesuai SPM,mencapai target program pendukung adalah program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mandai

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Mandai dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan,

No	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK
1	Jumlah layanan terkait Kententraman dan Ketertibun umum belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan standar yang berlaku	Masih Lemahnya koordinasi Pelaksanaan tugas antar seksi dalam Pelaksanaan Kegiatan	IKM trantibun
2	Keterlibatan Perempuan dalam bidang pembangunan social dan Ekonomi	Kurangnya Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Pembangunan Social Dan Ekonomi	Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan Bidang social dan Ekonomi di Kecamatan
3	Keikut sertaan masyarakat dalam aktifiitas Keagamaan	Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam aktifitas Keagamaan	IKM Keagamaan

4	Tercapainya pelayanan kecamatan sesuai sesuai dengan SPM	Masih Kurangnya Kuantitas Dan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan Yang Kompeten	IKM Layanan
5	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kurangnya Kualitas Fasilitas Sarana Dan Prasarana Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	IKM Layanan

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Mandai :

1) Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya dukungan SKPD Teknis terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
2) Masih rendahnya pemahaman Aparatur terhadap tugas pokok dan Fungsi
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana ASN masih terbatas

2. 4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maros

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Maros dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Mandai dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Mandai,dengan

arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan

Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi /Kabupaten/Kota Maros

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Mandai**	**100**	**Persen**	**4,649,566,301**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**5,345,904,789**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Mandai**	***19***	***Dokumen***	***8,680,000***	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	***19 Dokumen***	***60,300,000***	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mandai	2	Dokumen	1,050,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mandai	1	Dokumen	1,200,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,100,000	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mandai	1	Dokumen	1,250,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,200,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Mandai	1	Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	32,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mandai	1	Dokumen	850,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mandai	1	Dokumen	1,680,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6,500,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	Kecamatan Mandai	12	Dokumen	1,650,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	12 Dokumen	5,500,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Kecamatan Mandai**			***4,288,586,451***	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			***4,544,424,789***	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mandai	53	Orang	4,249,516,451	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang	4,494,424,789	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SkPD	Kecamatan Mandai	12	Dokumen	39,050,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SkPD	12 Dokumen	50,000,000	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Kecamatan Mandai**	***58***	***Orang***	***14,500,000***	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	***58 Orang***	***14,500,000***	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	Kecamatan Mandai	53	Paket	14,500,000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	53 Paket	14,500,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**Kecamatan Mandai**	***11***	Orang	***127,091,950***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	***11 Jenis***	***382,000,000***	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mandai	15	Paket	4,133,450	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	10,000,000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Mandai	17	paket	9,575,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	25,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mandai	5	paket	21,571,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	30,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Mandai	2	jenis	7,450,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	7,450,000	
fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi	Kecamatan Mandai	750	Orang	12,000,000	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi	750 Orang	210,000,000	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	Kecamatan Mandai	12	Laporan	72,362,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	12 Laporan	90,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Mandai**	***4***	***Jenis***	***7,650,000***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***4 Jenis***	***18,000,000***	
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedia jasa Surat	Kecamatan Mandai	12	laporan	12.120.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terdistribusi	700 surat	12.120.000	
Penyedia jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Mandai	12	laporan	6,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Layanan Umum Kantor	3 jenis	26,680,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**Kecamatan Mandai**	***11***	***Jenis***	***24,937,900***	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	***11 Jenis***	***50,000,000***	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Mandai	6	unit	12,697,900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	6 unit	15,500,000	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Mandai	2	unit	12,240,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	2 unit	34,500,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan**	**Kecamatan Mandai**	**100**	**Persen**	**1,222,800,000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan**	**100 Persen**	**1,450,000,000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Mandai**	**4**	**Urusan**	**132,840,000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan**	**4 Urusan**	**220,000,000**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Sehat, BOP Kelurahan)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Mandai	25	Dokumen	132,840,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Sehat, BOP Kelurahan)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	25 Dokumen	220,000,000	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	Kecamatan Mandai	**2**	**Kegiatan**	**1,193,400,000**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**2 Kegiatan**	**1,270,000,000**	
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Mandai	24	laporan	1,193,400,000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	24 laporan	1,270,000,000	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**Kecamatan Mandai**	**3**	**layanan**	**16,560,000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**3 layanan**	**80,000,000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Mandai	4	Dokumen	5,230,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinzn Usaha yang dilaksanakan	4 Dokumen	25,000,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan plaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kecamatan Mandai	1	laporan	5,200,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan plaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	1 laporan	25,000,000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan	Kecamatan Mandai	1	laporan	6,130,000	Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan	1 laporan	30,000,000	
MASYARAKAT DESA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	Kecamatan Mandai	**100**	**Persen**	**75,379,250**	**PEMBERDAYAAN PROGRAM MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Aktif Masyarakat di Persentase Partisipasi Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100 Persen**	**160,000,000**	
Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kecamatan Mandai	2	Dokumen	41,618,000	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	2 Dokumen	80,000,000	

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mandai	2	Laporan	33,761,250	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	80,000,000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKM Pelayan desa/kelurahan)	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**Kecamatan Mandai**	**4**	**kegiatan**	**1.622.800.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKM Pelayan desa/kelurahan)**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**4 kegiatan**	**1.622.800.000**	
Pembangunan sarana prasarana Kelurahan	Jumlah saranan prasarana kelurahan yang terbangun	Kecamatan Mandai	6	Unit	400,000,000	Pembangunan sarana prasarana Kelurahan	Jumlah saranan prasarana kelurahan yang terbangun	6 Unit	800,000,000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan di kelurahan	Kecamatan Mandai	7	Pokmas/ Ormas	120.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan di kelurahan	**7** Pokmas/ Ormas	120.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	Kecamatan Mandai	**95**	**Persen**	**8,100,000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	**100 Persen**	8,100,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	Kecamatan Mandai	**1**	**kegiatan**	**8,100,000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**1 kegiatan**	**8,100,000**	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vetikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Mandai	1	Laporan	8,100,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vetikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	8,100,000	
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM **SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**Kecamatan Mandai**	**100**	**Persen**	**339.732.000**	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**Persen**	**100**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum **sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**Kecamatan Mandai**	**4**	**Kegiatan**	**79,550,000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** **sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**4 Kegiatan**	**260,500,000**	

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Mandai	300	Orang	26,450,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	300 orang	140,500,000	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Mandai	600	Orang	52,150,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000	120,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	Kecamatan Mandai	**100**	**Persen**	**7,250,000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	**100 Persen**	**7,250,000**	

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**Kecamatan Mandai**	**4**	**Desa**	**7,250,000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**4 Desa**	**7,250,000**	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		4	Dokumen	7,250,000	Fasilitasi Pengelolaan	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 dokumen	7,250,000	

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Mandai pada tahun 2024 dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum diarahkan pada :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Menjadi Kewenangan Kecamatan dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur lingkup Kecamatan Mandai
2. Peningkatan Kualitas pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan baik di Desa maupun Kelurahan
3. Upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
4. Peningkatan Kualitas Koordinasi Pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
5. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Mandai maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel. 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
PROVINSI /KABUPATEN/KOTA MAROS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Mandai

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Mandai	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun		
1	Pekerasan Jalanan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu Jalan RT 07 RW 03 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 150 x 4 M	Musrenbang
2	Pemeliharaan Trotoar, Taman Median Jalan dan Perbaikan Taman Jl. Poros H. Banca Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 100 x 3 m	Musrenbang
3	Pemeliharaan Trotoar, Taman Median Jalan dan Perbaikan Taman Jl. Poros H. Banca Kel. Bontoa RT 05 RW 01 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 150 x 4 M	Musrenbang
4	Pekerasan Jalanan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu JalanKantor Kecamatan Mandai Jl. Poros Maros - Makassar RT 04 RW 01 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 1500 x 4 M	Musrenbang
5	Pembangunan Drainase Jl. Poros Kariango RW 01 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 500 meter	Musrenbang
6	Pembangunan Drainase Jl. Siswa RW 01 Depan Kantor Lurah Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 500 meter	Musrenbang

7	Pembangunan Drainase RT 06 RW 03 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 300 meter	Musrenbang
8	Pembangunan Drainase RT 06 RW 03 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 300 meter	Musrenbang
9	Pembangunan Drainase Jl. Poros Perumahan Papan Lestari (Samping Indomaret) Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 500 meter	Musrenbang
10	Pembangunan Drainase RT 01 RW 06 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 100 meter	Musrenbang
11	Pembangunan Drainase RT 04 RW 07 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 250 meter	Musrenbang
12	Pembangunan Drainase Jl. Sentosa RT 04 RW 07 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 200 meter	Musrenbang
13	Pembangunan Drainase Jl. Mujahidin Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 500 meter	Musrenbang
14	Pembangunan Drainase RT 01 RW 07 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 350 meter	Musrenbang
15	Pemasangan Paving Blok RT 05 RW 01 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 200 m x 3 m	Musrenbang
16	Pemasangan Paving Blok RT 07 RW 06 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 200 m x 3 m	Musrenbang

17	Pemasangan Paving Blok RT 07 RW 03 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 200 m x 3 m	Musrenbang
18	Pemasangan Paving Blok Jl. Sejiwa Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 200 m x 3 m	Musrenbang
19	Pemasangan Paving Blok RT 3 RW 1 Padangalla Kel. Hasanuddin	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 200 m x 3 m	Musrenbang
20	Pemeliharaan Bangunan Gedung (Rehab Pagar Kantor Kecamatan Mandai)	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
21	Pemeliharaan Bangunan Gedung (Pemasangan Pagar) Jl. Sehati Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
22	Rehabilitas Bangunan Gedung (Gerbang) Jl. Poros H. Banca Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
23	Rehabilitasi Saluran Jaringan Irigasi Primer dan Saluran Sekunder Yang Memiliki Sumber Air RT 06 RW 03 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 500 meter	Musrenbang
24	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Kesehatan (Rehab Bangunan Poskedes) Perumahan Solindo RT 03 RW 05 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
25	Pemeliharaan Puskesmas Pembantu (Pembangunan Pagar Belakang) RT 03 RW 05 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
26	Pembuatan Jalan Tani RT 03 Menuju RT 07 Kel. Bontoa	Kel. Bontoa	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 500 m	Musrenbang

27	Peningkatan Jalan Beton RT 4 RW 2 Lorong Batangase Kel. Hasanuddin	Kel. Hasanuddin	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 1000 x 4 M	Musrenbang
28	Peningkatan Jalan Beton (Lanjutan) RT 3 RW 4 Padangsessere Kel. Hasanuddin	Kel. Hasanuddin	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 1000 x 4 M	Musrenbang
29	Peningkatan Jalan Beton Jl. Musyawarah RW 4 Padangsessere Kel. Hasanuddin	Kel. Hasanuddin	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 1500 x 3 M	Musrenbang
30	Peningkatan Jalan Beton Kampung Baru RW 5 Kel. Hasanuddin	Kel. Hasanuddin	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 1200 x 3 M	Musrenbang
31	Pengaspalan Jalan Poros Batangase Padangalla Kel. Hasanuddin	Kel. Hasanuddin	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 7000 x 3 m	Musrenbang
32	Pembangunan Drainase Perumahan Mitra Mas RT 2 RW 2 Batangase Kel. Hasanuddin	Kel. Hasanuddin	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 500 m	Musrenbang
33	Pembangunan Drainase RT 5 RW 3 Kadieng Kel. Hasanuddin	Kel. Hasanuddin	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 300m	Musrenbang
34	Pembangunan Drainase RT 01 RW 05 Ling. Kampung Baru Kel. Hasanuddin	Kel. Hasanuddin	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 300m	Musrenbang
35	Pengadaan Kabel Listrik RT 2 RW 2 Batangase Kel. Hasanuddin	Kel. Hasanuddin	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 600 m	Musrenbang
36	Perbaikan Jalan di Lorong TPA Bontoramba	Desa Bonto Matene	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 km	Musrenbang
37	Pembangunan Drainase Jl. Poros Maccopa - Amarang Dusun Barambang Desa Bonto Matene	Desa Bonto Matene	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 400 m	Musrenbang

38	Penambahan Kelas RKB SDN 146 Barambang 1 Lantai 2 Dusun Bentenge Desa Bonto Matene	Desa Bonto Matene	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
39	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 146 Barambang 1 Dusun Bentenge Desa Bonto Matene	Desa Bonto Matene	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
40	Penambahan RKB 6 Kelas SDN 234 Barambang II Dusun Bentenge Desa Bonto Matene	Desa Bonto Matene	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
41	Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang SDN 234 Barambang II Dusun Bentenge Desa Bonto Matene	Desa Bonto Matene	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
42	Pembangunan WC SDN 234 Barambang II Dusun Bentenge Desa Bonto Matene	Desa Bonto Matene	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
43	Pembangunan Paving Blok Halaman Olahraga SMPN 16 Mandai Dusun Bontoramba Desa Bonto Matene	Desa Bonto Matene	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
44	Peningkatan Kapasitas Jalan Poros Penghubung Antara Dusun Tamarunang / Butta Mammu (Desa Baji Mangngai) ke Desa Pattontongan	Desa Baji Mangngai	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1600 km	Musrenbang
45	Pembangunan Drainase / Dekker Dusun Baddo - Baddo RT 02 Desa Baji Mangngai	Desa Baji Mangngai	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 500 m	Musrenbang
46	Pengadaan Lampu Jalan Poros dan Pemukiman Dusun Baddo - Baddo Desa Baji Mangngai	Desa Baji Mangngai	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 10 buah	Musrenbang
47	Pengadaan Lampu Jalan Poros Dusun Pao - Pao Desa Baji Mangngai	Desa Baji Mangngai	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 7 buah	Musrenbang

48	Perbaikan Pagar Sekolah SD Inpres 222 Dusun Pao-Pao Desa Baji Mangngai	Desa Baji Mangngai	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 250 m	Musrenbang
49	Pembangunan Paving Blok Halaman SD Inpres 222	Desa Baji Mangngai	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 500 m2	Musrenbang
50	Rehab / Perbaikan Pagar Sekolah SD Dusun Baddo-Baddo Desa Baji Mangngai	Desa Baji Mangngai	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 100 m	Musrenbang
51	Bantuan APD Bagi Masing-Masing Penyandang Disabilitas	Desa Baji Mangngai	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 set	Musrenbang
52	Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Linmas	Desa Baji Mangngai	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 15 orang	Musrenbang
53	Peningkatan dan Pelebaran Jalan dari Dusun Bangun Polea ke Kampung Borong	Desa Pattontongan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 204 m x 3 m	Musrenbang
54	Pembangunan Jembatan dan Perluasan Drainase Dusun Bangun Polea Samping Rumah Imam Dusun	Desa Pattontongan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 100 m x 3 m	Musrenbang
55	Drainase Dusun Mangento - Buttamammu	Desa Pattontongan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 500 m	Musrenbang
56	Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan Desa	Desa Pattontongan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 300 m	Musrenbang
57	Pengadaan Lampu Jalan Dusun Mangento - Baji Mangngai	Desa Pattontongan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 35 titik	Musrenbang

58	Pemasangan Paving Blok Halaman, Pagar dan Gedung SDN 228 Salu Desa Pattontongan	Desa Pattontongan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 250 m2	Musrenbang
59	Pemasangan Paving Blok Halaman dan Pagar SDN 56 Pattontongan Desa Pattontongan	Desa Pattontongan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 500 m2	Musrenbang
60	Pembangunan Ruang Publik (Perpustakaan Desa / Taman Baca)	Desa Pattontongan	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
61	Pagar Sekolah Dusun Padaelo Desa Tenrigangkae	Desa Tenrigangkae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	Volume 35 x 65 m	Musrenbang
62	Paving Blok Halaman Sekolah SD Dusun Padaelo Desa Tenrigangkae	Desa Tenrigangkae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 20 x 25 m	Musrenbang
63	Pembangunan Lapangan Olahraga Serba Guna	Desa Tenrigangkae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 paket	Musrenbang
64	Pemberian Alat Bantu Kursi Roda, Tongkat, Alat Bantu Dengar dan Kaki Palsu Bagi PPKS (Disabilitas, Lansia dan Anak)	Desa Tenrigangkae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 set	Musrenbang
65	Permintaan Tenaga Dokter di Desa	Desa Tenrigangkae	Jumlah paket Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang terbangun	volume 1 oraNg	Musrenbang

BAB.III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TelaahTerhadapKebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamqatan Mandai adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Mandai

Table 3.1

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Mandai mempunyai *tujuan* dan *sasaran*:

Tujuan	**sasaran**	**Indikator**
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM PATEN
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	IKM Trantib Linmas
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerinthan Desa /Kelurahan	IKM Desa /Kelurahan
Meningkatkan Peran serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	Meningkatnya akses Masyarakat dalam kegiatan Keagamaam secara aktif	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan
Meningkatkan Peran Serta Perempuan di Kecamatan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Atif Perempuan Di Kecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial dan ekonomi	Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam kegiatan pembangunanBidang social dan ekonomi
Meningkatkan kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan dasar Kecamatan	Meningkatnya Cakupan Pelayan Dasar Masyarakat Kecamatan sesuai SPM	Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

3.3. Telaahan terhadap Kebijakan Perubahan

I. Dasar

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2. Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 180/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kab Maros Tahun 2024
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
4. SE Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2024 Nomor 917/151/BKAD

II. Pokok Permasalahan

1. Terdapat Sub Kegiatan yang harus dilakukan Penyesuaian di karenakan mengalami Perubahan di dalam Sub Rincian Obyek Belanja yang berbeda.

2. Sehubungan dengan adanya kegiatan pada kantor kami, yang dimana tidak terdapat anggaran pada kegiatan tersebut maka kami mengajukan penambahan sub kegiatan dan anggarannya, yang mana kegiatan tersebut ada pada daftar terlampir.

III. Analisis dan Alasan Perubahan

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pada Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan,
- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Pada Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Kendaraan Hias)

Di lakukan Perubahan Untuk dialihkan ke Sub Kegiatan Fasilitasi Jamuan Tamu Pada Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu dengan alasan semakin bertambahnya Kegiatan dan Ke sementara Anggaran Makan Minum Tamu terbatas.

- Pada Sub Kegiatan ‘‘Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan’’ dilakukan Penambahan anggaran dan sub kegiatan **dikarenakan sesuai dengan kebutuhan.**

TABEL T-C. 32

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MANDAI TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA MAROS

NO REKENING					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2024					Catatan penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Mandai	100	Persen		PAD		100 Persen	5.345.904.789
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	Kecamatan Mandai	*19*	*Dokumen*	*8.680.000*	*PAD*		*19 Dokumen*	*60.300.000*
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	Kecamatan Mandai	2	Dokumen	1.050.000	PAD		2 Dokumen	7.000.000
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mandai	1	Dokumen	1.200.000	PAD		1 Dokumen	3.000.000
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mandai	1	Dokumen	1.250.000	PAD		1 Dokumen	3.100.000

7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Mandai	1	Dokumen	1.000.000	PAD		1 Dokumen	3.200.000
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mandai	1	Dokumen	850	PAD		1 Dokumen	32.000.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mandai	1	Laporan	1.650.000	PAD		1 Laporan	5.500.000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Kecamatan Mandai	12	Laporan	1.680.000	PAD		12 Laporan	6.500.000
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**Kecamatan Mandai**			***4.288.566.451***				***4.544.424.789***
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mandai	58	Orang/Bulan	4.249.516.451	DAU		14 Dokumen	4.494.424.789
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Mandai	12	Dokumen	39.050.000	DAU		12 Dokumen	14.500.000
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Mandai	12	Dokumen	-	-		12 Dokumen	3.600.000
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Mandai	1	Laporan	-	-		1 Laporan	7.500.000

7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Daerah		Kecamatan Mandai			14.500.000	PAD			126.450.000
7	1	1	2.05	2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	Kecamatan Mandai	58	Paket	14.500.000	PAD		58 Paket	14.500.000
													Dokumen	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**Kecamatan Mandai**	11	Jenis	**127.091.950**	**PAD**		11 Jenis	**382.000.000**
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Mandai	15	paket	4.133.450	PAD		10 jenis	10.000.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediKn	Kecamatan Mandai	17	paket	9.575.000	PAD		17 paket	25.000.000
7	1	1	2.06	4	Penyedia bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Kecamatan Mandai	3	Paket	21.571.000	PAD		3 Paket	30.000.000
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kecamatan Mandai	2	Paket	7.450.000	PAD		2 Paket	17.000.000
7	1	1	2.06	8	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Terfasilitasi kunjungan tamu	Kecamatan Mandai	11	Laporan	12.000.000	PAD		11 Laporan	210.000.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	Kecamatan Mandai	12	Laporan	72.362.500	PAD		12 Laporan	90.000.000
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Mandai**	**4**	**Jenis**	**185.790.000**	**PAD**			**294.680.000**

7	1	1	2.08	1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedia jasa Surat	Kecamatan Mandai	12	laporan	7.650.000	PAD		12 laporan	18.000.000
7	1	1	2.08	2	Penyedia jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Mandai	12	laporan	6.000.000			12 laporan	26.680.000
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Mandai	12	laporan	172.140.000	PAD		12 laporan	250.000.000
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**Kecamatan Mandai**		**3 Jenis**	**24.937.900**	PAD		**3 Jenis**	**50.000.000**
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Mandai	6	unit	12.697.900	PAD		10 unit	15.500.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Mandai	2	unit	12.240.000	PAD		2 unit	34.500.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan	Kecamatan Mandai	100	Persen	**1.222.800.000**	PAD		100 Persen	1.450.000.000
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan**	Kecamatan Mandai	**4**	**Urusan**	**132.840.000**	PAD		**4 Urusan**	**255.000.000**

7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec Sabat)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Mandai	1	Dokumen	12.840.000	PAD		1 Dokumen	100.000.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (BOP Kelurahan Bontoa)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Mandai	12	Dokumen	60.000.000	PAD		12 Dokumen	100.000.000
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (BOP Kelurahan Hasanuddin)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Mandai	12	Dokumen	60.000.000	PAD		12 Dokumen	100.000.000
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**Kecamatan Mandai**	**2**	**Kegiatan**	**1.193.400.000**	PAD		**2 Kegiatan**	**1.270.000.000**
7	1	2	2	2	Fasilitasi Percamatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percamatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mandai	1	Laporan	-	PAD		5 Jenis	10..000.000
7	1	2	2	3	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Mandai	24	Laporan	1.193.400.000	PAD		24 Laporan	1.270.000.000
7	**1**	**2**	**4**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku**	**Kecamatan Mandai**	**3**	**layanan**	**16.560.000**	**PAD**		**3 layanan**	**80.000.000**

7	1	2	4	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinn usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Mandai	4	dokumen	5.230.000	PAD		4 dokumen	25.000.000
7	1	2	4	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Kecamatan Mandai	8	Laporan	5.200.000	PAD		8 Laporan	25.000.000
7	1	2	4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang diimpahkan	Jumlah Laporan pelaksanaan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain Yang Diimpahkan	Kecamatan Mandai	1	Laporan	6.130.000	PAD		1 Laporan	30.000.000
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**Kecamatan Mandai**	**100**	**Persen**	**75.379.250**	**PAD**		**100 Persen**	**160.000.000**
7	**1**	**3**	**2**	**1**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan Pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**Kecamatan Mandai**	**1.12**	**Orang**	**76.289.000**	**PAD**		**1.120 Orang**	**160.000.000**
7	1	3	2.01	2	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah Kerja Kecamatan	Kecamatan Mandai	2	Dokumen	41.618.000	PAD		2 Dokumen	80.000.000
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mandai	3	Laporan	33.761.250	PAD		3 Laporan	80.000.000

7	1	3	2	2	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (LKM Pelayan desa/kelurahan)	Kecamatan Mandai	3	kegiatan	400.000.000	PAD		3 Kegiatan	122.800.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun	Kecamatan Mandai (Bontoa)	1	unit	200.000.000	DAU		1 unit	750.000.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun	Kecamatan Mandai (Hasanuddin)	1	unit	200.000.000	DAU		1 unit	750.000.000
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Mandai	2	Laporan	-	PAD		2 Laporan	2.800.000
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan	Kecamatan Mandai	100	Persen	**8.100.000**	**PAD**		**100 Persen**	**20.000.000**
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan	Kecamatan Mandai	1	kegiatan	8.100.000	**PAD**		**1 kegiatan**	20.000.000
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara Nasional Indonesia, Dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mandai	1	laporan	8.100.000	PAD		1 laporan	20.000.000
7	**1**	**5**			**ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mandai	100	Persen	**78.550.000**	**PAD**		**100 Persen**	**260.500.000**

7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** **sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**Kecamatan Mandai**	**4**	**Kegiatan**	**78.550.000**	PAD		**4 Kegiatan**	**260.500.000**
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan kutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Mandai	500	Orang	26.400.000	PAD	500	500 Orang	140.500.000
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mandai	400	Orang	-	PAD	400	400 Orang	62.732.000
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Mandai	1.22	Orang	52.150.000	PAD	1.22	1.220 Orang	120.000.000

7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mandai	1	dokumen	-			1 dokumen	8.000.000
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**Kecamatan Mandai**	**100**	**Persen**	**7.250.000**	PAD		**100 Persen**	**15.000.000**
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**Kecamatan Mandai**	**4**	**Desa**	**7.250.000**	PAD		**4 Desa**	**15.000.000**
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Mandai	4	Dokumen	**7.250.000**	PAD		4Dokumen	**15.000.000**

BAB. IV PENUTUP

1. Saran dan Kesimpulan

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Mandai. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Mandai ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Maros secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Ridha dan Petunjuk Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing. Amin.**

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

RENCANA KERJA PERUBAHAN - DPMD Tahun Anggaran 2024

“Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing”



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 1 Maros Prop. Sul-Sel Telp. 0411 – 371068 Fax. 0411 - 371920 Kode Pos, 90516
Email : dpmd@maroskab.go.id Website : www.maroskab@go.id

KATA PENGANTAR

Dengan Ucapan Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2024 berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros merupakan pengaplikasian Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana Kerja (Renja) Setiap tahun. Oleh karena itu dalam penyusunan Renja Perubahan ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Maros periode 2021-2026 yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kabupaten Maros.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Perubahan ini, dan kami menyadari bahwa dalam Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2024 ini masih terdapat berbagai kekurangan dan masih perlu penyempurnaan lagi sehingga memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan. Untuk itu mohon saran kepada semua pihak agar Renja ini menjadi lebih baik di masa mendatang.

Maros, 31 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Maros

Drs. IDRUS, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 197303031993021003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			**1**
DAFTAR ISI			**2**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**3**
	1.1.	Latar Belakang	3
	1.2.	Landasan Hukum	4
	1.3.	Maksud dan Tujuan	7
	1.4.	Sistematika Penulisan	7
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**		**11**
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	11
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
	2.4	Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD	22
	2.5.	Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**		**35**
	3.1	Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	35
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja	40
	3.3	Program dan Kegiatan	41
BAB IV	**PENUTUP**		**49**

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2024 yang telah berjalan dapat mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan PD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perubahan PD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perubahan berperan penting dalam setiap kinerja suatu PD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah di rancang sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2024 dilakukan dengan menganalisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2024 untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan tahun yang telah lalu serta mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan perubahan Rencana Kerja tahun berjalan yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang baik Desa maupun Kecamatan.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan OPD didasarkan atas pertimbangan pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing OPD;

c. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD sebagian besar merupakan pergeseran dana yang berasal dari kegiatan kurang maksimal penyerapannya maka akan dipindahkan ke kegiatan yang masih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2024 serta lebih optimal pemanfaatannya bagi warga masyarakat;

d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2022 mengacu kepada beberapa peraturan sebagai landasan hukum seperti dibawah ini :

1 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

18 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

19 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Thun 2021 Tentang Hasil Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);

21 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);

22 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (berita Daerah Kabupaten Maros tahun 2023 Nomor 34); dan

24 Peraturan Bupati Maros nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 Nomor 12).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja PD (RENJA PD) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2024 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2024 sesuai dengan,Visi misi Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2021-2026.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja PD (RENJA PD) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2024 dengan tujuan untuk :

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maros untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
b. Menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dalam 1 (satu) tahun perencanaan.
c. Adanya kesinambungan antara RPJMD , Renstra PD dan Renja PD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja Kementerian dan Renja Provinsi/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta pedoman yg dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD,

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi terget kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kabupaten), TPB (Tujuan pembanguan jangka berkelanjutan) dan IKU (indicator Kinerja Utama). Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDGs.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan pencatatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dlakukan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengam pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun PD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan atau kabupaten (kalau dilaksanakan).

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

1. Pencatatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB 2
HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun sebelumnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2024. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap porogram (outcome) dan kegiatan (output) yang dilaksanakan oleh Dinas Perikaanan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan, pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros melaksanakan 5 program, 10 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang dilaksanakan sebanyak lima (5) Program, dengan jumlah program yang mencapai target sebanyak empat (4) program, jumlah program yang tidak mencapai target sebanyak satu (1) Program dan jumlah program yang melampaui target sebanyak nol (0) program
2. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak sepuluh (10) kegiatan, dengan jumlah kegiatan yang mencapai target sebanyak sembilan (9) kegiatan, jumlah kegiatan yang tidak mencapai target sebanyak satu (1) kegiatan dan jumlah kegiatan yang melampaui target sebanyak nol (0) kegiatan
3. Jumlah Sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak dua puluh tiga puluh Sembilan (39) Sub kegiatan, dengan jumlah sub kegiatan yang mencapai target sebanyak tigapuluh (30) sub kegiatan, jumlah sub kegiatan yang tidak mencapai target sebanyak sembilan (9) Sub kegiatan dan jumlah sub kegiatan yang melampaui target sebanyak nol (0) sub kegiatan

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros sampai dengan tahun 2024 Triwulan II dapat diuraikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1

REKAFITULASI EVALUASI HASIL PELANKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 TRIWULAN II

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAROS

Kode Rekening						Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan 2023		
											Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1						2	3		4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	
2	**13**	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**															
2	**13**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**Persen**
2	**13**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**57**	**19**	**19**	**19**	**100**	**19**	**57**	**100**	**Persen**
2	13	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	2	2	2	100	2	6	100	Persen
2	13	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen

2	13	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen
2	**13**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**135**	**45**	**45**	**45**	**100**	**45**	**135**	**100**	**Persen**
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	2.268	756	756	756	100	756	2.268	100	Persen
2	13	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen
2	13	01	2	02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	54	18	18	18	100	18	54	100	Persen
2	**13**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**78**	**26**	**26**	**26**	**100**	**26**	**78**	**100**	**Persen**
2	13	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	6	2	2	2	100	2	6	100	Persen
2	13	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen
2	13	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen
2	**13**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Dokumen**	**486**	**162**	**183**	**162**	**89**	**162**	**486**	**100**	**Persen**
2	13	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	162	54	61	54	89	54	162	100	Persen

2	13	01	2	05		Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta Atribut Kelengkapan	Paket	162	54	61	54	89	54	162	100	Persen
2	13	01	2	05		Pengadaan Pakaian Baju Batik	Jumlah Paket Pakaian Batik	Paket	162	54	61	54	89	54	162	100	Persen
2	**13**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Jenis Layanan**	**24**	**8**	**8**	**8**	**100**	**8**	**24**	**100**	**Persen**
2	13	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen
2	13	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	5	5	5	100	5	15	100	Persen
2	13	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	60	20	20	20	100	20	60	100	Persen
2	13	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen
2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen
2	13	01	2	06		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen
2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen
2	**13**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenis**	**6**	**2**	**2**	**2**	**100**	**2**	**6**	**100**	**Persen**
2	13	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	100	1	3	300	Persen
2	13	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	5	5	100	5	15	300	Persen
2	**13**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Jenis**	**9**	**3**	**3**	**3**	**100**	**3**	**9**	**100**	**Persen**
2	13	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen

2	13	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	12	12	12	100	12	36	100	Persen
2	**13**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang berada dalam kondisi Baik**	**Jenis BMD**	**6**	**2**	**2**	**2**	**100**	**2**	**6**	**100**	**Persen**
2	13	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	15	15	15	100	15	45	100	Persen
2	13	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	6	2	2	2	100	2	6	100	Persen
2	**13**	**02**				**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa Yang Terfasilitasi Dalam Penataan Desa**	**Persen**	**180**	**55**	**60**	**60**	**100**	**65**	**180**	**100**	**Persen**
2	**13**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa**	**Desa**	**168**	**56**	**56**	**56**	**100**	**56**	**168**	**100**	**Persen**
2	13	02	2	01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	02	2	01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	240	80	80	80	100	80	240	100	Persen
2	13	02	2	01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	240	80	80	80	100	**80**	240	100	Persen
2	13	02	2	01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa	24	8	8	8	100	8	24	100	Persen
2	**13**	**03**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Desa Yang Memiliki Kerjasama Baik Antar Pemerintah Desa Maupun Dengan Pihak Ketiga Dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Persen**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**100**	**Persen**
2	**13**	**03**	**2**	**01**		**Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**Jumlah Dokumen kerja sama antar desa yang difasilitasi dalam rangka pembangunan Desa**	**Dokumen**	**240**	**80**	**80**	**80**	**100**	**80**	**240**	**100**	**Persen**
2	13	03	2	01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen

2	13	03	2	01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	03	2	01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	**13**	**04**				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Memiliki Pencatatan Data dan Informasi Tentang Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan Berlaku**	**Persen**	**60**	**10**	**20**	**20**	**100**	**30**	**60**	**100**	**Persen**
2	**13**	**04**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku**	**Desa**	**48**	**8**	**16**	**16**	**100**	**24**	**48**	**100**	**Persen**
2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	240	80	80	80	100	80	240	100	Persen
2	13	04	2	01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	04	2	01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa	Laporan	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	240	80	80	80	100	80	240	100	Persen
2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	16	16	16	16	100	0	16	100	Persen
2	13	04	2	01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	16	16	16	16	100	0	16	100	Persen

2	13	04	2	01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	240	80	80	80	100	80	240	100	Persen
2	13	04	2	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	240	80	80	80	100	80	240	100	Persen
2	13	04	2	01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi dalam Penetapan	Desa	24	8	8	8	100	8	24	100	Persen
2	13	04	2	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	**13**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persen**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**300**	**100**	**Persen**
2	**13**	**05**	**2**	**01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan**	**Lembaga**	**309**	**103**	**103**	**103**	**100**	**103**	**309**	**100**	**Persen**
2	13	05	2	01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Dokumen
2	13	05	2	01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	309	103	103	103	100	103	309	100	Persen

2	13	05	2	01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	3	1	1	1	100	1	3	100	Laporan
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	3	1	1	1	100	1	3	100	Laporan
2	13	05	2	01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	3	1	1	1	100	1	3	100	Persen
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	9	3	3	3	100	3	9	100	Dokumen
2	13	05	2	01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	Keluarga	3	1	1	1	100	1	3	100	Keluarga

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Jenis Indikator yang dikaji serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kinerja Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun jumlah indikator pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri dari IKK LPPD sebanyak 6 indikator , IKU sebanyak 8 Indikator dan , IKK RPJMD sebanyak 7 Indikator

Tabel. 22
Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Maros

NO.	INDIKATOR	IKU	IKK	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik		√	71 80 88,75	72 80 90,00	73 80 91,25	74 80 92,5	70 80 87,5	72 80 90	75 80 93,75	78 80 97,5	IKK RPJMD
2	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat		√	103 103 1,00	103 103 1,00	103 103 1,00	103 103 1,00	103 103 1,00	103 103 1,00	103 103 1,00	103 103 1,00	IKK RPJMD
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK		√	1131 118 9,58	1131 118 9,58	1131 118 9,58	1131 118 9,58	1511 118 12,81	2606 118 22,08	2616 118 22,17	2626 118 22,25	IKK RPJMD
4	Persentase LPM Berprestasi		√	20 103 19,42	21 103 20,39	23 103 22,33	24 103 23,30	9 103 8,74	10 103 9,71	15 103 14,56	20 103 19,42	IKK RPJMD
5	Persentase PKK Aktif		√	118 118 100	118 118 100	118 118 100	118 118 100	118 118 100	118 118 100	118 118 100	118 118 100	IKK RPJMD
6	Persentase Posyandu Aktif		√	382 382 100	382 382 100	382 382 100	382 382 100	416 416 100,00	422 422 100,00	425 425 100,00	430 430 100,00	IKK RPJMD
7	Persentase Jumlah Desa Mandiri		√	6 80 7,50	7 80 8,75	8 80 10	9 80 11,25	13 80 16,25	43 80 53,75	55 80 68,75	75 80 93,75	IKK LPPD
8	Persentase Jumlah Desa Maju		√	23 80 28,75	25 80 31,25	27 80 33,75	29 80 36,25	42 80 52,50	23 80 28,75	15 80 18,75	0 80 0,00	IKK LPPD / TPB
9	Persentase Jumlah Desa Berkembang		√	 80 0,00	 80 0	 80 0	 80 0,00	24 80 30,00	13 80 16,25	5 80 6,25	0 80 0,00	IKK LPPD / TPB
10	Persentase Jumlah Desa Tertinggal		√	2 80 2,50	1 80 1,25	0 80 0	0 80 0,00	2 80 2,50	1 80 1,25	0 80 0,00	0 80 0,00	IKK LPPD / TPB
11	Persentase masyarakat miskin di desa yang menjadi peserta SJSN/ mendapatkan BLT	√		44,83	45,23	46,64	47,04	60,21	60,21	65,69	68,69	IKU
12	Persentase Masyarakat Miskin di Desa yang memiliki pendapatan diatas standar nasional	√		69,82	71,89	74,01	76,18	67,60	67,60	54,54	58,74	IKU
13	Persentase RT Miskin Di desa yang memiliki akses terhadap pelayanan dasar sesuai kewenangan Desa	√		82,66	83,36	84,06	84,76	78,26	78,26	80,07	81,76	IKU
14	Indeks ketahanan sosial Desa	√		78,00	79,00	82,00	84,00	80,24	82,40	85,40	88,40	IKU
15	Indeks ketahanan Ekonomi Desa	√		63,00	64,00	66,00	68,00	70,94	74,95	77,95	81,95	IKU
16	Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi Desa	√		64,00	65,00	67,00	79,00	70,34	79,33	85,33	90,33	IKU

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Hasil evaluasi kienrja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros pada tahun 2022 menunjukkan adanyan beberapa permasalahan dan hambatan yang mempegaruhi kinerja pelayanan tersebut. Permasalahan dan hambatan yang di hadapi adalah sebegai berikut :

Identifikasi Permasalahan,Hambatan, Dampak, Peluang dan Rekomendasi Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros

Masalah	Hambatan	Dampak
• Terbatasnya anggaran dan kondisi geografis desa yang sulit terjangkau • Status legalitas lahan belum merupakan aset desa atau pemda	• Masih banyak sarana prasarana pemerintah desa yang belum memenuhi standar • Memerlukan pembangunan sarana dan prasarana baru	Cakupan sarana prasarana pemerintah Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik
Kurangnya pembinaan terhadap SDM LPM	SDM LPM masih terbatas	LPM beprestasi
• Desa tersebut sangat jauh dari perkotaan	• Sarana dan prasarana desa tersebut sangat terbatas • Memerlukan bantuan pengembangan infratruktur	Persentase Jumlah Desa Tertinggal
• Masih tinggihnya jumlah warga miskin di desa yang tidak memiliki pekerjaan tetap • Kurangnya pembinaan terhadap warga miskin di desa	• Memerlukan bantuan lapangan kerja • Selalu berharap bantuan dari Pemerintah	Persentase Masyarakat Miskin di Desa yang memiliki pendapatan diatas standar nasional
• Kurangnya pendapatan warga miskin di desa untuk memenuhi akses layanan dasar	• Kurangnya kesadaran warga akan pentingnya pemenuhan layanan dasar • Selalu berharap bantuan dari Pemerintah	Persentase RT Miskin Di desa yang memiliki akses terhadap pelayanan dasar sesuai kewenangan Desa

2.3.2. Permasalahan, Hambatan dan Dampak Terkait pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros

Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2022 sangat baik, capaian sasaran dari akumulasi beberapa kegiatan, sasaran program secara fisik dapat dicapai 100 %.

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

   Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksaan tugas dan fungsi OPD, adalah kurangnya SDM aparat pelaksana yang kurang dan masih rendahnya pemahaman ASN tentang peraturan tentang Administrasi Pelayanan di OPD dan Pemerintah Desa

b. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasioanal, seperti SDGs.

Pencapaian visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Maros akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Maros

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD

1. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD : Masih rendahnya SDM ASN terhadap prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi Pelayanan.
2. peluang dalam meningkatkan pelayanan PD : Komitmen Kepala Daerah yang kuat yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan bertanggung jawab dengan Pencapai sumber Daya Manusia yang baik dan inovatif dengan adanya visi misi Bupati dan Adanya dukungan Aplikasi Kab. Maros online akan menjadikan Aparat Pemerintah Desa mudah dalam pengurusan Administrasi.

d. Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan, Administrasi Pemerintahan Desa serta Penataan dan Kerjasama antar Desa: Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah BKPSDM mempunyai tugas di bidang Pemerintahan urusan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa. Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian atau evaluasi yang lain. Secara umum identifikasi permasalahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Dalam rangka untuk meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros dan mensukseskan program Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Maros, diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya Aparatur Sipil Negara .

Dari Uraian Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah diatas, dapat disimpulkan bahwa Isu Strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pengembangan Bumdes, TTG dan kerjasama antar desa;
b. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta masih kurangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berprestasi;
c. Masih rendahnya realisasi pelaksanaan program kegiatan dana desa, penyertaan swadaya masyarakat dan pemeliharaan pasca program.

2.4. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Secara umum rancangan awal RKPD telah sesuai dengan Renja yang digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAROS

RANCANGAN AWAL RKPD										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
1						2	3	4	5	6	2	3	4	5		6
	13					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				9.000.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				8.148.595.705	
2	13	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor PMD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	5.794.228.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kantor PMD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	5.364.657.705	Diusul DPMD
2	13	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor PMD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	49.960.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor PMD	Jumlah Dokumen Perencanaa, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Dokumen	16.680.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.800.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.990.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.400.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.990.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.200.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.990.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.400.000	Diusul DPMD

2	13	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1.200.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	4.995.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1.280.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	19.995.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	8.400.000	Diusul DPMD
2	**13**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kantor PMD**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**59**	**Dokumen**	**4.665.501.400**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kantor PMD**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**59**	**Dokumen**	**4.684.730.460**	**Diusul DPMD**
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Dokumen	4.537.026.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Dokumen	4.581.670.460	Diusul DPMD
2	13	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	103.480.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	95.260.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	4.995.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	1.600.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1.200.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	2.000.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	18	Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	18	Laporan	2.000.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1.000.000	Diusul DPMD

2	**13**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kantor PMD**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**14**	**Dokumen**	**8.890.000**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kantor PMD**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**14**	**Dokumen**	**2.470.000**	**Diusul DPMD**
2	13	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	2.900.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	800.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	3.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	800.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	2.990.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	870.000	Diusul DPMD
2	**13**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kantor PMD**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**186**	**Paket**	**35.400.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kantor PMD**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**186**	**Paket**	**45.500.000**	**Diusul DPMD**
2	13	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor DPMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62	Paket	15.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kantor DPMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	62	Paket	15.500.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	05		Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kantor DPMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta Atribut Kelengkapan	62	Paket	7.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Kantor DPMD	Jumlah Paket Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta Atribut Kelengkapan	0	Paket	12.500.000	
2	13	01	2	05		Pengadaan Pakaian Baju Batik	Kantor DPMD	Jumlah Paket Pakaian Batik	62	Paket	12.400.000	Pengadaan Pakaian Baju Batik	Kantor DPMD	Jumlah Paket Pakaian Batik	62	Paket	17.500.000	Diusul DPMD
2	**13**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kantor PMD**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**64**	**Jenis**	**429.157.100**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kantor PMD**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**64**	**Jenis**	**266.067.245**	**Diusul DPMD**
2	13	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Jenis	14.999.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Jenis	8.963.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor DPMD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Jenis	22.393.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor DPMD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Jenis	13.500.845	Diusul DPMD
2	13	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor DPMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Jenis	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor DPMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Jenis	28.526.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor DPMD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Jenis	24.825.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor DPMD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Jenis	25.183.400	Diusul DPMD
2	13	01	2	06		Penyediaan Bahan / Material	Kantor DPMD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Jenis	42.000.000	Penyediaan Bahan / Material	Kantor DPMD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3	Jenis	31.000.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	40.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	13.000.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	249.940.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	145.894.000	Diusul DPMD

2	**13**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kantor DPMD**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah**	**17**	**Unit**	**334.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kantor DPMD**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah**	**17**	**Unit**	**89.500.000**	**Diusul DPMD**
2	**13**	**01**	**2**	**07**	**05**	Pengadaan Mebel	Kantor DPMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	150.000.000	Pengadaan Mebel	Kantor DPMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit	27.000.000	Diusul DPMD
2	**13**	**01**	**2**	**07**	**06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor DPMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	184.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor DPMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	62.500.000	Diusul DPMD
2	**13**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor DPMD**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**36**	**Laporan**	**191.320.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36**	**Laporan**	**36**	**Laporan**	**214.710.000**	**Diusul DPMD**
2	13	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	11.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1.870.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	35.000.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	154.570.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	177.840.000	Diusul DPMD
2	**13**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor DPMD**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang berada dalam kondisi Baik**	**17**	**Unit**	**80.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor DPMD**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang berada dalam kondisi Baik**	**17**	**Unit**	**45.000.000**	**Diusul DPMD**
2	13	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor DPMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor DPMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	20.000.000	Diusul DPMD
2	13	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	7	Unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	7	Unit	25.000.000	Diusul DPMD
2	**13**	**02**				**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Kab. Maros**	**Persentase Desa Yang Terfasilitasi Dalam Penataan Desa**		**Persen**	**106.320.000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Kab. Maros**	**Persentase Desa Yang Terfasilitasi Dalam Penataan Desa**	**80**	**Desa**	**107.780.000**	**Diusul DPMD**
2	**13**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Kab. Maros**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa**	**80**	**Desa**	**106.320.000**	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Kab. Maros**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa**	**80**	**Desa**	**107.780.000**	**Diusul DPMD**
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**01**	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Maros	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Desa	14.750.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Maros	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Desa	25.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**02**	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Maros	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	80	Desa	14.500.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Maros	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	80	Desa	15.950.000	Diusul DPMD dan Masyara

																	kat
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**03**	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Maros	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	80	Desa		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Maros	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	80	Desa	25.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**04**	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Maros	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Desa	29.030.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Maros	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Desa	19.730.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**05**	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	Laporan	29.040.000	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	0	Laporan	5.100.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**06**	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	15	Unit	19.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	15	Unit	17.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	**13**	**03**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Kab. Maros**	**Persentase Desa Yang Memiliki Kerjasama Baik Antar Pemerintah Desa Maupun Dengan Pihak Ketiga Dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat**		**Persen**	**72.206.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Kab. Maros**	**Persentase Desa Yang Memiliki Kerjasama Baik Antar Pemerintah Desa Maupun Dengan Pihak Ketiga Dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat**		**Persen**	**84.692.000**	**Diusul DPMD**
2	**13**	**03**	**2**	**01**		**Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**Kab. Maros**	**Jumlah Dokumen kerja sama antar desa yang difasilitasi dalam rangka pembangunan Desa**	**4**	**Dokumen**	**72.206.000**	**Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**Kab. Maros**	**Jumlah Dokumen kerja sama antar desa yang difasilitasi dalam rangka pembangunan Desa**	**4**	**Dokumen**	**84.692.000**	**Diusul DPMD**
2	**13**	03	2	01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	30.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	Dokumen	31.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	**13**	**03**	**2**	**01**	**02**	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	1	Dokumen	16.050.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	1	Dokumen	25.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	**13**	**03**	**2**	**01**	**01**	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	Dokumen	26.156.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	Dokumen	28.692.000	Diusul DPMD dan Masyarakat

2	**13**	**04**				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Maros**	**Persentase Desa Yang Memiliki Pencatatan Data dan Informasi Tentang Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan Berlaku**	**Persen**	**2.137.945.500**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Kab. Maros**	**Persentase Desa Yang Memiliki Pencatatan Data dan Informasi Tentang Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan Berlaku**	**Persen**	**872.906.000**	**Diusul DPMD**
2	**13**	**04**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Maros**	**Jumlah Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku**		**2.137.945.500**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Maros**	**Jumlah Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku**		**872.906.000**	**Diusul DPMD**
2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	58.270.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	54.500.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	14.900.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	9.700.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	25.025.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	11.950.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	27.370.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	9.520.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Maros	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	80 Orang	33.200.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Maros	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	80 Orang	197.850.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	23.010.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan	25.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	26.545.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	25.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	33.110.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	65.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat

2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	Laporan	0	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	0	Laporan	0	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	Laporan	0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0	Laporan	0	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	64	Laporan	1.642.025.500	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	64	Laporan	70.145.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Laporan	17.600.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Laporan	25.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	11	Penyusunan Profil Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Profil Desa	1	Dokumen	26.500.000	Penyusunan Profil Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Profil Desa	1	Dokumen	75.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1	Dokumen	26.600.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1	Dokumen	25.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1	Dokumen	26.500.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1	Dokumen	13.300.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Maros	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	80	Orang	26.660.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Maros	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	80	Orang	62.500.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Maros	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	40		30.950.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Maros	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	40		101.241.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1	Laporan	23.880.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1	Laporan	35.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	04	2	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	75.800.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1	Dokumen	67.200.000	Diusul DPMD dan Masyarakat

2	**13**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kab. Maros**	**Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persen**	**889.300.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Kab. Maros**	**Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**	**Persen**	**1.718.560.000**	**Diusul DPMD**
2	**13**	**05**	**2**	**01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan**	**118 Lembaga**	**889.300.000**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan**	**118 Lembaga**	**1.718.560.000**	**Diusul DPMD**
2	13	05	2	01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	23.500.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	6.920.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	05	2	01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	34.600.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	22.450.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	118 Lembaga	34.150.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	118 Lembaga	14.740.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	05	2	01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	45.100.000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	20.100.000	Diusul DPMD dan Masyarakat

2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Dokumen	18.050.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Dokumen	25.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	274.200.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	275.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan	21.900.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	Laporan	80.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	05	2	01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	Dokumen	34.950.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1	Dokumen	13.100.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3	Dokumen	335.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3	Dokumen	1.191.250.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	05	2	01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Maros	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja sama antar Keluarga, warga dan kelompok masyarakat.	80	Keluarga	33.400.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Maros	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja sama antar Keluarga, warga dan kelompok masyarakat.	80	Keluarga	35.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat
2	13	05	2	01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkanSumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.	Kab. Maros	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkanSumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.	80	Keluarga	34.450.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkanSumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.	Kab. Maros	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkanSumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.	80	Keluarga	35.000.000	Diusul DPMD dan Masyarakat

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Maros yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan usulan dari kegiatan Musrenbang yang terkait dengan usulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros ke dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros.

Dari hasil Forum Perangkat Daerah dilakukan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap Perangkat Daerah. Dalam keadaan terdapat usulan masyarakat yang mendesak dan belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap Perangkat Daerah yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD. Sehingga rancangan RKPD merupakan integrasi dan harmonisasi antara rancangan awal RKPD dengan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah mendapatkan konfirmasi dan review dari setiap Perangkat Daerah.

Musrenbang tahunan atau Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah berfungsi menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan.

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

KABUPATEN MAROS

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Besar Volume		Lokasi	Catatan
1						2	3		4	5
	13					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2	13	02				PROGRAM PENATAAN DESA				
2	13	02	2	01		Penyelenggaraan Penataan Desa				
2	13	02	2	01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	80	Desa	Kab. Maros	Musrenbang
						Penataan dan Peningkatan Kwalitas Lingkungan Kawasan 1 paket (23 Ha)	1	Desa	Desa	
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
2	13	04	2	01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4	Dokumen	Kab. Maros	
						Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	4	Desa	Desa Baji Pa'mai Kec. Cenrana dan Desa Bonto Bunga Kec. Moncongloe, Desa Majannang, Desa Mattirotasi	Usulan Kecamatan
2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1	Dokumen	Kab. Maros	
						Peningkatan Pengetahuan Warga di Desa terkait Produk Hukum	1	Desa	Desa Simbang	Usulan Kecamatan
2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1	Dokumen	Kab. Maros	
						Peningkatan Pengetahuan Tim Pengelolah kegiatan dalam penyusunan RAB kegian fisik maupun pemberdayaan	1	Desa	Desa	Usulan Kecamatan
2	13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	80	Orang	Kab. Maros	
						Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2	Desa	Desa Moncongloe,	Usulan Kecamatan
						Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1	Lembaga	APDESI	Usulan Lembaga
2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	2	Dokumen	Kab. Maros	

						Peningkatan kapasitasi SDM masyarakat pelaku usaha ekonomi di Desa	6	Desa	Desa Bontolempangan, Desa Salenrang, Desa Bontobunga, Desa Tompobulu, Desa Minasaupa,	Usulan Kecamatan
						Peningkatan kapasitasi SDM masyarakat pelaku usaha ekonomi di Desa	1	Lembaga	BKNDI	Usulan Lembaga
2	**13**	**04**	**2**	**01**	**11**	**Penyusunan Profil Desa**		**Dokumen**	**Kab. Maros**	
						Peningkatan SDM Operator Profil Desa Dalam Mengimput Data Profil Desa	3	Desa	Desa Bontolempangan, Kel. Biribellaya, Desa Toddolimae	Usulan Kecamatan
2	**13**	**04**	**2**	**01**	**14**	**Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD**	**80**	**Orang**	**Kab. Maros**	
						Pemahan Regulasi dan Segala Turunan Regulasi	1	Lembaga	DPC Abpednas Maros	Usulan Lembaga
						Peningkatan Kapasitas BPD dan Anggotanya	6	Desa	Desa Bontolempangan, Desa Benteng Gaja, Desa Toddolimae, Desa Mattirotasi,	Usulan Kecamatan
2	**13**	**04**	**2**	**01**	**15**	**Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa**	**80**	**Desa**	**Kab. Maros**	
						Evaluasi dan Penyesuaian Penegasan Batas Desa	1	Desa	Desa Moncongloe Kec. Moncongloe	Usulan Kecamatan
2	13	04	2	01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		Laporan	Kab. Maros	
2	**13**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**				
2	**13**	**05**	**2**	**01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**				
2	**13**	**05**	**2**	**01**	**02**	**Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**		**Dokumen**	**Kab. Maros**	
						Pembinaan dan Pelatihan Kader Posyandu Untuk Peningkatan SDM Kader	19	Desa / Kel.	Kel. Boribellaya, Kel. Bajubodoa, Kel. Raya, Kel. Pettuadae, Kel. Turikale, Kel. Pallantikang,	Usulan Kecamatan
2	**13**	**05**	**2**	**01**	**03**	**Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**		**Lembaga**	**Kab. Maros**	
						anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan PKK di Kelurahan padahal kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap tahun sehingga banyak kegiatan tidak terlaksana dengan baik dan Kader meminta agar ada anggaran transportasi untuk tiap pelaksanaan kegiatan.	1	Kelurahan	Keluraham Boribellaya	Usulan Kecamatan

2	**13**	**05**	**2**	**01**	**04**	**Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**	**100**	**Unit**	**Kab. Maros**	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana (Kursi dan Timbang Digital untuk Posyadu)	6	Desa/Kel	Desa Sambueja, Kel. Alliritengngae, Kel. Pettuadae, Kel. Borong, Desa tanete, Desa Sabueja	Usulan Kecamatan
2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Dokumen	Kab. Maros	
2	**13**	**05**	**2**	**01**	**06**	**Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**	**1**	**Laporan**	**Kab. Maros**	
						Pelatihan Hidroponik dan Peningkatan SDM bagi petani milenial	2	Desa	Kel. Alliritengngae,	Usulan Kecamatan
2	**13**	**05**	**2**	**01**	**08**	**Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa**	**1**	**Dokumen**	**Kab. Maros**	
						Angkatan kerja semakin bertambah	1	Desa	Desa	Usulan Kecamatan
2	**13**	**05**	**2**	**01**	**09**	**Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga**	**5**	**Dokumen**	**Kab. Maros**	
						Peningkatan kapasitas kader posyandu dan pemberian insentif bagi kader posyandu	7	Desa/Kel	Kel. Boribellaya, Kel. Bajubodoa, Kel. Raya, Kel. Pettuadae, Kel. Turikale,	Usulan Kecamatan
						Penunjang Akfitas Tim Penggerak PKK	1	Lembaga	Tim Penggerak PKK Kab. Maros	Usulan Lembaga

BAB 3
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional setelah pemuktahiran yang dilakukan oleh BAPPENAS pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengarah pada pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk mendorong berkembangnya potensi-potensi yang ada di perdesaan berupa pertanian dan industri agro. Selain daripada itu percepatan pembangunan desa juga menjadi kegiatan prioritas nasional dalam rangka menopang desa dengan status tertinggal menjadi desa dengan status berkembang dan mandiri. Selain itu, Pengentasanan Kemiskinan Ekstrem dan Penanganan Stunting adalah isu yang menjadi fokus utama Nasionla. Melihat pada kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat secara nasional dibandingkan dengan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan masih berjalan beriringan. Oleh karena itu perlu juga untuk melakukan koordinasi pada tingkat pusat untuk dapat memantapkan keselarasan antara kegiatan prioritas nasional dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

A. Kementerian Dalam Negeri RI (Ditjen Bina Pemerintahan Desa)

Dalam penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sangat memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yakni (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, (2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender, dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing.

Kementerian Dalam Negeri bertugas membantu sebagian tugas Presiden dalam bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan pemerintahan yang meliputi : Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah, Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian Dan Pengembangan. Untuk tugas pokok dan fungsi tersebut Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Desa.

Kejelasan kedudukan Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan kekuatan utama Kementerian Dalam Negeri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang urusan pemerintahan dalam negeri. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Dalam Negeri juga memiliki sejumlah peluang yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, Kementerian Dalam Negeri memiliki mandat untuk merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan desa, melalui upaya-upaya pembinaan kepada pemerintah daerah Provinsi maupun

Kabupaten/Kota, peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah dan desa, memberikan fasilitasi, penataan ruang dan lingkungan hidup, memberikan fasilitasi dalam pengembangan perekonomian daerah, melakukan upaya-upaya percepatan dalam penanganan ketimpangan/kesenjangan antar daerah, serta memberikan fasilitasi dalam pengelolaan perkotaan. Adapun tantangannya yaitu dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah yang Desentralistik, peningkatan pelayanan publik melalui SPM yang telah ditetapkan dan diinisiasi penerapannya, belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.Selain itu peningkatan kualitas waktu penyelesaian APBD belum diikuti sepenuhnya dengan komposisi anggaran yang berorientasi kepada Penggunaan Belanja Daerah untuk kepentingan pelayanan public yang lebih optimal oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri RI menentukan tujuan strategis yaitu optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa dengan sasaran stragegis meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

B. Kementerian Desa PDTT

Pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi termasuk dalam Prioritas Nasional Kedua tentang Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan pada Kegiatan Prioritas Keempat yaitu Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi. Selain adanya mandate dari RPJMN 2020-2024, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Daerah Tertinggal. Paling tidak terdapat tiga aspek penting dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut.

- Pertama, undang-undang ketransmigrasian mengamanatkan bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama diluar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat antara lain dari: (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaaan perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa luar Jawa, dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa.
- Kedua, undang-undang desa yang mengamanatkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan mandat yang cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Aspek materialisme undang-undang desa yaitu keuangan desa dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan dalam membangun desa. Dari cara pandang peluang, dana yang cukup besar yang diberikan kepada desa dapat mendorong percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan, serta pemenuhan pelayanan dasar desa. Namun dari cara pandang tantangan, fakta lemahnya tata kelola keuangan desa selama ini berpotensi menggiring desa pada inefisiensi tata kelola desa, tidak tepatnya

sasaran pelaksanaan percepatan pembangunan desa, serta degradasi kultur gotong-royong dan integritas aparatpemerintah desa. Karena itu, pendampingan desa menjadi agenda besar dalamimplementasi undang-undang desa, termasuk pemanfaatan dana desa bagikesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan kawasan perdesaan yang merupakan salahsatu kawasan strategis nasional memiliki peran penting dalam mendukungpengurangan kesenjangan dalam pembangunan nasional.Berdasarkan undang-undang desa, kawasan perdesaan diartikan sebagai kawasan yang mempunyaikegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunanfungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasapemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

- Ketiga, peraturan pemerintah tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal yang menekankan perlunya peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi percepatan pembangunan daerahantara pusat dengan daerah dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan,pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi adalah mandat yang cukup kuat bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam menggerakkan dan mengintegrasikan Kementerian, Lembaga, Daerah, dan Mitra pembangunan.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam poin ke-3 NAWACITA yakni *"Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan"*, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan dimana salah satu kebijakan strategisnya adalah dengan pembangunan Perdesaan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan;
3. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal;
4. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana dasar dan aksesibilitas di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
5. Meningkatkan derajat ketahanan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, rawan pangan, dan konflik sosial;
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah; dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan yang terkonektifitas dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah;

8. Percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan baru yang terintegrasi dalam suatu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah untuk mewujudkan keterkaitan desa dan kota.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu:

1. Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui:
   a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
   b. Menyusun peraturan pelaksanaan perundang-undangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal;
   c. Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa.
2. Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi;
3. Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
4. Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
5. Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, adminitrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
7. Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tert inggal dan kawasan transmigrasi
8. Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

Strategi Pembangunan Nasional yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kemendesa PDTT terdapat pada Strategi ke-1, ke-2 dan ke-7 yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Terkait penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional maka berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kwalitas hidup masyarakat desa,dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan social, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah mengalokasikan dana untuk Alokasi Dana Desa serta dana pemantauan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN setiap tahunnya. Keberhasilan pembangunan tingkat Desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di Pemerintah juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan. Sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar

waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rumusan visi dalam Renstra Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri 2015- 2019 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam lima tahun ke depan yaitu ‘‘Terwujudnya Otonomi dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif’’. Adapun misi yaitu menetapkan Kebijaksanaan Nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya:

1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Mengembangkan Kelembagaan dan Partisipasi masyarakat;
3. Memantapkan kehidupan sosial budaya dan masyarakat;
4. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat;
5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan Teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.

Tabel. 3.1.1
TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL,PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN NASIONAL		KEBIJAKAN PROPINSI		KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	
1	Kebijakan Percepatan Pengentasanan Kemiskinan Ekstrem, Penanganan Stunting dan Anak Tidak Sekolah	1	Mendukung Percepatan Pengentasan Kemiskinan Eksterm, Penanganan Stuntung dan Anak Tidak Sekolah	1	Melaksanakan Kegiatan-Kegiatan yang mendukung Percepatan Pengentasan Kemiskinan Eksterm, Penanganan Stuntung dan Anak Tidak Sekolah
2	Pada bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengarah pada pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk mendorong berkembangnya potensi-potensi yang ada di perdesaan berupa pertanian dan industri agro	2	Peningkatan kerjasama Desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama, dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;	2	Peningkatan Penataan Desa, Kerjasama antar Desa dan penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa
3	percepatan pembangunan desa juga menjadi kegiatan prioritas nasional dalam rangka menopang desa dengan status tertinggal menjadi desa dengan status berkembang dan mandiri	3	Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa;	3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Pemerintah Desa, dan Badan Kerjasama Antar Desa dalam pembentukan kerjasama Desa
4	Kebijakan Percepatan Penyusunan Satu Peta Indonesia	4	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wilayah Sulawesi Selatan	4	Penetapan dan Penegasan Batas Desa di tiap Desa Se- Kabupaten Maros
		5	Penguatan lembaga ekonomi masyarakat (BUMDes)	5	Peningkatan Pembinaan Pengelolaan Kegiatan BUMDes
		6	Peningkatan status Desa Mandiri dan pengentasan status Desa Tertinggal;	6	Meningkatkan sosialisasi di desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun dan sosialisasidi desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun di Kabupaten Maros
		7	Penguatan fungsi kapasitas lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	7	Peningkatan Pembinaan SDM dan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA

Tujuan adalah merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan tujuan dari visi/misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang dimana organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros akan dapat mengetahui hal - hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai limatahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros memiliki tujuan organisasi yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros yang profesional, bersinergi dan berkinerja tinggi.
2. Menurunkan tingkat kemiskinan di Desa dan Kelurahan.
   Layanan Dasar, isu Stunting di Desa dan Kelurahan dan angka anak tidak sekolah (ATS) di Desa.
3. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah Desa menuju Kemandirian Desa, terkait Ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat Desa dan Ketahanan Lingkungan/Ekologi Desa.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros

VISI : Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing			
MISI 1 RPJMD : MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK			
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
Meningkatkan Tata Kelola DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAROS yang profesional, bersinergi dan berkinerja tinggi	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai RB DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	BB (66)
		Nilai SAKIP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAROS	BB (77)
MISI 4 RPJMD : MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL			
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
Menurunkan tingkat kemiskinan di Desa	Meningkatnya masyarakat miskin dan sangat miskin di desa yang mendapatkan jaminan sosial / BLT	Persentase masyarakat miskin dan sangat miskin di desa yang mendapatkan jaminan sosial / BLT	46,64 %
	Meningkatnya Akses masyarakat Miskin di Desa terhadap Pemberdayaan UMKM, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Penyediaan Akses Pekerjaan.	Persentase Masyarakat Miskin di Desa yang memiliki pendapatan diatas standar nasional	74,01 %
	Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Di Desa terhadap pelayanan dasar	Persentase RT Miskin Di Desa yang memiliki akses terhadap pelayanan dasar sesuai kewenangan Desa	84,06 %
MISI 5 RPJMD : MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH			
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah Desa menuju Kemandirian Desa	Meningkatnya ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat Desa	Indeks Ketahanan Sosial Desa (IKS)	82 POIN
		Indeks Ketahanan Ekonomi Desa (IKE)	66 POIN
MISI 6 RPJMD : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA			
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator**	**Target**
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan wilayah Desa menuju Kemandirian Desa	Meningkatnya Ketahanan Lingkungan / Ekologi Desa	Indeks Ketahanan Lingkungan / Ekologi Desa (IKL)	67 POIN

3.3 Program dan Kegiatan

a. Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros sangat memperhatikan faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya adalah :

MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	SASARAN DPMD	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	KETERANGAN
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros**	**5.349.101.315**	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros	55.000.000	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros	4.132.476.015	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Maros	15.000.000	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Maros	24.800.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros	444.825.300	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Maros	335.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	242.000.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	100.000.000	
Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Menurunnya jumlah Masyarakat Miskin.	Meningkatnya masyarakat miskin dan sangat miskin di desa yang mendapatkan jaminan sosial / BLT	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Kab. Maros**	**50.000.000**	
			Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Kab. Maros	50.000.000	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	**35.000.000**	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	35.000.000	

MISI RPJMD	SASARAN RPJMD	SASARAN DPMD	PROGRAM KEGIATAN	LOKASI	PAGU INDIKATIF (Rp)	KETERANGAN
		Meningkatnya Akses masyarakat Miskin di Desa terhadap Pemberdayaan UMKM, Pengembangan Ekonomi Lokal dan Penyediaan Akses Pekerjaan.	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Maros**	35.000.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Maros	35.000.000	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**Kab. Maros**	**310.000.000**	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	310.000.000	
		Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Di Desa terhadap	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**Kab. Maros**	**60.000.000**	
			Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Kab. Maros	60.000.000	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**Kab. Maros**	**405.000.000**	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	405.000.000	
Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah	**Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat**	**Meningkatnya ketahanan sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat Desa**	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**Kab. Maros**	**2.150.204.700**	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Maros	2.150.204.700	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	**Kab. Maros**	**150.000.000**	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	150.000.000	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	**Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan**	**Meningkatnya Ketahanan Lingkungan / Ekologi Desa**	**Program Penataan Desa**	**Kab. Maros**	**145.000.000**	
	Menurunnya resiko akibat bencana		Penyelenggaraan Penataan Desa	Kab. Maros	145.000.000	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	**Kab. Maros**	**100.000.000**	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Maros	100.000.000	

c. Rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Tabel T-3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 & PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

KABUPATEN MAROS

Nama Perangkat Daerah :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13					**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**8.824.306.015**				**10.872.726.015**	
2	**13**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kantor DPMD**	**Persen**	**5.349.101.315**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**Persen**	**5.727.726.015**	**PAD**
2	**13**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kantor DPMD**	**19 Dokumen**	**55.000.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**19 Dokumen**	**65.000.000**	**PAD**
2	13	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor DPMD	2 Dokumen	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	2 Dokumen	5.000.000	PAD
2	13	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor DPMD	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	5.000.000	PAD
2	13	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kantor DPMD	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	5.000.000	PAD
2	13	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kantor DPMD	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	5.000.000	PAD
2	13	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kantor DPMD	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	5.000.000	PAD
2	13	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor DPMD	1 Laporan	10.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Laporan	15.000.000	PAD
2	13	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor DPMD	12 Laporan	20.000.000	DAU	Diusul DPMD	12 Laporan	25.000.000	PAD
2	**13**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kantor DPMD**	**112 Dokumen**	**4.132.476.015**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**112 Dokumen**	**4.154.976.015**	**DAU**
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DPMD	62 Orang/ bulan	3.997.476.015	DAU	Diusul DPMD	62 Orang/ bulan	3.997.476.015	DAU
2	13	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor DPMD	12 Dokumen	110.000.000	DAU	Diusul DPMD	12 Dokumen	120.000.000	DAU
2	13	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor DPMD	12 Dokumen	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	12 Dokumen	7.500.000	PAD
2	13	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor DPMD	1 Laporan	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Laporan	7.500.000	PAD
2	13	01	2	02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor DPMD	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	7.500.000	PAD
2	13	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan / Semesteran SKPD	Kantor DPMD	19 Laporan	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	19 Laporan	7.500.000	PAD
2	13	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor DPMD	5 Dokumen	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	5 Dokumen	7.500.000	PAD

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	**13**	**01**	**2**	**03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kantor DPMD**	**25 Dokumen**	**15.000.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**25 Dokumen**	**22.500.000**	**PAD**
2	13	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor DPMD	1 Dokumen	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	7.500.000	PAD
2	13	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor DPMD	12 Dokumen	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	12 Dokumen	7.500.000	PAD
2	13	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor DPMD	12 Laporan	5.000.000	DAU	Diusul DPMD	12 Laporan	7.500.000	PAD
2	**13**	**01**	**2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Kantor DPMD**	**124 Paket**	**24.800.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**124 Paket**	**45.250.000**	**PAD**
2	13	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kantor DPMD	62 Paket	24.800.000	DAU	Diusul DPMD	0 Paket	30.000.000	PAD
2	13	01	2	05		Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Lapangan (PDL) beserta Atribut Kelengkapan	Kantor DPMD	0 Paket	0	DAU	Diusul DPMD	62 Paket	15.250.000	PAD
2	13	01	2	05		Pengadaan Pakaian Baju Batik	Jumlah Paket Pakaian Batik	Kantor DPMD	62 Paket	0	DAU	Diusul DPMD	0 Paket	0	PAD
2	**13**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**Kantor DPMD**	**31 Paket**	**444.825.300**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**31 Paket**	**602.000.000**	**PAD**
2	13	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kantor DPMD	1 Paket	15.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Paket	20.000.000	PAD
2	13	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kantor DPMD	2 Paket	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	2 Paket	35.000.000	PAD
2	13	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kantor DPMD	1 Paket	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Paket	40.000.000	PAD
2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kantor DPMD	1 Paket	24.825.300	DAU	Diusul DPMD	1 Paket	27.000.000	PAD
2	13	01	2	06		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kantor DPMD	1 Paket	50.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Paket	75.000.000	PAD
2	13	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DPMD	1 Laporan	40.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Laporan	55.000.000	PAD
2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor DPMD	24 Laporan	250.000.000	DAU	Diusul DPMD	24 Laporan	350.000.000	PAD
2	**13**	**01**	**2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah**	**Kantor DPMD**	**17 Unit**	**335.000.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**17 Unit**	**450.000.000**	**PAD**
2	**13**	**01**	**2**	**07**	**05**	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kantor DPMD	2 Unit	150.000.000	DAU	Diusul DPMD	15 Unit	250.000.000	PAD
2	**13**	**01**	**2**	**07**	**06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kantor DPMD	15 Unit	185.000.000	DAU	Diusul DPMD	15 Unit	200.000.000	PAD
2	**13**	**01**	**2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Kantor DPMD**	**36 Laporan**	**242.000.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**36 Laporan**	**248.000.000**	**PAD**
2	13	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DPMD	12 Laporan	15.000.000	DAU	Diusul DPMD	12 Laporan	12.000.000	PAD
2	13	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kantor DPMD	12 Laporan	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	12 Laporan	36.000.000	PAD
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kantor DPMD	12 Laporan	197.000.000	DAU	Diusul DPMD	12 Laporan	200.000.000	PAD
2	**13**	**01**	**2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang berada dalam kondisi Baik**	**Kantor DPMD**	**17 Unit**	**100.000.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**17 Unit**	**140.000.000**	**PAD**
2	13	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kantor DPMD	10 Unit	50.000.000	DAU	Diusul DPMD	10 Unit	65.000.000	PAD
2	13	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Kantor DPMD	7 Unit	50.000.000	DAU	Diusul DPMD	7 Unit	75.000.000	PAD

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	**13**	**02**				**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase Desa Yang Terfasilitasi Dalam Penataan Desa**	**Kab. Maros**	**Persen**	**145.000.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**Persen**	**270.000.000**	**PAD**
2	**13**	**02**	**2**	**01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam Penataan Desa**	**Kab. Maros**	**80 Desa**	**145.000.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**80 Desa**	**270.000.000**	**PAD**
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**01**	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kab. Maros	4 Desa	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	4 Desa	45.000.000	PAD
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**02**	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kab. Maros	80 Desa	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	80 Desa	45.000.000	PAD
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**03**	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kab. Maros	80 Desa	0	DAU	Diusul DPMD	80 Desa	45.000.000	PAD
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**04**	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kab. Maros	80 Desa	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	0 Desa	45.000.000	PAD
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**05**	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Maros	1 Laporan	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	0 Laporan	45.000.000	PAD
2	**13**	**02**	**2**	**01**	**06**	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Maros	20 Unit	25.000.000	DAU	Diusul DPMD	20 Unit	45.000.000	PAD
2	**13**	**03**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase Desa Yang Memiliki Kerjasama Baik Antar Pemerintah Desa Maupun Dengan Pihak Ketiga Dalam Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat**	**Kab. Maros**	**Persen**	**110.000.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**Persen**	**2.320.000.000**	**PAD**
2	**13**	**03**	**2**	**01**		**Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**Jumlah Dokumen kerja sama antar desa yang difasilitasi dalam rangka pembangunan Desa**	**Kab. Maros**	**4 Dokumen**	**110.000.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**4 Dokumen**	**2.320.000.000**	**PAD**
2	**13**	03	2	01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Maros	1 Dokumen	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	85.000.000	PAD
2	**13**	**03**	**2**	**01**	**02**	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota	Kab. Maros	1 Dokumen	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	85.000.000	PAD
2	**13**	**03**	**2**	**01**	**01**	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Maros	2 Dokumen	50.000.000	DAU	Diusul DPMD & TMMD	1 Dokumen	2.150.000.000	PAD
2	**13**	**04**				**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Memiliki Pencatatan Data dan Informasi Tentang Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan Berlaku**	**Kab. Maros**	**Persen**	**2.285.204.700**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**Persen**	**1.490.000.000**	**PAD**
2	**13**	**04**	**2**	**01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa yang memiliki pencatatan Data dan Informasi tentang Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku**	**Kab. Maros**	**Desa**	**2.285.204.700**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**Desa**	**1.490.000.000**	**PAD**
2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Maros	1 Dokumen	65.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	75.000.000	PAD
2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Maros	1 Dokumen	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Maros	1 Dokumen	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Maros	1 Dokumen	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2	13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Maros	80 Orang	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	120.000.000	PAD
2	13	04	2	01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Kab. Maros	1 Laporan	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Laporan	45.000.000	PAD
2	13	04	2	01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Maros	1 Dokumen	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Maros	1 Dokumen	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Maros	64 Laporan	1.605.204.700	DAU	Diusul DPMD	64 Laporan	500.000.000	PAD

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	13	04	2	01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Maros	64 Laporan	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	64 Laporan	45.000.000	PAD
2	13	04	2	01	11	Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Maros	1 Dokumen	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2	13	04	2	01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kab. Maros	1 Dokumen	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2	13	04	2	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Maros	1 Dokumen	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2	13	04	2	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Maros	80 Orang	50.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	60.000.000	PAD
2	13	04	2	01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kab. Maros	40 Desa	100.000.000	DAU	Diusul DPMD	40 Desa	125.000.000	PAD
2	13	04	2	01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Maros	1 Laporan	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Laporan	75.000.000	PAD
2	13	04	2	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Maros	1 Dokumen	80.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	85.000.000	PAD
2	**13**	**05**				**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**	**Kab. Maros**	**Persen**	**935.000.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**Persen**	**1.065.000.000**	**PAD**
2	**13**	**05**	**2**	**01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan**	**Kab. Maros**	**118 Lembaga**	**935.000.000**	**DAU**	**Diusul DPMD**	**118 Lembaga**	**1.065.000.000**	**PAD**
2	13	05	2	01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	1 Dokumen	30.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2	13	05	2	01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	1 Dokumen	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Maros	118 Lembaga	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	118 Lembaga	45.000.000	PAD
2	13	05	2	01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Maros	10 Unit	50.000.000	DAU	Diusul DPMD	15 Unit	75.000.000	PAD
2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Maros	Dokumen	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Maros	1 Laporan	275.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Laporan	200.000.000	PAD

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Maros	1 Laporan	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	85.000.000	PAD
2	13	05	2	01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Maros	1 Dokumen	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	1 Dokumen	85.000.000	PAD
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Maros	3 Dokumen	335.000.000	DAU	Diusul DPMD	3 Dokumen	350.000.000	PAD
2	13	05	2	01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama antar-keluarga, warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam membangun Kerja sama antar Keluarga, warga dan kelompok masyarakat.	Kab. Maros	80 Keluarga	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	80 Keluarga	45.000.000	PAD
2	13	05	2	01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkanSumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkanSumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.	Kab. Maros	80 Keluarga	35.000.000	DAU	Diusul DPMD	80 Keluarga	45.000.000	PAD

BAB. IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021-2026. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah. Renja sebagai pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, maka perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut :

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam penyusunan Renja Perubahan yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024 dengan berpedoman pada Renja 2024 dan RKPD 2024 dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Maros berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2024 dalam Renja OPD

dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA PPAS).

5.3 Rencana Kerja Tindak Lanjut

Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2024 selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2024. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros tahun 2024 juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros serta memberi manfaat bagi proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Maros.

Semoga Renja Perubahan yang dibuat ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan kemampuan anggaran tahun 2024 menuju Maros Sejahterah, Religius dan Berdaya Saing. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2024 ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2021, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024. Untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program/ kegiatan ini akan diadakan evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Demikian untuk dapat dilaksanakan.

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MAROS

RENCANA KERJA PERUBAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Tahun Anggaran 2024

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan tahun ke empat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun berdasarkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah 2021-2026. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja Perubahan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sebelum perubahan. Melalui Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Maros, 31 Juli 2024

PLT. SEKRETARIS DAERAH,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

SEKRETARIS DAERAH, ... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 11

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 24

a. Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah 24

b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 26

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan / Renstra PD 29

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN 34

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah 35

3.3 Telaahan Staf Terhadap Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan 36

BAB IV PENUTUP 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD 13
Tabel 2. 2 Perencanaan Kinerja Pelayanan Perangkat Sekretariat Daerah Tahun 2024 . 23
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25
Tabel 2. 4 Analisis Permasalahan dan Hambatan Pencapaian Kinerja PD 28
Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 30
Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 33

Tabel 3. 1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Maros Tahun 2024 35
Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 36
Tabel 3. 3 Rumusan Perubahan Rencana Anggaran Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026 dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan, penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan didalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026, yang kemudian setiap pertengahan tahun berjalan dilakukan beberapa koreksi dan penyesuaian dengan menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan). Renja Perubahan Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024, maka disusunlah Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2024 Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.

Sebagaimana dengan bidang tugas lingkup Sekretariat Daerah sebagai pelayanan administrasi, koordinasi, pengendalian, dan pembinaan

kemasyarakatan yang dengan berdasarkan visi dan misi organisasi yang telah dirumuskan, diharapkan dapat menjadi payung perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi agar supaya sasaran dan tujuan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Maros dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan tahun 2024 mengakomodir seluruh kepentingan dasar dan kebijakan pemerintah daerah, baik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun sifatnya koordinatif dan lintas Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maros. Sebagaimana tercantum dalam visi Pemerintah Kabupaten Maros pada periode 2021 – 2026 yaitu ” Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing” dan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan public;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia;
3. Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi local;
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Begitupula program dan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilanjutkan dengan mekanisme dan penyusunan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat pencapaian dari renja tersebut sangat tergantung dari realisasi pagu anggaran yang tersedia serta tingkat kemampuan aparatur untuk melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana kerja ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan serta sasaran akan dicapai berdasarkan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang tersedia sebagai salah satu kinerja keberhasilan kegiatan tersebut.

Diharapkan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan kesinambungan pembangunan, administrasi dan pelayanan kemasyarakatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neaa Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomo 1781);
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

16. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 tanggal 6 Juli 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 sebagai acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024.

b. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan 2024 ini diantaranya adalah :

   1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan antar bagian, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah;
   2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan;
   3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD-P.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen**.**

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan.

Bab ini memuat kajian (riview) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD. Sub bab ini memuat kajian tentang tingkat kinerja pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tupoksi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dampak pelayanan PD terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, SPM dan MDGs.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Memuat uraian tentang proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut serta temuan-temuan setelah proses perbandingan dilakukan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Memuat usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi memuat uraian mengenai penelaahan terhadap kebijakan dan prioritas nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Renja Perubahan PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaran tupoksi PD dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3 Telaahan Staf Terhadap Perubahan RKPD

Telaahan Staf Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Peruabhan Anggaran program, kegiatan dan Sub Kegiatan PD serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal, yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam pelaksanaan program kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros tahun 2023 menjadikan pengukuran sasaran pada kegiatan yang dananya bersumber dari anggaraan pembangunan daerah diluar belanja, realisasi diukur target sasaran dan capaian kondisi yang diwujudkan pada tingkat outcome, dengan memperhatikan anggaran rencana kerja/kegiatan yang telah ditetapkan, maka Sekretariat Daerah belum mencapai sasaran strategik kinerja sebagaimana diharapkan.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Maros tahun 2021 - 2026 yang memuat indikator keberhasilan proses perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Sekretariat Daerah selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

Evaluasi didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 dan perkiraan pelaksanaan DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023.

Evaluasi capaian dan target program Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Maros dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah periode yang lalu, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Maros;
3. Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan pencapaian kinerja program Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Maros;
4. Identifikasi kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Sekretariat Daerah sampai tahun berjalan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Maros sampai dengan tahun 2023 sebagaimana tersaji dalam **tabel 2.1**. sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD

No Rekening		Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg			Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Bulan Berjalan	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2			3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)
4	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintrah Daerah**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**33**	**33%**
01	**01**	**2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**31**	**6**	**6**	**6**	**100%**	**6**	**18**	**58%**
01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	2	2	2	100%	2	6	55%
01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%
01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%

No Rekening		Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg			Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Bulan Berjalan	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2			3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(5/11)
01	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	**70**	**14**	**14**	**14**	**100%**	**14**	**42**	**60%**
01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln	13020	2604	2604	2548	98%	2604	7756	60%
01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	12	12	12	100%	12	36	60%
01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunaan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	1	1	1	100%	1	3	60%
01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunaan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	90	18	18	18	100%	18	54	60%
01	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian PD yang dilaksanakan**	**Jenis Layanan**	**35**	**7**	**7**	**7**	**100%**	**7**	**21**	**60%**
01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1465	340	293	293	100%	340	973	66%
01	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD yang dilaksanakan**	**Jenis Layanan**	**240**	**48**	**48**	**46**	**96%**	**48**	**142**	**59%**
01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	60	12	12	11.65	97%	12	36	59%
01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	60	12	12	10.87	91%	12	35	58%

No Rekening		Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg			Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Bulan Berjalan	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2			3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(5/11)
01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	60	12	12	11.85	99%	12	36	60%
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultsi SKPD	Laporan	60	12	12	11.55	96%	12	36	59%
01	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Unit**	**245**	**49**	**49**	**48**	**98%**	**49**	**146**	**60%**
01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	120	24	24	24	100%	24	72	60%
01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	125	25	25	24	96%	25	74	59%
01	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenis**	**140**	**28**	**28**	**24**	**86%**	**28**	**80**	**57%**
01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	20	4	4	0	0%	4	8	40%
01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	60%

No Rekening		Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg			Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Bulan Berjalan	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2			3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(5/11)
01	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang Berada Dalam Kondisi Baik**	**Jenis**	**290**	**58**	**58**	**58**	**100%**	**58**	**174**	**60%**
01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	250	50	50	50	100%	50	150	60%
01	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	40	8	8	8	100%	8	24	60%
01	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Orang**	**60**	**12**	**12**	**12**	**100%**	**12**	**36**	**60%**
01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bln	10	2	2	2	100%	2	6	60%
01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Paket	10	2	2	2	100%	2	6	60%
01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Chek Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bln	10	2	2	2	100%	2	6	60%
01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bln	10	2	2	2	100%	2	6	60%

No Rekening			Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg			Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Bulan Berjalan	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2			3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(5/11)
01	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Layanan Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah yang Terfasilitasi**	**Paket**	**180**	**36**	**36**	**36**	**100%**	**36**	**108**	**60%**
01	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	60	12	12	12	100%	12	36	60%
01	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	60	12	12	12	100%	12	36	60%
01	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan	Paket	60	12	12	12	100%	7	31	52%
01	**1**	**1**	**1**		**Penataan Organisasi**	**Jumlah Kebijakan Penataan Organisasi yang dikeluarkan**	**Laporan**	**110**	**22**	**22**	**18**	**82%**	**22**	**62**	**56%**
01	1	1	1	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	dokumen	25	5	5	5	100%	5	15	60%
01	1	1	1	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	25	5	5	5	100%	5	15	60%
01	1	1	1	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrsi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	35	7	7	7	100%	7	21	60%
01	1	1	1	4	Monitoring Evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan Publik dan Tata Laknsana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	dokumen	20	4	4	0	0%	4	8	40%
01	1	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordiansi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	dokumen	5	1	1	1	100%	1	3	60%

No Rekening			Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg			Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Bulan Berjalan	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2			3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(5/11)
01	**1**	**1**	**1**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumlah Layanan Keprotokoleran dan komunikasi pimpinan**	**Laporan**	**95**	**19**	**19**	**19**	**100%**	**19**	**57**	**60%**
01	1	1	1	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	20	4	4	4	100%	4	12	60%
01	1	1	1	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	15	3	3	3	100%	3	9	60%
01	1	1	1	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
01	**01**	**02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**Persentase Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yg dilaksanakan**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**33**	**33%**
01	**1**	**1**	**1**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan yang dilaksanakan**	**Laporan**	**45**	**9**	**9**	**8**	**89%**	**9**	**26**	**58%**
01	1	1	1	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	230	12	46	12	25%	46	69	30%
01	1	1	1	1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	50	10	10	10	100%	10	30	60%
01	1	1	1	1	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	20	4	4	4	100%	4	12	60%

No Rekening			Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg			Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Bulan Berjalan	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2			3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(5/11)
01	**1**	**1**	**1**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**		**Jumlah Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat yg dilaksanakan**	**Laporan**	**55**	**10**	**11**	**10**	**93%**	**11**	**31**	**57%**
01	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Dokumen	35	7	7	7	100%	7	21	60%
01	01	02	2.02	02	Pelaksanan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan KB	Dokumen	15	3	3	3	100%	3	9	60%
01	01	02	2.02	03	Pelaksanan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan. Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepermudaan dan Olahraga , Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsiapn, Trantibum Linmas	Dokumen	5		1	0.25	25%	1	1	25%

No Rekening			Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg			Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Bulan Berjalan	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2			3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(5/11)
01	**1**	**1**	**1**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Kebijakan Produk Hukum Daerah yang Terfasilitasi**	**Laporan**	**8000**	**1600**	**1600**	**1600**	**100%**	**1600**	**4800**	**60%**
01	**1**	**1**	**1**	**1**	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yg disusun	Dokumen	8000	1536	1600	1536	96%	1600	4672	58%
01	**1**	**1**	**1**	**2**	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yg mendapatkan fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	50	7	10	7	73%	10	25	49%
01	**1**	**1**	**1**	**3**	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum yg didokumentasi	Dokumen	8000	1536	1600	1536	96%	1600	4672	58%
01	**01**	**03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yg dilaksanakan**	**Persentase**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**33**	**33%**
01	**1**	**1**	**1**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dikeluarkan**	**Kebijakan**	**10**	**2**	**2**	**2**	**100%**	**2**	**6**	**60%**
01	1	1	1	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	25	5	5	5	100%	5	15	60%
01	1	1	1	2	Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	60	12	12	12	100%	12	36	60%
01	1	1	1	3	Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikri Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	10	2	2	2	100%	2	6	60%

No Rekening					Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Keg	Indikator	Satuan	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021-2026	Capaian Renstra Sampai Dengan Tahun 2022	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Bulan Berjalan	
										Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(5/11)
01		**1**	**1**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Jumlah Kebijakan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan**	**Kebijakan**	**15**	**3**	**3**	**3**	**100%**	**3**	**9**	**60%**
01	1	1	1	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	5	0	1	1	100%	1	2	40%
01		1	1	2	Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlahlaporan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	10	2	2	2	100%	2	6	60%
01	1	1	1	3	Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	60	12	12	12	100%	12	36	60%
01	**1**	**1**	**1**		**Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa**	**Jumlah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan**	**Kebijakan**	**25**	**5**	**5**	**5**	**100%**	**5**	**15**	**60%**
01	1	1	1	1	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	3500	650	700	650	93%	700	2000	57%
01	1	1	1	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	10	2	2	1	38%	2	5	48%
01	1	1	1	3	Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Orang	25	5	5	5	100%	5	15	60%

Berdasarkan table di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Maros pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 3 program, 17 kegiatan, dan 54 sub kegiatan dengan tingkat capaian program dan kegiatan (kinerja) rata-rata mencapai tingkat 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana disajikan pada **Tabel 2.2.** sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Perencanaan Kinerja Pelayanan Perangkat Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	IKU	IKK	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*	*13*	*14*	*16*
1.	Indeks Kualitas Kebijakan	√	-	Nilai Indeks	60	65	70	75	60	65	70.21	75.61	
2.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah	-	√	Sedang	2.78	2.95	3.35	3.51	2.68	2.92	3.12	3.25	
3.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	-	√	Nilai Indeks	60	62	64	68	60	62	64.03	66.10	

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

a. Analisis Tingkat Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah pada tahun 2023 menganpuh 3 indikator yang terdiri dari 1 indikator kinerja utama (IKU) dan 2 indikator kinerja kunci (IKK), yakni Nilai Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa. Untuk indikator IKU pada tahun 2023 realisasinya telah mencapai target dengan capaian 100%. Kemudian untuk indikator IKK LPPD capaiannya juga dianggap 100% dengan predikat Baik, demikian juga dengan IKK indeks tata kelola Pengadaan Barang/Jasa dengan capaian kinerja 100%.

Faktor kunci keberhasilan atau critical success factors merupakan capaian kongret dari prioritas asumsi strategis yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Sekretariat Daerah Kabupaten Maros dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Pada tataran implementasi operasional, aspek-aspek factor kunci keberhasilan tersebut substansinya dirinci lebih lanjut di dalam tujuan, sasaran, dan strategi sesuai dengan perubahan-perubahan kebijakan internal maupun eksternal.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah juga dapat kita lihat pada **Tabel 2.3** berikut ini :

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4 x 100)	9 = (7/5 x 100)
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Nilai Indeks	60	65	60	65	100	100
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah	Sedang	2.71	2.95	2.68	2.92	98.89	98.98
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Indeks	60	62	60	62	100	100
TOTAL CAPAIAN KINERJA							**99.63**	**99.66**

Faktor kunci keberhasilan yang diharapkan dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaran Pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip – prinsip Good Governance dan Otonomi Daerah yang bertanggung jawab;
2. Menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah;
3. Pemantaun dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan Administratif dan Aparatur Pemerintah Daerah;
5. Optimalisasi Kapasitas dan kualitas Pelayanan Aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah yang baik..
6. Menyelenggarakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai standar operasional prosedur dan kode etik UKPBJ.

b. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah Kabupaten Maros dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, antara lain :

1. Adanya kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkositensi perencanaan pembangunan dan mekanisme pendanaan daerah;
2. Terdapatnya kegiatan – kegiatan yang masih tumpang tindih antar perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk Sekretariat Daerah;
4. Belum adanya system pengelolaan Perencanaan yang dapat menghimpun seluruh produk perencanaan secara integritasi sehingga

informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan;

5. Keterbatasan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan penempatan aparatur yang belum sesuai dengan keahliannya.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya, Sekretariat Daerah diharapkan dapat responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas.

Gambaran permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target maksimal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros, dapat kita lihat pada **Tabel 2.4** berikut ini :

Tabel 2. 4 Analisis Permasalahan dan Hambatan Pencapaian Kinerja PD

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Peluang	Rekomendasi
1	Terdapatnya kegiatan – kegiatan yang masih tumpang tindih antar perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros	1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk Sekretariat Daerah; 2. Belum adanya system pengelolaan Perencanaan yang dapat menghimpun seluruh produk perencanaan secara integritasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan; 3. Keterbatasan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara dan penempatan aparatur yang belum sesuai dengan keahliannya	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah masih berada di tingkat Sedang	Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya, Sekretariat Daerah diharapkan dapat responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas	1. Penyelenggaran Pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip – prinsip Good Governance dan Otonomi Daerah yang bertanggung jawab; 2. Menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah; 3. Pemantaun dan Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah; 4. Pembinaan Administratif dan Aparatur Pemerintah Daerah; 5. Optimalisasi Kapasitas dan kualitas Pelayanan Aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola Pemerintah Daerah yang baik.. 6. Menyelenggarakan layanan pengadaan barang/jasa sesuai standar operasional prosedur dan kode etik UKPBJ.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan / Renstra PD

Sekretariat Daerah Kabupaten Maros termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Maros yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024 Kabupaten Maros sebagaimana dalam **Tabel 2.5.**

Tabel 2. 5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan Tahun 2024

Kode				Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
				Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1				2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
4	**1**	**1**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Maros, Turikale, Turikale**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**33,142,534,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kab. Maros, Turikale, Turikale**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**33,142,534,000**	
4	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	19 Dokumen	14,775,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	19 Dokumen	14,775,000	
4	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	14,329,731,216	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	12 Laporan	14,329,731,216	
4	1	1	2.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Pakaian Dinas PD Beserta Atribut Kelengkapannya	340 Paket	326,582,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Pakaian Dinas PD Beserta Atribut Kelengkapannya	340 Paket	326,582,000	
4	1	1	2.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	12 Jenis	4,815,698,400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	12 Jenis	4,815,698,400	
4	1	1	2.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jenis Barang Milik Daerah PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	49 Unit	203,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jenis Barang Milik Daerah PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	49 Unit	203,000,000	
4	1	1	2.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Jenis Jasa Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2,909,400,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Jenis Jasa Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	2,909,400,000	
4	1	1	2.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	58 Unit	1,425,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	58 Unit	1,425,000,000	

Kode				Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
				Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1				2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
4	1	1	2.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bula	1,446,489,324	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bula	1,446,489,324	
4	1	1	2.1	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Pelaksanaan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	12 Bulan	1,860,000,000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Pelaksanaan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi	12 Bulan	1,860,000,000	
4	1	1	2.1	Penataan Organisasi	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Nilai Reformasi Birokrasi yang Dicapai	64 Nilai	372,802,000	Penataan Organisasi	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Nilai Reformasi Birokrasi yang Dicapai	64 Nilai	372,802,000	
4	1	1	2.1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Media yang Meliput Kegiatan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	5,116,600,000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Media yang Meliput Kegiatan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	5,116,600,000	
4	**1**	**2**		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kab. Maros, Turikale, Turikale**	**Presentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**4,531,238,000**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Kab. Maros, Turikale, Turikale**	**Presentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**4,531,238,000**	
4	1	2	2	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Point	963,123,000	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4 Point	963,123,000	
4	1	2	2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Layanan Keagamaan	8 Kegiatan	3,227,925,000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Layanan Keagamaan	8 Kegiatan	3,227,925,000	
4	1	2	2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	3 Jenis	340,190,000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Produk Hukum Daerah yang diselesaikan	3 Jenis	340,190,000	

Kode				Rencana Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
				Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1				2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	12
4	**1**	**3**		**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kab. Maros, Turikale, Turikale**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**3,151,224,800**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Kab. Maros, Turikale, Turikale**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**3,151,224,800**	
4	1	3	2	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	18 Laporan	318,537,800	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	18 Laporan	318,537,800	
4	1	3	2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	18 Dokumen	415,618,000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	18 Dokumen	415,618,000	
4	1	3	2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	700 Paket	2,417,069,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	700 Paket	2,417,069,000	
TOTAL								**42,172,322,970**					**42,172,322,970**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

Tabel 2. 6 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan, maka dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun mulai dari rencana pembangunan jangka panjang RPJPD, RPJMD dan Renstra, dan rencana pembangunan jangka pendek (RKPD) yang diaktualisasikan melalui penyusunan Renja PD, kemudian diimplementasikan ke dalam RAPBD, maka Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat Daerah Tahun 2024 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja pun harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Terkait dengan kebijakan pembangunan nasional, maka Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah sebagai staf pendukung Kepala Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya di bidang pembangunan terkait dengan seluruh kebijakan nasional yang termuat dalam Prioritas Nasional, Fokus Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional.

Secara garis besar, arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk unggulan daerah;

4. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata;
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tabel 3. 1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Kabupaten Maros Tahun 2024

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal Secara Kewilayahan Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	
3	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas Wilayah Dan Pelayanan DasarMasyarakat
4	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Antisipasi Perubahan Iklim
5	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Secara Inklusif
6	Revolusi Mental	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah
7	Memperkuat stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik	

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Maros, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 seperti yang nampak pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Satuan
				2022	2023	2024	2024	2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*9*	*10*
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	60	65	70	75	80	Nilai Indeks

3.3 Telaahan Staf Terhadap Perubahan RKPD

Dalam Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran, terdapat beberapa Sub Kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian dikarenakan rincian Belanja pada beberapa Sub Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut :

a. Pada Sub Kegiatan “Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD” dilakukan penambahan jumlah bulan pada Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan, dimana sebelumnya dianggarkan 9 bulan menjadi 12 bulan dikarenakan pada jadwal pergeseran anggaran sebelumnya anggarannya telah dikurangi untuk menutupi kekurangan anggaran belanja Honorarium Kuasa Pengguan Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang sebelumnya hanya terdiri dari 3 KPA dan 3 BPP, namun setelah dihitung kembali Anggaran yang dikelola masing-masing Bagian lingkup Sekretariat Daerah ternyata ada 4 Bagian yang memenuhi kriteria untuk menjadi KPA dengan 4 BPP.

b. Pada Sub Kegiatan “Penyediaan Bahan Logistik Kantor” dilakukan penyesuaia anggaran pada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover.

c. Pada Sub Kegiatan “Fasilitasi Kunjungan Tamu” dilakukan penambahan anggaran pada Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Ruang Kerja Sekretaris Daerah, karena adanya peningkatan intensitas tamu Pimpinan yang diterima dengan anggaran yang belum pernah ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

d. Pada Sub Kegiatan “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD” dilakukan penambahan anggaran pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa, karena pada laporan realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2024, Belanja Perjalanan Dinas Biasa menunjukkan anggaran yang sudah tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun, sehingga dipandang perlu untuk ditambah.

e. Pada Sub Kegiatan “Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya” dilakukan pergeseran Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) pengadaan Sound System sebesar Rp. 50.000.000,- yang sebelumnya adalah Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio, karena melihat kondisi Sound System yang ada lebih efektif melakukan pengadaan dari pada pemeliharaan.

f. Pada Sub Kegiatan “Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor” dilakukan pergeseran anggaran pada Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) untuk dialihkan pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor yang dipandang perlu anggarannya untuk ditambahkan.

g. Pada Sub Kegiatan “Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya” dilakukan penambahan Anggaran Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, karena pada laporan realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2024, Anggaran pada Belanja ini menunjukkan anggaran yang sudah tidak mencukupi sampai dengan akhir tahun, sehingga dipandang perlu untuk ditambah.

h. Pada Sub Kegiatan “Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan” dilakukan Pengurangan anggaran pada Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan untuk dialihkan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan yang anggarannya tidak mencukupi sampai akhir tahun.

i. Pada Sub Kegiatan “Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik” dilakukan pengurangan anggaran pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika dialihkan pada Sub Kegiatan “Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa” pada Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026 dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026 maka untuk tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Maros merancang program kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari : 3 Program, 17 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan, dapat dilihat pada **Tabel 3.3** :

Tabel 3. 3 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**								
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**				**42,172,322,970**				**56,266,365,100**
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 Persen**	**34,489,860,170**			**100 Persen**	**45,984,115,100**
4	**1**	**1**	**2**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**		**19 Dokumen**	**14,775,000**			**19 Dokumen**	**26,015,000**
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	2 Dokumen	3,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	7,260,000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Turikale	1 Dokumen	3,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4,235,000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Turikale	1 Dokumen	3,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	6,050,000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Turikale	1 Dokumen	1,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4,235,000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Turikale	1 Dokumen	1,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	4,235,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**1**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan**		**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**16,441,479,846**			**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**18,859,060,000**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros, Turikale, Turikale	192 Orang/b	15,951,731,846	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		192 Orang/b	18,271,000,000
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Dokumen	482,448,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	580,800,000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros, Turikale, Turikale	1 Laporan	3,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	3,630,000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest SKPD	Kab. Maros, Turikale, Turikale	18 Laporan	3,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18 Laporan	3,630,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pakaian Dinas PD Beserta Atribut Kelengkapannya**		**340 Paket**	**341,582,000**			**340 Paket**	**550,000,000**
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	340 Paket	341,582,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		340 Paket	550,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**		**12 Jenis**	**4,083,242,000**			**12 Jenis**	**4,948,900,000**
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Paket	371,398,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	471,900,000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Paket	49,443,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	181,500,000
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Laporan	1,750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	2,178,000,000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Laporan	1,912,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	2,117,500,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jenis Barang Milik Daerah PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**		**49 Unit**	**729,500,000**			**49 Unit**	**3,113,000,000**
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	24 Unit	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		24 Unit	1,650,000,000
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	25 Unit	329,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25 Unit	1,463,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**12 Laporan**	**2,753,490,000**			**12 Laporan**	**3,835,700,000**
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Laporan	66,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	145,200,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	4 Laporan	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	181,500,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Laporan	2,667,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	3,509,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik**		**58 Unit**	**1,329,900,000**			**58 Unit**	**1,391,500,000**
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Maros, Turikale, Turikale	50 Unit	670,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50 Unit	665,500,000
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Maros, Turikale, Turikale	8 Unit	659,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	726,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**		**2 Orang/Bula**	**1,446,489,324**			**2 Orang/Bula**	**1,712,700,000**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	2 Orang/Bula	159,539,324	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang/Bula	193,600,000
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	2 Paket	434,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	544,500,000
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	2 Orang	252,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Orang	314,600,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	2 Orang/Bula	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Orang/Bula	660,000,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Jumlah Pelaksanaan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang terfasilitasi**		**12 Bulan**	**1,860,000,000**			**12 Bulan**	**2,072,400,000**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Paket	900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	990,000,000
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Paket	720,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	792,000,000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Paket	240,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Paket	290,400,000
4	**1**	**1**	**2.1**		**Penataan Organisasi**	**Nilai Reformasi Birokrasi yang Dicapai**		**64 Nilai**	**372,802,000**			**64 Nilai**	**1,045,540,100**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	5 Dokumen	73,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	407,000,000
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Maros, Turikale, Turikale	5 Laporan	48,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Laporan	165,000,000
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Maros, Turikale, Turikale	7 Dokumen	235,802,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7 Dokumen	344,300,000
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Maros, Turikale, Turikale	4 Dokumen	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	56,860,100
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	1 Dokumen	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	72,380,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**1**	**1**	**2.1**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Jumlah Media yang Meliput Kegiatan Pemerintahan Daerah**		**12 Laporan**	**5,116,600,000**			**12 Laporan**	**8,429,300,000**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	4 Laporan	1,098,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	2,971,100,000
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	3 Laporan	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Laporan	101,200,000
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Laporan	4,010,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	5,357,000,000
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Presentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan**		**100 Persen**	**4,531,238,000**			**100 Persen**	**5,046,250,000**
4	**1**	**2**	**2**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**		**4 Point**	**963,123,000**			**4 Point**	**1,519,100,000**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	46 Dokumen	66,635,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		46 Dokumen	176,000,000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	10 Dokumen	216,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Dokumen	506,000,000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	4 Dokumen	680,038,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	837,100,000
4	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah Layanan Keagamaan**		**8 Kegiatan**	**3,227,925,000**			**8 Kegiatan**	**3,103,650,000**
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Maros, Turikale, Turikale	4 Dokumen	1,642,705,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4 Dokumen	1,331,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Maros, Turikale, Turikale	6 Dokumen	1,562,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6 Dokumen	1,694,000,000
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Maros, Turikale, Turikale	1 Dokumen	22,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	78,650,000
4	**1**	**2**	**2**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Jumlah Produk Hukum Daerah yang diselesaikan**		**3 Jenis**	**340,190,000**			**3 Jenis**	**423,500,000**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Maros, Turikale, Turikale	1600 Dokum	78,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1600 Dokum	66,550,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Maros, Turikale, Turikale	10 Kasus	234,830,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10 Kasus	320,650,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab. Maros, Turikale, Turikale	1600 Dokum	27,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1600 Dokum	36,300,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan**		**100 Persen**	**3,151,224,800**			**100 Persen**	**5,236,000,000**
4	**1**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**		**18 Laporan**	**318,537,800**			**18 Laporan**	**357,500,000**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Maros, Turikale, Turikale	5 Dokumen	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Dokumen	22,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Maros, Turikale, Turikale	11 Laporan	212,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		11 Laporan	280,500,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Maros, Turikale, Turikale	2 Dokumen	94,237,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	55,000,000
4	**1**	**3**	**2**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**		**18 Dokumen**	**415,618,000**			**18 Dokumen**	**302,500,000**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Maros, Turikale, Turikale	1 Dokumen	48,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	181,500,000
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	2 Laporan	314,518,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	60,500,000
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Maros, Turikale, Turikale	12 Laporan	52,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12 Laporan	60,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Keluaran Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	**1**	**3**	**2**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa**		**700 Paket**	**2,417,069,000**			**700 Paket**	**4,576,000,000**
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Maros, Turikale, Turikale	700 Dokume	2,067,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		700 Dokume	4,235,000,000
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Maros, Turikale, Turikale	3 Dokumen	305,092,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	99,000,000
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Maros, Turikale, Turikale	5 Orang	44,977,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5 Orang	242,000,000
TOTAL									**42,172,322,970**				**56,266,365,100**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Sekretariat Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada tahun 2024.

Rencana kerja Perubahan ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bidang-bidang dan sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan sesuai dengan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, hasilnya tetap memerlukan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumberdaya manusia dengan sumberdaya lainnya pada masing-masing bidang dan sekretariat sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Peruabhan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 tersebut di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat Daerah Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar bidang dan sekretariat
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan
3. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat Daerah Tahun 2024 masih belum sempurna sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 karena belum adanya kesepahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja tersebut.
4. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) SKPD di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya seperti RKP, RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD.
6. Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Sekretariat Daerah Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodir di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PERIKANAN KABUPATEN MAROS



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Maros dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan ini disusun untuk menjadi pedoman acuan dalam merencanakan dan merumuskan berbagai program dan kegiatan di bidang perikanan tahun 2024. Kami berharap dukungan dari semua pihak, utamanya PD dan instansi terkait maupun dari stakeholders lainnya untuk bersama-sama masyarakat Kabupaten Maros dengan berpedoman sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, saran dan sumbangan pemikiran atas penyusunan dokumen ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk pembangunan menuju Maros lebih baik dan lebih khusus dalam meningkatkan kinerja Daerah Kabupaten Maros.

Maros, 31 Juli 2024

KEPALA DINAS,

Ir. MUHADIR, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19650825 199203 1 015

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 10

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.. 24
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan 30
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD 31
2.5 Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat 46

BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 49
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 49
3.2 Program dan Kegiatan 50

BAB IV PENUTUP 63
4.1 Saran dan Kesimpulan 63
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 63
4.3 Rencana Tindak Lanjut 65

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan II	11
Tabel 2.2.a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Maros	25
Tabel 2.2.b	Permasalahan Pencapaian Kinerja Pelayanan beserta hambatan, dampak, peluang, serta rekomendasi penanganannya	27
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	32
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kab. Maros	46
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran SKPD	49
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024 yang telah berjalan dapat mengetahui beberapa kekurangan sehingga harus dilaksanakan perbaikan atau penyempurnaan. Oleh karena itu maka dilakukan pengurangan atau penambahan anggaran sebagai akibat dari perubahan target kinerja. Rencana Kerja Perubahan PD memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja Perubahan PD merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perubahan berperan penting dalam setiap kinerja suatu PD dalam memaksimalkan kegiatan yang telah di rancang sebelumnya.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perikanan dilakukan dengan menganalisis gambaran pelayanan Dinas Perikanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perubahan tahun yang telah lalu serta mengacu pada Renstra Dinas Perikanan yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD.

Selanjutnya menjadi perumusan perubahan Rencana Kerja tahun berjalan yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang baik Desa maupun Kecamatan.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja Perubahan OPD didasarkan atas pertimbangan pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing OPD;
c. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD sebagian besar merupakan pergeseran dana yang berasal dari kegiatan kurang maksimal penyerapannya maka akan dipindahkan ke kegiatan yang masih memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2024 serta lebih optimal pemanfaatannya bagi warga masyarakat;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

1.2 Landasan hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Thun 2021 Tentang Hasil-Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomr 13);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros tahun 2023 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perikanan Kabupaten Maros adalah untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi pedoman bagi Dinas Perikanan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun 2024;
2. Penyempurnaan Rencana Kerja tahun berjalan sehingga lebih optimal bagi masyarakat;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan tahun 2024;

4. Memastikan bahwa APBD Perubahan tahun 2024 disusun berlandaskan Perubahan RKPD Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu, latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada bab ini memuat kajian (riview) terhadap hasil evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan II.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan

Pada bab ini Tujuan dan Sasaran Renja SKPD yang merupakan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan berisikan rumusan

rencana program dan kegiatan perubahan beserta analisis dan alasan perubahannya.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup berupa saran dan kesimpulan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Maros adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Maros. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tahun sebelumnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD menjadi salah satu indikator substansif dalam Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan tahun 2024. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian indikator setiap porogram (outcome) dan kegiatan (output) yang dilaksanakan oleh Dinas Perikaanan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Perikanan sampai dengan tahun 2024 Triwulan II dapat diuraikan pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan II
Dinas Perikanan Kaupaten Maros

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP**										**37**		**24,926,563,804**		**67**	**DISKAN**
		Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	**37,022,711,130**	**100**	**22,213,626,678**	**100**	**7,404,542,226**		**2,712,937,126**	**0**	**37**	**100**	**24,926,563,804**	**100**	**67**	**DISKAN**
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**65**	**45,000,000**	**39**	**27,000,000**	**13**	**9,000,000**	**5**	**0**	**38.46**	**0.00**	**44**	**27,000,000**	**68**	**60**	**DISKAN**
		Penyusunan dokumen perencanaan perangkatdaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	7,500,000	6	4,500,000	2	1,500,000	0	0	0.00	0.00	6	4,500,000	60	60	DISKAN
		Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	7,500,000	3	4,500,000	1	1,500,000	0	0	0.00	0.00	3	4,500,000	60	60	DISKAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	7,500,000	3	4,500,000	1	1,500,000	0	0	0.00	0.00	3	4,500,000	60	60	DISKAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	7,500,000	3	4,500,000	1	1,500,000	1	0	100.00	0.00	4	4,500,000	80	60	DISKAN
		Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	7,500,000	3	4,500,000	1	1,500,000	0	0	0.00	0.00	3	4,500,000	60	60	DISKAN
		Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerj a SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	7,500,000	3	4,500,000	1	1,500,000	1	0	100.00	0.00	4	4,500,000	80	60	DISKAN
		Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi**	**220**	**30,985,095,550**	**132**	**18,591,057,330**	**44**	**6,197,019,110**	**16**	**2,510,022,256**	**36.36**	**40.50**	**148**	**21,101,079,586**	**67**	**68**	**DISKAN**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Keuangan															
		Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4900	30,137,095,550	2940	18,082,257,330	980	6,027,419,110	420	2,433,522,256	42.86	40.37	3,360	20,515,779,586	69	68	DISKAN
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	841,500,000	36	504,900,000	12	168,300,000	5	76,500,000	41.67	45.45	41	581,400,000	68	69	DISKAN
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	90	6,500,000	54	3,900,000	18	1,300,000	5	0	27.78	0.00	59	3,900,000	66	60	DISKAN
		Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah**	**5**	**6,500,000**	**3**	**3,900,000**	**1**	**1,300,000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**3**	**3,900,000**	**60**	**60**	**DISKAN**
		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah apda SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	6,500,000	3	3,900,000	1	1,300,000	0	0	0.00	0.00	3	3,900,000	60	60	DISKAN
		Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**425**	**5,000,000**	**255**	**3,000,000**	**85**	**1,000,000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**255**	**3,000,000**	**60**	**60**	**DISKAN**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelemgkapannya	5	5,000,000	3	3,000,000	1	1,000,000	0	0	0.00	0.00	3	3,000,000	60	60	DISKAN
		Administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**7**	**2,289,967,000**	**7**	**1,373,980,200**	**7**	**457,993,400**	**5**	**88,509,370**	**71.43**	**19.33**	**12**	**1,462,489,570**	**171**	**64**	**DISKAN**
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	30,627,000	3	18,376,200	1	6,125,400	0	0	0.00	0.00	3	18,376,200	60	60	DISKAN
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	36,837,500	3	22,102,500	1	7,367,500	0	2,414,000	0.00	32.77	3	24,516,500	60	67	DISKAN
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	347,690,000	9	208,614,000	3	69,538,000	2	18,203,250	66.67	26.18	11	226,817,250	73	65	DISKAN
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	18,750,000	3	11,250,000	1	3,750,000	0	0	0.00	0.00	3	11,250,000	60	60	DISKAN
		Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	50,000,000	3	30,000,000	1	10,000,000	0	0	0.00	0.00	3	30,000,000	60	60	DISKAN
		Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	36,750,000	36	22,050,000	12	7,350,000	5	1,500,000	41.67	20.41	41	23,550,000	68	64	DISKAN
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1,769,312,500	36	1,061,587,500	12	353,862,500	5	66,392,120	41.67	18.76	41	1,127,979,620	68	64	DISKAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**1,393,800,000**	**3**	**836,280,000**	**3**	**278,760,000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**3**	**836,280,000**	**100**	**60**	**DISKAN**
		Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	635,000,000	3	381,000,000	1	127,000,000	0	0	0.00	0.00	3	381,000,000	60	60	DISKAN
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	583,800,000	30	350,280,000	10	116,760,000	0	0	0.00	0.00	30	350,280,000	60	60	DISKAN
		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	175,000,000	3	105,000,000	1	35,000,000	0	0	0.00	0.00	3	105,000,000	60	60	DISKAN
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**1,994,500,000**	**2**	**1,196,700,000**	**2**	**398,900,000**	**2**	**108,640,000**	**100.00**	**27.23**	**4**	**1,305,340,000**	**200**	**65**	**DISKAN**
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	41,000,000	36	24,600,000	12	8,200,000	5	3,050,000	41.67	37.20	41	27,650,000	68	67	DISKAN
		penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	1,953,500,000	36	1,172,100,000	12	390,700,000	5	105,590,000	41.67	27.03	41	1,277,690,000	68	65	DISKAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**2**	**302,848,580**	**2**	**181,709,148**	**3**	**60,569,716**	**0**	**5,765,500**	**0.00**	**9.52**	**2**	**187,474,648**	**100.00**	**61.90**	**DISKAN**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15	150,000,000	9	90,000,000	3	30,000,000	1	5,765,500	33.33	19.22	10	95,765,500	67	64	DISKAN
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	100,500,000	30	60,300,000	10	20,100,000	0	0	0.00	0.00	30	60,300,000	60	60	DISKAN
		Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	52,348,580	3	31,409,148	1	10,469,716	0	0	0.00	0.00	3	31,409,148	60	60	DISKAN
	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap Sektor Pertanian		**Kontribusi Sub Sektor Perikanan Terhadap Sektor Pertanian dalam PDRB**	**44.4**				**44**										**DISKAN**
		Pengelolaan perikanan tangkap	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**2.5**	**20,988,375,000**	**8.65**	**28,583,057,837**	**2.00**	**4,197,675,000**	**0.74**	**102,356,330**	**2**	**2**	**9**	**28,685,414,167**	**21**	**137**	**DISKAN**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan alam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	**Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya.**	**3600**	**20,089,000,000**	**4,580.00**	**5,273,565,605.00**	**3,400**	**4,017,800,000**	**0**	**82,856,330**	**0.00**	**2.06**	**4,580**	**5,356,421,935**	**48**	**27**	**DISKAN**
		Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	5	8,939,000,000	13	3,865,130,900	1	1,787,800,000	0	82,856,330	0.00	4.63	13	3,947,987,230	260	44	DISKAN
		Penjaminan ketersediaan saran usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	15310	11,150,000,000	6,072.00	1,408,434,705	3,062	2,230,000,000	0	0	0.00	0.00	6,072	1,408,434,705	40	13	DISKAN
		Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	**Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas dan kapsitasnya**	**720**	**598,375,000**	**300**	**11,770,594,532.00**	**240**	**119,675,000**	**150**	**19,500,000**	**62.50**	**16.29**	**450**	**11,790,094,532**	**63**	**1,970**	**DISKAN**
		Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	1200	143,400,000	340	44,761,675	240	28,680,000	180	19,500,000	75.00	67.99	520	64,261,675	43	45	DISKAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	125	454,975,000	29	167,201,157	25	90,995,000	0	0	0.00	0.00	29	167,201,157	23	37	DISKAN
		Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan (TPI)	**Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Yang dikelola**	**5**	**301,000,000**	**3**	**11,538,897,700.00**	**1**	**60,200,000**	**1**	**0**	**100.00**	**0.00**	**4**	**11,538,897,700**	**80**	**3,834**	**DISKAN**
		Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	10	301,000,000	4	19,734,000	2	60,200,000	0	0	0.00	0.00	4	19,734,000	40	7	DISKAN
		Pengelolaan perikanan budidaya	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**5.5**	**27,218,490,000**	**25.45**	**11,192,917,900**	**5.25**	**5,165,255,000**	**0.29**	**75,126,008**	**3.71**	**1.45**	**26**	**11,268,043,908**	**322**	**41**	**DISKAN**
		Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	**Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan**	**100**	**110,675,000**	**92**	**163,122,900**	**20**	**22,135,000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**92**	**163,122,900**	**92**	**147**	**DISKAN**
		Pemberian Pendampingan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100	110,675,000	28	163,122,900	20	22,135,000	0	0	0.00	0.00	28	163,122,900	28	147	DISKAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengelolaan pembudidaya ikan	**jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar**	**225**	**27,107,815,000**	**70**	**11,029,795,000**	**45**	**5,143,120,000**	**0**	**75,126,008**	**0.00**	**1.46**	**70**	**11,104,921,008**	**31**	**41**	**DISKAN**
		Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15	13,264,000,000	11	3,471,438,000	3	2,652,800,000	0	75,126,008	0.00	2.83	11	3,546,564,008	73	27	DISKAN
		Penjaminan ketersediaan sarana pembubidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35	11,958,600,000	10	6,007,342,000	7	2,391,720,000	0	0	0.00	0.00	10	6,007,342,000	29	50	DISKAN
		Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya sela a 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	10	48,162,500	0	0	2	9,632,500	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	DISKAN
		Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan lahan Untuk Pembudidyaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	20	47,837,500	10	1,551,015,000	4	9,567,500	0	0	0.00	0.00	10	1,551,015,000	50	3,242	DISKAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	300	1,789,215,000	10	1,551,015,000	60	79,400,000	0	0	0.00	0.00	10	1,551,015,000	3	87	DISKAN
		Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	**Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan**	**0.97**	**5,423,975,000**	**1.37**	**2,550,470,736**	**0.97**	**1,084,795,000**	**0.31**	**87,438,680**	**31.96**	**8.06**	**2**	**2,637,909,416**	**112**	**49**	**DISKAN**
		Penerbitan tanda daftra usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil	**Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang diterbitkan**	**5**	**280,287,500**	**1**	**101,406,700**	**1**	**56,057,500**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**1**	**101,406,700**	**20**	**36**	**DISKAN**
		Penyediaan data dan informasi pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	5	280,287,500	3	101,406,700	1	56,057,500	0	0	0.00	0.00	3	101,406,700	60	36	DISKAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	**Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan tentang mutu dan keamanan hasil perikanan**	**90**	**143,512,500**	**40**	**90,941,500**	**30**	**28,702,500**	**10**	**6,500,000**	**33.33**	**22.65**	**50**	**97,441,500**	**56**	**68**	**DISKAN**
		Pelaksaanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100	143,512,500	70	90,941,500	20	28,702,500	10	6,500,000	50.00	22.65	80	97,441,500	80	68	DISKAN
		Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten /kota	**jumlah jenis bahan baku industri yang tersedia dan disalurkan**	**2**	**5,000,175,000**	**4**	**2,358,122,536**	**2**	**1,000,035,000**	**1**	**80,938,680**	**50.00**	**8.09**	**5**	**2,439,061,216**	**250**	**49**	**DISKAN**
		Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1450	135,675,000	692.9	121,759,000	290	27,135,000	290	16,422,000	100.00	60.52	983	138,181,000	68	102	DISKAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kota																
		Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	55	4,864,500,000	23	2,236,363,536	11	972,900,000	0	64,516,680	0.00	6.63	23	2,300,880,216	42	47	DISKAN

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 triwulan II di atas terdiri dari 4 program, 16 kegiatan, dan 41 sub kegiatan. Tingkat capaian relisasi dari target Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 sudah cukup baik dengan capaian sekitar 70 persen.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut, antara lain :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/kegiatan dapat dicapai sesuai target;
2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia; serta
3. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

Walaupun pencapaian sasaran sebagaian besar sudah memenuhi, namun masih ada sedikit kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki untuk mencapai target sasaran sampai akhir periode. Oleh karena itu upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.
2. Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas perikanan Kabupaten Maros sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Straregis dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2.a

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERIKANAN KAB. MAROS

No	Indikator	Satuan	IKU	SPM / Standar Nasional	IKK	Target SKPD (Tahun)				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian dalam PDRB	Persen	√			43.6	43.8	44	44.2	50.48	50.48	50.48	50.48	
2	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP			√	-	-	-	-	26	26	26	26	IKK LPPD
3	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Persen			√	-	-	-	-	100	100	100	100	IKK LPPD
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Orang			√	-	-	-	-	538	859	1371	2188	IKK LPPD
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Ekor			√	-	-	-	-	200,000	285,350	407,123	580,862	IKK LPPD
6	Produksi Perikanan	Persen			√	137.14	144.65	152.57	160.93	148.51	163.79	180.64	199.2	IKK RPJMD dan LPPD
7	Konsumsi Ikan	Persen			√	100	100	100	100	101.57	105.26	109.00	112.80	IKK RPJMD

No	Indikator	Satuan	IKU	SPM / Standar Nasional	IKK	Target SKPD (Tahun)				Capaian Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
8	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Persen			√	50.84	58.1	66.4	75.89	51.89	58.04	93.46	125.42	IKK RPJMD
9	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Persen			√	86.87	89.48	92.16	94.93	87.41	93.75	100	106	IKK RPJMD dan TPB
10	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen			√	51.91	51.71	51.51	51.31	26.21	34.84	46	60.7	IKK RPJMD
11	Jumlah nelayan yang terlindungi	Nelayan			√	1,375	1,565	1,756	1,946	0	200	200	200	TPB
12	Jumlah anak, ibu hamil dan menyusui berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan	Orang								150	200	250	300	Percepatan penurunan stunting

Adapun permasalahan pencapaian kinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.2.b

Permasalahan Pencapaian Kinerja Pelayanan beserta Hambatan, Dampak, Peluang, serta Faktor Pendorongnya

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Peluang	Faktor Pendorong
1			Kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian dalam PDRB semakin meningkat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	• Produksi perikanan budidaya dan tangkap semakin meningkat • Pemberian sarana dan prasarana untuk pembudidaya dan nelayan yang memadai
2	Pekerjaan sebagai nelayan sering terkendala karena faktor cuaca dan musim ikan	Masih kurangnya keterampilan yang dimiliki nelayan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Meningkatkan pendapatan	Pemberian bimbingan terkait diversifikasi olahan hasil perikanan
3			Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Meningkatkan perekonomian	Peningkatan sarana dan prasarana yang ada di TPI
4			Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan) semakin	Meningkatkan kapasitas pembudidaya ikan	• Pelaksanaan bimbingan teknis pengembangan budidaya • Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan

			meningkat		
5	• Sarana dan prasarana yang ada di Balai Benih Ikan masih kurang memadai • Balai Benih Ikan hanya memproduksi benih ikan air tawar	• Keterbatasan anggaran • Kurangnya tenaga teknis	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Meningkatkan produksi benih ikan	Peningkatan sarana dan prasarana produksi yang memadai
6			Produksi Perikanan semakin meningkat	Meningkatkan pendapatan	• Bantuan sarana dan prasarana kepada pembudidaya dan nelayan • Pelaksanaan bimbingan untuk meningkatkan kapasitas pembudidaya dan nelayan
7			Konsumsi Ikan semakin meningkat		• Meningkatnya jumlah ketersediaan ikan • Ikan merupakan salah satu makanan pokok dan menu favorit masyarakat
8			Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Meningkatkan kesejahteraan nelayan	Meningkatnya jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda

9			Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Mendorong pembangunan berkelanjutan	• Pemberian bantuan yang efektif untuk mencegah penangkapan ikan yang berlebihan • Sosialisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan
10	Nelayan yang berkelompok masih sekitar 70%	Yang bisa memperoleh bantuan adalah nelayan yang sudah berkelompok	Produksi perikanan kelompok nelayan masih kurang	Pembentukan kelompok nelayan	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan
11	• Profesi nelayan memiliki resiko yang cukup tinggi yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan • Bantuan premi asuransi nelayan dari pusat sudah tidak ada	Nelayan masih belum memahami secara menyeluruh terkait bantuan premi asuransi nelayan	Jumlah nelayan yang terlindungi	Perlindungan nelayan	• Sosialisasi asuransi nelayan • Pemberian bantuan premi asuransi nelayan (kerjasama Pemda dengan BPJS Ketenagakerjaan)
12	Masih banyaknya keluarga yang beresiko stunting	Kurangnya pemenuhan asupan gizi untuk anak	Jumlah anak, ibu hamil dan menyusui berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan	Percepatan penurunan stunting	• Pemberian paket olahan hasil perikanan • Sosialisasi Gemarikan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Isu strategis Dinas Perikanan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Perikanan.

Penentuan Isu isu strategis dinas perikanan didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Perikanan Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target visi dan misi pembangunan Kabupaten Maros. Adapun isu-isu strategis Dinas Perikanan adalah :

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat perikanan tentang peranan kelembagaan dalam meningkatkan produksi.
2. Rendahnya Sumberdaya Manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan.
3. Masih rendahnya jumlah nelayan yang terlindungi dimana profesi nelayan memiliki resiko yang cukup tinggi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menjaga bahwa Perencanaan pembangunan yang direncanakan agar tetap dalam koridor yang ada dan sesudenan yang diinginkan, tentunya Dinas Perikanan harus melakukan Review

Terhadap Program Kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan untuk mengetahui bahwa program dan kegiatan tersebut masih layak atau tidak untuk mengetahui bahwa program dan kegiatan tersebut masih layak atau tidak untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Maros

Nama perangkat Daerah : Dinas Perikanan

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**9,472,000,000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100 Persen	**7,420,247,226**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	19 Dokumen	35,000,000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	19 Dokumen	**9,000,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,500,000	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah DokumenRKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah DokumenRKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah DokumenDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah DokumenDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,500,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	42 Dokumen	**7,815,000,000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	41 Dokumen	**6,184,629,110**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	7,500,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	70 Orang/ Bulan	6,027,419,110	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi PD	11 Dokumen	300,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi PD	11 Dokumen	155,910,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran PD	18 Laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran PD	18 Laporan	1,300,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik**	**1 Dokumen**	**10,000,000**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**		**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik**	**1 Dokumen**	**1,300,000**	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Daerah pada Perangkat Daerah					**Daerah pada Perangkat Daerah**			
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	1,300,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	70 Orang	**65,000,000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	**70 Orang**	**10,000,000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Maros	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Maros	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	9 Jenis	**603,000,000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	**6 Jenis**	**470,088,400**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Maros	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Maros	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,125,400	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Maros	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Maros	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7,367,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	69,513,000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3,750,000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Maros	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Maros	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15,350,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	350,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	367,982,500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	**450,000,000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	**3 Jenis**	**293,760,000**	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
								Daerah			
	Pengadaan Mebel	Kab. Maros	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	99 Unit	150,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Maros	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	89 Unit	127,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	150,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	116,760,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	**354,000,000**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2 Jenis**	**390,900,000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8,200,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	382,700,000	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik	4 Jenis	**140,000,000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik	**3 Jenis**	**60,569,716**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Maros	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	50,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Maros	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	30,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	30,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	20,100,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10,469,716	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**2 Persen**	**9,335,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**		**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**2 Persen**	**3,982,700,000**	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya.**	**3300 Ton**	**9,025,000,000**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya.**	**3400 Ton**	**3,817,825,000**	
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Maros	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	7 Unit	6,000,000,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Nisombalia Kec. Marusu, Kab. Maros	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	2 Unit	1,387,800,000	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Maros	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	12645 Unit	3,000,000,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Desa Nisombalia Kec. Marusu, Desa Pajjukukang Kec. Bontoa, Desa Tupabbiring Kec. Bontoa, Desa Tunikamaseang Kec. Bontoa, Desa Minasaupa Kec. Bontoa, Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	9824 Unit	2,430,025,000	
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		**Jumlah nelayan yang diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas dan kapsitasnya**	**240 Orang**	**300,000,000**	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah nelayan yang diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas dan kapsitasnya**	**630 Orang**	**119,675,000**	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Maros	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	180 Orang	50,000,000	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Maros	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	180 Orang	28,680,000	
	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25 Unit Usaha	200,000,000	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25 Unit Usaha	90,995,000	
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		**Jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang dikelola dan menyelenggarakan kegiatan sesuai fungsinya**	**1 Unit**	**100.000.000**	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**		**Jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang dikelola dan menyelenggarakan kegiatan sesuai fungsinya**	**1 Unit**	**45,200,000**	
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Maros	Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	100.000.000	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Maros	Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	45,200,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**5.25%**	**15,075,000,000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**5.25%**	**5,375,255,000**	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		**Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan**	**45 Kelompok**	**400,000,000**	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**		**Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan**	**20 Kelompok**	**22,135,000**	
	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Maros	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Klp	100,000,000	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Maros	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Klp	22,135,000	
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		**Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar**	**50 Kelompok**	**14,675,000,000**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**		**Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar**	**50 Kelompok**	**5,353,120,000**	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Unit	7,000,000,000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Minasaupa Kec. Bontoa, Desa Tunikamaseang Kec. Bontoa, Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa, Desa Lekopancing Kec. Tanralili, Desa Kurusumange Kec. Tanralili, Kel.	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 Unit	2,912,800,000	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
							Baji Pamai Kec. Maros Baru				
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51 Unit	7,500,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Kurusumange Kec. Tanralili, Desa Lekopancing Kec. Tanralili, Desa Jenetaesa Kec. Simbang, Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru, Desa Borikamase Kec. Maros Baru, Desa Borimasunggu Kec. Maros Baru, Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa, Desa Salenrang Kec. Bontoa, Desa Minasaupa Kec. Bontoa	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22 Unit	2,341,720,000	
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	50,000,000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	9,632,500	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Maros	Luas Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat yang direncanakan Dikembangkan Dimanfaatkan dan Dilindungi	4 Ha	-	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Maros	Luas Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat yang direncanakan Dikembangkan Dimanfaatkan dan Dilindungi	4 Ha	79,400,000	
	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Maros	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	60 Orang	50,000,000	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Maros	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	60 Orang	9,567,500	
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		**Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan**	**0.97%**	**2,725,000,000**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**		**Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan**	**0.97%**	**1,083,065,000**	
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		**Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang diterbitkan**	**2 Dokumen**	**25,000,000**	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang diterbitkan**	**1 Dokumen**	**54,327,500**	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2 Dokumen	25,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	54,327,500	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		**Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan tentang mutu dan keamanan hasil perikanan**	**20 Unit Usaha**	**100,000,000**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**		**Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan tentang mutu dan keamanan hasil perikanan**	**20 Unit Usaha**	**28,702,500**	
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha	100,000,000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Maros	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha	28,702,500	

No	Racangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Idikatif (Rp.)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (Rp.)**	**Catatan Penting**
	1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		**jumlah jenis bahan baku industri yang tersedia dan disalurkan**	**2 Jenis**	**2,600,000,000**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**jumlah jenis bahan baku industri yang tersedia dan disalurkan**	**2 Jenis**	**1,000,035,000**	
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	290 Ton	100,000,000	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	290 Ton	27,135,000	
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	11 Pelaku Usaha	2,500,000,000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Pajjukukang Kec. Bontoa, Desa Minasaupa Kec. Bontoa, Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa, Desa Ampekale Kec. Bontoa, Desa Nisombalia Kec. Marusu, Kel. Turikale Kec. Turikale, Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	13 Pelaku Usaha	972,900,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perikanan Kabupaten Maros untuk Rencana Kerja Tahun 2024, teridiri dari para pemangku kepentingan dan ditampilkan pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Maros

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	Ket.
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dala Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		
			Bantuan alat tangkap bagi nelayan	Dusun Panaikang, Dusun Parasanagan, Dusun Balosi, Minasa Upa (Kec. Bontoa)	Musrembang
			Pengadaan perahu/kapal di bawah 3 GT	Dusun Parasangan Beru,Dusun Balosi (Kec. Bontoa), Lingkungan Manjeppu, RET 01, RT 02, RT 03 (Kec. Lau),Dusun Kuri Caddi, Desa Nisombalia (Kecamatan Marusu), Kec. Maros Baru	Musrembang/ Pokir
			Penyediaan Tambatan Perahu Nelayan	Dusun Campagaya, Dusun Lempangan Rt 4 (Kec. Bontoa)	Musrembang
			Bantuan pembayaran premi asuransi nelayan	Lingkungan Pasandang, Kec. Turikale	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Kab. Maros	Musrembang
			Pelatihan pengelolaan kualitas air, hama dan penyakit ikan	Dusun Jawi-jaw (Kec. Maros Baru), Kelurahan Boribellaya (Kec. Turikale)	Musrembang
			Temu teknis/bimtek bagi pembudidaya ikan	Kelurahan Boribellaya (Kec. Turikale),Kelurahan Soreang (Kec. Lau)	Musrembang
		Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Musrembang
			Penyediaan jalan produksi	Dusun Parasangan Beru, Dusun Cambaya,Dusun Kalupenrang,Dusun Sikapaya (Kec. Bontoa), Dusun Slarang (Kec. Maros Baru), Kelurahan Soreang (Kec. Lau)	Musrembang/ Pokir
			Pembangunan Jembatan Penghubung	Kelurahan Palantikang (Kec. Maros Baru), Dusun Marana Desa Marannu (Kec. Lau)	Musrembang/ Pokir

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	Ket.
			Penyediaan pupuk tambak	Desa moncongloe (kec. Moncongloe),Desa Toddopulia (Kec. Tanralili), desa marannu (Kec. Lau)	Musrembang
			Pengadaan mesin pembuat pakan ikan	Kelurahan Boribellaya (Kec. Turikale),Desa Limapoccoe (Kec. Cenrana), Kelurahan Soreang (Kec. Lau)	Musrembang
			Penyediaan sumur bor dan pompanisasi tambak	Salo Manraleng menuju Pallanro desa Rompegading kec. cenrana, Kab. Maros	Pokir
			Temu teknis/bimtek bagi pembudidaya ikan	Kelurahan Soreang (Kec.Lau), Kelurahan Turikale (Kec. Turikale) Kab. Maros	Musrembang / Pokir
			Pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota		
			Pelatihan pengelolaan kualitas air, hama dan penyakit ikan	Dusun Jawi-jawi, Kab. Maros	Musrembang
			Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat		
			Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak	Dusun Jangka-Jangkayya, Dusun Lengkese dan Dusun Bonto-Bonto, RW 03 RT 05 / RT 06 Suli-suli kelurahan bontoa, pepbulaeng Tupabbiring (Kec. Bontoa)	Musrembang
				Dusun Kanjitongan Kec. Maros Baru, Lingkungan Kecampureng (Kec. Turikale)	
			Penyediaan bibit/benih air tawar (nila, lele, mas)	Lingkup Desa Timpuseng, Desa Sawaru (Kec. Camba), Dusun Balosi (Kec. Bontoa), Desa Baji Pa'mai, Dusun Mappasaile, Dusun Moncongjai (Kec. Cenrana), Moncongloe Bulu, Dusun Manjalling, Jenetallasa dan Bonto Bunga, (Kec. Moncongloe), lingkungan kasuarrang, Dusun Tangkuru, (Kec. Lau)	Musrembang
			Penyediaan bibit/benih air payau (udang windu, vaname, bandeng)	Minasa Upa (Kec. Bontoa)	
			Penyediaan benih unggul udang dan bandeng	Kecamatan Bontoa	Musrembang
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar	dusun Lalebata Kec. Camba	Musrembang
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Randa Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Pemberian Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Periikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Pelatihan desain kemasan produk olahan	Lingkungan Tamalalang (Kec. Turikale)	Musrembang
			Pelatihan desain kemasan produk olahan	RW 01 KASSI KEBO - RW 02 BETANG - RW 03 MASEMBO, Kec. Maros Baru	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	LOKASI	Ket.
			Bimbingan teknologi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	RW 01 / Perumnas Tumalia, Kec. Turikale,Kelurahan Soreang Kec. Lau	Musrembang
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1		
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kec		Musrembang
			Bimtek peningkatan mutu olahan hasil perikanan	Desa Moncongloe Lappara, Kec. Moncongloe	Musrembang
		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengadaan alat pengolahan hasil perikanan	Lingkungan Soreang Kecamatan Lau	Musrembang
			Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
			Peningkatan kapasitas pengolahan hasil perikanan	Kecamatan Maros Baru	Musrembang
			Penyediaan sarana penjemuran rumput laut	Kecamatan Maros Baru	Musrembang

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan SKPD

1. Meningkatkan Tata Kelola Dinas Perikanan Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi.
2. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran SKPD

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan Dinas Perikanan.
2. Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	Meningkatkan Tata Kelola Dinas Perikanan Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan Dinas Perikanan	Nilai SAKIP Dinas Perika nan	BB
2	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian	Kontribusi sub sektor perika nan terhadap sektor pertanian dalam PDRB	44%

3.2 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan SKPD tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**Rp 17,861,267,226**	**Rp 17,861,267,226**				
3 25 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**Rp 7,413,542,226**	**Rp 7,420,247,226**				
3 25 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19 Dokumen**	**19 Dokumen**	**Rp 9,000,000**	**Rp 9,000,000**				
3 25 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
3 25 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**41 Dokumen**	**41 Dokumen**	**Rp 6,197,019,110**	**Rp 6,184,629,110**				
3 25 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/ bulan	70 Orang/ bulan	Rp 6,027,419,110	Rp 6,027,419,110	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	DAU
3 25 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	Rp 168,300,000	Rp 155,910,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	DAU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
3 25 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Rp 1,300,000	Rp 1,300,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**Rp 1,300,000**	**Rp 1,300,000**				
3 25 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4 Laporan	Rp 1,300,000	Rp 1,300,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**70 Orang**	**70 Orang**	**Rp 10,000,000**	**Rp 10,000,000**				
3 25 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	Rp 10,000,000	Rp 10,000,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**7 Jenis**	**6 Jenis**	**Rp 457,993,400**	**Rp 470,088,400**				
3 25 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 6,125,400	Rp 6,125,400	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 7,367,500	Rp 7,367,500	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
3 25 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Rp 69,538,000	Rp 69,513,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Rp 3,750,000	Rp 3,750,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		Rp 10,000,000	Rp -	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Rp 7,350,000	Rp 15,350,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp 353,862,500	Rp 367,982,500	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**Rp 278,760,000**	**Rp 293,760,000**				
3 25 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	99 Unit	89 Unit	Rp 127,000,000	Rp 127,000,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	10 Unit	Rp 116,760,000	Rp 116,760,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Rp 35,000,000	Rp 50,000,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**Rp 398,900,000**	**Rp 390,900,000**				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
3 25 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Rp 8,200,000	Rp 8,200,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 390,700,000	Rp 382,700,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Berada Dalam Kondisi Baik**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**Rp 60,569,716**	**Rp 60,569,716**				
3 25 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	Rp 20,100,000	Rp 20,100,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Rp 10,469,716	Rp 10,469,716	Kab. Maros	Kab. Maros	Aparatur	PAD
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap**	**2 Persen**	**2 Persen**	**Rp 4,197,675,000**	**Rp 3,982,700,000**				
3 25 03 2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya**	**3300 Ton**	**3400 Ton**	**Rp 4,017,800,000**	**Rp 3,817,825,000**				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
3 25 03 2.01 0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	7 Unit	2 Unit	Rp 1,787,800,000	Rp 1,387,800,000	Kab. Maros	Desa Nisombalia Kec. Marusu, Kab. Maros	Kelompok Usaha Bersama (KUB), Nelayan	PAD, DAK Fisik
3 25 03 2.01 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	12645 Unit	9824 Unit	Rp 2,230,000,000	Rp 2,430,025,000	Kab. Maros	Desa Nisombalia Kec. Marusu, Desa Pajjukukang Kec. Bontoa, Desa Tupabbiring Kec. Bontoa, Desa Tunikamaseang Kec. Bontoa, Desa Minasaupa Kec. Bontoa, Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa	Kelompok Usaha Bersama (KUB), Nelayan	DAK Fisik
3 25 03 2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah nelayan yang diberdayakan dan mengalami peningkatan kualitas dan kapasitasnya**	**240 Orang**	**630 Orang**	**Rp 119,675,000**	**Rp 119,675,000**				
3 25 03 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	180 Orang	180 Orang	Rp 28,680,000	Rp 28,680,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Kelompok Usaha Bersama (KUB), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur	PAD
3 25 03 2.02 0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	Rp 90,995,000	Rp 90,995,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Kelompok Usaha Bersama (KUB), Nelayan	PAD
3 25 03 2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola dan menyelenggarakan kegiatan sesuai fungsinya**	**1 Unit**	**1 Unit**	**Rp 60,200,000**	**Rp 45,200,000**				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
3 25 03 2.03 0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	2 Layanan	Rp 60,200,000	Rp 45,200,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Masyarakat dan Aparatur	PAD
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**5,25 Persen**	**5,25 Persen**	**Rp 5,165,255,000**	**Rp 5,375,255,000**				
3 25 04 2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan**	**45 Kelompok**	**20 Kelompok**	**Rp 22,135,000**	**Rp 22,135,000**				
3 25 04 2.02 0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	20 Kelompok	20 Kelompok	Rp 22,135,000	Rp 22,135,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan dan Aparatur	PAD
3 25 04 2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar**	**50 Kelompok**	**50 Kelompok**	**Rp 5,143,120,000**	**Rp 5,353,120,000**				
3 25 04 2.04 0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Unit	14 Unit	Rp 2,652,800,000	Rp 2,912,800,000	Kab. Maros	Desa Minasaupa Kec. Bontoa, Desa Tunikamaseang Kec. Bontoa, Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa, Desa Lekopancing Kec. Tanralili, Desa Kurusumange Kec. Tanralili, Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan dan Aparatur	PAD, DAK Fisik

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
3 25 04 2.04 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51 Unit	22 Unit	Rp 2,391,720,000	Rp 2,341,720,000	Kab. Maros	Desa Kurusumange Kec. Tanralili, Desa Lekopancing Kec. Tanralili, Desa Jenetaesa Kec. Simbang, Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru, Desa Borikamase Kec. Maros Baru, Desa Borimasunggu Kec. Maros Baru, Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa, Desa Salenrang Kec. Bontoa, Desa Minasaupa Kec. Bontoa	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan dan Aparatur	PAD, DAK Fisik
3 25 04 2.04 0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	2 Dokumen	1 Dokumen	Rp 9,632,500	Rp 9,632,500	Kab. Maros	Kab. Maros	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan dan Aparatur	PAD
3 25 04 2.04 0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	4 Ha	4 Ha	Rp 79,400,000	Rp 79,400,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan dan Aparatur	PAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
3 25 04 2.04 0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	60 Orang	60 Orang	Rp 9,567,500	Rp 9,567,500	Kab. Maros	Kab. Maros	Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN), Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Penyuluh Perikanan dan Aparatur	PAD
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan**	**0,97 Persen**	**0,97 Persen**	**Rp 1,084,795,000**	**Rp 1,083,065,000**				
3 25 06 2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil yang diterbitkan**	**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**Rp 56,057,500**	**Rp 54,327,500**				
3 25 06 2.01 0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	2 Dokumen	1 Dokumen	Rp 56,057,500	Rp 54,327,500	Kab. Maros	Kab. Maros	Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), Penyuluh Perikanan, Keluarga beresiko stunting dan Aparatur	PAD
3 25 06 2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah usaha pengolahan yang mendapatkan pembinaan tentang mutu dan keamanan hasil perikanan**	**20 Unit Usaha**	**20 Unit Usaha**	**Rp 28,702,500**	**Rp 28,702,500**				

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
3 25 06 2.02 0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	Rp 28,702,500	Rp 28,702,500	Kab. Maros	Kab. Maros	Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur	PAD
3 25 06 2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah jenis bahan baku industri yang tersedia dan disalurkan**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**Rp 1,000,035,000**	**Rp 1,000,035,000**				
3 25 06 2.03 0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	290 Ton	290 Ton	Rp 27,135,000	Rp 27,135,000	Kab. Maros	Kab. Maros	Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur	PAD
3 25 06 2.03 0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	11 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	Rp 972,900,000	Rp 972,900,000	Kab. Maros	Desa Pajjukukang Kec. Bontoa, Desa Minasaupa Kec. Bontoa, Desa Bonto Bahari Kec. Bontoa, Desa Ampekale Kec. Bontoa, Desa Nisombalia Kec. Marusu, Kel. Turikale Kec. Turikale, Kel. Baji Pamai Kec. Maros Baru	Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR), Usaha Kecil Menengah (UMK), Penyuluh Perikanan, dan Aparatur	PAD, DAK Fisik

Analisis dan alasan perubahan diuraikan sebagai berikut :

1. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dilakukan pengurangan pada belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan untuk dialihkan ke belanja perjalanan dinas kabupaten dan makan minum rapat pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dikarenakan terdapat 2 orang PPTK yang akan memasuki masa pensiun dan kurangnya anggaran perjalanan dinas dan makan mimum rapat.
2. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dilakukan pengurangan pada belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya untuk dialihkan ke pembangunan jembatan penghubung pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dikarenakan kegiatan tersebut (belanja mobil hias) untuk tahun ini tidak dilaksanakan sementara banyaknya proposal yang masuk terkait permintaan pembangunan jembatan penghubung.
3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dilakukan pengurangan pada belanja honorarium petugas BBI dan operator komputer untuk dialihkan ke belanja makan minum tamu pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dikarenakan terdapat 2 orang tenaga honor yang lulus PPPK dan semakin banyaknya kunjungan dan mahasiswa yang melakukan penelitian

pada Balai Benih Ikan sementara anggaran makan minum tamu terbatas.

4. Pada Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, dilakukan pengurangan pada belanja modal pembangunan tambatan perahu nelayan untuk dialihkan ke belanja pembangunan kolam percontohan pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan pengadaan bubu/rakkang pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dikarenakan tambatan perahu nelayan juga terdapat pada Dana Alokasi Khusus sementara banyak proposal yang masuk terkait permintaan pembangunan kolam percontohan dan pengadaan bubu/rakkang.
5. Pada Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan pengurangan pada belanja pengadaan pupuk cair untuk dialihkan ke belanja pembangunan jembatan penghubung pada Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dikarenakan pengadaan pupuk sudah termasuk pada paket kegiatan Dana Alokasi Khusus sementara banyak proposal yang masuk terkait permintaan pembangunan jembatan penghubung.
6. Pada Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dilakukan pengurangan pada belanja pembangunan

sumur bor untuk dialihkan ke belanja modal pengadaan pintu gerbang TPI, dikarenakan pengadaan gerbang lebih dibutuhkan saat ini untuk meningkatkan keamanan pada Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

7. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dilakukan pengurangan pada belanja uang saku peserta sosialisasi gemar ikan untuk dialihkan ke belanja perjalanan dinas, dikarenakan peserta sosialisasi gemar ikan sudah diberikan masing-masing goodie bag yang berisi paket olahan dari ikan dan tidak adanya perjalanan dinas untuk kegiatan pendataan dan monitoring evaluasi terkait usaha pemasaran dan pengolahan.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Saran dan Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Maros Tahun 2024 ini merupakan panduan bagi Dinas Perikanan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan kegiatan pelayanan satu tahun kedepan. Oleh karena itu konsistensi, kerja sama dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target -target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Perikanan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
2. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perikanan Kab. Maros Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026;
3. Seluruh Aparat lingkup Dinas Perikanan dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang ditetapkan dalam Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2024;
4. Seluruh Aparat lingkup Dinas Perikanan dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
5. Dinas Perikanan dalam menyusun Renja Perubahan Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Perikanan;
6. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2024;
7. Masyarakat dapat melaporkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan yang dianggap tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Maros selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja dinas. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, Renja Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan Kab. Maros. Renja Perubahan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perikanan Kabupaten Maros sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas izinnya, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian tahun sebelumnya dan memuat program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan dalam rangka pencapaian visi – misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Disadari bahwa penyusunan renja Perubahan tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan dan masih akan berlanjut, maka saran dan kritik membangun selalu kami harapkan untuk kesempurnaan renja Perubahan ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan renja ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita, Amin.

Maros, 31 Juni 2024
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Maros

FADLI, S.STP.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19800827 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **14**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 39

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **45**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 45
3.3 Program dan Kegiatan 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **75**

A. Belanja Langsung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Setiap OPD 76
B. Belanja Langsung Menurut Urusan Program 78

BAB V PENUTUP **104**

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 104
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 104
5.3 Rencana Tindak Lanjut 106

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian Renstra PD S/D Tahun 2023 DPKP Kabupaten Maros 16

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros 24

Tabel 2.3.1 Permasalahan, Hambatan dan Dampak Kinerja berdasarkan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 25

Tabel 2.3.2 Permasalahan, Hambatan dan Peluang Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan..... 26

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Maros 28

Tabel 2.5 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Maros 39

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah 45

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024 46

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPKP Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Maros 57

Tabel 4.1 Rencana Kerja beserta pendanaannya Tahun 2024 86

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan, penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPKP Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) DPKP Kabupaten Maros Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan Renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja serta penyiapan data dan informasi. Pada tahap penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Pada tahap penetapan rancangan akhir Renja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan serta melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, menyusun Rencana Kerja DPKP Kabupaten Maros Tahun 2024. Selanjutnya Renja DPKP Kabupaten Maros menjadi dokumen rencana pembangunan DPKP untuk satu tahun anggaran guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh DPKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024, landasan hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang P2KP Sumber Daya Lokal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara No. 1114 Tahun 2019);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara No. 1147 Tahun 2019);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Daerah (Berita Negara No. 1781 Tahun 2020);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang P2KP Sumber Daya Lokal;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman TeknisKriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
26. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui KRPL Tahun 2017;
27. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 25);
32. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13)
33. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 23)
34. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 02);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 7);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
40. Peraturan Bupati Maros Nomor 45 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 34);
41. Peraturan Bupati Maros Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah Sebagai acuan dalam menyusun dan menetapkan arah kebijakan serta penyusunan program kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi DPKP. Tujuan disusunnya Renja Perubahan DPKP Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan daerah disemua tingkatan
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan
3. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024, adalah :

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan OPD, proses penyusunan Renja Perubahan OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Peruahan OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II: HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai : sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs; tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atasrumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; tabel rencana program dan kegiatan. Berisikan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganKabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2024.

BAB IV : RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2024.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; rencanatindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 yang memuat indikator keberhasilan perencanaan kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Evaluasi Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros meliputi 3 (tiga) hal, yaitu perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil program dan kegiatan. Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros meliputi 10 Program, 26 Kegiatan dan 83 Sub. Kegiatan dengan Realisasi sebesar 95 %.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok, sebagai berikut :

1) Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2) Tujuan yang dikehendaki;
3) Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4) Kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana; Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
   a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2024;

b. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros sampai dengan Tahun 2024 dapat diuraikan pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2023
DPKP KABUPATEN MAROS

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP**										**37**		**67.382.601.746**		**68**	**DPKP**
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	**99.534.032.435**	**100**	**59.720.419.461**	**100**	**20.539.498.487**	**100,00**	**7.662.182.285**	**100**	**37**	**100**	**67.382.601.746**	**100**	**68**	**DPKP**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**110**	**94.485.000**	**66**	**56.691.000**	**10**	**18.897.000**	**8,00**	**0**	**80,00**	**0,00**	**74**	**56.691.000**	**67**	**60**	**DPKP**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	25.700.000	6	15.420.000	2	5.140.000	2,00	0	100,00	0,00	8	15.420.000	80	60	DPKP
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	4.450.000	3	2.670.000	1	890.000	0,00	0	0,00	0,00	3	2.670.000	60	60	DPKP
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	6.595.000	3	3.957.000	1	1.319.000	0,00	0	0,00	0,00	3	3.957.000	60	60	DPKP
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	3.275.000	3	1.965.000	1	655.000	0,00	0	0,00	0,00	3	1.965.000	60	60	DPKP
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5	4.995.000	3	2.997.000	1	999.000	0,00	0	0,00	0,00	3	2.997.000	60	60	DPKP
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	37.030.000	36	22.218.000	12	7.406.000	5,00	0	41,67	0,00	41	22.218.000	68	60	DPKP
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	12.440.000	12	7.464.000	4	2.488.000	1,00	0	25,00	0,00	13	7.464.000	65	60	DPKP
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Administrasi keuaangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**25**	**96.307.612.030**	**15**	**57.784.567.218**	**5**	**19.261.522.406**	**2,00**	**7.446.891.285**	**40,00**	**38,66**	**17**	**65.231.458.503**	**68**	**68**	**DPKP**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12480	95.254.487.030	7488	57.152.692.218	2.496	19.050.897.406	800,00	7.359.641.285	32,05	38,63	8.288	64.512.333.503	66	68	DPKP
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	1.043.850.000	3	626.310.000	1	208.770.000	1,00	87.250.000	100,00	41,79	4	713.560.000	80	68	DPKP
	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	5	3.375.000	3	2.025.000	1	675.000	1,00	0	100,00	0,00	4	2.025.000	80	60	DPKP
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	90	4.250.000	54	2.550.000	18	850.000	8,00	0	44,44	0,00	62	2.550.000	69	60	DPKP
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	60	1.650.000	36	990.000	12	330.000	1,00	0	8,33	0,00	37	990.000	62	60	DPKP
	Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah	**Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah**	**5**	**2.000.000**	**3**	**1.200.000**	**1**	**400.000**	**1,00**	**0**	**100,00**	**0,00**	**4**	**1.200.000**	**80**	**60**	**DPKP**
	Rekonsilisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rekonsilisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20	2.000.000	12	1.200.000	4	400.000	1,00	0	25,00	0,00	13	1.200.000	65	60	DPKP

	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	1040	2.549.420.405	624	1.529.652.243	208	12.750.000	51,00	0	24,52	0,00	675	1.529.652.243	65	60	DPKP
	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	255	63.750.000	153	38.250.000	51	12.750.000	51,00	0	100,00	0,00	204	38.250.000	80	60	DPKP
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**9**	**2.485.670.405**	**9**	**1.491.402.243**	**9**	**497.134.081**	**3,00**	**37.641.000**	**33,33**	**7,57**	**12**	**1.529.043.243**	**133**	**62**	**DPKP**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	8.015.000	3	4.809.000	1	1.603.000	0,00	0	0,00	0,00	3	4.809.000	60	60	DPKP
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**5**	**7.500.000**	**3**	**4.500.000**	**1**	**1.500.000**	**1,00**	**0**	**100,00**	**0,00**	**4**	**4.500.000**	**80**	**60**	**DPKP**
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	41.000.000	3	24.600.000	1	8.200.000	1,00	0	100,00	0,00	4	24.600.000	80	60	DPKP
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	177.105.405	36	106.263.243	12	35.421.081	7,00	7.245.000	58,33	20,45	43	113.508.243	72	64	DPKP
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	70.100.000	3	42.060.000	1	14.020.000	0,00	4.085.000	0,00	29,14	3	46.145.000	60	66	DPKP
	Penyediaan Bahan Materail	Penyediaan Bahan Materail	Jumlah Paket Bahan Material	5	50.000.000	3	30.000.000	1	10.000.000	0,00	0	0,00	0,00	3	30.000.000	60	60	DPKP
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	175.000.000	36	105.000.000	12	35.000.000	4,00	9.990.000	33,33	28,54	40	114.990.000	67	66	DPKP
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.956.950.000	36	1.174.170.000	12	391.390.000	4,00	16.321.000	33,33	4,17	40	1.190.491.000	67	61	DPKP
	Pengandaan barang milik daerah oenunjang urusan pemerintahan daerah	**Pengandaan barang milik daerah oenunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**327.500.000**	**2**	**196.500.000**	**2**	**65.500.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2**	**196.500.000**	**100**	**60**	**DPKP**
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	327.500.000	6	196.500.000	2	65.500.000	0,00	0	0,00	0,00	6	196.500.000	60	60	DPKP
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	3.101.500.000	2	1.860.900.000	2	620.300.000	2,00	177.650.000	100,00	28,64	4	2.038.550.000	200	66	DPKP
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	45.000.000	36	27.000.000	12	9.000.000	4,00	3.750.000	33,33	41,67	40	30.750.000	67	68	DPKP
	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	3.056.500.000	36	1.833.900.000	12	611.300.000	4,00	173.900.000	33,33	28,45	40	2.007.800.000	67	66	DPKP
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**3**	**314.975.000**	**3**	**188.985.000**	**2**	**62.995.000**	**2,00**	**0**	**100,00**	**0,00**	**5**	**188.985.000**	**167**	**60**	**DPKP**
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	200.000.000	9	120.000.000	3	40.000.000	0,00	0	0,00	0,00	9	120.000.000	60	60	DPKP
	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175	75.000.000	105	45.000.000	35	15.000.000	10,00	0	28,57	0,00	115	45.000.000	66	60	DPKP
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung	Pemeliharaan/rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana	5	39.975.000	3	23.985.000	1	7.995.000	0,00	0	0,00	0,00	3	23.985.000	60	60	DPKP
	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan		**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**															**DPKP**
	Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	**Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan**	**Persentase Ketersediaan Pangan Utama**	**100**	**10.745.000**	**27,67**	**11.612.000,00**	**100,0**	**2.149.000**			**0**	**0**	**14**	**11.612.000**	**14**	**108**	**DPKP**
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia**	**5**	**10.745.000**	**3**	**11.612.000,00**	**1**	**2.149.000**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**3**	**11.612.000**	**60**	**108**	**DPKP**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	5	10.745.000	5	11.612.000,00	1	2.149.000	0,00		0,00	0,00	5	11.612.000	100	108	DPKP
	Peningkatan diverisifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	**Peningkatan diverisifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	**Ketersediaan energi dan protein perkapita**	**883,85**	**1.616.345.000**	**34,06**	**1.254.367.200,00**	**176,77**	**323.269.000**		**32.499.000**	**0,00**	**10,05**	**17**	**1.286.866.200**	**2**	**80**	**DPKP**

	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan**	**Jumlah jenis bahan pokok atau pangan lainnya yang tersedia dan tersalurkan**	**55**	**823.575.000**	**6**	**135.466.600,00**	**11**	**164.715.000**	**2,00**	**32.499.000**	**18,18**	**19,73**	**8**	**167.965.600**	**15**	**20**	**DPKP**
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	5	81.685.000	1	25.703.200,00	1	16.337.000	0,00	0	0,00	0,00	1	25.703.200	20	31	DPKP
	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia	Pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	5	71.040.000	5	28.071.000,00	1	14.208.000	0,00	460.000	0,00	3,24	5	28.531.000	100	40	DPKP
	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1250	92.775.000	0	0	250	18.555.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan kabupaten/kota	Pengembangan kelembagaan distribusi pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	20	30.240.000	0	0	4	6.048.000	0,00	216.000	0,00	3,57	0	216.000	0	1	DPKP
	Pemantauan stok pangan	Pemantauan stok pangan	Informasi Stok Pangan	20	223.450.000	0	0	4	44.690.000	1,00	3.165.000	25,00	7,08	1	3.165.000	5	1	DPKP
	Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	Penyediaan informasi harga pangan tingkat produsen dan konsumen wilayah kabupaten/kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	5	51.660.000	0	0	1	10.332.000	0,00	3.580.000	0,00	34,65	0	3.580.000	0	7	DPKP
	Koordinasi dan sinkronisasi pemanatauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Koordinasi dan sinkronisasi pemanatauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	15	169.370.000	0	0	3	33.874.000	1,00	25.078.000	33,33	74,03	1	25.078.000	7	15	DPKP
	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	5	103.355.000	0	0	1	20.671.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupateb/kota	**Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupateb/kota**	**Jumlah cadangan pangan yang tersedia**	**100**	**480.000.000**	**0**	**0**	**20**	**96.000.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**DPKP**
	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100	480.000.000	0	0	20	96.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	**Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi**	**Jumlah ketersediaan pangan**	**15**	**312.770.000**	**158,72**	**1.118.900.600,00**	**3**	**62.554.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**159**	**1.118.900.600**	**1.058**	**358**	**DPKP**
	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5	194.470.000	0	0	1	38.894.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumer daya loka	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumer daya loka	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5	17.000.000	3	10.200.000	1	3.400.000	0,00	0	0,00	0,00	3	10.200.000	60	60	DPKP
	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	5	101.300.000	1	11.847.600,00	1	20.260.000	0,00	0	0,00	0,00	1	11.847.600	20	12	DPKP
	Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Konsumen		**Indeks Harga Konsumen**															**DPKP**
	Penaganan kerawanan pangan	**Penaganan kerawanan pangan**	**Persentase Lokasi Rawan Pangan yang ditangani**	**100**	**213.095.000**	**98**	**154.479.100,00**	**100**	**42.619.000**		**6.300.000**	**0**	**15**	**49**	**160.779.100**	**49**	**75**	**DPKP**
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah kecamatan yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik**	**14**	**134.215.000**	**31**	**20.247.500,00**	**14**	**26.843.000**	**4,00**	**6.300.000**	**28,57**	**23,47**	**35**	**26.547.500**	**250**	**20**	**DPKP**
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	70	134.215.000	2	20.247.500,00	14	26.843.000	4,00	6.300.000	28,57	23,47	6	26.547.500	9	20	DPKP
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang tertangani**	**103**	**78.880.000**	**103**	**134.231.600,00**	**103**	**15.776.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**103**	**134.231.600**	**100**	**170**	**DPKP**
	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	515	78.880.000	0	0	103	15.776.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Pengawasan keamanan pangan	**Pengawasan keamanan pangan**	**Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan**	**100**	**377.605.000**	**71,93**	**54.136.400,00**	**100**	**75.521.000**		**1.390.000**	**0,00**	**1,84**	**36**	**55.526.400**	**36**	**15**	**DPKP**
	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota	**Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota**	**Jumlah pangan segar yang memnuhi syarat keamanan pangan**	**10**	**377.605.000**	**20**	**54.136.400,00**	**2**	**75.521.000**	**0,00**	**1.390.000**	**0,00**	**1,84**	**20**	**55.526.400**	**200**	**15**	**DPKP**

	Penyediaan sarana pengujian kemanan dan mutu pangan segar asa tumbuhan daerah kabupaten/kota	Penyediaan sarana pengujian kemanan dan mutu pangan segar asa tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5	156.347.000	0	0	1	31.269.400	0,00	1.390.000	0,00	4,45	0	1.390.000	0	1	DPKP
	Penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Penguatan kelembagaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5	221.258.000	0	0	1	44.251.600	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah		**Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB**															**DPKP**
	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	**Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian**	**Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar**	**26,5**	**11.029.220.350**	**24,87**	**9.472.310.590,00**	**5**	**528.344.700**	**5**	**6.460.000**	**100**	**1**	**15**	**9.478.770.590**	**57**	**86**	**DPKP**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah jenis sarana pertanian yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka peningkatan produksi pertanian**	**25**	**8.711.781.850**	**9**	**8.481.430.850,00**	**5**	**64.857.000**	**0,00**	**6.460.000**	**0,00**	**9,96**	**9**	**8.487.890.850**	**36**	**97**	**DPKP**
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5	3.182.972.850	2	3.109.312.350	1	24.553.500	0,00	6.460.000	0,00	26,31	2	3.115.772.350	40	98	DPKP
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	10	5.439.359.000	4	5.372.118.500	2	22.413.500	0,00	0	0,00	0,00	4	5.372.118.500	40	99	DPKP
	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	10	34.100.000	0	0	2	6.820.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan	10	29.850.000	0	0	2	5.970.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	10	25.500.000	0	0	2	5.100.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikro organisme yang tersedia**	**1**	**580.156.000**	**1**	**563.736.040,00**	**1**	**116.031.200**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1**	**563.736.040**	**100**	**97**	**DPKP**
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG /Tanaman	5	580.156.000	1	563.736.040,00	1	116.031.200	0,00	0	0,00	0,00	1	563.736.040	20	97	DPKP
	Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota	**Pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah benih/binit ternak yang diawasi dan di kendalikan**	**3750**	**820.997.500**	**5**	**198.335.600,00**	**750**	**164.199.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**5**	**198.335.600**	**0**	**24**	**DPKP**
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	3750	820.997.500	1.789,00	198.335.600,00	750	164.199.500	0,00	0	0,00	0,00	1.789	198.335.600	48	24	DPKP
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah benih/bibit ternak yang disediakan**	**5720**	**916.285.000**	**5**	**228.808.100,00**	**1.144**	**183.257.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**5**	**228.808.100**	**0**	**25**	**DPKP**
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	5.720	916.285.000	1.718,00	228.808.100,00	1.144	183.257.000	0,00	0	0,00	0,00	1.718	228.808.100	30	25	DPKP
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan		**Persentase Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan**															**DPKP**
	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	**Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian**	**Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB**	**45**	**13.469.185.000**	**42,5**	**3.722.589.519,00**	**#REF!**	**2.693.837.000**		**17.820.000**	**#REF!**	**1**	**21**	**3.740.409.519**	**47**	**28**	**DPKP**
	Pengembangan prasarana pertanian	**Pengembangan prasarana pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian dan dikembangkan**	**0**	**469.185.000**	**6**	**0**		**93.837.000**	**0,00**	**9.550.000**	**#DIV/0!**	**10,18**	**6**	**9.550.000**	**0**	**2**	**DPKP**
	Koordinasi dan sikronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Koordinasi dan sikronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0	219.185.000	0	0		43.837.000	0,00	9.550.000	#DIV/0!	21,79	0	9.550.000	0	4	DPKP
	Penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian berklenajutan di kabupaten/kota	Penyusunan peta kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian berklenajutan di kabupaten/kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0	250.000.000	0	0		50.000.000	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Pembangunan prasarana pertanian	**Pembangunan prasarana pertanian**	**Jumlah prasarana pertanian yang dibangun**		**13.000.000.000**	**8**	**3.722.589.519,00**		**2.600.000.000**	**1**	**8.270.000**	**#DIV/0!**	**0,32**	**9**	**3.730.859.519**	**0**	**29**	**DPKP**
	Pembangunan, rehabiitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Pembangunan, rehabiitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	10.000.000.000	0	0		2.000.000.000	1,00	0	#DIV/0!	0,00	1	0	0	0	DPKP

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	0	3.000.000.000	0	0		600.000.000	3,00	8.270.000	#DIV/0!	1,38	3	8.270.000	0	0	DPKP
	Perizinan usaha pertanian	**Perizinan usaha pertanian**	**Kontrbusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB**	**0,5**	**41.607.500**	**0,49**	**32.068.000,00**		**8.321.500**		**0**	**#DIV/0!**	**0,00**	**0**	**32.068.000**	**49**	**77**	**DPKP**
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Jumlah usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang memiliki Izin**	**20**	**41.607.500**	**0**	**32.068.000,00**	**4**	**8.321.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**32.068.000**	**0**	**77**	**DPKP**
	Penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	0	41.607.500	0	0		8.321.500	0,00	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Petani		**Nilai Tukar Petani (NTP)**															**DPKP**
	Pegendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	**Pegendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota**	**Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani akibat Gagal Panen**	**85**	**2.591.755.000**	**43,25**	**1.297.319.600,00**	**100**	**518.351.000**		**15.203.000**	**0**	**3**	**22**	**1.312.522.600**	**25**	**51**	**DPKP**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan**	**1000**	**2.591.755.000**	**54**	**1.297.319.600,00**	**233**	**518.351.000**	**58,25**	**15.203.000**	**25,00**	**2,93**	**112**	**1.312.522.600**	**11**	**51**	**DPKP**
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	250	1.437.717.500	54	760.982.800,00	50	287.543.500	12,5	11.739.000	25,00	4,08	67	772.721.800	27	54	DPKP
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Penanganan Dampak Perubahan Iklim(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	490	468.590.000	248	311.739.300,00	98	93.718.000	24,50	2.182.000	25,00	2,33	273	313.921.300	56	67	DPKP
	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	425	595.160.000	50	224.597.500,00	85	119.032.000	21,25	1.282.000	25,00	1,08	71	225.879.500	17	38	DPKP
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	5	90.287.500	0	0	1	18.057.500	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Penyuluhan pertanian	**Penyuluhan pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Pembinaan**	**100**	**6.210.229.700**	**30,31**	**4.480.621.200,00**	**100,00**	**626.468.500**		**96.852.500**	**0,00**	**15,46**	**15**	**4.577.473.700**	**15**	**74**	**DPKP**
	Pelaksanaan penyuluhan pertanian	**Pelaksanaan penyuluhan pertanian**	**Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Pembinaan**	**1000**	**6.210.229.700**	**441**	**4.480.621.200,00**	**249**	**626.468.500**	**0,00**	**96.852.500**	**0,00**	**15,46**	**441**	**4.577.473.700**	**44**	**74**	**DPKP**
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan dan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	70	659.035.000	42	324.745.500,00	14	131.807.000	0,00	25.146.500	0,00	19,08	42	349.892.000	60	53	DPKP
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.245	1.613.307.500	2.958,00	963.988.500,00	249	322.661.500	0,00	57.351.000	0,00	17,77	2.958	1.021.339.500	238	63	DPKP
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	49	3.362.887.200	46	3.191.887.200,00	1	57.000.000	0,00	0	0,00	0,00	46	3.191.887.200	94	95	DPKP
	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/Kota	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	70	500.000.000	0	0	14	100.000.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	600	75.000.000	0	0	120	15.000.000	0,00	14.355.000	0,00	95,70	0	14.355.000	0	19	DPKP
	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinier	**Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veternier**	**Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak**	**100**	**2.907.379.500**	**87,25**	**729.113.100,00**	**100**	**581.475.900**	**50,00**	**249.336.850**	**50,00**	**42,88**	**69**	**978.449.950**	**69**	**34**	**DPKP**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah wilayah yang terkena penyakit wabah penyakit hewan menular dan dapat dikendalikan**	**10**	**1.704.842.000**	**24**	**588.369.300,00**	**2**	**340.968.400**	**1,00**	**36.000.000**	**50,00**	**10,56**	**25**	**624.369.300**	**250**	**37**	**DPKP**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2022 telah melaksanakan 10 (sepuluh) program dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 40.262.361.528,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.901.137.768,- atau 94,14 %. Sedangkan capaian kinerja program/kegiatan sebesar 92.72%.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 17.863.447.898,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 16.649.396.049,- atau 93,20%.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.999.600.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 4.994.600.000,- atau 99.90%.
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 415.876.200,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 354.859.000,- atau 85,33%.
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 22.235.200,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 5.965.200,- atau 26,83%.
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 29.458.500,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 17.708.500,- atau 60,12%.
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 6.906.601.430,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 6.123.384.900,- atau 94,12%.

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 8.235.297.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 8.198.608.019,- atau 99,56%.
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 468.823.400,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 426.992.200,- atau 99,56%.
9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 465.657.400,- dan anggaran yang terealisasi Rp. 433.179.700,- atau 93,03%.
10. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.12.561.000,- dan anggaran yang terealisasi Rp. 12.561.000,- atau 100%.
11. Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 842.803.200,- dan anggaran yang terealisasi Rp. 683.883.200,- atau 81,15%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Maros merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam bidang urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap

perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan

dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros merasakan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Indikator kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
2. Indeks Harga Pangan Konsumen
3. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
4. Persentase Luas Lahan pertanian berkelanjutan
5. Nilai Tukar Petani

Dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian rupa, DPKP diharapkan dapat responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang baik pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta meningkatkan kualitas pembangunan pertanian daerah berkelanjutan. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.2. di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Maros

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	√	85	85	85	85	88	88	85	85	IKU
2	Indeks Harga Pangan Konsumen	-	√	<104	<104	<104	<104	109.58	102.38	<104	<104	IKU
3	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	-	√	19,50	19,50	19,50	19,50	16,50	15.25	19,50	19,50	IKU
4	Persentase Luas Lahan pertanian berkelanjutan	-	√	64	64	64	64	64	64	64	64	IKU
5	Nilai Tukar Petani	-	√	>100	>100	>100	>100	100.49	114.25	>100	>100	IKU
												IKK RPJMD
												IKK LPPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju kearah yang lebih baik. Permasalahan yang ada selanjutnya menjadi isu- isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan misi, visi, tujuan dan sasaran, sehingga visi, misi, program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadaplingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Maros.

a. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros terdapat Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Permasalahan, Hambatan dan Dampak Kinerja berdasarkan Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Peluang
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) belum mencapai ideal	Kurangnya Konsumsi umbi-umbian, sayur-sayuran dan kacang-kacangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang rendah	Adanya peluang usaha produk pangan berbasis pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang dan aman

2.	Jumlah Cadangan Pangan masih dibawah jumlah yang seharusnya	Masih rendahnya daya saing komoditas pertanian	Indeks Harga Pangan Konsumen	Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah sehingga dapat bersaing di pasar domestic dan global
3.	Produksi pertanian menurun	Luas lahan pertanian mengalami pengurangan akibat banyak alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman dan industri	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB berkurang	Perda lahan Pangan Berkelanjutan yang mengatur terkait alih fungsi lahan pertanian
4.	Meningkatnya alih fungsi lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian	Pertumbuhan Jumlah Penduduk	Persentase Luas Lahan pertanian berkelanjutan menurun	Adanya Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
5.	Berkurangya indeks harga hasil produksi Pertanian	Lemahnya aksesibilitas petani terhadap permodalan.	Nilai Tukar Petani mengalami penurunan	Adanya Fasilitas dari Pemerintah untuk memperkuat Modal Usaha

b. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros terdapat Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

Tabel 2.3.2
Permasalahan, Hambatan dan Peluang Kinerja berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Permasalahan	Hambatan	Peluang
1.	Masih terbatasnya jumlah ASN dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya	Pengisian Formasi Pegawai/ASN masih terbatas	Tersedianya pegawai yang bisa di optimalisasikan
2.	Belum Optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung tidak direalisasikan	Perhatian Pemerintah terhadap dukungan sarana dan prasarana
3.	Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan pertanian	Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah	Adanya pelatihan bagi tenaga pengelola data Pertanian
4.	Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagai tanggung jawabnya	Tingginya intensitas koordinasi lintas sektor yang dilakulkan Dinas Pertanian	Terdapatnya keinginan untuk melakukan koordinasi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah.

Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2021-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka fungsi dan tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terkait erat dengan pencapaian

- Misi 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik
- Misi 3 : Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif
- Misi 4 : Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal
- Misi 5 : Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah
- Misi 6 : Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra OPD dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Maros

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analysis Kebutuhan					Cat. Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksana Dengan Baik	100%	22,866,514,600	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksana Dengan Baik	100%	1,963,100,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISTAN KP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	23,450,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISTAN KP	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	63.000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISTAN KP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	8,479,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISTAN KP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	35,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISTAN KP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,191,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISTAN KP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISTAN KP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISTAN KP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISTAN KP	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DISTAN KP	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISTAN KP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,046,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DISTAN KP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISTAN KP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4,318,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISTAN KP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	4,000,000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISTAN KP	Jumlah Laporan Evaluasi	5 Laporan	1,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISTAN KP	Jumlah Laporan Evaluasi	5 Laporan	1,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISTAN KP	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	2.748 Dokumen	13.483.329.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISTAN KP	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan AdministrasiKeuangan	2.748 Dokumen	13.483.329.500	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISTAN KP	Jumlah dokumen pelaporan	12 Bulan	13.414.329.500	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISTAN KP	Jumlah dokumen pelaporan	12 Bulan	13.414.329.500	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISTAN KP	Jumlah pelaksanaan pengelolaan	25 Jenis	45,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISTAN KP	Jumlah pelaksanaan pengelolaan	25 Jenis	45,000,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISTAN KP	Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Kali	6,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISTAN KP	Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Kali	6,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISTAN KP	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran	2 Laporan	8,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISTAN KP	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran	2 Laporan	8,000,000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DISTAN KP	Jumlah dokumen pelaporan	10 Dokumen	5,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DISTAN KP	Jumlah dokumen pelaporan	10 Dokumen	5,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DISTAN KP	Jumlah dokumen pelaporan	2 Laporan	5,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DISTAN KP	Jumlah dokumen pelaporan	2 Laporan	5,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISTAN KP	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	11 Jenis	1,759,650,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISTAN KP	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	11 Jenis	1,759,650,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISTAN KP	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	35,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DISTAN KP	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	35,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISTAN KP	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	25 Jenis	20,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISTAN KP	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	25 Jenis	20,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISTAN KP	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	6 Unit	23,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISTAN KP	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	6 Unit	23,500,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISTAN KP	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	12 Bulan	400,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DISTAN KP	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Tersedia	12 Bulan	400,000,000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISTAN KP	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	25,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DISTAN KP	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	25,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISTAN KP	Jumlah Kunjungan Tamu yang Difasilitasi	1 Tahun	11,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DISTAN KP	Jumlah Kunjungan Tamu yang Difasilitasi	1 Tahun	11,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISTAN KP	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISTAN KP	Jumlah pelaksanaan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	250,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISTAN KP	Jumlah Jenis BMD-PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	1.450.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah	DISTAN KP	Jumlah Jenis BMD-PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	1.450.000.000	
	Pengadaan Mebel	DISTAN KP	Jumlah Mebel yang Diadakan	Unit	250,000,000	Pengadaan Mebel	DISTAN KP	Jumlah Mebel yang Diadakan	Unit	250,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISTAN KP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	350,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DISTAN KP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	Unit	350,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISTAN KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	5 Paket	850,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISTAN KP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	5 Paket	850,000,000	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Kec. Tanralili	Meningkatnya Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100 Persen		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Kec. Tanralili	Meningkatnya Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100 Persen		
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanralili	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan	1 Unit	1,298,000,000	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tanralili	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan	1 Unit	1,298,000,000	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kec. Tanralili	Jumlah infrastruktur Lumbung Pangan	3 Unit	500,000,000	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kec. Tanralili	Jumlah infrastruktur Lumbung Pangan	3 Unit	500,000,000	
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kec. Tanralili, Kec. Lau, Kec. Simbang	Jumlah infrastruktur Lantai Jemur	8 Unit	798,000,000	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Kec. Tanralili, Kec. Lau, Kec. Simbang	Jumlah infrastruktur Lantai Jemur	8 Unit	798,000,000	
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan pangan		361,100,000	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		Meningkatnya Pemantapan Ketersediaan pangan			

	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Maros	Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk Rawan Pangan		190,550,000	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Maros	Meningkatnya Ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk Rawan Pangan			
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Maros	Jumlah jenis informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	2 Jenis	20,550,000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Maros	Jumlah jenis informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	2 Jenis	20,550,000	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Maros	Jumlah jenis penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal	Jenis	30,000,000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Maros	Jumlah jenis penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal	Jenis	30,000,000	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Maros	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan	4 Dokumen	40,000,000	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kab. Maros	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan	4 Dokumen	40,000,000	
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen laporan pengembangan kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	4 Dokumen	50,000,000	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen laporan pengembangan kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	4 Dokumen	50,000,000	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Maros	Jumlah Dokumen laporan pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	4 Dokumen	50,000,000	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kab. Maros	Jumlah Dokumen laporan pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	4 Dokumen	50,000,000	
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros			20,550,000	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros				
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Maros	Jumlah dokumen penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	1 Dokumen	20,550,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Maros	Jumlah dokumen penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal	1 Dokumen	20,550,000	
	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Kab. Maros			40,000,000	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	1 Kegiatan	40,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	1 Kegiatan	40,000,000	

	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Maros	Jumlah konsumsi pangan perkapita/tahun yang sesuai dengan angka kecukupan gizi	162,06 Kg/Kapita	110,000,000	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kab. Maros	Jumlah konsumsi pangan perkapita/tahun yang sesuai dengan angka kecukupan gizi	162,06 Kg/Kapita	110,000,000	
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Maros	Jumlah dokumen penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 Dokumen	40,000,000	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Maros	Jumlah dokumen penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun	1 Dokumen	40,000,000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	1 Kegiatan	30,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	1 Kegiatan	30,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	1 Kali Kegiatan	40,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	1 Kali Kegiatan	40,000,000	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Meningkatnya Pengawasan keamanan dan Mutu Pangan		100,000,000	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Meningkatnya Pengawasan keamanan dan Mutu Pangan		100,000,000	
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Lokasi yang memenuhi standar keamanan sesuai standar yang berlaku	14 Lokasi	100,000,000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros			100,000,000	
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah dokumen laporan ketahanan pangan daerah	4 Dokumen	50,000,000	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah dokumen laporan ketahanan pangan daerah	4 Dokumen	50,000,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengujian mutu sarana dan prasarana yang tersedia	1 Kali	50,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengujian mutu sarana dan prasarana yang tersedia	1 Kali	50,000,000	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Tertanganinya Daerah Rawan Pangan		270,000,000	Program Penanganan Kerawanan Pangan		Tertanganinya Daerah Rawan Pangan		270,000,000	
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Maros	Jumlah kecamatan yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik	14 Kecamatan	35,000,000	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kab. Maros	Jumlah kecamatan yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik	14 Kecamatan	35,000,000	

	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Maros	Jumlah dokumen penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentangan pangan	1 Dokumen	35,000,000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Maros	Jumlah dokumen penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentangan pangan	1 Dokumen	35,000,000	
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang ditangani	100 Persen	235,000,000	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Persentase Lokasi Rawan Pangan yang ditangani	100 Persen	235,000,000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	14 Kecamatan	155,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi	14 Kecamatan	155,000,000	
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan	14 Kecamatan	80,000,000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan	14 Kecamatan	80,000,000	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Terbinanya kelompok tani penerima manfaat		5,252,630,000	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Terbinanya kelompok tani penerima manfaat		5,252,630,000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Maros	Meningkatnya usaha tani	6 Jenis	2,963,750,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Maros	Meningkatnya usaha tani		2,963,750,000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengawasan	12 Bulan	204,050,000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengawasan	12 Bulan	204,050,000	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pendampingan	20 Kelompok	17,200,000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pendampingan	20 Kelompok	17,200,000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros		1 Jenis	250,000,000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros		1 Jenis	250,000,000	
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Maros	Jumlah hewan/tanaman yang dijaminkan kemurnian dan kelestarian SDG	1000 Ekor	250,000,000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Maros	Jumlah hewan/tanaman yang dijaminkan kemurnian dan kelestarian SDG	1000 Ekor	250,000,000	

	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				155,500,000	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota				155,500,000	
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	12 Bulan	155,500,000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	12 Bulan	155,500,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Jenis Benih/Bibit Ternak yang diawasi persediaannya	5 Jenis	50,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Jenis Benih/Bibit Ternak yang diawasi persediaannya	5 Jenis	50,000,000	
	Pengawasan Produksi Benih/Bibibt Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Bulan	50,000,000	Pengawasan Produksi Benih/Bibibt Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	12 Bulan	50,000,000	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Kab. Maros	Jumlah benih/bibit ternak yang disediakan	5 Jenis	515.980,000	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Kab. Maros	Jumlah benih/bibit ternak yang disediakan	5 Jenis	1,833,380,000	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kec. Lau, Kec. Bontoa, Kec. Maros Baru, Kec. Tanralili, Kec. Turikale	Jumlah benih/bibit ternak unggas	4514 ekor	315,980,000	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kec. Lau, Kec. Bontoa, Kec. Maros Baru, Kec. Tanralili, Kec. Turikale	Jumlah benih/bibit ternak unggas	4514 ekor	315,980,000	
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kec. Tompobulu	Jumlah pengadaan hijauan pakan ternak	1 kegiatan	200,000,000	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Kec. Tompobulu	Jumlah pengadaan hijauan pakan ternak	1 kegiatan	200,000,000	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Maros	Meningkatnya Jaminan Mutu dan sistem Pelayanan Kesehatan Hewan		476,500,000	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Meningkatnya Jaminan Mutu dan sistem Pelayanan Kesehatan Hewan		476,500,000	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah wilayah yang terkena penyakit wabah penyakit hewan menular dan dapat dikendalikan	14 Lokasi	350,000,000	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Maros	Jumlah wilayah yang terkena penyakit wabah penyakit hewan menular dan dapat dikendalikan	14 Lokasi	350,000,000	

	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Maros	Jumlah jenis penyakit hewan dan zoonosis yang dapat dikendalikan	5 Jenis	250,000,000	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Maros	Jumlah jenis penyakit hewan dan zoonosis yang dapat dikendalikan	5 Jenis	250,000,000	
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Maros	Jumlah kunjungan	50 Kunjungan	100,000,000	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Maros	Jumlah kunjungan	50 Kunjungan	100,000,000	
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Lokasi Lalu Lintas Hewan yang diawasi	14 Lokasi	18,500,000	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Lokasi Lalu Lintas Hewan yang diawasi	14 Lokasi	18,500,000	
	Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	12 bulan	18,500,000	Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	12 bulan	18,500,000	
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah layanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang diberikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku	5 Layanan	80,000,000	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah layanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang diberikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku	5 Layanan	80,000,000	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Maros	Jumlah tenaga pelayanan jasa laboratorium	4 Orang	50,000,000	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Maros	Jumlah tenaga pelayanan jasa laboratorium	4 Orang	50,000,000	
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Maros	Jumlah tenaga pelayanan jasa Medik Veteriner	2 Orang	30,000,000	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Maros	Jumlah tenaga pelayanan jasa Medik Veteriner	2 Orang	30,000,000	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				18,000,000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				18,000,000	

	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	20 Kali Perjalanan	9,000,000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	20 Kali Perjalanan	9,000,000	
	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengujian laboratorium	30 Kali	9,000,000	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pengujian laboratorium	30 Kali	9,000,000	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				10,000,000	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan				10,000,000	
	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan	6 Kali	10,000,000	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan	6 Kali	10,000,000	
	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pendampingan		45,200,000	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kab. Maros	Jumlah pelaksanaan pendampingan		45,200,000	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Terlaksananya pengembangan fasilitasi terpadu dalam pengelolaan Lahan dan air		5,509,500,000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Terlaksananya pengembangan fasilitasi terpadu dalam pengelolaan Lahan dan air		5,509,500,000	
	Pengembangan Prasarana Pertanian				150,000,000	Pengembangan Prasarana Pertanian				150,000,000	
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan/LP2B	Kab.Maros	Jumlah Dokumen Peta Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	100,000,000	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan/LP2B	Kab.Maros	Jumlah Dokumen Peta Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	100,000,000	
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komuditas Perkebunan	Kab.Maros	Jumlah Dokumen Masterplan	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komuditas Perkebunan	Kab.Maros	Jumlah Dokumen Masterplan	1 Dokumen	50,000,000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian		Tersedianya Prasarana produksi pertanian		5,359,500,000	Pembangunan Prasarana Pertanian		Tersedianya Prasarana produksi pertanian		5,359,500,000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kec. Cenrana, Kec. Tanralili, Kec. Bantimurung, Kec. Lau, Kec. Mandai	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun dan direhabilitasi	6 Unit	861,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kec. Cenrana, Kec. Tanralili, Kec. Bantimurung, Kec. Lau, Kec. Mandai	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun dan direhabilitasi	6 Unit	861,000,000	

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kec. Cenrana, Kec. Mallawa	Jumlah embung yang dibangun	2 Unit	241,500,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kec. Cenrana, Kec. Mallawa	Jumlah embung yang dibangun	2 Unit	241,500,000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kec. Camba, Kec. Moncongloe, Kec. Maros Baru, Kec. Simbang, Kec. Mandai, Kec. Mallawa, Kec. Bontoa	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun dan direhabilitasi	9 Unit	1,995,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kec. Camba, Kec. Moncongloe, Kec. Maros Baru, Kec. Simbang, Kec. Mandai, Kec. Mallawa, Kec. Bontoa	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun dan direhabilitasi	9 Unit	1,995,000,000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Kec. Mandai	Jumlah dam parit yang dibangun dan direhabilitasi	2 Unit	231,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Kec. Mandai	Jumlah dam parit yang dibangun dan direhabilitasi	2 Unit	231,000,000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kec. Bontoa, Kec. Mandai, Kec. Marusu, Kec. Tanralili	Jumlah balai penyuluhan yang direhabilitasi	4 Unit	1,800,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Kec. Bontoa, Kec. Mandai, Kec. Marusu, Kec. Tanralili	Jumlah balai penyuluhan yang direhabilitasi	4 Unit	1,800,000,000	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kec. Mandai dan Kec. Marusu	Jumlah pembangunan sumur dangkal dan sumur dalam	2 Unit	231,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kec. Mandai dan Kec. Marusu	Jumlah pembangunan sumur dangkal dan sumur dalam	2 Unit	231,000,000	
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Terkendalinya bencana pertanian		630,250,000	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Terkendalinya bencana pertanian			
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Tertanganinya serangan OPT		650,250,000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		Tertanganinya serangan OPT		650,250,000	
	Pengendalian Organisme Penganggau Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Maros	Jumlah jenis OPT yang dapat dikendalikan	4 Jenis	371,500,000	Pengendalian Organisme Penganggau Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Maros	Jumlah jenis OPT yang dapat dikendalikan	4 Jenis	371,500,000	
	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Maros	Jumlah Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui Sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) Tanaman Perkebunan	1 Kegiatan	258,750,000	Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Maros	Jumlah Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui Sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) Tanaman Perkebunan	1 Kegiatan	258,750,000	
	Program Penyuluhan Pertanian		Meningkatnya kualitas SDM penyuluh dan petani		1,171,875,000	Program Penyuluhan Pertanian		Meningkatnya kualitas SDM penyuluh dan petani			

	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1,171,875,000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				1,171,875,000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Maros	Jumlah Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	99 Orang	163,875,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Maros	Jumlah Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	99 Orang	163,875,000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Maros	Jumlah Kelompok Tani yang Dinaikkan Kelas Kelompoknya	550 kelompok	250,000,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Maros	Jumlah Kelompok Tani yang Dinaikkan Kelas Kelompoknya	550 kelompok	250,000,000	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kec. Maros Baru, Kec. Mandai, Kec. Bontoa, Kec. Turikale	Jumlah Penyedian Sanggar Tani	12 Unit	630,000,000	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kec. Maros Baru, Kec. Mandai, Kec. Bontoa, Kec. Turikale	Jumlah Penyedian Sanggar Tani	12 Unit	630,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk Rencana Kerja Tahun 2023 dalam bentuk program/kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.5
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Maros

OPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	**Dusun Sambueja, Simbang, Bantimurung, Baruga, Bonto Manai, Tompobulu, Bonto Rea Kec. Lau, Maccini Baji Kec. Lau**	**Persentase Ketersediaan Pangan Utama**	**100 %**	
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Dusun Sambueja, Simbang, Bantimurung, Baruga, Bonto Manai, Tompobulu, Bonto Rea Kec. Lau, Maccini Baji Kec. Lau**	**Jumlah Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia**	**8 Unit**	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Dusun Sambueja, Simbang, Bantimurung, Baruga	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	2 Unit	
	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Dusun Sambueja, Simbang, Bonto Manai, Tompobulu, Bonto Rea Kec. Lau, Maccini Baji Kec. Lau	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	6 Unit	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Kec. Bantimurung, Kec. Turikale, Kec. Mallawa**	**Ketersediaan energi dan protein perkapita**	**5 Lembaga**	

	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	**Kec. Bantimurung, Kec. Turikale, Kec. Mallawa**	**Jumlah jenis informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah yang tersedia**	**5 Lembaga**	
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Kec. Bantimurung, Kec. Turikale, Kec. Mallawa	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	5 Lembaga	
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka Kecakupan Gizi	**Desa Uludaya Kec. Mallawa, Desa Minasa Baji Kec. Bantimurung**	**Jumlah konsumsi pangan perkapita/tahun yang sesuai dengan angka kecukupan gizi**	**2 Layanan**	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Desa Uludaya Kec. Mallawa, Desa Minasa Baji Kec. Bantimurung	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Layanan	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Kec. Turikale**	**Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar**	**1 Layanan**	
	Pengawasan Penggunssn Sarana Pertanian	**Kec. Turikale**	**Jumlah jenis sarana pertanian yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka peningkatan produksi pertanian**	**1 Layanan**	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kec. Turikale	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Layanan	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Bontomanai dan Tompobulu**			
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Bontomanai dan Tompobulu**	**Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar**		
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Bontomanai dan Tompobulu	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1 Unit	
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	**Kec. Cenrana, Kec. Tanralili, Kec. Mallawa, Kec. Mandai, Kec. Lau, Kec. Bantimurung, Kec. Marusu, Kec. Simbang**	**Jumlah benih/bibit ternak yang disediakan**	19 Ekor	
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kec. Cenrana, Kec. Tanralili, Kec. Mallawa,	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain	19 Ekor	

	Penanggulangan daerah terdampak wabah oenyakit hewan menular	Penanggulangan daerah terdampak wabah oenyakit hewan menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	5	319.967.000	0	0	1	63.993.400	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Pemberantasan penaykit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pemberantasan penaykit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5	1.384.875.000	3	246.357.000,00	1	276.975.000	0,00	36.000.000	0,00	13,00	3	282.357.000	60	20	DPKP
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Lokasi Lalu Lintas Hewan yang diawasi**	**14**	**53.750.000**	**14**	**44.615.000,00**	**1**	**10.750.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**14**	**44.615.000**	**100**	**83**	**DPKP**
	Pengawasan atas peenrapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan media pembawa hewan lainnya (HPM)	Pengawasan atas peenrapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan media pembawa hewan lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	5	53.750.000	0	0	1	10.750.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP
	Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veternier dalam daerah kabupaten/kota	**Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veternier dalam daerah kabupaten/kota**	**Jumlah layanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang diberikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku**	**5**	**60.000.000**	**3**	**45.350.000,00**	**1**	**12.000.000**	**0,25**	**0**	**25,00**	**0,00**	**3**	**45.350.000**	**65**	**76**	**DPKP**
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5	60.000.000	3	45.350.000,00	1	12.000.000	0,25	0	25,00	0,00	3	45.350.000	65	76	DPKP
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Jumlah peraturan dan persyaratan teknis yang dikeluarkan dalam rangka penerapan kesehatan masyarakat veteriner**	**5**	**1.088.787.500**	**3**	**50.778.800,00**	**1**	**217.757.500**	**1**	**213.336.850**	**100,00**	**97,97**	**4**	**264.115.650**	**80**	**24**	**DPKP**
	Pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veternier, dan kesejahteraan hewan	Pengembangan kompetensi petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veternier, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	140	1.069.992.500	0	0	28	213.998.500	28	213.336.850	100,00	99,69	28	213.336.850	20	20	DPKP
	Pengawasan unit usaha produk hewan	Pengawasan unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	5	18.795.000	0	0	1	3.759.000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	DPKP

		Kec. Mandai, Kec. Lau, Kec. Bantimurung, Kec. Marusu, Kec. Simbang			
	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Batunapara Kec. Bantimurung	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3 Ekor	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Kec. Simbang, Kec. Camba, Kec. Maros Baru, Kec. Lau, Kec. Mallawa, Kec. Bantimurung, Kec. Tanralili, Kec. Turikale**	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	**100 %**	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	**Kec. Simbang, Kec. Camba, Kec. Maros Baru, Kec. Lau, Kec. Mallawa, Kec. Bantimurung, Kec. Tanralili, Kec. Turikale**	Jumlah jenis prasarana pertanian yang dikembangkan dan mendukung peningkatan produksi	**51 Unit**	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kec. Simbang, Kec. Camba, Kec. Maros Baru, Kec. Lau, Kec. Mallawa, Kec. Bantimurung, Kec. Tanralili, Kec. Turikale	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	51 Unit	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kec. Maros Baru	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kec. Mallawa, Kec. Camba, Kec. Tanralili, Kec. Maros Baru, Kec. Bantimurung, Kec. Lau, Kec. Tompobulu, Kec. Cenrana, Kec. Marusu, Kec. Turikale	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	76 Unit	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Kec. Marusu	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kec. Tanralili, Kec. Simbang, Kec. Tompobulu,	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan	7 Unit	

		Kec. Turikale, Kec. Camba, Kec. Moncong Loe	Dipelihara		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Desa Limapoccoe Kec, Cenrana**	**Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak**	**1 Laporan**	
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	**Desa Limapoccoe Kec, Cenrana**	**Jumlah wilayah yang terkena penyakit wabah penyakit hewan menular dan dapat dikendalikan**	**1 Laporan**	
	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Desa Limapoccoe Kec, Cenrana	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	**Leang-Leang Kec. Bantimurung**	Jumlah peraturan dan persyaratan teknis yang dikeluarkan dalam rangka penerapan kesehatan masyarakat veteriner	1 Laporan	
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Leang-Leang Kec. Bantimurung	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	**Kec. Mallawa, Kec. Marusu, Kec. Mallawa, Kec. Tanralili, Kec. Camba, Kec. Tompobulu**	**Persentase Penurunan Tingkat Kerugian Petani akibat Gagal Panen**		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	**Kec. Mallawa, Kec. Marusu, Kec. Mallawa, Kec. Tanralili, Kec. Camba, Kec. Tompobulu**	**Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan**		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Kec. Mallawa, Kec. Marusu, Kec. Mallawa, Kec. Tanralili	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	5 Paket	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kec. Camba, Kec. Tompobulu	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 Laporan	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Desa Tompobulu Kec. Tompobulu**	**Kontrbusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB**		

	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Desa Tompobulu Kec. Tompobulu**	**Jumlah usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang memiliki Izin**		
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Desa Tompobulu Kec. Tompobulu	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Kegiatan	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Desa Tukamasea Kec. Bantimurung, Kec. Lau, Kec. Mallawa, Kec. Cenrana, Kec. Tanralili dan Kec. Marusu	Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan Pembinaan		
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Desa Tukamasea Kec. Bantimurung, Kec. Lau, Kec. Mallawa, Kec. Cenrana, Kec. Tanralili dan Kec. Marusu	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Pembinaan		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Desa Tukamasea Kec. Bantimurung	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kec. Lau, Kec. Mallawa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Kelembagaan	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kec. Cenrana dan Kec. Bantimurung	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 Unit	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kec. Tanralili dan Kec. Marusu	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance dan akuntabilitas public.*

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah

No	Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi	Kebijakan Daerah
1.	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Berbasis Potensi Ekonomi Wilayah
2.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Hidup Masyarakat secara Inklusif
			Peningkatan Ketersediaan dan kebermanfaatan Infrastruktur dasar wilayah secara Inklusif dan berkelanjutan
			Peningkatan Ketahanan Ekologi, Ketahanan Bencana dan Kelestarian Lingkungan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros
Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Mewujudkan Tata Kelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros
		Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros
2.	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pertanian Daerah Berkelanjutan	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
		Terjaganya Stabilitas Harga Pangan Konsumen	Indeks Harga Pangan Konsumen
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan	Persentase Luas Lahan pertanian berkelanjutan
		Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib. Ada pun rencana program dan kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota, terdiri atas :
   a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah, Sub Kegiatan :
      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :
      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerahpada SKPD

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B) Belanja Langsung Menurut Urusan Program

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

a) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan lainnya
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
3. Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri atas :

a) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Sub

Kegiatan :

1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakatdan Toko Tani Indonesia
3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
4. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Panagan Kabupaten/Kota
5. Pemantauan Stok Pangan
6. Penyediaan Informasi harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
8. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

b) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c) Penentuan Harga Minimun Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimun Pangan Pokok Lokal

d) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan perKapita per Tahun

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan EvaluasiKonsumsi per kapita per Tahun

3) Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri atas:

a) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan PanganKecamatan, Sub Kegiatan:

1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanandan Kerentanan Pangan

b) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota,Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan PanganKabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri atas:

a) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri atas:

a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Sub Kegiatan:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
4. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
5. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

b) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
3. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDH Tanaman
4. Penjaminan Kemujrnian dan Kelestarian SDG Hewan

c) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

d) Pengawasan Obat Hewan ditingkat Pengecer

1. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

e) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak

Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak

f) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain, Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
2. Pengadaan Benih ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri atas:

a) Pengembangan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
2. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
3. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
4. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
5. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
6. Penyusunan Peta Kawasan, lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota

b) Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan:

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan JaringanIrigasi Usaha Tani
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Embung Pertanian

3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan UsahaTani
4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
7. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
9. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan

7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:

a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Penanggulangan Daerah Dampak Wabah Penyakit HewanMenular
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
3. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
4. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan ProdukHewan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan

c) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Pelayanan jasa Laboratorium
2. Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner

d) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tehnis Kesehatan Masyarakat Veteriner, Sub Kegiatan:

1. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
2. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
3. Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
4. Pengawasan Unit Usaha P;roduk Hewan

e) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tehnis Kesejahteraan Hewan

1. Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada unit Usaha

8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian,terdiri atas:

a) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana PertanianKabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Pengendalian Organisme Penganggau Tumbuhan (OPT)Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) TanamanPangan, Hortikultura, dan Perkebunan
3. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan GangguanUsaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
4. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

9) Program Perizinan Usaha Pertanian, terdiri atas :

a) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam

Daerah Kabupaten/Kota

1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

b) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Sub Kegiatan:

1. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
2. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
3. Pengawasan pelaksanaan Izin usaha Rumah Potong Hewan

10) Program Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:

a) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertaniandi Kecamatan dan Desa
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatandan Desa
3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan PrasaranaPenyuluhan Pertanian
4. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
5. Penyediaan dan Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian
6. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

Rencana kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPKP Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Maros

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2025	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	27	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksana Dengan Baik	Kabupaten Maros	100%	22,866,514,600	PAD		100%	22,701,129,500
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	DPKP	100 Persen	23,450,000	PAD		100 Persen	37,500,000
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPKP	5 Dokumen	8,479,000	PAD		5 Dokumen	10,000,000
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPKP	1 Dokumen	2,191,000	PAD		1 Dokumen	15,000,000

3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPKP	1 Dokumen	1,000,000	PAD		1 Dokumen	1,000,000
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPKP	1 Dokumen	1,000,000	PAD		1 Dokumen	1,000,000
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPKP	1 Dokumen	1,046,000	PAD		1 Dokumen	2,000,000
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPKP	4 Laporan	4,318,000	PAD		4 Laporan	5,000,000
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPKP	5 Laporan	5,416,500	PAD		5 Laporan	3,500,000
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	DPKP	100 Persen	19,624,839,100			100 Persen	19,661,329,500
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPKP	208 Orang/bulan	19,413,264,100	DAU		208 Orang/bulan	19,414,329,500
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPKP	12 Dokumen	204,150,000	DAU		12 Dokumen	225,000,000

3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPKP	12 Laporan	915,000	PAD		12 Laporan	7,000,000
3	27	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DPKP	5 Dokumen	3,000,000	PAD		5 Dokumen	5,000,000
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPKP	4 Laporan	2,700,000	PAD		4 Laporan	5,000,000
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPKP	12 Dokumen	810,000	PAD		12 Dokumen	5,000,000
3	27	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPKP	100 Persen	1,800,000	PAD		100 Persen	2,500,000
3	27	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPKP	1 Laporan	1,800,000	PAD		1 Laporan	2,500,000
3	27	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	DPKP	100 Persen	52,500,000	PAD		100 Persen	65,000,000
3	27	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPKP	1 Paket	52,500,000	PAD		1 Paket	65,000,000
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umumm PD yang dilaksanakan	DPKP	11 Jenis	837,240,500			11 Jenis	523,800,000
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPKP	3 Paket	4,580,000	PAD		3 Paket	58,000,000

3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPKP	21 Paket	1,500,000	PAD		21 Paket	20,000,000
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPKP	6 Paket	16,505,500	PAD		6 Paket	25,000,000
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	DPKP	12 Paket	47,980,000	PAD		12 Paket	120,000,000
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPKP	3 Paket	18,125,000	PAD		3 Paket	22,000,000
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPKP	1 Laporan	45,000,000	PAD		1 Laporan	28,800,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPKP	12 Laporan	703,550,000	PAD		12 Laporan	250,000,000
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	DPKP	11 Jenis	542,030,000			11 Jenis	527,000,000
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPKP	1 Unit	356,750,000	PAD		1 Unit	252,000,000
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPKP	1 Unit	185,280,000	PAD		1 Unit	275,000,000
3	27	01	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPKP	11 Jenis	709,330,000			11 Jenis	754,000,000

3	27	1	2.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPKP	12 Laporan	9,000,000	PAD		12 Laporan	9,000,000
3	27	1	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPKP	12 Laporan	700,330,000	PAD		12 Laporan	745,000,000
3	27	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berada Dalam Kondisi Baik	DPKP	24 Unit	1,075,325,000			24 Unit	1,130,000,000
3	27	1	2.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPKP	4 Unit	76,000,000	PAD		4 Unit	80,000,000
3	27	1	2.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPKP	4 Unit	50,575,000	PAD		4 Unit	70,000,000
3	27	1	2.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPKP	5 Unit	28,750,000	PAD		Unit	30,000,000
3	27	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPKP	1 Unit	920,000,000	PAD		Unit	950,000,000

2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Kab. Maros		635,000,000				635,000,000
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Kab. Maros	6 Jenis	635,000,000			6 Jenis	635,000,000
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Maros	1 Unit	600,000,000	PAD/DAK		1 Unit	600,000,000
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Maros	3 Laporan	15,000,000	PAD		3 Laporan	15,000,000
2	09	02	2.01	06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab. Maros	1 Unit	20,000,000	PAD		1 Unit	20,000,000
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kab. Maros		582,021,500				652,784,000
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah jenis informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah yang tersedia	Kab. Maros	10 Jenis	281,887,500			10 Jenis	232,650,000

2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Maros	1 Laporan	15,187,000	PAD		1 Laporan	16,000,000
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kab. Maros	1 Unit	36,673,000	PAD		4 Dokumen	38,000,000
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Maros	250 Keluarga	16,260,000	PAD		250 Keluarga	16,260,000
2	09	03	2.01	10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Maros	1 Unit	22,334,500	PAD		1 unit	25,000,000
2	09	03	2.01	11	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Kab. Maros	2 Dokumen	81,390,000	PAD		2 Dokumen	81,390,000
2	09	03	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	1 Laporan	10,646,000	PAD		1 Laporan	30,000,000
2	09	03	2.01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Maros	4 Laporan	79,112,000	PAD		4 Laporan	5,000,000
2	09	03	2.01	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Maros	1 Dokumen	20,285,000	PAD		1 Dokumen	21,000,000
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				104,000,000				104,000,000
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Maros	1 Dokumen	21,000,000	PAD		1 Dokumen	21,000,000
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Ton	55,000,000	PAD		Ton	55,000,000
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kab. Maros	Ton	28,000,000	PAD		Ton	28,000,000

2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Penentuan Harga Minimun Daerah untuk Pangan Lokal	Kab. Maros	4 Dokumen	25,000,000			4 Dokumen	25,000,000
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Maros	1 Laporan	25,000,000	PAD		1 Laporan	25,000,000
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi pangan perkapita/tahun yang sesuai dengan angka kecukupan gizi	Kab. Maros	1 Dokumen	171,134,000			1 Dokumen	291,134,000
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Maros	1 Dokumen	16,134,000	PAD		1 Dokumen	16,134,000
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Maros	5 Laporan	155,000,000	PAD		5 Laporan	250,000,000
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Maros	1 Laporan	19.920,000	PAD		1 Laporan	25,000,000
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Lokasi rawan pangan yang ditangani	Kab. Maros	100 Persen	38,849,000			100 Persen	38,849,000
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kecamatan yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik	Kab. Maros	14 Kecamatan	25,743,000			14 Kecamatan	25,743,000
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kab. Maros	1 Dokumen	25,743,000	PAD		1 Dokumen	25,743,000

2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani	Kab. Maros	14 Kelurahan	148,020,000			14 Kelurahan	63,106,000
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	1 Laporan	13,106,000	PAD		1 Laporan	13,106,000
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	14 Dokumen	134,914,000	PAD		14 Dokumen	134,914,000
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Lokasi rawan pangan yang ditangani	Kab. Maros	100 Persen	110,324,000			100 Persen	122,574,000
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang memenuhi standar keamanan sesuai standar yang berlaku	Kab. Maros	14 Lokasi	110,324,000			14 Lokasi	122,574,000
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	2 Dokumen	26,858,000	PAD		Dokumen	35,000,000
2	09	05	2.01	07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kab. Maros	1 Dokumen	32,574,000	PAD		Sertifikat	32,574,000
2	09	05	2.01	09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Maros	1 Dokumen	50,892,000	PAD		1 Dokumen	55,000,000

3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kab. Maros	53,97 Ton	2,345,826,500			53,97 Ton	3,598,330,000
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah jenis sarana pertanian yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka peningkatan produksi pertanian	Kab. Maros	6 Jenis	105,827,000			6 Jenis	1,134,330,000
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	14 Kecamatan	4 Laporan	56,063,500	PAD/DAK		4 Laporan	1,070,060,000
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	14 Kecamatan	4 Laporan	22,413,500	PAD		4 Laporan	35,870,000
3	27	02	2.01	07	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	14 Kecamatan	2 Laporan	9,400,000	PAD		2 Laporan	9,400,000
3	27	02	2.01	12	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	14 Kecamatan	2 Laporan	8,550,000	PAD		2 Laporan	9,000,000
3	27	02	2.01	14	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana pascapanen tanaman pangan	14 Kecamatan	2 Laporan	9,400,000	PAD		2 Laporan	10,000,000
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				1,131,784,000				1,140,000,000
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Maros	1 Dokumen	381,784,000	PAD		1 Dokumen	390,000,000
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Maros	1 Dokumen	500,000,000	PAD		1 Dokumen	500,000,000
3	27	02	2.02	04	Penjaminan kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnia	Kab. Maros	1 VUB	125,000,000	PAD		1 VUB	125,000,000
3	27	02	2.02	05	Penjaminan kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Kab. Maros	1 Laporan	125,000,000	PAD		1 Laporan	125,000,000

3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis benih/bibit ternak yang ditingkatkan mutunya	Kab. Maros	5 Jenis	64,199,000			5 Jenis	197,000,000
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Maros	4 Laporan	30,243,000	PAD		4 Laporan	72,000,000
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Kab. Maros	4 Laporan	33,956,000	PAD		4 Laporan	125,000,000
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan ditingkat Pengecer				2,000,000				2,000,000
	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Kab. Maros	1 Laporan	2,000,000	PAD		Laporan	2,000,000
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Benih/Bibit Ternak yang diawasi persediaannya	Kab. Maros	5 Jenis	186,569,500			5 Jenis	125,000,000
3	27	02	2.05	08	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Kab. Maros	25 Laporan	186,569,500	PAD		1 Laporan	125,000,000

3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang disediakan	Kab. Maros	5 Jenis	855,447,000			5 Jenis	1,000,000,000
3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	14 Kecamatan	5 Ton	500,000,000	PAD		5 Ton	500,000,000
3	27	02	2.06	04	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	14 Kecamatan	250 Dosis	355,447,000	PAD		Ton	500,000,000
3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kab. Maros	100 Persen	6,410,917,000			100 Persen	6,855,337,000
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis prasarana pertanian yang dikembangkan dan mendukung peningkatan produksi	Kab. Maros	3 Jenis	478,837,000			3 Jenis	578,837,000
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	14 Kecamatan	14 Laporan	43,837,000	PAD		14 Laporan	43,837,000
3	27	03	2.01	05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	14 Kecamatan	5 Ha	150,000,000	PAD		1 Dokumen	150,000,000
3	27	03	2.01	06	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	14 Kecamatan	2 Unit	250.000,000	PAD		2 Unit	250.000,000
3	27	03	2.01	13	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab. Maros	2 Unit	100,000,000	PAD		1 Dokumen	100,000,000
3	27	03	2.01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Kab. Maros	1 Dokumen	35,000,000	PAD		1 Dokumen	35,000,000

3	27	03	2.01	16	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kab. Maros	1 Dokumen	150,000,000	PAD		1 Dokumen	250,000,000
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan mendukung peningkatan produksi	Kab. Maros	3 Jenis	5,932,080,000			3 Jenis	6,276,500,000
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Kab. Maros	6 Unit	756,000,000	PAD/DAK		6 Unit	756,000,000
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Maros	3 Unit	378,000,000	PAD/DAK		3 Unit	378,000,000
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Maros	10 Unit	789,800,000	PAD/DAK		10 Unit	1,000,000,000
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Maros	7 Unit	900,000,000	PAD/DAK		7 Unit	950,000,000
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Kecamatan	2 Unit	480,000,000	PAD/DAK		2 Unit	480,000,000
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Kecamatan	4 Unit	33,000,000	PAD		4 Unit	35,000,000
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Kecamatan	5 Unit	621,400,000	PAD/DAK		5 Unit	621,500,000

3	27	03	2.02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	6 Kecamatan	6 Unit	1,473,880,000	PAD		6 Unit	1,556,000,000
3	27	03	2.02	15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Kecamatan	2 Unit	500,000,000	PAD		2 Unit	500,000,000
3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak	Kab. Maros	100 Persen	993,468,400	PAD		100 Persen	2,207,007,400
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang terkena penyakit wabah penyakit hewan menular dan dapat dikendalikan	Kab. Maros	14 Lokasi	742,657,400	PAD		Lokasi	743,657,400
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kab. Maros	2 Laporan	471,457,400	PAD		2 Laporan	471,457,400
3	27	04	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah Kader Zoonosis	Kab. Maros	50 Orang	45,000,000	PAD		50 Orang	45,000,000
3	27	04	2.01	05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Kab. Maros	14 Wilayah	9,000,000	PAD		14 Wilayah	10,000,000
3	27	04	2.01	08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Maros	1 Laporan	217,200,000	PAD		1 Laporan	217,200,000
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Lalu Lintas Hewan yang diawasi	Kab. Maros	14 Lokasi	45,390,000			14 Lokasi	1,000,000,000

3	27	04	2.02	02	Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Maros	1 Laporan	45,390,000	PAD		1 Laporan	1,000,000,000
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang diberikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Maros	5 Layanan	55,000,000			5 Layanan	55,000,000
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Puskeswan	1 Laporan	7,000,000	PAD		1 Laporan	7,000,000
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Puskeswan	1 Laporan	48,000,000	PAD		1 Laporan	48,000,000
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tehnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah peraturan dan persyaratan teknis yang dikeluarkan dalam rangka penerapan kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Maros	1 Dokumen	144,421,000			1 Dokumen	402,350,000
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Maros	1 Laporan	102,790,000	PAD		1 Laporan	110,000,000
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Maros	1 Dokumen	5,350,000	PAD		1 Dokumen	5,350,000
3	27	04	2.04	04	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kab. Maros	10 Orang	232.188.500	PAD		10 Orang	250,000,000
3	27	04	2.04	10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Kab. Maros	3 Unit	36,281,000	PAD		3 Unit	37,000,000

3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tehnis Kesejahteraan Hewan				6,000,000				6,000,000
3	27	04	2.05	03	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kab. Maros	1 Laporan	6,000,000	PAD		1 Laporan	6,000,000
3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan Tingkat kerugian Petani akibat gagal panen	Kab. Maros	100 Persen	1,210,293,500			100 Persen	1,279,032,000
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Arel Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan	Kab. Maros	204 Ha	1,210,293,500			204 Ha	1,279,032,000
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Penganggau Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Maros	100 Ha	683,543,500	PAD		100 Ha	750,000,000
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kab. Maros	100 Ha	147,718,000	PAD		100 Ha	150,000,000
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Maros	50 Ha	179,032,000	PAD		50 Ha	179,032,000
3	27	05	2.01	04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Kab. Maros	1 Laporan	200,000,000	PAD		1 Laporan	200,000,000

3	**27**	**06**			**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB**	Kab. Maros	1,00 Persen	**156,737,200**	PAD		1,00 Persen	**158,000,000**
3	27	06	2		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Kab. Maros	12 Dokumen	25,000,000	PAD		12 Dokumen	25,000,000
3	27	06	2	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Kab. Maros	1 Laporan	25,000,000	PAD		1 Laporan	25,000,000
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang memiliki Izin	Kab. Maros	7 Kelompok Usaha	131,737,200			7 Kelompok Usaha	133,000,000
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Maros	1 dokumen	19,904,500	PAD		1 dokumen	20,000,000
3	27	06	2.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Kab. Maros	1 Laporan	34,318,500	PAD		1 Laporan	15,000,000
3	27	06	2.02	05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Kab. Maros	1 Laporan	98,000,000	PAD		1 Laporan	98,000,000
3	**27**	**07**			**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan pembinaan**	Kab. Maros	**13 Persen**	**1,915,558,000**	PAD		**13 Persen**	**1,015,558,000**

3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan	Kab. Maros	253 Kelompok Tani	2,415,558,000	APBD		253 Kelompok Tani	1,015,558,000
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Kecamatan	14 unit	514,124,500	PAD		14 unit	14,124,500
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab.Maros	14 unit	446,818,500	PAD		unit	446,818,500
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	14 Kecamatan	10 unit	253,198,000	PAD		10 unit	253,198,000
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	14 Kecamatan	5 unit	250,000,000	PAD		5 unit	250,000,000
3	27	07	2.01	06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Maros	120 Orang	591.219,000	PAD		5 unit	91.219,000
3	27	07	2.01	08	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Kab. Maros	2 Unit	451,417,000	PAD		2 Unit	51,417,000
JUMLAH									**37,785,995,500**				**37,785,995,500**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Program Prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Rencana Program prioritas beserta Indikator keluaran program sebagaiman tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Rencana Kerja ini disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Maros dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan

Sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, maka untuk tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros

merancang program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari :

A) Belanja Langsung Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Setiap OPD

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B) Belanja Langsung Menurut Urusan Program

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

a) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Infrastruktur pendukung Kemandirian Pangan lainnya
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
3. Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdiri atas :

a) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
4. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Panagan Kabupaten/Kota
5. Pemantauan Stok Pangan
6. Penyediaan Informasi harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, pasokan dan Harga

Pangan Pokok Strategis

8. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

b) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

c) Penentuan Harga Minimun Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimun Pangan Pokok Lokal

d) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengnekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per kapita per Tahun

3) Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri atas:

a) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Sub Kegiatan:

1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

b) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4) Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri atas:

a) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
3. Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

5) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri atas:

a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Sub Kegiatan:

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
2. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
4. Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
5. Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

b) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
2. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

3. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDH Tanaman
4. Penjaminan Kemujrnian dan Kelestarian SDG Hewan

c) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
2. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

d) Pengawasan Obat Hewan ditingkat Pengecer

1. Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

e) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:

1. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak

f) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain, Sub Kegiatan:

1. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
2. Pengadaan Benih ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri atas:

a) Pengembangan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

2. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
3. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan
4. Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan
5. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
6. Penyusunan Peta Kawasan, lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota

b) Pembangunan Prasarana Pertanian, Sub Kegiatan:

1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air
6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
7. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
9. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan

7) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri atas:

a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
   1. Penanggulangan Daerah Dampak Wabah Penyakit Hewan Menular
   2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
   3. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
   4. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
   1. Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
c) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
   1. Penyediaan Pelayanan jasa Laboratorium
   2. Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner
d) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tehnis Kesehatan Masyarakat Veteriner, Sub Kegiatan:
   1. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
   2. Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
   3. Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
   4. Pengawasan Unit Usaha P;roduk Hewan

e) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tehnis Kesejahteraan Hewan

1. Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada unit Usaha

8) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, terdiri atas:
   a) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan:
      1. Pengendalian Organisme Penganggau Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
      2. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
      3. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
      4. Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

9) Program Perizinan Usaha Pertanian, terdiri atas :
   a) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
   b) Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Sub Kegiatan:
      1. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
      2. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan
      3. Pengawasan pelaksanaan Izin usaha Rumah Potong Hewan

10) Program Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:
   a) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Sub Kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
4. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
5. Penyediaan dan Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian
6. Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani

Rencana kerja dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja beserta pendanaannya Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	27	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksana Dengan Baik	Kabupaten Maros	100%	22,866,514,600	PAD
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	DPKP	100 Persen	23,450,000	PAD
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPKP	5 Dokumen	8,479,000	PAD
3	27	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPKP	1 Dokumen	2,191,000	PAD

3	27	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPKP	1 Dokumen	1,000,000	PAD
3	27	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DPKP	1 Dokumen	1,000,000	PAD
3	27	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DPKP	1 Dokumen	1,046,000	PAD
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPKP	4 Laporan	4,318,000	PAD
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPKP	5 Laporan	5,416,500	PAD
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	DPKP	100 Persen	19,624,839,100	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DPKP	208 Orang/bulan	19,413,264,100	DAU
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPKP	12 Dokumen	204,150,000	DAU

3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPKP	12 Laporan	915,000	PAD
3	27	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DPKP	5 Dokumen	3,000,000	PAD
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPKP	4 Laporan	2,700,000	PAD
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPKP	12 Dokumen	810,000	PAD
3	27	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPKP	100 Persen	1,800,000	
3	27	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPKP	1 Laporan	1,800,000	PAD
3	27	01	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	DPKP	100 Persen	52,500,000	
3	27	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPKP	1 Paket	52,500,000	PAD
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umumm PD yang dilaksanakan	DPKP	11 Jenis	837,240,500	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DPKP	3 Paket	4,580,000	PAD

3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DPKP	21 Paket	1,500,000	PAD
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DPKP	6 Paket	16,505,500	PAD
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	DPKP	12 Paket	47,980,000	PAD
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DPKP	3 Paket	18,125,000	PAD
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPKP	1 Laporan	45,000,000	PAD
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPKP	12 Laporan	703,550,000	PAD
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	DPKP	11 Jenis	542,030,000	
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DPKP	1 Unit	356,750,000	PAD
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DPKP	1 Unit	185,280,000	PAD
3	27	01	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPKP	11 Jenis	709,330,000	

3	27	1	2.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPKP	12 Laporan	9,000,000	PAD
3	27	1	2.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DPKP	12 Laporan	700,330,000	PAD
3	27	01	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berada Dalam Kondisi Baik	DPKP	24 Unit	1,075,325,000	
3	27	1	2.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	DPKP	4 Unit	76,000,000	PAD
3	27	1	2.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DPKP	4 Unit	50,575,000	PAD
3	27	1	2.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DPKP	5 Unit	28,750,000	PAD
3	27	1	2.1	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DPKP	1 Unit	920,000,000	PAD

2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Kab. Maros		635,000,000	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia	Kab. Maros	6 Jenis	635,000,000	
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Kab. Maros	1 Unit	600,000,000	PAD/DAK
2	09	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Kab. Maros	3 Laporan	15,000,000	PAD
2	09	02	2.01	06	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	Kab. Maros	1 Unit	20,000,000	PAD
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kab. Maros		582,021,500	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah jenis informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah yang tersedia	Kab. Maros	10 Jenis	281,887,500	

2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Maros	1 Laporan	15,187,000	PAD
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Kab. Maros	1 Unit	36,673,000	PAD
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kab. Maros	250 Keluarga	16,260,000	PAD
2	09	03	2.01	10	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Kab. Maros	1 Unit	22,334,500	PAD
2	09	03	2.01	11	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Kab. Maros	2 Dokumen	81,390,000	PAD
2	09	03	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	1 Laporan	10,646,000	PAD
2	09	03	2.01	14	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Maros	4 Laporan	79,112,000	PAD
2	09	03	2.01	16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Maros	1 Dokumen	20,285,000	PAD
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				104,000,000	
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Kab. Maros	1 Dokumen	21,000,000	PAD
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Ton	55,000,000	PAD
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Kab. Maros	Ton	28,000,000	PAD

2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Penentuan Harga Minimun Daerah untuk Pangan Lokal	Kab. Maros	4 Dokumen	25,000,000	
2	09	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Kab. Maros	1 Laporan	25,000,000	PAD
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi pangan perkapita/tahun yang sesuai dengan angka kecukupan gizi	Kab. Maros	1 Dokumen	171,134,000	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Maros	1 Dokumen	16,134,000	PAD
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Maros	5 Laporan	155,000,000	PAD
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Kab. Maros	1 Laporan	19.920,000	PAD
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Lokasi rawan pangan yang ditangani	Kab. Maros	100 Persen	38,849,000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kecamatan yang memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik	Kab. Maros	14 Kecamatan	25,743,000	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kab. Maros	1 Dokumen	25,743,000	PAD

2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan rawan pangan yang tertangani	Kab. Maros	14 Kelurahan	55,000,000	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros	1 Laporan	13,106,000	PAD
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	14 Dokumen	134,914,000	PAD
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Lokasi rawan pangan yang ditangani	Kab. Maros	100 Persen	110,324,000	
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang memenuhi standar keamanan sesuai standar yang berlaku	Kab. Maros	14 Lokasi	110,324,000	
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	2 Dokumen	26,858,000	PAD
2	09	05	2.01	07	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kab. Maros	1 Dokumen	32,574,000	PAD
2	09	05	2.01	09	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Maros	1 Dokumen	50,892,000	PAD

3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kab. Maros	53,97 Ton	2,345,826,500	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah jenis sarana pertanian yang digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam rangka peningkatan produksi pertanian	Kab. Maros	6 Jenis	105,827,000	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	14 Kecamatan	4 Laporan	1,070,060,000	PAD/DAK
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	14 Kecamatan	4 Laporan	35,870,000	PAD
3	27	02	2.01	07	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	14 Kecamatan	2 Laporan	9,400,000	PAD
3	27	02	2.01	12	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	14 Kecamatan	2 Laporan	8,550,000	PAD
3	27	02	2.01	14	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana pascapanen tanaman pangan	14 Kecamatan	2 Laporan	9,400,000	PAD
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				1,131,784,000	
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Maros	1 Dokumen	381,784,000	PAD
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Maros	1 Dokumen	500,000,000	PAD
3	27	02	2.02	04	Penjaminan kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnia	Kab. Maros	1 VUB	125,000,000	PAD
3	27	02	2.02	05	Penjaminan kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Kab. Maros	1 Laporan	125,000,000	PAD

3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis benih/bibit ternak yang ditingkatkan mutunya	Kab. Maros	5 Jenis	64,199,000	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Maros	4 Laporan	30,243,000	PAD
3	27	02	2.03	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Kab. Maros	4 Laporan	33,956,000	PAD
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan ditingkat Pengecer				2,000,000	
	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Kab. Maros	Laporan	2,000,000	PAD
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Benih/Bibit Ternak yang diawasi persediaannya	Kab. Maros	5 Jenis	186,569,500	
3	27	02	2.05	08	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Kab. Maros	25 Laporan	186,569,500	PAD
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang disediakan	Kab. Maros	5 Jenis	855,447,000	PAD

3	27	02	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	14 Kecamatan	5 Ton	500,000,000	PAD
3	27	02	2.06	04	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	14 Kecamatan	250 Dosis	355,447,000	PAD
3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kab. Maros	100 Persen	6,410,917,000	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis prasarana pertanian yang dikembangkan dan mendukung peningkatan produksi	Kab. Maros	3 Jenis	478,837,000	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	14 Kecamatan	14 Laporan	43,837,000	PAD
3	27	03	2.01	05	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	14 Kecamatan	5 Ha	150,000,000	PAD
3	27	03	2.01	06	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	14 Kecamatan	2 Unit	250.000,000	PAD
3	27	03	2.01	13	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab. Maros	2 Unit	100,000,000	PAD
3	27	03	2.01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Kab. Maros	1 Dokumen	35,000,000	PAD
3	27	03	2.01	16	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kab. Maros	1 Dokumen	150,000,000	PAD

3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun dan mendukung peningkatan produksi	Kab. Maros	3 Jenis	5,932,080,000	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Kab. Maros	6 Unit	756,000,000	PAD/DAK
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Maros	3 Unit	378,000,000	PAD/DAK
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Maros	10 Unit	789,800,000	PAD/DAK
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Maros	7 Unit	900,000,000	PAD/DAK
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Kecamatan	2 Unit	480,000,000	PAD/DAK
3	27	03	2.02	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Kecamatan	4 Unit	33,000,000	PAD
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Kecamatan	5 Unit	621,400,000	PAD/DAK

3	27	03	2.02	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	6 Kecamatan	6 Unit	1,473,880,000	PAD
3	27	03	2.02	15	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2 Kecamatan	2 Unit	500,000,000	PAD
3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pencegahan Penyakit Hewan/Ternak	Kab. Maros	100 Persen	993,468,400	PAD
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang terkena penyakit wabah penyakit hewan menular dan dapat dikendalikan	Kab. Maros	14 Lokasi	742,657,400	PAD
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kab. Maros	2 Laporan	471,457,400	PAD
3	27	04	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah Kader Zoonosis	Kab. Maros	50 Orang	45,000,000	PAD
3	27	04	2.01	05	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Kab. Maros	14 Wilayah	9,000,000	PAD
3	27	04	2.01	08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kab. Maros	1 Laporan	217,200,000	PAD
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Lalu Lintas Hewan yang diawasi	Kab. Maros	14 Lokasi	45,390,000	

3	27	04	2.02	02	Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Maros	1 Laporan	45,390,000	PAD
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang diberikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Maros	5 Layanan	55,000,000	
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Puskeswan	1 Laporan	7,000,000	PAD
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Puskeswan	1 Laporan	48,000,000	PAD
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tehnis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah peraturan dan persyaratan teknis yang dikeluarkan dalam rangka penerapan kesehatan masyarakat veteriner	Kab. Maros	1 Dokumen	144,421,000	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Maros	1 Laporan	102,790,000	PAD
3	27	04	2.04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Maros	1 Dokumen	5,350,000	PAD
3	27	04	2.04	04	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kab. Maros	10 Orang	232.188.500	PAD
3	27	04	2.04	10	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Kab. Maros	3 Unit	36,281,000	PAD

3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Tehnis Kesejahteraan Hewan				6,000,000	
3	27	04	2.05	03	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kab. Maros	1 Laporan	6,000,000	PAD
3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penurunan Tingkat kerugian Petani akibat gagal panen	Kab. Maros	100 Persen	1,210,293,500	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Arel Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan	Kab. Maros	204 Ha	1,210,293,500	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Penganggau Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Maros	100 Ha	683,543,500	PAD
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kab. Maros	100 Ha	147,718,000	PAD
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Maros	50 Ha	179,032,000	PAD
3	27	05	2.01	04	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Kab. Maros	1 Laporan	200,000,000	PAD

3	**27**	**06**			**Program Perizinan Usaha Pertanian**	**Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB**	Kab. Maros	1,00 Persen	**156,737,200**	PAD
3	27	06	2		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Kab. Maros	12 Dokumen	25,000,000	PAD
3	27	06	2	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Kab. Maros	1 Laporan	25,000,000	PAD
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang memiliki Izin	Kab. Maros	7 Kelompok Usaha	131,737,200	
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kab. Maros	1 dokumen	19,904,500	PAD
3	27	06	2.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Kab. Maros	1 Laporan	34,318,500	PAD
3	27	06	2.02	05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Kab. Maros	1 Laporan	98,000,000	PAD
3	**27**	**07**			**Program Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan pembinaan**	Kab. Maros	**13 Persen**	**1,915,558,000**	PAD

3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pembinaan	Kab. Maros	253 Kelompok Tani	2,415,558,000	APBD
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	14 Kecamatan	14 unit	514,124,500	PAD
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab.Maros	14 unit	446,818,500	PAD
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	14 Kecamatan	10 unit	253,198,000	PAD
3	27	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	14 Kecamatan	5 unit	250,000,000	PAD
3	27	07	2.01	06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Maros	120 Orang	591.219,000	PAD
3	27	07	2.01	08	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Kab. Maros	2 Unit	451,417,000	PAD
JUMLAH									**37,785,995,500**	

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2024.

Rencana kerja ini dijadikan sebagai pedoman rencana operasional oleh bidang-bidang dan sekretariat, hal tersebut tetap memerlukan integrasi, koordinasi dan sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya pada masing-masing bidang dan sekretariat sehingga dapat melaksanakan semua kegiatan sesuai target waktu dan volume yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 tersebut di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Maros tahun 2024 Merupakan Penjabaran Tahun Kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Maros Tahun 2021 - 2026 yang memuat

kerangka kerja Tahunan Pemerintah Kota Maros beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) dan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran sementara SKPD Tahun 2024.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah - kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar bidang dan sekretariat
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif, upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan
3. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 masih belum sempurna sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 karena belum adanya kesepahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja tersebut
4. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan OPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN

5. Rencana Kerja (Renja) OPD di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya seperti RKP, RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD.
6. Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implemnentasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Diperlukan peningkatan kapasitas perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan formal, bimbingan teknis serta seminar-seminar tentang perencanaan pembangunan;

b. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam musrenbang;
c. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
d. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
e. Menjadikan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun-tahun berikutnya.

Maros, 31 Juni 2024

Kepala Dinas Pertanian Dan
Ketahanan Pangan Kab. Maros

FADLI, S.STP.,M.Si
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 19800827 199912 1 001

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

KECAMATAN LAU



KATA PENGANTAR.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selain itu Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggungjawab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi **kecamatan** yang sebelumnya merupakan **perangkat wilayah** dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi **perangkat daerah** dalam kerangka asas desentralisasi. Camat juga berperan sebagai kepalawilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintahlainnya diwilayah kecamatan.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untu kmendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosiokultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik,ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.Dalam hal ini, fungsi utama camat

selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, system administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan sebagai cirri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota.

Maros, 13 Juli 2024

C A M A T

MULYADI, S.STP

Pangkat : Pembina TK I, IV/b

Nip. 19770228 199612 1 001 0

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR. 1

DAFTAR ISI 4

BAB I. PENDAHULUAN..... 5

I.1. Latar Belakang 5

I.2. Landasan Hukum 6

I.3. Maksud Dan Tujuan 10

1.4. Sistematika Penulisan 11

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..... 12

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lau Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lau. 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lau 38

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lau 40

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..... 42

2. 5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.... 67

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 71

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 71

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Lau 72

3.3 . Program Dan Kegiatan 73

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 103

BAB V P E N U T U P..... 128

5.1 Saran dan Kesimpulan..... 128

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Renja Kecamatan Lau 128

5.1. Rencana Tindak Lanjut..... 129

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana kerja (RENJA) Kecamatan Lau adalah dokumen perencanaan Kecamatan Lau untuk periode tahun 2024 merupakan implementasi dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lau Tahun 2021 – 2026 yang memuat a) program dan kegiatan, b) lokasi kegiatan, c) indicator kinerja, d) kelompok sasaran dan e) pagu indikatif dan prakiraan maju.

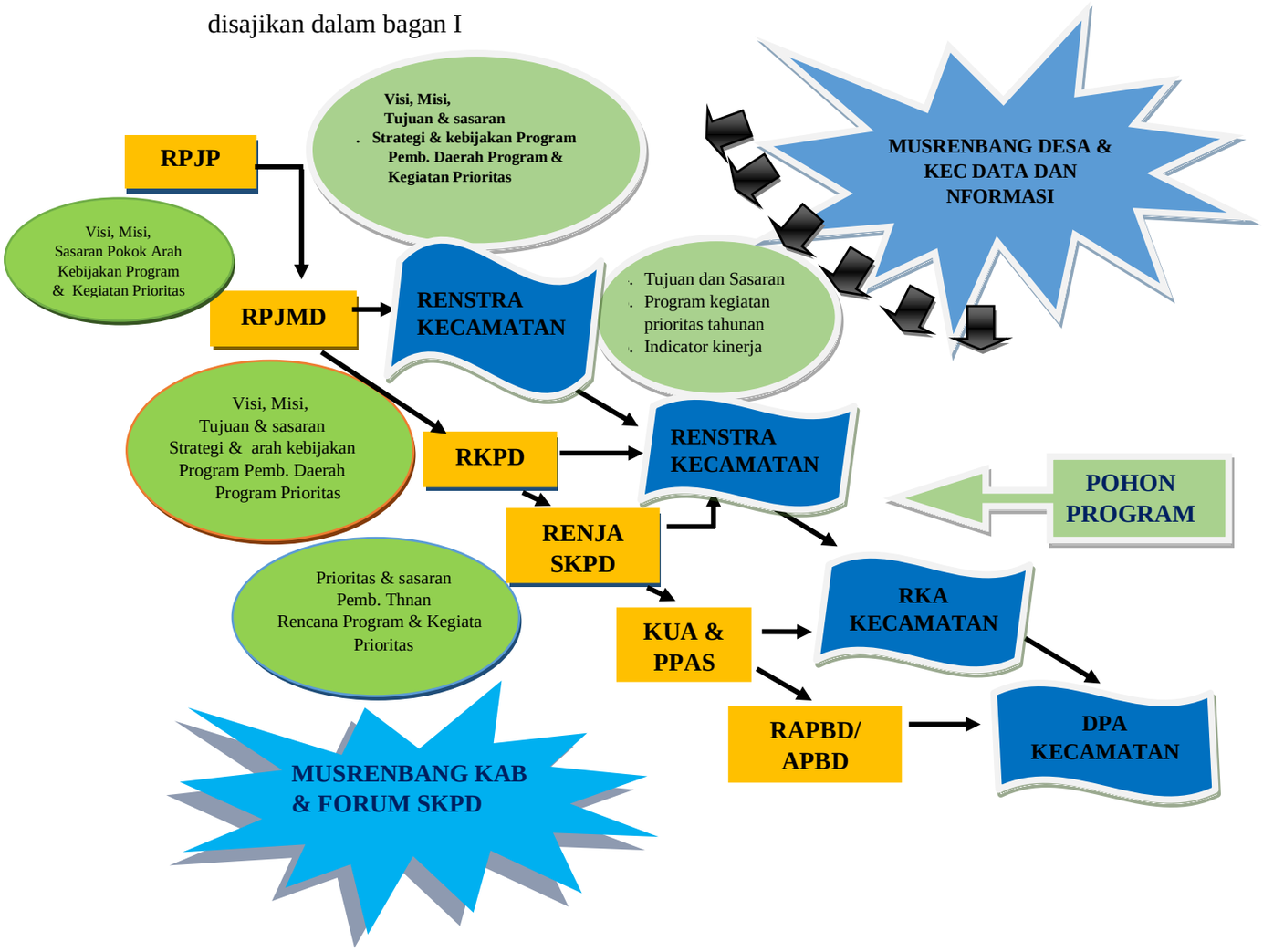
Penyusunan Renja Kecamatan Lau merupakan serangkaian proses yang dilakukan oleh Kecamatan Lau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga mendapatkan satu Dokumen Perencanaan yaitu Dokumen Renja. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Lau mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Renja Kecamatan Lau disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Lau, yang meliputi pembentukan Tim Penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja tim dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2) Penyusunan Rancangan Renja, yang terdiri dari perumusan rancangan Renja dan penyajian rancangan Renja.
3) Pelaksanaan Forum SKPD.
4) Penetapan Renja.

Dokumen Renja Kecamatan Lau Tahun 2024 disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2024 dan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Lau Tahun 2021 – 2026

Keterkaitan antara Renja Kecamatan Lau dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan I



I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lau Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia

Nomor 5234);

5. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
30. Peraturan Bupati Maros Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 45).
31. Peraturan Bupati Maros Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 tanggal 6 Juli 2023.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lau Tahun 2024 adalahsebagai berikut :

1. Untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Lau dalam kurun waktu satu tahun.
2. Sebagai dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Lau, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun oleh Pihak Swasta, organisasi kemasyarakatan dan individu yang memiliki kepentingan ataupun kepedulian terhadap perkembangan Kecamatan Lau.
3. Sebagai gambaran dari pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Lau yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Lau Tahun 2021– 2026
4. Sebagai sarana untuk sinkronisasi dari seluruh perencanaan di wilayah Kecamatan Lau baik yang berasal dari Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) maupun yang berasal dari Instansi Pemerintah (RKPD Provinsi/RKPD Kabupaten).

Tujuan disusunnya Dokumen Renja Kecamatan Lau Tahun 2024 adalah:

1. Sebagai Acuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Untuk integrasi, singkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Lau;
3. Membuat acuan perencanaan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lau , disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belalakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud Dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lau

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lau

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lau

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Lau

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

5.1 Saran dan Kesimpulan

5.2 Kaidah Pelaksanaan Renja Kecamatan Lau

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Lau Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Lau.

Rencana Kerja Kecamatan Lau merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Lau. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Lau ini menyajikan pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Lau selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Lau 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Lau tahun 2023 dan realisasi Renstra Kecamatan Lau mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kecamatan Lau, antara lain :

a. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran sesuai yang direncanakan

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan pada Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi,Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kelurahan

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Kecamatan Lau pada tahun 2023 dapat merealisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Rincian dapat dilihat pada Tabel TC. 2.1 (terlampir)

c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Program dan kegiatan pada umumnya terealisasi sesuai dengan target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adanya program/kegiatan yang tidak terealisasi;

Faktor penyebab adanya program/kegiatan yang tidak terealisasi 100% khususnya pada tahun 2023 adalah Belanja Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah dimana kegiatan tersebut tidak tercapai karena Terkendala Proses E katalog , sementara Program dan Kegiatan lainnya terealisasi sesuai tujuan dan sasaran program melalui koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh pelaksana kegiatan dan seluruh stakeholder.

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Lau;

Implikasi atau dampak yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah merupakan upaya pemerintah Kecamatan dalam Meningkatkan Peran dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Lau, selain itu juga berdampak positif pada Peningkatan kapasitas ASN Kecamatan Lau dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana strategis Kecamatan Lau.

f. **Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab diatas;**

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan / koordinasi.

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024
KECAMATAN LAU

Nama OPD : Kecamatan Lau

NO	URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (KEPMEN 050 TAHUN 2022)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3) 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (n-2) 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2022	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN (N-2) 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3		5	6	7	8=7/6	11	12	13 =11/12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang pelakasanaan Pemerintah daerah	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	100%

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	jumlah penyusunan dokumen perubhana RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	jumlah penyusunan dokumen perubhana DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**71 Dokumen**	57 Dokumen	57 Dokumen	57 Dokumen	100%	57 Dokumen	57 Dokumen	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	95%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Atas Hasil Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan PD	26 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	JUmlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akutansi PD	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-	-	12 Dokumen	100%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	JUmlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Tiwulan/Semesteran PD	18 Dokumen	18 Dokumen	-	-	-	-	18 Dokumen	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	**312 Orang**	**312 Orang**	**312 Orang**	**312 Orang**	-	**312 Orang**	**312 Orang**	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Yang Dibeli	300 Set	Set		-	-	25 Stel	-	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Dokumen		-	-	12 Dokumen	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**11 Jenis**	**11 Jenis**	**11 Jenis**	**11 Jenis**	100%	**11 Jenis**	**11 Jenis**	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Jenis	17 Jenis	17 Jenis	17 Jenis	100%	17 Jenis	17 Jenis	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	100%	40 Jenis	40 Jenis	100%

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makan minum yang tersedia	600 Orang	600 Orang	600 Orang	600 Orang	100%	600 Orang	600 Orang	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Rapat - Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	150 Kali	150 Kali	150 Kali	150 Kali	100%	150 Kali	150 Kali	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	**4 unit**	-	-	-	-	-	4 Unit	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	4 Unit	-	-	-	-	-	4 Unit	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	100%	**4 Jenis**	**4 Jenis**	100%
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terdistribusi	1200 surat	1200 surat	1000 Surat	1000 Surat	100%	1000 Surat	1000 Surat	100%
	penyediaan jasa komuniaski sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komuniskasi yang tersedia	12 Bulan	-	1 Jasa	1 Jasa	100%	1 Jasa	1 Jasa	100%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	-	-	-	-	4 Jenis	4 Jenis	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Juimlah penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	4 Jenis	4 Jasa	4 Jasa	4 Jasa	100%	4 Jasa	4 Jasa	100%

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	**11 Jenis**	**11 Jenis**	**11 Jenis**	**11 Jenis**	100%	**11 Jenis**	**11 Jenis**	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	10 Jenis	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	100 persen	10 persen	100	100%		100%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah masyarakat dalam kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	100%	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	100%	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	100%

	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan pada tingkat Kecamatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	100%	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	100%
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Layanan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**3 Layanan**	**3 Layanan**	**3 Layanan**	**3 Layanan**	100%	**3 Layanan**	**3 Layanan**	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 Layanan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	13 Layanan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi aktif masyarakat di Kecamatan dalam Kegiatan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	100%	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	100%
	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 Kegiatan	2 kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	100%	7 Kelurahan	7 Kelurahan	100%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	100%	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	100%
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	**100%**	7 Kelurahan	7 Kelurahan	**100%**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**100%**	**2 kegiatan**	**2 kegiatan**	**100%**

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdyaan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	100%	7 Kelurahan	7 Kelurahan	100%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	7 Kelurahan	-	-	-	100%	7 Kelurahan	7 Kelurahan	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan	100	Persen	100	100	100	100	100	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**100%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**100**	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	85%	**4 kegiatan**	**4 kegiatan**	85%

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	40%	7 Kegiatan	7 Kegiatan	40%
	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	85%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	85%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen laporan Atas Hasil Pelaksanaan Tugas FORKOPIMCAM	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		Nilai SAKIP										37,39410895		37		748	KEC LAU
	Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota	**Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100**	**6.534.369.767**		**2.443.469.350**	**#VALUE!**	**37,39410895**	**#VALUE!**	**37**	**#VALUE!**	**748**	KEC LAU
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**950.000**		**949.500**	**0**	**99,94736842**	**0**	**99,94736842**	**0**	**1.999**	KEC LAU
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	0	12	950.000		949.500	0	99,94736842	0	99,94736842	0	1.999	KEC LAU
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Administrasi keuaangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**6.125.644.667**		**2.381.308.090**	**0**	**38,87440783**	**0**	**38,87440783**	**0**	**777**	KEC LAU

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12			13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	0	1.148	6.079.224.667		2.368.648.090	0	38,96299643		0	38,96299643	0	779	KEC LAU
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	0	0	0	11	46.420.000		12.660.000	0	27,27272727		0	27,27272727	0	545	KEC LAU
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**4**	**0**	**4**	**0**	**4**	**95.875.100**		**11.871.760**	**0**	**12,38252685**		**4**	**12,38252685**	**80**	**248**	**KEC LAU**
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	5	12.212.100		1.998.300	0	16,36327904		0	16,36327904	0	327	KEC LAU
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	2	8.098.000		2.331.500	0	28,79105952		0	28,79105952	0	576	KEC LAU
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	0	0	0	12	12.000.000		0	0	0		0	0	0	0	KEC LAU

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	0	0	12	63.565.000		7.541.960	0	11,86495713	0	11,86495713	0	237	KEC LAU
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**161.900.000**		**49.340.000**	**0**	**30,47560222**	**2**	**30,47560222**	**40**	**610**	**KEC LAU**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	12	10.650.000		2.800.000	0	26,29107981	0	26,29107981	0	526	KEC LAU
	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	12	151.250.000		46.540.000	0	30,77024793	0	30,77024793	0	615	KEC LAU
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**2**	**0**	**2**	**0**	**2**	**150.000.000**		**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**40**	**0**	**KEC LAU**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	0	0	0	1	30.000.000		0	0	0	0	0	0	0	KEC LAU
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	0	0	2	120.000.000		0	0	0	0	0	0	0	KEC LAU
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di kecamatan		**IKM PATEN**															KEC LAU
	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100**	**10.793.142.500**	**37,25**	**3.719.668.500**	**100**	**1.679.200.000**		**316.500.000**	**#VALUE!**	**18,84826108**	**#VALUE!**	**3.719.668.519**	**#VALUE!**	**74.393.370.377**	KEC LAU
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan**	**4**	**8.843.842.500**	**4**	**1.768.768.500**	**4**	**360.000.000**		**18.000.000**	**0**	**5**	**4**	1768768505	80	35.375.370.100	KEC LAU

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	2.210.960.625	3	442.192.125	1	90.000.000		3.000.000	0	3,333333333	3	442192128,3	60	8.843.842.567	KEC LAU
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	2.210.960.625	3	442.192.125	1	90.000.000		9.000.000	0	10	3	44219235	60	8.843.842.700	KEC LAU
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	2.210.960.625	3	442.192.125	1	90.000.000		3.000.000	0	3,333333333	3	4421921 28,3	60	8.843.842.567	KEC LAU
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	2.210.960.625	3	442.192.125	1	90.000.000		3.000.000	0	3,333333333	3	4421921 28,3	60	8.843.842.567	KEC LAU
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat**	**Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan**	**2**	**1.949.300.000**	**2**	**1.949.300.000**	**2**	**1.316.600.000**		**298.500.000**	**0**	**22,67203403**	**2**	**1949300023**	**40**	**38.986.000.453**	**KEC LAU**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12			13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
	yang ada di kecamatan	**daerah yang ada di kecamatan**																	
	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5	1.162.200.000	3	1.162.200.000	1	2.600.000		0	0	0		3	1162200000	60	23.244.000.000	KEC LAU
	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan	Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah ekcamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60	787.100.000	36	787.100.000	12	1.314.000.000		298.500.000	0	22,71689498		36	787100022,7	720	15.742.000.454	KEC LAU
	Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat	**Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat**	**Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat**	**1**	**0**	**0**	**1.600.000**	**1**	**2.600.000**		**0**	**0**	**0**		**0**	**1600000**	**0**	**32.000.000**	**KEC LAU**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12			13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	0	1	1.600.000	1	2.600.000		0	0	0		1	1600000	20	32.000.000	KEC LAU
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan		**IKM Desa/Kelurahan**																KEC LAU
	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	**100**	**0**	**23,75**	**0**	**100**	**2.640.000**		**0**	**#VALUE!**	**0**		**#VALUE!**	**0**	**#VALUE!**	**0**	KEC LAU

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa	**Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa**	**Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2.640.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	KEC LAU
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	0	0	0	2	2.640.000		0	0	0	0	0	0	0	KEC LAU
	Meningkatnya peran aktif perempuan di kecamatan dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi		**Persentase perempuan yang terlbat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi di kecamatan**															KEC LAU
	Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan	**Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100**	**0**	**44,25**	**263.997.000**	**100**	**841.825.000**			**#VALUE!**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	KEC LAU

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12			13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%	15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**0**	**0**	**0**	**78.925.000**	**350**	**41.825.000**			**0**	**0**		**0**	78.925.000	**0**	**1.578.500.000**	**KEC LAU**
	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	3	58.370.000	2	32.765.000		32.400.000	0	98,88600641		3	58.370.099	60	1.167.401.978	KEC LAU
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	1	20.555.000	3	9.060.000			0	0		1	20.555.000	20	411.100.000	KEC LAU
	Pemberdayaan kelurahan	**Pemberdayaan kelurahan**	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**9**	**0**	**0**	**185.072.000**	**4**	**800.000.000**		**0**	**0**	**0**		**0**	185.072.000	**0**	**3.701.440.000**	**KEC LAU**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12			13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0	0	1	185.072.000	1	200.000.000			0	0		1	185.072.000	20	3.701.440.000	KEC LAU
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	0			1	200.000.000			0	0		0	0	0	0	KEC LAU
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	0			1	200.000.000			0	0		0	0	0	0	KEC LAU
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	0			1	200.000.000			0	0		0	0	0	0	KEC LAU
	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban di kecamatan		**IKM Trantibun Linmas**																**KEC LAU**
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	**Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2.355.000**		**0**	**#VALUE!**	**0**		**#VALUE!**	**0**	**#VALUE!**	**0**	**KEC LAU**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12			13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
	Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	0	0	0	0	30	2.355.000		0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	KEC LAU
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	12	2.355.000		0	0	0		0	0	0	0	KEC LAU
	Meningkatnya Akses Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan secara aktif		**Meningkatnya Akses Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan secara aktif**																KEC LAU
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100**	**0**	**31,75**	**137.150.000**	**100**	**64.325.000**		**3.300.000**	**#VALUE!**	**5,130198212**		**#VALUE!**	137.150.005	**#VALUE!**	**2.743.000.103**	KEC LAU

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12			13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah**	**3**	**0**	**3**	**122.700.000**	**2**	**64.325.000**		**3.300.000**	**0**	**5,130198212**		**3**	122.700.005	60	2.454.000.103	KEC LAU
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	2500	0	350	56.220.000	500	41.575.000		0	0	0		350	56.220.000	7.000	1.124.400.000	KEC LAU

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		indonesia																
	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	2500	0	350	66.480.000	500	22.750.000		3.300.000	0	14,505494 51	350	66.480.015	7.000	1.329.600.290	KEC LAU

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Lau

Kecamatan Lau merupakan perangkat daerah Kabupaten Maros sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dengantugas utama yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat,koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa disamping itu juga camat bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

Tabel T-C. 22
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN LAU
KABUPATEN MAROS

NO	TUJUAN / SASARAN	TOLAK UKUR	INDOKATOR	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	IRB Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	CC	B	BB	BB	CC	B	BB	BB	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	3,25	3,25	3,26	3,26	3,25	3,25	3,26	3,26	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketenteraman Dan ketertiban di Kecamatan	3,25	3,25	3,26	3,26	3,25	3,25	3,26	3,26	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan	3,25	3,25	3,26	3,26	3,25	3,25	3,26	3,26	
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	Prersentase Masyarakat Kecamatan Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif	Meningkatnya Akses masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan Secara Aktif	3,25	3,25	3,26	3,26	3,25	3,25	3,26	3,26	
3	Meningkatkan Peran Serta Perempuan Di Kecamatan Dalam Pembangunan	Persentase Perempuan Di Kecamatan Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Pembangunan	Meningkatnya Peran Aktif Perempuan Dikecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial Dan Ekonomi	32	35	37	40	32	35	37	40	
4	Meningkatkan Kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar di Kecamatan Sesuai Standar Pelayanan Minimal	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kecamatan Terhadap Pelayanan Dasar	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dasar Masyarakat Kecamatan Sesuai SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Lau

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Lau dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan,

Kecamatan Lau sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan Aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lau :

1) Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya dukungan SKPD Teknis terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
2) Terbatasnya tingkat kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
3) Anggaran Kecamatan yang disediakan sangat terbatas

4) Penyediaan Sarana dan Prasarana ASN masih terbatas

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1) Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai,
2) Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi,
3) Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan,
4) Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai,
5) Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1) Visi dan misi organisasi yang jelas,
2) Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan,
3) Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan,
4) Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan,
5) Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan,
6) Komitmen Bupati dalam Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik,
7) Dukungan dan partisipasi masyarakat luas.

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategi prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi- rekomendasi sebagai berikut :

1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas kapasitas ASN yang terkait
2) Perlunya dibangun lapangan olahraga kecamatan yang representative guna pemenuhan sarana dan prasarana masyarakat.
3) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana ASN dalam upaya mewujudkan pelayanan prima
4) Dalam rangka peningkatan perencanaan perlu dialokasikan sejumlah dana perencanaan
5) Perlunya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan
6) Perlunya meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Maros dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Lau dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Lau,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tabel T-C.23. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**		**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGI INDIKATIF (Rp.000)**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Lau		**Nilai Sakip dan Nilai Survey**		**4.137.161.100**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Kec.Lau		**Nilai Sakip dan Nilai Survey**		**4.561.250.300**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Lau	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	***BB***	***Nilai Sakip***	**3.620.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec.Lau	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	***BB***	***Nilai Sakip***	**20.631.000**
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Lau	jumlah penyusunan dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	3.620.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Lau	jumlah dokumen perencanaan OPD	3	Dokumen	5.119.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Lau	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	***BB***	***Nilai Sakip***	**4.025.541.850**	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Lau	jumlah penyusunan dokumen RKA SKPD	1	Dokumen	2.378.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Lau	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Gaji Dan Tunjangan	80	Orang	4.008.074.850	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec.Lau	jumlah penyusunan dokumen perubhana RKA SKPD	1	Dokumen	2.378.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Lau	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Orang	17.467.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Lau	jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD	1	Dokumen	2.378.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00***	***Nilai Survey***	**76.199.250**	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec.Lau	jumlah penyusunan dokumen perubhana DPA SKPD	1	Dokumen	2.378.000
Penyediaan Peralatan rumah tangga	Kec.Lau	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum Masyarakat Yang Berfungsi dengan Baik	76,5	Persen	6.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kec.Lau	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja OPD	20	Dokumen	6.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**		**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGI INDIKATIF (Rp.000)**	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Lau	Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)	3	Nilai Survey	69.949.250	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec.Lau	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	***BB***	***Nilai Sakip***	**4.020.554.850**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Lau	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	***3.25***	**IKM**	**31.800.000**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Lau	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Gaji Dan Tunjangan	80	Orang	4.008.074.850
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec.Lau	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25	IKM	1.800.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Lau	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1	Orang	12.480.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Lau	Nilai Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai Survey	6000000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00***	***Nilai Survey***	**51.739.500**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Lau	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25	IKM	24.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Lau	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Yang Dibeli	80	Stel	20.400.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi**	***3.00***	***Nilai Survey***	**819.052.500**	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec.Lau	Jumlah Pendataan dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	24.064.500
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi**	***3.00***	***Nilai Survey***	**819.052.500**	pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec.Lau	Jumlah pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Kegiatan	7.275.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**		**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGI INDIKATIF (Rp.000)**	
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Lau	Nilai Kapasitas Organisasi	*3.00*	*Nilai Survey*	819.052.500	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00***	***Nilai Survey***	**240.364.950**
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Lau	**Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembagunan**	**45**	**Persen**	**324.766.000**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Lau	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7	Jenis	2.633.450
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Lau	**Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembagunan**	**16,5**	**Persen**	**324.766.000**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Lau	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	Jenis	9.297.500
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec.Lau	Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembagunan	16,5	Persen	24.766.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Lau	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	2	Jenis	13.650.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec.Lau	Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembagunan	16,5	Persen	300.000.000	fasilitasi kunjungan tamu	Kec.Lau	Jumlah makan minum yang tersedia	3	Kegiatan	154.850.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Lau	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dikoordinasikan**	**23**	**Urusan**	**18.000.000**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Lau	Jumlah Jenis Rapat - Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	2	Jenis	59.934.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Lau	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dikoordinasikan**	**23**	**Urusan**	**18.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00***	***Nilai Survey***	**125.500.000**

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**		**PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGI INDIKATIF (Rp.000)**	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kec.Lau	Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembagunan	16,5	Persen	18.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Lau	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	4	Unit	75,500,000
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Lau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit	50.000.000
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00***	***Nilai Survey***	**67.560.000**
						Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec.Lau	Jumlah surat yang terdistribusi	1000	Surat	9.960.000
						penyediaan jasa komuniaski sumber daya air dan listrik	Kec.Lau	Jumlah jasa komuniskasi yang tersedia	1	Jasa	12.000.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Lau	Juimlah penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	6	Jasa	45.600.000
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00***	***Nilai Survey***	**34.900.000**
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Lau	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	25	Jenis	14.900.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGI INDIKATIF (Rp.000)	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Lau	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	1	Unit	20.000.000
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Lau		**3.25**	**IKM**	**950.855.000**
						Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**1**	**Kegiatan**	**930.000.000**
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Lau	Jumlah Layanan Masyarakat Yang Terlaksana di Kecamatan	5	Layanan	930.000.000
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Lau	**Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**3**	**Urusan**	**20.855.000**
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Lau	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6	Dokumen	5.440.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGI INDIKATIF (Rp.000)	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Kec.Lau	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	11	Dokumen	5.440.000
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec.Lau	Jumlah Dokumen Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain Yang Dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku	2	Dokumen	9.975.000
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Lau			**Persen**	**3.115.678.000**
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan**	**2**	**Kegiatan**	**45.100.000**
						Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kec.Lau	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Wilayah Kerja Kecamatan Yang Terintegrasi	2	Kegiatan	35.100.000
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Lau	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	1	Kegiatan	10.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGI INDIKATIF (Rp.000)	
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**2**	**Kegiatan**	**30.578.000**
						Evaluasi Kelurahan	Kec.Lau	Jumlah Kelurahan yang di evaluasi	4	Kelurahan	2.625.000
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec.Lau	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300	Orang	27.953.000
						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**2**	**Kegiatan**	**3.040.000.000**
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec.Lau	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan	4	Kelurahan	240.000.000
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec.Lau	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	4	Kelurahan	2.800.000.000
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Lau			**Persen**	**60.000.000**

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGI INDIKATIF (Rp.000)	
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**5**	**Kegiatan**	**60.000.000**
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik indonesia di Wilayah Kecamatan	Kec.Lau	Jumlah Penanganan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Yang disinergikan dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	Kasus	60.000.000
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Lau			**Urusan**	**111.925.000**
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**3**	**Kegiatan**	**111.925.000**
						Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kec.Lau	Jmlah Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila	400	Orang	61.450.000

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGI INDIKATIF (Rp.000)	
						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec.Lau	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Yang dilaksanakan	4	Dokumen	46.350.000
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Lau	Jumlah Dokumen laporan Atas Hasil Pelaksanaan Tugas FORKOPIMCAM	1	Dokumen	4.125.000
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Lau			**Persen**	**3.750.000**
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Lau	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**2**	**Desa**	**3.750.000**
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Lau	Jumlah Desa Yang Memiliki Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan Aturan yang berlaku	2	Desa	3.750.000

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Kec. Lau**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**8.084.860.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Lau**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**8.084.860.000**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Kec. Lau**	**Jumlah Dokumen Perencanaand dan Pelaporan Perangkap Daerah**	**19 Dokumen**	***5.000.000***	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Lau**	**Jumlah Dokumen Perencanaand dan Pelaporan Perangkap Daerah**	**19 Dokumen**	***9.210.000***	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Lau	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	1.000.000		Kec. Lau	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dok	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Lau		1 Dok	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Lau		1 Dok	1.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Lau		1 Dok	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec. Lau		1 Dok		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Lau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1.000.000	
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Lau		1 laporan	1.000.000	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Lau		1 laporan		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Laporan Kinerka (LAPKIN) Perangkap Daerah	12 Laporan	1.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Laporan Kinerka (LAPKIN) Perangkap Daerah	12 Laporan	1.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Kec. Lau**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**12 Dokumen**	***5.702.784.111***	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Lau**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**12 Dokumen**	***7.605.684.250***	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bual	5.663.294.111	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Lau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bual	7.566.634.250	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	39.490.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	39.490.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Lau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Lau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Lau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Lau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 laporan	-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14 Dokumen		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14 Dokumen		

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Lau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Lau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Kec. Lau**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawean**	**120 Orang**	***7.500.000***	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec. Lau**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawean**	**120 Orang**	***7.500.000***	
pengadaan pakain dinas beserta atribut dan kelengkpanannya	Kec. Lau	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	2.250.000	pengadaan pakain dinas beserta atribut dan kelengkpanannya	Kec. Lau	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	2.250.000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Lau	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6 Jenis**	***114.205.100***		Kec. Lau	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6 Jenis**	***114.205.100***	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	1.781.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Lau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	1.781.100	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Lau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 paket	4.380.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Lau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 paket	4.380.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Lau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	10.534.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Lau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	10.534.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Lau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	7.900.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	7.900.000	
fasilitasi kunjungan tamu	Kec. Lau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	43.000.000	**fasilitasi kunjungan tamu**	Kec. Lau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	43.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255 laporan	46.610.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255 laporan	46.610.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kec. Lau**	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	**2 jenis**	**15.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Lau**	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	**2 jenis**	**15.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Pengadaan Mebel	Kec. Lau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	-	Pengadaan Mebel	Kec. Lau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Lau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Lau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Kec. Lau**	**Jumlah Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Jenis**	***165.530.000***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Lau**	**Jumlah Jasa Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2 Jenis**	***165.530.000***	
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	11530000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	11530000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	154.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Lau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	154.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Lau	**Jumlaj Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Baik**	**4 Jenis**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec. Lau	**Jumlaj Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Baik**	**4 Jenis**		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Lau	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Kali	15.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Lau	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Kali	15.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Lau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	7.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Lau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	7.500.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lau	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	1 Unit	7.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Lau	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	1 Unit	7.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Lau	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pablik di Kecamatan**	**100%**	**1.446.755.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec. Lau	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pablik di Kecamatan**	**100%**	**1.446.755.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**242.255.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Kec. Lau	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**242.255.000**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85 Dok	2.255.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85 Dok	2.255.000	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Kec. Lau**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**1 Kegiatan**	**1.197.000.000**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Kec. Lau**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**1 Kegiatan**	**1.197.000.000**	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	**3.000.000**	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	**3.000.000**	
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84 Laporan	1..194.000.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	84 Laporan	1..194.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Kec. Lau**	**Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	3 Layanan	**7.500.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Lau**	**Jumlah Layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	3 Layanan	**7.500.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	**4 Dokumen**	2.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	**4 Dokumen**	2.500.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	2.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 laporan	2.500.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	2.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	2.500.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Kec. Lau**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakatdi Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**90%**	**835.945.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Lau**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakatdi Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**90%**	**835.945.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Kec. Lau**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan**	**2 Kegiatan**	**35.945.000**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Lau**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan**	**2 Kegiatan**	**35.945.000**	
Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dok	24.675.000	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2 Dok	24.675.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	11.270.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 laporan	11.270.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Kec. Lau**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**1 Kegiatan**	**800.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kec. Lau**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**1 Kegiatan**	**800.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lau	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500 pokmas/ormas	800.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Lau	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	500 pokmas/ormas	800.000.000	
Evaluasi Kelurahan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 laporan	-	Evaluasi Kelurahan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 laporan	2.400.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Kec. Lau**	**Persentase Penurunan Kasus Penyelesaian K3 Di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**2.050.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Lau**	**Persentase Penurunan Kasus Penyelesaian K3 Di Wilayah Kecamatan**	**100%**	**2.050.000**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Kec. Lau**	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**2.050.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec. Lau**	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**2.050.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.050.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	2.050.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kec. Lau**	**Persentase Masyarakatdi Wilaya Kecamatan yang Mendapat Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**'90%**	**62.815.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Lau**	**Persentase Masyarakatdi Wilaya Kecamatan yang Mendapat Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**'90%**	**62.815.000**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec. Lau**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**3 Kegiatan**	**62.815.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Lau**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**3 Kegiatan**	**62.815.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kec. Lau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	20.220.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kec. Lau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	20.220.000	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Lau	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	2.050.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Lau	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	2.050.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
PROGRAM /KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (Rp.000)**	**PROGRAM /KEGIATAN**	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)**	**Catatan Penting**
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Kec. Lau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	620 orang	40.545.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional	Kec. Lau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	620 orang	40.545.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Lau	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Lau	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**2.750.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec. Lau	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	**90%**	**2.750.000**	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Lau	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**2.750.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kec. Lau	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan		**2.750.000**	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lau	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	2.750.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Lau	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	2.750.000	

2. 5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Lau pada tahun 2023 dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas SDM Aparatur lingkup kecamatan Lau;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan baik di desa maupun kelurahan;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah;
5. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Lau maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel T-C. 24

Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

Tahun 2024 Kabupaten Maros

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lau

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Lau	**Nilai Sakip dan Nilai Survey**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Lau	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	***BB***	***Nilai Sakip***
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Lau	jumlah dokumen perencanaan OPD	3	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Lau	jumlah penyusunan dokumen RKA SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Kec.Lau	jumlah penyusunan dokumen perubhana RKA SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Lau	jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec.Lau	jumlah penyusunan dokumen perubhana DPA SKPD	1	Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Lau	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja OPD	12	Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Lau	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	***BB***	***Nilai Sakip***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Lau	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Gaji Dan Tunjangan	80	Orang
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Lau	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Orang
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00***	***Nilai Survey***
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec.Lau	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Yang Dibeli	80	Stel
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec.Lau	Jumlah Pendataan dokumen dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen
	pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec.Lau	Jumlah pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00***	***Nilai Survey***
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Lau	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7	Jenis
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Lau	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	Jenis
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Lau	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	2	Jenis
	fasilitasi kunjungan tamu	Kec.Lau	Jumlah makan minum yang tersedia	2	Kegiatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Lau	Jumlah Jenis Rapat - Rapat Koordinasi Yang Dilaksanakan	2	Jenis
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00***	***Nilai Survey***
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Lau	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	4	Unit

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Lau	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00***	***Nilai Survey***
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kec.Lau	Jumlah surat yang terdistribusi	1000	Surat
	penyediaan jasa komuniaski sumber daya air dan listrik	Kec.Lau	Jumlah jasa komuniskasi yang tersedia	1	Jasa
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Lau	Juimlah penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	6	Jasa
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Lau	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00***	***Nilai Survey***
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Lau	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	25	Jenis
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Lau	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	1	Unit
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Lau		**3.25**	**IKM**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**1**	**Kegiatan**
	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec.Lau	Jumlah Layanan Masyarakat Yang Terlaksana di Kecamatan	5	Layanan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Lau	**Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**3**	**Urusan**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Lau	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	6	Dokumen
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Kec.Lau	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	12	Dokumen
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec.Lau	Jumlah Dokumen Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain Yang Dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku	2	Dokumen
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Lau			**Persen**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan**	**2**	**Kegiatan**
	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kec.Lau	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Wilayah Kerja Kecamatan Yang Terintegrasi	2	Kegiatan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Lau	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	1	Kegiatan
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**2**	**Kegiatan**
	Evaluasi Kelurahan	Kec.Lau	Jumlah Kelurahan yang di evaluasi	4	Kelurahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec.Lau	Jumlah Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musywarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300	Orang
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**2**	**Kegiatan**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec.Lau	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan di	4	Kelurahan

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Kelurahan		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec.Lau	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Yang Terbangun	4	Kelurahan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Lau			**Persen**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**7**	**Kegiatan**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Lau	Jumlah Penanganan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Yang disinergikan dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7	Kasus
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Lau			**Urusan**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Lau	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**3**	**Kegiatan**
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Kec.Lau	Jmlah Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila	400	Orang
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec.Lau	Jumlah Dokumen Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Yang dilaksanakan	4	Dokumen
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Lau	Jumlah Dokumen laporan Atas Hasil Pelaksanaan Tugas FORKOPIMCAM	1	Dokumen
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Lau			**Persen**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Lau	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**2**	**Desa**
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Lau	Jumlah Desa Yang Memiliki Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sesuai dengan Aturan yang berlaku	2	Desa

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Kecamatan Lau Kab. Maros Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan, RKPD Kabupaten Maros Tahun 2022. Sedangkan RKPD Kab. Maros Tahun 2023 sendiri merupakan penjabaran RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026. Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu stratregis serta merujuk pada prioritas pembangunan daerah.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut, maka Rencana Kerja Kecamatan Lau Kab. Maros Tahun 2023 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu.

Kecamatan Lau merupakan salah satu perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 dijelaskan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengkoordinasian upaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, pegkoordinasian penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;

Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dam atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam peraturan Bupati Maros Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pejabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian

Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros disebutkan bahwa Kecamatan sebagai salah satu Institusi Pemerintahan Daerah Kabupaten Maros mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dlilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan peran strategis adalah kontribusi yang nyata melalui : tugas camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat nyang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau kelurahan meliputi perencanaan kegiatan wilayahnya; pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat; serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;

Tabel 3.1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional/Propinsi	Sumber	Keterangan
A	Nasional		
1.			
2.			
B	Provinsi		
1.			
2.			

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Lau

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renja Kecamatan Lau adalah :

1. Memantapkan rancangan program dan kegiatan lingkup Kecamatan Lau Tahun 2023;

2. Mensinkronkan perencanaan Pemerintah Daerah dengan rencana program yang disusun oleh Kecamatan Lau;
3. Mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada pada Kecamatan Lau;
4. Memantapkan konsep RKA Tahun 2023.

Dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Tersusunnya program dan kegiatan Kecamatan Lau dan adanya sinegritas perencanaan program Pemerintah Daerah dan Kecamatan Lau
2. Adanya sinegritas perencanaan program Pemerintahan Daerah dan Kecamatan Lau;
3. Teralokasinya anggaran dengan prinsip efesiensi dan efektifitas;
4. Tersusunnya RKA Kecamatan Lau Tahun 2023.

3.3 . Program Dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
    1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
    2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
    3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing–masing Desa / Kelurahan se Kecamatan Lau.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,antara lain meliputi:

   Jumlah program dan kegiatan,yang ada di Kecamatan Lau meliputi 6 program, 15 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan.

c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya adalah :

Program, kegiatan dan Subkegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan kembali atau diajukan pada tahun mendatang.

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian dikarenakan Tidak cukupnya anggaran yang tersedia

1. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilakukan pengurangan pada belanja Honorarium Imam Mesjid/Guru Mengaji untuk dialihkan pada belanja Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/Kepala Dusun **dikarenakan Kelebihan Anggaran.**
2. Pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilakukan pengurangan pada belanja Honorarium Imam Mesjid/Guru Mengaji untuk dialihkan pada belanja Fasilitasi Kunjungan Tamu **dikarenakan Kelebihan Anggaran**.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Maros

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	**Kecamatan Lau**	**100%**	**6.206.180.000**	**PAD**		**3,00**	**7.591.200.000**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Lau**	**2**	**950.000**	**PAD**		**12**	**54.000.000**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Lau			PAD		2	18.000.000
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Lau			PAD		**1**	6.000.000
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Lau			PAD		2	6.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Lau			PAD		2	6.000.000
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Lau	2	950.000	PAD		2	6.000.000
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Lau			PAD		1	12.000.000
7 01 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lau			PAD		12	5.500.000
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Lau**	**26**	**6.125.644.667**	**DAU**		**26**	**6.125.644.667**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Lau	85	6.079.224.667	DAU		**85**	6.079.224.667
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Lau	12	46.420.000	PAD		12	46.420.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Lau			PAD		2	24.000.000
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Lau			PAD		1	5.000.000
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Lau**	**1**	**2.250.000**	**PAD**		**1**	**50.000.000**
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Lau	80	2.250.000	PAD		80	50.000.000
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Lau**	**1**	**58.205.100**	**PAD**		**1**	**327.000.000**
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lau	10		PAD		10	8.000.000
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lau			PAD		2	30.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Lau	1		PAD		2	45.000.000
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lau	2	12.212.100	PAD		2	32.000.000
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Lau	2	8098000	PAD		2	20.000.000
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lau	2	12.000.000	PAD		2	60.000.000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dikoordinasikan	Kecamatan Lau	1	63.565.000	PAD		1	120.000.000
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Lau			PAD		2	20.000.000
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Lau**	**2**	**161.900.000**	**PAD**		**3**	**275.000.000**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Lau	1	10.650.000	PAD		1	15.000.000
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lau			PAD		2	24.000.000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lau	4	151.250.000	PAD		4	200.000.000
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Lau	**5**	**157.500.000**	**PAD**		**1**	**326.200.000**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lau		30.000.000	PAD		1	6.100.000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lau	1	7.500.000	PAD		1	24.800.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Lau			PAD		1	45.000.000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lau	1		PAD		2	54.400.000
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Lau	1	120.000.000	PAD		1	190.000.000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		**Kecamatan Lau**						
7 01	**KECAMATAN**		**Kecamatan Lau**						
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**Kecamatan Lau**	**BB**	**1.559.200.000**	**PAD**		**BB**	**3.272.500.000**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Lau**	**1**	**360.000.000**	**PAD**		**2**	**417.500.000**
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Lau			PAD		1	17.500.000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lau	1	360.000.000	PAD		1	360.000..000
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Lau**	**3**	**1196600000**	**PAD**		**3**	**2.925.000.000**
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan Lau	1	2.6000.000	PAD		1	5.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lau	1	1.194.000.000	PAD		3	2.800.000.000
7 01 02 2.02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Lau**	**3**	**2.600.000**	**PAD**		**3**	**15.000.000**
7 01 02 2.02 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Lau	1		PAD		1	5.000.000
7 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan yang dilaksanakan	Kecamatan Lau	1		PAD		1	5.000.000
7 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kecamatan Lau	1	2.600.000	PAD		1	5.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembagunan**	**Kecamatan Lau**	**100%**	**841.825.000**	**PAD**		**100%**	**290.250.000**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan desa**	**Kecamatan Lau**	**2**	**41.825.000**	**PAD**		**2**	**120.000.000**
7 01 03 2.01 02	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Wilayah Kerja Kecamatan Yang Terintegrasi	Kecamatan Lau	2	32.765.000	PAD		2	50.000.000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lau	3	9.060.000	PAD		3	70.000.000
7 01 03 2.02	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Lau**	**4**	**800.000.000**	PAD		**3**	**1.060.000.000**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Lau			PAD		1	30.000.000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Lau	4	800.000.000	PAD		4	1.000.000.000
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lau			PAD		1	30.000.000
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**	**Kecamatan Lau**	**100%**	**2.355.000**	**PAD**		**100%**	**64.825.000**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Lau**	**2**	**2.355.000**	**PAD**		**2**	**64.825.000**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lau	5	2.355.000	PAD		5	18.825.000
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lau			PAD		5	46.000.000
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	**Kecamatan Lau**	**100%**	**64.325.000**	**PAD**		**3,00**	**487.750.000**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Lau**	**8**	**64.325.000**	**PAD**		**8**	**487.750.000**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Lau	2	41.575.000	PAD		1	82.750.000
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Lau	4		PAD		1	75.000.000
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Lau			PAD		1	30.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Lau	4	22.750.000	PAD		4	50.000.000
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Lau			PAD		1	60.000.000
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kecamatan Lau			PAD		1	50.000.000
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Lau			PAD		1	60.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dikoordinasikan	Kecamatan Lau			PAD		4	80.000.000
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**Kecamatan Lau**	**BB**	**2.640.000**	**PAD**		**BB**	**255.000.000**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Lau**	**7**	**2.640.000**	**PAD**		**7**	**255.000.000**
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Lau			PAD		2	35.000.000
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lau			PAD		2	40.000.000
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lau	6	2.640.000	PAD		6	80.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Lau			PAD		2	15.000.000
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lau			PAD		2	25.000.000
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Lau			PAD		2	30.000.000
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lau			PAD		2	30.000.000
	Pembangunan Drainase, Jalan Lingkungan yang berada di Kawasan Kumuh		Mattiro Deceng	1		DAU		1	400.000.000
	Pembangunan Pagar Sekolah PAUD		Mattiro Deceng	1		DAU		1	100.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Paving Blok Halaman/Pelataran Sekolah PAUD		Mattiro Deceng	1		DAU		1	100.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Mattiro Deceng	1		DAU		1	600.000.000
	Pengadaan Traktor untuk Kelompok Tani (sumber Dana DAK Fisik)		Mattiro Deceng	1		DAU		1	30.000.000
	Pengadaan Chrome Book Sekolah Dasar		Mattiro Deceng	1		DAU		1	125.000.000
	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar		Mattiro Deceng	1		DAU		1	100.000.000
	Lantai jemur untuk Gapoktan/kelompok tani (sumber Dana DAK Fisik)		Mattiro Deceng	1		DAU		1	50.000.000
	jalan tani sektor tanaman pangan, (sumber Dana DAK		Mattiro Deceng	1		DAU		1	100.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fisik)								
	Pekerjaan Pemasangan Bronjongdan Pasangan Batu		Mattiro Deceng	1		DAU		1	100.000.000
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan		Mattiro Deceng	1		DAU		1	1.560.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Mattiro Deceng	1		DAU		1	600.000.000
	Pekerjaan ReserVoir Air Bersih dan Bak Hydrant		Mattiro Deceng	1		DAU		1	400.000.000
	Pembangunan Drainase Lingkungan		Mattiro Deceng	1		DAU		1	1.000.000.000
	Pekerjaan Pemasangan Bronjongdan Pasangan Batu		Mattiro Deceng	1		DAU		1	100.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Drainase Lingkungan		Mattiro Deceng	1		DAU		1	1.000.000.000
	Perintisan Jalan Kel. Mattiro deceng		Mattiro Deceng	1		DAU		1	500.000.000
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan		Mattiro Deceng	1		DAU		1	1.560.000.000
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan)		Mattiro Deceng	1		DAU		1	20.000.000
	Pengadaan Pompa Air (Sarana Pendukung		Mattiro Deceng	1		DAU		1	30.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Allepolea	1		DAU		1	400.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Lingkungan Bonto Kapetta		Allepolea	1		DAU		1	250.000.000
	Rehabilitasi Saluran Jaringan Irigasi Primer dan Saluran Sekunder Yang Memiliki Sumber Air		Allepolea	1		DAU		1	200.000.000
	Pekerjaan Saluran Jaringan Irigasi Primer dan Saluran Sekunder yang Memiliki Sumber Air		Allepolea	1		DAU		1	150.000.000
	Rehabilitasi Saluran Jaringan Irigasi Primer dan Saluran Sekunder Yang Memiliki Sumber Air		Allepolea	1		DAU		1	200.000.000
	Pembangunan Pintu air (sumber Dana DAK Fisik)		Allepolea	1		DAU		1	150.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Mendata dan menyusulkan Masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan Bantuan usaha Produktif dan Pelatihan Keterampilan dari Dinas Provinsi dan Kemensos		Allepolea	1		DAU		1	5.000.000
	Sosialisasi Masyarakat terkait Kebencanaan Agar Lebih Adaptif Terhadap Resiko Bencana dan Pembuatan Buletin Informasi Kebencanaan		Allepolea	1		DAU		1	40.000.000
	Pembangunan Drainase Lingkungan		Allepolea	1		DAU		1	250.000.000
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan		Allepolea	1		DAU		1	780.000.000
	jalan tani sektor tanaman pangan, (sumber Dana DAK Fisik)		Allepolea	1		DAU		1	90.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Allepolea	1		DAU		1	150.000.000
	Pekerjaan Pemasangan Bronjongdan Pasangan Batu		Allepolea	1		DAU		1	100.000.000
	Penanganan Jalan yang Rusak Akibat terkena Banjir atau Gempa		Allepolea	1		DAU		1	250.000.000
	Pengadaan perahu/kapal di bawah 3 GT		Allepolea	1		DAU		1	60.000.000
	Pemeliharaan Puskesmas Pembantu		Allepolea	1		DAU		1	25.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Allepolea	1		DAU		1	300.000.000
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan		Allepolea	1		DAU		1	20.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan)								
	Pengadaan Bibit Ternak (itik)		Allepolea	1		DAU		1	5.000.000
	Pengadaan Paving Blok Halaman/Pelataran Sekolah dasar		Allepolea	1		DAU		1	100.000.000
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar		Marannu	1		DAU		1	300.000.000
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan)		Marannu	1		DAU		1	175.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	jalan tani sektor tanaman pangan, (sumber Dana DAK Fisik)		Marannu	1		DAU		1	100.000.000
	Penyediaan pupuk tambak		Marannu	1		DAU		1	16.250.000
	Layanan Keliling Administrasi Pencatatan Sipil		Bonto Marannu	1		DAU		1	75.000.000
	layanan kartu KIP dan Kartu KIS		Bonto Marannu	1		DAU		1	2.500.000
	Pengembangan Keterampilan dan Keahlian Pelaku Usaha		Bonto Marannu	1		DAU		1	3.000.000
	Pembangunan Jembatan Baja dan Beton		Bonto Marannu	1		DAU		1	250.000.000
	Penyediaan Sarana Persampahan		Bonto Marannu	1		DAU		1	50.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan		Bonto Marannu	1		DAU		1	700.000.000
	Pembangunan Drainase Lingkungan		Bonto Marannu	1		DAU		1	400.000.000
	Penyediaan bibit/benih air tawar (nila, lele, mas)		Bonto Marannu	1		DAU		1	10.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Soreang	1		DAU		1	200.000.000
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Soreang	1		DAU		1	250.000.000
	jalan tani sektor tanaman pangan, (sumber Dana DAK Fisik)		Soreang	1		DAU		1	100.000.000
	Penyediaan jalan produksi perikanan budidaya		Soreang	1		DAU		1	200.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Soreang	1		DAU		1	250.000.000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Fisik)		Soreang	1		DAU		1	75.000.000
	Fasilitasi Pelatihan Pertanian Tematik		Soreang	1		DAU		1	5.000.000
	Pembangunan Drainase Lingkungan		Soreang	1		DAU		1	200.000.000
	Pengadaan mesin pembuat pakan ikan		Soreang	1		DAU		1	40.000.000
	Pelatihan kader posyandu		Soreang	1		DAU		1	7.000.000
	Pendidikan dan pelatihan Calon Tenaga Kerja melallui Balai Pelatihan Kerja : Pelatihan : Menjahit, Tata		Soreang	1		DAU		1	60.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Boga, Tata Rias. Komputer, Seccurity)								
	Pendampingan usaha mikro dalam kemitraan		Soreang	1		DAU		1	50.000.000
	Pemasangan perangkat jaringan (Tower,Kabel LAN),pemasangan dan pemeliharaan peralatan jaringan (Tower dan Wifi)		Soreang	1		DAU		1	5.000.000
	Pekerjaan Saluran Jaringan Irigasi Primer dan Saluran Sekunder yang Memiliki Sumber Air		Soreang	1		DAU		1	150.000.000
	Temu teknis/bimtek bagi pembudidaya ikan		Soreang	1		DAU		1	5.000.000
	Penyediaan Sarana Persampahan		Soreang	1		DAU		1	100.000.000

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat di setiap Desa Melalui Pembentukan Bank Sampah		Soreang	1		DAU		1	25.000.000
	Rehabilitasi Bangunan Gedung		Soreang	1		DAU		1	1.000.000.000
	Pengadaan Paving Blok Halaman/Pelataran Sekolah dasar		Mattiro Deceng	1		DAU		1	100.000.000
	Pekerjaan Pemasangan Bronjongdan Pasangan Batu		Mattiro Deceng	1		DAU		1	150.000.000
	jalan tani sektor tanaman pangan, (sumber Dana DAK Fisik)		Mattiro Deceng	1		DAU		1	100.000.000
	Pendampingan peningkatan kapasitas BPD dan anggota		Bonto Marannu	1		DAU		1	50.000.000
TOTAL PAGU					**27.132.534.111**				**30.825.275.000**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat termasuk dunia usaha yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Disamping itu seluruh satker mulai membuat rencana aksi dalam upaya penggalian dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha. Mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan dengan model BOT, leasing, konsensi dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun

satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Maros

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lau

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	**Kecamatan Lau**	**100%**	**6.206.180.000**	**PAD**
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Lau**	**2**	**39.900.000**	**PAD**
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Lau	2	1.000.000	PAD
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Lau	2	1.000.000	PAD
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Lau	2	1.000.000	PAD
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Lau	2	1.000.000	PAD

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 01 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Lau	6	1.000.000	PAD
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Lau**	**26**	**6.125.644.667**	**DAU**
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Lau	14	6.079.224.667	DAU
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Lau	12	46.420.000	PAD
7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kecamatan Lau			PAD
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Lau			PAD
7 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kecamatan Lau**	**1**	**2.250.000**	**PAD**
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Lau	80	2.250.000	PAD

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Lau**	**1**	**58.205.100**	**PAD**
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Lau	10	1.529.100	PAD
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lau			PAD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Lau	1	2.097.000	PAD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Lau	2	10.534.000	PAD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Lau	2	6.550.000	PAD
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Lau	2	18.000.000	PAD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dikoordinasikan	Kecamatan Lau	1	19.495.000	PAD

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Lau			PAD
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Lau**	**2**	**165.530.000**	**PAD**
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Lau	1	11.530.000	PAD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Lau			PAD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Lau	4	154.000.000	PAD
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kecamatan Lau	**5**	**14.500.000**	**PAD**
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Lau			PAD

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Lau	1	7.500.000	PAD
7 01 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kecamatan Lau			PAD
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Lau	1	7.000.000	PAD
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Lau			PAD
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**		**Kecamatan Lau**			
7 01	**KECAMATAN**		**Kecamatan Lau**			
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**Kecamatan Lau**	**BB**	**1.420.955.000**	**PAD**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Lau**	**1**	**242.255.000**	**PAD**
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Lau			PAD
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Lau	1	242.255.000	PAD
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Kecamatan Lau**	**3**	**1.171.200.000**	**PAD**
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	Kecamatan Lau	1	3.000.000	PAD
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lau	1	1.168.200.000	PAD

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 02 2.02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Lau**	**3**	**7.500.000**	**PAD**
7 01 02 2.02 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Lau	1	2.500.000	PAD
7 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan yang dilaksanakan	Kecamatan Lau	1	2.500.000	PAD
7 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kecamatan Lau	1	2.500.000	PAD
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam proses pembagunan**	**Kecamatan Lau**	**100%**	**831.945.000**	**PAD**
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan desa**	**Kecamatan Lau**	**2**	**31.945.000**	**PAD**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 03 2.01 02	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarkat di Wilayah Kerja Kecamatan Yang Terintegrasi	Kecamatan Lau	2	20.675.000	PAD
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang terlaksana di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lau	3	11.270.000	PAD
7 01 03 2.02	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Kecamatan Lau**	**4**	**800.000.000**	PAD
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Lau			PAD
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kecamatan Lau	4	800.000.000	PAD
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lau			PAD

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)**	**Kecamatan Lau**	**100%**	**2.050.000**	**PAD**
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kecamatan Lau**	**2**	**2.050.000**	**PAD**
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lau	5	2.050.000	PAD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Lau			PAD
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	**Kecamatan Lau**	**100%**	**62.815.000**	**PAD**
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Lau**	**8**	**62.815.000**	**PAD**

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Lau	2	20.220.000	PAD
7 01 05 2.01 02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Lau	4	2.050.000	PAD
7 01 05 2.01 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Lau			PAD
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Lau	4	40.545.000	PAD

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 05 2.01 05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Lau			PAD
7 01 05 2.01 06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kecamatan Lau			PAD
7 01 05 2.01 07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Lau			PAD
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dikoordinasikan	Kecamatan Lau			PAD
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**Kecamatan Lau**	**BB**	**2.750.000**	**PAD**
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Lau**	**7**	**2.750.000**	**PAD**
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Lau			PAD

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Lau			PAD
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Lau	6	2.750.000	PAD
7 01 06 2.01 04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Lau			PAD
7 01 06 2.01 11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Lau			PAD
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Lau			PAD
7 01 06 2.01 18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Lau			PAD
	Pembangunan Drainase, Jalan Lingkungan yang berada di Kawasan Kumuh		Mattiro Deceng	1	400.000.000	DAU

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Pagar Sekolah PAUD		Mattiro Deceng	1	100.000.000	DAU
	Pengadaan Paving Blok Halaman/Pelataran Sekolah PAUD		Mattiro Deceng	1	100.000.000	DAU
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Mattiro Deceng	1	600.000.000	DAU
	Pengadaan Traktor untuk Kelompok Tani (sumber Dana DAK Fisik)		Mattiro Deceng	1	30.000.000	DAU
	Pengadaan Chrome Book Sekolah Dasar		Mattiro Deceng	1	125.000.000	DAU
	Pembangunan Pagar Sekolah Dasar		Mattiro Deceng	1	100.000.000	DAU
	Lantai jemur untuk Gapoktan/kelompok tani (sumber Dana DAK Fisik)		Mattiro Deceng	1	50.000.000	DAU

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
	jalan tani sektor tanaman pangan, (sumber Dana DAK Fisik)		Mattiro Deceng	1	100.000.000	DAU
	Pekerjaan Pemasangan Bronjongdan Pasangan Batu		Mattiro Deceng	1	100.000.000	DAU
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan		Mattiro Deceng	1	1.560.000.000	DAU
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Mattiro Deceng	1	600.000.000	DAU
	Pekerjaan ReserVoir Air Bersih dan Bak Hydrant		Mattiro Deceng	1	400.000.000	DAU
	Pembangunan Drainase Lingkungan		Mattiro Deceng	1	1.000.000.000	DAU
	Pekerjaan Pemasangan Bronjongdan Pasangan Batu		Mattiro Deceng	1	100.000.000	DAU

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Drainase Lingkungan		Mattiro Deceng	1	1.000.000.000	DAU
	Perintisan Jalan Kel. Mattiro deceng		Mattiro Deceng	1	500.000.000	DAU
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan		Mattiro Deceng	1	1.560.000.000	DAU
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan)		Mattiro Deceng	1	20.000.000	DAU
	Pengadaan Pompa Air (Sarana Pendukung		Mattiro Deceng	1	130.000.000	DAU
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Allepolea	1	400.000.000	DAU
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Lingkungan Bonto Kapetta		Allepolea	1	250.000.000	DAU

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
	Rehabilitasi Saluran Jaringan Irigasi Primer dan Saluran Sekunder Yang Memiliki Sumber Air		Allepolea	1	200.000.000	DAU
	Pekerjaan Saluran Jaringan Irigasi Primer dan Saluran Sekunder yang Memiliki Sumber Air		Allepolea	1	150.000.000	DAU
	Rehabilitasi Saluran Jaringan Irigasi Primer dan Saluran Sekunder Yang Memiliki Sumber Air		Allepolea	1	200.000.000	DAU
	Pembangunan Pintu air (sumber Dana DAK Fisik)		Allepolea	1	150.000.000	DAU
	Mendata dan menyusulkan Masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan Bantuan usaha Produktif dan Pelatihan Keterampilan dari Dinas Provinsi dan Kemensos		Allepolea	1	5.000.000	DAU
	Sosialisasi Masyarakat terkait Kebencanaan Agar Lebih Adaptif Terhadap Resiko Bencana dan Pembuatan Buletin Informasi Kebencanaan		Allepolea	1	40.000.000	DAU

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
	Pembangunan Drainase Lingkungan		Allepolea	1	250.000.000	DAU
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan		Allepolea	1	780.000.000	DAU
	jalan tani sektor tanaman pangan, (sumber Dana DAK Fisik)		Allepolea	1	90.000.000	DAU
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Allepolea	1	150.000.000	DAU
	Pekerjaan Pemasangan Bronjongdan Pasangan Batu		Allepolea	1	100.000.000	DAU
	Penanganan Jalan yang Rusak Akibat terkena Banjir atau Gempa		Allepolea	1	250.000.000	DAU
	Pengadaan perahu/kapal di bawah 3 GT		Allepolea	1	60.000.000	DAU

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan Puskesmas Pembantu		Allepolea	1	25.000.000	DAU
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Allepolea	1	300.000.000	DAU
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ (Rambu Pandulu Petunjuk Jalan)		Allepolea	1	20.000.000	DAU
	Pengadaan Bibit Ternak (itik)		Allepolea	1	5.000.000	DAU
	Pengadaan Paving Blok Halaman/Pelataran Sekolah dasar		Allepolea	1	100.000.000	DAU
	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Sekolah Dasar		Marannu	1	300.000.000	DAU
	Pemasangan Guadrail Rambu atau Tanda Peringatan, Warning Light Traffic Light, Penerangan Jalan Umum (PJU), RPPJ		Marannu	1	175.000.000	DAU

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
	(Rambu Pandulu Petunjuk Jalan)					
	jalan tani sektor tanaman pangan, (sumber Dana DAK Fisik)		Marannu	1	100.000.000	DAU
	Penyediaan pupuk tambak		Marannu	1	16.250.000	DAU
	Layanan Keliling Administrasi Pencatatan Sipil		Bonto Marannu	1	75.000.000	DAU
	layanan kartu KIP dan Kartu KIS		Bonto Marannu	1	2.500.000	DAU
	Pengembangan Keterampilan dan Keahlian Pelaku Usaha		Bonto Marannu	1	3.000.000	DAU
	Pembangunan Jembatan Baja dan Beton		Bonto Marannu	1	250.000.000	DAU

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Sarana Persampahan		Bonto Marannu	1	50.000.000	DAU
	Pekerasan Jalan, Pekerjaan Jalan Beton, Pekerjaan Jalan Aspal, Pekerjaan Bahu jalan		Bonto Marannu	1	700.000.000	DAU
	Pembangunan Drainase Lingkungan		Bonto Marannu	1	400.000.000	DAU
	Penyediaan bibit/benih air tawar (nila, lele, mas)		Bonto Marannu	1	10.000.000	DAU
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Soreang	1	200.000.000	DAU
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Soreang	1	250.000.000	DAU
	jalan tani sektor tanaman pangan, (sumber Dana DAK Fisik)		Soreang	1	100.000.000	DAU

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan jalan produksi perikanan budidaya		Soreang	1	200.000.000	DAU
	Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)		Soreang	1	250.000.000	DAU
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Fisik)		Soreang	1	75.000.000	DAU
	Fasilitasi Pelatihan Pertanian Tematik		Soreang	1	5.000.000	DAU
	Pembangunan Drainase Lingkungan		Soreang	1	200.000.000	DAU
	Pengadaan mesin pembuat pakan ikan		Soreang	1	40.000.000	DAU
	Pelatihan kader posyandu		Soreang	1	7.000.000	DAU

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
	Pendidikan dan pelatihan Calon Tenaga Kerja melallui Balai Pelatihan Kerja : Pelatihan : Menjahit, Tata Boga, Tata Rias. Komputer, Seccurity)		Soreang	1	60.000.000	DAU
	Pendampingan usaha mikro dalam kemitraan		Soreang	1	50.000.000	DAU
	Pemasangan perangkat jaringan (Tower,Kabel LAN),pemasangan dan pemeliharaan peralatan jaringan (Tower dan Wifi)		Soreang	1	5.000.000	DAU
	Pekerjaan Saluran Jaringan Irigasi Primer dan Saluran Sekunder yang Memiliki Sumber Air		Soreang	1	150.000.000	DAU
	Temu teknis/bimtek bagi pembudidaya ikan		Soreang	1	5.000.000	DAU
	Penyediaan Sarana Persampahan		Soreang	1	100.000.000	DAU
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat di setiap Desa Melalui Pembentukan Bank Sampah		Soreang	1	25.000.000	DAU

Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana
1	2	3	4	5	6	7
	Rehabilitasi Bangunan Gedung		Soreang	1	1.000.000.000	DAU
	Pengadaan Paving Blok Halaman/Pelataran Sekolah dasar		Mattiro Deceng	1	100.000.000	DAU
	Pekerjaan Pemasangan Bronjongdan Pasangan Batu		Mattiro Deceng	1	150.000.000	DAU
	jalan tani sektor tanaman pangan, (sumber Dana DAK Fisik)		Mattiro Deceng	1	100.000.000	DAU
	Pendampingan peningkatan kapasitas BPD dan anggota		Bonto Marannu	1	50.000.000	DAU
TOTAL PAGU					**27.132.534.111**	

BAB V P E N U T U P

5.1 Saran dan Kesimpulan

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Renja Kecamatan Lau

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Kecamatan Lau Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Lau tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Lau Tahun 2024 masih belum sempurna,.
4. Rencana Kerja Kecamatan Lau Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Maros dan Renstra).
6. RENJA Kecamatan Lau Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.1. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan

secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat parsipati. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
6. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses

pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

7. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
8. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.
9. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
10. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lau Tahun 2024 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan seperlunya.

Maros, 10 November 2023

CAMAT LAU

MULYADI, S.STP
Pangkat : Pembina TK I, IV/b
Nip. 19770228 199612 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk sisa periode dalam satu tahun yang merupakan perubahan dari rencana kerja pokok tahun berjalan serta penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah yang diamanatkan pasal 7 UU Nomor 24 tahun 2004, memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 yang sedang berjalan serta uraian mengenai tujuan, sasaran, program/ kegiatan yang akan dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2024 yang berjalan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah yang disusun ini berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja dimasa mendatang.

Maros, 13 Juli 2024

KEPALA BADAN,

ANDI BASO ARMAN, S.IP., M.I.Kom
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19761024 200502 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistimatika penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian PD 9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 48

BAB III TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 49
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 50
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024 51

BAB IV PENUTUP 61
4.1 Catatan Penting yang perlu diperhatikan 61
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 61
4.3 Rencana Tindak Lanjut 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2024 KabupatenMaros 10

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 17

Tabel 2.3 **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 18**

Tabel 2.4 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 20

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros..... 22

Tabel 2.5 Daftar Usulan Kecamatan yang Terakomodir dalam Renja 48

Tabel 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi 49

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran PD 51

Tabel 3.3 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 54

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanahkan Pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daaerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun Sehubungan dengan itu Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu instansi kabupaten maros menyusun dokumen perencanaan dalam periode satu tahun berupa rerncana kerja perangkat Daerah (RENJA PD) Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program kegiatan serta sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Apabila ditengah Tahun Anggaran yang berjalan terdapat perubahan kebijakan yang mengharuskan untuk merubah beberapa program dan kegiatan pemerintah, maka dibuatlah Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman terhadap Renstra dan Renja Pokok perangkat daerah.

Renja Perubahan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut : (1). Tahap Persiapan; (2). Penyusunan rancangan awal Renja PD; (3) Penyusunan Rancangan; (4). Penyusunan rancangan Akhir; (5). Penetapan Renja PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-UndangNomor25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan janka Panjang Daeraha dan Rencaana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keuputsan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perencanaan dan Penganggaran dan Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 20015 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Maros Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Nomor 62)
24. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 34);
25. Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 36).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 dan Penyesuaian dari Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan dan sub kegiatan sisa tahun anggaran berjalan.
b. Menjadi dasar Penyusunan RKA Perubahan Badan Pendapatan Daerah
c. Sebagai dasar penyusunan laporan akuntabiltas kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV. P E N U T U P

Bab ini menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 (berjalan) adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi (***akan tetapi evalusi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Maros belum bisa dinarasikan karena Struktur Organisasi dan Fungsinya belum ditetapkan***).

Berikut ini disajikan realisasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros 2024 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros dan Pencapaian Renstra PD.

Tabel 2.1. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah dan Pencapaian Renstra
Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2024 KabupatenMaros

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP**										**12.90522914**		**40,195,712,239**		**803,914,244,778**	**BAPENDA**
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	**66,992,853,710**	**100**	**40,195,712,226**	**100**	**13,398,570,742**		**1,729,116,256**	**0**	**12.90522914**	**100**	**40,195,712,239**	**2,000**	**803,914,244,778**	**BAPENDA**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**60**	**40,300,000**	**36**	**24,180,000**	**12**	**8,060,000**		**0**	**0**	**0**	**36**	**24,180,000**	**720**	**483,600,000**	**BAPENDA**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	7,250,000	6	4,350,000	2	1,450,000		0	0	0	6	4,350,000	120	87,000,000	BAPENDA
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	6,500,000	3	3,900,000	1	1,300,000		0	0	0	3	3,900,000	60	78,000,000	BAPENDA

	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	5,750,000	3	3,450,000	1	1,150,000		0	0	0	3	3,450,000	60	69,000,000	BAPENDA
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	6,050,000	3	3,630,000	1	1,210,000		0	0	0	3	3,630,000	60	72,600,000	BAPENDA
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	4,250,000	3	2,550,000	1	850,000		1,404,813,256	0	165272.1478	3	2,715,272	60	54,305,443	BAPENDA
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasi kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	7,000,000	12	4,200,000	4	1,400,000		1,349,337,806	0	96381.27186	12	4,296,381	240	85,927,625	BAPENDA
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	3,500,000	6	2,100,000	2	700,000		51,475,450	0	7353.635714	6	2,107,354	120	42,147,073	BAPENDA
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Administrasi keuaangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**285**	**62,413,552,240**	**171**	**37,448,131,344**	**57**	**12,482,710,448**		**0**	**0**	**0**	**171**	**37,448,131,344**	**3,420**	**748,962,626,880**	**BAPENDA**
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4200	61,114,097,240	2520	36,668,458,344	840	12,222,819,448		0	0	0	2,520	36,668,458,344	50,400	733,369,166,880	BAPENDA
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		60	410,355,000	36	246,213,000	12	82,071,000		4,000,000	0	4.873828758	36	246,213,005	720	4,924,260,097	BAPENDA
	Pelaksanaan penatausahaan dan	Pelaksanaan penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	60	872,250,000	36	523,350,000	12	174,450,000		0	0	0	36	523,350,000	720	10,467,000,000	BAPENDA

	pengujian/verivikasi keuangan SKPD	pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	10,600,000	3	6,360,000	1	2,120,000		0	0	0	3	6,360,000	60	127,200,000	BAPENDA
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	6,250,000	54	3,750,000	18	1,250,000		0	0	0	54	3,750,000	1,080	75,000,000	BAPENDA
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**1,040,251,470**	**6**	**624,150,882**	**6**	**208,050,294**		**0**	**0**	**0**	**6**	**624,150,882**	**120**	**12,483,017,640**	**BAPENDA**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5,841,970	3	3,505,182	1	1,168,394		43,903,000	0	3757.550963	3	3,508,940	60	70,178,791	BAPENDA
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60	11,465,000	36	6,879,000	12	2,293,000		2,872,000	0	125.2507632	36	6,879,125	720	137,582,505	BAPENDA
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	211,687,500	15	127,012,500	5	42,337,500		0	0	0	15	127,012,500	300	2,540,250,000	BAPENDA
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	122,857,000	36	73,714,200	12	24,571,400		13,811,000	0	56.2076235	36	73,714,256	720	1,474,285,124	BAPENDA
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	75,000,000	36	45,000,000	12	15,000,000		0	0	0	36	45,000,000	720	900,000,000	BAPENDA

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	613,400,000	36	368,040,000	12	122,680,000		4,050,000	0	3.301271601	36	368,040,003	720	7,360,800,066	BAPENDA
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**798,500,000**	**2**	**479,100,000**	**2**	**159,700,000**		**0**	**0**	**0**	**2**	**479,100,000**	**40**	**9,582,000,000**	**BAPENDA**
	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel		30	568,500,000	18	341,100,000	6	113,700,000		6,000,000	0	5.277044855	18	341,100,005	360	6,822,000,106	BAPENDA
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	230,000,000	18	138,000,000	6	46,000,000		17,170,000	0	37.32608696	18	138,000,037	360	2,760,000,747	BAPENDA
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**2,267,000,000**	**2**	**1,360,200,000**	**2**	**453,400,000**		**268,840,000**	**0**	**59.29422144**	**2**	**1,360,200,059**	**40**	**27,204,001,186**	**BAPENDA**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	11,000,000	36	6,600,000	12	2,200,000		1,540,000	0	70	36	6,600,070	720	132,001,400	BAPENDA
	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	2,256,000,000	36	1,353,600,000	12	451,200,000		267,300,000	0	59.24202128	36	1,353,600,059	720	27,072,001,185	BAPENDA
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**2**	**433,250,000**	**2**	**259,950,000**	**2**	**86,650,000**		**11,560,000**	**0**	**13.34102712**	**2**	**259,950,013**	**40**	**5,199,000,267**	**BAPENDA**
	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	333,250,000	57	199,950,000	57	66,650,000		0	0	0	57	199,950,000	1,140	3,999,000,000	BAPENDA
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	100,000,000	3	60,000,000	3	20,000,000		0	0	0	3	60,000,000	60	1,200,000,000	BAPENDA
	Meningkatnya Kontribusi		**Persentase PAD Terhadap Pendapatan**															**BAPENDA**

	Pendapatan Asli Daerah																	
	Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah		**Indeks Kepausan Masyarakat**															**BAPENDA**
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase Realisasi Pendapatan**	**100**	**5,555,401,000**	**48.22**	**2,348,419,900**	**100**	**1,034,842,800**	**25.94**	**426,669,000**	**2593915344**	**41.2303202**	**74**	**2,348,419,941**	**1,483**	**46,968,398,825**	**BAPENDA**
	Pengelolaan pendapatan daerah	**Pengelolaan pendapatan daerah**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**350**	**5,555,401,000**	**11**	**2,348,419,900**	**70**	**1,034,842,800**	**18.16**	**426,669,000**	**2593915344**	**41.2303202**	**37**	**2,348,419,941**	**739**	**46,968,398,825**	**BAPENDA**
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	15	627,500,000	12	246,400,000	1	125,500,000	0.5	54,000,000	50	43.02788845	62	246,400,043	1,240	4,928,000,861	BAPENDA
	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	15	271,064,000	12	189,557,000	1	27,169,000	0.14	964,000	14	3.548161508	26	189,557,004	520	3,791,140,071	BAPENDA
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	21	65,200,000	2	10,000,000	7	18,400,000	0	0	0	0	2	10,000,000	40	200,000,000	BAPENDA
	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	60	935,000,000	32	358,752,000	12	187,000,000	0	0	0	0	32	358,752,000	640	7,175,040,000	BAPENDA
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18	828,250,000	15	254,744,400	1	165,650,000	0.14	18,750,000	14	11.31904618	29	254,744,411	580	5,094,888,226	BAPENDA
	Penetapan wajib pajak daerah	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	60	2,006,769,000	33	804,658,500	12	401,353,800	5	316,085,000	41.66666667	78.7547047	75	804,658,579	1,493	16,093,171,575	BAPENDA
	Peneltiian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Peneltiian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	36	21,450,000	0	0	12	7,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	BAPENDA

	Penagihan pajak daerah	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	60	235,100,000	23	96,040,000	12	47,020,000	5	24,070,000	41.66666667	51.19098256	65	96,040,051	1,293	1,920,801,024	BAPENDA
	Pengendalian, pemeriksanaan dan penagwasan pajak daerah	Pengendalian, pemeriksanaan dan penagwasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	60	565,068,000	33	398,268,000	12	55,600,000	0.25	12,800,000	2.083333333	23.02158273	35	398,268,023	702	7,965,360,460	BAPENDA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Maros yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kemenangannya adalah :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan 6 (enam) indikator dalam melaksanakan kinerja pelayanan yaitu :

1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah. Capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 17,86% dari target sebesar 17,86% atau terealisasi 100%, sedangkan tahun 2023 capaian indikator ini adalah sebesar 18,6% dari target sebesar 18,6% atau terealisasi sebesar 100%.
2. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya. Indikator ini tidak terdapat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Maros sehingga tidak terdapat pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Capaian indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 0,105% sedangkan pada tahun 2023 capaian sebesar 0,114%.
3. Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB. Sama seperti indikator kedua diatas, indikator ini tidak terdapat pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Maros sehingga tidak terdapat pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Capaian indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 0,066% sedangkan pada tahun 2023 capaian sebesar 0,072%.
4. Persentase Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah. Capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 17,86% dari target sebesar 17,86% atau terealisasi 100%, sedangkan tahun 2023 capaian indikator ini adalah sebesar 18,6% dari target sebesar 18,6% atau terealisasi sebesar 100%.
5. Persentase potensi Penerimaan Daerah yang Terealisasi. Capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 84,93 dari target sebesar 84,90, sedangkan di tahun 2023 tercapai sebesar 96,79 dari target sebesar 88,33

Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS

No	Indikator Kinerja	SPM	TPB	IKK (RPJMD dan LPPD)	IKU	Satuan	Target				Realisasi		Proyeksi			Catatan analisis
							2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15		16	17
1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.		√			Persen	24.51	26.64	28.77	30.9	1.14	0.57	0.29	0.14	0.07	Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan peningkatan pendapatan pemerintah tidak signifikan
2	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.		√			Persen	0.01	0.01	0.02	0.02	0.072	0.075	0.08	0.08	0.08	
3	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			√		Persen	0	0	0	0	4.6	1.6	0.56	0.19	0.07	IKK LPPD ini tidak diakomodir dalam dokumen perencanaan Bapenda Maros karena penganggaran bukan merupakan urusan Bapenda
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah			√	√	Persen	18.6	19.38	21.09	22.14	18	19.83	21.85	24.07	26.51	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Minimal Baik				√	Persen	83	84	85	86	82.11	84.3	86.55	88.86	91.23	

Tabel 2.3
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAROS

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	7	8	9	12	13	15	16
1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.		22.39	24.39	1.14	0.57	5.09	2.34
2	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.		0.01	0.01	0.072	0.075	720.00	750.00
3	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		0	0	4.6	1.6	100	100
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah		17.86	18.6	18	19.83	100.78	106.61
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Minimal Baik		82	83	82.11	84.3	100.13	101.57
TOTAL CAPAIAN KINERJA							185.20	192.10

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan sektor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, diperoleh gambaran tentang adanya isu-isu strategis yang harus dihadapi pada Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

- Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 akan sedikit berdampak kepada penerimaan pajak khususnya pajak reklame dikarenakan gratisnya pajak reklame untuk kepentingan kampanye pemilu.
- Belum adanya SOP yang dibuat terkait perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah
- Belum adanya penetapan uraian tugas dan fungsi Bidang perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah
- Belum optimalnya SDM Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
- Belum adanya Ruang Pelayanan Publik yang sesuai Standar Pelayanan Publik

2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 akan sedikit berdampak kepada penerimaan pajak khususnya pajak reklame dikarenakan gratisnya pajak reklame untuk kepentingan kampanye pemilu.
- Belum adanya SOP yang dibuat terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Belum adanya penetapan uraian tugas dan fungsi Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Belum optimalnya SDM Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pajak Daerah

- Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 akan sedikit berdampak kepada penerimaan pajak khususnya pajak reklame dikarenakan gratisnya pajak reklame untuk kepentingan kampanye pemilu.
- Belum adanya SOP yang dibuat terkait Pengembangan dan Evaluasi Pajak Daerah
- Belum adanya penetapan uraian tugas dan fungsi Pengembangan dan Evaluasi Pajak Daerah
- Belum optimalnya SDM Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pajak Daerah.

4. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

- Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 akan sedikit berdampak kepada penerimaan pajak khususnya pajak reklame dikarenakan gratisnya pajak reklame untuk kepentingan kampanye pemilu.

- Belum adanya SOP yang dibuat terkait Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- Belum adanya penetapan uraian tugas dan fungsi Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- Belum optimalnya SDM Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- Updating peta bidang pengelola PBB dan BPHTB belum mencakup 14 Kecamatan di wilayah Kabupaten Maros.

Tabel 2.4

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Peluang	Rekomendasi
1	Terjadi penurunan realisasi pendapatan pemerintah sebagai proporsi PDRB menurut sumbernya.	a. Tingginya peningkatan nilai indikatif PDRB Kabupaten Maros menurut sumbernya setiap tahunnya. b. Tingginya target indikator ini yang dituangkan pada dokumen perencanaan	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB	Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pajak setiap tahunnya sebagai salah satu komponen pendapatan pemerintah	a. Agar BPS Maros melakukan evaluasi terhadap niliai indikatif PDRB Kabupaten Maros menurut sumbernya. b. Menurunkan target indikator dalam dokumen perencanaan yang akan datang (Renstra PD)
2	Tidak berbanding lurus antara peningkatan nilai indikatif PDRB Kab. Maros menurut sumbernya dengan peningkatan PAD (termasuk penerimaan pajak) setiap tahunnya	Peningkatan signifikan nilai indikatif PDRB Kab. Maros menurut sumbernya.	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Realisasi PAD dari sektor pajak yang dikelola oleh Bapenda Maros tiap tahunnya mengalami peningkatan yang diperoleh dari upoaya dalam memaksimalkan potensi pajak daerah	a. Agar BPS Maros melakukan evaluasi terhadap niliai indikatif PDRB Kabupaten Maros b. Menigkatkan target indikator kinerja pada dokumen perencanaan (renstra PD)
3	Terjadi penurunan Deviasi realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Peningkatan signifikan jumlah anggaran PAD untuk tahun 2023 untuk beberapa OPD yang mengelola retribusi sebagai bagian dari PAD meskipun nilai realisasi PAD juga sedikit meningkat dari tahun sebelumnya	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pajak setiap tahunnya sebagai salah satu komponen pendapatan pemerintah	Agar tiap OPD yang mengelola retribusi (PAD) dapat memaksimalkan potensi-potensi PAD yang ada di masing-masing OPD.

4	Capaian PAD di sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tidak maksimal	Banyak dari objek pajak MBLB yang tidak terdata Perusahaan pengelolanya	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Penyusunan Peraturan Bupati Maros sebagai turunan dari Perda Kabupaten Maros No. 1 Tahun 2024 Tentang Tentang Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan mampu dijadikan sebagai landasan dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah	Perlunya mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan pajak MBLB di wilayahnya.
5	Masih kurangnya fasilitas pendukung dalam memberikan pelayanan pajak dan fasilitas dalam memaksimalkan potensi pajak daerah	Anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang dianggap kurang	Indeks Kepuasan Masyarakat minimal baik	Walaupun fasilitas pelayanan yang kurang memadai, kualitas pelayanan dapat dimaksimalkan melalui kemudahan prosedur dalam layanan perpajakan.	Peningkatan fasilitas layanan perpajakan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.4 (T-C.31.)
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maros

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**14,433,413,542.00**							**0.00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14,433,413,542.00**							**0.00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**14,433,413,542.00**							**0.00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	100	100	**-**	**13,160,513,542.00**						**-**	**0.00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	12	100	12	-	8,010,000.00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	0 Dokumen	1,450,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	0 Dokumen	1,300,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTA	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

											HAN YANG BERDAMP AK PADA P ELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK					
	5.02.01. 2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	0 Dokume n	1,150, 000.00	Kab. Maros , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5. PENING KATAN KUALITAS TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERDAMP AK PADA P ELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01. 2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	0 Dokume n	1,210,000.00	Kab. Maros , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5. PENING KATAN KUALITAS TATA KELOLA P EMERINTA	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

											HAN YANG BERDAMP AK PADA P ELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK					
	5.02.01. 2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	0 Dokume n	800,000.00	Kab. Maros , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5. PENING KATAN KUALITAS TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG BERDAMP AK PADA P ELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01. 2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4	4	4	0 Laporan	1,400,000.00	Kab. Maros , Semu a Keca matan , Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	01.Peningk atan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif 5. PENING KATAN KUALITAS TATA KELOLA P EMERINTA HAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

			Realisasi Kinerja SKPD									BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	2	0 Laporan	700,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	57	12	57	-	11,030,229,142.00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840	696	840	0 Orang/bulan	10,770,338,142.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	0 Dokumen	82,071,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	0 Dokumen	174,450,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	0 Laporan	2,120,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18	12	18	0 Laporan	1,250,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	0	1	-	480,000.00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	0	1	0 Laporan	480,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60	0	60	-	15,000,000.00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	0	60	0 Paket	15,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	6	5	6	-	1,407,044,400.00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4	1	0 Paket	1,200,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	0	12	0 Paket	2,293,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	5	0 Paket	42,500,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	4	12	0 Paket	24,571,400.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	0 Laporan	15,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	12	0 Laporan	122,680,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	2	11	2	-	159,700,000.00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	0	6	0 Unit	113,700,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	17	6	0 Unit	46,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	2	2	-	453,400,000.00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	0 Laporan	2,200,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	0 Laporan	451,200,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik	2	2	2	-	86,650,000.00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57	45	57	0 Unit	66,650,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	2	3	0 Unit	20,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Pendapatan**	**100**	100	100	**-**	**1,272,500,000.00**						**-**	**0.00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	70	8	70	-	1,272,500,000.00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA P	-	-	0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

											EMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	1	0 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	1	0 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	0	12	0 Laporan	50,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7	1	7	0 Unit	50,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	2	12	0 Laporan	80,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	12	1	0 Laporan	100,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	100	0	100	0 Obyek Pajak	75,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	12	12	0 Dokumen	400,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	12	0	12	0 Layanan	50,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	0	12	0 Dokumen	7,500,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	12	0 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12	0	12	0 Dokumen	10,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	2	12	0 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	0	12	0 Laporan	50,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

												BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK				
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	0	12	0 Laporan	100,000,000.00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif 5. PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERDAMPAK PADA PELAYANAN DAN BERBASIS IPTEK	-		0.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H							**14,433,413,542.00**							**0.00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Assosiasi-assosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, akan tetapi " **tidak ada usulan Kecamatan / hasil Musrenbang"**untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

TABEL 2.5 (T-C.32)

DAFTAR USULAN KECAMATAN YANG TERAKOMODIR DALAM RENJA PD

TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	USULAN	VOLUME	LOKASI	KET
-	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi (TERDAPAT DALAM RKPD)

a. Kebijakan Nasional

Berdasarkan penelaahan atas rencana strategis Kebijakan Nasional pada Urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Maros mengidentifiaksi dan memetapkan fokus pengelolaan Pendapatan Daerah dengan fokus kepada : Perencanaan, Pengembangan, Pengelolaan, Pengendalian dan Evaluasi serta Pengelolaan System Informasi Pendapatan Daerah, sehingga mampu meningatkan Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

NO	KEBIJAKAN NASIONAL	KEBIJAKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	KEBIJAKAN KABUPATEN MAROS	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Inovatif	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan	100%	100%

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana kegiatan pembangunan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Maros, yakni : Maros Sejahtera, Religius dan Bedaya Saing'', sedangkan misi yang diampu sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026, dan misi yang dampuh adalah Misi 1 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Birokrasi dan pelayanan Publik''.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros disusun berdasarkan Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros 2021 – 2026 serta permasalahan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dengan memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Maros.

Pembangunan pada aspek daya saing daerah yang menitik beratkan pada pemanfaatan Ruang/Wilayah Kabupaten Maros, utamanya pada wilayah yang menjadi kawasan-kawasan potensial guna menunjang kesejahteraan masyarakat berupa :

- Kawasan Pedesaan (persawahan, perikanan)
- Kawasan Perkotaan (dunia Usaha dan Industri)
- Kawasan Kuliner
- Kawasan Wisata
- Kawasan Pesisir dan Pantai

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih masing-masing misi.

Adapun Tujuannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah;
2. Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Baik dan Bersih dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

b. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam ukuran waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	TOLAK UKUR
1	MENINGKATKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	MENINGKATNYA KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
2	MEWUJUDKAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN YANG BAIK DAN BERSIH DILINGKUNGAN BAPENDA	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDAPATAN	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT MINIMAL BAIK

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang mengalami perubahan

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian dikarenakan adanaya sedikit perubahan kebijakan yang berakibat pada berubahnya kebutuhan di beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu. Dilakukan perbaikan kode rekening belanja dari yang sebelumnya Belanja Makanan dan Minuman Rapat digeser ke kode rekening belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu.
b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Mebel. Pagu sub kegiatan sebesar 113,700,000 diusulkan berkurang menjadi 83,700,000 atau berkurang 30,000,000 dari penghapusan belanja modal alat pendingin untuk dialihkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk belanja modal personal komputer dan peralatan personal komputer. Pengalihan anggaran tersebut dikarenakan pengadaan alat pendingin (AC Standing) dengan volume 1 unit dianggap kurang optimal dan akan dianggarakan pada anggaran tahun 2025 dengan volume yang lebih banyak.
c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sub kegiatan sebesar 46,000,000 diusulkan bertambah menjadi 80,700,000 atau bertambah 34,700,000 dari penambahan belanja modal komputer unit dan belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use). Penambahan ini dimaksudkan untuk mendukung proses pelayanan yang lebih efektif dengan berbasis pemanfaatan tekhnologi.
d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu sub kegiatan sebesar 46,000,000 diusulkan berkurang menjadi 74,150,000 atau

berkurang 12,500,000. Pengurangan ini dialihkan untuk mencukupkan pagu Belanja Modal di beberapa kegiatan seperti Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dan kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah.

e. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah. Pagu kegiatan sebesar 125,000,000 diusulkan berkurang menjadi 106,947,500 atau berkurang 7,800,000. Pengurangan tersebut dimaksudkan untuk menggeser sebagian anggaran ke sub kegiatan Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan anggaran.
f. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. Pagu kegiatan sebesar 27,169,000 diusulkan bertambah menjadi 46,731,500 atau bertambah 19,562,500. Penambahan kebutuhan anggaran tersebut disebabkan karena adanya penambahan belanja jasa tenaga ahli penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Maros tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
g. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah. Pagu kegiatan sebesar 18,400,000 diusulkan bertambah menjadi 21,900,000 atau bertambah 3,500,000. Penambahan kebutuhan anggaran tersebut disebabkan karena adanya penambahan belanja modal alat ukur (meteran air bawah tanah) untuk mendukung pengelolaan pajak air bawah tanah.
h. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Pagu kegiatan sebesar 187,000,000 diusulkan berkurang menjadi 160,480,000 atau berkurang sebesar 26,520,000. Anggaran yang dikurangi tersebut digeser ke sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
i. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah. Pagu kegiatan sebesar 165,650,000 diusulkan bertambah menjadi 192,170,000 atau bertambah sebesar 26,520,000. Penambahan anggaran tersebut diperoleh dari penambahan anggaran belanja cetak spanduk/baliho dan belanja perjalanan dinas luar daerah.
j. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah. Pagu sub kegiatan sebesar 7,150,000 diusulkan bertambah menjadi 8,750,000 atau bertambah sebesar 1,600,000. Penambahan ini berasal dari penambahan belanja makanan dan minuman rapat untuk pelaksanaan verifikasi laporan pajak daerah dan kegiatan Rapat Koordinasi Realisasi Penerimaan PAD yang dilaksanakan setiap bulan.
k. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Sub Kegiatan Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah. Pagu sub kegiatan sebesar 55,600,000 diusulkan bertambah menjadi 57,290,000 atau bertambah sebesar 1,690,000. Penambahan ini berasal dari penambahan belanja perjalanan dinas

yang tidak dapat mengakomodir kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan pajak/objek pajak daerah untuk untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah.

Tabel 3.3
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2024

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.	**100**	**100**	**13,398,570,742**	**13,398,570,742**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**		PAD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	**12**	**12**	**8,060,000**	**8,060,000**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**		PAD
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	1,450,000	1,450,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1,300,000	1,300,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1,150,000	1,150,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1,210,000	1,210,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	850,000	850,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	4	1,400,000	1,400,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	700,000	700,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	**57**	**57**	**12,482,710,448**	**12,482,710,448**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**		PAD
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840	840	12,222,819,448	12,222,819,448	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12	12	82,071,000	82,071,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD

	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	174,450,000	174,450,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2,120,000	2,120,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	1,250,000	1,250,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	**6**	**6**	**208,050,294**	**208,050,294**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**		PAD
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1,168,394	1,168,394	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	2,293,000	2,293,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	5	42,337,500	42,337,500	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD

	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	24,571,400	24,571,400	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	15,000,000	15,000,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	122,680,000	122,680,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	**2**	**2**	**159,700,000**	**164,400,000**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**		PAD
	Pengadaan mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	6	6	113,700,000	83,700,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	12	46,000,000	80,700,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**2**	**2**	**453,400,000**	**453,400,000**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**		PAD
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2,200,000	2,200,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD

	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	451,200,000	451,200,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**2**	**2**	**86,650,000**	**74,150,000**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**		PAD
	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	57	55	66,650,000	54,150,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3	3	20,000,000	20,000,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan	**100**	**100**	**1,034,842,800**	**1,042,642,800**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**		PAD
	Pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	**70**	**70**	**1,034,842,800**	**1,042,642,800**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**	**Seluruh Wilayah Kabupaten Maros**		PAD
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1	1	125,500,000	106,947,500	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD

	Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	1	27,169,000	46,731,500	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7	8	18,400,000	21,900,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	187,000,000	160,480,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1	1	165,650,000	192,170,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12	12	401,353,800	401,353,800	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Peneltiian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12	12	7,150,000	8,750,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD
	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12	12	47,020,000	47,020,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD

	Pengendalian, pemeriksanaan dan penagwasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	12	55,600,000	57,290,000	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros	Seluruh Wilayah Kabupaten Maros		PAD

BAB IV
PENUTUP

4.1 Catatan Penting Yang Perlu Dapat Diperhatikan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros yang memuat program dan kegiatan pembangunan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat. Rancangan program dan kegiatan Tahun 2024 disusun dengan maksud agar sasaran pembangunan Pendapatan Daerah di Kabupaten Maros pada tahun 2024 dapat tercapai.

Proses perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan-kegiatan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dan wajib pajak lainnya serta berbagai elemen yang terkait untuk secara bersama dalam satu manajemen program. Karena masyarakat adalah merupakan pelaku utama dan sekaligus penerima manfaat, maka pelibatannya dalam setiap tahapan pembangunan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi sangat penting. Pelibatan tersebut diharapkan akan melahirkan tumbuhnya rasa memiliki dan dapat mendorong partisipasi masyarakat, sehingga peluang bagi peningkatan taraf hidup masyarakat lebih terbuka.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 akan sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi aktif dari para stakeholder terkait terutama pelaku usaha dan wajib pajak , termasuk dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah melalui dana APBD maupun dari Pemerintah Propinsi melalui dana APBD I serta dana Pusat (DAU) sebagai Dana Transfer.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun Keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 yang memuat Perubahan Kerangka Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Maros beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja – SKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Perubann Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara SKPD Perubahan Tahun 2024.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah dalam pelaksanaannya, yaitu :

A. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan seluruh Stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program–program Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ini dengan sebaik–baiknya;
B. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Perubahan (RAPBD P), Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran, sebagaimana yang telah diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
C. Dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu membuat Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD);

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Diperlukan peningkatan kapasitas aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan formal,

bimbingan teknis serta seminar – seminar tentang perencanaan pembangunan;

b. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam musrenbang;
c. Mengintensifkan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka sinergitas perencanaan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
d. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
e. Menjadikan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar perencanaan yang lebih baik dan tepat sasaran untuk tahun – tahun berikutnya.

Maros, 2024

KEPALA BADAN,

ANDI BASO ARMAN, S.IP., M.I.Kom
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19761024 200502 1 004

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun dan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah yang diamanatkan pasal 7 UU Nomor 24 tahun 2004, memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 serta uraian mengenai tujuan, sasaran, program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah yang disusun ini berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai amanat Undang-Undang tersebut dan Peraturan Bupati Maros Nomor 86 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maros, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dimasa mendatang.

Maros, 31 Juli 2024

Kepala Badan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Maros,

ANDI SAMSOPHYAN, SE.MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19710903 199603 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian PD 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 26

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 279

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 34

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 76

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 77

3.1 Identifikasi Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi…….. 77

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 77

3.3 Program dan Kegiatan 788

BAB IV PENUTUP 97

4.1 Catatan Penting Yang Perlu Dapat Diperhatikan 97

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 98

4.3 Rencana Tindak Lanjut 99

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanahkan Pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Sehubungan dengan itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu instansi kabupaten maros menyusun dokumen perencanaan dalam periode satu tahun berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program kegiatan serta sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros disusun dengan tahapan sebagai berikut : (1). Tahap Persiapan; (2). Penyusunan rancangan awal Renja PD; (3) Penyusunan Rancangan; (4). Penyusunan rancangan Akhir; (5). Penetapan Renja PD.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024, dan tetap berpedoman pada RENSTRA PD. Kemudian Renja PD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentangPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

15. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perencanaan dan Penganggaran dan Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 20015 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3);

24. Peraturan Bupati Maros Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026;
25. Peraturan Bupati Maros Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros;
26. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 36)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan dan sub kegiatan
b. Menjadi dasar Penyusunan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros
c. Sebagai dasar penyusunan laporan akuntabiltas kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan uraian tabel rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

BAB V. P E N U T U P

Bab ini menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros tahun lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realisasi Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 dan realisasi renja tahun berjalan sampai dengan tahun 2024 dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Maros

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		**Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**										**38.15**		**177,752,139,326**		**68**	**BKAD**
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**262,830,942,400**	**100**	**157,698,565,440**	**100**	**52,566,188,480**	**100**	**20,053,573,886**	**100**	**38.15**	**100**	**177,752,139,326**	**100**	**68**	**BKAD**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55**	**135,885,000**	**33**	**81,531,000**	**11**	**27,177,000**	**5**	**11,970,000**	**45.45**	**44.04**	**38**	**93,501,000**	**69**	**69**	**BKAD**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	10	21,200,000	6	12,720,000	2	4,240,000	0	4,235,000	.00	99.88	6	16,955,000	60	80	BKAD
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	5	23,250,000	3	13,950,000	1	4,650,000	0	0	0.00	0.00	3	13,950,000	60	60	BKAD

	SKPD																
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	5	22,450,000	3	13,470,000	1	4,490,000	0	0	0.00	0.00	3	13,470,000	60	60	BKAD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5	15,550,000	3	9,330,000	1	3,110,000	1	0	100.00	0.00	4	9,330,000	80	60	BKAD
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	5	14,760,000	3	8,856,000	1	2,952,000	0	0	0.00	0.00	3	8,856,000	60	60	BKAD
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	5	19,125,000	3	11,475,000	1	3,825,000	1	3,825,000	100.00	100.00	4	15,300,000	80	80	BKAD
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	20	19,550,000	12	11,730,000	4	3,910,000	1	3,910,000	25.00	100.00	13	15,640,000	65	80	BKAD
	Administrasi keuangan perangkat daerah	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**160**	**118,882,387,665**	**96**	**71,329,432,599**	**32**	**23,776,477,533**	**19**	**9,184,246,127**	**59.38**	**38.63**	**115**	**80,513,678,726**	**72**	**68**	**BKAD**
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	4,340	113,934,295,165	2604	68,360,577,099	868	22,786,859,033	434	8,869,749,127	50.00	38.92	3,038	77,230,326,226	70	68	BKAD
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	567,932,500	36	340,759,500	12	113,586,500	5	76,377,000	41.67	67.24	41	417,136,500	68	73	BKAD
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	5	3,845,050,000	3	2,307,030,000	1	769,010,000	0	202,640,000	0.00	26.35	3	2,509,670,000	60	65	BKAD
	Koordinasi dan pelaksaaan akuntansi SKPD	Koordinasi dan pelaksaaan akuntansi SKPD	Koordinasi dan pelaksaaan akuntansi SKPD	5	168,450,000	3	101,070,000	1	33,690,000	0	19,448,000	0.00	57.73	3	120,518,000	60	72	BKAD

	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	135,200,000	3	81,120,000	1	27,040,000	0	0	0.00	0.00	3	81,120,000	60	60	BKAD
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	5	74,295,000	3	44,577,000	1	14,859,000	0	6,788,000	0.00	45.68	3	51,365,000	60	69	BKAD
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	10	134,790,000	6	80,874,000	2	26,958,000	0	9,244,000	0.00	34.29	6	90,118,000	60	67	BKAD
	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5	22,375,000	3	13,425,000	1	4,475,000	0	0	0.00	0.00	3	13,425,000	60	60	BKAD
	Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah	**Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah**	**Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah**	**25**	**75,270,000**	**15**	**45,162,000**	**5**	**15,054,000**	**1**	**1,145,000**	**20.00**	**7.61**	**16**	**46,307,000**	**64**	**62**	**BKAD**
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	5	12,537,500	3	7,522,500	1	2,507,500	0	0	0.00	0.00	3	7,522,500	60	60	BKAD
	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Pengamanan barang milik daerah SKPD	5	15,135,000	3	9,081,000	1	3,027,000	0	1,145,000	0.00	37.83	3	10,226,000	60	68	BKAD
	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	5	9,160,000	3	5,496,000	1	1,832,000	1	0	100.00	0.00	4	5,496,000	80	60	BKAD
	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik	5	18,100,000	3	10,860,000	1	3,620,000	0	0	0.00	0.00	3	10,860,000	60	60	BKAD

	barang milik daerah pada SKPD	daerah pada SKPD	daerah pada SKPD															
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	5	20,337,500	3	12,202,500	1	4,067,500	0	0	0.00	0.00	3	12,202,500	60	60	BKAD
	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	**Administrasi kepegawaian perangkat dasrah**	**Administrasi kepegawaian perangkat dasrah**	**400**	**228,500,000**	**240**	**137,100,000**	**80**	**45,700,000**	**65**	**8,200,000**	**81.25**	**17.94**	**305**	**145,300,000**	**76**	**64**	**BKAD**
	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	400	187,500,000	240	112,500,000	80	37,500,000	60	0	75.00	0.00	300	112,500,000	75	60	BKAD
	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	60	41,000,000	36	24,600,000	12	8,200,000	5	8,200,000	41.67	100.00	41	32,800,000	68	80	BKAD
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Administrasi umum perangkat daerah**	**7**	**2,614,595,625**	**7**	**1,568,757,375**	**620**	**522,919,125**	**320**	**228,797,915**	**51.61**	**43.75**	**327**	**1,797,555,290**	**4,671**	**69**	**BKAD**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50	49,049,375	30	29,429,625	10	9,809,875	4	0	40.00	0.00	34	29,429,625	68	60	BKAD
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	5	125,012,500	3	75,007,500	1	25,002,500	0	4,337,500	0.00	17.35	3	79,345,000	60	63	BKAD
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	145	330,658,750	87	198,395,250	29	66,131,750	10	47,060,000	34.48	71.16	97	245,455,250	67	74	BKAD
	Penyediaan barang cetakan	Penyediaan barang cetakan dan	Penyediaan barang cetakan dan	35	90,000,000	21	54,000,000	7	18,000,000	3	4,999,500	42.86	27.78	24	58,999,500	69	66	BKAD

	dan penggandaan	penggandaan	penggandaan															
	Penyediaan bahan/material	Penyediaan bahan/material	Penyediaan bahan/material	5	50,000,000	3	30,000,000	1	10,000,000	0	0	0.00	0.00	3	30,000,000	60	60	BKAD
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	60	300,000,000	36	180,000,000	12	60,000,000	5	26,200,000	41.67	43.67	41	206,200,000	68	69	BKAD
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2,800	1,669,875,000	1680	1,001,925,000	560	333,975,000	298	146,200,915	53.21	43.78	1,978	1,148,125,915	71	69	BKAD
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**10**	**2,600,000,000**	**6**	**1,560,000,000**	**2**	**520,000,000**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**6**	**1,560,000,000**	**60**	**60**	**BKAD**
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	5	2,000,000,000	3	1,200,000,000	1	400,000,000	0	0	0.00	0.00	3	1,200,000,000	60	60	BKAD
	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel	5	600,000,000	3	360,000,000	1	120,000,000	0	0	0.00	0.00	3	360,000,000	60	60	BKAD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**15**	**123,522,154,205**	**9**	**74,113,292,523**	**3**	**24,704,430,841**	**3**	**9,690,818,251**	**100.00**	**39.23**	**12**	**83,804,110,774**	**80**	**68**	**BKAD**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	60	188,500,000	36	113,100,000	12	37,700,000	5	17,749,000	41.67	47.08	41	130,849,000	68	69	BKAD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	108,690,678,205	36	65,214,406,923	12	21,738,135,641	5	8,964,076,451	41.67	41.24	41	74,178,483,374	68	68	BKAD

	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	15	14,642,976,000	9	8,785,785,600	3	2,928,595,200	1	708,992,800	33.33	24.21	10	9,494,778,400	67	65	BKAD
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**20**	**14,772,149,905**	**12**	**8,863,289,943**	**4**	**2,954,429,981**	**2**	**928,396,593**	**50.00**	**31.42**	**14**	**9,791,686,536**	**70**	**66**	**BKAD**
	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	10	11,062,700,000	6	6,637,620,000	2	2,212,540,000	0	757,028,738	0.00	34.22	6	7,394,648,738	60	67	BKAD
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	30	3,055,699,905	18	1,833,419,943	6	611,139,981	2	163,057,855	33.33	26.68	20	1,996,477,798	67	65	BKAD
	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	155	153,750,000	93	92,250,000	31	30,750,000	3	8,310,000	9.68	27.02	96	100,560,000	62	65	BKAD
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	5	500,000,000	3	300,000,000	1	100,000,000	0	0	0.00	0.00	3	300,000,000	60	60	BKAD

	Meningkatnya Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		**Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**															**BKAD**
	Meningkatnya Daya Serap Anggaran Dalam APBD		**Indeks Penyerapan Anggaran**															**BKAD**
	Pengelolaan Keuangan Daerah	**Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target**	**100**	**2.037.196.561.384**	**67.22**	**205,646,602,388**	**100**	**159,571,196,850**	**100**	**48,802,406,985**	**100**	**31**	**84**	**254,449,009,373**	**84**	**12**	**BKAD**
	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	**Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Jumlah Dokumen koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**1,185**	**3,940,083,750**	**142**	**943,197,000**	**237**	**788,016,750**	**75**	**83,915,000**	**31.65**	**10.65**	**217**	**1,027,112,000**	**18**	**26**	**BKAD**
	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10	77,300,000	6	28,299,000	2	15,460,000	0	0	0.00	0.00	6	28,299,000	60	37	BKAD
	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10	77,427,500	5	28,299,000	2	15,485,500	0	0	0.00	0.00	5	28,299,000	50	37	BKAD
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	195	39,130,000	1	19,722,000	39	7,826,000	12	0	30.77	0.00	13	19,722,000	7	50	BKAD
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	195	32,130,000	26	12,471,000	39	6,426,000	12	3,000,000	30.77	46.69	38	15,471,000	19	48	BKAD

	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	195	38,880,000	21	9,866,000	39	7,776,000	12	0	30.77	0.00	33	9,866,000	17	25	BKAD
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	195	38,880,000	46	17,001,000	39	7,776,000	12	0	30.77	0.00	58	17,001,000	30	44	BKAD
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tenatng APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tenatng APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerahtentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	5	1,376,631,250	4	313,120,000	1	275,326,250	0	0	0.00	0.00	4	313,120,000	80	23	BKAD
	Koordinasi dan penyusunan peratuan daerah tentang perubahan APBD dan pertauran kepala daerah tentang penjabaran prubahan APBD	Koordinasi dan penyusunan peratuan daerah tentang perubahan APBD dan pertauran kepala daerah tentang penjabaran prubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5	1,542,381,250	5	295,724,000	1	308,476,250	0	66,300,000	0.00	21.49	5	362,024,000	100	23	BKAD
	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	60	110,397,500	1	10,771,000	12	22,079,500	5	8,595,000	41.67	38.93	6	19,366,000	10	18	BKAD
	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	60	411,236,250	1	98,296,600	12	82,247,250	5	0	41.67	0.00	6	98,296,600	10	24	BKAD

	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	60	100,020,000	0	49,930,000	12	20,004,000	5	0	41.67	0.00	5	49,930,000	8	50	BKAD
	Pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	195	95,670,000	0	59,697,400	39	19,134,000	12	6,020,000	30.77	31.46	12	65,717,400	6	69	BKAD
	Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	**Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**340**	**1,287,127,500**	**47**	**463,961,910**	**68**	**257,425,500**	**28**	**104,370,000**	**41.18**	**40.54**	**75**	**568,331,910**	**22**	**44**	**BKAD**
	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	60	92,020,000	3	71,686,000	12	18,404,000	5	18,180,000	41.67	98.78	8	89,866,000	13	98	BKAD
	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas di SPD	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas di SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60	28,800,000	2	39,140,000	12	5,760,000	5	5,600,000	41.67	97.22	7	44,740,000	12	155	BKAD
	Penatausahaan pembiayaan daerah	Penatausahaan pembiayaan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	60	216,400,000	2	73,360,000	12	43,280,000	5	3,720,000	41.67	8.60	7	77,080,000	12	36	BKAD

	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi , monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi , monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20	575,982,500	24	179,626,200	4	115,196,500	2	34,227,000	50.00	29.71	26	213,853,200	130	37	BKAD
	Koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan trnasaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga kuangan bukan bank	Koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan trnasaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga kuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	20	85,265,000	8	21,936,000	4	17,053,000	1	0	25.00	0.00	9	21,936,000	45	26	BKAD

	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetora perhitungan fihak ketiga (PFK)	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetora perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lapora Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	60	233,900,000	15	49,254,000	12	46,780,000	5	42,643,000	41.67	91.16	20	91,897,000	33	39	BKAD
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan	60	54,760,000	5	28,959,710	12	10,952,000	5	0	41.67	0.00	10	28,959,710	17	53	BKAD

			Instansi Terkait															
	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	**Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**41 5**	**1.355.96 8.996. 756**	**99**	**1,435,37 9,900**	**83**	**793,658, 000**	**2 5**	**219,386 ,000**	**30. 12**	**27. 64**	**12 4**	**1,654,765, 900**	**30**	**0**	**BKAD**
	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	60	93,690,0 00	21	54,377,0 00	12	18,738,0 00	5	0	41. 67	0.0 0	26	54,377,00 0	43	58	BKAD
	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	60	51,785,0 00	6	30,825,5 00	12	10,357,0 00	5	0	41. 67	0.0 0	11	30,825,50 0	18	60	BKAD
	Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semsteran	Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semsteran	Jumlah Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan	60	325,065, 000	17	24,834,1 00	12	65,013,0 00	5	0	41. 67	0.0 0	22	24,834,10 0	37	8	BKAD

			dan Semesteran															
	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	60	1,406,057,500	5	392,834,400	12	281,211,500	5	219,386,000	41.67	78.01	10	612,220,400	17	44	BKAD
	Koordinasi dan penyusunan rancanagan peraturan daerah tenatnag pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancanagan pertauran kepala daerah tenatng penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Koordinasi dan penyusunan rancanagan peraturan daerah tenatnag pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancanagan pertauran kepala daerah tenatng penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	181,757,500	2	96,265,900	2	36,351,500	0	0	0.00	0.00	2	96,265,900	20	53	BKAD

	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	11,940,000	0	0	1	2,388,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	BKAD
	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	60	843,855,000	8	418,454,000	12	168,771,000	5	0	41.67	0.00	13	418,454,000	22	50	BKAD
	Penyusunan analisis laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Penyusunan analisis laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5	13,010,000	0	0	1	2,602,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	BKAD
	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5	322,210,000	1	253,063,000	1	64,442,000	0	0	0.00	0.00	1	253,063,000	20	79	BKAD
	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah istem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	5	174,940,000	0	69,990,000	1	34,988,000	0	0	0.00	0.00	0	69,990,000	0	40	BKAD

	keuangan pemerintah daerah	pemerintah daerah	Daerah															
	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	320	438,890,000	60	94,736,000	80	87,778,000	0	0	0.00	0.00	60	94,736,000	19	22	BKAD
	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten/kota	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten/kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	75	99,000,000	0	0	15	19,800,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	BKAD
	Koordinasi dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah	Koordinasi dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	5	6,090,000	0	0	1	1,218,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	BKAD
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**9,600**	**676,000,353,378**	**1,160.00**	**202,804,063,578**	**1920**	**157,732,096,600**	**800**	**48,394,735,985**	**41.67**	**30.68**	**1,960**	**251,198,799,563**	**20**	**37**	**BKAD**
	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	9,600	676,000,353,378	1,450.00	202,804,063,578	1920	157,732,096,600	800	48,394,735,985	41.67	30.68	2,250	251,198,799,563	23	37	BKAD

	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Keuangan Daerah secara Tepat Waktu dan dapat diakses oleh Masyarakat		**Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**														**BKAD**
	Pengelolaan barang milik daerah	**Pengelolaan barang milik daerah**	**Persentase PD Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah**		**29,928,056,250**	**100**	**5,090,417,167**	**100**	**5,929,930,350**	**100**	**2,293,700,000**	**100**	**39**	**100**	**7,384,117,167**	**0**	**25**	**BKAD**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**710**	**29,928,056,250**	**202**	**5,090,417,167**	**142**	**5,929,930,350**	**12**	**2,293,700,000**	**8.45**	**38.68**	**214**	**7,384,117,167**	**30**	**25**	**BKAD**
	Penyusunan standar harga	Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	5	172,705,000	0	0	1	34,541,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	BKAD
	Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	10	65,240,000	0	0	2	13,048,000	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	BKAD
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5	107,940,000	1	41,311,100	1	21,588,000	0	0	0.00	0.00	1	41,311,100	20	38	BKAD
	Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	200	37,465,000	85	28,208,200	40	7,493,000	0	0	0.00	0.00	85	28,208,200	43	75	BKAD

	penatausahaan barang milik daerah	penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	15	348,271,250	50	60,408,000	3	69,654,250	0	0	0.00	0.00	50	60,408,000	333	17	BKAD
	Inventarisasi barang milik daerah	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	15	101,462,500	5	23,574,000	3	20,292,500	0	0	0.00	0.00	5	23,574,000	33	23	BKAD
	Pengamanan barang milik daerah	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	125	75,522,500	10	34,574,500	25	15,104,500	8	0	32.00	0.00	18	34,574,500	14	46	BKAD
	Penialian barang milik daerah	Penialian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	15	14,481,750,000	2	1,841,423,300	3	2,896,350,000	0	0	0.00	0.00	2	1,841,423,300	13	13	BKAD
	Pengawasan dan pengendalain pengelolaan barang milik daerah	Pengawasan dan pengendalain pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	25	186,454,500	3	150,085,500	5	12,123,000	1	0	20.00	0.00	4	150,085,500	16	80	BKAD
	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan an, oemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangan an, oemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	75	13,722,455,500	22	2,652,964,067	15	2,744,491,100	3	2,285,340,000	20.00	83.27	25	4,938,304,067	33	36	BKAD

			Daerah															
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	15	147,375,000	4	57,167,500	3	29,475,000	0	0	0.00	0.00	4	57,167,500	27	39	BKAD
	Penyusunan laporan barang milik daerah	Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5	328,850,000	2	99,651,500	1	65,770,000	0	8,360,000	0.00	12.71	2	108,011,500	40	33	BKAD
	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	200	152,565,000	75	101,049,500	40	30,513,000	0	0	0.00	0.00	75	101,049,500	38	66	BKAD

Sumber : BKAD Kab. Maros 2024

Dari hasil yang dilakukan terkait Pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut :

- Jumlah Program yang dilaksanakan oleh BKAD Tahun 2022 sebanyak 2 Program dengan jumlah program yang mencapai target sebanyak 2 Program sedangkan program yang tidak mencapai target kinerja sebanyak 1 program
- Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKAD Tahun 2022 sebanyak 5 Kegiatan yang tidak mencapai targrt sebanyak 5 kegiatan
- Jumlah Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BKAD sebanyak 37 Sub kegiatan, jumlah sub kegiatan yang tidak mencapai target sebanyak 23 sub kegiatan dan yang mencapau target sebanyak 13 sub kegiatan, melampaui target sebanyak 1 kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah :

1. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
3. Urusan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Maros Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut ini

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros Tahun 2023

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisa
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran			√	5,66	6,66	6,66	6,66	11,40	11,40			IKU
2	Indeks Transparansi pengelolaan Keuangan Daerah			√	9,30	10,05	12,68	15	9,83	9,83			IKU
3	Indeks Penyerapan Anggaran		√		11,11	13,33	15,56	15,56	11,11	11,11			
4	Persentase SILPA				3,40	11,01	8,37	8,32	3,87	12,21	4,28	1,50	RPJMD
5	Persentase Belanja Pendidikan 20 %				6,23	6,46	20,46	17,90	7,09	23,39	20,46	15,66	RPJMD

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisa
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa				4,24	4,83	5,97	6,66	4,83	5,35	5,97	7,43	RPJMD
10	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik				0,01	0,01	0,01	0,02	11,35	11,35	-	-	TPB
11	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga kesehatan				-	-	-	-	0,14	0,14	-	-	LPPD
12	Rasio PAD				-	-	-	-	15,07	15,07	-	-	LPPD
13	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)				-	-	-	-	59,4	59,4	-	-	LPPD
14	Opini Laporan Keuangan				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	LPPD
15	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD				-	-	-	-	99,09	-	-	-	LPPD
16	Deviasi realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD				-	-	-	-	99,09	-	-	-	LPPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros

Tabel 2.3
Analsisi Kinerja Pelayanan BKAD Kab. Maros

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Peluang	Rekomendasi
1	Masih sering teradapat perbedaan antara perencanaan dan penganggaran	Belum Konsistensi PD dalam melaksanakan penganggaran	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran baik	Penyusunan perencanaan dan penganggaran telah terintegrasi dengan menggunkan sistem informasi SIPD	PD menggarkan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai prioritas yang telah ditetapkan pada perencanaan
2	Pelaporan keuangan dari Perangkat Daerah sering terlambat	Laporan realisasi anggaran belum dapat di finalisasi sesuai waktu yang ditentrukan	Indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah masih rendah	Audit BPK	PD melaksanakan rekonsiliasi sesuai dengan waktu yang di tentukan
3	Adanya revisi-revisi kegiatan	Perencanaan dan pengesahan dokumen tidak sesuai dengan jadwal yang sudah di tentukan	Indeks Penyerapan anggaran masih cukup rendah	Evaluasi dan Pengawasan laporan realisasi	
4	Banyaknya program kegiatan yang dianggarkan pada anggaran perubahan dan tidak bisa di	Penyerapan anggaran masih cukup rendah	Persentase SILPA masih cukup tinggi	SILPA masih dapat digunakan pada tahun selanjutnya	

	selesaikan				
5	Sumber dana Pendidikan yang terbatas	Memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional	Persentase Belanja Pendidikan 20%	Besarnya belanja pendidikan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bidang pendidkan	Peningkatan produktivitas kinerja dan kualitas pendidikan
6	Sumber dana Kesehatan yang terbatas serta biaya Kesehatan yang makin meningkat	Memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat	Persentase Belanja Kesehatan 10%	Mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan	Peningkatan dan pemerataan tenaga kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan sektor Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Maros, diperoleh gambaran tentang adanya isu-isu strategis yang harus dihadapi pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Bidang Perencanaan dan Anggaran :
   - Permasalahan sinkronisasi uraian belanja PD pada aplikasi SIPD dengan regulasi Kemendagri sehingga menjadi penghambat pada saat pengimputan anggaran belanja.
   - Belum optimalnya pengelolaan Anggaran Belanja APBD dalam pengaplikasian Sistem Informasi Perangakat Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri.
   - Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah belum optimal sehingga penginputan anggaran belanja tidak selesai tepat waktu.
   - Masih terbatasnya SDM pengelola SIPD.
2. Bidang Perbendaharaan :
   - Belum optimalnya pengelolaan perbendaharaan yang disebabkan masih kurangnya koordinasi dari bendahara Perangkat Daerah yang terkait.
   - Pengelolaan perbendaharaan daerah belum optimal karena masih adanya Perangkat Daerah yag belum mengikuti anggaran kas yang telah dibuat.
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan :
   - Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
   - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros belum sepenuhnya berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.
   - Masih terdapatnya koreksi pada pembukuan dan pelaporan keuangan akibat pencairan anggaran tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah dibuat.
   - Masih terbatasnya SDM pengelola Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah :
   - Masih terbatasnya kompetensi SDM pengelola Barang Milik Daerah.
   - Perlu pengangkatan tim appraisal mandiri dari Pemkab sehingga dapat menekan anggaran pemakaian tim appraisal pihak ketiga.
   - Belum optimalnya penatausahaan, Inventarisasi Barang Milik Daerah dan perbaikan data Barang Milik Daerah sesuai hasil inventarisasi pada aplikasi SIMDA BMD.
   - Belum terdapat sarana penampungan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang rusak / belum dilelang.

TABEL 2.4
Analisis Lingkungan (Internal dan Eksternal) Analisis SWOT
BKAD Kabupaten Maros

KEKUATAN		KELEMAHAN	
1	Terciptanya tata kelola keuangan dan Barang Milik Daerah yang transparan, akuntabel dan professional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	1	Pada pengelolaan Barang Milik Daerah masih menggunakan server lama
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	2	Masih kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga masih terdapat kesalahan pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah
3	Ketatnya pengawsasan terhadap aktivitas pemerintah khususnya dalam pengelolaan keuangan dan Asset Daerah	3	Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang tidak menyelesaikan penginputan Realisasi Anggaran (LRA) belanja dan penggunaan Asset tepa waktu
PELUANG		**ANCAMAN**	
1	Perolehan Opini BPK kategori WTP	1	Seringnya terjadi permasalahan pada server dari Kementerian Dalam Negeri sehingga menjadi penghambat pada penginputan Anggaran belanja dan Rekonsiliasi BMD
2	Tingginya kepedulian pemerintah Kabupaten Maros terhadap penatausahaan pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	2	Regulasi terkait pengelolaan keuangan dan Asset Daerah yang hamper tiap tahun mengalami perubahan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024. Hal ini berdasarkan atas hasil analisis kebutuhan akan adanya Peraturan Daerah Perencanaan dan Penganggaran guna meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
5.02.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	51,919,311,207	
	5.02.0 1. 2. 01		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, dan Pelaporan BKAD	19 Dok	**33,000,000**	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, dan Pelaporan BKAD	19 Dok	**22,074,000**	
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan BKAD	2 Dok	6,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan BKAD	2 Dok	2,855,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen RKA BKAD	1 Dok	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen RKA BKAD	1 Dok	2,527,000	
		03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-BKAD	1 Dok.	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-BKAD	2 Dok	2,895,000	
		04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen DPA-BKAD	1 Dok.	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen DPA-BKAD	1 Dok	3,110,000	
		05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen DPA-BKAD Perubahan	1 Dok.	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen DPA-BKAD Perubahan	1 Dok.	5.24.000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen SAKIP SKPD	1 Dok.	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen SAKIP SKPD	1 Dok.	3,825,000	
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dok	4,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Dok	3,910,000	
	5.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Pelaksananaan Administrasi Keuangan BKAD	71 Dok	75,432,300,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Pelaksanaan an Administrasi Keuangan BKAD	71 Dok	899,632,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dok.	73,500,000, 000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dok.	25,786,859,033	
		02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKAD	Jumlah Dok. Laporan hasil pelaksanaan tugas ASN	12 Dok.	105.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKAD	Jumlah Dok. Laporan hasil pelaksanaan tugas ASN	12 Dok.	129,986,500	
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan atas hasil Penata usahaan dan Verifikasi Keuangan BKAD	12 Dok	1,500,000, 000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan atas hasil Penata usahaan dan Verifikasi Keuangan BKAD	12 Dok	769,010,000	
		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BKAD	Jumlah Dok. laporan Pelaksanaan Akuntansi BKAD	12 Dok	37,800,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasni SKPD	BKAD	Jumlah Dok. laporan Pelaksanaan Akuntansi BKAD	12 Dok	39,690,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BKAD	Jumlah Dok. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dok	122,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	BKAD	Jumlah Dok. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	1 Dok	33,040,000	
		06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tangga pan Pemeriksaan	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Penyiapan bahan Tanggapan	1 Dok	40,950,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BKAD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyiapan bahan Tanggapan	1 Dok	20,859,000	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKAD	18 Dok	110,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran BKAD	18 Dok	32,558,000	
		08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil analisis Prognosis Realisasi anggaran	1 Dok	15,750,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil analisis Prognosis Realisasi anggaran	1 Dok	4,475,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
					BKAD					BKAD			
	5.02.01.203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi BMD BKAD	29 Dok	277,884,375	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi BMD BKAD	29 Dok	16,054,000	
		01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD BKAD	1 Dok	34.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD BKAD	1 Dok	2,907,500	
		02	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamanan BMD BKAD	12 Dok	50,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengamanan BMD BKAD	12 Dok	3,427,000	
		03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian BMD BKAD	1 Dok	8,500,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pelaksanaan Penilaian BMD BKAD	1 Dok	1,832,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD BKAD	12 Dok	45,150,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD BKAD	12 Dok	3,820,000	
		05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD BKAD	1 Dok	24,150,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pelaksanaan Rekonsiliasi BMD BKAD	1 Dok	4,067,500	
		06	Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Lap.Hasil Pelaksanaan Penatausaha an BMD BKAD	1 Dok	39,900,000	Pentausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pelaksanaan Penatausaha an BMD BKAD	1 Dok	0	
		07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pelaksanaan n Pemanfaatan Barang Milik Daerah BKAD	1 Dok	26,184,375	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pelaksananan Pemanfaatan BMD BKAD	1 Dok	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
	5.02.01.205		Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Aparatur BKAD yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	59 Dok	1,053,675,000	Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Aparatur BKAD yang mendapatkan layanan administrasi Kepegawaian	80 Steel	55.199.700	
		01	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	BKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai BKAD	1 Jenis	52,500,000	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai	BKAD	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai BKAD	1 Jenis	0	
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKAD	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya untuk ASN BKAD	80 Steel	56,175,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BKAD	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya untuk ASN BKAD	80 Steel	42.000.000	
		03	Pendataan Dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	BKAD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelak sanaan Pendataan Dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	105,000,000	Pendataan Dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	BKAD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelak sanaan Pendataan Dan Pengelohan Administrasi Kepegawaian	12 Dok	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dok	105,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dok	0	
		05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dok	105,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dok	13.199.700	
		06	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	BKAD	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Org	105,000,000	Pemulangan Pegawai Yang Pensiun	BKAD	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Org	0	
		07	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	1 Lap	105,000,000	Pemulangan Pegawai Yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	1 Lap	0	
		08	Pemindahan Tugas ASN	BKAD	Jumlah Dokumen Pemindahan	1 Dok	105,000,000	Pemindahan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Pemindahan	1 Dok	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
					Tugas ASN				BKAD	Tugas ASN			
		09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	BKAD	Jumlah Aparatur PD Yang Meng ikuti Diklat Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	5 Org	105,000,000	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	BKAD	Jumlah Aparatur PD Yang Meng ikuti Diklat Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	5 Org	0	
		10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKAD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3 Org	105,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKAD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	3 Org	0	
		11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Implementasi Peraturan Peundang-Undangan	3 Org	105,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Implementasi Per aturan Peundang-Undangan	3 Org	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
	5.02.01.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Pada BKAD	65 Jenis	23,658,947,550	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BKAD	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Pada BKAD	65 Jenis	1.205.988.625	
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	21,525,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKAD	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Jenis	9,809,875	
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	105,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	0	
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	19 Jenis	105,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BKAD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	19 Jenis	30.378.000	
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	28 Jenis	34,125,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKAD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Jenis	87.295.750	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
					Disediakan								
		05	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	BKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis	393,750,000	Penyediaan Cetakan Dan Penggandaan	BKAD	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan yang Disediakan	6 Jenis	18,000,000	
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKAD	Jumlah Jenis Bahan Bacaan Dan Per aturan Per undangan-Undangan	4 Jenis	52,500,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BKAD	Jumlah Jenis Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundangan-Undangan	4 Jenis	0	
		07	Penyediaan Bahan/Material	BKAD	Jumlah Jenis Bahan /Material	1 jenis	262,500,000	Penyediaan Bahan/Material	BKAD	Jumlah Jenis Bahan /Material	1 jenis	10.000.000	
		08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKAD	Jumlah Tamu yang Berkunjung dan Terfasilitasi	1.500 Org	420,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BKAD	Jumlah Tamu yang Berkunjung dan Terfasilitasi	1.500 Org	72,000,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal SKPD	110 Kali	603,572,550	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKAD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal SKPD	110 Kali	988.505,000	
		10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen Yang di Arsipkan	1 Dok	52,500,000	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	BKAD	Jumlah Dokumen Yang di Arsipkan	1 Dok	0	
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	BKAD	Jumlah Sistem Elektronik/ Aplikasi BKAD	3 Sistem	105,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	BKAD	Jumlah Sistem Elektronik/ Aplikasi BKAD	3 Sistem	0	
	5.02.01,207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Jenis BMD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah	48 Jenis	8,732,262,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Jenis BMD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintah	48 Jenis	477.400.000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah Kendaraan Dinas /Jabatan	1 Unit	1,050,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah Kendaraan Dinas/Jabatan	1 Unit	400.000.000	
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	BKAD	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan	1 Unit	315,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	BKAD	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan	1 Unit	0	
		05	Pengadaan Mebel	BKAD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	525,000,000	Pengadaan Mebel	BKAD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	77.400,000	
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	325,500,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	
		07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	BKAD	Jumlah Jenis Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	31 Jenis	5,781,762,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	BKAD	Jumlah Jenis Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	31 Jenis	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	BKAD	Jumlah Jenis Aset Tak Berwujud Kebutuhan Kantor	9 Jenis	315,000,000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	BKAD	Jumlah Jenis Aset Tak Berwujud Kebutuhan Kantor	9 Jenis	0	
		09	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	105,000,000	Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah UnitGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pen-dukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	315,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pen-dukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Jenis	0	
	5.02.01.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis	21,768,760,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Jenis	25.932.523.641	
		01	Penyediaan Jasa Surat	BKAD	Jumlah Surat yang Terdis	480 Surat	85,000,000	Penyediaan Jasa Surat	BKAD	Jumlah Surat yang	480 Surat	37,700,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
			Menyurat		tribusi			Menyurat		Terdistribusi			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BKAD	Jumlah Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	21,525,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	BKAD	Jumlah Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	23.288.135.641	
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD	Jumlah JenisJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	132,300,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKAD	Jumlah JenisJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	0	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD	Jumlah Jenis Jasa Lyanan Umum Kantor	3 Jenis	26,460,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKAD	Jumlah Jenis Jasa Layanan Umum Kantor	3 Jenis	2.606.688.000	
	5.02.01.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang	44 jenis	4,109,135,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang	44 jenis	3.474.429.981	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
					berda Dalam Kondisi Baik					berda Dalam Kondisi Baik			
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah Kendaraan Dinas/ Jabatan Dalam Kondisi Baik	2 Unit	2,669,100,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BKAD	Jumlah Kendaraan Dinas/ Jabatan Dalam Kondisi Baik	2 Unit	2.683.540.000	
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	BKAD	Jumlah Kendaraan Operasional/ Lapangan Dalam Kondisi Baik	450 Unit	866,460,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	BKAD	Jumlah Kendaraan Operasional/ Lapangan Dalam Kondisi Baik	450 Unit	645.139.981	
		05	Pemeliharaan Mebel	BKAD	Jumlah Mebel Dalam Kondisi Baik	252 Unit	102,375,000	Pemeliharaan Mebel	BKAD	Jumlah Mebel Dalam Kondisi Baik	252 Unit	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	31 Unit	46,200,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BKAD	Jumlah Peralatan dan Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	31 Unit	30,750,000	
		07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BKAD	Jumlah Jenis Aset Tetap Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	31 Jenis	85,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	BKAD	Jumlah Jenis Aset Tetap Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	31 Jenis	0	
		08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	BKAD	Jumlah Jenis Aset Tak Berwujud Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	9 Jenis	85,000,000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	BKAD	Jumlah Jenis Aset Tak Berwujud Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	9 Jenis	0	
		09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	1 Unit	85,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	1 Unit	115,000,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah Jenis Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	3 Jenis	85,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah Jenis Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	3 Jenis	0	
		11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	1 Jenis	85,000,000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	BKAD	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	1 Jenis	0	
5 .02 .02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Persentase Penyerapan Keuangan sesuai Target	95 %		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKAD	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	159.571.197 .850	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
	5.02.02.201		Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD	Jumlah Dok koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	171 Dok	680,900,000	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	BKAD	Jumlah Dok. koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	171 Dok	788.016.500	
		01	Koordinasi dan Penyusunan KUA Dan PPAS	BKAD	Jumlah Dok. KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA Dan PPAS	BKAD	Jumlah Dok. KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	15.460,000	
		02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD	Jumlah Dok. KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	33,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	BKAD	Jumlah Dok. KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	15.485.500	
		03	Koordinasi, Penyusunan dan Verfikasi RKA-SKPD	BKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok	32,025,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verfikasi RKA-SKPD	BKAD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok	7.826,000	
		04	Koordinasi, Penyusunan dan Verfikasi Perubahan	BKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok	32,025,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verfikasi Perubahan	BKAD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok	6.426.000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
			RKA-SKPD					RKA-SKPD					
		05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BKAD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok	32,025,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	BKAD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok	7.776,000	
		06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok	32,025,000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	BKAD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dok	7.776,000	
		07	Koordinasi dan Penyusunan Perda Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Ttg Penjabaran APBD	BKAD	Jumlah Dok. Perda APBD dan Peratur an Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Dok	159,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Perda Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Ttg Penjabaran APBD	BKAD	Jumlah Dokumen Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2 Dok	275.326,250	
		08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan	BKAD	Jumlah Dok. Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dok	159,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan	BKAD	Jumlah Dok. Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dok	308.476,250	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
			Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD					Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD					
		10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dok	55,000,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dok	22,079,500	
		11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dok	55,000,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dok	82,247,250	
		12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dok	55,000,000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dok	20,004,000	
		13	Pembinaan Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	40 Org	20,517,000	Pembinaan Perencanaan Anggaran Pembiayaan	BKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	40 Org	19,134,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
					Pemerintah Kab/Kota					Pemerintah Kab/Kota			
	5.02.02.202		Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	46 Dok	397,435,000	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	46 Dok	271.612,500	
		01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dok	15,000,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dok	18,404,000	
		02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dok	8,872,500	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	BKAD	Jumlah Dok. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Dok	0	
		03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran	1 Dok	55,000,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas	1 Dok	5,760,000	
					Kas dan SPD					dan SPD			

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dok	11,025,000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dok	43.280.000	
		05	Koordinasi Fasilitasi, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	9 Dok	18,375,000	Koordinasi Fasilitasi, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Koordinasi Fasilitasi, Asistensi Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	9 Dok	115.196.500	
		06	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga	9 Dok	55,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan	9 Dok	18.798,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
			Keuangan Bukan Bank		Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			Keuangan Bukan Bank		Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			
		07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realiasasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pe mungutan /Pemo tongan dan Penyetoran Perhi tungan Pihak Ketiga (PFK)	9 Lap	55,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realiasasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	BKAD	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	9 Lap	59.222,000	
		08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,	BKAD	Jumlah Dok. Koordinasi Pelak sanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat	9 Dok	55,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,	BKAD	Jumlah Dok. Koordinasi Pelak sanaan Piutang dan Utang Daerah Yang Timbul Akibat	9 Dok	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
			Pelaks anaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas		Pengelolaan Kas, Pelak anaan Analisis Pembia yaan dan Penem patan Uang Daerah Sebagai Optima lisasi Kas			Pelaks anaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas		Pengelolaan Kas, Pelak anaan Analisis Pembia yaan dan Penem patan Uang Daerah Sebagai Optima lisasi Kas			
		09	Rekonsiliasi Data Penerima an dan Penge luaran Kas Serta Pemungutan dan Pemo tongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Rekon siliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Insttansi Terkait	3 Dok	48,037,500	Rekonsiliasi Data Penerima an dan Penge luaran Kas Serta Pemungu tan dan Pemo tongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Rekon siliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Insttansi Terkait	3 Dok	10,952,000	
		10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	BKAD	Jumlah SPD yang Terbit Sebanyak (2500 SPD)	1 Dok	76,125,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang	BKAD	Jumlah SPD yang Terbit Sebanyak (2500 SPD)	1 Dok	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
			Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausaha an dan Pertangung jawaban Sub Kegiatan		Dokumen			Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausaha an dan Pertangung jawaban Sub Kegiatan		Dokumen			
		11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	BKAD	Jumlah Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 Dok	55,000,000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	BKAD	Jumlah Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	1 Dok	0	
	5.02.02.203		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah Dok Pelaksanaan Akuntansi dan Pelapo ran Keuangan Daerah	86 Dok	1,554,450,000	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	124 Dok	793.659,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pene rimaann dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Lap	25,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Pene rimaann dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Lap	18.738,000	
		02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD	Jumlah Dok. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 Dok	78,750,000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	BKAD	Jumlah Dok. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	12 Dok	10,357,000	
		03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungja waban pelaksana an APBD Bulanan, Triwulanan dan	BKAD	Jumlah Laporan Pertanggungj awaban pelaksa naan APBD Bulanan, Triwulanan	12 Lap	130,200,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungja waban pelaksana an APBD Bulanan, Triwulanan dan	BKAD	Jumlah Laporan Pertanggungja waban pelaksa naan APBD Bulanan, Triwulanan dan	12 Lap	15.013,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
			Semesteran		dan Semesteran			Semesteran		Semesteran			
		04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	567,000,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	271.851.500	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Per tanggungjawab an Pelaksana an APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung jawabanPelak sanaan APBD Kab / Kota	BKAD	Jumlah Dok. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungj awaban Pelaksa naan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pen jabaran Per tanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota	2 Dok	85,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Per tanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggung jawabanPelaks anaan APBD Kab / Kota	BKAD	Jumlah Dok. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungja waban Pelaksa naan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penja baran Per tang gungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/ Kota	2 Dok	36,351,500	
		06	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan	BKAD	Jumlah Dok. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Per tanggung jawaban Pelaksa aan	2 Dok	15,000,000	Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan	BKAD	Jumlah Dok. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK Atas Laporan Per tanggung jawaban Pelaksaaan	2 Dok	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
			APBD		APBD			APBD		APBD			
		07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Per bendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Hasil Koordinasi Sinkroni asasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Dok	105,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Per bendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Hasil KoordinasiSinkroniasasi danPenyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Dok	168,771,000	
		08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	105,000,000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	BKAD	Jumlah Dokumen Penyusunan Analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	73,500,000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	0	
		10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	55,000,000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	107.941.000	
		11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/ Kota	BKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	80 Org	105,000,000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/ Kota	BKAD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/Kota	80 Org	164.636,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	BKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota	15 Lembaga	105,000,000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	BKAD	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota	15 Lembaga	0	
		13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dok	105,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dok	0	
	5.02.02.204		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	608 Dok	182,834,374, 740	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	608 Dok	157.732.096.600	
		01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dok	105,000,000	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dok	0	
		02	Analisis Investasi	BKAD	Jumlah Dok. Analisis	1 Dok	6,000,000	Analisis Investasi	BKAD	Jumlah Dok. Analisis	1 Dok	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
			Pemerintah Daerah		Investasi Pemerintah Daerah			Pemerintah Daerah		Investasi Pemerintah Daerah			
		03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Analisis Perenca naan dan Pelaksa naan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Dok	55,000,000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Analisis Perenca naan dan Pelaksa naan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Dok	0	
		04	Analisis Perencanaan Dan Pelaksana an Pemba yaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Analsis Perenca naan Dan Pelaksa naan Pem bayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Peme rintah Daerah	1 Dok	55,000,000	Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Analsis Perencanaan Dan Pelaksa naan Pembaya ran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Peme rintah Daerah	1 Dok	0	
		05	Analisis Perencanaan dan pelaksanaan Pemberian Pinjaman	BKAD	Jumlah Dok. Perencanaan dan pelaksa naan Pem berian Pinjaman	1 Dok	55,000,000	Analisis Perencanaan dan pelaksanaan Pemberian Pinjaman	BKAD	Jumlah Dok. Perencanaan dan pelaksa naan Pem berian Pinjaman	1 Dok	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
			Daerah		Daerah			Daerah		Daerah			
		07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	BKAD	Jumlah Dok. Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Dok	15,000,000	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	BKAD	Jumlah Dok. Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1 Dok	0	
		08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD	Tersedianya Dok. Pelaporan Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keu	600 Dok	182,383,374, 740	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BKAD	Tersedianya Dok. Pelaporan Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keu	600 Dok	157.732.096.600	
		09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD	Jumlah Dok. Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	1 Dok	55,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BKAD	Jumlah Dokumen Pengelolaan dana Darurat dan Mendesak	1 Dok	0	
		10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	BKAD	Jumlah Dok. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/ Kota	1 Dok	105,000,000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	BKAD	Jumlah Dok . Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/ Kota	1 Dok	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
	5.02.02.205		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	23 Dok	431,975,775	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	BKAD	Jml Dok. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	23 Dok	0	
		01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Lap	47,250,000	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12 Lap	0	
		02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	10 Dok	326,282,250	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	10 Dok	0	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	BKAD	Jumlah Dok. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota	1 Dok	58,443,525	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota	BKAD	Jumlah Dok. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kab/Kota	1 Dok	0	
5.02.03			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	BKAD	Persentase PD Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah	100 Persen		**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	BKAD	Persentase PD Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah	100 Persen	5.960.443.350	
	5.02.03.201		Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	142 Dok	9,387,913,310	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	142 Dok	5.960.443.350	
		01	Penyusunan Standar Harga	BKAD	Jumlah Dok. Penyusunan Standar Harga	1 Dok	105,000,000	Penyusunan Standar Harga	BKAD	Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Harga	1 Dok	91.353,000	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dok. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	2 Dok	55,000,000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	BKAD	Jumlah Dok. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	2 Dok	8.548,000	
		03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah	BKAD	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan	1 Dok	33,838,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah	BKAD	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan	1 Dok	21,588,000	
		04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Teresedianya RKBMD Kabupaten Yang Tersusun Tepat Waktu	40 Dok	8,611,344,360	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Teresedianya RKBMD Kabupaten Yang Tersusun Tepat Waktu	40 Dok	7.493.000	
		05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	Tersedianya Laporan BMD Untuk PD	3 Lap	22,050,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BKAD	Tersedianya Laporan BMD Untuk PD	3 Lap	69,654,250	
		06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD	Tersedianya Pencatatan Barang Inventarisasi	3 Lap	75,810,000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	BKAD	Tersedianya Pencatatan Barang Inventarisasi	3 Lap	20,292,500	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
					Barang Milik Daerah					Barang Milik Daerah			
		07	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	25 Dok	55,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	BKAD	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	25 Dok	110.104.500	
		08	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Yang akan Dinilai /Di Apresial/ Di Sertifikatkan	3 Lap	8,715,000	Penilaian Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Yang akan Dinilai /Di Apresial/ Di Sertifikatkan	3 Lap	3.319.350.000	
		09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Lap	143,456,250	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Lap	212.123.000	
		10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	BKAD	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	15 Dok	62,699,700	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	BKAD	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah	15 Dok	2.898.553.900	

KODE			RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					
PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEG	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING
1			2	3	4	5	7	8	9	9	10	11	12
		11	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Yang Telah Di Rekon	3 Lap	105,000,000	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah Yang Telah Di Rekon	3 Lap	29.475.000	
		12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Lap	55,000,000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	BKAD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Lap	65.770.000	
		13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	BKAD	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan Barang Milik Daerah Lingkup Pemda Kabupaten Maros	40 Org	55,000,000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	BKAD	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan Barang Milik Daerah Lingkup Pemda Kabupaten Maros	40 Org	30.513.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Assosiasi-assosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, akan tetapi untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros ***"tidak ada usulan".***

DAFTAR USULAN KECAMATAN YANG TERAKOMODIR DALAM RENJA PD TAHUN

Tabel. 2.7
Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN		SUB KEGIATAN	USULAN	VOLUME	LOKASI	KET

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan, maka dokumen pengelolaan keuangan daerah yang disusun mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJPD, RPJMD dan Renstra, dan rencana pembangunan jangka pendek (RKPD) yang diaktualisasikan melalui penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, kemudian diimplementasikan kedalam RAPBD, Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 hakekatnya merupakan dokumen pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai lingkup dan tingkatannya agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang efektif, efisien, ekonomis, tertib, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab.

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kedudukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros yang merupakan salah satu lembaga teknis daerah, berfungsi sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yaitu : “Menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Maros”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok, dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Terkait dengan pengelolaan keuangan, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros selaku lembaga pengelolaan keuangan di daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, termasuk dalam mengorganisir dan mengelola kegiatan keuangan dan aset daerah sesuai lingkup dan tingkatannya.

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah

No	Nasional	Provinsi	Daerah
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas Dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, Serta Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Penguatan Inovasi	Penguatan Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maros, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran Perencanaan Pembangunan BKAD Kab. Maros Tahun 2024

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Nilai Reformasi Birokrasi BKAD	61,0 (B/ Baik)
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	65,25

	SASARAN		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP BKAD	77,3 (BB/ Sangat Baik)
2.	Meningkatnya Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (D1)	6,66
3.	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Keuangan Daerah secara Tepat Waktu dan dapat diakses oleh Masyarakat	Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (D3)	10,05
4.	Meningkatnya Daya Serap Anggaran Dalam APBD	Indeks Penyerapan Anggaran (D4)	13,33

3.3 Program dan Kegiatan

- **Program penunjang urusan pemerintahan daerah/kabupaten/kota**
  5.0.02.01.2.08.0002 Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik sebagai antisipasi melonjaknya tagihan air maupun listrik

  5.02.01.2.09.0001 Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan,dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan diperlukan penambahan anggaran bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas/operasional

  5..02.01.2.06.0009 Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD mengingat banyaknya kooordinasi baik dalam provinsi maupun luar provinsi dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
- **Program pengelolaan keuangan daerah**
  5..02.02.2.02.0006 sub kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Mengingat diperlukannya koordinasi di pusat maka diperlukan penambahan anggaran perjalan dinas. Memasuki semester 2 pelaksanaan APBD, prediksi belum memadai terhadap Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer dalam mendukung proses penatausahaan pada bidang Perbendaharaan.

5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) diperlukan penambahan anggaran terhadap Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, belanja modal personal computer dan belanja makan minum proses penatausahaan. Serta kebutuhan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi.

- **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

5 02 03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan standar harga diperlukan beberapa belanja yaitu Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak, Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer untuk penyusunan pedoman standar harga, belanja makan minum dalam rangka sosialisasi standar harga ta 2024 serta penambahan satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana, serta penambahan perjalanan dinas.

5 02 03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah, Belanja Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan dimana perlu penambahan volume/satuan dari 10 paket menjadi 30 paket serta pendukung kegiatan tersebut yaitu belanja makan minum rapat dan perjalanan dinas.

5 02 03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah, Belanja Modal Server E BMD untuk mendukung kegiatan pengawasan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah.

5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, untuk belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan untuk memenuhi satuan 12 bulan.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 tertuang dalam Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAROS
TAHUN 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
5.02.01	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**Persen**	**Persen**	**52,566,188,480**	**29,638,565,947**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	PAD
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**Dokumen**	**27,177,000**	**27,177,000**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	PAD
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	**4,240,000**	**4,240,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	**4,650,000**	**4,650,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

5.02.01.2.01.0 003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	**4,490,000**	**4,490,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.01.0 004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	**3,110,000**	**3,110,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.01.0 005	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	**2,952,000**	**5,024,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	**3,825,000**	**3,825,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.01.0 007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	**3,910,000**	**3,910,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.02	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	32 Dok	32 Dok	**23,776,477,533**	**23,786,083,533**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

5.02.01.2.02.0001	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	868 Org/Bln	868 Org/Bln	**22,786,859,033**	**22,786,859,033**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	DAU
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	**113,586,500**	**113,829,500**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dok	1 Dok	**769,010,000**	**771,480,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	DAU
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan pelaksaaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1 Dok	**33,690,000**	**41,130,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	**27,040,000**	**14,260,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	**14,859,000**	**14,859,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem	2 Laporan	2 Laporan	**26,958,000**	**39,191,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

		esteran SKPD								
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	**4,475,000**	**4,475,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.03	**Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah**	**5 Dok**	**5 Dok**	**15,054,000**	**27,194,000**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.03.0001	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	**2,507,500**	**2,507,500**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.03.0002	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	**3,027,000**	**3,027,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	**1,832,000**	**1,832,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.03.0004	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	**3,620,000**	**3,620,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

5.02.02.2.03.0005	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	**4,067,500**	**16,207,500**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.01.02.2.05	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**80 Orang**	**80 Orang**	**45,700,000**	**55,199,700**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket	80 Paket	**37,500,000**	**42,000,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.05.0003	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dok	12 dok	**8,200,000**	**13,199,700**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.06	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**620 Layanan**	**620 Layanan**	**522,919,125**	**1,205,988,625**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	**9,809,875**	**9,809,875**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	**25,002,500**	**30,378,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 Paket	29 Paket	**66,131,750**	**87,295,750**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

5.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	**18,000,000**	**18,000,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	**10,000,000**	**-**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.06.0007	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	**60,000,000**	**72,000,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.01.2.06.0008	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560 Laporan	560 Laporan	**333,975,000**	**988,505,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.07	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**520,000,000**	**477,400,000**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.07.0002	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	**400,000,000**	**400,000,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	**120,000,000**	**77,400,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.08	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**24,704,430,841**	**25,932,523,641**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

5.02.02.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	**37,700,000**	**37,700,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Laporan	12 Laporan	**21,738,135,641**	**23,288,135,641**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.08.0004	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	**2,928,595,200**	**2,606,688,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.09	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**2,954,429,981**	**3,474,429,981**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.09.0001	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	**2,212,540,000**	**2,683,540,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	**611,139,981**	**645,139,981**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.09.0006	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	31 Unit	**30,750,000**	**30,750,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD

5.02.02.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	**100,000,000**	**115,000,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02	**Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penyerapan Keuangan Sesuai Target**	**100 Persen**	**100 Persen**	**159,571,197,850**	**159,571,197,850**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah**	**Jumlah Dokumen koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**237 Dok**	**237 Dok**	**788,016,500**	**788,016,500**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok	**15,460,000**	**15,460,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	2 Dok	**15,485,500**	**15,485,500**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dok	39 Dok	**7,826,000**	**7,826,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dok	39 Dok	**6,426,000**	**6,426,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dok	39 Dok	**7,776,000**	**7,776,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD

5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dok	39 Dok	**7,776,000**	**7,776,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tenatng APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerahtentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dok	1 Dok	**275,326,250**	**275,326,250**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan penyusunan peratuan daerah tentang perubahan APBD dan pertauran kepala daerah tentang penjabaran prubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dok	1 Dok	**308,476,250**	**308,476,250**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	12 Dok	12 Dok	**22,079,250**	**22,079,250**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dok	12 Dok	**82,247,250**	**82,247,250**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	12 Dok	12 Dok	**20,004,000**	**20,004,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Aparatur Sipil Negara ASN	PAD
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan perencanaan penganggaran daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	39 Orang	39 Orang	**19,134,000**	**19,134,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD

5.02.02.2.02	**Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**68 Dok**	**68 Dok**	**257,425,500**	**271,612,500**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dok	12 Dok	**18,404,000**	**18,404,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas di SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	12 Dok	12 Dok	**5,760,000**	**5,760,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan pembiayaan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12 Dok	12 Dok	**43,280,000**	**43,280,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi , monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dok	4 Dok	**115,196,500**	**115,196,500**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, pelaksanaan kerja sama dan pemantauan trnasaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga kuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dok	4 Dok	**17,053,000**	**18,798,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD

5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetora perhitungan fihak ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lapora Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	12 Laporan	**46,780,000**	**59,222,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.02.0008	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dok	12 Dok	**10,952,000**	**10,952,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**83 Dok**	**83 Dok**	**793,659,000**	**793,659,000**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	12 Laporan	12 Laporan	**18,738,000**	**18,738,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD

		Pengeluaran Kas Daerah								
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	12 Dok	12 Dok	**10,357,000**	**10,357,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semsteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	**65,013,000**	**15,013,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	12 Laporan	**281,211,500**	**271,851,500**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan penyusunan rancanagan peraturan daerah tenatnag pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancanagan pertauran kepala daerah tenatng penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	**36,351,500**	**36,351,500**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD

	kabupaten/kota									
5.02.02.2.03.0006	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	1 Dok	**2,388,000**	-	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Dok	12 Dok	**168,771,000**	**168,771,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan analisis laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dok	1 Dok	**2,602,000**	-	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	**64,442,000**	-	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.03.0010	Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	Jumlah istem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	**34,988,000**	**107,941,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD

5.02.02.2.03.0011	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	**87,779,000**	**164,636,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.03.0012	Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten/kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	15 Lembaga	15 Lembaga	**19,800,000**	**-**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Lembaga	PAD
5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	**1,218,000**	**-**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Jumlah Dokumen Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**1920 Dok**	**1920 Dok**	**157,732,096,600**	**157,732,096,600**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Pemerintahan Desa**	DD,DAU
5.02.02.2.04.0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1920 Laporan	1920 Laporan	**157,732,096,600**	**157,732,096,600**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Pemerintahan Desa	DD,DAU
5.02.03	**Pengelolaan barang milik daerah**	**Persentase PD Yang Tertib Tata Kelola Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5,960,443,350**	**5,960,443,350**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**142 Dok**	**142 Dok**	**5,960,443,350**	**6,884,818,150**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	**Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros**	Perangkat Daerah	PAD

5.02.03.2.01.0001	Penyusunan standar harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dok	1 Dok	**34,541,000**	**91,353,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01.0002	Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dok	2 Dok	**13,048,000**	**8,548,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	**21,588,000**	**21,588,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dok	1 Dok	**7,493,000**	**7,493,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01.0005	penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	**69,654,250**	**69,654,250**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	**20,292,500**	**20,292,500**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	25 Laporan	25 Laporan	**15,104,500**	**110,104,500**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01.0008	Penialian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	**2,896,350,000**	**3,319,350,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD

5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan pengendalain pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	**12,123,000**	**212,123,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, oemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dok	15 Dok	**2,744,491,100**	**2,898,553,900**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	**29,475,000**	**29,475,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	**65,770,000**	**65,770,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	**30,513,000**	**30,513,000**	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Kec. Turikale Kelurahan Pettuadae Kab. Maros	Perangkat Daerah	PAD

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros, disusun guna memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki. Namun suatu perencanaan tidak akan berarti bila tidak mendapat dukungan dan komitmen dari para pelaksananya. Olehnya itu partisipasi dan peran serta dari seluruh komponen yang ada mutlak diperlukan baik dalam rangka penyusunan, sosialisasi dan pelaksanaan dari dokumen perencanaan ini.

Dan akhirnya, semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros.

5.1 Catatan Penting Yang Perlu Dapat Diperhatikan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dibuat berdasarkan penjabaran RPJMD dan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros periode tahun 2021-2026. Berbeda dengan dokumen Rencana Kerja tahun sebelumnya, pada dokumen Renja BPKAD ini telah mengaplikasikan perumusan indikator kinerja baik itu Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja berdasarkan Kepmendagri No. 19 Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Kiunci (IKK).

Dalam mengaplikasikan Indikator Kinerja sesuai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai

dengan tuntutan paradigma baru, sehingga Rencana Kerja yang telah diuraikan diatas, melahirkan catatan penting yang perlu dapat perhatian, antara lain :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dalam manajemen pada umumnya dan juga manajemen pengelolaan keuangan;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaan;
e. Peningkatan kualitas pelayanan, system data informasi serta manajemen pendapatan daerah.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros Tahiun 2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan pengelolaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja disusun dengan tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024 dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros ini disusun dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2024.

Program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif yang tersusun dalam rencana kerja Tahun 2024 diharapkan dapat dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Maros atau sumber dana lain yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Maros.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana kerja tindak lanjut dari program kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (good government) dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel oleh karena itu komitmen pimpinan dan segenap staf Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maros sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi Sekretariat Badan, Bidang Perencanaan Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, serta Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

DINAS SOSIAL

KABUPATEN MAROS PROVINSI SUAWESI SELATAN

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas izinnya sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap instansi pemerintah memiliki rencana kerja (Renja) Tahunan dan perubahan yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) OPD dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Visi-Misi dari masing-masing instansi.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 ini memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial tahun berjalan sampai dengan Pelaksanaan Tahun 2024 dan memuat program / kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan dalam rangka pencapaian visi – misi Dinas Sosial Kab. Maros.

Disadari bahwa penyusunan Rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 ini masih terdapat kekurangan, olehnya itu saran dan kritik membangun senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan renja ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan renja perubahan ini dari awal sampai akhir.Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita, Amin.

Maros, 13 Juli 2024
Kepala Dinas Sosial,

H. SUWARDI, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. 1
Nip : 19690413200112100

DAFTAR ISI

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

BAB I **PENDAHULUAN**

Latar Belakang 1

Landasan Hukum 3

Maksud dan Tujuan 7

Sistematika Penulisan 7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 35

2.4 Analisis Lingkungan (Internal dan Eksterlan)/SWOT Perangkat Daerah 38

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 40

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 78

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional 86

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 86

3.3 Program dan Kegiatan 87

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2021 -2023 12

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial ..... …….. . 24

Tabel 2.3 Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat daerah 32

Tabel 2.4 Analisis kinerja Pelayanan Perangkar daerah **35**

Tabel 2.5 Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023 38

Tabel 2.6 Review terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2025 41

Tabel 2.7.Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 79

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Maros 87

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju 91

Tabel 4.1. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah 107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanahkan Pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Sehubungan dengan itu, Dinas Sosial Kabupaten Maros sebagai salah satu instansi Kabupaten Maros menyusun dokumen perencanaan dalam periode satu tahun ke depan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD). Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program kegiatan serta sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut : (1). Tahap Persiapan; (2). Penyusunan rancangan awal Renja PD; (3) Penyusunan Rancangan; (4). Penyusunan rancangan Akhir; (5). Penetapan Renja PD.

Berdasarkan uraian diatas, Renja Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam satu tahun anggaran

untuk menjawab tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja, serta pengorganisasian perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Dinas Sosial Tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Maros Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Maros Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor ....).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Maros tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan dan sub kegiatan
b. Menjadi dasar Penyusunan RKA Dinas Sosial Kabupaten Maros
c. Sebagai dasar penyusunan laporan akuntabiltas kinerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II.HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL TAHUN 2024

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yang menjelaskan arah dan kebijakan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Maros. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial DPRD Kabupaten Maros, serta Program dan Kegiatan yang memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. P E N U T U P

Bab ini berisikan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Maros adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Sosial. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Maros Tengah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros pada Tahun 2023. Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Maros pada Tahun 2023 yang bersumber dari APBD - dengan capain realisasi kinerja fisik sebesar 100% dan capain realisasi keuangan sebesar (100 %.) Implikasi yang timbul terhadap Capaian Program Renstra Dinas Sosial Kabupaten Maros adalah Persentase Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 100 % dan Persentase korban bencana alam dan sosial yang terlayani kebutuhan dasarnya sebesar 100 %. Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial sampai dengan Tahun 2023 dapat serta evaluasi renja sampai dengan triwulan I Tahun 2024 dilihat pada tabel 2.1;

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024

Dinas Sosial Kabupaten Maros

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP**										**19,6318 634**		**14.874.3 14.372**		**297.486. 287.433**	**DINSOS**
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	**24.790.523 .920**	**100**	**14.874.3 14.352**	**100**	**4.953. 296.13 4**	**100**	**972.42 4.331**	**100**	**19,6318 634**	**200**	**14.874.3 14.372**	**4.000**	**297.486. 287.433**	**DINSOS**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**55**	**65.300.00 0**	**33**	**39.180.0 00**	**11**	**13.06 0.000**	**4**	**0**	**36,363 63636**	**0**	**69,363 63636**	**39.180.0 00**	**1.387**	**783.600. 000**	**DINSOS**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	9.625.000	6	5.775.000	2	1.925.0 00	0	0	0	0	6	5.775.000	120	115.500.0 00	DINSOS
	Koordinasi dan penyusnan dokumen	Koordinasi dan penyusnan dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	5	8.775.000	3	5.265.000	1	1.755.0 00	1	0	100	0	103	5.265.000	2.060	105.300.0 00	DINSOS

	RKA-SKPD	RKA-SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	9.550.000	3	5.730.000	1	1.910.000	0	0	0	0	3	5.730.000	60	114.600.000	DINSOS
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	9.650.000	3	5.790.000	1	1.930.000	1	0	100	0	103	5.790.000	2.060	115.800.000	DINSOS
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	9.650.000	3	5.790.000	1	1.930.000	0	0	0	0	3	5.790.000	60	115.800.000	DINSOS
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	9.125.000	3	5.475.000	1	1.825.000	1	0	100	0	103	5.475.000	2.060	109.500.000	DINSOS
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	8.925.000	12	5.355.000	4	1.785.000	1	0	25	0	37	5.355.000	740	107.100.000	DINSOS
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Administrasi keuaangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**225**	**24.282.216.420**	**135**	**14.569.329.852**	**45**	**4.416.027.484**	**11**	**921.584.331**	**24,444 44444**	**20,869 08051**	**159,44 44444**	**14.569.329.873**	**3.189**	**291.386.597.457**	**DINSOS**

	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3290	21.266.837.420	1974	12.760.102.452	658	4.253.367.484	188	897.404.331	28,57142857	21,09867850	2002,571429	12.760.102.473	40.051	255.202.049.462	DINSOS
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	794.750.000	36	476.850.000	12	158.950.000	3	24.180.000	25	15,21233092	61	476.850.015	1.220	9.537.000.304	DINSOS
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	9.800.000	3	5.880.000	1	1.960.000	0	0	0	0	3	5.880.000	60	117.600.000	DINSOS
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	8.750.000	54	5.250.000	18	1.750.000	4	0	22,22222222	0	76,22222222	5.250.000	1.524	105.000.000	DINSOS
	Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah	**Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah**	**5**	**5.500.000**	**3**	**3.300.000**	**1**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**3.300.000**	**60**	**66.000.000**	**DINSOS**
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5	5.500.000	3	3.300.000	1	1.100.000	0	0	0	0	3	3.300.000	60	66.000.000	DINSOS
	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	**Administrasi kepegawaian perangkat dasrah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**235**	**127.725.000**	**141**	**76.635.000**	**47**	**25.545.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141**	**76.635.000**	**2.820**	**1.532.700.000**	**DINSOS**
	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15	62.725.000	9	37.635.000	3	12.545.000	0	0	0	0	9	37.635.000	180	752.700.000	DINSOS

	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	65.000.000	6	39.000.000	2	13.000.000	0	0	0	0	6	39.000.000	120	780.000.000	DINSOS
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**30**	**842.814.500**	**18**	**505.688.700**	**6**	**168.562.900**	**4**	**2.390.000**	**66,66666667**	**1,417868345**	**84,66666667**	**505.688.701**	**1.693**	**10.113.774.028**	**DINSOS**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	8.900.000	60	5.340.000	20	1.780.000	0	0	0	0	60	5.340.000	1.200	106.800.000	DINSOS
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	209.485.000	9	125.691.000	3	41.897.000	1	0	33,33333333	0	42,33333333	125.691.000	847	2.513.820.000	DINSOS
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30	23.769.500	18	14.261.700	6	4.753.900	0	0	0	0	18	14.261.700	360	285.234.000	DINSOS
	Penyediaan bahan/material	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25	50.000.000	15	30.000.000	5	10.000.000	0	0	0	0	15	30.000.000	300	600.000.000	DINSOS
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	101.075.000	36	60.645.000	12	20.215.000	3	1.290.000	25	6,381399951	61	60.645.006	1.220	1.212.900.128	DINSOS
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	449.585.000	12	269.751.000	4	89.917.000	1	1.100.000	25	1,223350423	37	269.751.001	740	5.395.020.024	DINSOS
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**5**	**125.000.000**	**3**	**75.000.000**	**1**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**75.000.000**	**60**	**1.500.000.000**	**DINSOS**
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	125.000.000	3	75.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0	3	75.000.000	60	1.500.000.000	DINSOS
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan**	**2**	**13.000.000**	**2**	**7.800.000**	**2**	**251.000.000**	**2**	**48.450.000**	**100**	**19,30278884**	**102**	**7.800.019**	**2.040**	**156.000.386**	**DINSOS**

	daerah	**daerah**	**Pemerintahan Daerah**															
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	13.000.000	36	7.800.000	12	2.600.000	3	1.200.000	25	46,15384615	61	7.800.046	1.220	156.000.923	DINSOS
	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	340.003.750	36	204.002.250	12	248.400.000	3	47.250.000	25	19,02173913	61	204.002.269	1.220	4.080.045.380	DINSOS
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**20**	**265.003.750**	**12**	**159.002.250**	**4**	**53.000.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**159.002.250**	**240**	**3.180.045.000**	**DINSOS**
	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Peyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	75.000.000	15	45.000.000	5	15.000.000	0	0	0	0	15	45.000.000	300	900.000.000	DINSOS
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	90.003.750	0	54.002.250	5	20.000.000	0	0	0	0	0	54.002.250	0	1.080.045.000	DINSOS
	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175	52.500.000	105	31.500.000	35	10.500.000	0	0	0	0	105	31.500.000	2.100	630.000.000	DINSOS
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	37.503.750	6	22.502.250	2	7.500.750	0	0	0	0	6	22.502.250	120	450.045.000	DINSOS

	Meningkatnya layanan bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin		**Persentase Masyarakat Miskin yg memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial dan jaminan sosial**															**DINSOS**
	Pemberdayaan sosial	**Pemberdayaan sosial**	**Persentase Masyarakat Miskin yg memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial dan jaminan sosial.**	**100**	**1.232.724.500**	**100**	**508.317.000**	**100**	**258.033.500**	**100**	**25.220.000**	**100**	**9,773924704**	**200**	**508.317.010**	**4.000**	**10.166.340.195**	**DINSOS**
	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	**Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota**	**Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang memiliki kapasitas sesuai dengan standar yang berlaku**	**355**	**1.232.724.500**	**74**	**508.317.000**	**71**	**258.033.500**	**14**	**25.220.000**	**19,71830986**	**9,773924704**	**93,71830986**	**508.317.010**	**1.874**	**10.166.340.195**	**DINSOS**
	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan osial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan osial kecamatan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	70	574.100.000	49	125.897.000	14	114.820.000	14	25.220.000	100	21,96481449	149	125.897.022	2.980	2.517.940.439	DINSOS
	Peningkatan kemampuan potensi usmber kesejhateraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan kemampuan potensi usmber kesejhateraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15	572.460.000	29	382.420.000	3	114.492.000	0	0	0	0	29	382.420.000	580	7.648.400.000	DINSOS
	peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga	peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya	45	86.164.500	0	0	15	28.721.500	0	0	0	0	0	0	0	0	DINSOS

	konsultasi keluarga (LK3)	konsultasi keluarga (LK3)	Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota															
	Perlindungan dan jaminan sosial	**Perlindungan dan jaminan sosial**	**Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial**	**100**	**4.697.572.500**	**28,41**	**3.490.620.983**	**100**	**943.678.500**	**0**	**51.200.000**	**0**	**5,425576613**	**28,41**	**3.490.620.988**	**568**	**69.812.419.769**	**DINSOS**
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.	**Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.**	**Jumlah fakir miskin yang telah diverifikasi oleh daerah.**	**140.045**	**4.697.572.500**	**100.045**	**3.490.620.983**	**40.000**	**943.678.500**	**0**	**51.200.000**	**0**	**5,425576613**	**100.045**	**3.490.620.988**	**2.000.900**	**69.812.419.769**	**DINSOS**
	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	200000	3.184.300.000	83.368	1.592.365.456	40.000	636.860.000	0	51.200.000	0	8,03944352	83.368	1.592.365.464	1.667.360	31.847.309.281	DINSOS
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota.	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	50000	149.997.500	43.844	854.300.000	10.000	29.999.500	0	0	0	0	43.844	854.300.000	876.880	17.086.000.000	DINSOS
	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluaarga	Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluaarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	86360	1.332.045.000	22.908	1.043.955.527	21.590	266.409.000	0	0	0	0	22.908	1.043.955.527	458.160	20.879.110.540	DINSOS
	Fasilitasi bantuan pengembangan	Fasilitasi bantuan pengembangan	Jumlah Orang Mendapatkan	60	31.230.000	0	0	20	10.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINSOS

	ekonomi masyarakat	ekonomi masyarakat	Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota															
	Pengelolaan taman makam pahlawan	**Pengelolaan taman makam pahlawan**	**Persentase Kelayakan Penggunaan Taman makam Pahlawan**	**100**	**97.710.000**	**0,01**	**25.762.000**	**100**	**19.542.000**	**100**	**0**	**100**	**0**	**100,01**	**25.762.000**	**2.000**	**515.240.000**	**DINSOS**
	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	**Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota**	**Jumlah TPM yang dikelola oleh Daerah**	**4**	**97.710.000**	**4**	**25.762.000**	**2**	**19.542.000**	**2**	**0**	**100**	**0**	**104**	**25.762.000**	**2.080**	**515.240.000**	**DINSOS**
	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	4	97.710.000	4	25.762.000	2	19.542.000	2	0	100	0	104	25.762.000	2.080	515.240.000	DINSOS
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan dasar Bidang Sosial		**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemenuhan Dasar**															**DINSOS**
	Rehabilitasi sosial	**Rehabilitasi sosial**	**Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial.**	**100**	**743.506.500**	**27,17**	**144.915.000**	**100**	**199.351.500**	**100**	**8.620.000**	**100**	**4,324020637**	**127,17**	**144.915.004**	**2.543**	**2.898.300.086**	**DINSOS**
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar	**Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar**	**Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar**	**750**	**609.200.000**	**450**	**73.532.000**	**150**	**170.100.000**	**20**	**8.620.000**	**13,33333333**	**5,06760729**	**463,33333333**	**73.532.005**	**9.267**	**1.470.640.101**	**DINSOS**

	serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	**serta gelandangan pengemis di luar panti sosial**	**serta gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar**															
	Penyediaan permakanan	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	150	21000000	0	0	50	7.000.000	20	0	40	0	40	0	800	0	DINSOS
	Penyediaan sandang	Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	150	48750000	0	0	50	16.250.000	20	0	40	0	40	0	800	0	DINSOS
	Peynyediaan alat bantu	Peynyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesua kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	205500000	0	0	50	68.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINSOS
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	250	247250000	50	54.785.500	50	49.450.000	20	8.620.000	40	17,43174924	90	54.785.517	1.800	1.095.710.349	DINSOS
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	300	82950000	0	0	100	27.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINSOS
	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan	300	3750000	0	0	100	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DINSOS

			Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota															
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah masyarakat dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi sosial dasar**	**350**	**134.306.500**	**300**	**71.383.000**	**50**	**29.251.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**71.383.000**	**6.000**	**1.427.660.000**	**DINSOS**
	Pemberian layanan data dan pengaduan	Pemberian layanan data dan pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150	17926500	0	0	50	5.975.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINSOS
	kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	5	116380000	3	71.383.000	1	23.276.000	0	0	0	0	3	71.383.000	60	1.427.660.000	DINSOS
	Penanganan Bencana	**Penanganan Bencana**	**Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana.**	**100**	**1.277.740.000**	**82,5**	**356.275.000**	**100**	**307.155.000**	**100**	**51.234.900**	**100**	**16,68047077**	**182,5**	**356.275.017**	**3.650**	**7.125.500.334**	**DINSOS**
	Perlindungan sosial korban	**Perlindungan sosial korban**	**Jumlah korban bencana alam**	**300**	**262.725.000**	**0**	**0**	**100**	**87.575.000**	**65**	**0**	**65**	**0**	**65**	**0**	**1.300**	**0**	**DINSOS**

	bencana alam dan sosial kabupaten/kota	**bencana alam dan sosial kabupaten/kota**	**dan sosial yang mendapat pelayanan perlindungan sosial**															
	Penyediaan makanan	Penyediaan makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300	73650000	0	0	100	24.550.000	65	0	65	0	65	0	1.300	0	DINSOS
	penyediaan sandang	penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300	160875000	0	0	100	53.625.000	65	0	65	0	65	0	1.300	0	DINSOS
	Pelayanan dukungan psikososial	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300	28200000	0	0	100	9.400.000	65	0	65	0	65	0	1.300	0	DINSOS
	penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	**penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota**	**Jumlah lembaga pemberdayaan bencana (kampung bencana) yang terbentuk)**	**127**	**1.015.015.000**	**85**	**356.275.000**	**14**	**219.580.000**	**0**	**51.234.900**	**0**	**23,333 13599**	**85**	**356.275.023**	**1.700**	**7.125.500.467**	**DINSOS**
	Koodinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Koodinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	127	399.910.000	85	356.275.000	14	14.545.000	0	0	0	0	85	356.275.000	1.700	7.125.500.000	DINSOS

			Kewenangan Kabupaten/Kota															
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	90	615105000	0	0	30	205.035.000	30	51.234.900	100	24,988367 84	100	25	2.000	500	DINSOS

Dari hasil analsis yang dilaukan terkait pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Jumlah program yang dilaksanakan tahun 2024 sebanyak 6 program, dari ke 6 tersebut sampai dengan Bulan Mei program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan sudah mencapai target dan 5 program masih kurang dari 50 %

- Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 14 kegiatan dari 14 kegiatan realisasi fisik kegiatan sampai bulan Mei kegiatan Perencanaan Pengaggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah sudah mencapai 85.71 % sampai bulan Mei 2024 dan Kegiatan Pemeliharaan Taman makan Pahlawan realisasi fisik sampai bulan Mei 2024 sudah Mencapai 100 % sub kegiatan yang lain masih realisasi fisik masih dibawa 50 %
- Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 48 sub kegiatan, dari jumlah sub kegiatan ada 5 sub kegiatan sudah mencapai realisasi fisik 100 % yaitu sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD , Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD, Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD serta sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dan sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makan pahlawan Nasional kabupaten. Sub kegiatan yang lainnya masih dibawa 50 %

2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kabupaten Maros sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolak ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Maros, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK), TPB ,SPM dan IKU yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Maros berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan sebagai berikut : Persentase penanganan PMKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Maros pada Tahun 2023 sebesar 69.23 %, untuk Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial berdasarkan TPB pada tahun 2023

sebesar 100 % sementara untuk Program Penanganan Bencana dengan Sasaran Indicator berupa Cakupan Penanganan Korban Bencana sebesar 100 %.

Pencapaian keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten:Dinas Sosial Kabupaten Kabupaten Maros memiliki 24 indikator terkait pelayanan.

Indikator-indikator tersebut terdiri dari 3 indikator Kinerja Utama, 7 Iiidkator Kinerja Kabupaten (IKK RPJMD), 7 indikator untuk SPM, 8 dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan . Realisasi setiap indikator pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial baik Tujuan maupun Sasaran sesuai dengan tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Maros

No	Indikator Kinerja	SPM	TPB	IKK (RPJMD dan LPPD)	IKU	Satuan	Target				Realisasi		Proyeksi			Catatan analisis
							2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk			√			0.15	0.15	0.15	0.15	0.001	0.001	0.90	0.90	0.90	IKK RPJMD
2	Persentase PMKS yag memperoleh bantuan sosial			√			69.23	73.08	76.92	80.77	65.38	69.23	73.31	77.62	82.19	IKK RPJMD

3	Persentase PMKS Yang tertangani			√			69.23	73.08	76.92	80.77	65.38	69.23	73.31	77.62	82.19	IKK RPJMD
4	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar			√			69.23	73.08	76.92	80.77	65.38	69.23	73.31	77.62	82.19	IKK RPJMD
5	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya			√			73.33	80.00	86.67	93.33	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	IKK RPJMD
6	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial			√			73.33	80.00	86.67	93.33	71.43	71.43	71.43	71.43	71.43	IKK RPJMD
7	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial			√			83.33	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK RPJMD

8	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	√					100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	SPM
9	Persentase Korban Bencana Yang DI Evakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	√					100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	SPM
10	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	√					100	100	100	100	100	100	100	100	100	SPM
11	Predikat Nilai SAKIP			√			B	B	B	B	B	B	BB	A	A	IKU
12	Persentase masyarakat penyandang disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi	√					100.00	100.00	100.00	100.00	100	10 0	100	100	100	SPM

	kebutuhan dasarnya															
13	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	√					100.00	100.00	100.00	100.00	100	100	100	100	100	TPB
14	Persentase Penduduk Miskin yg memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial dan jaminan sosial				√		100	100	100		100	100	100	100	100	IKU
15	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		√				8.05	7.59	7.13	6.67		9.43	9.43	9.43	9.43	TPB

16	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.		√				75.00	80.00	85.00	90.00		100	100	100	100	TPB
17	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.		√				10,382	9,508	8,633	7,759		15,985	15985	15985	15985	TPB
18	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.		√				638	698	758	817		1,015	1015	1015	1015	TPB
19	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.		√				1,505	1,778	2,052	2,325			10,669	10,669	10,669	TPB
	Kovesien Gini		√				0.35	0.34	0.33	0.32			6	6	6	TPB
20	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.				√					30,19						Iku

21	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		√				6.00	5.80	5.50	5.00			0	0	0	TPB
22	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	√					100					100	100	100	100	SPM
23	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	√								Tidak ada keiatan		100	100	100	100	SPM
24	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,		√				8.05	7.59	7.13	6.67			0	0	0	TPB

	menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.															

Pendorong Tercapainya Indikator adalah :

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal dan hasil yang maksimal;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program kegiatan;
3. Mengefektifkan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan Instansi terkait baik lingkup Kabupaten Maros maupun diluar Kabupaten Maros;
4. Merencanakan kegiatan dan pengendalian atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk Anggaran Dukungan berbagai pihak terkait.

Tabel 2.3

Pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	7	8	9	12	13	15	16
1	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk		0.002	0.15	0.001	0.001	50	0.65
2	Persentase PMKS yag memperoleh bantuan sosial		65.38	69.23	65.38	69.23	100	100.00
3	Persentase PMKS Yang tertangani		65.38	69.23	65.38	69.23	100	100.00
4	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar		65.38	69.23	65.38	69.23	100	100.00
5	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya		66.67	73.33	71.43	71.43	107.14	97.4045
6	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial		66.67	73.33	71.43	71.43	107.140	100

7	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial		66.67	83.33	100	100	149.99	120.00
8	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat		100	100.00	100	100	100	100
9	Persentase Korban Bencana Yang DI Evakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap		100	100.00	100	100	100	100
10	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		100	100	100	100	100	100
11	Predikat Nilai SAKIP	IKU	B	B	B	A	BB	BB
12	Persentase masyarakat penyandang disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100	100.00	100	10 0	100	100
13	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		100	100.00	100	100	100	100
14	Persentase Penduduk Miskin yg memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial dan	IKU	100	100	100	100	100	100

	jaminan sosial							
15	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Peren	8.51	8.05	9.43	9.43	110.82	117.16
16	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Persen	70	100.00	100	100	142.86	100
17	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	RT	11,257	10,382	15,895.00	15,985	141.21	153.96
18	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Org	579	638	1,015	1,015	175.36	158.99
19	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	org	1,231	1,505	21		1.71	-
	Kovesien Gini	Indek	0.36	0.35			0	0
20	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	persen	0.36		33.98	33.98	9437.73	0
21	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persen	6.10	6.00			0	0

22	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)			100		100	0	100
23	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota					100	0	0
24	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.			8.05			0	0

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu – isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Sosial Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Maros.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, maka Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang sosial;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas sosial;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam tugas pokok dan fungsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Secara umum dan normatif suatu hal yang mempengaruhi pelayanan PD adalah proses manajemen mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program/kegiatan. Proses tersebut merupakan serangkaian tahapan kritis yang harus dikelola melalui penyusunan manajemen resiko sehingga sebelum dilaksanakan akan dapat diantisipasi dan diminimalisir dampak negatif atau penyimpangannya. Oleh karena itu, setiap tahapan tersebut harus dapat dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Tabel 2.4
Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Permasalahan	Hambatan	Upaya/Pendorong	Peluang	Rekomendasi
1.	Kurangnya Bimbingan Teknis dan Sertifikasi bagi PSKS	Kualitas potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang telah mengikuti sertifikasi dan akreditasi	Peningkatan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Bagi PSKS	Adanya RPJMD, Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan produk kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan pelayanan urusan wajib bidang sosial	Pelaksanaan Bimtek untuk PSKS Sertifikasi
2	Kurangnya Sosialisasi tentang Nilai Nilai Kepahlawan dan Kesetiakawanan Sosial Kepada Masyarakat	Rendahnya perhatian Masyarakat terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	Keinginan baik Pemerintah Kabupaten Maros untuk semakin meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Penanganan PPKS masuk dalam skala Prioritas	Penanaman nilai-nilai melalui edukasi dan sosialisasi memanfaatkan media offline dan onlinePeningkatan Program Penanganan Kemiskinan
3	Masih tingginya angka kemiskinan (diatas Angka Kemiskinan Provinsi dan Nasional)	Penanganan Kemiskinan selama ini masih bersifat persial dan belum terintergrasi dalam satu Program yang di Koordinir oleh TIM Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.(TKPKD)	Meningkatkan Penyebaran Informasi dan Nilai Nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan Sosial kepada Masyrakat melalui ber Bagai Media Peningkatan Kapasitas OPD yang tergabung dalam TKPKD	Semakin mudahnya akses informasi yang antara lain membuka peluang Masyarakat untuk mengatahui program pelayanan Sosial	Penajaman sasaran melalui verval data
4	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum menjadi acuan dan sasaran dalam program program dalam penanganan kemiskinan	Program Penanganan Kemiskinan harus menggunakan DTKS sebagai sasaran penerima Manfaa	Updating atau pemutakhiran DTKS secara berkala		Membuat Regulasi penggunaan DTKS sebagai basis data program penanganan kemiskinan Updating DTKS

					secara berkala
5	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial	Masih Banyak Masyarakat Miskin yg belum menjadi penerima Manfaat program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dibukanya pelayanan pendaftaran maupun Pengaduan Masyarakat untuk di masukkan menjadi penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Adanya peluang kerja sama dengan pihak terkait lembaga kesejahteraan sosial masyarakat	Optimalisasi SLRT sebagai Lembaga yang mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan program perlindungan jaminan sosial Melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial yang transparan dan berkeadilan.

Setiap permasalahan, hambatan, Upaya dan peluang yang ada bisa saling terkait anatara yang satu dengan yang lain sehingga memungkinkan satu upaya yang dilakukan dapat mengatasi beberapa permasalahan yang ada.

Perumusan Program dan Kegiatan Berdasarkan Isu-isu Staregis, antara lain:

1. Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik.
2. Mengoptimalkan penggunaan belanja langsung dengan melakukan efesiensi pada belanja tidak langsung, belanja pegawai dan belanja perjalanan dinas serta memperkecil Silpa yang disebabkan kurang cermatnya perencanaan.

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan senantiasa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik diinternal OPD antara OPD dengan masyarakat / kelompok masyarakat penerima manfaat.

2.4 Analisis Lingkungan (Internal dan Eksterlan)/SWOT Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Maros merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Sosial. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut di Tahun 2023, ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan	Kelemahan
Sistem Informasi Kesejahteraan Sosal New eneration (SIKS'NG) dari kementrian Sosial	Kurangnya sosialiasi pelayanan Pemerlu Pelayanan perlindungan Jaminan Sosialbelum optimal
	Pendataan pakir miskin cakupan daerah masih belum bisa dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumberdaya di tingkat kalurahan dengan berbagai tuntutan dari beberapa instansi
	Penelolaan data pakir miskin cakupan daerah masih belum bisa dilakukan secara optimal karena kurangnnya sosialiasi kepada pasilitator mengnai aplikasi akibat keterbatasan anggaran dari APBD
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Fungsi shelter kesejahteraan sosial di bidang rehabilitasi sosial belum optimal

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Peluang	Tantangan
Dukungan Mitra kerja antara lain Kecamatan Kalurahan, BPJS, Dukcapil, TKSK,Siks”NG dan lain-lainnya lain2nya.	Tingkat kemiskinan masih tinggi
Kemitraan dan kerjasama dengan PSM (pekerja sosial masyarakat), Lembaga Kesos, Tagana, dll	Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di Kalurahan	Kualitas SDM operator kalurahan pendata PPKS
Pendataan PMKS secara terperinci mempermudah dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Belum semua perangkat daerah menggunakan data kemiskinan dari Dinas Sosial sebagai dasar penentuan penerima program pengentasan kemiskinan

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023, maka strategi pada tahun 2024 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Maros pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Updating, verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem;
- Peningkatan kapasitas PSKS dan operator kalurahan pendata PPKS;
- Updating, optimalisasi, dan pemanfaatan data indikator kesejahteraan sosial pada aplikasi sidamesra, agar penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.

Kekuatan Kelemahan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Fungsi shelter kesejahteraan sosial di bidang rehabilitasi sosial belum optimal Memiliki aplikasi pendataan milik Dinas Sossial Sistem Informasi Kesejahteraan Sosal New eneration (SIKS’NG) dari kementrian Sosial Kurangnya sosialiasi pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pendataan PPKS masih belum bisa dilakukan secara optimal karena keterbatasan sumberdaya di tingkat kalurahan dengan berbagai tuntutan dari beberapa instansi Kurangnya peningkatan kapasitas PSKS. Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan kekuatan.

2.5 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Penyusunan Rencana Kerja OPD disamping mengacu pada Renstra OPD juga berdasarkan realisasi dan plafon anggaran tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja. Disamping itu Rivew Renstra OPD terhadap Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok OPD, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran OPD dengan melihat perkembangan – perkembangan lingkungan organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran OPD.

Adanya perbedaan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD, tetap menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJPD sampai dengan RKPD hingga Renja SKPD.Untuk program dan kegiatan Dinas Sosial yang lain tidak ada yang mengalami perubahan

Tabel 2.6

Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024

Dinas Sosial Kabupaten Maros

No	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	Dinas Sosial	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	100	9.497.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Sosial	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	100	9.497.000.000	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Dinas Sosial	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.		**2,204,254,304.00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Dinas Sosial	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.		**2,204,254,304.00**	
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan		**418,770,400.00**	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan		**418,770,400.00**	

	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3,675,000.00	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		3,675,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**12 DOKUMEN**	-	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,/Triwulan/Semesteran SKPD**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**12 DOKUMEN**	-	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	**3,675,000.00**	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	**3,675,000.00**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin pegawai	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 paket	**25,000,000.00**	**Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin pegawai**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 paket	**25,000,000.00**	
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	1 paket	25,000,000.00	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	1 paket	25,000,000.00	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 JENIS	151,889,900.00	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 JENIS	151,889,900.00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 PAKET	11,139,000.00	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 PAKET	11,139,000.00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 PAKET	4,761,400.00	**Penyediaan Bahan/Material**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 PAKET	4,761,400.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20,215,000.00	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20,215,000.00	
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 LAPORAN	115,774,500.00	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 LAPORAN	115,774,500.00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 JENIS	97,350,000.00	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 JENIS	97,350,000.00	
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	12 LAPORAN	97,350,000.00	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	12 LAPORAN	97,350,000.00	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	20,000,000.00	**Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	20,000,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Bertambahnya asset Sarana dan Prasarana Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)	1 paket	20,000,000.00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Bertambahnya asset Sarana dan Prasarana Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)	1 paket	20,000,000.00	
	Pengadaan Mebel	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Bertambahnya asset Sarana dan Prasarana Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)		120,855,500.00	**Pengadaan Mebel**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Bertambahnya asset Sarana dan Prasarana Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)		120,855,500.00	

	Program Pemberdayaan Sosial	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial	1 paket	120,855,500.00	**Program Pemberdayaan Sosial**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial	1 paket	120,855,500.00	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang memiliki kapasitas sesuai dengan standar yang berlaku		137,719,000.00	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang memiliki kapasitas sesuai dengan standar yang berlaku		137,719,000.00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	71 org	137,719,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	71 org	137,719,000.00	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	14 org	124,749,000.00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	14 org	124,749,000.00	

	Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kot			Kabupaten/Kota		Kabupaten/Kot			
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga $LK3	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga $LK3% Kewenangan Kabupaten/Kota	*3 lembaga*	*12,070,000.00*	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga $LK3	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga $LK3% Kewenangan Kabupaten/Kota	*3 lembaga*	*12,070,000.00*	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Persentase Masyarakat PMKS/PPKS yang mendapatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosia	*15 sertifikat*	*900,000.00*	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Persentase Masyarakat PMKS/PPKS yang mendapatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosia	*15 sertifikat*	*900,000.00*	
	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah penyandang disabilitas trlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan	100%	3,500,000.00	**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah penyandang disabilitas trlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan	100%	3,500,000.00	

	GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL		yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar			**GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL**		yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar			
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhanKewenangan Kabupaten/Kota	510 org	3,500,000.00	**Penyediaan Alat Bantu**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhanKewenangan Kabupaten/Kota	510 org	3,500,000.00	
	Penyediaan Sandang	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 org	-	Penyediaan Sandang	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 org	-	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Persentase Masyarakat PMKS /PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi	50 org	3,500,000.00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Persentase Masyarakat PMKS /PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan	50 org	3,500,000.00	

			SPM Sosia					Kualifikasi SPM Sosia			
	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah fakir miskin yang telah terdata dan diverifikasi oleh daerah		1,001,084,000.00	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah fakir miskin yang telah terdata dan diverifikasi oleh daerah		1,001,084,000.00	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	40000 org	1,001,084,000.00	**Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	40000 org	1,001,084,000.00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40000 org	602,784,000.00	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40000 org	602,784,000.00	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*1 org*	*1,500,000.00*	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*1 org*	*1,500,000.00*	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Persentase Masyarakat PMKS /PPKS yang mendapatkan Perlindungan	1 tahun	*396,800,000.00*	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Persentase Masyarakat PMKS /PPKS yang mendapatkan Perlindungan	1 tahun	*396,800,000.00*	

			dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosia					dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosia			
	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah fakir miskin yang telah terdata dan diverifikasi oleh daerah		*618,430,904.00*	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah fakir miskin yang telah terdata dan diverifikasi oleh daerah		*618,430,904.00*	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat $KPM% yang Mendapatkan Bantuan Sosial KesejahteraanKeluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		*618,430,904.00*	**Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat $KPM% yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		*618,430,904.00*	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan sosial sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial Baik pada saat maupun pasca	21590 Keluarga	618,430,904.00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan sosial sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial Baik pada saat maupun pasca	21590 Keluarga	618,430,904.00	

			terjadinya Bencana					terjadinya Bencana			
	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan mendapatkan pelayanan sosial sesuai standar dan ketentuan yang berlaku		**24,750,000.00**	**PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan mendapatkan pelayanan sosial sesuai standar dan ketentuan yang berlaku		**24,750,000.00**	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		**24,750,000.00**	**Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		**24,750,000.00**	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 org	24,750,000.00	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 org	24,750,000.00	

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang dilaksanakan melalui Rapat Paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrembang tingkat Kecamatan sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana kerja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja dibahas dalam Forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan serta penajaman indicator dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kabupaten Maros

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Keterangan	Catatan
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	40 Keluarga	118,140,000.00	Usulan musrenbang/aspirasi
	: 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	40 Keluarga	118,140,000.00	
	: 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat	40 Keluarga	118,140,000.00	

			Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			
I	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial.		9,800,000	Usulan musrenbang/aspirasi
I.1	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar		9,800,000	
I.1.1	: 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	140 org	9,800,000	
XXX	: 1.06.04 PROGRAM	: Kab.	Persentase Masyarakat	140 org	20,000,000	Usulan

IV	REHABILITASI SOSIAL	Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial.			musrenbang/aspirasi
XXX IV.1	: 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	140 org	20,000,000	
XXX IVI I.I	: 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	140 orng (Nasi 35.000 x 2 kali mkn)	20,000,000	
XXX VIII	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial		126,967,500.00	Usulan musrenbang/aspirasi

			Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial.			
XXXVIII.1	: 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah masyarakat dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan Rehabilitasi sosial dasar	3 Dokumen	126,967,500.00	
XXXVIII.I	: 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Dokumen	126,967,500.00	
	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana			Usulan musrenbang/aspirasi
	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	: Kab. Maros,		2100 org	872,049,000	

	dan Sosial Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
	: 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2100 org	200,000,000	
	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial, Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana			Usulan musrenbang/aspirasi
	: 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		850 orang	150,000,000	

	: 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang	: Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	850 orang	150,000,000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial, Kabupaten Maros dalam jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dalam rangka mencapai misi sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan, selanjutnya disusun tujuan setiap bidang yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan rehabilitasi sosial
- Meningkatkan perekonomian penyang dang masalah kesejahteraan sosial
- Meningkatkan Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
- Meningkatkan Pembinaan eks penyandang penyakit sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan isu – isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Maros, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

dalam perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 seperti yang Nampak pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2025
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Sosial.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	nilai	90-100
			Nilai SAKIP Dinas Sosial		
2	Meningkatkan Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Sosial	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase masyarakat penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Nilai Survy	3,25
		Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100
3	Meningkatkan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	Meningkatnya cakupan layanan bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin	Persentase Penduduk Miskin yg memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan sosial dan jaminan sosial	Persen	100

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap Rumusan dan Program Kegiatan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 dan prioritas pembangunan daerah erah tahun 2025 maka untuk tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Maros Terdapat beberapa Program, kegiatan, Sub Kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian dikarenakan Ada beberapa kegiatan mengalami kelebihan anggaran dan ada juga kegiatan yang perlu pengurangan anggaran serta masih banyak kebutuhan yang sangat penting (darurat) perlu dilakukan penambahan anggaran pada Dinas Sosial Kabupten Maros. Adapun analisis perubahan yang terjadi sebagai berikut :

Bagian Sekretariat

- Pada Sub Keguatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Ada Pengurangan untuk honor PPTK dikeranakan tidak ada honor PPTK setingkat eselon IV sehingga dialihkan ke Belanja Perjalanan Dinas.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan/Semesteran SKPD Untuk menyelesaian administrasi laporan keuangan diperlukan penambahan anggaran untuk Penggandaan, jilid dan ATK
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dilakukan perubahan pada beberapa jenis belanja menyesuaikan kebutuhan logistik untuk mendukung kelancaran kegiatan administrasi perkantoran
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Pada Belanja Perjalanan dinas biasa dilakukan penambahan anggaran karena banyak kegiatan yang perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat , pemerintah Provinsi maupun lingkup pemerintah Kabupaten Maros
- Sub Kegiatan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Dilakukan Alokasi Anggaran untuk sarana dan prasarana kantor yang sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sosial untuk dinas sosial/ RPTC, dan Komisi Disabilitas Daerah karena akan berkantor di Dinas Sosial
- Sub kegiatan Belanja Modal tidak terdapat di belanja modal pada anggaran pokok tapi mengingat pentingnya asset tersebut maka di adakan di perubahan

seperti Pengadaan Kursi untuk Pejabat Eselon II dan Kursi Rapat meja kerja baik untuk pimpinan mengingat pentingnya asset yang dianggarkan diatas merupakan asset yang sangat dibutuhkan, mengingat di Dinas Sosial belum ada kursi Rapat di ruang Rapat maka perlu dianggarkan di perubahan Tahun Anggaran 2024

Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2024

- Pada Sub kegiatan Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesesahteraan sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten /Kota dilakukan Pengurangan jumlah anggaran pada rekening belanja makan minum rapat jasa moderator dan belanja jasa penanganan sosial yang tidak terealisasi pada semester I dialihkan ke belanja perjalanan dinas untuk ke Kecamatan dalam rangka montoring dan evaluasi kinerja TKSK di masing-masing wilayah kerjanya serta penganggaran belanja perjalanan dinas ke Kementrian Sosial RI dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait program kegiatan pemberdayaan sosial yan bisa menepatkan dukungan penganggaran dari Kemensos. Selanjutnya penganggaran untuk koordinasi ke BBPPKS Makassar dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi selatan sebagai instansi Pembina
- Pada Sub kegiatan peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan osial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabuapten /Kota dilakukan pengurangan beberapa rekening belanja yang belum realisasi pada semester I dialihkan ke perjalanan dinas dalam rangka montoring dan evaluasi LKSA se Kabupaten Maros untuk pemeriksaan masa aktif surat keterangan Terdaftar dan persiapan visitasi baik LKSA yang memenuhi syarat akrediasasi dari BBPPKS Makassar.
- Pada sub kegiatan peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan penguatan lembaga konsultasi Kerjasama Kelarga (LK3) dilakukan pengurangan anggaran rekening belanja bahan komputer dan honorarium narasumber yang belum digunakan adanya perubahan materi sosialisasi yang akan dilaksanakan

Bidang Rehabitasi Sosial Tahun Anggaran 2024

1. Pada sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu ditiadakan anggaran rekening belanja Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (alat bantu dengar sebanyak 10 unit dan kursi roda sebanyak 10 unit) dengan alasan harga yang ada di DPA teralu rendah dibandingkan dengan harga yang ada pada E-katalog rekanan, sehingga tidak bisa direalisasikan dana yang ada pada kegiatan tersebut dialihkan ke

belanja modal untuk kebutuhan Rumah Singgah (RPTC) dan KDD Fordisma

2. Pada sub kegiatan Penyediaan Sandang dilakukan pengurangan anggaran pada Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat yaitu Paket Perlengkapan Jenazah Terlantar pada anggaran pokok sebanyak 5 paket dilakukan pengurangan menjadi 2 paket diperubahan dan begitupun pada Paket Perlengkapan Jenazah Terlantar untuk anak-anak anggaran pokok 5 paket menjadi 5 dilakukan pengurangan menjadi 2 paket. Alasannya karena Berdasarkan realisasi yang ada sampai semester I belum ada jenazah terlantar sehingga kami beriinisiati mengurangi anggarannya dan mengalihkan anggaranya. ke belanja modal untuk kebutuhan Rumah Singgah (RPTC) / teralis Disablitas.

Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM)

- Pada sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan pada belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Honorarium Fasilitator Kelelurahan/Desa, Honorarium supervisor Kecamatan dan Petugas Back dan Front Office) dilakukan karena SK Jasa tersebut terlambat selesai mengakibatkan keterlambatan pembayaran sehingga bulan januari dan bulan Februari tidak bisa dibayarkan untuk memanfaatkan Anggaran tepat sararan maka anggaran terebut dialihkan pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk melaksanakan study Tiru di Jakarta dan Bandung (kementrian Dinsos terkait DTKS dan Bandung untuk kegiatan kunjungan Ke SLPT terkait Pengelolaan dan pelayanan SLRT terhadap data DTKS dan masyarakat miskin.
- Pada Sub Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota pada anggaran belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dilakukan penambahan anggaran pada honorarium /Jasa Narasumber/ pembahas Eselon I yang tidak dianggarkan pada anggaran pokok, dikarenakan ada kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakuan Daerah Kabupaten Maros terkait bintek dan perlu dihadirkan Pemerintah Kabpaten Maros (Bapak Bpatih Maros selaku Narasumber)

Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial (Limjamsos)

- Pada sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga

Bencana tidak terlaksana di tahun anggaran 2024 penyebabnya proposal kampung siaga tidak mengirim proposal ke Pusat sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan maka di alihkan anggarannya ke perjalanan Dinas Luar Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 karena : Kampung siaga bencana adalah Program kementrian sosial dan apabila Kab/kota tidak mengirim proposal kampung siaga bencana kesejahteraan sosial maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan di kabupaten, oleh karena itu anggaran yang sudah ada dialihkan di perubahan untuk perjalanan dinas luar deerah untuk melakukan koordinasi pada instansi terkait dan mempelajari aplikasi SIKS-NG di Pusdatin Kementrian Sosial RI segaligus membawa proposal Kampung siaga Bencana sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Kampung siaga untuk Tahun Anggaran 2025.

- Pada sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan naan Taruna Siaga Bencana dilakukan penabahan Jumlah anggaran pada Perjalanan Dinas, anggaran perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi yang belum ada dianggarkan di pokok 2024 alasan karena selalu ada yang perlu d koordinasikan d i Dinas sosial Provinsi dan juga setiap tahun dilaksanakan Jambore Tagana TK dan Provinsi yang diselenggarakan diluar Provinsi Sulawesi selatan dan juga untuk memenuhi undangan dari kementrian Sosial mengharapkan setiap tahunnya kehadiran SDM TAGANA untuk memeriahkan kegiatan tersebut dan anggarannya dibebankan kepada masing-masing daerah khususnya instansi yang menangani

Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM)

- Pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dianggarkan, Berdasarkan lampiran Keputusan Bupati Maros 719/KPTS/500/V/2024 tentang perubahan Atas keputusan Bupati Maros Nomor 678/kpts/500/V/ tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil cukai hasil tembakau untuk perangkat Daerah Terkait Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2024 Jumlah alokasi yang dianggarkan ke Dinas Sosial sebanyak Rp. 398.228.610 (**Tiga ratus sembilan Puluh delapan Juta Dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah)** penambahan anggaran pada belanja Hibah Uang kepada Masyarakat yang terdampak yang tidak dianggarkan di anggaran pokok lalu dimasukkan dianggaran perubahan dikarenakan pada pemeriksaan

BPK Tahun 2023 terdapat anggaran dari kementrian di laokasikan pada Dinas Koperasi dan Perdagangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi hasil Cukai hasil Tembakau tidak tepat sasaran di Dinas Koperasi dan Perdagangan, sehingga dialihkan kegiatannya di Dinas Sosial Kabupaten Maros dengan pertimbangan sasaran kegiatan tersebut lebih tepatnya berada di Dinas Sosial menyasar pada masyarakat miskin Pembinaan Lingkungan sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yaitu untuk buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diberikan dalam bentu bantuan langsung tunai" dan atau bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan prroduksi tembakau bagi petani tembakau

Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial (Limjamsos)

1. **Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Sub kegiatan dilakukan Fasilitasi batuan sosial kesejahtraan keluarga** dilakukan penambahan anggaran karena : Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi sulawsi selatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Pada pemerintahan Kabupaten Maros Dinas Sosial terdapat utang pelayanan kesehatan PPK pada Rumah Sakit Umum Daerah La Palaloi sebesar RP. 287.340.904 (***Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus empat Rupiah***)berdasarkan keputusan Bupati Maros Nomor : 694/KPTS/900/V/2024 Tentang Penetapan daftar Utang pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2023, perlu dimasukkan pada Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024 untuk pelunasan utang tersebut;

Tabel. 3.3
Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan
Dinas Sosial Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGITAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUBER DANA
			Volume		PAGU IDUKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
1	2	2	3	4	5		7	8	9	10
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**1,301,005,400.00**	**2,204,254,304.00**				
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.			**264,207,900.00**	**418,770,400.00**				
1.06.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan	8 dokumen		27,560,000.00	3,675,000.00				
1.06.01.2.02.03	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**12 DOKUMEN**	**12 DOKUMEN**	**25,960,000.00**	-	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.02.07	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan,/Triwulan/Semesteran SKPD**	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	**1,600,000.00**	**3,675,000.00**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.06.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	110 org	1 paket	**12,545,000.00**	**25,000,000.00**	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae		
1.06.01.2.05.0001	**Peningkatan Sarana dan Prasarana disiplin pegawai**	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 unit	1 paket	12,545,000.00	25,000,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.06 6	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan	11 JENIS	11 JENIS	110,102,900.00	151,889,900.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.06.04	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 PAKET	3 PAKET	14,150,000.00	11,139,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.06.05	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 PAKET	6 PAKET	4,753,900.00	4,761,400.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	-		
1.06.01.2.06.07	**Penyediaan Bahan/Material**	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 PAKET	-	10,000,000.00	-				
1.06.01.2.06.08	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	20,215,000.00	20,215,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.06.01.2.06.09	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 LAPORAN	4 LAPORAN	60,984,000.00	115,774,500.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 JENIS	4 JENIS	114,000,000.00	97,350,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.08.04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 LAPORAN	12 LAPORAN	114,000,000.00	97,350,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		1 paket		20,000,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.09.10	**Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 paket		20,000,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Bertambahnya asset Sarana dan Prasarana Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)				120,855,500.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.01.2.07.0005	**Pengadaan Mebel**	Bertambahnya asset Sarana dan Prasarana Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use)		1 paket		120,855,500.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.06.02	**Program Pemberdayaan Sosial**	Persentase Pusat Kesejahteraan Sosial yang Memiliki Standar dan Kualifikasi SDM Kesejahteraan Sosial Sesuai SPM Sosial			137,912,500.00	137,719,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang memiliki kapasitas sesuai dengan standar yang berlaku	71 org	71 org	137,912,500.00	137,719,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 org	14 org	109,250,000.00	124,749,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kot	*3 lembaga*	*3 lembaga*	*23,850,000.00*	*12,070,000.00*	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga $LK3	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga $LK3% Kewenangan Kabupaten/Kota	*15 sertifikat*	*15 sertifikat*	*4,812,500.00*	*900,000.00*	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.04 6	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Masyarakat PMKS/PPKS yang mendapatkan Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosia	100%	100%	33,250,000.00	3,500,000.00				

1.06.04.2.01 6	**REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL**	Jumlah penyandang disabilitas trlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	510 org	510 org	33,250,000.00	3,500,000.00				
1.06.04.2.01.00036	**Penyediaan Alat Bantu**	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 org	70 org	24,500,000.00	-	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.04.2.01.00026	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	50 org	8,750,000.00	3,500,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.05 6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat PMKS /PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosia	100%		621,400,000.00	1,001,084,000.00				
1.06.05.2.02 6	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah fakir miskin yang telah terdata dan diverifikasi oleh daerah	40000 org	40000 org	621,400,000.00	1,001,084,000.00				
1.06.05.2.02.0001	**Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	40000 org	40000 org	621,400,000.00	602,784,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.05.2.02.0002	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		*1 org*		*1,500,000.00*	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		1 tahun		*396,800,000.00*	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.05 6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Masyarakat PMKS /PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial Sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosia			*220,540,000.00*	*618,430,904.00*				
1.06.05.2.02 6	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah fakir miskin yang telah terdata dan diverifikasi oleh daerah	40000 org		*220,540,000.00*	*618,430,904.00*				
1.06.05.2.02.03	**Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial**	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat $KPM% yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	21590 Keluarga	21590 Keluarga	220,540,000.00	618,430,904.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.06 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan sosial sesuai Standar dan Kualifikasi SPM Sosial Baik pada saat maupun pasca terjadinya Bencana	100%		**23,695,000.00**	**24,750,000.00**				
1.06.06.2.02 6	**PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA**	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang Mendapatkan mendapatkan pelayanan sosial sesuai standar dan ketentuan yang berlaku			**23,695,000.00**	**24,750,000.00**				

1.06.06.2.02.0002 6	**Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana**	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 org	30 org	9,150,000.00	24,750,000.00	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros, Kecamatan Turikale, Kelurahan Pettuadae	Kab. Maros	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.06.2.02.00016	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	14 kampung		14,545,000.00					

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 berjalan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sesuai dengan tuntutan yang berkembang dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Maros memuat program dan kegiatan sosial baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Rencana Program dan kegiatan tahun 2024 disusun dengan maksud agar sasaran pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Maros dapat tercapai.

Proses perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan-kegiatan melibatkan masyarakat serta berbagai macam yang terkait untuk secara bersama dalam suatu manajemen program, karena masyarakat merupakan pelaku utama dan sekaligus penerima bantuan atau manfaat sehingga peluang untuk meningkatkan taraf hidup akan lebih baik.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2024 ini kami sadari masih banyak kekurangan – kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu sangat memerlukan kritikan, saran serta masukan - masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan rencana kerja ini.

Demikianlah Rencana Kerja ini kami buat mudah-mudahan mendapat respon dan kebijaksanaan, atas bantuan dan dukungan kami ucapkan terima kasi

Maros, 22 Juli 2024
Kepala Dinas Sosial,

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS SOSIAL

H. SUWARDI, SE., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. 1
Nip : 196904132001121003

DISKOMINFO-SP

RENCANA KERJA

Perubahan

2024

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maros Tahun 2024 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap Bidang dan Seksi serta usulan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan.

Rencana Kerja Perubahan sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja Perubahan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahap tahun selanjutnya. Terima kasih.

Maros, 31 Juli 2024

Kepala Dinas,

PRAYITNO, ST., MT.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196705101997031007

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMINFO-SP TAHUN LALU 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo-SP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kominfo-SP 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo-SP..... 18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo-SP Kab. Maros..... 22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... 38
2.6 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD..... 39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMINFO-SP 48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo-SP..... 50
3.3 Program dan Kegiatan..... 51
3.4 Matriks Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Kominfo- SP..... 52
BAB IV PENUTUP..... 65

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kominfo-SP sampe dengan Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo-SP Kab. Maros.....	19
Tabel 2.3	Rumusan Permasalahan berdasarkan Indikator Pelayanan.....	22
Tabel 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2024	38
Tabel 2.6	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	40
Tabel 3.1	Identifikasi Terhadap Arah Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah	48
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo-SP Kabupaten Maros Tahun 2024.....	50
Tabel 3.4	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo-SP Kabupaten Maros Tahun 2024.....	52

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanahkan Pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daaerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Sehubungan dengan itu Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros sebagai salah satu instansi menyusun dokumen perencanaan dalam periode satu tahun berupa Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RENJA Perubahan PD). Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kominfo-SP 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021 – 2026. Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat kebijakan, program kegiatan serta sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kominfo-SP disusun dengan tahapan sebagai berikut : (1). Tahap Persiapan; (2). Penyusunan rancangan awal Renja Perubahan PD; (3) Penyusunan Rancangan; (4). Penyusunan rancangan Akhir; (5). Penetapan Renja Perubahan PD.

Renja Perubahan Dinas Kominfo-SP disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024, dan tetap berpedoman pada RENSTRA PD. Kemudian Renja Perubahan PD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA PD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Maros Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan janka Panjang Daerah dan Rencaana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020)
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perencanaan dan Penganggaran dan Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 20015 Nomor 2);`
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros.
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Kesetaraan Gender.
25. Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi,Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Maros.
26. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Maros tahun 2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kominfo-SP Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Maros tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan dan sub kegiatan
b. Menjadi dasar Penyusunan RKA Dinas Kominfo-SP
c. Sebagai dasar penyusunan laporan akuntabiltas kinerja perangkat daerah.

1.4.. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan uraian tabel rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.

BAB V. P E N U T U P

Bab ini menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KOMINFO-SP TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo-SP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kominfo-SP

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo-SP Kabupaten Maros tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Kominfo-SP dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program,kegiatan dan sub kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan realisasi Renja Dinas Kominfo-SP Kabupaten Maros Tahun 2024 dan perkiraan realisasi pelaksanaan Renja tahun berjalan dalam tabel yang memuat Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kominfo-SP.

Secara umum program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maros telah dilaksanakan sesuai yang tertuang dalam dokumen perencanaan, untuk mendukung pencapaian target kinerja peningkatan layanan infrastruktur komunikasi informatika, pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik, layanan keamanan informasi dan ketersediaan data sektoral.

Pada tahun ke tiga pelaksanaan rencana kerja dari rencana strategis Dinas Kominfo-SP,seluruh program/kegiatan telah terlaksana, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program yang dilaksanakan sebanyak 5 program, dengan program yang mencapai target sebanyak 4 program dan melampaui target sebanyak 1 program
2. Kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan, dengan kegiatan yang mencapai target sebanyak 9 kegiatan dan tidak mencapai target sebanyak 6 kegiatan

3. Sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 39 sub kegiatan, dengan kegiatan yang mencapai 9 target sebanyak sub kegiatan dan tidak mencapai target sebanyak 30 sub kegiatan

Program/kegiatan yang belum mencapai target di sebabkan antara lain,keterbatasan anggaran untuk keterjangkuan layanan jaringan internet yang melayani seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Maros, perangkat daerah belum maksimal mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informatika, terbatasnya saranan prasarana komunikasi informatika dan belum maksimalnya penyebarluasan informasi serta masih rendahnya indeks keterbukaan informasi publik.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2024

No	Sasaran/Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Kinerja sampai Triwulan I Tahun 2024		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
					Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8	14
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai SAKIP**	**Nilai Indeks**	**71**	**69.61**	**97.89**		
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**70.245**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**19**	**6**	**31.58**	**85.71**	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	0	25	25	
2	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100	100	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	25	25	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100	100	

No	Sasaran/Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Kinerja sampai Triwulan I Tahun 2024		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
					Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8	14
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	25	25	
6	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100	100	
7	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	3	25	25	
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**Dokumen**	**47**	**11**	**23.40**	**80**	
1	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	812	232	28.57	28.57	
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	3	25	25	

No	Sasaran/Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Kinerja sampai Triwulan I Tahun 2024		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
					Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8	14
3	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	3	0	25	25	
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	4	22.22	22.22	
	Administrasi barang milik daerah pada peranglat daerah	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah**	**Dokumen**	**14**	**4**	**28.57**	**80**	
1	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	1	50	50	
2	Rekonsilisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	3	25	25	
	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Orang**	**58**	**58**	**100**	**40**	

No	Sasaran/Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Kinerja sampai Triwulan I Tahun 2024		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
					Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8	14
1	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	58	0	0	0	
2	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	3	25	25	
	Administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**Layanan**	6	6	**100**	46.25	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	
2	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	0	0	0	
3	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100	100	
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1	50	50	
5	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	3	25	25	
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3	25	25	

No	Sasaran/Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Kinerja sampai Triwulan I Tahun 2024		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
					Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8	14
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis**	**1**	**1**	**100**	**100**	
1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	100	100	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jenis**	**3**	**3**	**100**	**80**	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3	25	25	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	25	25	
3	penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	25	25	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**Jenis**	**2**	**1**	**50**	**50**	

No	Sasaran/Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Kinerja sampai Triwulan I Tahun 2024		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
					Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8	14
1	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	0	0	0	
2	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100	100	
	Meningkatnya Kualitas Dan Akses Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi	**Persentase informasi strategis pemerintahan yang terpublikasi**	**Persen**	**90**	**122**	**135.56**	**80**	
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	**Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**80**	
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	**Jumlah jenis informasi dan komunikasi publik yang di kelola**	**Jenis**	3	3	**100**	**80**	
1	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	3	25	25	
2	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	3	25	25	
3	Pelayanan informasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	3	25	25	

No	Sasaran/Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Kinerja sampai Triwulan I Tahun 2024		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
					Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8	14
	Meningkatnya Tingkat Kematangan pada Tata Kelola dan Kebijakan SPBE	**Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE**	**Nilai Indeks**	**3**	**2.55**	**85**	**88.34**	
	Meningkatnya Pemanfaatan TIK Di Sektor Ekonomi Dan Bisnis	**Meningkatnya Pemanfaatan TIK Di Sektor Ekonomi Dan Bisnis**	**Persen**	**60**	**45.5**	**75.83**	**88.34**	
	Aplikasi Informatika	**Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi Dalam SPBE**	**Persen**	**90**	**85**	**94.44**	**88.34**	
	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	**Jumlah domain dan sub domain yang telah ditetapkan dan dikelola lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota**	**Domain/Sub domain**	63	63	**100**	90.00	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	3	25	25	
2	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintahan daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	40	40	100	100	
	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	**Jumlah aplikasi informatika layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi**	**Aplikasi**	**40**	**11**	**27.5**	**86.67**	
1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	12	3	25	25	

No	Sasaran/Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Kinerja sampai Triwulan I Tahun 2024		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
					Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8	14
2	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	PD	40	40	100	100	
3	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	7	1	14.29	14.29	
	Meningkatnya Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Data	**Indeks Kepausan layanan data**	**Nilai Indeks**	**4**	**3.31**	**82.75**	**80**	
	Peneyelenggaraan statistik sektoral	**Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**80**	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Maros	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros**	**Dokumen**	**12**	**3**	**25**	**80**	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	12	3	25	25	
	Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	**Indeks Keamanan Informasi**	**Nilai Level**	**70**	**52.4**	**74.86**	**77.5**	
	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	**Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**77.5**	

No	Sasaran/Program/kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Satuan	Target Tahun 2024	Kinerja sampai Triwulan I Tahun 2024		Realisasi Fisik (%)	Keterangan
					Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/5x100	8	14
	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	**Jumlah perangkat daerah yang menerapkan persandian berupa tanda tangan elektronik untuk pengamanan informasi**	**PD**	40	40	**100**	40	
1	Penetapan kebijakan tata kelola keamanan infirmasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	2	0	0	0	
2	pelaksanaan kemanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	12	3	25	25	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	**Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi**	**PD**	40	40	**100**	100	
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	PD	40	40	100	100	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo

Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh Diskominfo-SP Kabupaten Maros sebagai penyelenggara urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian telah merumuskan indikator kinerja antara lain Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri 86 Tahun 2017,9 indikator, Indikator Kinerja utama (IKU) 6 Indikator, TPB/SDG dan Indikator Kinerja Kunci (IKK LPPD) 8 Indikator.Adapun target dan capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo- SP Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo-SP Kabupaten Maros

No	Indikator	Satuan	SPM/standar nasional	IKK	IKU	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn+ n)	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informsi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen		√		100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	Persen		√		84.94	87.54	90.14	92,14	82.00	82.93	82.94	83.88	
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen		√		74.73	74.72	74.79	74,93	83.57	83.57	83.57	83.57	
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen		√		0.74	0.76	0.77	0,79	0.61	0.61	0.61	0.61	
5	Proporsi Rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen		√		0.90	0.92	0.94	0,97	0.13	0.13	0.13	0.13	
6	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi			√		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
7	Buku "Kabupaten dalam angka"			√		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
8	Buku " PDRB"			√		ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
9	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen		√		100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah Kepemilikan Sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan	Orang				-	-	-	-	3	3	3	3	TPB
11	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Persen								67.25	67.25	67.25	67.25	TPB
12	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks				-	-	-	-					TPB
13	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Persen								100	100	100	100	TPB

No	Indikator	Satuan	SPM/standar nasional	IKK	IKU	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn+ n)	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
14	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Persen								96.88	96.88	96.88	96.88	TPB
15	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Metadata				-	-	-	-	6	6	6	6	TPB
16	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Orang				-	-	-	-	13.06	13.06	13.06	13.06	TPB
17	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Persen				-	-	-	-	100	100	100	100	TPB
18	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Persen				-	-	-	-	5.44	5.44	5.44	5.44	TPB
19	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Persen				-	-	-	-	83.57	83.57	83.57	83.57	TPB
20	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Persen				-	-	-	-	60.76	60.76	60.76	60.76	TPB
21	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Persen				-	-	-	-	21.78	21.78	21.77	21.77	TPB
22	PDRB per kapita.	Juta Rp/Jiwa				-	-	-	-	58.31	58.31	58.31	58.31	TPB
23	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Persen				-	-	-	-	67.25	67.25	67.25	67.25	TPB
24	Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE	Persen			√	2,5	3	3	4	2,04	2,55	2,8	3,5	IKU
25	Indeks Keamanan Informasi				√	CB	CB	B	B	CB	CB	B	B	IKU
26	Indeks Kepuasan Konsumen Terhadap Data				√	B	B	B	B	B	B	B	B	IKU
27	Persentase informasi pemerintahan strategis yang terpublikasi				√	85	90	95	100	88	100	100	100	IKU
28	Persentase Pelaku Ekonomi Yang Memanfaatkan Teknologi Dalam Promosi				√	45	50	60	70	23,3	45,2	46,13	89,5	IKU

No	Indikator	Satuan	SPM/standar nasional	IKK	IKU	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2025	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn+ n)	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
29	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					-	-	-	-	100	100	100	100	IKK LPPD
30	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi					-	-	-	-	100	100	100	100	IKK LPPD
31	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					-	-	-	-	68,30	77,23	77,36	87,47	IKK LPPD
32	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah					-	-	-	-	100	100	100	100	IKK LPPD
33	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					-	-	-	-	100	100	100	100	IKK LPPD
34	Tingkat keamanan informasi pemerintah					-	-	-	-	CB	CB	B	B	IKK LPPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo - SP

Perumusan isu – isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki dalam rangka pencapaian target Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Maros.

Tabel 2.3. Rumusan Permasalahan berdasarkan Indikator Pelayanan

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak
1.	Pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Maros sedangkan anggaran yang ada dari Pemerintah daerah masih sangat terbatas belum dapat memenuhi untuk seluruh pembangunan yang akan dilakukan	Kondisi geografis Kabupaten Maros berupa wilayah pegunungan yang menyebabakan masih adanya daerah blankspot	Cakupan Layanan Telekomunikasi yang terbatas
2.	Perhatian pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kominfo-SP untuk akses jaringan dan ketersediaan akses internet (bandwith) masih sebatas untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik secara umum.	Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kominfo-SP dalam layanannya belum menyediakan layanan internet untuk masyarakat umum khususnya rumah tangga.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet masih rendah
3	Pemerintah Kabupaten Maros belum Menyusun Peta Rencana dan siklus atau proses pembangunan/pengembangan aplikasi belum dikonsultasikan.	Nilai atau level Domain Tata Kelola SPBE dan Domain Manajemen SPBE masih lemah dalam hal dokumentasi pelaksanaan program kerja tim koordinasi SPBE	Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE masih di bawah level 3 atau kategori cukup

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Maros sehingga memunculkan perumusan program kegiatan terkait isu- isu sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, informatika,statistik dan persandian, antara lain :

1. Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi secara bertahap dan menyeluruh.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan informatika yang dapat menggunakan, merancang, mengembangkan berbagai metode, dan memanfaatkan informasi dan teknologi beserta pendukungnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
3. Meningkatkan sistem layanan kepemerintahan yang terintegrasi dan mampu menciptakan sistem teknologi informasi daerah yang telah disesuaikan dengan keberadaan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai wujud dari pelayanan prima pemerintah Kabupaten Maros kepada masyarakat.
4. Pembentukan suatu kebijakan yang kuat dalam memberikan dukungan kepada pengimplementasian *e-Government* yang didasarkan kepada penguatan koordinasi secara kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan penyediaan aplikasi beserta perencanaannya yang dilakukan dengan penilaian secara berkala.
5. Pemanfaatan jaringan Internet untuk kepentingan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diindikasikan dengan persentase peran sektor komunikasi dan informasi dalam meningkatkan PDRB, nilai investasi, dan peningkatan volume perdagangan hasil/produk asli Kabupaten Maros.
6. Membangun suatu sistem informasi data yang terintegrasi yang dapat diakses secara umum dan mudah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini akan dibahas mengenai penjabaran rancangan awal RKPD yang memuat program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian.Penyusunan Rencana Kerja disamping mengacu pada Renstra juga berdasarkan realisasi dan plafon anggaran tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja. Disamping itu Rivew Renstra terhadap Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan melihat perkembangan – perkembangan lingkungan organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 2.4 Review Awal Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Maros

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	Persen	100	**6,350,811,000.00**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Maros	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	Persen	100	**6,110,181,533**	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	Dokumen		10,393,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi PD	Dokumen	19	8,918,000	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1,445,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	1,445,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1,498,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1,498,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1,475,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1		
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	0	1,475,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	1,475,000	

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
			Penyusunan Dokumen DPA-SKPD										
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1,500,000	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros	umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1,500,000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	1,605,000	
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13	1,500,000		Kab. Maros	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	13	1,500,000	
11	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	12	4,652,300,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	37	4,988,606,033	

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
12	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65	4,494,000,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65	4,851,866,033	
13	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	156,970,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	135,410,000	
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	1,330,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	1,330,000	
15	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Maros				11,630,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Maros				7,550,000	
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Maros	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1,430,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1,430,000	
17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	10,200,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	6,120,000	
18	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	orang	65	3,130,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian	Orang	65	77,350,000	

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
19	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Maros	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	65	16,250,000.00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Maros	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	65	16,250,000.00	
20	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Maros	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	65 Paket	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	65	7,970,000	
21	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	3,130,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1	3,130,000	
22	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Maros	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	50,000,000.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Maros	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	50,000,000.00	
23	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Jenis Layanan Adminstrasi Umum Yang Dilaksanakan	Jenis	9	285,054,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Jenis Layanan Adminstrasi Umum Yang Dilaksanakan	Jenis	7	262,947,500	
24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Maros	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	3,930,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	3,930,000	
25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Maros	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5,000,000	

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Maros	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	5,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	4,598,500	
27	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	10,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	11,913,500	
28	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	16,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12,000,000	
29	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	250,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	230,104,000	
30	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Maros	Jumlah Jenis BMD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Penunjang PD	Jenis		1,040,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Maros	Jumlah Jenis BMD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Penunjang PD	Jenis	2	637,160,000	
31	Pengadaan Mebel	Kab. Maros	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	15,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Maros	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	15,000,000	
32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	102	1,040,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Maros	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	102	286,000,000	
33	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis		170,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Jenis Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	3	170,000,000	

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5,500,000	
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	600,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	600,000	
36	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	160,060,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	160,060,000	
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros				200,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros				127,650,000	
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	100,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	90	72,650,000	
39	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	35,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	35,000,000	
40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Maros	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	20,000,000	

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
41	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Maros	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	Persen	90	275,410,000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Maros	Peresentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	Persen	90	**369,090,000**	
42	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Dokumen	12	300,000,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Dokumen	12	369,090,000	
43	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	200,000,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	26,670,000	
44	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	200,000,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	186,820,000	
45	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	50,000,000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	17,600,000	
46	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	12	5,000,000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	12	5,000,000	
47	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Maros	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	6	50,000,000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Maros	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	6	25,000,000	

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
48	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	12	5,000,000	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	12	3,000,000	
49	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	12	5,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	12	5,000,000	
50	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5	200,000,000	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	100,000,000	
51	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Maros	Persentase Aplikasi yang terintegrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen		**5,191,040,000.00**	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Maros	Persentase Aplikasi yang terintegrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	75	**5,060,352,099**	
52	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	539,440,000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	302,370,000	
53	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan	Dokumen	12	10,800,000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan	Dokumen	12	5,400,000	

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
	Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
54	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Maros	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	63	528,640,000	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	63	296,970,000	
55	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		4,651,600,000.00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	4,757,982,099	
56	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	12	5,500,000,000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	12	4,000,000,000	
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	12	200,000,000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	40	200,000,000	

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Maros	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	40	300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kab. Maros	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	40	200,000,000	
59	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Maros	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	7	400,000,000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	7	357,982,099	
60	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	12	200,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	12	200,000,000	
61	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Maros	Persentase Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi	Persen	100	53,168,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Maros	Persentase Sistem Data Dan Statistik Yang Terintegrasi	Persen	100	**129,183,000**	
62	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dokumen	3	53,168,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dokumen	3	129,183,000	
63	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	12	30,034,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	12	19,183,000	
64	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Maros	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	39	200,000,000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di	Kab. Maros	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	39	100,000,000	

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
							Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
65	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Maros	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	1	200,000,000	Pengembangan Infrastruktur	Kab. Maros	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	39	10,000,000	
66	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Maros	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	39	23,134,000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kab. Maros	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen			
67	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Maros	Persentase PD Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah	Persen	100	76,639,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Maros	Persentase PD Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah	Persen	100	**50,000,000**	
68	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah PD Yang Menggunakan Sandi Dalam Berkomunikasi	Perangkat Daerah	40	100,000,000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah PD Yang Menggunakan Sandi Dalam Berkomunikasi	Perangkat Daerah	40	33,000,000	
69	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	2	5,000,000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	2	5,000,000	
70	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	21,981,000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1		

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
71	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	12	36,500,000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektroni	Laporan	12	28,000,000	
72	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Berita Sandi Yang Terdistribusikan	Laporan	12	20,000,000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Laporan Berita Sandi Yang Terdistribusikan	Laporan	12	17,000,000	
73	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	39	17,000,000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	39	17,000,000	
74	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Maros	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	Persen	100	52,932,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Maros	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan yang Terlaksana	Persen	100		
75	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Jenis BMD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Penunjang PD	Jenis	5	200,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros	Jumlah Jenis BMD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Penunjang PD	Jenis	3	200,000,000	
76	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	5,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	14	5,000,000	

No							Hasil Analisis Kebutuhan (dari RKA 2024)						Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4		5	6	7	8	9		10	11	12
77	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	5,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dibagian Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dipaparkan mengenai usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan sebagai hasil dari Musrenbang, sehingga dapat diketahui program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja dan besaran/volume yang diminta dan dibutuhkan oleh masyarakat, dapat dilihat pada Tabel 2.5 , sebagai berikut :

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Maros

NO	Kode					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2					3	4	5	6	7	8
1	2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Maros	Persentase penyebarluasan informasi melalui pengelolaan informasi dan media massa	Persen		musrenbang
2	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kab. Maros	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Dokumen	1	Muarenbang
3	2	16	02	2.01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kab. Maros	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat	Orang	10	
4	2	16	02	2.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi	Dokumen	1	
5	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Maros	Persentase Aplikasi Informatika Yang Terintegrasi Dalam SPBE	Persen		
6	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah domain dan sub domain yang telah ditetapkan dan dikelola lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	Domain/Sub Domain	1	

NO	Kode					Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/ Volume	Catatan
1	2					3	4	5	6	7	8
7	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	
8	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Maros	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	20	Pokir
9	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros	Jumlah aplikasi informatika layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi	Aplikasi	1	
10	2	16	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kab. Maros	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	2	

2.6 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Pada bagian ini akan dibahas mengenai penjabaran rancangan akhir RKPD yang memuat program dan kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif Dinas Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian.Penyusunan Rencana Kerja disamping mengacu pada Renstra juga berdasarkan realisasi dan plafon anggaran tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja. Disamping itu Rivew Renstra terhadap Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan melihat perkembangan – perkembangan lingkungan organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 2.6 . Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				
				VOLUME	PAGU INDIKATIF	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
1	2.16.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksana Dengan Baik	100%	6,121,555,273.00	Dinas Kominfo		APBD/ DAU
1.1	**2.16.01.2.01**	**Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**19 Dokumen**	**10,393,000.00**	Kominfo		**APBD/DAU**
1.1.1	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,445,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.1.2	2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1,498,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.1.3	2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	1,475,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.1.4	2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,475,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.1.5	2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1,500,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.1.6	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1,500,000.00	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				
				VOLUME	PAGU INDIKATIF	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
1.1.7	2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	13 Dokumen	1,500,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.2	**2.16.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan**	**9 Layanan**	**5,426,772,273.00**	Kominfo		**APBD/DAU**
1.2.1	2.16.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	58 Orang	5,269,617,273.00	Kominfo		APBD/DAU
1.2.2	2.16.01.2.02.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	154,220,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.2.3	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	-	Kominfo		APBD/DAU
1.2.4	2.16.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1,605,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.2.5	2.16.01.2.02.07	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan	-	Kominfo		APBD/DAU
1.2.6	2.16.01.2.02.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1,330,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.3	2.16.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	7,550,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.3.1	2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen	1,430,000.00	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				
				VOLUME	PAGU INDIKATIF	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
1.3.2	2.16.01.2.03.02	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	-	Kominfo		APBD/DAU
1.3.4	2.16.01.2.03.04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6,120,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.4	2.16.01.2.06	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	4 Layanan	14,380,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.4.1	**2.16.01.2.05.01**	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	-	Kominfo		APBD/DAU
1.4.2	**2.16.01.2.05.02**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	60 Paket	11,250,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.4.3	**2.16.01.2.05.04**	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	3,130,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.4.4	**2.16.01.2.05.09**	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	-	Kominfo		APBD/DAU
1.5	**2.16.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Umum Yang Dilaksanakan**	**5 Layanan**	**295,510,000.00**	Kominfo		**APBD/DAU**
1.5.1	**2.16.01.2.06.01**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	3,930,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.5.2	**2.16.01.2.06.03**	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4,236,000.00	Kominfo		APBD/DAU
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33,327,000.00	Kominfo		

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				
				VOLUME	PAGU INDIKATIF	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
1.5.3	**2.16.01.2.06.05**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11,913,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.5.5	**2.16.01.2.06.06**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.5.6	**2.16.01.2.06.07**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	230,104,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.6	**2.16.01.2.07**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	25,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.6.1	**2.16.01.2.07.05**	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	-	Kominfo		APBD/DAU
1.6.2	**2.16.01.2.07.06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	25,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.7	**2.16.01.2.08**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan	192,300,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.7.1	**2.16.01.2.08.01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5,500,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.7.2	**2.16.01.2.08.02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	600,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.7.1	**2.16.01.2.08.03**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Bulan	1,200,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.7.2	**2.16.01.2.08.04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	185,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.8	**2.16.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Layanan Pemeliharaan BMD**	**5 Layanan**	**149,650,000.00**	Kominfo		**APBD/DAU**

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				
				VOLUME	PAGU INDIKATIF	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
1.8.1	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 kali	49,650,000.00	Dinas Kominfo		APBD/DAU
1.8.2	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	100,000,000.00	Dinas Kominfo		APBD/DAU
1.8.3	2.16.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Tahun	-	Dinas Kominfo		APBD/DAU
1.8.4	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	22,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU
1.8.5	2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	30,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU
2	**2.16.02**	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Informasi Yang Dipublikasikan**	**95%**	**266,090,000.00**	**Kominfo**		**APBD/DAU**
2.2	2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen	266,090,000.00	Kominfo		APBD/DAU
2.2.1	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	26,670,000.00	Kominfo		APBD/DAU
2.2.2	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	221,820,000.00	Kominfo		APBD/DAU
2.2.3	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	17,600,000.00	Kominfo		APBD/DAU
2.2.4	2 16 02 1.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	0	-	Kominfo		APBD/DAU
2.2.5	2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	0	-	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				
				VOLUME	PAGU INDIKATIF	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
2.2.6	2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	0	-	Kominfo		APBD/DAU
2.2.7	2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	0	-	Kominfo		APBD/DAU
2.2.8	2 16 02 1.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	-	Kominfo		APBD/DAU
3	**2.16.03**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase sistem Informasi yang Terintegrasi**	**75%**	**6,938,521,000.00**	**Dinas Kominfo**		**APBD/DAU**
3.1	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros	Jumlah Pengelolaan Domain Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	63 Domain	6,650,280,000.00	OPD Dan Kelurahan		APBD/DAU
3.1.1	2.16.03.2.01.03	Penatalaksanaan dan Pengawasan nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63 domain	5,400,000.00	OPD		APBD/DAU
3.1.2	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40 Unit	1,254,880,000.00	OPD		APBD/DAU
3.1.3	2 16 03 1.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	5,390,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU
3.1.4	2 16 03 1.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	-	-	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				
				VOLUME	PAGU INDIKATIF	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
3.2	2.16.03.2.02.	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan E-Government Yang Di kembangkan	7 aplikasi	288,241,000.00	Kominfo		APBD/DAU
3.2.1	2.16.03.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang MenerapkanKoordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40 PD	300,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU
3.2.2	2.16.03.02.10	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	7 Unit	288,241,000.00	Kominfo		APBD/DAU
3.2.3	2 16 03 1.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	-	-	Kominfo		APBD/DAU
4	2. 20. 02 .	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Data	3	125,183,000.00	Kominfo		APBD/DAU
4.1	2 .20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Maros	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Daerah	85%	125,183,000.00	Kominfo		APBD/DAU
4.1.1	2 .20. 02. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	25,183,000.00	Kominfo		APBD/DAU
4.1.2	2 20 02 2.01.02	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	100,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU
4.1.3	2 20 02 1.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	-	-	Kominfo		APBD/DAU
4.1.4	2 20 02 1.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	-	-	Kominfo		APBD/DAU
5	2. 21 .02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah Yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	100%	46,150,000.00	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024				
				VOLUME	PAGU INDIKATIF	LOKASI	KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
5.1	2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Yang Menerapkan Tata kelola Keamanan Informasi	40 OPD	29,150,000.00	Kominfo		APBD/DAU
5.1.1	2 21 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yangDitetapkan	1 Buah	1,150,000.00	Kominfo		APBD/DAU
5.1.2	2 21 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Kominfo		APBD/DAU
5.1.3	2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	28,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU
5.1.4	2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	-	-	Kominfo		APBD/DAU
5.2	2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Maros	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	40 OPD	17,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU
5.2.1	2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	40 OPD	17,000,000.00	Kominfo		APBD/DAU

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMINFO-SP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel. 3.1 Identifikasi Terhadap Arah Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah

Arah Kebijakan Nasional	Arah Kebijakan Provinsi	Arah Kebijakan Daerah
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;	Penguatan akuntabilitas
Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.	Implementasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis SPBE
Meningkatnya kualitas Pengelolaan informasi dan komunikasi publik		Meningkatnya pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik
Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas		Meningkatnya kualitas data
Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis		Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi
Terselenggaranya Keamanan Siber secara Andal, Profesional dan Terpercaya		Meningkatnya layanan keamanan informasi

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Maros harus merujuk pada sasaran dan kebijakan nasioanal dan kebijakan propinsi untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang komunikasi dan informatika teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mengembangkan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal, pedalaman maupun perbatasan terus digalakkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo-SP

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas KOMINFO-SP Kabupaten Maros Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian	Nilai SAKIP
2.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Tingkat Kematangan pada Tata Kelola dan Kebijakan SPBE	Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE dan Kebijakan Internal SPBE
		Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi
		Meningkatnya Kualitas Layanan Ketersediaan Data	Indeks Kepuasan Konsumen Terhadap Data
		Meningkatnya Kualitas Dan Akses Masyarakat Untuk Memperoleh Informasi	Persentase Masyarakat Yang Mengakses Informasi Melalui Media Sesuai Strakom
3.	Meningkatkan Layanan TIK dalam Aktvitas Ekonomi	Meningkatnya Pemanfaatan TIK Di Sektor Ekonomi Dan Bisnis	Persentase Pelaku Ekonomi Yang memanfaatkan teknologi dalam transaksi

3.3 Program dan Kegiatan

1.Pada Sub Kegiatan 'Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah" dilakukan perubahan rincian belanja karena terdapat sisa anggaran pada belanja modal Peralatan jaringan sehingga sisa pagu anggaran dialihkan ke belanja pada sub kegiatan,yaitu :

a. Belanja modal peralatan dokumentasi dan belanja pemeliharaan peralatan dokumentasi pada sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.

b. Belanja modal pengadaan UPS, belanja jasa BHP Frekuensi Radio dan belanja jasa tenaga perencana dan tenaga pengawas pada sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.

c. Belanja Modal pengadaan laptop dan kursi kerja pada sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah.

d. Belanja jasa/honorarium panitia pemeriksa pada sub kegiatan penyelenggaran sistem komunikasi intra pemerintah daerah.

e. Belanja perjalanan dinas dalam daerah pada sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik.

f. Belanja perjalanan dinas dalam daerah pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

g. Belanja pemeliharaan peralatan alat pendingin pada sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

h. Belanja cetak buku pada sub kegiatan koorinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data sektoral daerah.

3.4 Matriks Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas KOMINFO-SP

Tabel 3.4. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas KOMINFO-SP Kabupaten Maros Tahun 2024

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
1	2.16.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Fungsi Manajemen OPD yang Terlaksana Dengan Baik	100%	100%	5,204,980,000.00	6,121,555,273.00	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo		APBD/ DAU
1.1	**2.16.01.2.01**	**Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**19 Dokumen**	**19 Dokumen**	**11,000,000.00**	**10,393,000.00**	Kominfo	Kominfo		**APBD/DAU**
1.1.1	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000.00	1,445,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.1.2	2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000.00	1,498,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.1.3	2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1Dokumen	1Dokumen	1,500,000.00	1,475,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
1.1.4	2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000.00	1,475,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.1.5	2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000.00	1,500,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.1.6	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	1,500,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.1.7	2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PD	13 Dokumen	13 Dokumen	1,000,000.00	1,500,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.2	**2.16.01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Keuangan**	**9 Layanan**	**9 Layanan**	**4,545,000,000.00**	**5,426,772,273.00**	Kominfo	Kominfo		**APBD/DAU**
1.2.1	2.16.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	58 Orang	58 Orang	4,400,000,000.00	5,269,617,273.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
1.2.2	2.16.01.2.02.04	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	137,000,000.00	154,220,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.2.3	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.2.4	2.16.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	1,605,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.2.5	2.16.01.2.02.07	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.2.6	2.16.01.2.02.08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	5,000,000.00	1,330,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.3	2.16.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	14,500,000.00	7,550,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
1.3.1	2.16.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000.00	1,430,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.3.2	2.16.01.2.03.02	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.3.4	2.16.01.2.03.04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000.00	6,120,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.4	2.16.01.2.06	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	4 Layanan	4 Layanan	81,080,000.00	14,380,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.4.1	**2.16.01.2.05.01**	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit	9,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.4.2	**2.16.01.2.05.02**	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	60 Paket	60 Paket	18,000,000.00	11,250,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.4.3	**2.16.01.2.05.04**	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	4,080,000.00	3,130,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
1.4.4	2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	50,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.5	**2.16.01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Umum Yang Dilaksanakan**	**5 Layanan**	**5 Layanan**	**300,000,000.00**	**295,510,000.00**	Kominfo	Kominfo		**APBD/DAU**
1.5.1	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	5,000,000.00	3,930,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.5.2	2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,000,000.00	4,236,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,000,000.00	33,327,000.00	Kominfo	Kominfo		
1.5.3	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	JJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10,000,000.00	11,913,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.5.5	2.16.01.2.06.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	15,000,000.00	12,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.5.6	2.16.01.2.06.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	120,000,000.00	230,104,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
1.6	**2.16.01.2.07**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	115,000,000.00	25,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.6.1	**2.16.01.2.07.05**	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	0	100,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.6.2	**2.16.01.2.07.06**	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	3	15,000,000.00	25,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.7	**2.16.01.2.08**	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan	4 Layanan	34,400,000.00	192,300,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.7.1	**2.16.01.2.08.01**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	5,000,000.00	5,500,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.7.2	**2.16.01.2.08.02**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	600,000.00	600,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.7.1	**2.16.01.2.08.03**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	12 Bulan	12 Bulan	1,200,000.00	1,200,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.7.2	**2.16.01.2.08.04**	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	27,600,000.00	185,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
1.8	**2.16.01.2.09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Layanan Pemeliharaan BMD**	**5 Layanan**	**5 ayanan**	**104,000,000.00**	**149,650,000.00**	Kominfo	Kominfo		**APBD/DAU**
1.8.1	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Kali	54 kali	50,000,000.00	49,650,000.00	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo		APBD/DAU
1.8.2	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	54,000,000.00	100,000,000.00	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo		APBD/DAU
1.8.3	2.16.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Tahun	1 Tahun	20,000,000.00	-	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo		APBD/DAU
1.8.4	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25,000,000.00	22,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
1.8.5	2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun	100,000,000.00	30,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
2	**2.16.02**	**Program Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase Informasi Yang Dipublikasikan**	**95%**	**95%**	**565,000,000.00**	**266,090,000.00**	**Kominfo**	**Kominfo**		**APBD/DAU**
2.2	2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi	8 Dokumen	8 Dokumen	565,000,000.00	266,090,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dan Komunikasi Pemerintah Daerah								
2.2.1	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000.00	26,670,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
2.2.2	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	200,000,000.00	221,820,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
2.2.3	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	12 Dokumen	20,000,000.00	17,600,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
2.2.4	2 16 02 1.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen	0	5,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
2.2.5	2 16 02 1.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	6 Orang	0	30,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
2.2.6	2 16 02 1.01 11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 Dokumen	0	5,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
2.2.7	2 16 02 1.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	0	5,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
2.2.8	2 16 02 1.01 13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5 Jenis	0	200,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
3	**2.16.03**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase sistem Informasi yang Terintegrasi**	**75%**	**75%**	**6,860,000,000.00**	**6,938,521,000.00**	**Dinas Kominfo**	**Dinas Kominfo**		**APBD/DAU**
3.1	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros	Jumlah Pengelolaan Domain Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	63 Domain	63 Domain	6,610,000,000.00	6,650,280,000.00	OPD Dan Kelurahan	OPD Dan Kelurahan		APBD/DAU
3.1.1	2.16.03.2.01.03	Penatalaksanaan dan Pengawasan nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63 domain	63 domain	10,000,000.00	5,400,000.00	OPD	OPD		APBD/DAU
3.1.2	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	40 Unit	40 Unit	500,000,000.00	1,254,880,000.00	OPD	OPD		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
3.1.3	2 16 03 1.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000,000.00	5,390,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
3.1.4	2 16 03 1.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	12 Dokumen	-	100,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
3.2	2.16.03.2.02.	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan E-Government Yang Di kembangkan	7 aplikasi	7 aplikasi	250,000,000.00	288,241,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
3.2.1	2.16.03.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang MenerapkanKoordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	40 PD	40 PD	100,000,000.00	300,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
3.2.2	2.16.03.02.10	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	7 Unit	7 Unit	250,000,000.00	288,241,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
3.2.3	2 16 03 1.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	12 Dokumen	-	100,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
4	2. 20. 02 .	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Data	3	3	320,000,000.00	125,183,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
4.1	2 .20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Kabupaten Maros	Persentase Ketersediaan Data Sektoral Daerah	85%	85%	320,000,000.00	125,183,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
4.1.1	2 .20. 02. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	3 Dokumen	20,000,000.00	25,183,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
4.1.2	2 20 02 2.01.02	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	1 Unit	100,000,000.00	100,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
4.1.3	2 20 02 1.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	40 Laporan	-	100,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
4.1.4	2 20 02 1.01 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	40 Jenis	-	100,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
5	2. 21 .02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah Yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	100%	100%	310,000,000.00	46,150,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
5.1	2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Jumlah OPD Yang Menerapkan Tata kelola Keamanan Informasi	40 OPD	40 OPD	260,000,000.00	29,150,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
		Daerah Kabupaten/Kota									
5.1.1	2 21 02 1.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yangDitetapkan	2 Buah	1 Buah	5,000,000.00	1,150,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
5.1.2	2 21 02 1.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	5,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
5.1.3	2 21 02 1.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000.00	28,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
5.1.4	2 21 02 2.01 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40 OPD	-	200,000,000.00	-	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

NO	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024							
				VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI		KELOMPOK SASARAN	Sumber Dana
				SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SETELAH	SETELAH		
5.2	2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Maros	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	40 OPD	40 OPD	50,000,000.00	17,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU
5.2.1	2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	40 OPD	40 OPD	50,000,000.00	17,000,000.00	Kominfo	Kominfo		APBD/DAU

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Maros dan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Maros menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar benar dikedepankan.

Output Renja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros adalah program tahunan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros. Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024 dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Maros, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Maros.

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAROS

=== RENCANA KERJA ===

RENJA PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DOKUMEN PERENCANAAN

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

wonderful indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan yang sudah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros merupakan penjabaran dari Renstra yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maros setelah melewati proses penyusunan Ranwal, Rancangan, Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) dan beberapa kali mengikuti pendampingan yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Maros yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros dalam 1 tahun anggaran. Dokumen Renja tersebut nantinya diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis dan permasalahan yang sedang berkembang saat ini serta sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros

Maros, 31 Juli 2024
KEPALA DINAS PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

M. FERDIANSYAH, S. IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19750921 199412 1 00

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BER BERJALAN**	**6**
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Perangkat Daerah Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12 17
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
	2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyrakat	34
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**41**
	4.1 Rencana Kerja Perubahan Beserta Pendanaannya Tahun 2025	41
	4.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	55
	4.3 Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024	55
BAB V	**PENUTUP**	**56**
	Catatan Penting dalam Penyusunan Renja Perubahan	56

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan instansi yang mendukung Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wilayah hukum Pemerintahan Maros, khususnya Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2024 adalah rencana tahunan untuk penjabaran dan pelaksanaan pembangunan. Sesuai kewenangannya, pemerintah daerah, kabupaten, atau kota membuat perencanaan pembangunan di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa perencanaan pembangunan harus diintegrasikan dalam sistem pelaksanaan pemerintahan daerah.

Rencana pembangunan daerah harus dibuat oleh setiap daerah berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Rencana ini harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan fleksibel, dengan jenjang perencanaan yang mencakup perencanaan tahunan, jangka panjang, dan jangka menengah. Untuk setiap kabupaten atau kota, harus menetapkan Rencana kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun Rencana kerja (Renja) Perubahan. Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan bahwa semua OPD harus membuat dan memiliki Rencana kerja Perubahan(Renja) OPD.

Untuk alasan ini, Rencana kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, secara konsisten mempertimbangkan semua aspirasi pemangku kepentingan pembangunan. Untuk melakukan ini, Musrenbang tahunan diadakan secara berjenjang untuk mengintegrasikan Rancangan Renja Perubahan OPD. Rencana kerja PerubahanPariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2024 telah disusun sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang disebutkan di atas Namun, RKPD harus dilaksanakan bersamaan dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana kerja Perubahan ini berfungsi sebagai pedoman operasional dan pedoman bagi pimpinan dan seluruh karyawan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros untuk menjalankan tugas utama, fungsi, program, dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Dengan adanya Rencana kerja PerubahanPerubahan (Renja) Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2024 ini, diharapkan kinerja yang lebih baik akan dicapai sesuai

dengan arahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros akan tercapai secara optimal.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja PerubahanPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana kerja PerubahanPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 8;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Maros Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
24. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana kerja PerubahanPemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan bagi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros selama tahun 2024.

B. Tujuan

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2024 bertujuan memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Maros di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Sistematika Penulisan Rencana kerja PerubahanDinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

Pada Bab ini memiliki Sub Bab yang terdiri dari:

- Sub Bab 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan [I bulan Berjalan Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

  Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.
- Sub Bab 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, maupun terhadap IKK RPJMD, IKK LPPD, dan indikator TPB.

- Sub Bab 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

  Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, dan SDGs (*Suistanable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- Sub Bab 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

  Berisikan uraian mengenai: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

- Sub Bab 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

  Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan).

BAB III. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan Rencana kerja Perubahan dan pendanaan program serta kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2026. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan PD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan PD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah		**Nilai SAKIP**										**21,56729284**		**26.592.250.378**		**531.845.007.551**	**DISPARPORA**
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	**44.320.417.260**	**100**	**26.592.250.356**	**100**	**8.864.083.452**	**16,67**	**1.911.742.836**	**16,66666667**	**21,56729284**	**117**	**26.592.250.378**	**2.333**	**531.845.007.551**	**DISPARPORA**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**95**	**79.500.000**	**57**	**47.700.000**	**19**	**15.900.000**	**2**	**2.810.000**	**10,52631579**	**17,67295597**	**68**	**47.700.018**	**1.351**	**954.000.353**	**DISPARPORA**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	14.050.000	6	8.430.000	2	2.810.000	2	2.810.000	100	100	106	8.430.100	2.120	168.602.000	DISPARPORA
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	13.150.000	3	7.890.000	1	2.630.000	0	0	0	0	3	7.890.000	60	157.800.000	DISPARPORA
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	4.650.000	3	2.790.000	1	930.000	0	0	0	0	3	2.790.000	60	55.800.000	DISPARPORA
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	5.625.000	3	3.375.000	1	1.125.000	0	0	0	0	3	3.375.000	60	67.500.000	DISPARPORA
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	14.125.000	3	8.475.000	1	2.825.000	0	0	0	0	3	8.475.000	60	169.500.000	DISPARPORA
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	15.400.000	3	9.240.000	1	3.080.000	0	0	0	0	3	9.240.000	60	184.800.000	DISPARPORA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	12.500.000	36	7.500.000	12	2.500.000	0	0	0	0	36	7.500.000	720	150.000.000	DISPARPORA
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Administrasi keuaangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**225**	**38.865.726.910**	**135**	**23.319.436.146**	**45**	**7.773.145.382**	**8**	**1.599.969.691**	**17,77777778**	**20,58329817**	**153**	**23.319.436.167**	**3.056**	**466.388.723.332**	**DISPARPORA**

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros

	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6370	38.020.876.910	3822	22.812.526.146	1.274	7.604.175.382	364	1.555.089.691	28,57142857	20,45047113	3.851	22.812.526.166	77.011	456.250.523.329	DISPARPORA
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25	833.550.000	15	500.130.000	5	166.710.000	4	44.880.000	80	26,92100054	95	500.130.027	1.900	10.002.600.538	DISPARPORA
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	90	11.300.000	54	6.780.000	18	2.260.000	0	0	0	0	54	6.780.000	1.080	135.600.000	DISPARPORA
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**5**	**2.600.190.350**	**5**	**1.560.114.210**	**5**	**520.038.070**	**1,25**	**187.989.145**	**25**	**36,14911212**	**30**	**1.560.114.246**	**600**	**31.202.284.923**	**DISPARPORA**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	78.427.850	3	47.056.710	1	15.685.570	0,25	0	25	0	28	47.056.710	560	941.134.200	DISPARPORA
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	464.162.500	3	278.497.500	1	92.832.500	0,25	6.772.000	25	7,29485902	28	278.497.507	560	5.569.950.146	DISPARPORA
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	105.500.000	3	63.300.000	1	21.100.000	0,25	1.750.000	25	8,293838863	28	63.300.008	560	1.266.000.166	DISPARPORA
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.682.100.000	36	1.009.260.000	12	336.420.000	3	165.967.145	25	49,33331698	61	1.009.260.049	1.220	20.185.200.987	DISPARPORA
	Dukungan pelaksanaan sistem peemrintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dukungan pelaksanaan sistem peemrintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5	270.000.000	3	162.000.000	1	54.000.000	0,25	13.500.000	25	25	28	162.000.025	560	3.240.000.500	DISPARPORA
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**2.472.500.000**	**2**	**1.483.500.000**	**2**	**494.500.000**	**0,5**	**91.950.000**	**25**	**18,59453994**	**27**	**1.483.500.019**	**540**	**29.670.000.372**	**DISPARPORA**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	72.500.000	36	43.500.000	12	14.500.000	3	5.000.000	25	34,48275862	61	43.500.034	1.220	870.000.690	DISPARPORA
	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	2.400.000.000	36	1.440.000.000	12	480.000.000	3	86.950.000	25	18,11458333	61	1.440.000.018	1.220	28.800.000.362	DISPARPORA
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**1**	**302.500.000**	**1**	**181.500.000**	**1**	**60.500.000**	**0,25**	**29.024.000**	**25**	**47,97355372**	**26**	**181.500.048**	**520**	**3.630.000.959**	**DISPARPORA**
	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatanan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25	302.500.000	15	181.500.000	5	60.500.000	2,5	29.024.000	50	47,97355372	65	181.500.048	1.300	3.630.000.959	DISPARPORA
	Meningkatkan Kualitas Destinasi Wisata		**Persentase Destinasi wisata yang berkualitas Baik**															**DISPARPORA**
	Peningkatan daya tarik desitinasi pariwisata	**Peningkatan daya tarik desitinasi pariwisata**	**Rata-rata lama kunjungan wisatawan**	**3**	**22.009.725.323**	**0**	**17.735.715.663**	**1**	**1.577.225.000**	**0,32**	**0**	**32**	**2,02888E-08**	**32**	**17.735.715.663**	**640**	**354.714.313.260**	**DISPARPORA**

	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	**Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota**	**Jumlah kawasan startegis pariwisata yang terkelola dengan baik**	**3**	**1.220.000.000**	**1**	**945.665.340**	**1**	**244.000.000**	**0,3**	**0**	**30**	**1,22951E-07**	**31**	**945.665.340**	**620**	**18.913.306.800**	**DISPARPORA**
	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata startegis pariwisata kabupaten/kota	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata startegis pariwisata	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,	15	1.220.000.000	0	0	3	244.000.000	1	1	33,33333333	4,09836E-07	33	0	667	0	DISPARPORA
	Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	**Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota**	**Jumlah destinasi wisata yang terkelola dengan baik**	**3**	**20.789.725.323**	**3**	**16.790.050.323**	**3**	**1.333.225.000**	**1**	**1**	**33,33333333**	**7,50061E-08**	**36**	**16.790.050.323**	**727**	**335.801.006.460**	**DISPARPORA**
	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai	15	147.675.000	0	0	3	49.225.000	1	1	33,33333333	2,03149E-06	33	0	667	0	DISPARPORA
	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi wisata kabupaten/kota	Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi wisata kabupaten/kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	200	20.642.050.323	21	16.790.050.323	40	1.284.000.000	10	10	25	7,78816E-07	46	16.790.050.323	920	335.801.006.460	DISPARPORA
	Meningkatnya kunjungan wisatwan		**Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan**															**DISPARPORA**
	Pemasaran wisata	**Pemasaran wisata**	**Persentase Kunjungan Wisata**	**100**	**1.689.300.000**	**95,47**	**1.424.255.416**	**100,00**	**563.100.000**	**33,33**	**4.500.000**	**33,33333333**	**0,799147576**	**129**	**1.424.255.417**	**2.576**	**28.485.108.336**	**DISPARPORA**
	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	**Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota**	**Jumlah Daya Tarik, Destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang terpromosikan**	**15**	**1.689.300.000**	**2**	**1.424.255.416**	**15**	**563.100.000**	**5**	**4.500.000**	**33,33333333**	**0,799147576**	**35**	**1.424.255.417**	**707**	**28.485.108.336**	**DISPARPORA**
	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	25	1.609.800.000	0	0	5	536.600.000	2	0	40	0	40	0	800	0	DISPARPORA
	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan	60	79.500.000	0	0	12	26.500.000	3	4.500.000	25	16,98113208	25	17	500	340	DISPARPORA
	Meningkatnya usaha ekonomi Kreatif yang memiliki sertifikasi		**persentase usaha ekonomi Kreatif yang bersertifikasi**															**DISPARPORA**
	Pengembangan ekonomi kreatif mlalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	**Pengembangan ekonomi kreatif mlalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual**	**PersentaseUsaha Ekonomi Kreatif Lokal yang memilik Hak Kekayaan Intelktual**	**100**	**417.108.330**	**62,5**	**79.967.500**	**100**	**177.081.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63**	**79.967.500**	**1.250**	**1.599.350.000**	**DISPARPORA**
	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi,Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi,Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Usaha ekonomi kreatif yang Memanfaatkan Prasarana dan Pengembangan Pemasaran**	**315**	**182.958.330**	**1**	**79.967.500**	**105**	**130.251.666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**79.967.500**	**20**	**1.599.350.000**	**DISPARPORA**

	kabupaten/kota wirausaha	kepemudaan tenaga																	
	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	175	107.400.000	0	0	35	21.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPARPORA
	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	125	117.375.000	0	0	25	23.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPARPORA
	Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan saran tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strtaegis kepemudaan	Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan saran tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	225	1.491.000.000	135	547.255.000	45	298.200.000	0	58.500.000	0	19,61770624	135	547.255.020	2.700	10.945.100.392	DISPARPORA
	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota	**Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**14**	**5.003.000.000**	**14**	**2.341.517.000**	**14**	**1.000.600.000**	**1**	**320.000.000**	**7,142857143**	**31,98081151**	**21**	**2.341.517.032**	**423**	**46.830.340.640**	**DISPARPORA**
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitran dengan dunia usaha	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	500	253.000.000	0	0	100	50.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPARPORA
	Peningkatan kapasitas pemuda dan organsiasi kepemudaan kabupaten/kota	Peningkatan kapasitas pemuda dan organsiasi kepemudaan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	30	4.750.000.000	0	0	6	950.000.000	1	320.000.000	16,66666667	33,68421053	17	34	333	674	DISPARPORA
	Meningkatnya Pembinaan Usia Dini dan prestasi Olahraga Unggulan Daerah		**Persentase Cabang Olahraga yang melakukan Pembinaan usia Dini dan Berprestasi**															**DISPARPORA**
	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	**Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**100**	**24.133.750.000**	**100**	**6.357.013.083**	**100**	**2.709.850.000**	**43,94**	**1.532.000.000**	**43,93939394**	**56,53449453**	**144**	**6.357.013.140**	**2.879**	**127.140.262.791**	**DISPARPORA**
	Penyelenggaraan kejuaran olahraga ttingkat daerah kabupaten/kota	**Penyelenggaraan kejuaran olahraga ttingkat daerah kabupaten/kota**	**Jumlah Cabang Olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat daerah**	**7**	**2.400.000.000**	**7**	**647.250.000**	**7**	**480.000.000**	**3**	**20.000.000**	**42,85714286**	**4,166666667**	**50**	**647.250.004**	**997**	**12.945.000.083**	**DISPARPORA**
	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat	70	1.400.000.000	7	358.450.000	14	280.000.000	3	20.000.000	21,42857143	7,142857143	28	358.450.007	569	7.169.000.143	DISPARPORA
	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	100	1.000.000.000	0	0	20	200.000.000	5	0	25	0	25	0	500	0	DISPARPORA

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	**Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi**	**Jumlah cabang olahraga yang mendapatkan pembinaan**	**7**	**101.750.000**	**7**	**244.449.263**	**7**	**20.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**244.449.263**	**140**	**4.888.985.260**	**DISPARPORA**
Seleksi atlet daerah	Seleksi atlet daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	1250	101.750.000	0	0	250	20.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	DISPARPORA
Pengembangan dan pengembangan organisasi olahraga	**Pengembangan dan pengembangan organisasi olahraga**	**Jumlah organisasi olahraga yang mendapatkan pembinaan**	**27**	**10.584.500.000**	**27**	**5.279.028.820**	**27**	**2.116.900.000**	**20**	**1.500.000.000**	**74,07407407**	**70,85833058**	**101**	**5.279.028.891**	**2.021**	**105.580.577.817**	**DISPARPORA**
Pengembangan organisasi keolahragaan	Pengembangan organisasi keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	135	10.584.500.000	0	0	27	2.116.900.000	20	1.500.000.000	74,07407407	70,85833058	74	71	1.481	1.417	DISPARPORA
Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	**Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi**	**Jumlah cabang olahraga rekreasi yang mendapatkan pembinaan**	**25**	**463.000.000**	**17**	**186.285.000**	**25**	**92.600.000**	**6**	**12.000.000**	**24**	**12,95896328**	**41**	**186.285.013**	**820**	**3.725.700.259**	**DISPARPORA**
Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	60	179.000.000	0	0	12	35.800.000	4	6.000.000	33,33333333	16,75977654	33	17	667	335	DISPARPORA
Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	15	120.000.000	2,25	24.980.000	3	24.000.000	1	6.000.000	33,33333333	25	36	24.980.025	712	499.600.500	DISPARPORA
Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat	Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	15	164.000.000	2	20.000.000	3	32.800.000	0	0	0	0	2	20.000.000	40	400.000.000	DISPARPORA
Meningkatnya kualitas pendidikan pemuda		**Rata-rata lama sekolah pemuda**															**DISPARPORA**
Pengembangan kapasitas kepramukaan	**Pengembangan kapasitas kepramukaan**	**Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi**	**100**	**2.861.500.000**	**100**	**1.620.595.000**	**100**	**572.300.000**	**32,95**	**33**	**32,95454545**	**5,75826E-06**	**133**	**1.620.595.000**	**2.659**	**32.411.900.000**	**DISPARPORA**
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Jumlah oragnsiasi kepramukaan yang mendapatkan pembinaan**	**440**	**2.861.500.000**	**440,00**	**1.620.595.000**	**440**	**572.300.000**	**145**	**145**	**32,95454545**	**2,53364E-05**	**473**	**1.620.595.000**	**9.459**	**32.411.900.000**	**DISPARPORA**
Koordinasi dan sinkronisasi peneydiaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik	Koordinasi dan sinkronisasi peneydiaan data dan informasi kepramukaan berbasis	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	60	60.000.000	0	0	12	12.000.000	3	3	25	0,000025	25	0	500	0	DISPARPORA
Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	2200	2.801.500.000	270	1.510.620.000	440	560.300.000	145	145	32,95454545	2,5879E-05	303	1.510.620.000	6.059	30.212.400.000	DISPARPORA

Sumber : Disparpora Kab. Maros, 2024

Dari hasil analsis yang dilakukan terkait pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan diperoleh hasil sebagai berikut :

- Jumlah program yang dilaksanakan tahun 2024 sebanyak 8 program, jumlah program yang berjalan sesuai dengan Renja Pokok 2024 adalah sebanyak 8 program .
- Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sebanyak 18 kegiatan dengan jumlah kegiatan yang berjalan sesuai dengan Renja Pokok 2024 sebanyak 18 kegiatan.
- Jumlah sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 41 sub kegiatan, dengan jumlah 37 sub kegiatan yang berjalan sesuai dengan Renja Pokok 2024 dan sebanyak 4 sub kegiatan yang belum berjalan sampaidengan Triwulan II Tahun 2024 .

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros sebagai lembaga penunjang yang membantu Kepala Daerah di Urusan Kepariwisataan ,Kepemudaan dan Olahraga telah di atur didalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepariwisataan penunjang urusan pemerintahaan Kepemudaan dan Olahraga .

Pencapaian keberhasilan Sektor kepariwisataan , Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan dengan cara Sinergitas antara Pemerintah Pusat, oPemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten:

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros memiliki 20 indikator terkait pelayanan. Indikator-indikator tersebut terdiri dari 7 indikator Kinerja Utama, ,13 indikator untuk LPPD Realisasi setiap indikator pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disparpora Kabupaten Maros

No.	Indikaor Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target				Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15
1	Rata rata Lama Sekolah Pemuda			√	Indeks	7,16	7,27	7,38	7.48	7,16	7,27	7,38	7.48	Indikator Kinerja Utama
2	Angka Harapan Hidup Pemuda			√	Indeks	72,67	72,77	72,87	72,97	72,67	72,77	72,87	72,97	Indikator Kinerja Utama
3	Persentase Cabang Olahraga yang melakukan Pembinaan usia Dini dan Berprestasi			√	Persen	80	85	90	95	80	85	90	95	Indikator Kinerja Utama
4	Persentase Destinasi wisata yang berkualitas Baik			√	Persen	80	85	90	95	80	85	90	95	Indikator Kinerja Utama
5	Persentase peningkatan Kunjungan Wisatawan			√	Persen	37,64,	40,74	44,44	48,15	43,79	40,01	44,44	48,15	Indikator Kinerja Utama

No.	Indikaor Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target				Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15
6	persentase usaha ekonomi Kreatif yang bersertifikasi			√	Persen	80	85	90	95	80	85	90	95	Indikator Kinerja Utama
7	persentase usaha ekonomi Kreatif yang berkualitas dan terstandarisasi			√	Persen	80	85	90	95	80	85	90	95	Indikator Kinerja Utama
8	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		√		Orang	-	-	-	-	414	6.396	414	6.396	Indikator Kinerja LPPD
9	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		√		Orang	-	-	-	-	414	3.846	414	3.846	Indikator Kinerja LPPD
10	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		√		Orang	-	-	-	-	664	5.813	664	5.813	Indikator Kinerja LPPD
11	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		√		Orang	-	-	-	-	14	863	14	863	Indikator Kinerja LPPD

No.	Indikaor Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target				Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	15
12	Jumlah Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan--satuan pendidikan		√		Orang	-	-	-	-	157	157	157	157	Indikator Kinerja LPPD
13	Jumlah penyelengaraan event OR prestasi tingkat daerah		√		Organisasi	-	-	-	-	1	1	1	1	Indikator Kinerja LPPD
14	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		√		Unit	-	-	-	-	3	3	3	3	Indikator Kinerja LPPD
15	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata		√		Organisasi	-	-	-	-	42	44	42	44	Indikator Kinerja LPPD
16	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		√		Unit	-	-	-	-	219	219	219	219	Indikator Kinerja LPPD
17	Jumlah Wisatawan mancanegara per kebangsaan		√		Orang	-	-	-	-	2.138	6.373	2.138	6.373	Indikator Kinerja LPPD

No.	Indikaor Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target				Realisasi		Proyeksi		Catatan analisis
						2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Jumlah Promosi Event Daerah yang terlaksana di dalam Negeri		√		Event	-	-	-	-	70	62	62	62	Indikator Kinerja LPPD
19	Jumlah Industri Pariwisata Daerah Yang Berpartisipasi pada event Promosi pariwisata di dalam negeri		√		Industri	-	-	-	-	13	13	13	13	Indikator Kinerja LPPD
20	Persentase Tenaga Kerja di Sektor pariwisata yang disertifikasi		√		Persen	-	-	-	-	14,86%	22,68%	14,86%	22,68%	Indikator Kinerja LPPD
21	Persentase SDM Peserta pembekalan sektor kepariwisataan		√		Persen	-	-	-	-	7,69%	22,1%	7,69%	22,1%	Indikator Kinerja LPPD
22	Jumlah Lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		√		Lokasi	-	-	-	-	10	10	10	10	Indikator Kinerja LPPD

Sumber : Disparpora Kab. Maros, 2023

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Tingkat Pelayanan

Penetapan kinerja sesuai dengan skala yang terdapat dalam Permendagri 86 Tahun 2017, sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90,1	Sangat Tinggi	
2	75,1 ≤ 90	Tinggi	
3	65,1 ≤ 75	Sedang	
4	50,1 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Kemendargi (Permendagri 86 Tahun 2017), 2017

Capaian indikator kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selama tahun 2022 dan tahun 2023 secara umum termasuk dalam ketegori sangat tinggi, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 254,77 persen. Namun apabila dibandingkan capaian kinerja pelayanan tahun 2022 dan 2023, terdapat penurunan capaian. Hal ini terlihat pada Tabel 2.4, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja pelayanan sebesar 307,45 persen, kemudian pada tahun 2023 menurun hingga mencapai 202,08 persen. Penurunan kinerja ini disebabkan pada tahun 2023, pada saat penyusunan dokumen Renja 2022, data terkait indikator pelayanan tahun 2023 belum tersedia, sehingga sesuai dengan aturan penggunaan data yang baku, maka data tahun 2022 dapat masih relevan dengan kondisi tahun 2023.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

No.	Indikaor Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata rata Lama Sekolah Pemuda	Indeks	7,16	7,27	7,16	7,27	100,00	100,00
2	Angka Harapan Hidup Pemuda	Indeks	72,67	72,77	72,67	72,77	100,00	100,00
3	ersentase Cabang Olahraga yang melakukan Pembinaan usia Dini dan Berprestasi	Persen	80	85	80	85	100,00	100,00

No.	Indikaor Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Persentase Destinasi wisata yang berkualitas Baik	Persen	80	85	80	85	100,00	100,00
5	Persentase peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	37,64,	44,74	40,01	43,79	106,00	98,00
6	persentase usaha ekonomi Kreatif yang bersertifikasi	Persen	80	85	80	85	100,00	100,00
7	persentase usaha ekonomi Kreatif yang berkualitas dan terstandarisasi	Persen	80	85	80	85	100,00	100,00
8	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Orang	-	-	414	6396	414	6396
9	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Orang	-	-	414	3846	414	3846
10	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Orang	-	-	664	5813	664	5813
11	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Orang i	-	-	14	863	14	863
12	Jumlah Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-- satuan pendidikan	Orang	-	-	157	157	157	157
13	Jumlah penyelengaraan event OR prestasi tingkat daerah	Organisasi	-	-	1	1	1	1
14	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Obyek	-	-	3	3	3	3
15	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	Unit	-	-	42	44	44,64	44,38
16	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Unit	-	-	219	219	100,83	99,85
17	Jumlah Wisatawan mancanegara per kebangsaan	Orang	-	-	2138	6373	107,14	100,00
	Jumlah Promosi Event Daerah yang terlaksana di dalam Negeri	Event	-	-	70	62		

No.	Indikaor Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Industri Pariwisata Daerah Yang Berpartisipasi pada event Promosi pariwisata di dalam negeri	Industri	-	-	13	13		
	Persentase Tenaga Kerja di Sektor pariwisata yang disertifikasi	Persen	-	-	14,86	22,68		
	Persentase SDM Peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Persen	-	-	7,69	22,1		
	Jumlah Lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	-	-	10	10		

Sumber Disparpora), 2024

Seperti yang terlihat pada Tabel 2.4, tingginya capaian rata-rata kinerja pelayanan Disparpora disebabkan adanya indikator pelayanan yang memiliki capaian Rata rata 100 persen yaitu hampir setiap Indikator, namun terdapat satu Indikator yang tidak mencapai Realiasasi 100 % yaitu Persentase Kunjungan Wisatawan yang menurun angka capaiannnya.

Walaupun hampir seluruh inidkator pelayanan Disparpora memiliki capaian capaian Rata rata 100 , masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tersebut. Analisis terkait permasalahan, hambatan, dampak serta peluang setiap indikator pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5
Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No.	Permasalahan	Hambatan	Dampak	Peluang	Rekomendasi
1	'Kondisi cuaca ekstrim	Banyak daerah wisata ditutup	Kunjungan wisata menurun	• Potensi daerah wisata non alam / Buatan • Melaksanakan Kerja Sama pemanfaatan dengan Pihak Ke 3	Perlunya Daerah wisata dikelola oleh pihak swasta sehingga dapat mengatisipasi segala sesuatu yang akan terjadi
2	Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang Pariwisata	Banyak Obyek wisata tidak terkelola dengan baik	Kunjungan wisata tidak meningkat	potensi daerah wisata seharusnya dikelola dengan baik dan benar	Perlunya dilakukan evaluasi berkala bagi pengelola Daya Tarik Wisata agar kualitas (profesionalisme) SDM pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung dan penunjang kepariwisataan lainnya lebih meningkat kapasitasnya
3	Belum optimalnya upaya strategi pemasaran dalam menyasar segmen wisatawan mancanegara	Promosi yang kurang dilakukan oleh pihak yang terkait	kunjuungan wisatawan mancanegara berkurang	Membuat promosi dengan memanfaatkan media	Promosi dan pemasaran untuk Daearah wisata dilakukan oleh semua pihak

4	Hanya menjadi tempat transit dan minimnya durasi lama tinggal wisatawan	Masih kurangnya tempat wisata yang menawarkan hal-hal yang baru dan menarik	Kunjungan wisatawan tidak lebih dari 1 hari	Perlunya koordinasi dan kerjasama antar semua pihak terkait	Kuantitas sarana prasarana pendukung disetiap daerah wisata (parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang belum memadai.
5.	Manajemen keolahragaan masih tidak mampu mendorong pengembangan aktivitas olahraga didalam masyarakat	Dana Pembinaan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat relatif terbatas, sumberdaya manusia (guru, pelatih, instruktur, manajer), belum memadai.	Sistem dan manajemen keolahragaan masih terkotak-kotak, semua unsur yang terlibat dalam olahraga belum manpu mendorong perkembangan olahraga	Memperbaiki sistem pembinaan olahraga dengan masuknya pemerintah daerah sebagai pendorong	Selain dari pemerintah dan masyarakat untuk mendorong penigkatan aktifitas olah raga diperlukan pihak swasta sebagai pendukung
6.	Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan sarana prasarana olahraga	Tidak semua daerah memiliki sarana olahraga yang memadai	Tidak ada tempat untuk menjalurkan bakat dan hobi masyarakat	Menyiapkan sarana dan prasarana untuk dipakai olah raga	Dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana lahraga
7.	Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik sedangkan bidang lain belum banyak digarap sehingga Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam pelayanan kepemudaan	pemuda terhadap pengaruh budaya asing, pendangkalan kehidupan beragama, dan masih rendahnya tingkat pemahaman untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang tidak baik;	Seharusnya untuk kewirausahaan, kepedulian dan kepeloporan dapat dilaksanakan secara bertahap melalui organisasi kepemudaan	potensi besar pemuda juga terletak pada sifat cenderung pada pembaruan dan perubahan sehingga peran kepemimpinan dan kepeloporan pemuda menjadi signifikan baik sosial maupun iptek	Adanya dukungan pemerintah dalam Organisasi Pemuda/Forum Pemuda dalam pengembangan Peran serta Kepemudaan

Sumber : Disparpora 2024

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang fungsi Kepariwisataan ,Kepemudaan dan Keolahragaan, Dispapora Kabupaten Maros mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disparpora sebagai unsur yang berfungsi menangani Urusan Kepariwisataan ,Kepemudaan dan Keolahragaan Disparpora diharapkan mampu melaksanakan Kebijakan kebijakan apa yang menjadi tujuan Visi dan Misi Kepala Daerah dari Sektor Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Dalam melaksanakan Fungsinya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mengemban tugas Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tatakelola kelembagaan pemerintahan yang baik pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Optimalisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Lokal Secara Kewilayahan yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
2. Meningkatkan Kualitas Pemuda;
3. Meningkatkan kualitas dan Daya saing Keolahragaan Masyrakat;
4. Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah;

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan strategis yang sering kali juga disebut faktor internal dan eksternal (Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Analisis yang dapat digunakan adalah analisis SWOT meliputi faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan yang ada pada Disparpora Kabupaten Maros. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel analisis berikut :

Tabel 2.6
Analisis Lingkungan (Internal dan Eksternal) Analisis SWOT
Disparpora Kabupaten Maros

KEKUATAN		KELEMAHAN	
1	Besar minat masyarakat akan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga serta tingginya minat masyarakat untuk berolahraga	1	Masih terbatasnya Sarana dan rasarana Olahraga yang bertaraf Nasional dan Internasional
2	Banyaknya Organisasi Pemuda	2	Tingkat Kesejahteraan Atlet dan Pelatih
3	Telah tersedianya Perda Keolahragaan Dan Rancangan Perda Kepemudaan	3	Masih terbatasnya tenaga Pelatih yang Handal
4	Perhatian Presiden dalam pengembangan Obyek Wisata Kab. Maros	4	Masih kurangnya kegiatan kegiatan dalam peningkatan kapasitas Pemuda
5	Pengakuan dari Unesco Global Karts Maros –Pangkep	5	Belum tersediannya Dokumen Perencanaan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
PELUANG		**ANCAMAN**	
1	Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Olahraga	1	Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait perencanaan
2	Adanya kesempatan untuk mengembangankan dan meningkatkan Prestasi Atlet dan Pelatih	2	Adanya rasa kurang percaya masyarakat terhadap pemerintah
3	Adanya kepercayaan eksternal terhadap perecanaan pembangunan Pariwisata dan ekonomi Kreatif	3	Akan cenderung terjadinya Kenakalan Remaja dan meningkatnya Kriminlaitas Pemuda
4	Peluang Pelaksanaan Kegiatan Legiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda	4	Menurunnya jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nuasantara
5	Terciptanya Peluang Pengembangan Obyek Wisata dan adanya Dokumen Perencanaan secara Terstruktur	5	Berkurang PDRB sektor PAriwisata terhadap PAD Kabupten Maros

Sumber : Disparpora (Diolah), 2024

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan terdapat perbedaan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025. Hal ini berdasarkan atas hasil analisis kebutuhan akan adanya Peraturan Daerah Perencanaan dan Penganggaran guna meningkatnya kualitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2025.. Adanya perbedaan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD, tetap menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJPD sampai dengan RKPD hingga Renja SKPD. Untuk program dan kegiatan Disparpora yang lain tidak ada yang mengalami perubahan.

Tabel 2.7
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Maros

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**8.864.083.452**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**8.844.130.152**	
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19 Dokumen**	**15.900.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19 Dokumen**	**16.075.000**	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.810.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.810.000	
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.630.000	
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	930.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	930.000	
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.675.000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.675.000	
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.125.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.125.000	

2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.825.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.825.000	
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3.080.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3.080.000	
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45 Dokumen**	**7.773.145.382.00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45 Dokumen**	**7.775.645.382**	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	7.604.175.382.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	7.604.175.382	
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	174.510.000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	166.710.000	
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.260.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.260.000	
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.500.000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.500.000	
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**581,613,500.00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Dokumen**	**520.038.070**	

2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.179.700.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.685.570	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.162.000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.832.500	
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.000.000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.100.000	
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	380.086.000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	336.420.000	
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	72.000.000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	54.000.000	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia**	**3 Jenis**	**72.000.000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia**	**3 Jenis**	**72.000.000**	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-0	
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia**	**3 Jenis**	**498.200.000.00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia**	**3 Jenis**	494.500.000	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.500.000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.500.000	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	483.700.000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	480.000.000	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**4 Jenis**	**108.000.000.00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**		**Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**4 Jenis**	**60.500.000**	

	Urusan Pemerintahan Daerah		**Daerah Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik**			**Urusan Pemerintahan Daerah**		**Daerah Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik**			
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	88.000.000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	63.879.300	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pemuda yang Aktif**	**100 Persen**	**1,408,519,550.00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pemuda yang Aktif**	**100 Persen**	**1.343.755.000**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah pemuda pelopor dan wirausaha muda yang meningkat kaulitas dan kapasitasnya**	**105 Orang**	**626.685.000,00**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah pemuda pelopor dan wirausaha muda yang meningkat kaulitas dan kapasitasnya**	**105 Orang**	**343.155.000**	
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas DayaSaingnya	35 Orng	170,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas DayaSaingnya	35 Orng	21.480.000	
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orng	128.805.000.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orng	23.475.000	
2.19.02.2.01.0004	'Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif,	45 Orng	320.130.000,00	'Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi	35 Orng	298.200.000	

	Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,Pelaksana an Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			Pemuda dalam Proses Perencanaan,Pelaksana an Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**14 Organisasi**	**711.290.000,00**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**14 Organisasi**	**1.000.600.000**	
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitran dengan dunia usaha	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	100 Orang	691.800.000,00	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitran dengan dunia usaha	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	100 Orang	50.600.000	
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan kapasitas pemuda dan organsiasi kepemudaan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	6 Dokumen	19.490.000,00	Peningkatan kapasitas pemuda dan organsiasi kepemudaan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	6 Dokumen	950.000.000	
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**90 Persen**	**2.661.645.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**90 Persen**	**3.089.045.000**	
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Cabang Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang mendapatkan Pembinaan**	**6 Cabor**	**110.960.000**	**Pembinaan dan PengembanganOlahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Cabang Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang mendapatkan Pembinaan**	**6 Cabor**	**110.960.000**	
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Dokumen	110.960.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Dokumen	110.960.000	

2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten**	**100 Persen**	**132.845.000,00**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten**	**100 Persen**	**480.000.000**	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7 Dokumen	150.000.000,00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7 Dokumen	280.000.000	
2.19.03.2.02.0006	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	20 Dokumen	0.00	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	20 Dokumen	200.000.000	
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Atlet yang Berpartisipasi dalam Olahraga Prestasi**	**100 Persen**	**0.00**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Atlet yang Berpartisipasi dalam Olahraga Prestasi**	**100 Persen**	**20.350.000**	
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	0,00	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	20.350.000	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	35 Orang	0,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	35 Orang	0.00	
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Organisasi Cabang Olahraga**	**27 Cabor**	**2.098.900.000,00**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Organisasi Cabang Olahraga**	**27 Cabor**	**2.116.900.000**	
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama OrganisasiKeolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2.098.900.000,00	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2.116.900.000	
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan**	**5 Cabor**	**279.900.000,00**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan**	**5 Cabor**	**92.600.000**	

2.19.03.2.05.0006	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Dokumen	77.425.000,00	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Laporan	66.425.000	
2.19.03.2.05.0007	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6 Unit	0.00	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6 Laporan	0.00	
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen	127.050.000,00	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen	107.300.000	
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi**	**100 Persen**	**581.750.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi**	**100 Persen**	**572.300.000**	
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100 Persen**	**581.750.000,00**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100 Persen**	**572.300.000**	
2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Dokumen	12.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Dokumen	12.000.000	
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	440 Organisasi	569.750.000,00	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	440 Organisasi	560.300.000	
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Destinasi wisata yang berkualitas Baik**	**90 Persen**	**1.569.810.000,00**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Destinasi wisata yang berkualitas Baik**	**90 Persen**	**1.577.225.000**	
3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Taroada**	**Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/**	**100 Persen**	**0**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Taroada**	**Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/**	**100 Persen**	**0**	

3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Taroada	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	100 Orang	0	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Taroada	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	100 Orang	0	
3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	
3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang**	**Persentase Lama Kunjungan Wisatawan**	**100 Persen**	**0,00**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang**	**Persentase Lama Kunjungan Wisatawan**	**100 Persen**	**244.000.000**	
3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang	Jumlah LokasiDaya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Unit	0,00	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang	Jumlah LokasiDaya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Unit	244.000.000	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang**	**Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dikelola dengan Baik**	**3 Obyek**	**1.146.985.000,00**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang**	**Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dikelola dengan Baik**	**3 Obyek**	**1.333.225.000**	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	119.635.000,00	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Lokasi	49.225.000	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	40 Unit	1.027.350.000,00	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	40 Unit	1.284.000.000	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Kab. Maros, Semua**	**Persentase Kunjungan Wisatawan**	**44,44 Persen**	**984.651.000,00**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan,**	**Persentase Kunjungan Wisatawan**	**44,44 Persen**	**563.100.000**	

		Kecamatan, Semua Kel/Desa					**Semua Kel/Desa**				
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Daya Tarik, Destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang terpromosikan**	**3 Obyek**	**984.651.000,00**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Daya Tarik, Destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang terpromosikan**	**3 Obyek**	**563.100.000**	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	28.500.000,00	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	536.600.000	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Promosi	956.151.000,00	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Promosi	26.500.000	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PersentaseUsaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikasi**	**90%**	**734.495.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PersentaseUsaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikasi**	**90 %**	**83.421.666**	
3.26.04.2.01	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah UMKM yang Memanfaatkan Prasarana dan Pengembangan Pemasaran**	**105 UMKM**	**30.000.000,00**	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah UMKM yang Memanfaatkan Prasarana dan Pengembangan Pemasaran**	**105 UMKM**	**83.421.666**	
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	30.000.000,00	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	36.591.666	

3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Perentase Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berkembang**	**100 Persen**	**704.495.000,00**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Perentase Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berkembang**	**100 Persen**	**709.495.000**	
3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	704.495.000,00	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	46.830.000	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif**	**90Persen**	**538.190.000,00**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif**	**90 Persen**	**679.644.000**	
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki Kompetensi Tingkat Dasar**	**100 Persen**	**386.190.000,00**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki Kompetensi Tingkat Dasar**	**100 Persen**	**479.654.000**	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	316.190.000,00	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	479.654.000	
3.26.05.2.01.0006	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**200 Orang**	**152.000.000,00**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**200 Orang**	**199.990.000**	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	120 Orang	64.300.000,00	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	120 Orang	199.990.000	
JUMLAH					**17.357.969.247.**					**16.828.511.152**	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Rancangan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros dalam pembahasan forum perangkat daerah, guna penyelarasan rumusan rancangan Renja tahun 2024 serta kesepakatan dalam hasil Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.

Dalam pelaksanaan forum perangkat daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selaku perangkat daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah lainnya, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan atau tidak ada sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator kinerja	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1		3	4	5	6
1	Bintek Pembuatan Branding Hasil Produk UMKM	LINGKUNGAN BANIAGA, KELURAHAN TAROADA, KECAMATAN TURIKALE, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Bintek Pembuatan Branding Hasil Produk UMKM	1 Kecamatan	
2	Pendampingan Pengurusan Hak Cipta Bagi UMKM	KELURAHAN PETTUADAE, KECAMATAN TURIKALE, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Pendampingan Pengurusan Hak Cipta Bagi UMKM	1 Kecamatan	
3	Pembangunan Obyek Wisata yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	WISATA LACOLLA, KECAMATAN CAMBA, Kab. Maros	Jumlah sarana Obyek Wisata Lacolla	1 Kecamatan	
4	Rehabilitasi/Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Rea-rea Desa Tupabbiring Kec.Bontoa, Kab. Maros	Jumlah sarana Pembangunan Lapangan Sepak Bola	1 Kecamatan	
5	Rehabilitasi/Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Dusun Rammang-Rammang, Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kab. Maros	Jumlah sarana Pembangunan Lapangan Sepak Bola	1 Kecamatan	
6	Rehabilitasi Bangunan Gedung	RW I Amarang Kelurahan Borong , Kab. Maros	Jumlah sarana Bangunan Gedung	1 Kecamatan	

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator kinerja	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1		3	4	5	6
7	Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	Dusun Taipa (Pemuda Desa Majannang), Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	1 Kecamatan	
8	Pembangunan Obyek Wisata yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	Dusun Kuri Caddi, Kab. Maros	Jumlah Obyek Wisata Dusun Kuri Caddi	1 Kecamatan	
9	Bintek Bagi Sumber daya Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi kreatif	Desa Tunikamaseang, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Bintek Bagi Sumber daya Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi kreatif	1 Kecamatan	
10	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	Desa Sambueja Kecamatan Simbang, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	1 Kecamatan	
11	Bintek Pembuatan Branding Hasil Produk UMKM	kelurahan, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Bintek Pembuatan Branding Hasil Produk UMKM	1 Kecamatan	
12	Melaksanakan Perkemahan dan Lomba Pramuka Tinkat Desa	lingkungan bulowa, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Perkemahan dan Lomba Pramuka Tinkat Desa	1 Kecamatan	
13	Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	Desa Bonto Tallasa, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	1 Kecamatan	
14	Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	Lingkungan RW 01 Marusu, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	1 Kecamatan	

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator kinerja	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1		3	4	5	6
15	Pembangunan Obyek Wisata yang Merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	Dusun Bangun Polea, Kab. Maros	Jumlah Obyek Wisata Dusun Bangun Polea	1 Kecamatan	
16	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	Dusun Ujung, Kab. Maros	Jumlah peserta kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	1 Kecamatan	
17	Rehabilitasi/Pembangunan Lapangan Sepak Bola	Desa Moncongloe Lappara, Kab. Maros	Jumlah sarana Pembangunan Lapangan Sepak Bola	1 Kecamatan	
18	Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	Kelurahan Pettuadae (7 Lingkungan), Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	1 Kecamatan	
19	Workshop, Bintek dan Sosialisasi bagi Pelaku Wisata dan Pengelola Desa Wisata	Dusun Kuri Lompo, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Workshop, Bintek dan Sosialisasi bagi Pelaku Wisata dan Pengelola Desa Wisata	1 Kecamatan	
20	Bintek Pembuatan Branding Hasil Produk UMKM	Desa Salenrang, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Bintek Pembuatan Branding Hasil Produk UMKM	1 Kecamatan	
21	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	Kelurahan, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	1 Kecamatan	

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator kinerja	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1		3	4	5	6
22	Bintek Pembuatan Branding Hasil Produk UMKM	Desa Salenrang, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Bintek Pembuatan Branding Hasil Produk UMKM	1 Kecamatan	
23	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	Minasa Upa, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	1 Kecamatan	
24	Memfasilitasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	Minasa Upa, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	1 Kecamatan	
25	Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	Minasa Upa, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	1 Kecamatan	
26	Workshop, Bintek dan Sosialisasi bagi Pelaku Wisata dan Pengelola Desa Wisata	Minasa Upa, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Workshop, Bintek dan Sosialisasi bagi Pelaku Wisata dan Pengelola Desa Wisata	1 Kecamatan	
27	Bintek Pembuatan Branding Hasil Produk UMKM	Minasa Upa, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Bintek Pembuatan Branding Hasil Produk UMKM	1 Kecamatan	
28	Memfasilitasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	Dusun Sampakang, Paccinikang, Garantiga, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	1 Kecamatan	
29	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	Baruga, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti i kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	1 Kecamatan	

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator kinerja	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1		3	4	5	6
30	Memfasilitasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	Kelurahan Turikale, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	1 Kecamatan	
31	Bintek Bagi Sumber daya Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi kreatif	Dusun Dojong, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Bintek Bagi Sumber daya Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi kreatif	1 Kecamatan	
32	Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	kelurahan, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Pelatihan Bagi Wira Usaha muda	1 Kecamatan	
33	Memfasilitasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	Setiap RW, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	1 Kecamatan	
34	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	Sekretariat nKarang Taruna Desa Alatengae Dusun Gollae RT 003 RW 007, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	1 Kecamatan	
35	Bintek Bagi Sumber daya Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi kreatif	Desa Toddolimae, Kab. Maros	Jumlah yang mengikutiBintek Bagi Sumber daya Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi kreatif	1 Kecamatan	
36	Workshop, Bintek dan Sosialisasi bagi Pelaku Wisata dan Pengelola Desa Wisata	Desa Tompobulu, Kab. Maros	Jumlah yang mengikutiWorkshop, Bintek dan Sosialisasi bagi Pelaku Wisata dan Pengelola Desa Wisata	1 Kecamatan	
37	Pembinaan Kader	Lapangan Pallantikang Kantor Bupati Maros, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Pembinaan Kader	1 Kecamatan	

No	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	Indikator kinerja	BESARAN /VOLUME	CATATAN
1		3	4	5	6
38	Memfasilitasi kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	Jl. Poros batangngase km.23 komp. graha cemerlang blok 1 no.26 Kec.Mandai, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti kegiatan kepemudaan tingkat desa dan lomba kreasi pemuda	1 Kecamatan	
39	Pembinaan Olahraga Prestasi	Jl. Azalea No. 17 Kelurahan Pettudae Kecamatan Turikale Maros, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Pembinaan Olahraga Prestasi	1 Kecamatan	
40	Pembinaan Olahraga Prestasi	Jl. Bambu Runcing No. 16 Maros, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Pembinaan Olahraga Prestasi	1 Kecamatan	
41	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Pramuka	Jalan Angsana, No.2 Kabupaten Maros, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Pramuka	1 Kecamatan	
42	Memfasilitasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	Kabupaten Maros, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	1 Kecamatan	
43	Memfasilitasi Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	Kabupaten Maros, Kab. Maros	Jumlah yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan Tingkat Desa Seminar Kepemudaan	1 Kecamatan	
44	Bintek Bagi Sumber daya Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi kreatif	kabupaten maros, Kab. Maros	Jumlah yang mengikutiBintek Bagi Sumber daya Pelaku Wisata dan Pelaku Ekonomi kreatif	1 Kecamatan	
45	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	jl. Sultan Hasanuddn, No. 61 , Kab. Maros	Jumlah yang mengikutiPeningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	1 Kecamatan	
46	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	**Jl. Nasrum Amirullah, Kab. Maros**	Jumlah yang mengikutiPeningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan	1 Kecamatan	

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari arah kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros, maka rencana kerja Perubahan program dan kegiatan Disparpora Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Beserta Pendanaannya
Dinas PAriwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Kode	Rencana Sebelum Perubahan					Rencana Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang	Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2.19.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**8.866.758.452**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**8.869.563.452**	**2.805.000**	
2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19 Dokumen**	**16.075.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19 Dokumen**	**16.075.000**		
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.810.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.810.000		
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.630.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.630.000		
2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	930.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	930.000		
2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.675.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.675.000		
2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.125.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.125.000		

2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.825.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.825.000		
2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3.080.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	3.080.000		
2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45 Dokumen**	**7.775.645.382**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**45 Dokumen**	**7.775.645.382**		
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	7.604.175.382	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	102 Orang/bulan	7.604.175.382		
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	166.710.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	166.710.000		
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.260.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.260.000		
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	2.500.000		
2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Maros,**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan**	**6 Dokumen**	**520.038.070**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan**	**6 Dokumen**	**513.644.825**	**(6.393.245)**	

		Turikale, Pettuadae	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.685.570	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.662.325	((5.023.245)	
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.832.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.832.500		
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.100.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.100.000		
2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	0		
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	336.420.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	335.050.000		
2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	72.000.000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	54.000.000	(1.370.000)	
5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia**	**3 Jenis**	**72.000.000.00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia**	**3 Jenis**	**72.000.000**		
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-0		
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia**	**3 Jenis**	**480.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia**	**3 Jenis**	**486.000.000**	**6.000.000**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros,	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.500.000		

		Turikale, Pettuadae										
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	480.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	486.000.000	6.000.000	
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik**	**4 Jenis**	**60.500.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Berada Dalam Kondisi Yang Baik**	**4 Jenis**	**60.500.000**		
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	60.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	63.698.245	3.198.245	
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0		
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pemuda yang Aktif**	**100 Persen**	**1.343.755.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Pemuda yang Aktif**	**100 Persen**	**1.318.100.000**	**(25.655.000)**	
2.19.02.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah pemuda pelopor dan wirausaha muda yang meningkat kaulitas dan kapasitasnya**	**105 Orang**	**343.155.000**	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah pemuda pelopor dan wirausaha muda yang meningkat kaulitas dan kapasitasnya**	**105 Orang**	**335.450.000**	(7.705.000)	

2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Maros, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas DayaSaingnya	35 Orng	21.480.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas DayaSaingnya	35 Orng	0	(21.480.000)	
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orng	23.475.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orng	0	(23.475.000)	
2.19.02.2.01.0004	'Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	45 Orng	298.200.000	'Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	35 Orng	335.450.000	37.250.000	
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**14 Organisasi**	**1.000.600.000**	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**14 Organisasi**	**982.650.000**	(17.950.000)	
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	100 Orang	50.600.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	100 Orang	50.600.000	(17.950.000)	

	organisasi kepemudaan melalui kemitran dengan dunia usaha					kemitran dengan dunia usaha						
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan kapasitas pemuda dan organsiasi kepemudaan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	6 Dokumen	950.000.000	Peningkatan kapasitas pemuda dan organsiasi kepemudaan kabupaten/kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	6 Dokumen	950.000.000		
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**90 Persen**	**2.820.810.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Cakupan Pembinaan Olahraga**	**90 Persen**	**2.820.810.000**		
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Cabang Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang mendapatkan Pembinaan**	**6 Cabor**	**110.960.000**	**Pembinaan dan PengembanganOlahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Cabang Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang mendapatkan Pembinaan**	**6 Cabor**	**110.960.000**		
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Maros, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Dokumen	110.960.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	3 Dokumen	110.960.000		
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten**	**100 Persen**	**480.000.000**	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten**	**100 Persen**	**480.000.000**		

2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7 Dokumen	280.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7 Dokumen	280.000.000		
2.19.03.2.02.0006	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	20 Dokumen	200.000.000	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	20 Dokumen	200.000.000		
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Atlet yang Berpartisipasi dalam Olahraga Prestasi**	**100 Persen**	**20.350.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Atlet yang Berpartisipasi dalam Olahraga Prestasi**	**100 Persen**	**20.350.000**		
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	20.350.000	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	100 Orang	20.350.000		
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	35 Orang	0,00	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	35 Orang	0.00		
2.19.03.2.04	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Organisasi Cabang Olahraga**	**27 Cabor**	**2.116.900.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Organisasi Cabang Olahraga**	**27 Cabor**	**2.116.900.000**		
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama OrganisasiKeolahragaan	3 Dokumen	2.116.900.000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	2.116.900.000		

	dengan Lembaga Terkait		Kabupaten/Kota									
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan**	**5 Cabor**	**92.600.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Olahraga Rekreasi yang dibina dan dikembangkan**	**5 Cabor**	**92.600.000**		
2.19.03.2.05.0006	Penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Dokumen	35.800.000	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Laporan	35.800.000		
2.19.03.2.05.0007	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6 Unit	24.000.000	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	6 Laporan	24.000.000		
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen	32.800.000	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	3 Dokumen	32.800.000		
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi**	**100 Persen**	**572.300.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Persentase Organisasi Kepramukaan Yang difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi**	**100 Persen**	**572.300.000**		
2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100 Persen**	**572.300.000**	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**100 Persen**	**572.300.000**		
2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Dokumen	12.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Dokumen	12.000.000		
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	440 Organisasi	569.750.000,00	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	440 Organisasi	560.300.000		

3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Destinasi wisata yang berkualitas Baik**	**90 Persen**	**1.577.225.000**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Destinasi wisata yang berkualitas Baik**	**90 Persen**	**1.682.225.000**	**105.000.000**	
3.26.02.2 .01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Taroada**	**Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/**	**100 Persen**	**0**	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Taroada**	**Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/**	**100 Persen**	**0**		
3.26.02.2 .01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Taroada	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	100 Orang	0	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Taroada	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	100 Orang	0		
3.26.02.2 .01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0		
3.26.02.2 .02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang**	**Persentase Lama Kunjungan Wisatawan**	**100 Persen**	**244.000.000**	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang**	**Persentase Lama Kunjungan Wisatawan**	**100 Persen**	**244.000.000**		
3.26.02.2 .02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang	Jumlah LokasiDaya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Unit	244.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang	Jumlah LokasiDaya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	3 Unit	244.000.000		
3.26.02.2 .03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang**	**Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dikelola dengan Baik**	**3 Obyek**	**1.333.225.000**	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang**	**Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten yang dikelola dengan Baik**	**3 Obyek**	**1.438.225.000**	**105.000.000**	
3.26.02.2 .03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai	3 Lokasi	49.225.000	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai	3 Lokasi	49.225.000		

			dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)					dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	40 Unit	1.284.000.000	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Bantimurung, Kalabbirang	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	40 Unit	1.389.000.000	105.000.000	
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Kunjungan Wisatawan**	**44,44 Persen**	**563.100.000**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase Kunjungan Wisatawan**	**44,44 Persen**	**493.100.000**	**(70.000.000)**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Daya Tarik, Destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang terpromosikan**	**3 Obyek**	**563.100.000**	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Jumlah Daya Tarik, Destinasi Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang terpromosikan**	**3 Obyek**	**493.100.000**	**(70.000.000)**	
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	26.500.000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	61.500.000	35.000.000	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Promosi	536.600.000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Promosi	431.600.000	(105.000.000)	
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PersentaseUsaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikasi**	**90%**	**83.421.666**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**PersentaseUsaha Ekonomi Kreatif yang Bersertifikasi**	**90 %**	**71.271.666**	**(12.150.000)**	

	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL											
3.26.04.2.01	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah UMKM yang Memanfaatkan Prasarana dan Pengembangan Pemasaran**	**105 UMKM**	**36.591.666**	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah UMKM yang Memanfaatkan Prasarana dan Pengembangan Pemasaran**	**105 UMKM**	**36.591.666**		
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	36.591.666	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	36.591.666		
3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Perentase Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berkembang**	**100 Persen**	**46.830.000**	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Perentase Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Berkembang**	**100 Persen**	**36.591.666**	**(12.150.000)**	
3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	46.830.000	Pengembangan Sistem Pemasaran	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen	36.591.666	(12.150.000)	
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif**	**90Persen**	**679.644.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**persentase Peningkatan Usaha Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif**	**90 Persen**	679.644.000		
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki Kompetensi Tingkat Dasar**	**100 Persen**	**479.654.000**	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa**	**Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki Kompetensi Tingkat Dasar**	**100 Persen**	**479.654.000**		

3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	479.654.000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 Laporan	479.654.000		
3.26.05.2.01.0006	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	Kab. Maros, Turikale, Pettuadae	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**200 Orang**	**199.990.000**	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Kab. Maros, Turikale, Pettuadae**	**Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif**	**200 Orang**	**199.990.000**		
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	120 Orang	199.990.000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	120 Orang	199.990.000		
JUMLAH					**16.828.511.152.**					**16.607.014.118**	**100.000.000**	

Sumber Data : Disparpora 2024

Dari Tabel 3.1 diatas dapat kita Lihat terjadinya Perubahan Anggaran Pokok A{ND 2024 Atau Anggran Sebelumnya yang berubah dan ada Penambahan anggaran sebesar **Rp**.100.000.000, **(Seratus Juta Rupiah**) serta ada adanya dua Sub Kegiatan pada Program Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan yang Anggaran Nol (0) setelah Perubahan , hal ini dikarenakan :

1. Dalam Upaya meningkatkan PAD dari Sektor Retribusi PAriwisaya maka Pemenrintah Kab. Maros melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menginisiasi Bentuk Kerja Sama Pengelolaan KWA Bantimurng dengan Pihak Ke tiga / Mitra, maka segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan Kerja sama tersebut tertuang dalam Anggaran Perubahan ABPD 2024
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2024 Tentang rekomendasi Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Maros terhadap laporan keterangan Pertanggung Jawaban (Lkpj) Bupati Maros Akhir Tahun 2023;
3. Dalam rangka merampungkan Rancangan Perda Kepemudaan maka dibutuhkan Anggaran Penyusunan dan Penetapan Perda Kemepudaan yang indikatornya adalah Peningkatan Kapasitas Pemuda secara Umum.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 ditujukan sebagai pedoman pelaksanaan berbagai progam dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros (Disparpora) untuk tahun anggaran 2024 hingga Akhir Desember 2024 sehingga diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Disparpora Kabupaten Maros periode 2021-2026. Selain itu digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Disparpora Kabupaten Maros.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil dan memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kabupaten Maros dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan Disparpora Kabupaten Maros, maka sinkronisasi program/kegiatan/sub kegiatan di dalam Renja Perubahan ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan ASN Disparpora Kabupaten Maros merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan ini.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagi berikut :

1. Substansi Renja Perubahan Disparpora Kabupaten Maros disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024 dan Renstra Disparpora Kabupaten Maros.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Disparpora Kabupaten Maros atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Perubahan Disparpora, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Disparpora Kabupaten Maros, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja Perubahan yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Disparpora Kabupaten Maros pada tahun 2025 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Disparpora Kabupaten Maros Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Disparpora Kabupaten Maros Tahun 2021 2026 yang berimplikasi terhadap akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

PEMERINTAH KABUPATEN MARUS
KECAMATAN MAllAWA



H,EN.JA
PERUBAHAN
KECAMATAN MALLAWA

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia_Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Mallawa Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) ini suatu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mallawa Tahun 2024.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mallawa Tahun 2024 ini adalah dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Mallawa, dan apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini maka kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan Rencana Kerja ini. Kami berharap semoga Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah_Nya bagi kita semua.

Maros, 3 1 Juli 2024

CAMAT MALLAWA,

KEMAL WAHYUDI, S.Sos., M.Si

NIP : 19760514 200112 1008

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul I
Kata Pengantar II
Daftar Isi III
Daftar Tabel IV

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 38
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 38
3.3. Program dan Kegiatan 39
BAB V PENUTUP 47

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Mallawa Bulan Mei Tahun 2023 9
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mallawa Kab. Maros 20
Tabel 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mallawa 22
Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024 24
Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 37
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Mallawa Tahun 2024 38
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mallawa Rancangan Awal Renja Perubahan Tahun 2024 41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaran pemrintahaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mallawa Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Sehubungan dengan itu, Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Maros membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja (Renja). Renja PD dan Perubahan Renja PD disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mallawa Tahun 2021-2026. Perubahan Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja Kecamatan Mallawa disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan;
2. Penyusunan Rancangan Awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir;
3. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mallawa Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 dan tetap mempedomani Renstara Kecamatan Mallawa. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mallawa Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA/DPA Kecamatan Mallawa Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mallawa Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Repuplik Indonesi Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuntakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Darah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahn Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 34).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mallawa Tahun 2024 adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Mallawa untuk periode 1 tahun sebagai impelemntasi pelaksnaan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Mallawa Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan, dan sub kegiatan;
2. Sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Kantor Kecamatan Mallawa;
3. Membuat acuan perencanaan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan perkiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan;
4. Sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Perubahan Renja Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Tahun 2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rentsra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Pada bab ini memuat kajian (riview) terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD Semester I tahun berjalan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telahan Terhadap Kebijakan Nasional yang menjelaskan menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

Bab IV Penutup

Berisikan uraian penutup, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mallawa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mallawa.

Rencana Kerja Kecamatan Mallawa merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Mallawa. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mallawa ini menyajikan pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Mallawa selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023.

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mallawa 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mallawa tahun 2022 dan Evaluasi Renja Kecamatan Mallawa tahun berjalan tahun 2023 mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kecamatan Mallawa, antara lain :

a. Realisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai yang direncanakan.

1. Kecamatan Mallawa mempunyai 5 Program kegiatan, sampai dengan Bulan Mei pada tahun 2023. Dari ke-5 program kegiatan tersebut, 4 Program yang sudah terealisasi dan terdapat 1 program yang belum terealisasi yaitu Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.
2. Kecamatan Mallawa pada tahun 2023 melaksanakan 13 kegiatan, dari ke-13 kegiatan tersebut yang terealisasi sebanyak 8 Kegiatan , sedangkan yang belum terealisasi sebanyak 5 kegiatan.
3. Kecamatan Mallawa pada tahun 2023 melaksanakan 24 sub kegiatan. Dari 24 Sub kegiatan yang baru terealisasi 8 sub kegiatan dan 16 sub kegiatan yang belum terealisasi sampai pada bulan Mei 2023.

b. **Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab diatas;**

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Tabel 2.1

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		**Nilai SAKIP**										**38,27**		**9.860.686.296**		**67,66**	**KEC MALLAWA**
	Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota	**Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.**	**100**	**14.574.009.515**	**100**	**8.744.405.709**	**100**	**2.916.561.903**	**7,17**	**1.116.280.587**	**7,17**	**38,27**	**53,58**	**9.860.686.296**	**53,58**	**67,66**	**KEC MALLAWA**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**95**	**35.880.000**	**57**	**21.528.000**	**19**	**7.176.000**	**3**	**3.090.000**	**15,79**	**43,06**	**60,00**	**24.618.000**	**63**	**69**	**KEC MALLAWA**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	4.950.000	6	2.970.000	2	990.000	1	90.000	50,00	9,09	7,00	3.060.000	70	62	KEC MALLAWA
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5	4.950.000	3	2.970.000	1	990.000	0	900.000	0,00	90,91	3,00	3.870.000	60	78	KEC MALLAWA

			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	4.950.000	3	2.970.000	1	990.000	0	0	0,00	0,00	3,00	2.970.000	60	60	KEC MALLAWA
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	5.250.000	3	3.150.000	1	1.050.000	0	1.050.000	0,00	100,00	3,00	4.200.000	60	80	KEC MALLAWA
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	5.250.000	3	3.150.000	1	1.050.000	1	0	100,00	0,00	4,00	3.150.000	80	60	KEC MALLAWA
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	5	5.250.000	3	3.150.000	1	1.050.000	1	1.050.000	100,00	100,00	4,00	4.200.000	80	80	KEC MALLAWA

			Realisasi Kinerja SKPD															
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	5.280.000	36	3.168.000	12	1.056.000	0	0	0,00	0,00	36,00	3.168.000	60	60	KEC MALLAWA
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Administrasi keuaangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**130**	**12.871.106.390**	**78**	**7.722.663.834**	**26**	**2.574.221.278**	**11**	**1.011.185.507**	**42,31**	**39,28**	**89,00**	**8.733.849.341**	**68**	**68**	**KEC MALLAWA**
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2380	12.631.306.390	1428	7.578.783.834	476	2.526.261.278	238	989.385.507	50,00	39,16	1.666,00	8.568.169.341	70	68	KEC MALLAWA
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	239.800.000	36	143.880.000	12	47.960.000	5	21.800.000	41,67	45,45	41,00	165.680.000	68	69	KEC MALLAWA
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian**	**185**	**50.000.000**	**111**	**30.000.000**	**37**	**10.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**111,00**	**30.000.000**	**60**	**60**	**KEC MALLAWA**
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	185	50.000.000	111	30.000.000	37	10.000.000	0	0	0,00	0,00	111,00	30.000.000	60	60	KEC MALLAWA
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**625.635.000**	**6**	**375.381.000**	**6**	**125.127.000**	**19**	**38.767.080**	**316,67**	**30,98**	**12,50**	**414.148.080**	**208**	**66**	**KEC MALLAWA**

	penyediaan peratalan rumah tangga	penyediaan peratalan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	8.887.500	15	5.332.500	5	1.777.500	0	0	0,00	0,00	15,00	5.332.500	60	60	KEC MALLAWA
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10	53.862.500	6	32.317.500	2	10.772.500	1	4.182.000	50,00	38,82	7,00	36.499.500	70	68	KEC MALLAWA
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	5.500.000	6	3.300.000	2	1.100.000	1	980.000	50,00	89,09	7,00	4.280.000	70	78	KEC MALLAWA
	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	100	3.960.000	60	2.376.000	20	792.000	0	0	0,00	0,00	60,00	2.376.000	60	60	KEC MALLAWA
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	94.075.000	36	56.445.000	12	18.815.000	12	18.815.000	100,00	100,00	48,00	75.260.000	80	80	KEC MALLAWA
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	459.350.000	36	275.610.000	12	91.870.000	5	14.790.080	41,67	16,10	41,00	290.400.080	68	63	KEC MALLAWA
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**986.388.125**	**2**	**591.832.875**	**2**	**197.277.625**	**10**	**63.238.000**	**500,00**	**32,06**	**6,00**	**655.070.875**	**300**	**66**	**KEC MALLAWA**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	59.300.000	36	35.580.000	12	11.860.000	5	4.168.000	41,67	35,14	41,00	39.748.000	68	67	KEC MALLAWA
	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	15	927.088.125	9	556.252.875	3	185.417.625	5	59.070.000	166,67	31,86	14,00	615.322.875	93	66	KEC MALLAWA

			Umum Kantor yang Disediakan														
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**2**	**5.000.000**	**2**	**3.000.000**	**2**	**2.760.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3.000.000**	**50**	**60**	**KEC MALLAWA**
	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	5.000.000	30	3.000.000	10	1.000.000	0	0	0,00	0,00	30,00	3.000.000	60	60	KEC MALLAWA
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	8.800.000	3	5.280.000	1	1.760.000	0	0	0,00	0,00	3,00	5.280.000	60	60	KEC MALLAWA
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di kecamatan		**IKM PATEN**															**KEC MALLAWA**
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan		**IKM Desa/Kelurahan**															**KEC MALLAWA**
	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100**	**1.199.416.000**	**53,75**	**110.252.000**	**100**	**284.380.000**	**50**	**78.200.000**	**50**	**27**	**52**	**188.452.000**	**52**	**16**	**KEC MALLAWA**
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat**	**2**	**513.016.000**	**2**	**106.352.000**	**1**	**93.280.000**	**1**	**3.450.000**	**100,00**	**3,70**	**1,50**	**109.802.000**	**75**	**21**	**KEC MALLAWA**

			Kecamatan															
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5	63.016.000	3	53.176.000	1	3.280.000	0	0	0,00	0,00	3,00	53.176.000	60	84	KEC MALLAWA
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	450.000.000	36	53.176.000	12	90.000.000	3	3.450.000	25,00	3,83	39,00	56.626.000	65	13	KEC MALLAWA
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	**Jumlah layanan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan**	**2**	**670.050.000**	**2**	**109.800.000**	**2**	**186.750.000**	**1**	**74.750.000**	**50,00**	**40,03**	**1,50**	**184.550.000**	**75**	**28**	**KEC MALLAWA**
	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	25	113.850.000	15	109.800.000	5	1.350.000	0	0	0,00	0,00	15,00	109.800.000	60	96	KEC MALLAWA
	Peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	556.200.000	0	0	4	185.400.000	2	74.750.000	50,00	40,32	2,00	74.750.000	17	13	KEC MALLAWA

	Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat	**Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat**	**Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat**	**3**	**16.350.000**	**1**	**3.900.000**	**3**	**4.350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**3.900.000**	**17**	**24**	**KEC MALLAWA**
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah laporan pelayanan perizinan non usaha	12	4.050.000	0	0	4	1.350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	KEC MALLAWA
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan pelaksanan pelayanan non perizinan	39	4.050.000	0	0	13	1.350.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	KEC MALLAWA
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	8.250.000	3	3.900.000	1	1.650.000	0	0	0,00	0,00	3,00	3.900.000	60	47	KEC MALLAWA
	Meningkatnya peran aktif perempuan di kecamatan dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi		**Persentase perempuan yang terlbat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi di kecamatan**															**KEC MALLAWA**
	Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan	**Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100**	**1.227.450.000**	**74,41**	**285.404.888**	**100**	**245.490.000**	**20**	**22.990.000**	**20**	**9**	**47**	**308.394.888**	**47**	**25**	**KEC MALLAWA**

	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**1075**	**227.450.000**	**645**	**50.877.250**	**4**	**45.490.000**	**1**	**22.990.000**	**25,00**	**50,54**	**646,00**	**73.867.250**	**60**	**32**	**KEC MALLAWA**
	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10	141.150.000	4	38.775.000	2	28.230.000	1	22.990.000	50,00	81,44	5,00	61.765.000	50	44	KEC MALLAWA
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	86.300.000	2	12.102.250	2	17.260.000	0	0	0,00	0,00	2,00	12.102.250	20	14	KEC MALLAWA
	Pemberdayaan kelurahan	**Pemberdayaan kelurahan**	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan**	**1260**	**1.000.000.000**	**100**	**234.527.638**	**420**	**200.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**234.527.638**	**8**	**23**	**KEC MALLAWA**
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	1.000.000.000	5	234.527.638	1	200.000.000	0	0	0,00	0,00	5,00	234.527.638	100	23	KEC MALLAWA

	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban di kecamatan		**IKM Trantibun Linmas**															**KEC MALLAWA**
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	**Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan**	**100**	**6.750.000**	**0**	**0**	**100**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**KEC MALLAWA**
	Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Korodinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**		**6.750.000**	**0**	**0**	**1**	**2.250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**KEC MALLAWA**
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3	6.750.000	0	0	1	2.250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	KEC MALLAWA
	Meningkatnya Akses Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan secara aktif		**IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan**															**KEC MALLAWA**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan**	**100**	**449.850.000**	**33,52**	**118.865.000**	**100**	**89.970.000**	**50**	**19.150.000**	**50**	**21**	**42**	**138.015.000**	**42**	**31**	**KEC MALLAWA**

			Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah**	**Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan**	**2**	**449.850.000**	**2**	**118.865.000**	**2**	**89.970.000**	**1**	**19.150.000**	**50,00**	**21,28**	**1,50**	**138.015.000**	**75**	**31**	**KEC MALLAWA**
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2500	233.600.000	0	20.500.000	500	46.720.000	0	0	0,00	0,00	0,00	20.500.000	0	9	KEC MALLAWA

	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6000	216.250.000	560	25.200.000	1.200	43.250.000	600	19.150.000	50,00	44,28	1.160,00	44.350.000	19	21	KEC MALLAWA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mallawa

Kecamatan Mallawa merupakan perangkat daerah Kabupaten Maros sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa disamping itu juga camat bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mallawa yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat padat tabel berikut :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MALLAWA
KABUPATEN MAROS

NO	INDOKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2022	2023	2024	2025	
1	IKM PATEN		✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
2	IKM Trantibum Linmas		✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
3	IKM Desa/ Kelurahan		✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
4	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan		✓	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
5	Persentase Perempuan Yang Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan		✓	32,20	34,56	32,11	34,56	38,80	42,72	
6	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM		✓	100	100	100	100	100	100	

Jumlah inidkator yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Mallawa ada 6 indikator yaitu : IKM Paten, IKM Trantibum Linmas, IKM Desa dan Kelurahan , IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan, Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam Kegiatan Pembangunan bidang Sosial dan ekonomi di Kecamatan, Persentase Masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar sesuai SPM, Ke 6 Indikator Tersebut semuanya mencapai target.

- Indikator 1. IKM Paten Kecamatan Mallawa sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di Kecamtan mencapai target , program pendukung penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- IKM Trantibum linmas sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan Ketertiban di kecamatan mencapai target , program pendukung Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum.
- IKM Desa/Kelurahan sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan mencapai target , Program pendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
- IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan sasaran meningkatnya akses masyarakat dalam kegiatan Keagamaan secara aktif, mencapai target program pendukung program Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.
- Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan bidang social dan ekonomi di kecamatan mencapai target, program pendukung program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan pelayanan dasar sesuai SPM,mencapai target program pendukung adalah program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mallawa

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Mallawa dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan.

TABEL 2.3
ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MALLAWA

No	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK
1	Jumlah layanan terkait kententraman dan ketertibun umum belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan standar yang berlaku	Kurang anggaran terkait pelaksanaan pelayanan	IKM trantibun
2	Keterlibatan Perempuan dalam bidang pembangunan social dan Ekonomi	Kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan social dan ekonomi	Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan Bidang social dan Ekonomi di Kecamatan
3	Keikut sertaan masyarakat dalam aktifiitas Keagamaan	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam aktifitas keagamaan	IKM Keagamaan
4	Tercapainya pelayanan kecamatan sesuai sesuai dengan SPM	Keterbatasan Sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas, Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki , sumber daya aparatur yang menguasai teknologi imformasi juga terbatas	IKM Layanan
5	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	IKM Layanan

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mallawa :

1. Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya dukungan SKPD Teknis terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;
2. Masih rendahnya pemahaman Aparatur terhadap tugas pokok dan Fungsi;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana ASN masih terbatas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Kabupaten Maros

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Maros dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Mallawa dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Mallawa,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Mallawa**	**100**	**Persen**	**4.298.761.476**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**4.298.761.476**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Mallawa**	***19***	***Dokumen***	***28.500.000***	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	***19 Dokumen***	***28.500.000***	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Mallawa	2	Dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Mallawa	1	Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Mallawa	1	Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Mallawa	1	Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Mallawa	1	Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Mallawa	1	Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	Kecamatan Mallawa	12	Dokumen	3.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LAPKIN) Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Kecamatan Mallawa**	***71***	**Dokumen**	***4.023.661.476***	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			***4.023.661.476***	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Mallawa	35	Orang	3.974.516.476	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	3.974.516.476	
Penyedia administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Mallawa	12	Dokumen	2.500.000	Penyedia administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.500.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SkPD	Kecamatan Mallawa	12	Dokumen	35.145.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SkPD	12 Dokumen	35.145.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi PD	Kecamatan Mallawa	12	Dokumen	1.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Akuntansi PD	12 Dokumen	1.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	Kecamatan Mallawa	1	Laporan	1.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD	1 Dokumen	1.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kecamatan Mallawa	1	Dokumen	2.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Mallawa	18	Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran PD	18 Dokumen	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD	Kecamatan Mallawa	1	Dokumen	2.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran PD	1 Dokumen	2.000.000	
Administrasi Barang MIlik Daerah pada perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	Kecamatan Mallawa	***29***	**Dokumen**	***17.500.000***	**Administrasi Barang MIlik Daerah pada perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	***4***	***17.500.000***	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	Kecamatan Mallawa	1	Dokumen	2.500.000	Jumlah rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	*1* Dokumen	2.500.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian barang milik daerah	Kecamatan Mallawa	12	Laporan	2.500.000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian barang milik daerah	1 Laporan	2.500.000	
Rekonsiliasi dan penyusunan barang milik Daerah SKPD	Jumlah lapoaran Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik Daerag pada SKPD	Kecamatan Mallawa	1	Laporan	2.500.000	Jumlah lapoaran Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik Daerag pada SKPD	Jumlah lapoaran Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik Daerag pada SKPD	1 Laporan	2.500.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil pelaksanaan pengamanan BMD-PD	Kecamatan Mallawa	12	Dokumen	2.500.000	Jumlah Dokumen Laporan Hasil pelaksanaan pengamanan BMD-PD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil pelaksanaan pengamanan BMD-PD	12 Dokumen	2.500.000	
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD-PD	Kecamatan Mallawa	12	Dokumen	2.500.000	Jumlah Dokumen Laporan Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD-PD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD-PD	12 Dokumen	2.500.000	
Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil pelaksanaan pemanfaatan BMD-PD	Kecamatan Mallawa	1	Dokumen	2.500.000	Jumlah Dokumen Laporan Hasil pelaksanaan pemanfaatan BMD-PD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil pelaksanaan pemanfaatan BMD-PD	1 Dokumen	2.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Mallawa	1	Laporan	2.500.000	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**Kecamatan Mallawa**	***67***	***Orang***	***108.100.000***	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur Kecamatan Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	***67 Orang***	***108.100.000***	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Saranan Prasarana displin pegawai	Kecamatan Mallawa	4	unit	20.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan Saranan Prasarana displin pegawai	4 unit	20.000.000	
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	Kecamatan Mallawa	40	Paket	11.100.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan lainnya	40 Paket	11.100.000	
Pendataan dan pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah dokomen pendataan dan engolahan Administrasi kepegawaian	Kecamatan Mallawa	12	Dokumen	3.000.000	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah dokomen pendataan dan engolahan Administrasi kepegawaian	12 Dokumen	3.000.000	
Koordinasi dan pelaksanaan sistim informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan system Imformasi kepegawaian	Kecamatan Mallawa	12	Dokumen	20.000.000	Koordinasi dan pelaksanaan sistim informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan system Imformasi kepegawaian	12 Dokumen	20.000.000	
Monitoring evaluasi, dan penilaian kierja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Kecamatan Mallawa	35	Dokumen	1.000.000	Monitoring evaluasi, dan penilaian kierja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	1.000.000	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kecamatan Mallawa	67	Orang	8.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	8.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikui sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Mallawa	67	orang	25.000.000	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikui sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	25.000.000	
Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Kecamatan Mallawa	67	Orang	20.000.000	Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	57	20.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**Kecamatan Mallawa**	***11***	Jenis	***376.000.000***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	***11 Jenis***	***376.000.000***	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Mallawa	1	Paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	12.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Mallawa	5	Paket	9.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	9.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Mallawa	5	paket	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	17 jenis	5.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Mallawa	2	paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	25.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Mallawa	2	jenis	15.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis	15.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material	Kecamatan Mallawa	20	Jenis	25.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material	5 Jenis	25.000.000	
fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi	Kecamatan Mallawa	400	Orang	120.000.000	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi	750 Orang	120.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	Kecamatan Mallawa	12	Laporan	90.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	12 Laporan	90.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	**INDIKATOR KINERJA**	**LOKASI**	**TARGET CAPAIAN**		**KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF**	**PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**KEBUTUHAN DANA**	
Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Kecamatan Mallawa	12	Dokumen	20.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	20.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Mallawa	5	Jenis	-				-	
Dokumen pelaksanaan Sistim pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistim pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Kecamatan Mallawa	2	Dokumen	30.000.000	Dokumen pelaksanaan Sistim pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistim pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	2 Dokumen	30.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Mallawa**	***4***	***jenis***	***540.000.000***	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	***5 jenis***	***540.000.000***	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kecamatan Mallawa	1	Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1 Unit	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kecamatan Mallawa	5	Unit	50.000.000	Pengadaan Moel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Unit	50.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor	Kecamatan Mallawa	2	unit	40.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor	4 Unit	40.000.000	
Pengadaan gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit atau bangunan bangunan lainnya yang disediakan	Kecamatan Mallawa	3	unit	300.000.000	Pengadaan gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit atau bangunan bangunan lainnya yang disediakan	2 Unit	300.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Kecamatan Mallawa	15	Jenis	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 Jenis	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Mallawa**	***4***	***Jenis***	***125.000.000***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***4 Jenis***	***125.000.000***	
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedia jasa Surat	Kecamatan Mallawa	1000	Laporan	15.000.000	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terdistribusi	700 surat	15.000.000	
Penyedia jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang disediakan	Kecamatan Mallawa	12	laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Layanan Umum Kantor	3 jenis	12.000.000	
Penyedia jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kecamatan Mallawa	2	laporan	25.000.000	Penyedia jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Laporan	25.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kecamatan Mallawa	3	laporan	73.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	73.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**Kecamatan Mallawa**	***11***	***Jenis***	***80.000.000***	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	***11 Jenis***	***80.000.000***	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kecamatan Mallawa	6	unit	-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 unit	-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Mallawa	10	unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	6 unit	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Mallawa	1	unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	2 unit	30.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan**	**Kecamatan Mallawa**	**100**	**Persen**	**780.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan**	**100 Persen**	**780.000.000**	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Mallawa**	**1**	**Urusan**	**100.000.000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan**	**4 Urusan**	**100.000.000**	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Sehat, BOP Kelurahan)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Kecamatan Mallawa	25	Dokumen	100.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Sehat, BOP Kelurahan)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	25 Dokumen	100.000.000	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	Kecamatan Mallawa	**2**	**Kegiatan**	**600.000.000**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**2 Kegiatan**	**600.000.000**	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mallawa	5	Laporan	100.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis SPM Yang Dilaksanakan Di Kecamatan	1 laporan	100.000.000	
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masy. di wilayah Kecamatan	Kecamatan Mallawa	4	Layanan	500.000.000	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	24 laporan	500.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**Kecamatan Mallawa**	**3**	**layanan**	**80.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**3 layanan**	**80.000.000**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Mallawa	4	Dokumen	20.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinzn Usaha yang dilaksanakan	4 Dokumen	20.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan plaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kecamatan Mallawa	13	Layanan	25.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan plaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	1 laporan	25.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan	Kecamatan Mallawa	1	Kegiatan	35.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan	1 laporan	35.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	Kecamatan Mallawa	**100**	**Persen**	**475.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100 Persen**	**475.000.000**	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (gender)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan	Kecamatan Mallawa	2	kegiatan	110.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (gender)	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan	2 Kegiatan	110.000.000	
Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kecamatan Mallawa	2	Dokumen	60.000.000	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	2 Dokumen	60.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Mallawa	2	Laporan	50.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50.000.000	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKM Pelayan desa/kelurahan)	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**Kecamatan Mallawa**	**4**	**kegiatan**	**365.000.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (IKM Pelayan desa/kelurahan)**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**4 kegiatan**	**365.000.000**	
Pembangunan sarana prasarana Kelurahan	Jumlah saranan prasarana kelurahan yang terbangun	Kecamatan Mallawa	2	Paket	200.000.000	Pembangunan sarana prasarana Kelurahan	Jumlah saranan prasarana kelurahan yang terbangun	6 Unit	200.000.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan di kelurahan	Kecamatan Mallawa	7	Pokmas/ Ormas	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan di kelurahan	7 Pokmas/ Ormas	150.000.000	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Mallawa	400	orang	--	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	400 orang	--	
Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Mallawa	2	Laporan	15.000.000	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	15.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	Kecamatan Mallawa	**100**	**Persen**	**20.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	**100 Persen**	**20.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	Kecamatan Mallawa	**1**	**kegiatan**	**20.000.000**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**1 kegiatan**	**20.000.000**	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vetikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Mallawa	200	Orang	20.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vetikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	20.000.000	
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**Kecamatan Mallawa**	**100**	**Persen**	**360.000.000**	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH**	**Persentase Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**	**Persen**	**360.000.000**	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**Kecamatan Mallawa**	**4**	**Kegiatan**	**360.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**4 Kegiatan**	**360.000.000**	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	Kecamatan Mallawa	2	Kegiatan	150.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	500 orang	150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
NKRI	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia						Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia			
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Mallawa	4	Dokumen	75.000.000	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	400 orang	75.000.000	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Mallawa	2	Kegiatan	120.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.220 orang	120.000.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Mallawa	1	Dokumen	15.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	15.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	Kecamatan Mallawa	**100**	**Persen**	**10.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	**100 Persen**	**10.000.000**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**Kecamatan Mallawa**	**4**	**Desa**	**10.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**4 Desa**	**10.000.000**	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Mallawa	4	Desa	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Desa	10.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Mallawa pada tahun 2024 dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum diarahkan pada :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Menjadi Kewenangan Kecamatan dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur lingkup Kecamatan Mallawa;
2. Peningkatan Kualitas pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan baik di Desa maupun Kelurahan;
3. Upaya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
4. Peningkatan Kualitas Koordinasi Pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah;
5. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Mallawa maka kelima hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kelurahan Sabila**		**Rp. 200,000,000**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Kelurahan Sabila*		*Rp. 200,000,000*	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamqatan Mallawa adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Mallawa

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Mallawa mempunyai *tujuan* dan *sasaran*:

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MALLAWA TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2024
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM PATEN	Poin	3,25

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	IKM Trantib Linmas	Poin	3,25
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerinthan Desa /Kelurahan	IKM Desa /Kelurahan	Poin	3,25
Meningkatkan Peran serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	Meningkatnya akses Masyarakat dalam kegiatan Keagamaam secara aktif	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan	Poin	3,25
Meningkatkan Peran Serta Perempuan di Kecamatan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Atif Perempuan Di Kecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial dan ekonomi	Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam kegiatan pembangunanBidang social dan ekonomi	Persen	34,56
Meningkatkan kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan dasar Kecamatan	Meningkatnya Cakupan Pelayan Dasar Masyarakat Kecamatan sesuai SPM	Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM	Persen	100

3.3 Program dan Kegiatan

I Pokok Permasalahan

Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian dikarenakan , ada beberapa kegiatan yang tidak cukup anggaranya, sedangkan kegiatan lain ada kelebihan anggaran.

II Analisis dan Alasan Perubahan

1. Pada Sub Kegiatan "Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional" dilakukan pengurangan pada belanja Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan , Belanja

Jasa Tenaga Ahli, belanja makanan dan minuman pengajinan dan belanja jasa peyelenggara acara untuk dialihkan pada belanja makanan dan minuman jamuan tamu **dikarenakan dana yang tesedia tidak cukup**

2. Pada Sub Kegiatan " Penyediaan jasa penunjang urusan kantor dialihkan pada belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya **dikarenakan dana yang tesedia tidak cukup**

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Mallawa dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MALLAWA
RANCANGAN AWAL RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Kecamatan**			**2.916.561.903**	**2.918.126.903**				
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	***19 Dokumen***	***19 Dokumen***	***7.176.000***	***7.176.000***	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	990.000	990.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	990.000	990.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perubhana RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	990.000	990.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000	1.050.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perubhana DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.050.000	1.050.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja OPD	1 Laporan	1 Laporan	1.050.000	1.050.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.056.000	1.056.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**			***2.574.221.278***	***2.574.221.278***	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**DAU/PAD**
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Layanan Gaji Dan Tunjangan	34 Org/Bln	34 Org/Bln	2.526.261.278	2.526.261.278	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**DAU**
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	47.960.000	47.960.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**DAU**
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Daerah**				-	-	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		-
7.01.01.2.05	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut lainnya	40 Unit	40 Unit	10.000.000	10.000.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis layanan Administrasi Umum PD yang dilaksanakan**	**11 Jenis**	**11 Jenis**	**125.127.000**	**134.400.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	17 Peket	17 Peket	1.777.500	1.777.500	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	10.772.500	10.772.500	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	1.100.000	1.100.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.01.2.06.06	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dn peraturan perundang-undangan	5 Dokumen	5 Dokumen	-	-	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		
7.01.01.2.06.07	Penyedian Bahan/Material	Jumlah paket bahan / Material	5 Jenis	5 Jenis	792.000	792.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan kunjungan tamu yang terfasilitasi	11 Laporan	12 Laporan	18.815.000	33.815.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi Internal PD	12 Laporan	12 Laporan	91.870.000	91.310.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD

7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	***4 Jenis***	***4 Jenis***	**197.277.625**	**171.077.625**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.01.2.08.01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedia jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.860.000	11.860.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Juimlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan	185.417.625	159.217.625	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Kapasitas Organisasi (Survey Internal)**	***3.00 Nilai Survey***	***3.00 Nilai Survey***	**2.760.000**	**15.955.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	6 Unit	6 Unit	1.000.000	1.000.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik	1 Unit	1 Unit	1.760.000	14.955.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**284.380.000**	**284.380.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**
7.01.02.2.01.02	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Tingkat Kecamatan**	**4 Urusan**	**4 Urusan**	**93.280.000**	**93.280.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec.Sehat)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.280.000	3.280.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (BOP Kelurahan Sabila)	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000	90.000.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**186.750.000**	**186.750.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD

7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1.350.000	1.350.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.02.2.02.03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	24 Laporan	24 Laporan	185.400.000	185.400.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.02.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**3 Urusan**	**3 Urusan**	**4.350.000**	**4.350.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.02.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	4 Dokumen	4 Dokumen	1.350.000	1.350.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.02.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	8 Laporan	8 Laporan	1.350.000	1.350.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.02.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Dokumen Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain Yang Dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku	1 Laporan	1 Laporan	1.650.000	1.650.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan**	**3**	**3**	**245.490.000**	**245.490.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Di Koordinasikan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**45.490.000**	**45.490.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.03.2.01.02	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Singkronisasi Pogram Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta diwilayah Kerja Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen	28.230.000	28.230.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD

7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	17.260.000	17.260.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Di Kelurahan**	**2 Kegiatan**	**2 Kegiatan**	**200.000.000**	**200.000.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		
7.01.03.2.02.01	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan prasarana yang terbangun	1 Unit	1 Unit	200.000.000	200.000.000	Kecamatan Mallawa (Kel. Sabila)	Kecamatan Mallawa (Kel. Sabila)		DAU
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melakukan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 Pokmas/Ormas	7 Pokmas/Ormas	-	-	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		-
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	-	-	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		-
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.250.000**	**2.250.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**
7.01.04.2.03	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**2.250.000**	**2.250.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Penanganan Kasus Ketentraman dan Ketertiban Yang disinergikan dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	**2.250.000**	**2.250.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jenis dan urusan yang dikoordinasikan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**89.970.000**	**99.320.000**	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		**PAD**

7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**4**	**Kegiatan**	**89.970.000**	99.320.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	500 Org	500 Org	46.720.000	36.750.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku Umat Beragama Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan stabilitas Keamanan local Regional dan Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1220 Org	1200 Org	43.250.000	30.500.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	1 Dokumen	-	10.000.000	Kec. Mallawa	Kec. Mallawa		PAD

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Mallawa. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Mallawa ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Maros secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap ridha dan petunjuk Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing.**



RENCANA KERJA PERUBAHAN

KECAMATAN MARUSU

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami Dapat menyusun dan Menyelesaikan Laporan Renja Kecamatan Marusu Tahun 2024 ini tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan Rancangan Renja Tahun 2024 ini, banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Olehnya itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Rancangan Awal Renja Kecamatan Marusu Tahun 2024 ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kami menyadari bahwa Renja Tahun 2024 ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Akhir kata semoga Laporan Renja Kecamatan Marusu Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.

Maros, 31 Juli 2024

Camat Marusu,

SYAMSUL IDRUS, S. STP., M.M

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19830730 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I PENDAHULUAN .....

1.1. Latar Belakang .....

1.2. Landasan Hukum .....

1.3. Maksud dan Tujuan .....

1.4. Sistematika Penulisan .....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....

II.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah .....

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....

III.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Perubahan .....

BAB IV PENUTUP.....

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 tahun 20214 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Pemerintah daerah untuk Menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaran Pemrintahaan.Prenecaaan adalah Suatu proses untuk menentukan Tindakan masa depan yang tepat,melalui urutan pilihan dengan memeperhatikan rencana kerja Kecamatan Marusu Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RENJA merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global.

Sehubungan dengan itu, Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, sebagai salah satu instansi pemerintah Kabupaten Maros membuat dan menyusun dokumen perencanaan dalam periode 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja PD tahun disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Marusu Tahun 2021-2026. Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Kecamatan Marusu disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahapan Persiapan.
2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
3) Penyusunan Rancangan.
4) Penyusunan Rancangan Akhir
5) Penetapan Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarakn Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros tahun 2024 dan tetap mempedomani Renstara Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah Menjadi Pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Marusu Tahun 2024 berdasarkan pada ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Adapun landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah :
    1. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
    4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangana Pendemi Corona Viru Disease 2019 (Covid – 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasidan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-
;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 Nomor 23);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahn Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3;
30. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 34);
31. Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2023 Tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 nomor 36.

I.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marusu Tahun 2024 adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Marusu untuk periode 1 tahun sebagai Impelemntasi pelaksnaan rencana pembagunan jangka menengah Daerah dan Renstra perangkat daerah

Tujuan disusunnya Dokumen Renja Kecamatan Marusu Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program kegiatan, dan Sub.kegiatan ;
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Kantor Kecamatan Marusu
3. Membuat acuan perencanaan untuk mencapai Visi,Misi , Tujuan yang memuat Programdan kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja , kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan.

4. Sebagai Dasar Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab- bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu, Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rentsra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang- undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Maksud dan tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022,

Pada bab ini memuat kajian (riview) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat daerah sudah disahkan.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan,

Pada bab ini menjelaskan mengenai Telahan Terhadap Kebijakan Nasional yang menjelaskan menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD yang merupakan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab I V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa Saran dan Kesimpulan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Marusu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Marusu.

Rencana Kerja Kecamatan Marusu merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Marusu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Marusu ini menyajikan pengukuran Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Marusu selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023

Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Marusu 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Marusu tahun 2022 dan Evaluasi renja Kecamatan Marusu tahun berjalan tahun 2023 mengacu pada laporan realisasi APBD untuk Kecamatan Marusu, antara lain :

a. **Realisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran sesuai yang direncanakan**

1. Kecamatan Marusu pada tahun 2022 melaksanakan 5 program dan terealisasi seluruhnya. Dari ke-5 program tersebut, terdapat 1 program yang tidak mencapai target
2. Kecamatan Marusu pada tahun 2022 melaksanakan 8 kegiatan terkait urusan, dari ke-8 kegiatan tersebut yang mencapai target sebanyak 6 Kegiatan , sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 2 kegiatan
3. Kecamatan Marusu pada tahun 2022 melaksanakan 12 sub kegiatan. Dari 12 Subkegiatan yang melaksanakan terdapat 10 subkegiatan yang mencapai target, 2 sub kegiatan yang tidak mencapai target

b. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan adanya program/kegiatan yang tidak terealisasi;**

1. Factor penyebab adanya program / kegiatan yang tidak terealisasi 100% khususnya pada tahun 2022 adalah Evaluasi kelurahan hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran diakhir tahun sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi anggarannya , sementara Program dan Kegiatan lainnya terealisasi sesuai tujuan dan sasaran program melalui koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh pelaksana kegiatan dan seluruh stakeholder.
2. Faktor penyebab adanya program,kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 yang belum memenuhi terget diakibatkan karena Belum terealisasi anggaran tersebut karena masih masuk di Tahun berjalan , sementara Program dan Kegiatan lainnya terealisasi sesuai tujuan dan sasaran program melalui koordinasi dan pemahaman tugas yang baik oleh pelaksana kegiatan dan seluruh stakeholder.

e. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab diatas;

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan urusan pemerintahan

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023
PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA MAROS

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Marusu

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		**Nilai SAKIP**										**39**		**9.055.993.388**		**68**	**KEC MARUSU**
	Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota	**Penunjang Urusan Pemerintah DAerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.**	**100**	**13.358.352.425**	**100**	**8.015.011.455**	**100**	**2.671.670.485**		**1.040.981.933**	**0**	**39**	**50**	**9.055.993.388**	**50**	**68**	**KEC MARUSU**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**11**	**29.575.000**	**11**	**17.745.000**	**11**	**5.915.000**		**1.780.000**	**#DIV/0!**	**30**	**11**	**19.525.000**	**100**	**66**	**KEC MARUSU**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	3.950.000	6	2.370.000	2	790.000		0	#DIV/0!	0	6	2.370.000	60	60	KEC MARUSU
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	4.450.000	3	2.670.000	1	890.000		890.000	#DIV/0!	100	3	3.560.000	60	80	KEC MARUSU
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	3.200.000	3	1.920.000	1	640.000		0	#DIV/0!	0	3	1.920.000	60	60	KEC MARUSU
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	4.450.000	3	2.670.000	1	890.000		890.000	#DIV/0!	100	3	3.560.000	60	80	KEC MARUSU
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	3.200.000	3	1.920.000	1	640.000		0	#DIV/0!	0	3	1.920.000	60	60	KEC MARUSU

	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	5.000.000	3	3.000.000	1	1.000.000		0	#DIV/0!	0	3	3.000.000	60	60	KEC MARUSU
	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	5.325.000	12	3.195.000	4	1.065.000		0	#DIV/0!	0	12	3.195.000	60	60	KEC MARUSU
	Administrasi keuangan perangkat daerah	**Administrasi keuangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**125**	**12.134.887.425**	**75**	**7.280.932.455**	**25**	**2.426.977.485**		**975.896.933**	**#DIV/0!**	**40**	**75**	**8.256.829.388**	**60**	**68**	**KEC MARUSU**
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100	11.860.987.425	1260	7.116.592.455	420	2.372.197.485		950.996.933	#DIV/0!	40	1.260	8.067.589.388	60	68	KEC MARUSU
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55	273.900.000	33	164.340.000	11	54.780.000		24.900.000	#DIV/0!	45	33	189.240.000	60	69	KEC MARUSU
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	**Administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mendapatkan layanan Administrasi Kepegawaian**	**150**	**16.500.000**	**90**	**9.900.000**	**30**	**3.300.000**		**0**	**#DIV/0!**	**0**	**90**	**9.900.000**	**60**	**60**	**KEC MARUSU**
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150	16.500.000	90	9.900.000	30	3.300.000		0	#DIV/0!	0	90	9.900.000	60	60	KEC MARUSU
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**500.515.000**	**6**	**300.309.000**	**6**	**100.103.000**		**29.475.000**	**#DIV/0!**	**29**	**3**	**329.784.000**	**50**	**66**	**KEC MARUSU**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	16.180.000	3	9.708.000	1	3.236.000		1.083.000	#DIV/0!	33	3	10.791.000	60	67	KEC MARUSU
	penyediaan peratalan rumah tangga	penyediaan peratalan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	33.110.000	3	19.866.000	1	6.622.000		2.077.000	#DIV/0!	31	3	21.943.000	60	66	KEC MARUSU
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	121.775.000	3	73.065.000	1	24.355.000		6.375.000	#DIV/0!	26	3	79.440.000	60	65	KEC MARUSU
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	14.000.000	3	8.400.000	1	2.800.000		0	#DIV/0!	0	3	8.400.000	60	60	KEC MARUSU
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	162.500.000	36	97.500.000	12	32.500.000		14.770.000	#DIV/0!	45	36	112.270.000	60	69	KEC MARUSU
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	152.950.000	36	91.770.000	12	30.590.000		5.170.000	#DIV/0!	17	36	96.940.000	60	63	KEC MARUSU
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**531.000.000**	**2**	**318.600.000**	**2**	**106.200.000**		**32.830.000**	**#DIV/0!**	**31**	**1**	**351.430.000**	**50**	**66**	**KEC MARUSU**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	10.000.000	36	6.000.000	12	2.000.000		1.000.000	#DIV/0!	50	36	7.000.000	60	70	KEC MARUSU
	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	60	521.000.000	36	312.600.000	12	104.200.000		31.830.000	#DIV/0!	31	36	344.430.000	60	66	KEC MARUSU

			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**2**	**145.875.000**	**2**	**87.525.000**	**2**	**29.175.000**		**1.000.000**	**#DIV/0!**	**3**	**1**	**88.525.000**	**50**	**61**	**KEC MARUSU**
	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mensin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	120.000.000	45	72.000.000	15	24.000.000		1.000.000	#DIV/0!	4	45	73.000.000	60	61	KEC MARUSU
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	25.875.000	3	15.525.000	1	5.175.000		0	#DIV/0!	0	3	15.525.000	60	60	KEC MARUSU
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu di kecamatan		**IKM PATEN**															**KEC MARUSU**
	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	**Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan**	**100**	**56.705.000**	**32,5**	**34.905.000**	**100**	**8.150.000**		**0**	**0**	**0**	**16**	**34.905.000**	**16**	**62**	**KEC MARUSU**
	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	**Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada tingkat Kecamatan**	**1**	**22.075.000**	**1**	**13.825.000**	**1**	**2.750.000**		**0**	**0**	**0**	**1**	**13.825.000**	**50**	**63**	**KEC MARUSU**
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60	22.075.000	8	13.825.000	12	2.750.000		0	0	0	8	13.825.000	13	63	KEC MARUSU
	Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat	**Pelaksanaan urusan peemrintahan yang dilipahkan kepada camat**	**Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimphkan kepada Camat**	**2**	**34.630.000**	**2**	**21.080.000**	**2**	**5.400.000**		**0**	**0**	**0**	**1**	**21.080.000**	**50**	**61**	**KEC MARUSU**
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	5	13.500.000	3	8.050.000	1	2.700.000		0	0	0	3	8.050.000	60	60	KEC MARUSU
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5	21.130.000	3	13.030.000	1	2.700.000		0	0	0	3	13.030.000	60	62	KEC MARUSU
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan		**IKM Desa/Kelurahan**															**KEC MARUSU**
	Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**100**	**10.500.000**	**46,25**	**7.280.000**	**100**	**2.100.000**		**2.100.000**	**0**	**100**	**23**	**9.380.000**	**23**	**89**	**KEC MARUSU**
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa	**Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan penagwasan pemerintahan desa**	**Jumlah desa yang menyelenggarakan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku**	**7**	**10.500.000**	**7**	**7.280.000**	**7**	**2.100.000**		**2.100.000**	**0**	**100**	**4**	**9.380.000**	**50**	**89**	**KEC MARUSU**

	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35	10.500.000	5	7.280.000	7	2.100.000		2.100.000	0	100	5	9.380.000	14	89	KEC MARUSU
	Meningkatnya peran aktif perempuan di kecamatan dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi		**Persentase perempuan yang terlbat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi di kecamatan**															**KEC MARUSU**
	Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan	**Pemberdayaan masyrakat desa dan kelurahan**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100**	**352.575.000**	**100**	**14.560.000**	**100**	**70.515.000**		**26.315.000**	**0**	**37**	**50**	**40.875.000**	**50**	**12**	**KEC MARUSU**
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	**Jumlah masyarakat yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**2000**	**352.575.000**	**1200**	**14.560.000**	**400**	**70.515.000**		**26.315.000**	**0**	**37**	**1.200**	**40.875.000**	**60**	**12**	**KEC MARUSU**
	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	SInkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10	140.325.000	5	7.280.000	2	28.065.000		26.315.000	0	94	5	33.595.000	50	24	KEC MARUSU
	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15	212.250.000	5	7.280.000	3	42.450.000		0	0	0	5	7.280.000	33	3	KEC MARUSU
	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban di kecamatan		**IKM Trantibun Linmas**															**KEC MARUSU**
	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	**Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran K3 dan pelanggaran PERDA di Wilayah Kecamatan**	**100**	**19.640.000**	**46,25**	**11.540.000**	**100**	**2.700.000**		**0**	**0**	**0**	**23**	**11.540.000**	**23**	**59**	**KEC MARUSU**
	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	**Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**Jumlah masyarakat yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum**	**375**	**19.640.000**	**200**	**11.540.000**	**75**	**2.700.000**		**0**	**0**	**0**	**100**	**11.540.000**	**27**	**59**	**KEC MARUSU**
	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5	19.640.000	4	11.540.000	1	2.700.000		0	0	0	4	11.540.000	80	59	KEC MARUSU
	Meningkatnya Akses Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan secara aktif		**IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan**															**KEC MARUSU**
	Penyelenggaraan	**Penyelenggaraan**	**Persentase**	**100**	**409.450.000**	**37,48**	**175.870.000**	**100**	**77.860.000**		**42.160.000**	**0**	**54**	**19**	**218.030.000**	**19**	**53**	**KEC**

	urusan pemerintahan umum	**urusan pemerintahan umum**	**Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional**															**MARUSU**
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalad aerah**	**Jumlah urusan pemerintahan daerah sesuai penugasan kepala daerah yang diselenggarakan**	**2**	**409.450.000**	**2**	**175.870.000**	**2**	**77.860.000**		**42.160.000**	**0**	**54**	**1**	**218.030.000**	**50**	**53**	**KEC MARUSU**
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tungggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1500	131.430.000	100	54.330.000	300	25.700.000		0	0	0	100	54.330.000	7	41	KEC MARUSU
	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2500	278.020.000	400	121.540.000	500	52.160.000		42.160.000	0	81	400	163.700.000	16	59	KEC MARUSU

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Marusu

Kecamatan Marusu merupakan perangkat daerah Kabupaten Maros sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dengan tugas utama yaitu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu sebagai koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat,koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta sebagai pembina penyelenggaraan pemerintahan desa disamping itu juga camat bertugas melaksanakan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa. Jika dilihat dari jenisnya, Pelayanan Adminitrasi Terpadu dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN MARUSU
KABUPATEN MAROS

NO	INDOKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	IKM PATEN			3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
2	IKM Trantibum Linmas			3,25	3,25	3,26	3,26	3,25	3,25	3,26	3,26	
3	IKM DESA/Kelurahan			3,25	3,25	3,25	3,26	3,25	3,25	3,26	3,26	
4	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan			3,25	3,25	3,26	3,25	3,25	3,25	3,26	3,26	
5	Persentase Perempuan Yang Terlibat Secara Aktif Dalam Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Dan Ekonomi di Kecamatan			32,20	34,56	36,56	38,56	32,11	34,56	38,80	42,72	
6	Persentase Masyarakat Kecamatan Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM			100	100	100	100	100	100	100	100	

- Jumlah inidkator yang dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Marusu ada 6 indikator yaitu : IKM Paten, IKM Trantibum Linmas, IKM Desa dan Kelurahan , IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan, Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam Kegiatan Pembangunan bidang Sosial dan ekonomi di Kecamatan, Persentase Masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar sesuai SPM, Ke 6 Indikator Tersebut semuanya mencapai target.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Marusu

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Marusu dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan,

No	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK
1	Jumlah layanan terkait kententraman dan ketertibun umum belum dapat dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan standar yang Berlaku	Kurang anggaran terkait pelaksanaan pelayanan	IKM trantibum
2	Keterlibatan Perempuan dalam bidang pembangunan social dan Ekonomi	Kurangnya partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan social dan ekonomi	Persentase perempuan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan Bidang social dan Ekonomi di Kecamatan
3	Keikut sertaan masyarakat dalam aktifiitas Keagamaan	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam aktifitas keagamaan	IKM Keagamaan
4	Tercapainya pelayanan kecamatan sesuai dengan SPM	Keterbatasan Sumber daya aparatur baik kuantitas maupun kualitas, Selain terbatasnya jumlah sumber daya yang dimiliki , sumber daya aparatur yang menguasai teknologi imformasi juga terbatas	IKM Layanan
5	Sarana dan prasarana yang tidak memadai	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	IKM Layanan

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Marusu :

1) Terbatasnya kewenangan Camat di wilayah karena belum adanya dukungan SKPD Teknis terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat menyangkut urusan pemerintahan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
2) Masih rendahnya pemahaman Aparatur terhadap tugas pokok dan Fungsi
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana ASN masih terbatas

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Maros

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Maros dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Kecamatan Marusu dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Marusu,dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan.

Tabel 2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Provinsi /Kabupaten/Kota Maros

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Marusu

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Marusu**			**2.298.036.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**2.298.036.000,00**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Marusu**			***34.500.000,00***	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**		***34.500.000,00***	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Marusu	2	Dokumen	6.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Marusu	1	Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Marusu	1	Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Marusu	1	Dokumen	4.000.000 ,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000 ,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kecamatan Marusu	1	Dokumen	4.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1 Dokumen	4.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD						SKPD			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Marusu	1	Laporan	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian KInerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.500.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Marusu	4	Laporan	6.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kecamatan Marusu			***1.776.186.000,00***	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			***1.776.186.000,00***	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Marusu	29	Orang	1.765.786.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang	1.765.786.000,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SkPD	Kecamatan Marusu	12	Dokumen	10.400.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SkPD	12 Dokumen	10.400.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kecamatan Marusu			47.700.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			47.700.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Marusu	30	Paket	15.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Dokumen	15.000.000,00	
Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Marusu	12	Dokumen	25.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	25.700.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Marusu	67	Orang	7.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	67 Orang	7.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Kecamatan Marusu**			***260.750.000,00***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	***11 Jenis***	***260.750.000,00***	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	**Kecamatan** Marusu	***10***	*Paket*	***15.000.000,00***	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	***10 paket***	***15.000.000,00***	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Marusu	25	Paket	10.500.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	25 Paket	10.500.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Marusu	2	Paket	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	15.000.000,00	
fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Marusu	2750	Orang	30.000.000	fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Tamu Yang Berkunjung dan Terfasilitasi	2750 Orang	30.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal SKPD	Kecamatan Marusu	225	Laporan	65.500.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Internal PD	225 Laporan	65.500.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Marusu	21	Unit	65.500.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21 Unit	65.500.000,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Marusu	6	Unit	45.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	45.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Marusu	15	Unit	20.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	15 Unit	20.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Marusu**			***75.400.000,00***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***75.400.000,00***	
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyedia jasa Surat Menyurat	Kecamatan Marusu	1200	Laporan	10.000.000,00	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Yang Terdistribusi	1200 Laporan	10.000.000,00	
Penyedia jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan listrik yang Disediakan	Kecamatan Marusu	12	Laporan	12.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Jasa Layanan Umum Kantor	12 Laporan	12.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	Kecamatan Marusu	7	Laporan	53.400.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	7 Laporan	53.400.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**Kecamatan Marusu**	***13***	***Unit***	***65.000.000,00***	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	***13 Unit***	***65.000.000,00***	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kecamatan Marusu	2	Unit	38.500.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	2 Unit	38.500.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Marusu	10	Unit	13.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/Mesin Kebutuhan Kantor Dalam Kondisi Baik	10 unit	13.500.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan	Kecamatan Marusu	1	Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Dalam Kondisi Baik	1 unit	25.000.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di Kecamatan**	**Kecamatan Marusu**	**2**	**Kegiatan**	**730.400.000,00**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di kecamatan**	**2 Kegiatan**	**730.400.000,00**	
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	Kecamatan Marusu	**1**	**Kegiatan**	**658.900.000,00**	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Kecamatan**	**1 Kegiatan**	**658.900.000,00**	
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kecamatan Marusu	4	Laporan	658.900.000,00	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	4 laporan	658.900.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**Kecamatan Marusu**	**18**	**Dokumen**	**71.500.000,00**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah layanan Urusan Pemerintahan Yang Di Delegasikan Kepada Camat Dan Terlaksana Sesuai Ketentuan Berlaku.**	**18 Dokumen**	**71.500.000,00**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Marusu	4	Dokumen	6.500.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinzn Usaha yang dilaksanakan	4 Dokumen	6.500.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan plaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	Kecamatan Marusu	13	Laporan	6.500.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non perizinan	Jumlah laporan plaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	13 laporan	6.500.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan	Kecamatan Marusu	1	Laporan	58.500.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain Yang Dilimpahkan	1 laporan	58.500.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
dilimpahkan										
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	Kecamatan Marusu	**100**	**Persen**	**50.000.000,00**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat di Kecamatan Dalam Kegiatan Pembangunan**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	
Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Kecamatan Marusu	2	Dokumen	25.000.000,00	Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	Jumlah dokumen Singkronisasi Program kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	2 Dokumen	25.000.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Marusu	2	Laporan	25.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	25.000.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	Kecamatan Marusu	**100**	**Persen**	**10.000.000,00**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penurunan kasusu pelanggaran K3 dan pelanggaran perda di wilayah kecamatan**	**100 Pesen**	**10.000.000,00**	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	Kecamatan Marusu	**1**	**Kegiatan**	**10.000.000,00**	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Kegiatan Penanganan Ketenteraman Dan Ketertiban Yang Dilaksanakan**	**1 Kegiatan**	**10.000.000,00**	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vetikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Marusu	1	Laporan	10.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republikertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vetikal di wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**Kecamatan Marusu**	**3**	**Kegiatan**	**178.575.000,00**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Kegiatan Terkait urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan Berlaku**	**3 Kegiatan**	**178.575.000,00**	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Marusu	400	Orang	116.575.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan NKRI	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia	400 orang	116.575.000,00	

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Marusu	200	Orang	56.000.000,00	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 orang	56.000.000,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Marusu	1	Dokumen	6.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	6.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	Kecamatan Marusu	**100**	**Persen**	**14.000.000,00**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan**	**100 Persen**	**14.000.000,00**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**Kecamatan** Marusu	**7**	**Desa**	**14.000.000,00**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Berlaku**	**7 Desa**	**14.000.000,00**	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Marusu	3	Dokumen	14.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 dokumen	14.000.000,00	

Tabel 2.5

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. MAROS

TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN MARUSU							**3.200.000.000,00**	**2.832.995.485,00**	**2.832.995.485,00**	**-367.004.515,00**							**2.584.151.439,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**1.900.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**-1.260.000,00**							**2.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**1.900.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**-1.260.000,00**							**2.000.000,00**	
1,	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**-**				**-**	**-**	**2.856.580.000,00**	**2.671.670.485,00**	**2.671.670.485,00**	**-688.928.561,00**							**2.167.651.439,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.400.000,00	5.915.000,00	5.915.000,00	-6.485.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	-		14.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	640.000,00	640.000,00	-1.260.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			2.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.198.100.000,00**	**2.832.355.485,00**	**2.832.355.485,00**	**-365.744.515,00**							**2.582.151.439,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.198.100.000,00**	**2.832.355.485,00**	**2.832.355.485,00**	**-365.744.515,00**							**2.582.151.439,00**	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.750.000,00	790.000,00	790.000,00	-960.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			2.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000,00	890.000,00	890.000,00	-860.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi			2.000.000,00	KECAMATAN MARUSU

															Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah				
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000,00	890.000,00	890.000,00	-860.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			2.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.750.000,00	640.000,00	640.000,00	-1.110.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			2.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-750.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			2.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.750.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	-685.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			2.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.346.850.000,00	2.426.977.485,00	2.426.977.485,00	80.127.485,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	-		1.529.651.439,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.294.490.000,00	2.372.197.485,00	2.372.197.485,00	77.707.485,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			1.469.651.439,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	52.360.000,00	54.780.000,00	54.780.000,00	2.420.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			60.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-11.700.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	-		15.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	15.000.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-11.700.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			15.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	160.830.000,00	100.103.000,00	100.103.000,00	-60.727.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	-		202.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	3.394.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00	-158.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			7.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	9.230.000,00	6.622.000,00	6.622.000,00	-2.608.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			10.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				48 Paket	48 Paket	29.860.000,00	24.355.000,00	24.355.000,00	-5.505.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			31.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.346.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-546.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			4.000.000,00	KECAMATAN MARUSU

	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2750 Laporan	2750 Laporan	45.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			50.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				255 Laporan	255 Laporan	70.000.000,00	30.590.000,00	30.590.000,00	-39.410.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			100.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	146.000.000,00	0,00	0,00	-146.000.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	-		180.000.000,00	KECAMATAN MARUSU

	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			100.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	66.000.000,00	0,00	0,00	-66.000.000,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			80.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	123.500.000,00	106.200.000,00	106.200.000,00	-17.300.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	-		152.000.000,00	KECAMATAN MARUSU

	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	1200 Laporan	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			10.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			12.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	107.500.000,00	104.200.000,00	104.200.000,00	-3.300.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas			130.000.000,00	KECAMATAN MARUSU

															Wilayah				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	52.000.000,00	29.175.000,00	29.175.000,00	-22.825.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	-		75.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	42.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			50.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	5.175.000,00	5.175.000,00	-4.825.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			25.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
1,	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**				**-**	**-**	**32.910.000,00**	**8.150.000,00**	**8.150.000,00**	**1.590.000,00**							**34.500.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	9.530.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-6.780.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	-		10.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	9.530.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-6.780.000,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan			10.000.000,00	KECAMATAN MARUSU

															Kondusifitas Wilayah				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	23.380.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-17.980.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	-		24.500.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	4 Dokumen	5.950.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-3.250.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			6.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				13 Laporan	13 Laporan	5.950.000,00	0,00	0,00	-5.950.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			6.500.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	11.480.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-8.780.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			12.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
2,	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**125.000.000,00**	**70.515.000,00**	**70.515.000,00**	**0,00**							**125.000.000,00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	125.000.000,00	70.515.000,00	70.515.000,00	-54.485.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusi	-		125.000.000,00	KECAMATAN MARUSU

															fitas Wilayah					
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	28.065.000,00	28.065.000,00	-21.935.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			50.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	42.450.000,00	42.450.000,00	-32.550.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			75.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
3,	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**6.860.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**140.000,00**							**7.000.000,00**	

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	6.860.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-4.160.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	-		7.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	6.860.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-4.160.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			7.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
4,	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**-**				**-**	**-**	**173.650.000,00**	**77.860.000,00**	**77.860.000,00**	**66.350.000,00**							**240.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	173.650.000,00	77.860.000,00	77.860.000,00	-95.790.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusi	-		240.000.000,00	KECAMATAN MARUSU

															fitas Wilayah				
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				600 Orang	600 Orang	52.650.000,00	25.700.000,00	25.700.000,00	-26.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Temmapaduae Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			60.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				300 Orang	300 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas			15.000.000,00	KECAMATAN MARUSU

																Wilayah				
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	111.000.000,00	52.160.000,00	52.160.000,00	-58.840.000,00	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			150.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			15.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
5,	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**				**-**	**-**	**5.000.000,00**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**5.000.000,00**								**10.000.000,00**	

	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-				-	-	5.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-2.900.000,00			-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah	-		10.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa																		
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-2.900.000,00	Kab. Maros, Marusu, Temmapaduae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Kondusifitas Wilayah			10.000.000,00	KECAMATAN MARUSU
	JUMLAH								**1.588.775.253.250,00**	**1.609.376.673.957,00**	**1.609.376.673.957,00**	**20.601.420.707,00**							**2.220.523.682.875,00**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat berjalan sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Marusu adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Marusu

Table 3.1

Dengan menitik beratkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Marusu mempunyai *tujuan* dan *sasaran*:

Tujuan	**sasaran**	**Indikator**
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan

Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	IKM PATEN
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	IKM Trantib Linmas
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat Pada Tingkat Pemerinthan Desa /Kelurahan	IKM Desa /Kelurahan
Meningkatkan Peran serta Masyarakat Kecamatan Dalam Aktifitas Keagamaan	Meningkatnya akses Masyarakat dalam kegiatan Keagamaam secara Aktif	IKM Layanan Keagamaan di Kecamatan
Meningkatkan Peran Serta Perempuan di Kecamatan Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Atif Perempuan Di Kecamatan Dalam Bidang Pembangunan Sosial dan ekonomi	Persentase Perempuan yang terlibat secara aktif Dalam kegiatan pembangunanBidang social dan ekonomi
Meningkatkan kualitas dan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan dasar Kecamatan	Meningkatnya Cakupan Pelayan Dasar Masyarakat Kecamatan sesuai SPM	Persentase masyarakat Kecamatan yang mendapatkan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

3.3. Telaahan terhadap Kebijakan Perubahan

1. Dasar
    1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
    2. Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 180/II/Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kab Maros Tahun 2024
    3. Peraturan Bupati Maros Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
    4. SE Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah TA. 2024 Nomor 917/151/BKAD
2. Pokok Permasalahan
    1. Terdapat Sub Kegiatan yang harus dilakukan Penyesuaian di karenakan mengalami Perubahan di dalam Sub Rincian Obyek Belanja yang berbeda.
    2. Sehubungan dengan adanya kegiatan pada kantor kami, yang dimana tidak terdapat anggaran pada kegiatan tersebut maka kami mengajukan penambahan sub kegiatan dan anggarannya, yang mana kegiatan tersebut ada pada daftar terlampir.

I. Analisis dan Alasan Perubahan

- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pada Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan,
- Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Pada Belanja Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Kendaraan Hias)

Di lakukan Perubahan Untuk dialihkan ke Sub Kegiatan Fasilitasi Jamuan Tamu Pada Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu dengan alasan semakin bertambahnya Kegiatan dan Ke sementara Anggaran Makan Minum Tamu terbatas.

- Pada Sub Kegiatan “Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan” dilakukan Penambahan anggaran dan sub kegiatan **dikarenakan sesuai dengan kebutuhan.**

TABEL 3.2
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAROS
TAHUN 2024

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Marusu

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	790.000	790.000	790.000	790.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	890.000	890.000	890.000	890.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	890.000	890.000	890.000	890.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	640.000	640.000	640.000	640.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	640.000	640.000	640.000	640.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD

7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.372.197.485	2.372.197.485	##########	##########	Kec. Marusu	Kec. Marusu		DAU
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.780.000	54.780.000	54.780.000	54.780.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		DAU
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**									
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.236.000	3.236.000	3.236.000	3.236.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6.622.000	9.162.000	6.622.000	9.162.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24.355.000	26.215.000	24.355.000	26.215.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.500.000	40.485.000	32.500.000	40.485.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.590.000	49.690.000	30.590.000	49.690.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104.200.000	87.200.000	104.200.000	87.200.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.175.000	-	5.175.000	-	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan/ kec. Sehat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	2.750.000	-	2.750.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	2.750.000	-	2.750.000	-	Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.700.000	6.690.000	2.700.000	6.690.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yangDilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	28.065.000	28.065.000	28.065.000	28.065.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	42.450.000	37.050.000	42.450.000	37.050.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban**						Kec. Marusu	Kec. Marusu		

	Umum									
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan PemeliharaanKeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.700.000	25.700.000	25.700.000	25.700.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Pengajian Rutin + Safari Ramadan/STQ)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona	52.160.000	42.160.000	52.160.000	42.160.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						Kec. Marusu	Kec. Marusu		
7.01.06.2.01	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa	2.100.000	4.200.000	2.100.000	4.200.000	Kec. Marusu	Kec. Marusu		PAD
			2.832.995.48	**2.832.995.48**						

			5	5						

BAB IV
PENUTUP

1. Saran dan Kesimpulan

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Marusu. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Marusu ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Maros secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap Ridha dan Petunjuk Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Maros Sejahtera, Religius dan Berdaya Saing. Amin.**

2024

RENCANA KERJA PERUBAHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Pemadam Kebakaran Maros Damkarmaros Satpolpp Kabupaten Maros Satpolpp Kabupaten Maros Satpolpp Kabupaten Maros

Copyright: wordexceltemplates.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmatdan Karunianya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi pamong Praja, Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Maros dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini merupakan serangkaian rencana kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangkapencapaian tujuan organisasi yaitu sebagai dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi pembangunan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros.

Perencanaan kerja (RENJA) Perubahan Satuan Polisi pamong Praja, Pemadam Kebakaran Penyelamatan merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu 1 (satu) tahun. Oleh karena itu perlu dukungan oleh seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Perencanaan Kerja (RENJA) Perubahan ini untuk Tahun Anggaran 2024. Dan disadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan materi didalamnya, sehingga usul dan saran yang bermanfaat untuk penyempurnaan sangat diperlukan.

Akhirnya atas Rahmat dan Berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa jualah kita semua berdo'a dan berupaya agar Renja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten MarosTahun 2024 dapat diimplementasikan dengan baik.

Maros, 31 Juli 2024

KEPALA SATUAN,

Drs. H. ELDRIN SALEH NUHUNG, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19720307 199402 1 002

DAFTAR ISI

			Halaman
HALAMAN PENGESAHAN			
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	PENDAHULUAN		
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	11
	1.4	Sistematika Penulisan	12
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN TAHUN SEBELUMNYA		
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Pokok Sebelumnya dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD	25
	2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	33
	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	40
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	78
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH		
	3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	80
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	82
	3.3	Program dan Kegiatan Tahun 2024	86
BAB V	PENUTUP		116

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros 15
1.2 Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan 27
1.3 Tabel 2.3 Analisis SWOT Pelaksanaan Renja Tahun 2022..... 33
1.4 Tabel 2.4 Permasalahan Pelayanan SKPD Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya..... 37
1.5 Tabel 2.5 Review terhadap rancangan akhir RKPD..... 41
1.6 Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros 79
1.7 Tabel 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,Propinsi Dan Pemerintah Daerah 82
1.8 Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah 85
1.9 Tabel 3.3 Rancangan Akhir Perubahan RKPD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 89

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2024 merupakan rencana tahunan penjabaran dan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Amanah Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan di daerah disusun oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang Perencanaan yaitu Perencanaan jangka panjang, Perencanaan jangka menengah maupun Perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) tertuang pada pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD,

Untuk itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan tahunan, penyusunannya senantiasa memperhatikan seluruh Aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 telah disusun sesuai mekanisme dan alur Penyusunan dokumen Perencanaan di atas. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen Rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Namun operasionalisasi RKPD harus disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana kerja ini merupakan bentuk opersionalisasi dan pedoman bagi pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Idealnya, diharapkan dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Maros Tahun 2024 ini, akan tercipta kinerja yang lebih baik sesuai dengan rencana yang telah disusun, sesuai dengan arahan, sehingga pada akhir pelaksanaan kegiatan diharapkan apa yang menjadi Tujuan dan Sasaran kegiatan dapat tercapai secara maksimal, dengan demikian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros akan dapat terwujud.

Akselerasi peningkatan kinerja dapat dicapai bila rencana yang disusun dilaksanakan dengan konsisten dan adanya koordinasi, dukungan dan kerjasama yang optimal dari seluruh unsur pelaksana rencana tersebut.

Wujud dari konsistensi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan akan terlihat pada Implementasi setiap item perencanaan yang direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selisih

antara harapan dan kenyataan tidak jarang akan dijumpai dalam pelaksanaannya.

Akhirnya dibutuhkan pula kemampuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta kemampuan mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan Global, Regional, Nasional maupun lokal pada berbagai bidang tetap harus menjadi referensi dalam realisasi Rencana Kerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayananan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keuputsan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifkasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);

40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
44. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
45. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
47. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 8);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 6);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 1);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 4);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5)

58. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2022 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 2);
59. Peraturan Bupati Maros Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 8).
60. Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 34).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024 dan menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros tahun 2024. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di kabupaten sehingga

terwujudnya sinergitas antar dokumen perencanaan dan juga merupakan :

a. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2024.
b. Merumuskan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan rencana kerja PD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja PD, dan program dan kegiatan PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang uraian tabel rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif PD.

BAB V. P E N U T U P

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros tahun yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros mampu melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan Realisasi pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana dan Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros tahun 2021-2026 maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 terkait dengan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

Secara umum, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaen Maros Sesuai Peraturan Daerah Kabupaen Maros Nomor 8 Tahun 2022 salah satu diantaranya adalah sebagaimana tercantum pada pasal 12 adalah melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah :

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
4. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut :

- ✓ Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan;
- ✓ Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Akibatnya, ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis;
- ✓ Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan;
- ✓ Adanya ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan

sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;

- ✓ Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Kabupaten Maros sebagai daerah penyangga ibu kota dan berada pada jalur lintas untuk beberapa Kabupaten/kota;
- ✓ Letak geografis Kabupaten maros, yakni beberapa desa yang sulit untuk dijangkau secara cepat sehingga dalam penanganan Bencana Khususnya Kebakaran dan Non Kebakaran mengalami kendala;
- ✓ Adanya intervensi masyarakat terhadap tugas dan fungsi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas pemerintahan dalam pengaturan, pembinaan, pelayanan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Trantibum Linmas. Strategi yang digunakan dengan meningkatkan kwalitas/kwantitas SDM melaui bimtek/diklat dan sarana (menambah peralatan /perlengkapan).
2. Melakukan Peningkatan sarana prasarana penunjang para pelaksanaan tugas dan fungsi Aparatur Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan di lapangan.
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
4. Peningkatan Pelayanan Secara Prima Serta Menciptakan Masyarakat Yang Tentram dan Tertib Dalam Aspek Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah Serta Perlindungan Mayarakat Dan Pelayanan Pencegahan, Pemadaman Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran.

Agar Startegi tersebut diatas dapat diimplementasikan maka ditetapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Membuat perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan yang sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan .
2. Menyediakan sarana pelayanan administrasi perkantoran.
3. Menyediakan peralatan dan sarana yang lengkap demi mendukung kegiatan di lapangan.
4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kantor.
5. Meningkatkan SDM dengan mengikuti berbagai Diklat Teknik dan Profesional serta memberikan kesempatan peningkatan Pendidikan Formal.
6. Melakukan updating data dan informasi melalui komputerisasi dan transparan terhadap informasi publik.
7. Meningkatkan sarana transportasi dalam menunjang aksebilitas Aparatur Satpol, Damkar dan Penyelamatan.

Untuk menetapkan perencanaan pembangunan tahun 2024, di perlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan PD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tantang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (Tahun 2022) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat di sajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)			unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12	14=13/5 x 100%			15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		**Nilai SAKIP**															**SATPOL PP**
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100**	**79.560.501.325**	**100**	**47.736.300.795**	**100**	**15.396.282.689**		**5.804.624.867**	**0**	**38**	**50**	**53.540.925.662**	**50**	**67**	**SATPOLPP**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**145**	**49.000.000**	**87**	**29.400.000**	**29**	**9.800.000**	**10,00**	**6.864.000**	**34**	**70**	**97**	**36.264.000**	**67**	**74**	**SATPOL PP**
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	9.640.000	6	5.784.000	2	1.928.000	0,00	1.750.000	0	91	6	7.534.000	60	78	SATPOL PP
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	6.585.000	3	3.951.000	1	1.317.000	1,00	1.286.000	100	98	4	5.237.000	80	80	SATPOL PP
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	6.585.000	3	3.951.000	1	1.317.000	0,00	0	0	0	3	3.951.000	60	60	SATPOL PP
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	6.585.000	3	3.951.000	1	1.317.000	1,00	1.286.000	100	98	4	5.237.000	80	80	SATPOL PP

	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	6.585.000	3	3.951.000	1	1.317.000	0,00	0	0	0	3	3.951.000	60	60	SATPOL PP
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	6.435.000	15	3.861.000	5	1.287.000	2,00	1.256.000	40	98	17	5.117.000	68	80	SATPOL PP
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90	6.585.000	54	3.951.000	18	1.317.000	6,00	1.286.000	33	98	60	5.237.000	67	80	SATPOL PP
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Administrasi keuaangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**15**	**47.339.828.445**	**9**	**28.403.897.067**	**3**	**9.467.965.689**	**3,00**	**3.487.007.867**	**100**	**37**	**12**	**31.890.904.934**	**80**	**67**	**SATPOLPP**
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12000	46.636.400.945	7200	27.981.840.567	2.400	9.327.280.189	684,00	3.426.657.867	28	37	7.884	31.408.498.434	66	67	SATPOL PP
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	663.850.000	36	398.310.000	12	132.770.000	5,00	60.350.000	42	45	41	458.660.000	68	69	SATPOL PP
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	90	39.577.500	54	23.746.500	18	7.915.500	6,00	0	33	0	60	23.746.500	67	60	SATPOL PP
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**6**	**950.965.000**	**6**	**570.579.000**	**6**	**190.193.000**	**5,00**	**56.088.000**	**83**	**29**	**6**	**626.667.000**	**92**	**66**	**SATPOLPP**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	17.275.000	6	10.365.000	2	3.455.000	0,00	0	0	0	6	10.365.000	60	60	SATPOL PP
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25	42.160.000	15	25.296.000	5	8.432.000	2,00	2.790.500	40	33	17	28.086.500	68	67	SATPOL PP

	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25	106.930.000	15	64.158.000	5	21.386.000	3,00	6.818.500	60	32	18	70.976.500	72	66	SATPOL PP
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25	49.650.000	15	29.790.000	5	9.930.000	3,00	3.173.000	60	32	18	32.963.000	72	66	SATPOL PP
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	75.000.000	36	45.000.000	12	15.000.000	5,00	4.500.000	42	30	41	49.500.000	68	66	SATPOL PP
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	659.950.000	36	395.970.000	12	131.990.000	5,00	38.806.000	42	29	41	434.776.000	68	66	SATPOL PP
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**28.437.370.000**	**2**	**17.062.422.000**	**2**	**5.687.474.000**	**2,00**	**2.254.665.000**	**100**	**40**	**2**	**19.317.087.000**	**100**	**68**	**SATPOLPP**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	21.120.000	36	12.672.000	12	4.224.000	5,00	0	42	0	41	12.672.000	68	60	SATPOL PP
	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	penyediaan jasa pelayanan umu kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	28.416.250.000	36	17.049.750.000	12	5.683.250.000	5,00	2.254.665.000	42	40	41	19.304.415.000	68	68	SATPOL PP
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**2**	**2.783.337.880**	**2**	**1.670.002.728**	**2**	**40.850.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1.670.002.728**	**50**	**60**	**SATPOLPP**
	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	120	54.250.000	72	32.550.000	24	10.850.000	0,00	0	0	0	72	32.550.000	60	60	SATPOL PP
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	150.000.000	12	90.000.000	4	30.000.000	0,00	0	0	0	12	90.000.000	60	60	SATPOL PP
	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Perundangan Daerah		**Persentase penyelesaian pelanggaran K3**															

			Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perbup															
	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	**Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**	**Persentase penyelesaian pelanggaran K3**	**100**	**859.695.960**	**100**	**515.817.576**	**100**	**171.939.192**	**100,00**	**23.540.000**	**100**	**14**	**100**	**539.357.576**	**100**	**63**	**SATPOL PP**
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah	**Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah**	**Jumlah kejadian ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**6**	**482.950.000**	**6**	**289.770.000**	**6**	**96.590.000**	**3,00**	**23.540.000**	**50**	**24**	**5**	**313.310.000**	**75**	**65**	**SATPOLPP**
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	70	112.950.000	42	67.770.000	14	22.590.000	3,00	5.600.000	21	25	45	73.370.000	64	65	SATPOL PP
	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2390	103.000.000	1434	61.800.000	478	20.600.000	0,00	0	0	0	1.434	61.800.000	60	60	SATPOL PP
	Penyusunan SOP ketertiban dan ketentraman masyarakat	Penyusunan SOP ketertiban dan ketentraman masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	5	25.000.000	3	15.000.000	1	5.000.000	0,00	0	0	0	3	15.000.000	60	60	SATPOL PP
	Pecegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Pecegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1800	107.000.000	1080	64.200.000	360	21.400.000	151,00	10.640.000	42	50	1.231	74.840.000	68	70	SATPOL PP

	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerumunan massa	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerumunan massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	500	109.500.000	300	65.700.000	100	21.900.000	41,00	7.300.000	41	33	341	73.000.000	68	67	SATPOL PP
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan peraturan daserah dan peraturan kepala daerah	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan peraturan daserah dan peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	150	25.500.000	90	15.300.000	30	5.100.000	0,00	0	0	0	90	15.300.000	60	60	SATPOL PP
	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peaturan bupati/walikota	**Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peaturan bupati/walikota**	**Jumlah PERDA dan PERBUP yang dilaksanakan penegakannya**	**86**	**350.835.960**	**86**	**210.501.576**	**86**	**70.167.192**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**43**	**210.501.576**	**50**	**60**	**SATPOLPP**
	Sosialisasi penegakan peraturan d aerah dan peraturan bupati/wali kota	Sosialisasi penegakan peraturan d aerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	70	205.225.000	42	123.135.000	14	41.045.000	0,00	0	0	0	42	123.135.000	60	60	SATPOL PP
	Pengawasan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Pengawasan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	70	40.075.000	42	24.045.000	14	8.015.000	0,00	0	0	0	42	24.045.000	60	60	SATPOL PP

	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	500	105.535.960	300	63.321.576	100	21.107.192	0,00	0	0	0	300	63.321.576	60	60	SATPOL PP
	Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota	**Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota**	**Jumlah PPNS yang menadapatkan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas**	**25**	**25.910.000**	**15**	**15.546.000**	**5**	**5.182.000**	**0,00**		**0**	**0**	**8**	**15.546.000**	**30**	**60**	**SATPOLPP**
	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	25	25.910.000	15	15.546.000	5	5.182.000	0,00		0	0	15	15.546.000	60	60	SATPOL PP
	Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Kebakaran/Non Kebakaran		**Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**															
			Cakupan pelayanan kebakaran/Non Kebakaran dalam wilayah manajemen Kebakaran															
	Pencengahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	**Pencengahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**	**Persentase Masyarakat Yang MemperoLeh Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai SPM Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100**	**675.762.900**	**98,83**	**387.955.900**	**100**	**96.934.000**	**100,00**		**100**	**0**	**99**	**387.955.900**	**99**	**57**	**SATPOL PP**
	Pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	**Pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota**	**Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)**	**4**	**514.984.900**	**4**	**343.540.900**	**4**	**57.148.000**	**4,00**		**100**	**0**	**4**	**343.540.900**	**100**	**67**	**SATPOL PP**

	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1825	114.776.200	30	72.956.200	365	13.940.000	151,00		41	0	181	72.956.200	10	64	SATPOL PP
	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	60	225.145.000	12	174.145.000	12	17.000.000	5,00		42	0	17	174.145.000	28	77	SATPOL PP
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	48	123.183.000	12	49.959.000	12	24.408.000	5,00		42	0	17	49.959.000	35	41	SATPOL PP
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	103	51.880.700	103	46.480.700	103	1.800.000	103,00		100	0	103	46.480.700	100	90	SATPOL PP
	Inspeksi peralatan proteksi kebakaran	**Inspeksi peralatan proteksi kebakaran**	**Jumlah jenis peralatan proteksi kebakaran yang memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku**	**3**	**92.900.000**	**1**	**9.100.000**	**1**	**10.060.000**	**1,00**		**100**	**0**	**1**	**9.100.000**	**33**	**10**	**SATPOLPP**

	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	60	50.300.000	12	9.100.000	12	10.060.000	5,00		42	0	17	9.100.000	28	18	SATPOL PP
	Invetigasi kejadian kebakaran	**Invetigasi kejadian kebakaran**	**Jumlah kasus kebakaran yang diinvestigasi**	**70**	**21.300.000**	**0**	**0**	**14**	**7.100.000**	**6,00**		**43**	**0**	**6**	**0**	**9**	**0**	**SATPOLPP**
	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penilaian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penilaian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	70	21.300.000	0	0	14	7.100.000	6,00		43	0	6	0	9	0	SATPOL PP
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	**Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran**	**Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam upaya pencegahan kebakaran**	**1500**	**67.878.000**	**456**	**35.315.000**	**500**	**22.626.000**	**250,00**		**50**	**0**	**706**	**35.315.000**	**47**	**52**	**SATPOLPP**
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1500	67.878.000	0	0	500	22.626.000	250,00		50	0	250	0	17	0	SATPOL PP

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Nilai Akuntabilitas Kinerja, Persentase penyelesaian pelanggaran K3 dan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Peraturan Bupati Maros Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Permasalahan umum yang di hadapi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan pengganggaran dari bidang-bidang masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKA, DPA) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang harus dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros khususnya berkaitan dengan SDM adalah belum meratanya kemampuan/ kompetensi personil, masih rendahnya komitmen, integritas, dedikasi dan daya dukung sebagian personel terhadap tujuan akhir organisasi, masih rendahnya penguasaan dan pemahaman terhadap regulasi pemerintah.
3. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi. Gedung kantor sebagai pusat pengendali pelaksanaan kegiatanpun sangat tidak representatif. Karena luasan gedung kantor tidak mampu menampung jumlah pegawai yang mencapai 663 orang. Kemudian sarana penunjang lainnya seperti kendaraan dinas operasional juga belum memenuhi kebutuhan Satuan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Satuan

Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai pelaksana bidang Trantibum Linmas, maka diharapkan dengan adanya prasarana dan sarana sebagaimana daftar diatas, sesungguhnya belum dapat dikategorikan memenuhi kebutuhan dinas. Peningkatan dalam penyediaan sarana dan pemeliharaan terhadap sarana yang sudah ada perlu diprogramkan secara rutin. Diharapkan hal tersebut bukanlah menjadi alasan dikarenakan kekurangan prasarana dan sarana dijadikan alasan/dasar dalam pencapaian kinerja.

4. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi dalam dan luar daerah.

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kineja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 sebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra PD.

Adapun Indikator Kinerja Daerah yang terdiri dari Indikator SPM sebanyak 2 Indikator, IKK RPJMD sebanyak 3 Indikator, IKU sebanyak 6 Indikator, IKK LPPD sebanyak 18 indikator dan TPB/SDGs sebanyak 1 Indikator pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel.2.2
Pencapaian Target Kinerja Pelayanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK RPJMD	IKU	IKK LPPD	TPB SDGs	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISISIS
								2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*				*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	-	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Standar Pelayanan Minimal
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	-	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	Standar Pelayanan Minimal
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	-	100	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK RPJMD
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah Manajemen kebakaran (WMK)	-	69,33	-	-	-	Persen	76,91	81,01	85,32	89,86	72,00	64,72	85,32	89,86	IKK RPJMD
5	Persentase Penegakan PERDA	-	100	-	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK RPJMD

6	Nilai Akuntabilitas Kinerja	-	-	BB	-	-	Nilai SAKIP	B	BB	BB	A	B	BB	BB	A	IKU
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	3,25	-	-	Nilai survey internal	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	IKU
8	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	-	-	100	-	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKU
9	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perbup	-	-		-	-		100	100	100	100	100	100	100	100	IKU
10	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	15	-	-	Menit	15	15	15	15	15	15.90	15	15	IKU
11	Cakupan pelayanan kebakaran/Non Kebakaran dalam wilayah manajemen Kebakaran	-	-	85.50	-	-	Persen	80.50	85.50	90.50	95.50	80.50	85.50	90.50	95.50	IKU
12	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-	-	-	100	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK LPPD (OUTCOME)
13	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	-	-	100	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK LPPD (OUTCOME)

14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	-	-	64,72	-	Persen	76,91	81,01	85,32	89,86	72,00	64,72	85,32	89,86	IKK LPPD (OUTCOME)
15	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-	-	-	15.90	-	Menit	15	15	15	15	15	15.90	15	15	IKK LPPD (OUTCOME)
16	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	-	-	-	86	-	Laporan	100	100	100	100	118	86	86	86	IKK LPPD (OUTPUT)
17	Jumlah Satlinmas yang terlatihdan dikukuhkan	-	-	-	1598	-	0rang	1598	1598	1598	1598	1598	1598	1598	1598	IKK LPPD (OUTPUT)
18	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	-	-	53	-	Perda dan Perkada	66	53	53	53	66	53	53	53	IKK LPPD (OUTPUT)
19	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	-	-	-	5	-	orang	5	5	5	5	5	5	5	5	IKK LPPD (OUTPUT)
20	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	-	-	-	Ada	-	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK LPPD (OUTPUT)

21	Tersedianya sarana prasarana minimal	-	-	-	Ada	-	Unit/Jenis	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK LPPD (OUTPUT)
22	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	-	-	-	100	-	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	IKK LPPD (OUTPUT)
23	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	-	-	-	Ada	-	Pos	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	IKK LPPD (OUTPUT)
24	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	-	-	-	60	-	Orang	61	60	60	60	61	60	60	60	IKK LPPD (OUTPUT)
25	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan	-	-	-	Tidak Ada	-	Desa/ Keluarahan (Tidak Ada)	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	103	IKK LPPD (OUTPUT)

	evakuasi di setiap keluarahan/desa														
26	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	-	-	-	10.46	-	Persen/ Jumlah/ Jenis	10.46	10.46	10.46	10.46	10.46	10.46	10.46	51.46	IKK LPPD (OUTPUT)
27	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	-	-	-	12,98	-	Persen	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98	50,98	IKK LPPD (OUTPUT)
28	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	-	-	-	181	-	Orang	181	181	181	181	181	181	181	181	IKK LPPD (OUTPUT)

29	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	-	-	-	27	-	orang	27	27	27	27	27	27	27	104	IKK LPPD (OUTPUT)
30	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	-	-	-	-	388,934	Orang	388,934	388,934	388,934	388,934	388,934	388,934	388,934	388,934	Indikator TPB/SDGs

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Untuk dapat lebih memfokuskan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dalam pencapaian Visi Misi secara Efektif dan Efisien perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam Organisasi serta Situasi dan Kondisi.

Upaya peningkatan ketertiban umum dalam Wilayah Kabupaten Maros diperlukan usaha-usaha Strategis yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berorientasi kepada terciptanya Rasa Aman dalam melakukan Aktifitas keseharian.

Melihat kondisi masyarakat yang semakin plural akibat letak Geografis Kabupaten Maros yang menjadi Penyangga Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi Poros Trans ke beberapa Kabupaten diwilayah utara Sulawesi Selatan sangat rentan dengan pengaruh perubahan kehidupan Kota.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros tahun 2021–2026, maka strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan dengan metode analisis lingkungan internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (Stengths/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang, dan Threats/Tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategis, indentifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tabel Analisis SWOT Pelaksanaan Renja Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros

Strengths/Kekuatan	Pengembangan kualitas internal Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.

	Dengan berkembangnya kualitas dan kompleksitas permasalahan Kabupaten maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros juga harus meningkatkan kualitas sumber dayanya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana
Weaknesses/Kelemahan	Kurangnya Komptensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana yang tersedia pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Opportunities/Peluang	Komitemen Pemerintah Daerah dan Legislatif dalam Mengawal Kebijakan, Perubahan Paradigma Masyarakat, Kolaborasi kerja antar lembaga
Threats/Ancaman	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Strengths/Kekuatan :

Pengembangan kualitas internal Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros. Dengan berkembangnya kualitas dan kompleksitas permasalahan Kabupaten maka Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros juga harus meningkatkan kualitas sumber dayanya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Rasio jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan dengan luas wilayah dan jumlah perda Perkada yang harus ditegakkan bisa diantisipasi melalui pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat (linmas) dan Relawan Kebakaran (Redkar) yang akan di bentuk di 103 desa/keluarahan se-Kabupaten Maros. Selain kuantitas, kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga harus ditingkatkan melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Weaknesses/Kelemahan :

a. Kurangnya data dan informasi serta koordinasi antar instansi terkait.
b. Masih kurangnya kualitas/SDM aparatur.
c. Seringnya terjadi perubahan peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga perlunya pemahaman yang up to date.
d. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.
e. Belum dapat memenuhinya ketersediaan dana yang ada dalam memenuhi semua tuntutan pembangunan ataupun pemeliharaan.
f. Kurangnya motivasi kerja dari aparatur.

Opportunities/Peluang :

a. Adanya komitmen pemerintah daerah (eksekutif) dan legislatif dalam mengawal kebijakan.
b. Perubahan paradigma masyarakat, dapat meningkatkan peran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan guna mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban.
c. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.
d. Kolaborasi kerja antar lembaga. Pembangunan Kabupaten yang tingkat kompleksitasnya tinggi membutuhkan kerja sama antar lembaga, baik antar lembaga di dalam pemerintah Kabupaten Maros maupun dengan Lembaga lain seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, untuk mendapatkan kinerja pelayanan publik yang baik. Dalam penegakkan peraturan daerah dan peraturan Bupati Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros juga membutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan jajaran samping sebagai perbantuan dalam proses penegakan

e. Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
f. Perkembangan Informasi dan Teknologi (IT).

Threats/Ancaman :

a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pencegahan Trantibum Linmas.
b. Belum optimalnya pelaksanaan komitmen dan konsistensi kebijakan.
c. Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
d. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur dan konsultansi berdasarkan faktor-faktor tersebut.

Pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros dapat diidentifikasi Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi yaitu;

2.3.1. Dalam Rangka Pengamanan Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu tim Pengamanan.

2.3.2 Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros sebagian besar masih SLTA/SMU atau Sederajat dan direkrut dari PNS dan PPPK yang Notabene secara teknis kurang memenuhi persyaratan sebagai Aparatur Penegak PERDA dan Pemadam Kebakaran & Penyelamatan.

2.3.3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana pendukung Kegiatan Operasional dilapangan,

2.3.4. Belum semua Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Pemadam Kebakaran & Penyelamatan memiliki Sertifikat standar kualifikasi,

2.3.5. Masih rendahnya peran serta secara aktif dan kesadaran masyarakat dalam hal Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

2.3.6. Kondisi Kabupaten Maros yang secara Geografis terdiri dari Wilayah pegunungan dan pesisir serta 14 kecamatan yang menyebabkan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengalami kesulitan untuk menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten Maros secara Maksimal dan Efektif,

2.3.7. Keterbatasan dana Operasional untuk Kegiatan pengendalian Keamanan, Ketertiban, Linmas, kenyamanan lingkungan dan Penanggulangan Kebakaran/Non Kebakaran diseluruh Wilayah Kabupaten Maros.

Dari hal-hal yang disebutkan di atas perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah maupun Masyarakat untuk aktif secara bersama-sama mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan serta penanggulangan kebakaran/non Kebakaran.

Tabel.2.4
Permasalahan Pelayanan SKPD Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros

NO	PERMASALAHAN	HAMBATAN	DAMPAK	PELUANG
1.	Masih Rendahnya Kapasitas Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan SatLinmas yang diakibatkan Oleh Rendahnya Kompetensi Aparatur yang belum sepenuhnya Profesional Khususnya dalam Penyelengggaraan Tugas- Tugas tekhnis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Pengatahuan dan Keterampilan Personil Masih Kurang, - Penempatan Personil yang Belum sesuai dengan Kebutuhan - Motivasi Kerja dan Penguasaan Bidang Tugas yang masih Rendah - Sarana dan Prasarana serta FasilitasKerja masih Terbatas, - Masih Kurangnya Perhatian Terhadap Pelaksanaan Diklat Keterampilan	Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah tidak Tercapai	- Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros - Dokumen Program/Kegiatan dari Instansi terkait Guna Terlaksananya Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

		bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakarandan Penyelamatan		
2.	a. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran; b. Banyaknya jumlah tenaga honor satpol PP dan Damkar, sehingga anggaran yang ada di peruntukan untuk memenuhi jasa tenaga honor c. Kondisi sarana prasarana masih perlu di tambah utamanya mobil operasional Satdalmas, Patroli dan Armada Pemadam Kebakaran masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum memiliki Armada dan Penempatan personil Sektor di Kecamatan (Tompobulu, Mallawa, Cenrana, Simbang, Lau, Maros Baru dan Mandai).	a. Jalur Koordinasi yang Kurang berjalan dengan baik Antara Skateholder Terkait b. Masih banyaknya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang Belum Memehami dan Menguasai Teknis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sehingga Menimbulkan Image yang kurang baik ditengah Masyarakat akan Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros c. Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang dalam Pelaksanaan Tugas	a. Kebutuhan Pada Perangkat Daerah Tidak Terpenuhi sehingga Pemenuhan Target tidak Maksimal b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) tidak tercapai. c. Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) tidak tercapai.	a. Perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana kebakaran dan penambahan beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran; b. Mengajukan untuk melakukan pengangkatan khusus kepada tenaga honor Satpol PP dan Damkar serta melakukan seleksi kembali untuk mengurangi jumlah tenaga honor yang tidak melaksankan tugas sebagaimana mestinya; c. Penambahan jumlah sarana prasaran berupa armada pengangkut petugas
3.	a. Kurangnya Anggaran dalam mendukung program dan kegiatan b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;	Perencanaan Dan Penganggaran Tidak maksimal	Kebutuhan Sarana Prasarana Tidak Terpenuhi	Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional;
4.	a. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait; b. Masih banyaknya Aparatur	Pada Pelaksanaan yang Kurang Maksimal	Standart Operasional Prosedur Tidak Berjalan dengan	a. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak

	yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah 16 tahun 2018 tentang Satpol PP dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Di Daerah		Baik	guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; b. Mengirim Aparatur untuk mengikuti Diklat pengembangan SDA Aparatur Satpol PP dan Damkar
5.	a. Tidak adanya Hydran sumber air untuk pemadamam kebakaran; b. Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran; c. Kurangnya wilayah manajemen kebakaran yang mengkibatkan sulitnya pengendalian kebakaran di lokasi luar WMK; d. Biaya pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran masih terpusat di bagian keuangan daerah sehinggah dalam pengurusan perbaikan menjadi terhambat e. Beberapa Isu yang ada yang rentang terhadap terjadinya Gejolak di tengah Masyarakat Mis; Isu mengenai Ketenagakerjaan, Isu Mengenai Pilkada/Pemilu Legeslatif, Kenaikan BBM, Isu Sosial. Budaya/Sosial/Agama/Terorisme dll	Masih rendahnya tingkat Antisipasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabuparen Maros dalam Mengantisipasi terjadinya Gejolak-Gejolak Sosial ditengah Masyarakat	Pelayanan Tidak Maksimal dan Tidak Tercapai	a. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menambah pos pemadam kebakaran; b. Perbaikan jalan yang tidak bisa di jangkau oleh mobil pemadam kebakaran; c. Perlu adanya pembuatan sumur penampungan air di beberapa titik yang tersebar di WMK sebagai sumber air bagi pemadam kebakaran; d. Sebaiknya biaya pemeliharaan peralatan pemadan kebakan di kelola langsung oleh instansi bersangkutan sehingga proses perbaikan menjadi cepat dan dapat di gunakan apabila terjadi kebakaran e. Terdapat beberapa kearipan local yang dapat berdampakkepada pencegahan terhadap terjadinya gejolak Sosial Mis; "SIRI NAPACCE SIPAKAINGE SIPAKARAJA dll

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros menyoroti beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh karena disebabkan beberapa hal. Oleh karenanya program kerja setiap memasuki tahun anggaran sudah harus memiliki jadwal kerja yang tersusun secara sistematik dengan koordinasi internal yang terpadu untuk mensinkronisasikan dengan OPD terkait lainnya sehingga capaian tujuan akhir dari setiap pelaksanaan program dapat terwujud secara sistematik, terarah dan tepat waktu.

Masih kurangnya regulasi berupa Peraturan Kepala Daerah yang Menjabarkan Peraturan Perencanaan di daerah, hal ini disadari merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam merumuskan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan adanya perbedaan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir RKPD tetap menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan yang dimulai dari RPJMD sampai dengan RKPD hingga Renja SKPD.

Reviuw terhadap rancangan Akhir RKPD tahun 2024 terhadap hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini;

Tabel 2.5
Review terhadap rancangan akhir RKPD
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				15.664.955.881	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				27.126.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.664.955.881	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				27.126.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				15.664.955.881	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				27.126.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.	100 Persen	15.396.082.689	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.	100 Persen	19.958.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	9.800.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	84.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen'	1.928.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen'	12.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen'	1.317.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen'	12.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen'	1.317.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen'	12.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen'	1.317.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen'	12.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen'	1.317.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen'	12.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1.287.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	12.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	1.317.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Sub Kegiatan	9.467.965.689	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Sub Kegiatan	10.228.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	9.327.280.189	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	10.000.000.000

	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen'		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen'	13.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	132.770.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	13.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	13.000.000
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen'		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen'	13.000.000

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	7.915.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	13.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen'		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen'	13.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	91.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	13.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	13.000.000

	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	13.000.000
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	13.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	13.000.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	13.000.000
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	13.000.000

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 Sub Kegiatan	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 Sub Kegiatan	786.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawa	12 Unit		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawa	12 Unit	50.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket	500.000.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12.000.000
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja P	12 Dokumen		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja P	12 Dokumen	12.000.000

	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Laporan		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Laporan	50.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	50.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	50.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	50.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Sub Kegiatan	190.193.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Sub Kegiatan	583.000.000

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.455.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	8.432.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	60.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	21.386.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	9.930.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	50.000.000

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	66 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	66 Dokumen	60.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	60.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	30.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	131.990.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	13.000.000

	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	9 Sub Kegiatan	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	9 Sub Kegiatan	1.800.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediak	12 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediak	12 Unit	800.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	800.000.000
	Pengadaan Mebel	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disedia	0 Unit		Pengadaan Mebel	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disedia	0 Unit	100.000.000

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	100.000.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	24 Unit		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	24 Unit	-
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	24 Unit		Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	24 Unit	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	-

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan	5.687.474.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan	6.036.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.224.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak	12 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.683.250.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	6.000.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaeraH	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaeraH	9 Sub Kegiatan	40.650.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaeraH	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaeraH	9 Sub Kegiatan	350.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	30.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	24 Unit	10.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	24 Unit	150.000.000

	Pemeliharaan Mebel	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit		Pemeliharaan Mebel	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	10.000.000
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	-
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	50.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JUMLAH PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3 Kegiatan	171.939.192	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JUMLAH PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3 Kegiatan	4.188.000.000
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Sub Kegiatan	96.590.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Sub Kegiatan	2.740.000.000

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	14 Dokumen	22.590.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	14 Dokumen	100.000.000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Dokumen		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Dokumen	1.500.000.000

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	478 Orang	20.600.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	478 Orang	100.000.000
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	50 Dokumen		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	50 Dokumen	100.000.000
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	5.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	10.000.000

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	25 Orang		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	25 Orang	100.000.000
	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	10 Dokumen		Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	10 Dokumen	30.000.000

	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	25 Orang		Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	25 Orang	100.000.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	500 Orang		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	500 Orang	100.000.000

	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	360 laporan	21.400.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	360 laporan	100.000.000
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100 laporan	21.900.000	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100 laporan	100.000.000

	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	30 Laporan	5.100.000	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	30 Laporan	100.000.000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedi	50 Unit		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedi	50 Unit	300.000.000
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	9 Sub Kegiatan	70.167.192	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	9 Sub Kegiatan	1.160.000.000

	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	150.000.000
	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Dokumen		Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Dokumen	10.000.000
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 Unit		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 Unit	300.000.000
	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	100.000.000

	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12 Laporan		Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12 Laporan	100.000.000
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	20 Dokumen		Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	20 Dokumen	50.000.000
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14 Laporan	41.045.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14 Laporan	150.000.000
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SO	100 Laporan	21.107.192	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SO	100 Laporan	150.000.000

	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14 Laporan	8.015.000	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14 Laporan	150.000.000
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	5 Sub Kegiatan	5.182.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	5 Sub Kegiatan	288.000.000
	Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen		Pembentukan Sekretariat PPNS	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	10.000.000
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	12 Dokumen		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	12 Dokumen	100.000.000

	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	20 Laporan		Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	20 Laporan	150.000.000
	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	5 Laporan		Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	5 Laporan	13.000.000
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	5 Laporan	5.182.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	5 Laporan	15.000.000
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JUMLAH PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	5 Kegiatan	96.934.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JUMLAH PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	5 Kegiatan	2.980.000.000

	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16 Sub Kegiatan	57.148.000	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16 Sub Kegiatan	1.940.000.000
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	70.000.000
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	365 Laporan	13.940.000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	365 Laporan	200.000.000

	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	17.000.000	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	150.000.000
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	200.000.000

	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 Dokumen	24.408.000	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 Dokumen	50.000.000
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	200 Orang		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	200 Orang	150.000.000

	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	103 Desa/Kelurahan	1.800.000	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	103 Desa/Kelurahan	10.000.000
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP	1 Dokumen		Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP	1 Dokumen	70.000.000

	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	19 laporan		Peningkatkan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	19 laporan	100.000.000
	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen		Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	70.000.000
	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	12 Dokumen		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	12 Dokumen	50.000.000
	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen		Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	70.000.000
	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	12 Dokumen		Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	12 Dokumen	50.000.000

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkai	25 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkai	25 Unit	500.000.000
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	100.000.000
	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	300 Keluarga		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	300 Keluarga	100.000.000

	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	2 Sub Kegiatan	10.060.000	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	2 Sub Kegiatan	100.000.000
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	50.000.000
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	10.060.000	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	50.000.000
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran	1 Sub Kegiatan	7.100.000	Investigasi Kejadian Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran	1 Sub Kegiatan	50.000.000

	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	14 Dokumen	7.100.000	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	14 Dokumen	50.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	3 Sub Kegiatan	22.626.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	3 Sub Kegiatan	390.000.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	22.626.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	50.000.000

	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	103 Desa/Kelurahan		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	103 Desa/Kelurahan	140.000.000
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	103 Desa/Kelurahan		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	103 Desa/Kelurahan	200.000.000
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	4 Sub Kegiatan	-	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	4 Sub Kegiatan	500.000.000

	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	365 Laporan		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	365 Laporan	50.000.000
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standa	12 Dokumen		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standa	12 Dokumen	50.000.000

	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	12 Laporan		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	12 Laporan	100.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	35 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	35 Unit	300.000.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maros telah menampung usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	CATATAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
[BIDANG URUSAN] 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap arah kebijakan nasional merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembanguan dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

"INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR"

Penjabaran dari Visi adalah Mandiri berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.Majuberarti Sumber Daya Manusia Indonesia telah mencapai kualitas yang tinggi dengan tingkat kemakmuran yang juga tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap. Adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Makmur berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dapat dijabarkan dengan menelaah sasaran utama RPJMN 2020-2024. Sementara sasaran utama pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada visi misi pemerintah, strategi pembangunan nasional serta agenda prioritas pembangunan nasional.

Visi Pemerintah untuk tahun 2020-2024 adalah ***"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong".*** Visi ini kemudian diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sedangkan prinsip dasar pembangunan nasional meliputi:

1. Membangun Kemandirian.

   Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

2. Menjamin Keadilan.

   Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

3. Menjaga Keberlanjutan.

   Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti

Agenda prioritas Pembangunan Nasional dikenal dengan Nawa Cita Kedua, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tabel 3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,Propinsi Dan Pemerintah Daerah

KEBIJAKAN NASIONAL	KEBIJAKAN PROPINSI	KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 1. Terwujudnya Stabilitas Keamanan Nasional. 2. Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3. Terwujudnya pelayanan publik yang berorientasi pada perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan public.	1. Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat. 2. Terpeliharanya kualitas hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan Mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja 2. Pemenuhan standar Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 3. Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 4. Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan, kawasan permukiman, lahan, dan hutan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

A. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi serta serta sebagai jawaban atas Isu-Isu Strategis daerah dan Permasalahan Pembangunan daerah yang sedang dihadapi. Adapun

Tujuan yang ingin dicapai Oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros berdasarkan Visi-Misi RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelayanan dasar bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan darisetiap tujuan yang diimplementasikan kedalam suatu bentuk Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Selanjutnya arah kebijakan yang diambil dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yaitu :

Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Maros

1. Peningkatan Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan layanan administrasi pemerintahan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten

Maros

2. Pelaksanaan rapat – rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
3. Penyusunan rencana program dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dokumentasi program serta anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros
5. Penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.
6. Pembinaan pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.
7. Pembinaan dan pengelolaan urusan perbendaharaan, urusan akuntansi, urusan penatausahaan BMD lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros.
8. Penyusunan pelaporan keuangan dan BMD lingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros
9. Pengelolaan administrasi pimpinan, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana perkantoran, arsip, persuratan, keamanan dalam, serta layanan pengadaan barang dan jasa.

Sasaran 2. Meningkatnya Kualitas Penegakan Penegakan Peraturan Perundangan Daerah

1. standar operasional prosedur Satpol PP
2. standar sarana prasarana Satpol PP;
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Sasaran 3 . Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Kebakaran/Non Kebakaran

1. Peningkatan Kapasitas Kompetensi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
2. Peningkatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran/Non kebakaran.
3. Penanganan Kasus Kebakaran di WMK yang Tertangani Dalam Waktu Maksimal 15 Menit/(dibagi) dengan Jumlah Kasus Kebakaran di Wilayah Kabupaten Maros.
4. Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan dan kawasan permukiman.
5. Peningkatan Pelayanan Evakuasi dan Penyelamatan Kebakaran/Non Kebakaran.
6. Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
7. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
8. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN
1	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penyelamatan	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	BB
			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai survey internal	3,25
2	Meningkatkan Penerapan Jenis dan Mutu Pelayanan dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlidungan Masyarakat sesuai standar	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Perundangan Daerah	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	Persen	100
			Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perbup	Persen	100

4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencegahan, Penanganan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran/Non Kebakaran	Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Wilayah Terhadap Resiko Kebakaran/Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15
			Cakupan pelayanan kebakaran/Non Kebakaran dalam wilayah manajemen Kebakaran	Persen	90.50.00

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang terdiri dari Indikator SPM sebanyak 2 Indikator, IKK RPJMD sebanyak 3 Indikator, IKU sebanyak 6 Indikator, IKK LPPD sebanyak 18 indikator dan TPB/SDGs sebanyak 1 Indikator. Dalam Hal Ini terdapat beberapa Pokok Permasalahan yakni terdapat beberapa Sub Kegiatan yang dilakukan penyusuaian Perubahan Anggaran dikarenakan :

1. Kurangnya Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk melaksanakan Patroli, Pengamanan Unjuk Rasa di wilayah Kabupaten Maros,
2. Kurangnya Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk melaksanakan Operasi Yustisi di wilayah Kabupaten Maros,
3. Kurangnya Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk melakukan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran,

4. Kurangnya Anggaran Belanja Pemeliharan Kendaraan Operasional Lapangan dan
5. Kurangnya Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk melaksanakan untuk melakukan Kegaiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Analisis dan Alasan Perubahan

1. Pada sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan. Perlu dilakukan Penambahan Anggaran pada belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa **dikarenakan** Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tidak Cukup untuk melakukan Kegaiatan Patroli dalam rangka menjaga Ketenteraman, Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di malam hari
2. Pada sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Perlu dilakukan Penambahan Anggaran pada belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa **dikarenakan** Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tidak Cukup untuk melakukan Kegaiatan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa pada saat terjadi Demonstrasi
3. Pada sub kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran. Perlu dilakukan Penambahan Anggaran pada belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa **dikarenakan** Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tidak Cukup untuk melakukan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran di seluruh wilaya di Kab. Maros
4. Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Perlu dilakukan Penambahan Anggaran pada belanja Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan DARAT Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang **dikarenakan** Anggaran Belanja Service Kerndaraan Operasional Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tidak Cukup untuk melakukan Pemeliharaan di maksud
5. Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Perlu dilakukan Penambahan Anggaran pada belanja Belanja Perjalanan Dinas Biasa **dikarenakan** Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tidak Cukup untuk melakukan Kegaiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran visi dan misi Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan perubahan anggaran yang tertuang dalam perubahan renja tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 3.3
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Urusan/Bidang Urusan daerah program/kegiatan/subkegiatan	Indikator Porgram/kegiatan/subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka PendanaanTahun 2024						Kelompok Sasaran	Sumber Dana
			Volume		Pagu Indikatif		Lokasi			
			Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		
1	2	3	4	5						7
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN					15.664.955.881	27.126.000.000				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8 Kegiatan	8 Kegiatan	15.396.082.689	19.958.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Kegiatan	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	9.800.000	84.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Sub Kegiatan	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen'	2 Dokumen'	1.928.000	12.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	2 Dokumen'	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen'	2 Dokumen'	1.317.000	12.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	2 Dokumen'	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen'	2 Dokumen'	1.317.000	12.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	2 Dokumen'	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen'	2 Dokumen'	1.317.000	12.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	2 Dokumen'	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen'	2 Dokumen'	1.317.000	12.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	2 Dokumen'	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.287.000	12.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	4 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	1.317.000	12.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan	9.467.965.689	10.228.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Sub Kegiatan	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan	200 Orang/bulan	9.327.280.189	10.000.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	200 Orang/bulan	Dana Alokasi Umum (DAU)
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen'	12 Dokumen'		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Dokumen'	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	132.770.000	150.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		13.000.000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen'	3 Dokumen'		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	3 Dokumen'	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	7.915.500	13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	18 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen'	2 Dokumen'		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	2 Dokumen'	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	-	91.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Sub Kegiatan	APBD

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	1 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2 Laporan		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	2 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	2 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	2 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	-	786.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Sub Kegiatan	APBD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawa	12 Unit	12 Unit		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	600 Paket	600 Paket		500.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	600 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen		12.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen		12.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja P	12 Dokumen	12 Dokumen		12.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	5 Laporan	5 Laporan		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	5 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	30 Orang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120 Orang		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	120 Orang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	120 Orang		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	120 Orang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	11 Sub Kegiatan	11 Sub Kegiatan	190.193.000	583.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Sub Kegiatan	APBD

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	3.455.000	10.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	2 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	8.432.000	50.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	5 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket		60.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	3 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	21.386.000	50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	5 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	9.930.000	50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	5 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	66 Dokumen	66 Dokumen		60.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	66 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	10 Paket		60.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	10 Paket	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	30.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	131.990.000	150.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	100 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	9 Sub Kegiatan	9 Sub Kegiatan	-	1.800.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Sub Kegiatan	APBD

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediak	12 Unit	12 Unit		800.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	5 Unit		800.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	5 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disedia	0 Unit	30 Unit		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	0 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30 Unit		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	30 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	24 Unit	24 Unit		-	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	24 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	24 Unit	24 Unit		-	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	24 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit		-	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	3 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	umlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24 Unit	24 Unit		-	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	24 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit		-	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	22 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	5.687.474.000	6.036.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Sub Kegiatan	APBD
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	4.224.000	12.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediak	12 Laporan	12 Laporan		12.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		12.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	5.683.250.000	6.000.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaeraH	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaeraH	9 Sub Kegiatan	9 Sub Kegiatan	40.650.000	350.000.000	Kab. Maros, Turikale, Turikale	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Sub Kegiatan	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit		30.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	6 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	24 Unit	24 Unit	10.650.000	150.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	24 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit		10.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	25 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit		10.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	25 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit		-	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	5 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit		-	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	5 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit		50.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	2 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	30.000.000	50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	4 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	20 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	JUMLAH PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	171.939.192	4.188.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kegiatan	APBD
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	13 Sub Kegiatan	13 Sub Kegiatan	96.590.000	2.740.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Sub Kegiatan	APBD
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	14 Dokumen	14 Dokumen	22.590.000	100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Dokumen	14 Dokumen		1.500.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	478 Orang	478 Orang	20.600.000	100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	478 Orang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	50 Dokumen	50 Dokumen		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	10.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	1 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	25 Orang	25 Orang		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	25 Orang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen		30.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	10 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	25 Orang	25 Orang		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	25 Orang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	500 Orang	500 Orang		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	500 Orang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	360 laporan	360 laporan	21.400.000	100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	360 laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100 laporan	100 laporan	21.900.000	100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	30 Laporan	30 Laporan	5.100.000	100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedi	50 Unit	50 Unit		300.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	50 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	9 Sub Kegiatan	9 Sub Kegiatan	70.167.192	1.160.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Sub Kegiatan	APBD
	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan		150.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen		10.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	5 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 Unit	1 Unit		300.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	1 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	12 Laporan	12 Laporan		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	20 Dokumen	20 Dokumen		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	20 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14 Laporan	14 Laporan	41.045.000	150.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	14 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SO	100 Laporan	100 Laporan	21.107.192	150.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	100 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14 Laporan	14 Laporan	8.015.000	150.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	5 Sub Kegiatan	5 Sub Kegiatan	5.182.000	288.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Sub Kegiatan	APBD
	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen	1 Dokumen		10.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	1 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	20 Laporan	20 Laporan		150.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	20 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	5 Laporan	5 Laporan		13.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	5 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	5 Laporan	5 Laporan	5.182.000	15.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	5 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	JUMLAH PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	5 Kegiatan	5 Kegiatan	96.934.000	2.980.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kegiatan	APBD
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16 Sub Kegiatan	16 Sub Kegiatan	57.148.000	1.940.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Sub Kegiatan	APBD

	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12 Dokumen	12 Dokumen		70.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	365 Laporan	365 Laporan	13.940.000	200.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	17.000.000	150.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen		200.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12 Dokumen	12 Dokumen	24.408.000	50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	200 Orang	200 Orang		150.000.000	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	200 Orang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	103 Desa/Kelurahan	103 Desa/Kelurahan	1.800.000	10.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 Desa/Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP	1 Dokumen	1 Dokumen		70.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	1 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	19 laporan	19 laporan		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	19 laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1 Dokumen	1 Dokumen		70.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	1 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	1 Dokumen		70.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	1 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkai	25 Unit	25 Unit		500.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	25 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	4 Dokumen		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	300 Keluarga	300 Keluarga		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Keluarga	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	10.060.000	100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Sub Kegiatan	APBD

	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	10.060.000	50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan	7.100.000	50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Sub Kegiatan	APBD
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	14 Dokumen	14 Dokumen	7.100.000	50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	22.626.000	390.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Sub Kegiatan	APBD

	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	500 Orang	22.626.000	50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Orang	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	103 Desa/Kelurahan	103 Desa/Kelurahan		140.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	103 Desa/Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	103 Desa/Kelurahan	103 Desa/Kelurahan		200.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	103 Desa/Kelurahan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	-	500.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Sub Kegiatan	APBD
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	365 Laporan	365 Laporan		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standa	12 Dokumen	12 Dokumen		50.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	12 Laporan	12 Laporan		100.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	12 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	35 Unit	35 Unit		300.000.000	Kab. Maros, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kab. Maros	35 Unit	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Rencana kerja (Renja) Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Program Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan

anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros di urusan wajib pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

RENJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DPRD 2024



Sekretariat DPRD Kab. Maros

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 15 Telp. (0411)

371082 Fax. (0411) 372210

Email : setwan@maroskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan Kepada Allah Subhanahu Wataala karena dialah yang pantas untuk di puji dan atas kehendaknya, sehingga Laporan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Sekretariat DPRD Kabupaten Maros telah mengajukan dan ditetapkan dasar penyelenggaraan pelayanan publik dengan peraturan Bupati, yang menjadi acuan bagi SKPD ini dalam memacu peningkatan pelayanan publik yang prima.

Rencana kerja OPD merupakan Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 1(satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah,Sebagai Dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Sekertariat DPRD Maros mempunyai arti sangat penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

Demikian Laporan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2024. Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun, bahkan semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan data, analisis data, penulisan dan penerbitan laporan ini.

Maros, 31 Juli 2024

Sekretaris DPRD Kab.Maros



N A J I B, SH
Pangkat : Pembina Utama Muda,IVc
NIP. 196512311994011005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ***i***

DAFTAR ..... ***ii***

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAROS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Maros..... 22

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Maros 26

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional..... 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros..... 37

3.3. Program dan Kegiatan 38

BAB V. PENUTUP

4.1. Saran dan Kesimpulan 64

4.2. Kaidah Pelaksanaan Renja 65

4.3. Rencana Tindak Lanjut 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Jangka Menengah 5 Tahun (RPJPD), Jangka Menengah 5 Tahun (RPJMD), serta Jangka Pendek 1 Tahun (RKPD), lebih lanjut setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Jangka 5 Tahun (Renstra-PD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan memuat Visi, Misi, Tujuan, Stategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai Penjabaran dari Renstra-PD tersebut, maka Perangkat Daerah (PD) harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disebut dengan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) untuk memuat Periode 1 (satu) tahun.

Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1(satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, Sebagai Dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Sekertariat DPRD Kabupaten Maros mempunyai arti sangat penting dan strategis dalam

mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2024 berdasarkan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu :

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uandang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan penyelenggaraan

pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenkelatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provensi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Permbangunan Jangka Panjang Daerah,rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita Negara Nomor 1447 Tahun 2019;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Nomor 1781 Tahun 2020;
16) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
18) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten maros Tahun 2003 Nomor 27);
19) Peraturan Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
20) Peraturan Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2023 Nomor 23);

21) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok_pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten maros Tahun 2007 Nomor 01);
22) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 02);
23) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2021 Nomor 5);
24) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 3);
25) Peraturan Bupati Maros Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
26) Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 34); dan
27) Peraturan Bupati Maros Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2023 Nomor 36);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Perubahan Renja

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun dengan

berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2024 dan Renstra PD tahun 2021-2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan masalah yang dihadapi.

b. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang;
b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.
c. Sebagai pelaksana pedoman atau acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan;
d. Agar rencana strategi dapat terukur dengan memperhatikan skala prioritas;
e. Sebagai bahan dari pertanggungjawaban pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja Sekertariat DPRD Kabupaten Maros.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun Lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

5.1 Saran dan Kesimpulan

5.2 Kaidah Pelaksanaan Renja

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAROS TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Maros

Berdasarkan Rencana Strategis Sekertariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026 Sekertariat DPRD Kabupaten Maros Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2021 Hingga 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
c. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.
d. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel Tabel. 2.1 sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Sampai Dengan Tahun 2023

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outsame) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat DAerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) Yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggara Renstra Perangkta Daerah s/d tahun 2024(%)		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x 100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Nilai SAKIP										35		94.979.952.877		39	SEK DPRD
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.	100	245.792.384.145	100	84.573.355.797	100,00	29.882.106.223	77,78	10.406.597.080	78	35	89	94.979.952.877	89	39	SEK DPRD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	55	165.512.500	33	99.307.500	11,00	33.102.500	4	10.000.000	36	30	37	109.307.500	67	66	SEK DPRD

	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkatd aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	30.512.500	6	18.307.500	2,00	6.102.500	1	3.000.000	50	49	7	21.307.500	70	70	SEK DPRD
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	25.000.000	3	15.000.000	1,00	5.000.000	0	0	0	0	3	15.000.000	60	60	SEK DPRD
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	20.000.000	3	12.000.000	1,00	4.000.000	0	0	0	0	3	12.000.000	60	60	SEK DPRD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	20.000.000	3	12.000.000	1,00	4.000.000	1	2.000.000	100	50	4	14.000.000	80	70	SEK DPRD
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	5	20.000.000	3	12.000.000	1,00	4.000.000	0	0	0	0	3	12.000.000	60	60	SEK DPRD

			Perubahan DPA-SKPD															
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	30.000.000	3	18.000.000	1,00	6.000.000	1	3.000.000	100	50	4	21.000.000	80	70	SEK DPRD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	20.000.000	12	12.000.000	4,00	4.000.000	1	2.000.000	25	50	13	14.000.000	65	70	SEK DPRD
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Administrasi keuaangan perangkat daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**225**	**24.712.068.770**	**33**	**14.827.241.262**	**45,00**	**4.942.413.754**	**15,00**	**1.940.651.310**	**33**	**39**	**48**	**16.767.892.572**	**21**	**68**	**SEK DPRD**
	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.550	23.786.118.770	2.730	14.271.671.262	910,00	4.757.223.754	325	1.870.901.310	36	39	3.055	16.142.572.572	67	68	SEK DPRD

	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	785.950.000	36	471.570.000	12,00	157.190.000	5	64.750.000	42	41	41	536.320.000	68	68	SEK DPRD
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	40.000.000	3	24.000.000	1,00	8.000.000	0	0	0	0	3	24.000.000	60	60	SEK DPRD
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90	100.000.000	54	60.000.000	18,00	20.000.000	5	5.000.000	28	25	59	65.000.000	66	65	SEK DPRD
	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	**Administrasi kepegawaian perangkat dasrah**	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**325**	**3.905.000.000**	**195**	**2.343.000.000**	**65,00**	**781.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195**	**2.343.000.000**	**60**	**60**	**SEK DPRD**

	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	3.905.000.000	3	2.343.000.0 00	1,00	781.000.000	0	0	0	0	3	2.343.000.000	60	60	SEK DPRD
	Administrasi umum perangkat daerah	**Administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**8**	**10.663.763.125**	**8**	**6.398.257.8 75**	**8,00**	**2.132.752.625**	**5**	**329.288.530**	**63**	**15**	**7**	**6.727.546.405**	**81**	**63**	**SEK DPRD**
	Penyediaan komponen instalasi komponen listrik/peneranga n bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi komponen listrik/penerang an bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	97.683.125	3	58.609.875	1,00	19.536.625		0	#DI V/0!	0	3	58.609.875	60	60	SEK DPRD
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	111.025.000	3	66.615.000	1,00	22.205.000		0	#DI V/0!	0	3	66.615.000	60	60	SEK DPRD
	Penyediaan bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	2.641.550.000	12	1.584.930.0 00	4,00	528.310.000	2	125.987.500	50	24	14	1.710.917.500	70	65	SEK DPRD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	795.000.000	6	477.000.000	2,00	159.000.000	1	18.000.000	50	11	7	495.000.000	70	62	SEK DPRD

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	250	287.500.000	150	172.500.000	50,00	57.500.000		0	#DIV/0!	0	150	172.500.000	60	60	SEK DPRD
	Penyediaan bahan/material	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10	2.387.500.000	6	1.432.500.000	2,00	477.500.000	1	37.500.000	50	8	7	1.470.000.000	70	62	SEK DPRD
	Fasilitasi kunjungan tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	1.558.900.000	36	935.340.000	12,00	311.780.000	5	59.675.500	42	19	41	995.015.500	68	64	SEK DPRD
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	2.784.605.000	36	1.670.763.000	12,00	556.921.000	5	88.125.530	42	16	41	1.758.888.530	68	63	SEK DPRD
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**2**	**1.120.000.000**	**2**	**672.000.000**	**2,00**	**224.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**672.000.000**	**50**	**60**	**SEK DPRD**
	Pengadaan mebel	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	820.000.000	30	492.000.000	10,00	164.000.000	0	0	0	0	30	492.000.000	60	60	SEK DPRD
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	125	300.000.000	75	180.000.000	25,00	60.000.000	0	0	0	0	75	180.000.000	60	60	SEK DPRD

			Disediakan															
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3**	**4.470.983.690**	**3**	**2.682.590.214**	**3,00**	**894.196.738**	**3**	**262.213.210**	**100**	**29**	**3**	**2.944.803.424**	**100**	**66**	**SEK DPRD**
	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	186.500.000	36	111.900.000	12,00	37.300.000	5	15.600.000	42	42	41	127.500.000	68	68	SEK DPRD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumebr daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumebr daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	210.000.000	36	126.000.000	12,00	42.000.000	5	17.282.710	42	41	41	143.282.710	68	68	SEK DPRD
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	4.074.483.690	36	2.444.690.214	12,00	814.896.738	5	229.330.500	42	28	41	2.674.020.714	68	66	SEK DPRD
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**5**	**3.756.350.000**	**5**	**2.253.810.000**	**5,00**	**1.106.270.000**	**2**	**74.100.000**	**40**	**7**	**4**	**2.327.910.000**	**70**	**62**	**SEK DPRD**

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	240	1.431.350.000	0	0	48,00	286.270.000	5	52.000.000	10	18	5	52.000.000	2	4	SEK DPRD
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	240	75.000.000	0	0	48,00	15.000.000	5	16.000.000	10	107	5	16.000.000	2	21	SEK DPRD
	Pemeliharaan mebel	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	975.000.000	0	0	4,00	195.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	SEK DPRD
	Pemeliharaan perlataan dan mesin lainnya	Pemeliharaan perlataan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	1.275.000.000	0	0	20,00	255.000.000	0	6.100.000	0	2	0	6.100.000	0	0	SEK DPRD

	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	178.526.206.060	0	55.197.148.946	1,00	355.000.000	0	0	0	0	0	55.197.148.946	0	31	SEK DPRD
	Layana keuangan dan kesejahteraan DPRD	**Layana keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan yang diterima angora DPRD**	**3**	**89.388.103.030**	**3**	**27.648.574.473**	**3,00**	**17.877.620.606**	**1**	**7.007.844.030**	**33**	**39**	**2**	**34.656.418.503**	**67**	**39**	**SEK DPRD**
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	2.450	87.169.353.030	350	26.908.074.473	490,00	17.433.870.606	175	7.007.844.030	36	40	525	33.915.918.503	21	39	SEK DPRD
	Penyediaan pakaian dinas dan atibut DPRD	Penyediaan pakaian dinas dan atibut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	134	1.968.750.000	113	640.500.000	7,00	393.750.000	0	0	0	0	113	640.500.000	84	33	SEK DPRD
	Pelaksananaan medical chekcup DPRD	Pelaksananaan medical chekcup DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	175	18.472.500.000	0	100.000.000	35,00	50.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	1	SEK DPRD
	Layanan administrasi DPRD	**Layanan administrasi DPRD**	**Jumlah layanan adiministrasi DPRD**	**3**	**9.453.750.000**	**3**	**3.258.980.000**	**3,00**	**1.890.750.000**	**2**	**782.500.000**	**67**	**41**	**3**	**4.041.480.000**	**83**	**43**	**SEK DPRD**
	Fasilitasi fraksi DPRD	Fasilitasi fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	60	18.750.000	13	3.780.000	12,00	3.750.000	0	0	0	0	13	3.780.000	22	20	SEK DPRD

	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	0	9.000.000.000	11	3.150.000.000	36,00	1.800.000.000	15	750.000.000	42	42	26	3.900.000.000	0	43	SEK DPRD
	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0	435.000.000	32	105.200.000	12,00	87.000.000	5	32.500.000	42	37	37	137.700.000	0	32	SEK DPRD
	Meningkatkan Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD		**Tingkat Kepuasan Anggota DPRD**															**SEK DPRD**
	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	**Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan**	**100**	**62.001.705.000**	**51**	**20.810.077.827**	**100,00**	**12.400.341.000**	**100**	**7.042.877.631**	**100**	**57**	**76**	**27.852.955.458**	**76**	**45**	**SEK DPRD**
	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	**Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD**	**Jumlah peraturan daerah dan peraturan DPRD yang disahkan**	**200**	**1.120.250.000**	**16**	**337.550.000**	**40,00**	**224.050.000**	**3**	**12.475.000**	**8**	**6**	**19**	**350.025.000**	**10**	**31**	**SEK DPRD**
	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	60	51.000.000	14	14.600.000	12,00	10.200.000	0	0	0	0	14	14.600.000	23	29	SEK DPRD

			Pembentukan Peraturan Daerah														
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	60	448.000.000	26	209.650.000	12,00	89.600.000	3	12.475.000	25	14	29	222.125.000	48	50	SEK DPRD
	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	60	121.250.000	11	63.300.000	12,00	24.250.000	0	0	0	0	11	63.300.000	18	52	SEK DPRD
	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	20	500.000.000	11	50.000.000	4,00	100.000.000	0	0	0	0	11	50.000.000	55	10	SEK DPRD
	Pembahasan kebijakan Anggaran	**Pembahasan kebijakan Anggaran**	**Jumlah rekomendasiyang dikeluarkan DPRD terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah**	**50**	**746.750.000**	**18**	**275.270.000**	**10,00**	**149.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18**	**275.270.000**	**36**	**37**	**SEK DPRD**
	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah laporan KUA dan PPAS	10	182.000.000	5	54.725.000	2,00	36.400.000	0	0	0	0	5	54.725.000	50	30	SEK DPRD
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah laporan Perubahan KUA dan PPAS	10	162.750.000	16	58.170.000	2,00	32.550.000	0	0	0	0	16	58.170.000	160	36	SEK DPRD

	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD	10	124.000.000	1	68.200.000	2,00	24.800.000	0	0	0	0	1	68.200.000	10	55	SEK DPRD
	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	10	148.000.000	1	53.525.000	2,00	29.600.000	0	0	0	0	1	53.525.000	10	36	SEK DPRD
	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah laporan Pertanggung jawaban	10	130.000.000	2	40.650.000	2,00	26.000.000	0	0	0	0	2	40.650.000	20	31	SEK DPRD
	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	**Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRD terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan**	**300**	**359.000.000**	**9**	**150.260.000**	**60,00**	**71.800.000**	**5**	**23.400.000**	**8**	**33**	**14**	**173.660.000**	**5**	**48**	**SEK DPRD**
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	60	40.000.000	13	16.900.000	12,00	8.000.000	0	0	0	0	13	16.900.000	22	42	SEK DPRD
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	60	40.000.000	22	11.000.000	12,00	8.000.000	1	4.000.000	8	50	23	15.000.000	38	38	SEK DPRD
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan	60	40.000.000	21	18.425.000	12,00	8.000.000	1	3.650.000	8	46	22	22.075.000	37	55	SEK DPRD

			Rakyat														
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	60	40.000.000	22	18.500.000	12,00	8.000.000	0	0	0	0	22	18.500.000	37	46	SEK DPRD
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang sumber daya alam	60	40.000.000	9	11.375.000	12,00	8.000.000	0	0	0	0	9	11.375.000	15	28	SEK DPRD
	Pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan	Pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10	60.000.000	13	22.450.000	2,00	12.000.000	1	4.000.000	50	33	14	26.450.000	140	44	SEK DPRD
	Pengawasan penggunaan anggaran	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	60	16.791.235.000	19	26.510.000	12,00	8.000.000	0	0	0	0	19	26.510.000	32	0	SEK DPRD

	Pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah	Pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10	59.000.000	3	25.100.000	2,00	11.800.000	2	11.750.000	100	100	5	36.850.000	50	62	SEK DPRD
	Peningkatan kapasitas DPRD	**Peningkatan kapasitas DPRD**	**Jumlah anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya**	**35**	**8.401.655.000**	**35**	**4.579.201.689**	**35,00**	**1.680.331.000**	**35**	**848.542.278**	**100**	**50**	**35**	**5.427.743.967**	**100**	**65**	**SEK DPRD**
	Pendalaman tugas DPRD	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	60	7.334.580.000	40	4.056.266.689	12,00	1.466.916.000	5	765.542.278	42	52	45	4.821.808.967	75	66	SEK DPRD
	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	180	450.000.000	9	159.100.000	36,00	90.000.000	15	37.500.000	42	42	24	196.600.000	13	44	SEK DPRD
	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	420	546.000.000	20	189.500.000	84,00	109.200.000	35	45.500.000	42	42	55	235.000.000	13	43	SEK DPRD
	Penyusunan program kerja DPRD	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	10	11.420.375.000	1	156.840.000	2,00	6.840.000	0	0	0	0	1	156.840.000	10	1	SEK DPRD
	Publikasi dan dokumentasi dewan	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60	36.875.000	22	17.495.000	12,00	7.375.000	0	0	0	0	22	17.495.000	37	47	SEK DPRD
	Penyerapan dan penghimpunan masyarakat	**Penyerapan dan penghimpunan**	**Jumlah usulan dan aspirasi maysrakat**	**175**	**11.209.250.000**	**14**	**4.741.230.000**	**35,00**	**2.241.850.000**	**35**	**1.363.950.000**	**100**	**61**	**49**	**6.105.180.000**	**28**	**54**	**SEK DPRD**

		masyarakat	**yang difasilutasi**														
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	60	174.250.000	37	57.895.000	12,00	34.850.000	5	19.940.000	42	57	42	77.835.000	70	45	SEK DPRD
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	175	11.015.000.000	4	8.840.000	35,00	4.000.000	35	3.000.000	100	75	39	11.840.000	22	0	SEK DPRD
	Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	175	11.015.000.000	5	4.674.495.000	35,00	2.203.000.000	0	1.341.010.000	0	61	5	6.015.505.000	3	55	SEK DPRD
	Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	**Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD**	**Jumlah pelanngaran kode otik yang terselesaikan**	**35**	**2.127.500.000**	**4**	**82.180.700**	**7,00**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**82.180.700**	**11**	**4**	**SEK DPRD**
	Pengawasan kode etik DPRD	Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	35	25.000.000	4	82.180.700	7,00	5.000.000	0	0	0	0	4	82.180.700	11	329	SEK DPRD
	Pembahasan kerja sama daerah	**Pembahasan kerja sama daerah**	**Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi**	**120**	**2.102.500.000**	**7**	**657.100.000**	**24,00**	**420.500.000**	**0**	**97.138.000**	**0**	**23**	**7**	**754.238.000**	**6**	**36**	**SEK DPRD**
	Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah	Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	60	73.555.610.000	0	0	12,00	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	SEK DPRD

	Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	60	2.077.500.000	10	657.100.000	12,00	415.500.000	0	97.138.000	0	23	10	754.238.000	17	36	SEK DPRD
	Fasilitasi tugas DPRD	**Fasilitasi tugas DPRD**	**Jumlah jenis tugas DPRD yang di fasilitasi**	**4**	**38.037.300.000**	**4**	**9.987.285.438**	**4,00**	**7.607.460.000**	**0**	**4.697.372.353**	**0**	**62**	**2**	**14.684.657.791**	**50**	**39**	**SEK DPRD**
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	60	33.380.810.000	36	9.713.835.938	12,00	6.676.162.000	0	4.418.636.009	0	66	36	14.132.471.947	60	42	SEK DPRD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60	60.000.000	31	21.000.000	12,00	12.000.000	0	0	0	0	31	21.000.000	52	35	SEK DPRD
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	60	0	27	242.249.500	12,00	602.476.000	0	278.736.344	0	46	27	520.985.844	45	0	SEK DPRD
	Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	21	0	0	0	7,00	316.822.000	0	0	0	0	0	0	0	0	SEK DPRD

a. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran sesuai yang direncanakan

- Sekretariat DPRD Kab. Maros Tahun 2022 melaksanakan 2 (Dua) program dan dari 2 (Dua) program tersebut tidak ada yang mencapai target.
- Sekretariat DPRD Kab. Maros Tahun 2022 melaksanakan 7 (Tujuh) kegiatan dan dari 8 (Delapan) kegiatan tersebut 6 yang mencapai target dan 2 (Dua) yang tidak mencapai target.
- Sekretariat DPRD Kab. Maros Tahun 2022 melaksanakan 68 (Enam Puluh Delapan) Sub Kegiatan dan dari 68 (Enam Puluh Delapan) Sub Kegiatan tersebut, 65 (Enam Puluh) yang mencapai target dan 3 (Tiga) yang tidak mencapai target.

b. Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapaianya target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan

- Faktor penyebab adanya program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 yang belum mencapai target karena adanya kesalahan penempatan belanja pada sub kegiatan terkait gaji dan tunjangan Anggota DPRD Kab. Maros.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAROS

Dalam rangka melaksanakan pelayanan Sekertariat DPRD Kab. Maros terdiri dari 3 indikator untuk indikator kinerja dalam RPJMD dan 1 indikator kinerja utama.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada Tahun 2022 seluruh indicator, baik IKU maupun Indikator RPJMD telah mencapai target yang telah ditentukan.

Adapun pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAROS

No	Indikator	SATUAN	IKU	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
						2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	Persen	V	-		96.00	96,50	97,00	97,50	98,00	100	100	100	100	IKU
2	Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap alat-alat kelengkapan DPRD yang tersusun dan Terintegrasi	Persen	-	-	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	RPJMD
3	Pesentase Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan,Fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJM dan RKPD yang tersusun dan Terintegrasi	Persen	-	-	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	RPJMD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Terkait pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Maros terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi yang diuraikan pada Tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.3
PERMASALAHAN, HAMBATAN, DAN DAMPAK
KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KAB. MAROS

No	Permasalahan	Hambatan	Dampak
1	Penetepan waktu kegiatan DPRD bersifat elastis dan mendesak	Kurangnya partisipasi alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatan	Persentase Rencana Kerja Tahunan pada Setiap alat-alat kelengkapan DPRD yang tersusun dan Terintegrasi
2	Program dan Kegiatan DPRD terkadang tidak sesuai dengan Renja yang sudah ditetapkan	Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai pada Sekretariat DPRD Kab Maros.	Pesentase Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan,Fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen RPJM dan RKPD yang tersusun dan Terintegrasi
3	Program dan Kegiatan DPRD terkadang tidak sesuai dengan Renja yang sudah ditetapkan	Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai pada Sekretariat DPRD Kab Maros.	Pesentase Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan,Fungsi pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan pengangaran DPRD yang tersusun dan Terintegrasi

a. Terkait Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Maros terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi, sebagai berikut :
   1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai pada Kantor Sekretariat DPRD Kab. Maros.
   2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai pada Sekretariat DPRD Kab Maros.
   3. Penetepan waktu kegiatan DPRD bersifat elastis dan mendesak.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa Perubahan-perubahan mengenai Peraturan-Peraturan Perundang-undangan, kebijakan dengan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan kementerian/lembaga, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota

Penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros, dalam proses penyusunannya melalui rancangan awal. Dalam pelaksanaannya, rancangan awal program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Maros mengalami perubahan-perubahan yang berkaitan dengan besaran dana dan target kegiatan. Review terhadap rancangan awal program dan kegiatan pada Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.4. di bawah ini :

Tabel. 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KABUPATEN MAROS

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan /SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
I	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan	100%	12.004.472.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan	100%	12.004.472.000
I.1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah peraturan daerah dan peraturan DPRD yang disahkan	19 Dok	248.300.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah peraturan daerah dan peraturan DPRD yang disahkan	19 Dok	248.300.000

I.1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	10.200.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	10.200.000
I.1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	umlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	89.600.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	umlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Dokumen	89.600.000
I.1.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	24.250.000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	24.250.000
I.1.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	24.250.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 Dokumen	24.250.000
I.1.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000

I.2.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah rekomendasiyang dikeluarkan DPRD terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah**	**10 Dok**	**149.550.000**	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah rekomendasiyang dikeluarkan DPRD terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah**	**10 Dok**	**149.550.000**
I.2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	36.400.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	36.400.000
I.2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	32.550.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	32.550.000
I.2.3	Pembahasan APBD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	24.800.000	Pembahasan APBD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	24.800.000
I.2.4	Pembahasan APBD Perubahan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	29.800.000	Pembahasan APBD Perubahan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	29.800.000
I.2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	26.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	26.000.000

I.3.	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRD terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan**	**60 Rekomendasi**	**71.800.000**	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRD terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan**	**60 Rekomendasi**	**71.800.000**
I.3.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	8.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	8.000.000
I.3.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	8.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	8.000.000
I.3.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	8.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	8.000.000
I.3.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	8.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	8.000.000
I.3.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	8.000.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	12 Laporan	8.000.000

I.3.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	12 Dokumen	12.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	12 Dokumen	12.000.000
I.3.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	8.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dokumen	8.000.000
I.3.8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	11.800.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	11.800.000
I.4.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya**	**35 Orang**	**1.690.115.000**	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya**	**35 Orang**	**1.690.115.000**
1.4.1	Orientasi DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	35 Dokumen	4.800.000	Orientasi DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	35 Dokumen	4.800.000

1.4.2	Pendalaman Tugas DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen	1.466.940.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen	1.466.940.000
1.4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	90.000.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3 Orang	90.000.000
1.4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	109.200.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	109.200.000
1.4.5	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	6.550.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	6.550.000
1.4.6	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12.625.000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12.625.000
I.5	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah usulan dan aspirasi maysrakat yang difasilutasi**	**35 Laporan**	**2.627.500.000**	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah usulan dan aspirasi maysrakat yang difasilutasi**	**35 Laporan**	**2.627.500.000**
I.5.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	42.500.000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	42.500.000
I.5.2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	35 Dokumen	4.000.000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	35 Dokumen	4.000.000

I.5.3	Pelaksanaan Reses	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	35 Dokumen	2.581.000.000	Pelaksanaan Reses	Kel.Turikale Kec.Turikale	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	35 Dokumen	2.581.000.000
I.6	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah pelanngaran kode otik yang terselesaikan**	**7 Kasus**	**7.400.000**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah pelanngaran kode otik yang terselesaikan**	**7 Kasus**	**7.400.000**
I.6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	12 Dokumen	2.000.000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	12 Dokumen	2.000.000
I.6.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	7 Laporan	5.400.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	7 Laporan	5.400.000
I.7.	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi**	**24 Dokumen**	**461.000.000**	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi**	**24 Dokumen**	**461.000.000**
1.7.1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	12 Dokumen	5.500.000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	12 Dokumen	5.500.000

1.7.2.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	455.500.000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	455.500.000
I.8.	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah jenis tugas DPRD yang di fasilitasi**	**4 Jenis**	**6.748.807.000**	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah jenis tugas DPRD yang di fasilitasi**	**4 Jenis**	**6.748.807.000**
I.8.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	5.964.331.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	5.964.331.000
I.8.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	10.000.000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	10.000.000
I.8.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12.000.000
I.8.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	602.476.000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	602.476.000

I.8.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	7 Dokumen	160.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	7 Dokumen	160.000.000
II.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan**	**100%**	**28.823.354.789**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan**	**100%**	**28.823.354.789**
II.1.	**Layanan Administrasi DPRD**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah layanan adiministrasi DPRD**	**3 Layan an**	**1.865.250.000**	**Layanan Administrasi DPRD**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah layanan adiministrasi DPRD**	**3 Layana n**	**1.865.250.000**
II.1.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	1.800.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	1.800.000.000
II.1.2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	4.000.000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	4.000.000
II.1.3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	61.250.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	61.250.000

II.2.	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Jenis**	**787.400.000**	**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Jenis**	**787.400.000**
II.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000
II.2.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	43.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	43.300.000
II.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	702.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	702.100.000
II.3.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Jenis**	**225.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Jenis**	**225.000.000**
II.3.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.988.200.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.988.200.00

II.3.2	Pengadaan Mebel	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	3 Unit	75.000.000	Pengadaan Mebel	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	3 Unit	75.000.000
II.3.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	150.000.000
II.3.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-
II.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**8 Layanan**	**2.048.944.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**8 Layanan**	**2.048.944.000**
II.4.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	654.329.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	654.329.000
II.4.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	381.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	381.700.000
II.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	172.100.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	172.100.000

II.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	47.500.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	47.500.00
II.4.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	463.020.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	463.020.000
II.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	267.170.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	267.170.000
II.4.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.125.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.125.000
II.4.6	Penyediaan Bahan/Material	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	92.500.000	Penyediaan Bahan/Material	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	92.500.000
II.5.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**39 Dokumen**	**5.045.176.883**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**39 Dokumen**	**5.045.176.883**

II.5.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	20.000.000
II.5.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.000.000
II.5.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	180.240.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	180.240.000
II.5.4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	4.836.936.883	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Dokumen	4.836.936.883

II.6.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**24 Dokumen**	**42.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**24 Dokumen**	**42.000.000**
II.6.1	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	15.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	15.000.000
II.6.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.000.000
II.6.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.000.000

II.6.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000
II.6.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000
II.6.6	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.000.000
II.6.7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000
II.6.8	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	6.000.00

II.7.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**6 Jenis**	**547.663.600**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**	**6 Jenis**	**547.663.600**
II.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	299.270.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	299.270.000
II.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	113.393.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	113.393.600
II.7.3	Pemeliharaan Mebel	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	30.000.00	Pemeliharaan Mebel	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	30.000.00
II.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Turikale Kec. Turikale				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Turikale Kec. Turikale			

II.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	135.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	135.000.000
II.7.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-
II.9.	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan yang diterima angora DPRD**	**3 Layanan**	**18.261.920.306**	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Kel. Turikale Kec. Turikale**	**Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan yang diterima angora DPRD**	**3 Layanan**	**18.261.920.306**
II.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	17.668.170.306	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	17.668.170.306
II.9.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	393.750.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	393.750.000

II. 9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	200.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kel. Turikale Kec. Turikale	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	200.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat urusan OPD Sekertariat DPRD adalah urusan pemerintahan fungsi penunjang maka program dan kegiatannya adalah menyangkut urusan-urusan wajib pemerintahan,artinya usulan-usulan program dan kegiatan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD tidak dapat dituangkan dalam Perubaha Rencana Kerja (Renja) Sekertariat DPRD,namun usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat kegiatan Reses DPRD selanjutnya di tetapkan oleh DPRD menjadi Pokir (Pokok Pikiran) dan menjadi salah satu sumber usulan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Maros.

Dapat disimpulkan bahwa Sekertariat DPRD Kabupaten Maros tidak menerima secara langsung usulan dari masyarakat, hanya saja Sekertriat DPRD menfasilitasi usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD baik secara langsung maupun usulan masyarakat pada saat kunjungan ataupun Reses DPRD dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kabupaten Maros

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Nihil		Nihil		

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi/Misi dan Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026 yang menggambarkan arah kebijakan PRJMD terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Sekretariat DPRD mengampu priortitas ‘‘Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah’’ dengan sasaran pembangunan ‘‘Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah’’.

3.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan kontribusi Sekretariat DPRD Kabupaten Maros terhadap pencapaian misi tersebut, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menyusun struktur kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Maros untuk periode 2021 – 2026.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN *(IMPACT)*		
		TOLOK UKUR	TARGET 2024	SATUAN
	Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Kesekretariatan DPRD Yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	**Nilai IRB Sekretariat DPRD**	**B**	**Nilai IRB**
1	Meningkatnya Akuntabilitas, Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB	Nilai SAKIP
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	97,00	Persen

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros periode 2021 – 2026. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati dan wakil Bupati Maros, yaitu : Maros Sejahtera, Religius, dan Berdaya Saing, dan misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia;
3. Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah ;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Berdasarkan uraian diatas dan memperhatikan pembagian urusan dan kewenangan sebagaimana yang telah digariskan dalam Undang–Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka pencapaian Visi pembangunan Kabupaten Maros, Sekretariat DPRD Kabupaten Maros berkontribusi terhadap Misi Pertama dalam RPJMD yaitu: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik.

3.3. Program dan Kegiatan

Terdapat beberapa sub kegiatan yang harus dilakukan penyesuaian anggaran dikarenakan adanya pergantian Anggota DPRD Kab. Maros yang akan dilantik pada Bulan Agustus Tahun 2024, sehingga perlu diadakan penambahan anggaran pada sub kegiatan dimaksud.

Pada Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Pengadaan Mebel, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD, Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD, Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademi, Pendalaman Tugas DPRD, Penyusunan Program Kerja DPRD, Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus, dilakukan pengurangan anggaran untuk dialihkan pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainn, Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, dikarenakan perlu dilakukan penambahan anggaran pada belanja Tunjangan Transportasi, Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Keluarga DPRD serta perbaikan sarana dan prasaran kantor Sekretariat DPRD Kab. Maros.

TABEL 3.2
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAROS
TAHUN 2024

No	URUSAN/BIDANG/URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024						KELOMPOK SASARAN	SUMBER DANA
			VOLUME		PAGU INDIKATIF		LOKASI			
			SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH	SEBELUM	SETELAH		
	Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Layanan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.**	**100%**	**100%**	**29.230.357.873**	**24.258.449.025**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**ASN Set. DPRD**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah**	**11**	**Dok**	**33.102.500**	**37.000.000**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**ASN Set. DPRD**	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	6.102.500	6.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Koordinasi dan penyusnan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	5.000.000	5.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	4.000.000	4.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	4.000.000	4.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	4.000.000	4.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Koordinasi dan Penyusunan lapora capaian kinerja dan ikhtisar realsiasikinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dok	1 Dok	6.000.000	6.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	4 Dok	4.000.000	8.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Administrasi keuaangan perangkat daerah	**Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**45 Dok**	**45 Dok**	**4.942.413.754**	**4.942.413.754**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**ASN Set. DPRD**	

	Penyediaan gajji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910 OB	910 OB	4.757.223.754	4.757.223.754	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	DAU
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	157.190.000	157.190.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dok	1 Dok	8.000.000	8.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	20.000.000	20.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Administrasi kepegawaian perangkat dasrah	**Jumlah Aparatur PD Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian**	**59 Orang**	**59 Orang**	**78.100.000**	**25.600.000**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**ASN Set. DPRD**	
	Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	1 Paket	78.100.000	25.600.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD

	Administrasi umum perangkat daerah	**Jumlah Layanan Administrasi Umum PD Yang Dilaksanakan**	**8 Layaanan**	**8 Layaanan**	**2.273.510.625**	**2.268.010.625**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**ASN Set. DPRD**	
	Penyediaan komponen instalasi komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.538.625	19.538.625	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	63.081.000	63.081.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Peket	4 Peket	628.310.000	628.310.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Peket	2 Peket	159.000.000	153.500.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	50 Dok	50 Dok	57.500.000	57.500.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Peket	2 Peket	477.500.000	477.500.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	311.760.000	311.760.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD

	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	556.821.000	556.821.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Jenis**	**2 Jenis**	**224.000.000**	**87.900.000**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**ASN Set. DPRD**	
	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	7 Unit	164.000.000	13.900.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	25 Unit	60.000.000	74.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3 Jenis**	**3 Jenis**	**894.196.788**	**824.426.788**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**ASN Set. DPRD**	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	37.300.000	37.300.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Penyediaan jasa komunikasi, sumebr daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42.000.000	42.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	814.896.788	745.126.788	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD

	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah Jenis BMD PD Penunjang Kebutuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Yang berda Dalam Kondisi Baik**			**1.016.663.600**	**1.001.663.600**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**ASN Set. DPRD**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit	48 Unit	296.270.000	296.270.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit	48 Unit	155.393.600	155.393.600	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Pemeliharaan mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	15.000.000	15.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Pemeliharaan perlataan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	195.000.000	185.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	355.000.000	350.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	ASN Set. DPRD	PAD

	Layana keuangan dan kesejahteraan DPRD	**Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan yang diterima angora DPRD**	**3 Layanan**	**3 Layanan**	**17.877.620.606**	**18.291.098.012**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**Anggota DPRD**	
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	490 OB	490 OB	17.433.870.606	17.847.348.012	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	DAU
	Penyediaan pakaian dinas dan atibut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	393.750.000	393.750.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Pelaksananaan medical chekcup DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	50.000.000	50.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Layanan administrasi DPRD	**Jumlah layanan adiministrasi DPRD**	**3 Layanan**	**3 Layanan**	**1.890.750.000**	**1.722.750.000**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**Anggota DPRD**	
	Fasilitasi fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	87.000.000	69.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	36	Paket	3.750.000	3.750.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000.000	1.650.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD

	Dukungan pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD	**Persentase Anggota DPRD Yang Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Sesuai Ketentuan Perundang - Undangan**	**100%**	**100%**	**12.400.541.000**	**12.903.971.300**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**Anggota DPRD**	
	Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	**Jumlah peraturan daerah dan peraturan DPRD yang disahkan**	**40 Dok**	**40 Dok**	**224.050.000**	**168.600.000**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**Anggota DPRD**	
	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	10.200.000	5.200.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	89.600.000	95.150.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian PerundangUndangan	12 Laporan	12 Laporan	24.250.000	18.250.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitas	4 Dok	1 Dok	100.000.000	50.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Pembahasan kebijakan Anggaran	**Jumlah rekomendasiyang dikeluarkan DPRD terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah**	**10 Dok**	**10 Dok**	**149.550.000**	**149.550.000**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**Perangkat Daerah se- Kab. Maros**	

	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah laporan KUA dan PPAS	2 Dok	2 Dok	36.400.000	36.400.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Perangkat Daerah se- Kab. Maros	PAD
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah laporan Perubahan KUA dan PPAS	2 Dok	2 Dok	32.550.000	32.550.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Perangkat Daerah se- Kab. Maros	PAD
	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD	2 Dok	2 Dok	24.800.000	24.800.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Perangkat Daerah se- Kab. Maros	PAD
	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan	2 Dok	2 Dok	29.800.000	29.800.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Perangkat Daerah se- Kab. Maros	PAD
	Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	Jumlah laporan Pertanggung jawaban	2 Dok	2 Dok	26.000.000	26.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Perangkat Daerah se- Kab. Maros	PAD
	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	**Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRD terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan**	**60 Rekomendasi**	**60 Rekomendasi**	**71.800.000**	**67.800.000**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**Masyarakat**	
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	8.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Masyarakat	PAD

	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	8.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Masyarakat	PAD
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	8.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Masyarakat	PAD
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	8.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Masyarakat	PAD
	Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang sumber daya alam	12 Laporan	12 Laporan	8.000.000	8.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Masyarakat	PAD
	Pengawasan tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dok	2 Dok	12.000.000	8.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Masyarakat	PAD
	Pengawasan penggunaan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	12 Dok	12 Dok	8.000.000	8.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Masyarakat	PAD
	Pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	11.800.000	11.800.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Masyarakat	PAD

	Peningkatan kapasitas DPRD	**Jumlah anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya**	**35 Orang**	**35 Orang**	**1.680.331.000**	**1.446.726.000**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**Anggota DPRD**	
	Pendalaman tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dok	12 Dok	1.466.916.000	1.247.526.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 OB	36 OB	90.000.000	90.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84 0B	84 OB	109.200.000	109.200.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Penyusunan program kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dok	0	6.840.000	0	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dok	0	7.375.000	0	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Penyerapan dan penghimpunan masyarakat	**Jumlah usulan dan aspirasi maysrakat yang difasilutasi**	**35 Usulan**	**35 Usulan**	**2.241.850.000**	**2.241.850.000**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**Masyarakat**	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	12 Laporan	34.850.000	34.850.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Masyarakat	PAD
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	35 Dok	35 Dok	4.000.000	4.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Masyarakat	PAD
	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	35 Dok	35 Dok	2.203.000.000	2.203.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Masyarakat	PAD

	Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	**Jumlah pelanngaran kode Etik yang terselesaikan**	**7 Kasus**	**7 Kasus**	**5.000.000**	**15.200.000**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**Anggota DPRD**	
	Penyusunan Kode Etik DPRD (Penyusunan Tatib)		0	1 Laporan	-	10.200.000				
	Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	7 Laporan	7 Laporan	5.000.000	5.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Pembahasan kerja sama daerah	**Jumlah kerja sama daerah yang difasilitasi**	**24 Dok**	**24 Dok**	**420.500.000**	**420.500.000**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**Anggota DPRD**	
	Fasilitasi, verifikasi dan koordinasi persetujuan kerja sama daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	12 Dok	12 Dok	5.000.000	5.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dok	12 Dok	415.500.000	415.500.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Fasilitasi tugas DPRD	**Jumlah jenis tugas DPRD yang di fasilitasi**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**7.607.460.000**	**8.393.745.300**	**Kel. Turikale**	**Kel. Turikale**	**Anggota DPRD**	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dok	12 Dok	6.676.162.000	7.503.247.300	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dok	12 Dok	12.000.000	12.000.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	12 Dok	602.476.000	602.476.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD

	Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	7 Dok	7 Dok	316.822.000	276.022.000	Kel. Turikale	Kel. Turikale	Anggota DPRD	PAD

BAB IV
P E N U T U P

4.1. Saran dan Kesimpulan

4.1.1. Saran

Bertitik tolak pada beberapa strategi pilihan tersebut di atas, untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Maros, ditetapkan beberapa Saran yang meliputi kebijakkan internal dan eksternal :

1. Kebijakkan internal organisasi adalah sebagai berikut :
    1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Maros
    2) Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Pubik DPRD Kabupaten Maros.
2. Kebijakan eksternal dalam lingkup organisasi.
    1) Meningkatkan system dan standar pelayanan publik.
    2) Meningkatkan pelayanan publik DPRD Kabupaten Maros

4.1.2. Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekertariat DPRD Tahun 2024 merupakan dokumen Perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekertariat DPRD Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Maros. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekertariat DPRD Kabupaten Maros yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah. Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Sekertariat DPRD Kabupaten Maros dalam Penyelenggaraan pemerintahaan dan pembangunan satu tahun kedepan

4.2 Kaidah Pelaksanaan Perubahan Renja

Sekertariat DPRD Kabupaten Maros Berkewajiban untuk mengimplemtasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) sekertariat DPRD kabupaten Maros Tahun 2024 serta diselaraskan dengan Perubahan RKPD tahun 2024. Sekertariat DPRD Kabupaten Maros berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Tahun 2023 dan RKPD Seketariat DPRD tahun 2022, dalam rangkah meningkatkan efektifitas pelaksanaan Perubahan Renja Sekertariat DPRD Kabupaten Maros Tahun 2024 wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan 2024 Dalam Rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Sekeetariat DPRD tahun 2024.

Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) berkewajiabn untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinegitas RKPD Tahun 2024 dalam Rencana Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) dan berkewajiban Umum APBD Tahun 2024 serta prioritas dan pagu indikatif OPD tahun 2024

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Renja Kerja (Renja) Sekertariat DPRD Maros selain sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 juga berfungsi sebagi sarana peningkatan kinerja sekertariat DPRD. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Sekertariat DPRD Tahun 2024 tentu juga diketahui oleh sumber pembiayaan / Pendanaan yang memadai serta kompentasi dan semangat,tekad serta kedisplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia.

Disamping itu Perubahan Renja Sekertariat DPRD juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan renja di Sekertariat DPRD ini dapat menjadi acuan rencana

pembangunan demi tercapainya visi dan Misi Sekertariat DPRD Maros serta memberi manfaat bagi proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Maros.

Semoga Perubahan Rencana Kerja yang dibuat ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan kemampuan Anggaran Tahun 2024 menuju Maros lebih sejahtera 2025.